SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang
a. bahwa pembangunan di Daerah dilaksanakan secara selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, mandiri, religius, dan berbudaya;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu diatur dengan peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD DIY Tahun 2025–2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan:
a. RKPD;
b. Renstra Perangkat Daerah; dan
c. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) RPJMD"Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan Daerah Bupati dan Wakil Bupati.
(3) Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
    a. RPJMN 2025-2029;
    b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
    c. RPJP Daerah; dan
    d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika;
    BAB I : PENDAHULUAN;
    BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
    BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
    BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
    BAB V : PENUTUP;
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (5,24/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025–2045

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 ayat (2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selain daripada itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dimulai setelah dilantiknya Bupati Kulon Progo dan Wakil Bupati Kulon Progo, pada tanggal 20 Februari 2025, dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Penutup.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif *(bottom up), top down,* teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 131

PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2025-2029







"TERWUJUDNYA
KULON PROGO
YANG MAKMUR, MANDIRI,
RELIGIUS, BERBUDAYA
YANG BERKELANJUTAN"

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 7
DAFTAR GAMBAR 12
BAB 1 PENDAHULUAN 16
1.1 Latar Belakang 16
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 19
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya 22
1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029 23
1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD DIY Tahun 2025-2045 39
1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 41
1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD DIY Tahun 2022–2027 43
1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Kulon Progo 45
1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan KLHS RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 46
1.3.8 Keterkaitan RPJMD dengan RIPJPID 48
1.4 Maksud dan Tujuan 49
1.5 Sistematika Penulisan 50
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH 52
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 52
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 52
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 52
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 70
2.1.1.2.A Sumber Daya Air 70
2.1.1.2.B Sumber Daya Mineral 70
2.1.1.2.C Sumber Daya Hutan 72
2.1.1.2.D Sumber Daya Laut 73
2.1.1.2.E Potensi Penyerapan Karbon 74
2.1.1.2.F Potensi Geologi Strategis 76
2.1.1.2.G Perkembangan Penggunaan Lahan 77
2.1.1.2.H Keanekaragaman Hayati: Ekosistem dan Habitat Alami *(In Situ)* 81
2.1.1.2.I Keanekaragaman Hayati: Kawasan Ekosistem Esensial 83
2.1.1.2.J Keanekaragaman Hayati: Spesies Flora dan Fauna Potensial 84
2.1.1.2.K Klimatologi 96

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 100
2.1.1.3.A Daya Dukung dan Daya Tampung Air 100
2.1.1.3.B Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan 105
2.1.1.3.C Daya Dukung Permukiman 109
2.1.1.3.D Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 112
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 116
2.1.1.4.A Konsumsi Listrik 116
2.1.1.4.B Indeks Ketahanan Pangan 117
2.1.1.4.C Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan. 118
2.1.1.4.D Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 119
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 120
2.1.1.5.A Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 120
2.1.1.5.B Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 122
2.1.1.5.C Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 124
2.1.1.5.D Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah 125
2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 128
2.1.1.6.A Wilayah Rawan Bencana 128
2.1.1.6.B Indeks Ketahanan Daerah 145
2.1.1.6.C Indeks Risiko Bencana 146
2.1.1.6.D Perubahan Iklim 147
2.1.1.7 Demografi 150
2.1.1.7.A Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 150
2.1.1.7.B Komposisi Penduduk 150
2.1.1.7.C Distribusi dan Kepadatan Penduduk 153
2.1.1.7.D Proyeksi Demografi Lima Tahun ke Depan 155
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 159
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 159
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua 168
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 171
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 174
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 176
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 177
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 179
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 179
2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 180

2.1.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 188
2.1.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 189
2.1.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro 192
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 194
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 194
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 195
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan .. 196
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah 198
2.1.4.4.A Pendidikan 198
2.1.4.4.B Kesehatan 201
2.1.4.4.C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 214
2.1.4.4.D Perumahan 229
2.1.4.4.E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 235
2.1.4.4.F Sosial 239
2.1.4.4.G Ketenagakerjaan 244
2.1.4.4.H Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 247
2.1.4.4.I Pangan 249
2.1.4.4.J Pertanahan 251
2.1.4.4.K Lingkungan Hidup 258
2.1.4.4.L Kependudukan dan Catatan Sipil 263
2.1.4.4.M Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 265
2.1.4.4.N Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 267
2.1.4.4.O Perhubungan 269
2.1.4.4.P Komunikasi dan Informatika 280
2.1.4.4.Q Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 283
2.1.4.4.R Penanaman Modal 285
2.1.4.4.S Kepemudaan dan Olahraga 287
2.1.4.4.T Statistik 289
2.1.4.4.U Persandian 292
2.1.4.4.V Budaya 295
2.1.4.4.W Perpustakaan 298
2.1.4.4.X Kearsipan 300
2.1.4.4.Y Kelautan dan Perikanan 302
2.1.4.4.Z Pariwisata 304
2.1.4.4.AA Pertanian 307
2.1.4.4.AB Ekonomi dan Sumber Daya Mineral 309
2.1.4.4.AC Perdagangan 311

2.1.4.4.AD Perindustrian 313
2.1.4.4.AE Perencanaan dan Keuangan 316
2.1.4.4.AF Pengadaan 319
2.1.4.4.AG Kepegawaian 322
2.1.4.4.AH Manajemen Keuangan 324
2.1.4.4.AI Transparansi dan Partisipasi Publik 328
2.2 Gambaran Keuangan Daerah 330
2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 331
2.2.1.1 Pendapatan Daerah 333
2.2.1.2 Belanja Daerah dan Transfer 337
2.2.1.3 Pembiayaan Daerah 340
2.2.1.4 Neraca Daerah 342
2.2.1.5 Proporsi Penggunaan Anggaran 345
2.2.1.6 Analisis Pembiayaan 348
2.2.1.7 Ruang Fiskal Daerah 349
2.2.1.8 Kapasitas Fiskal Daerah 351
2.2.1.9 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah 351
2.2.1.10 Sistem Pengelolaan Anggaran dan Inovasi Fiskal 354
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030 355
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis 360
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 360
2.3.1.1 Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi 360
2.3.1.1.A Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 360
2.3.1.1.B Lingkungan Hidup Berkualitas 361
2.3.1.1.C Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 362
2.3.1.1.D Demografi 364
2.3.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat 364
2.3.1.2.A Kesejahteraan Ekonomi 364
2.3.1.2.B Kesehatan untuk Semua 367
2.3.1.2.C Pendidikan Berkualitas yang Merata 368
2.3.1.2.D Perlindungan Sosial yang Adaptif 370
2.3.1.2.E Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 370
2.3.1.2.F Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 372
2.3.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah 372
2.3.1.3.A Daya Saing Sumber Daya Manusia 372
2.3.1.3.B Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 373
2.3.1.3.C Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 375

2.3.1.3.D Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 376
2.3.1.3.E Stabilitas Ekonomi Makro 376
2.3.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum 377
2.3.1.4.A Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 377
2.3.1.4.B Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 378
2.3.2 Isu Strategis Daerah 378
2.3.2.1 Isu Strategis Global 379
2.3.2.1.A Teknologi 380
2.3.2.1.B Ekonomi, Politik, dan Pemerintah 381
2.3.2.1.C Lingkungan 381
2.3.2.1.D Kependudukan dan Kesehatan 382
2.3.2.2 Isu Strategis Nasional 382
2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi 385
2.3.2.3.A Isu Strategis RPJPD Provinsi 385
2.3.2.3.B Isu Strategis RPJMD Provinsi 388
2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten 392
BAB 3 VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 397
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 397
3.1.1 Visi dan Misi 397
3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 400
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 415
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan 415
3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah 424
3.3 Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025–2030 437
3.4 Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 438
3.4.1 Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates 441
3.4.2 Kawasan Industri dan Ekonomi Kreatif 448
3.4.3 Kawasan Pariwisata Berkelanjutan 451
3.5 Strategi Pembangunan Kewilayahan Berbasis Keistimewaan DIY 454
3.6 Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 458
BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 462
4.1 Program Perangkat Daerah 462
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 495
BAB 5 PENUTUP 527

5.1 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran 528
5.2 Kerangka Pengendalian 528
5.3 Sistem Insentif 529
5.4 Mekanisme Perubahan 529
5.5 Komunikasi Publik 529
5.6 Pembiayaan Pembangunan 530

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1-1 Visi, Misi, dan Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045 24

Tabel 1.3.1-2 Keterkaitan RPJPN Tahun 2025–2045 dengan RPJMN Tahun 2025–2029 27

Tabel 1.3.1-3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029 30

Tabel 1.3.1-4 Intervensi Kabupaten Kulon Progo terhadap Proyek Strategis Nasional ...36

Tabel 2.1.1.1-1 Luas Wilayah (Km^2) dan Persentase Luas Seluruh Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo 53

Tabel 2.1.1.1-2 Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024 61

Tabel 2.1.1.1-3 Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024 63

Tabel 2.1.1.1-4 Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo 64

Tabel 2.1.1.1-5 Stratigrafi Formasi Geologi di Kabupaten Kulon Progo 68

Tabel 2.1.1.2.B-1 Bahan Galian yang Memiliki Nilai Strategis di Kabupaten Kulon Progo 71

Tabel 2.1.1.2.C-1 Rekapitulasi Bahan Baku Industri Kayu Tanaman Seluruh Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2023-2024 72

Tabel 2.1.1.2.E-1 Potensi Penyerapan dan Perdagangan Karbon dari Kawasan Hutan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021 74

Tabel 2.1.1.2.E-2 Potensi Penyerapan dan Perdagangan Karbon dari Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Kulon Progo 76

Tabel 2.1.1.2.G-1 Perkembangan Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2023–2024 (dalam persen) 80

Tabel 2.1.1.2.J-1 Keanekaragaman Hayati (Flora) di Kabupaten Kulon Progo 87

Tabel 2.1.1.2.J-2 Keanekaragaman Hayati (Fauna) di Kabupaten Kulon Progo 90

Tabel 2.1.1.2.K-1 Curah Hujan dan Hari Hujan Per-Bulan di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2022–2024 97

Tabel 2.1.1.3.A-1 Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Air serta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Kulon Progo 101

Tabel 2.1.1.3.A-2 Proyeksi Daya Dukung Dan Daya Tampung Air di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 103

Tabel 2.1.1.3.B-1 Daya Dukung Pangan Kabupaten Kulon Progo 106

Tabel 2.1.1.3.B-2 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 107

Tabel 2.1.1.3.C-1 Status Daya Dukung Permukiman di Kab. Kulon Progo 111

Tabel 2.1.1.3.D-1 Capaian indikator TPB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 terhadap Target Nasional RPJMN 2019 Berdasarkan Pilar 113

Tabel 2.1.1.3.D-2 Capaian TPB Berdasarkan PD Pengampu Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2023 113

Tabel 2.1.1.5.D-1 Capaian Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020–2024 126

Tabel 2.1.1.6.A-1 Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Kulon Progo 128

Tabel 2.1.1.6.A-2 Rekapitulasi Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 130

Tabel 2.1.1.6.A-3 Jumlah Penduduk Per Kapanewon yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana, Tahun 2024 (dalam jiwa) 132

Tabel 2.1.1.7.B-1 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 153

Tabel 2.1.1.7.C-1 Distribusi Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024 155

Tabel 2.1.1.7.D-1 Proyeksi Demografi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030 157

Tabel 2.1.2.1-1 PDRB ADHK (=2010) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rupiah) 160

Tabel 2.1.2.1-2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2021-2024 161

Tabel 2.1.4.4.A-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 199

Tabel 2.1.4.4.B-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 203

Tabel 2.1.4.4.B-2 Rekapitulasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2020-2024 207

Tabel 2.1.4.4.B-3 Rincian Kejadian Luar Biasa (KLB) Perbulan Selama Tahun 2020-2024 209

Tabel 2.1.4.4.B-4 Skenario Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Bersama dengan Jejaring. 212

Tabel 2.1.4.4.C-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 216

Tabel 2.1.4.4.C-2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020–2024 219

Tabel 2.1.4.4.C-3 Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo 221

Tabel 2.1.4.4.C-4 Capaian Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo 223

Tabel 2.1.4.4.C-5 Perubahan Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo 225

Tabel 2.1.4.4.C-6 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 228

Tabel 2.1.4.4.D-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perumahan 231

Tabel 2.1.4.4.D-2 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 234

Tabel 2.1.4.4.E-1 Indikator Kinerja Kunci Fokus Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 237

Tabel 2.1.4.4.F-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Sosial 240

Tabel 2.1.4.4.F-2 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seluruh Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 242

Tabel 2.1.4.4.F-3 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 243

Tabel 2.1.4.4.G-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Ketenagakerjaan 245

Tabel 2.1.4.4.H-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 248

Tabel 2.1.4.4.I-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pangan 250

Tabel 2.1.4.4.J-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pertanahan 252

Tabel 2.1.4.4.J-2 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 255

Tabel 2.1.4.4.J-3 Kondisi dan Sebaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 257

Tabel 2.1.4.4.K-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Lingkungan Hidup 259

Tabel 2.1.4.4.K-2 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 262

Tabel 2.1.4.4.L-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Kependudukan dan Catatan Sipil 264

Tabel 2.1.4.4.M-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pemberdayaan Masyarakat Desa 266

Tabel 2.1.4.4.N-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 268

Tabel 2.1.4.4.O-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perhubungan 270

Tabel 2.1.4.4.O-2 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 270

Tabel 2.1.4.4.O-3 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 (dalam unit) 273

Tabel 2.1.4.4.O-4 Rekapitulasi Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 277

Tabel 2.1.4.4.O-5 Titik Rawan Kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo 278

Tabel 2.1.4.4.O-6 VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024 278

Tabel 2.1.4.4.P-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Komunikasi dan Informatika 282

Tabel 2.1.4.4.Q-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 284

Tabel 2.1.4.4.R-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Penanaman Modal 286

Tabel 2.1.4.4.S-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Kepemudaan dan Olahraga288

Tabel 2.1.4.4.T-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Statistik 290
Tabel 2.1.4.4.U-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Persandian 294
Tabel 2.1.4.4.V-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Budaya 297
Tabel 2.1.4.4.W-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perpustakaan 299
Tabel 2.1.4.4.X-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Kearsipan 301
Tabel 2.1.4.4.Y-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Kelautan dan Perikanan ... 303
Tabel 2.1.4.4.Y-2 Pembinaan Nelayan dan Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan, Tahun 2020-2024 303
Tabel 2.1.4.4.Z-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pariwisata 306
Tabel 2.1.4.4.AA-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pertanian 308
Tabel 2.1.4.4.AB-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 310
Tabel 2.1.4.4.AC-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perdagangan 312
Tabel 2.1.4.4.AD-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perindustrian 314
Tabel 2.1.4.4.AE-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perencanaan dan Keuangan 318
Tabel 2.1.4.4.AF-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pengadaan 320
Tabel 2.1.4.4.AG-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Kepegawaian 323
Tabel 2.1.4.4.AH-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Manajemen Keuangan .. 326
Tabel 2.1.4.4.AI-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Transparansi dan Partisipasi Publik 329
Tabel 2.2.1-1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta) 332
Tabel 2.2.1.1-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta) 334
Tabel 2.2.1.1-2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta) 336
Tabel 2.2.1.2-1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta) 338
Tabel 2.2.1.3-1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta) 341
Tabel 2.2.1.4-1 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta) 344
Tabel 2.2.1.5-1 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 347
Tabel 2.2.1.6-1 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 348
Tabel 2.2.1.6-2 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp juta) 349
Tabel 2.2.1.6-3 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kulon Progo (Rp Juta), T.A. 2020–2024 349
Tabel 2.2.1.7-1 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp) .350

Tabel 2.2.1.8-1 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020-2024 351

Tabel 2.2.1.9-1 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta) 353

Tabel 2.2.2-1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2025–2030 (Rp Juta) 357

Tabel 3.1.2-1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 402

Tabel 3.1.2-2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029406

Tabel 3.2.1-1 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 419

Tabel 3.2.2-1 Rumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030 425

Tabel 3.2.2-2 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030 ..429

Tabel 3.3-1 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 438

Tabel 3.5-1 Amanah Perdais No.2 Tahun 2017 455

Tabel 4.1-1 Program Perangkat Daerah yang disertai Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025–2030 463

Tabel 4.2-1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 496

Tabel 4.2-2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) 499

Tabel 4.2-3 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2025–2030 521

Tabel 4.2-4 Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030 526

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3-1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya 22

Gambar 1.3.1-1 Asta Cita Sebagai Prioritas Nasional Tahun 2025–2029 26

Gambar 1.3.1-2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029 33

Gambar 1.3.1-3 Tujuh Belas Program Prioritas Presiden dan Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 34

Gambar 1.3.2-1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan RPJPD DIY Tahun 2025-2045 40

Gambar 1.3.3-1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 42

Gambar 1.3.4-1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dengan RPJMD DIY Tahun 2022–2027 44

Gambar 1.3.7-1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dengan TPB KLHS RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 47

Gambar 2.1.1.1-1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kulon Progo 58

Gambar 2.1.1.1-2 Peta Kelas Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo 62

Gambar 2.1.1.1-3 Peta Geologi Kabupaten Kulon Progo 66

Gambar 2.1.1.1-4 Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Kulon Progo 69

Gambar 2.1.1.2.E-1 Grafik Fluks Gas Rumah Kaca dari Kawasan Hutan di Kabupaten Kulon Progo (rata-rata tahunan, dalam ktCO e, periode 2001–2024) 75

Gambar 2.1.1.2.G-1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo 79

Gambar 2.1.1.2.J-1 Grafik Rekapitulasi Status dan Lokasi Potensi Keragaman Flora di Kabupaten Kulon Progo 85

Gambar 2.1.1.2.J-2 Grafik Rekapitulasi Status dan Lokasi Potensi Keragaman Fauna di Kabupaten Kulon Progo 85

Gambar 2.1.1.2.K-1 Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2022–2024 98

Gambar 2.1.1.3.A-1 Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 102

Gambar 2.1.1.4.A-1 Perkembangan Daya Terpasang dan Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 116

Gambar 2.1.1.4.B-1 Grafik Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 117

Gambar 2.1.1.4.C-1 Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 118

Gambar 2.1.1.4.D-1 Grafik Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 119

Gambar 2.1.1.5.A-1 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 121

Gambar 2.1.1.5.B-1 Grafik Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 123

Gambar 2.1.1.5.C-1 Grafik Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 124

Gambar 2.1.1.6.A-1 Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi 134

Gambar 2.1.1.6.A-2 Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami 135

Gambar 2.1.1.6.A-3 Peta Wilayah Rawan Bencana Longsor 136

Gambar 2.1.1.6.A-4 Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir 138

Gambar 2.1.1.6.A-5 Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang 139

Gambar 2.1.1.6.A-6 Peta Wilayah Rawan Bencana Kekeringan 140

Gambar 2.1.1.6.A-7 Peta Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrem 141

Gambar 2.1.1.6.A-8 Peta Wilayah Rawan Bencana Epidemi/Wabah Penyakit 143

Gambar 2.1.1.6.A-9 Peta Wilayah Rawan Bencana Kegagalan Teknologi 144

Gambar 2.1.1.6.B-1 Grafik Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 145

Gambar 2.1.1.6.C-1 Grafik Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 147

Gambar 2.1.1.6.D-1 Grafik Klasifikasi Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Kulon Progo 148

Gambar 2.1.1.6.D-2 Peta Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Kulon Progo 149

Gambar 2.1.1.7.A-1 Grafik Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 150

Gambar 2.1.1.7.B-1 Grafik Perkembangan *Sex Ratio* di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 151

Gambar 2.1.1.7.B-2 Grafik Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (dalam Jiwa dan Persentase) 152

Gambar 2.1.1.7.C-1 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024 154

Gambar 2.1.1.7.D-1 Kompilasi Grafik Proyeksi Demografi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030 158

Gambar 2.1.2.1-1 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY, 2020-2024 162

Gambar 2.1.2.1-2 Grafik PDRB PerKapita ADHB di Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (Juta Rupiah) 163

Gambar 2.1.2.1-3 Grafik PDRB PerKapita ADHK (=2010) di Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (Juta Rupiah) 164

Gambar 2.1.2.1-4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional (%), Tahun 2020-2024 164

Gambar 2.1.2.1-5 Grafik Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional, Tahun 2020-2024 165

Gambar 2.1.2.1-6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2020-2024 166

Gambar 2.1.2.2-1 Grafik Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 168

Gambar 2.1.2.2-2 Grafik Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 169

Gambar 2.1.2.3-1 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 171

Gambar 2.1.2.3-2 Grafik Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 172

Gambar 2.1.2.3-3 Grafik Angka Literasi SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 173

Gambar 2.1.2.3-4 Grafik Angka Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 173

Gambar 2.1.2.3-5 Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 174

Gambar 2.1.2.4-1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 175

Gambar 2.1.2.6-1 Grafik Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 177

Gambar 2.1.2.6-2 Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 178

Gambar 2.1.3.1-1 Grafik Angka Ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 179

Gambar 2.1.3.2-1 Grafik Kontribusi/Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 180

Gambar 2.1.3.2-2 Grafik Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 181

Gambar 2.1.3.2-3 Grafik Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 182

Gambar 2.1.3.2-4 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 183

Gambar 2.1.3.2-6 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 184

Gambar 2.1.3.2-7 Grafik Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 186

Gambar 2.1.3.2-8 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 187

Gambar 2.1.3.3-1 Grafik Perkembangan Pembentukan Modal Tetap bruto Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 188

Gambar 2.1.3.4-1 Grafik Perkembangan Desa Mandiri di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 189

Gambar 2.1.3.4-2 Grafik Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 190

Gambar 2.1.3.5-1 Grafik Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 192

Gambar 2.1.3.5-2 Grafik Total Kredit/PDRB (%) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 193

Gambar 2.1.4.1-1 Grafik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 194

Gambar 2.1.4.1-2 Grafik Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 195

Gambar 2.1.4.2-1 Grafik Perkembangan Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan *(Crime Rate)* di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 196

Gambar 2.2.1.1-1 Grafik Struktur Pendapatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 336

Gambar 2.2.1.2-1 Grafik Struktur Belanja Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 . 339

Gambar 2.2.1.2-2 Grafik Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta) 340

Gambar 2.2.1.9-1 Grafik Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020-2024 354

Gambar 2.3.2.1-1 Tujuan *Sustainable Development Goals* 380

Gambar 3.1.1-1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 398

Gambar 3.4-1 Peta Pengembangan Kawasan Utama Lokus Pembangunan Kabupaten Kulon Progo 440

Gambar 3.4.1-2 Fokus Pembangunan Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan 447

Gambar 3.4.2-1 Fokus Pembangunan Kawasan Industri dan Ekonomi Kreatif 450

Gambar 3.4.3-1 Fokus Pembangunan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan 453

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2024, Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi dalam bentuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serentak yang diikuti oleh 545 daerah di seluruh wilayah tanah air. Sejalan dengan itu, setiap daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, sebagai instrumen utama dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih selama masa jabatannya.

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu daerah yang turut serta dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 secara serentak. Berdasarkan hasil rekapitulasi akhir yang telah ditetapkan secara sah oleh Komisi Pemilihan Umum, pasangan ***DR. H. R. Agung Setyawan, S.T., M.Sc., M.M.*** dan ***Ambar Purwoko, A.Md.*** dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo terpilih dengan perolehan sebanyak 119.643 suara sah[1]. Pasangan ini akan mengemban amanah kepemimpinan untuk periode jabatan Tahun 2025–2030.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo masa jabatan Tahun 2025–2030 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bertempat di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah tata kelola pemerintahan di Indonesia, karena untuk pertama kalinya, pelantikan kepala daerah dilaksanakan secara serentak secara nasional sebagai wujud konsolidasi demokrasi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kemenangan pasangan terpilih tersebut menjadi dasar legal-formal dalam penyusunan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029. RPJMD ini disusun sebagai penjabaran agenda pembangunan lima tahunan yang selaras dengan mandat kepala daerah hasil pemilihan umum, serta bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2045.

[1] *Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024, dapat diakses melalui https://jdih.kpu.go.id/diy/kulonprogo/blog/read/15944/peetapan-hasil-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kulon-progo-tahun-2024*

Dalam menjalankan pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengusung visi pembangunan daerah sebagai berikut: ***"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan".*** Visi tersebut dijabarkan ke dalam empat misi utama yang menjadi landasan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, yaitu:

1. ***Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius;***
2. ***Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi;***
3. ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis;***
4. ***Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana.***

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hakikat pembangunan daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga harus selaras dengan arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus sebagai instrumen untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah.

Pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 merupakan tahap awal dalam mewujudkan visi jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo 2025-2045. Pada periode ini, fokus utama adalah penguatan fondasi pembangunan daerah yang mencakup penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. RPJMD ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat.

Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo 2025-2045 serta mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang menjadi panduan utama pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 menekankan pada transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan sosial, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD ini diarahkan agar selaras dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab tantangan dan peluang pembangunan di tingkat daerah.

Selain itu, sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembangunan di Kabupaten Kulon Progo juga harus terintegrasi dengan visi pembangunan DIY 2022-2027 dan RPJPD DIY 2025-2045 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan budaya, pengentasan kemiskinan, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 harus memastikan keterpaduan dengan RPJMD DIY agar pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis dengan pembangunan provinsi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 dan Lembaran Negara 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
6. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6333).
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249).

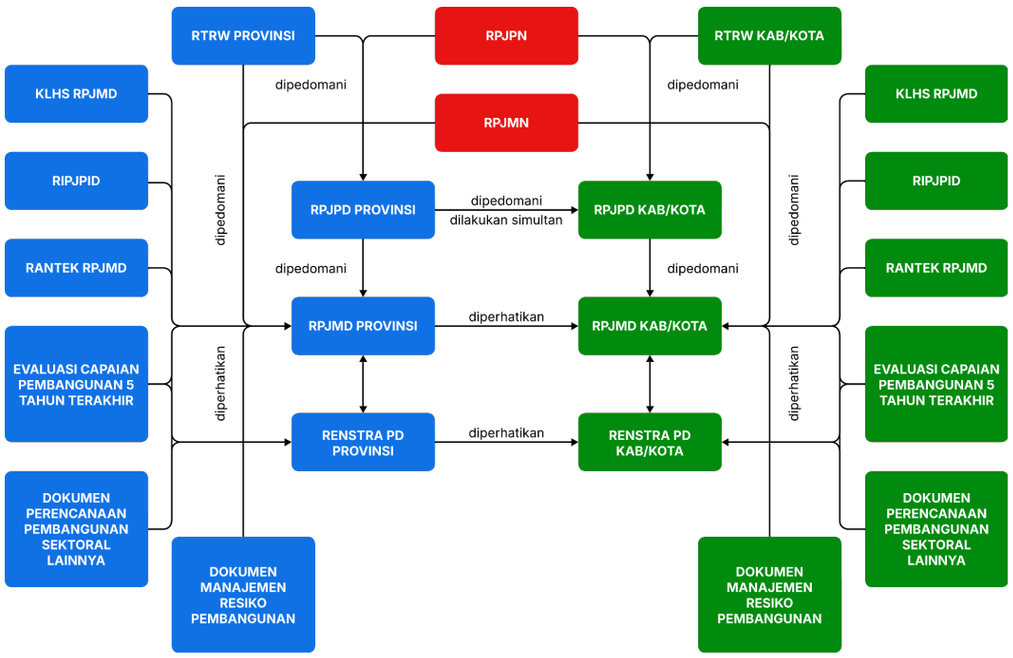
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 2017 Nomor 1312).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 2018 Nomor 459).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 2020 Nomor 288).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 2021 Nomor 1419).
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.8/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan D.I. Yogyakarta sampai dengan Tahun 2020.
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion, skala 1:250.000.
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.146/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Skala 1:250.000.
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 171.K/GL.01/MEM.G/2025 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional Jogja.

27. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13).
28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 6).
29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.
31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10).
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan DIY Tahun 2022-2042.
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di Daerah Istimewa Yogyakarta
35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023-2043.
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan.
37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
38. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40/Kep/2023 Tentang Penetapan Rencana Induk Geopark Jogja Tahun 2023-2032.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1).
40. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2022).
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045.
42. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2018-2035.

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pedoman teknis penyusunan RPJMD tahun perencanaan 2025–2029.

Penyusunan RPJMD ini mengedepankan pendekatan teknokratik berbasis data dan informasi yang valid, didukung oleh analisis capaian pembangunan daerah serta integrasi kebijakan pembangunan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Dokumen ini disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen strategis lima tahunan, tetapi juga sebagai platform koordinasi pembangunan daerah yang adaptif, kolaboratif, dan akuntabel, yang ditopang oleh sistem informasi, evaluasi capaian, serta komitmen terhadap integrasi lintas dokumen. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya digambarkan secara sistematis dalam Gambar 1.3-1 berikut.



Gambar 1.3-1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029

Indonesia memiliki visi dan misi abadi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi dan misi abadi tersebut dijabarkan lebih operasional dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, yang menetapkan visi pembangunan 20 tahun ke depan: ***"Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan".***

Visi ***"Indonesia Emas 2045"*** memiliki lima sasaran utama, yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui 8 Misi Pembangunan (Agenda), 17 Arah Pembangunan Nasional, dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Angka 17, 8, dan 45 ini juga mencerminkan semangat kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila, selaras dengan tanggal Proklamasi 17 Agustus 1945. Kedelapan misi pembangunan tersebut terbagi ke dalam tiga elemen besar:

1. Transformasi Indonesia (3 misi);
2. Landasan Transformasi (2 misi); dan
3. Kerangka Implementasi (3 misi).

Pelaksanaan kedelapan misi pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 17 Arah Pembangunan Nasional (dituangkan melalui IE sebagai Indonesia Emas, dimulai dari IE 1 sampai dengan IE 17), yang bersifat transformatif dan menggunakan paradigma baru untuk mewujudkan "Indonesia Emas" pada tahun 2045.

Selanjutnya, Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan indikator yang disepakati secara nasional dan telah didelegasikan melalui Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk diampu oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Penjabaran rinci setiap indikator tersebut akan disajikan pada Bab 4 dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029.

Untuk memudahkan pemahaman mulai dari visi, misi, dan arah pembangunan dalam RPJPN sebagaimana telah diuraikan pada narasi sebelumnya, berikut ini disajikan Tabel 1.3.1-1 yang merangkum visi, misi, dan arah pembangunan nasional RPJPN Tahun 2025–2045.

Tabel 1.3.1-1 Visi, Misi, dan Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045

VISI RPJPN 2025–2045	NO.	ELEMEN TRANSFORMASI	MISI	URAIAN MISI	PENJELASAN MISI	IE	ARAH PEMBANGUNAN
Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan	1	TRANSFORMASI INDONESIA	Misi 1	Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.	IE 1	Kesehatan untuk Semua
						IE 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
						IE 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
			Misi 2	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.	IE 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
						IE 5	Penerapan Ekonomi Hijau
						IE 6	Transformasi Digital
						IE 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
						IE 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
			Misi 3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.	IE 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
	2	LANDASAN TRANSFORMASI	Misi 4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global.	IE 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
						IE 11	Stabilitas Ekonomi Makro
						IE 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
			Misi 5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan.	IE 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
						IE 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
						IE 15	Lingkungan Hidup Berkualitas
						IE 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
						IE 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

VISI RPJPN 2025–2045	NO.	ELEMEN TRANSFORMASI	MISI	URAIAN MISI	PENJELASAN MISI	IE	ARAH PEMBANGUNAN
	3	KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI	Misi 6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.	-	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
			Misi 7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.	-	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
			Misi 8	Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.	-	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Sumber: RPJPN Tahun 2025–2045, diolah

Untuk menyelaraskan secara utuh antara RPJPN Tahun 2025–2045 dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, terlebih dahulu perlu dipahami keterkaitan antara RPJPN Tahun 2025–2045 dengan RPJMN Tahun 2025–2029. Tabel 1.3.1-2 menyajikan keterkaitan tersebut, dimulai dari 8 Misi (Agenda) RPJPN dan 17 Arah Pembangunan RPJPN (dituangkan sebagai IE/Indonesia Emas) terhadap 8 Misi RPJMN 2025–2029. Misi RPJMN tersebut merupakan bagian dari visi dan misi Presiden terpilih periode 2025–2029, dengan visi ***"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"*** dan misi yang dirumuskan sebagai Asta Cita yang menjadi Prioritas Nasional (PN 1 sampai dengan PN 8).

Asta Cita Sebagai Prioritas Nasional [PN] 2025–2029	
PN 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 1.3.1-1 Asta Cita Sebagai Prioritas Nasional Tahun 2025–2029

Sumber: RPJMN 2025–2029, diolah

Tabel 1.3.1-2 Keterkaitan RPJPN Tahun 2025–2045 dengan RPJMN Tahun 2025–2029

8 MISI RPJPN 2025–2045	17 ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2025–2045	PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2025–2029
Misi 4: SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	IE 10: Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 6: Transformasi Digital	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 5: Penerapan Ekonomi Hijau	
Misi 4: SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	IE 10: Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	
Misi 4: SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	IE 11: Stabilitas Ekonomi Makro	
Misi 4: SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	IE 12: Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	
Misi 5: KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	IE 15: Lingkungan Hidup Berkualitas	
Misi 5: KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	IE 16: Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
Misi 5: KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	IE 17: Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 6: Transformasi Digital	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
Misi 1: TRANSFORMASI SOSIAL	IE 1: Kesehatan untuk Semua	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Misi 1: TRANSFORMASI SOSIAL	IE 2: Pendidikan Berkualitas yang Merata	
Misi 1: TRANSFORMASI SOSIAL	IE 3: Perlindungan Sosial yang Adaptif	
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
Misi 5: KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	IE 14: Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	

8 MISI RPJPN 2025–2045	17 ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2025–2045	PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2025–2029
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
Misi 1: TRANSFORMASI SOSIAL	IE 3: Perlindungan Sosial yang Adaptif	PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 8: Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 6: Transformasi Digital	PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Misi 2: TRANSFORMASI EKONOMI	IE 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
Misi 3: TRANSFORMASI TATA KELOLA	IE 9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	
Misi 4: SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	IE 10: Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	
Misi 4: SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	IE 11: Stabilitas Ekonomi Makro	
Misi 5: KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	IE 13: Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi 5: KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	IE 15: Lingkungan Hidup Berkualitas	
Misi 5: KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	IE 17: Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	

Keterangan:

- Pada Kolom “8 Misi RPJPN”, untuk Misi 1–8 = dapat juga diartikan sebagai Agenda 1–8 RPJPN;
- IE 1–17 = bentuk penuangan arah pembangunan nasional RPJPN menuju Indonesia Emas 2045 (IE = Indonesia Emas); dan
- PN 1–8 = 8 Asta Cita sebagai Prioritas Nasional (PN)

Sumber: RPJMN 2025–2029, diolah

Berdasarkan Tabel 1.3.1-2, tampak bahwa dari 8 Misi (Agenda) RPJPN, lima di antaranya memiliki keterkaitan langsung dengan 17 Arah Pembangunan dan 8 Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025–2029. Sementara itu, tiga misi RPJPN lainnya, yaitu:

- Misi 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- Misi 7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
- Misi 8: Kesinambungan Pembangunan;

merupakan Kerangka Implementasi Transformasi. Kerangka ini dimaknai sebagai landasan yang diperlukan untuk memastikan transformasi menuju Indonesia Emas 2045 dapat terlaksana secara bertahap dan berkesinambungan, melalui pembangunan kewilayahan yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Nusantara, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, serta memastikan hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan. Untuk mewujudkan pembangunan wilayah, unsur sarana dan prasarana perlu dipersiapkan secara menyeluruh, mencakup konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana-prasarana dasar lainnya. Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan wilayah juga harus memperhatikan tata kelola dan kapasitas fiskal pemerintah daerah, mempertimbangkan karakteristik wilayah, serta menerapkan pendekatan yang tidak bersifat *one size fits all* dengan memberikan pemihakan kepada daerah afirmasi.

Dengan memahami keterkaitan tersebut, selanjutnya disajikan keterpaduan antara RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Kabupaten Kulon Progo pada Tabel 1.3.1-3 dan Gambar 1.3.1-1 berikut.

Tabel 1.3.1-3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029

VISI RPJMD	MISI RPJMD	ASTA CITA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL (dalam RPJMN Tahun 2025–2029)	STRATEGI BESAR MENCAPAI INDONESIA EMAS 2045 (dalam RPJPN Tahun 2025–2045)
TERWUJUDNYA KULON PROGO YANG MAKMUR, MANDIRI, RELIGIUS, BERBUDAYA YANG BERKELANJUTAN	**Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius**	***) PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	***) Agenda 1; Agenda 2; Agenda 5 = PN 4 Agenda 1; [IE.1] Kesehatan untuk Semua Agenda 1; [IE.2] Pendidikan Berkualitas yang Merata Agenda 1; [IE.3] Perlindungan Sosial yang Adaptif Agenda 2; [IE.4] Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Agenda 5; [IE.14] Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		***) PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	***) Agenda 1; Agenda 2; Agenda 5 = PN 4 Agenda 1; [IE.1] Kesehatan untuk Semua Agenda 1; [IE.2] Pendidikan Berkualitas yang Merata Agenda 1; [IE.3] Perlindungan Sosial yang Adaptif Agenda 2; [IE.4] Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Agenda 5; [IE.14] Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		***) PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	***) Agenda 5 = PN 8 Agenda 5; [IE.13] Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Agenda 5; [IE.15] Lingkungan Hidup Berkualitas Agenda 5; [IE.17] Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
	Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi	***) PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. ***) PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. ***) PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	***) Agenda 2; Agenda 4; Agenda 5 = PN 2 Agenda 2; [IE.6] Transformasi Digital Agenda 2; [IE.4] Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Agenda 2; [IE.5] Penerapan Ekonomi Hijau Agenda 4; [IE.10] Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial Agenda 4; [IE.11] Stabilitas Ekonomi Makro Agenda 4; [IE.12] Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Agenda 5; [IE.15] Lingkungan Hidup Berkualitas Agenda 5; [IE.16] Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Agenda 5; [IE.17] Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ***) Agenda 2 = PN 3 Agenda 2; [IE.6] Transformasi Digital Agenda 2; [IE.4] Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Agenda 2; [IE.7] Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ***) Agenda 2 = PN 5 Agenda 2; [IE.4] Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Agenda 2; [IE.7] Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

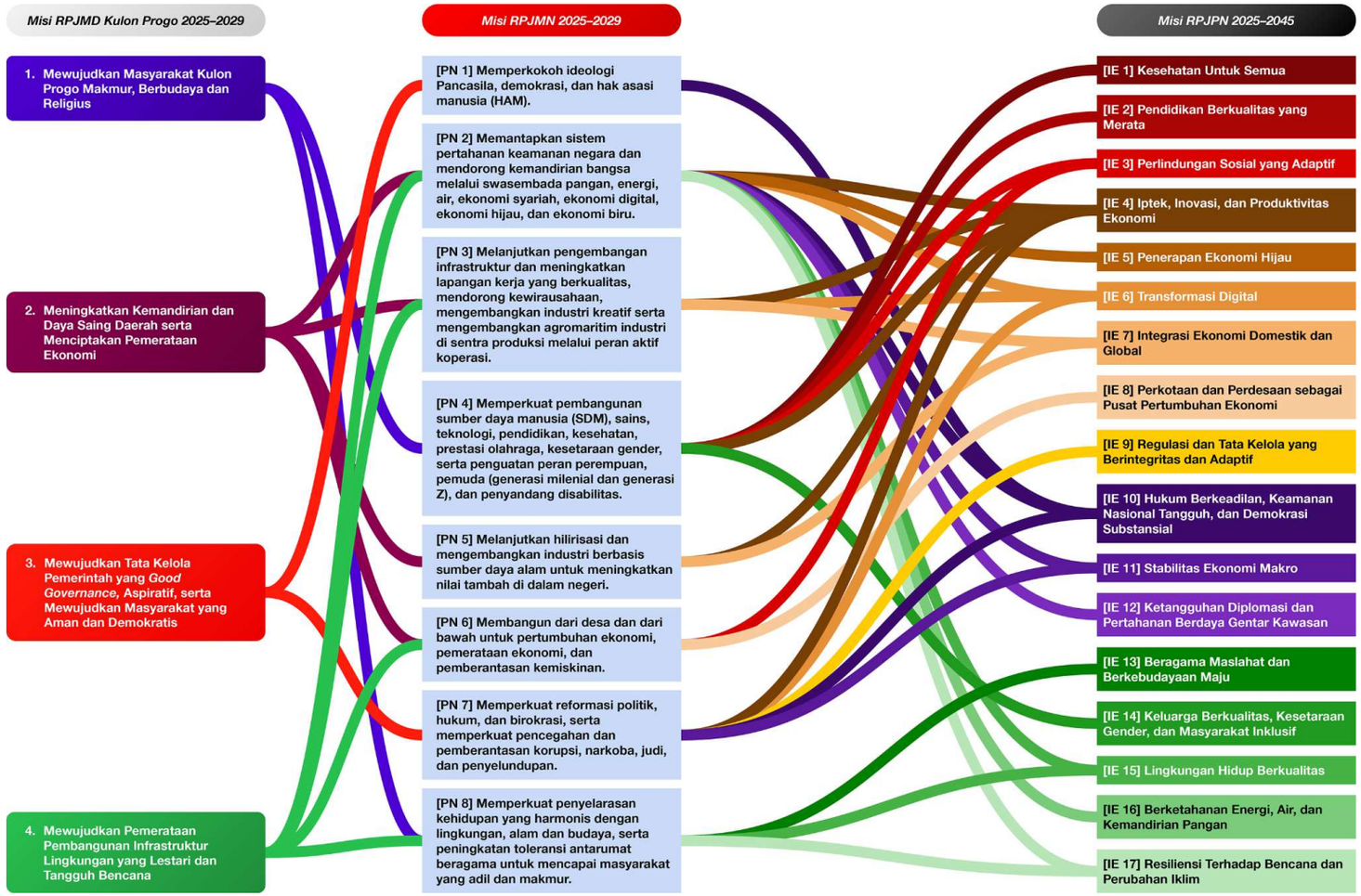
VISI RPJMD	MISI RPJMD	ASTA CITA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL (dalam RPJMN Tahun 2025–2029)	STRATEGI BESAR MENCAPAI INDONESIA EMAS 2045 (dalam RPJPN Tahun 2025–2045)
		***) PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	***) Agenda 1; Agenda 2 = PN 6 Agenda 1; [IE.3] Perlindungan Sosial yang Adaptif Agenda 2; [IE.8] Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis	***) PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	***) Agenda 2; Agenda 3; Agenda 4 = PN 7 Agenda 2; [IE.6] Transformasi Digital Agenda 2; [IE.4] Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Agenda 3; [IE.9] Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Agenda 4; [IE.10] Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial Agenda 4; [IE.11] Stabilitas Ekonomi Makro
		***) PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). ***) PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	***) Agenda 4 = PN 1 Agenda 4; IE 10: Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial ***) Agenda 2; Agenda 3; Agenda 4 = PN 7 Agenda 2; [IE.6] Transformasi Digital Agenda 2; [IE.4] Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Agenda 3; [IE.9] Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Agenda 4; [IE.10] Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial Agenda 4; [IE.11] Stabilitas Ekonomi Makro
	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	***) PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. ***) PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	***) Agenda 2 = PN 3 Agenda 2; [IE.6] Transformasi Digital Agenda 2; [IE.4] Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Agenda 2; [IE.7] Integrasi Ekonomi Domestik dan Global ***) Agenda 1; Agenda 2 = PN 6 Agenda 1; [IE.3] Perlindungan Sosial yang Adaptif Agenda 2; [IE.8] Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

VISI RPJMD	MISI RPJMD	ASTA CITA SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL (dalam RPJMN Tahun 2025–2029)	STRATEGI BESAR MENCAPAI INDONESIA EMAS 2045 (dalam RPJPN Tahun 2025–2045)
		***) PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. ***) PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	***) Agenda 2; Agenda 4; Agenda 5 = PN 2 Agenda 2; [IE.6] Transformasi Digital Agenda 2; [IE.4] Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Agenda 2; [IE.5] Penerapan Ekonomi Hijau Agenda 4; [IE.10] Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial Agenda 4; [IE.11] Stabilitas Ekonomi Makro Agenda 4; [IE.12] Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Agenda 5; [IE.15] Lingkungan Hidup Berkualitas Agenda 5; [IE.16] Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Agenda 5; [IE.17] Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ***) Agenda 5 = PN 8 Agenda 5; [IE.13] Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Agenda 5; [IE.15] Lingkungan Hidup Berkualitas Agenda 5; [IE.17] Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Keterangan:

- Agenda 1–8 = merujuk pada penyebutan Misi dalam dokumen RPJPN;
- IE 1–17 = bentuk penuangan arah pembangunan nasional RPJPN menuju Indonesia Emas 2045 (IE = Indonesia Emas); dan
- PN 1–8 = 8 Asta Cita sebagai Prioritas Nasional (PN)

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, Tahun 2025



Gambar 1.3.1-2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029

Sama halnya dengan keterkaitan antara RPJPN Tahun 2025–2045 dengan RPJMN Tahun 2025–2029, berdasarkan Tabel 1.3.1-3 dan Gambar 1.3.1-2 tentang keterkaitan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dengan RPJPN dan RPJMN, Misi (Agenda) ke-6 hingga ke-8 RPJPN yaitu:

- Misi 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- Misi 7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
- Misi 8: Kesinambungan Pembangunan

merupakan Kerangka Implementasi Transformasi. Kerangka yang dimaknai sebagai landasan untuk memastikan transformasi menuju Indonesia Emas 2045 dapat terlaksana secara bertahap dan berkesinambungan melalui pembangunan kewilayahan yang didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Setelah keterkaitan visi dan misi pembangunan nasional diuraikan, langkah selanjutnya adalah memahami bentuk operasionalisasi misi tersebut dalam agenda pembangunan nasional, yang kemudian menjadi acuan sinkronisasi perencanaan di tingkat daerah. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, operasionalisasi ini diwujudkan melalui Asta Cita yang dijabarkan ke dalam 17 Program Prioritas Presiden dan diperkuat oleh Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagaimana tersaji pada Gambar 1.3.1-3 berikut.



Gambar 1.3.1-3 Tujuh Belas Program Prioritas Presiden dan Delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Sumber: RPJMN 2025-2029, diolah

Sebagai bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan daerah dengan agenda pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memberikan perhatian khusus terhadap lokasi prioritas dan highlight indikasi intervensi yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa kawasan strategis nasional yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kulon Progo, yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta (A1), Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Yogyakarta (A2), Kawasan Aerotropolis YIA (A3) yang merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur–Yogyakarta–Prambanan, serta Kawasan Swasembada Pangan dan Air Progo–Opak.

Sejumlah *highlight* intervensi nasional yang bersinggungan langsung dengan wilayah Kabupaten Kulon Progo meliputi: pembangunan Pantai Congot sebagai destinasi pariwisata, persiapan pembangunan jalan tol Yogyakarta–Kulon Progo (YIA), rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Kalibawang, serta pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di DAS Progo. Pemerintah Daerah mendukung intervensi tersebut melalui program-program daerah seperti pengelolaan destinasi pariwisata, penataan ruang, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Kolaborasi lintas pemerintahan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional dalam rangka Pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029, intervensi Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Kulon Progo disajikan dalam Tabel 1.3.1-4 berikut.

Tabel 1.3.1-4 Intervensi Kabupaten Kulon Progo terhadap Proyek Strategis Nasional

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	INTERVENSI DI KULON PROGO	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	**Program Makan Bergizi Gratis**	Pembekalan higiene dan sanitasi kepada pengelola MBG	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Program Direktif Presiden
2	**Sekolah Rakyat**	Penyiapan lokasi	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Direktif Presiden
3	**Digitalisasi Pendidikan**	- Peningkatan kompetensi guru - Penguatan pendidikan literasi dan numerasi	- Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - Pengembangan konten digital untuk pendidikan - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Program Direktif Presiden
4	**Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**	Pembentukan badan hukum koperasi merah putih	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	Program Direktif Presiden
5	**Pengentasan Kemiskinan:** **- Kartu Kesejahteraan** **- Kartu Usaha Afirmatif**	- Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah - Penerapan data tunggal kemiskinan - Pemenuhan perlindungan sosial - Pendanaan usaha mikro melalui KerisKu - Fasilitasi budidaya dan benih perikanan - Hibah sarana dan alat bantu penangkapan ikan - Pelatihan pertanian - Bantuan sosial pangan pada keluarga	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga - Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	- Bapperida - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Perindustrian Koperasi & UKM - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Pertanian dan Pangan	
6	**Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas**	Pembangunan dan perbaikan sekolah dan madrasah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
7	**Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota**	- Optimalisasi pelayanan RSUD Wates (Peningkatan pelayanan: KJSU - KIA); - Perluasan RSUD NAS dan pengembangan layanan trauma center; - Optimalisasi Fungsi Pelayanan Puskesmas Kalibawang	- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan; - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan; - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	
8	**Program Penuntasan TBC**	Tracing dan pengobatan tuntas TB, AIDS dan Malaria	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
9	**Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional**	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	

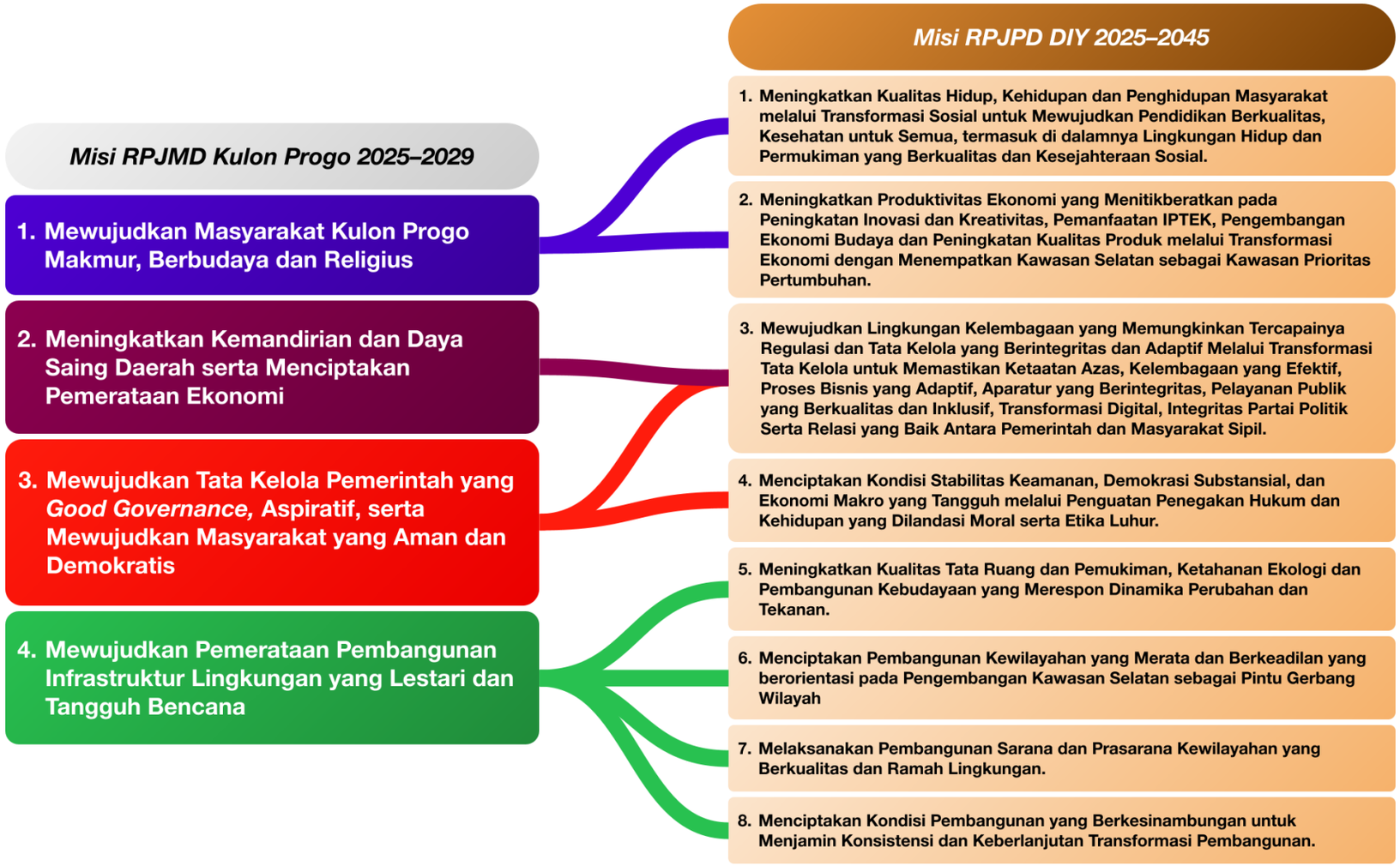
NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	INTERVENSI DI KULON PROGO	SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
10	**Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi**	Peningkatan Produksi Daging Sapi	- Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain; - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian dan Pangan	
11	**Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu**	Integrasi layanan Publik (terkait portal layanan) serta dashboard layanan pimpinan	- Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah; - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas; - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	
12	**Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia**	Penyusunan peta tematik	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
13	**Pembangunan 3 Juta Rumah**	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	
16	**Pengelolaan Sampah Terpadu**	Edukasi pemilahan sampah dan 1 Padukuhan 1 Bank Sampah	- Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup	
17	**Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo**	Manajemen lalu lintas	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	
21	**Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya**	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

Lebih lanjut, keselarasan antara RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029 sangat penting dalam rangka mencapai pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil di tingkat kabupaten mendukung dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Melalui pengintegrasian program dan kegiatan, sinergi dalam pengelolaan sumber daya, pengembangan inovasi dan teknologi, serta pengawasan dan evaluasi terintegrasi, Kabupaten Kulon Progo dapat mendukung dan mempercepat pencapaian visi jangka menengah ***"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045".*** Dengan demikian, ***"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan"*** dapat dicapai secara bersama-sama dengan tujuan nasional.

1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD DIY Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 juga memiliki keterkaitan dengan RPJPD DIY 2025-2045 dalam mencapai visi jangka panjang ***"Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan".*** Salah satu misi utama RPJPD DIY adalah meningkatkan produktivitas ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas, yang dapat diwujudkan melalui penguatan ekonomi berbasis budaya di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, fokus RPJPD DIY terhadap pembangunan kawasan selatan sebagai prioritas pertumbuhan menjadikan Kulon Progo sebagai wilayah strategis dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029 dapat menjadi instrumen awal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD DIY. Keselarasan kebijakan ini menjadikan pembangunan Kulon Progo sebagai bagian integral dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang provinsi.



Gambar 1.3.2-1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan RPJPD DIY Tahun 2025-2045

1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal pelaksanaan visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 yakni ***"Kulon Progo Yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, & Berkelanjutan (SEMARAK)".*** Keduanya memiliki kesinambungan dalam visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. RPJMD menekankan penguatan fondasi pembangunan melalui visi ***"Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan",*** yang menjadi langkah awal menuju capaian strategis jangka panjang dalam RPJPD, seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing SDM, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Fokus pembangunan dalam lima tahun pertama diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, kemandirian ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan sebagai fondasi untuk mewujudkan sasaran RPJPD. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya merupakan dokumen perencanaan lima tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan daerah menuju Kulon Progo yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

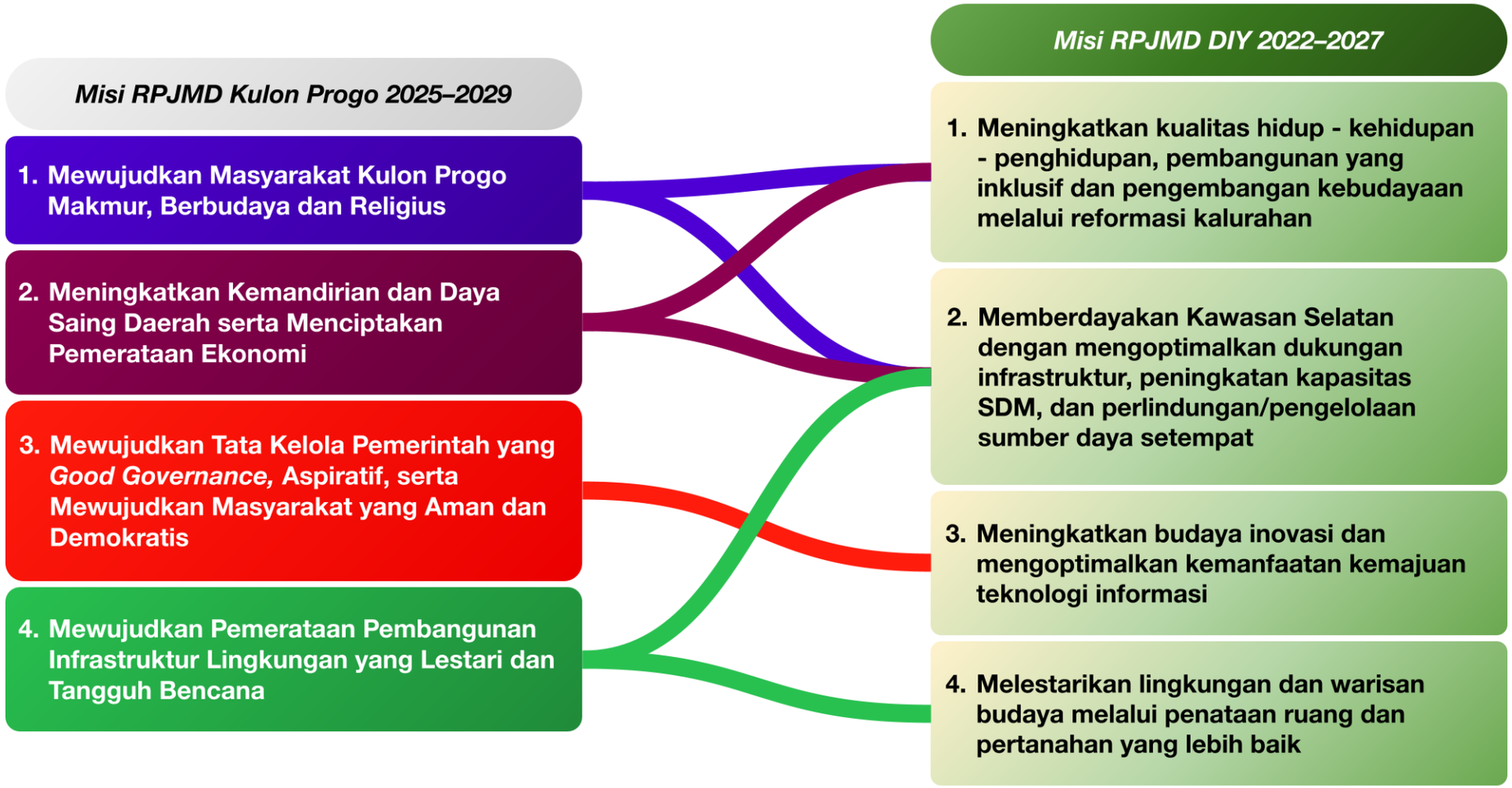


Gambar 1.3.3-1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045

1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD DIY Tahun 2022–2027

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2022–2027, khususnya dalam mewujudkan visi ***"Pancamulia Masyarakat Jogja"*** melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan bagian dari kawasan selatan DIY, memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sebagaimana ditekankan dalam misi kedua RPJMD DIY. Selain itu, program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo selaras dengan sasaran utama RPJMD DIY, yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan antardaerah. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo juga sejalan dengan misi RPJMD DIY untuk melestarikan lingkungan dan budaya melalui penataan ruang yang lebih baik. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan implementasi strategis dari kebijakan pembangunan DIY.

Keterkaitan antara misi dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dengan misi RPJMD DIY Tahun 2022–2027 divisualisasikan secara sistematis dalam Gambar 1.3.4-1 berikut. Gambar tersebut menggambarkan kesesuaian arah antara misi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo dengan misi RPJMD DIY, yang menunjukkan integrasi vertikal dalam perencanaan pembangunan antarwilayah dan memperkuat sinergi kebijakan dalam kerangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang secara berkelanjutan.



Gambar 1.3.4-1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dengan RPJMD DIY Tahun 2022–2027

1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Kulon Progo

Dokumen RTRW dan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya mengusung prinsip pembangunan wilayah berbasis potensi lokal yang terarah, berkelanjutan, dan inklusif. Dalam RTRW, arah pengembangan kawasan dibagi menjadi tiga klaster utama: kawasan aerotropolis dan jasa perkotaan, kawasan industri dan ekonomi kreatif, serta kawasan pariwisata berkelanjutan. Ketiga klaster ini secara strategis mendukung pencapaian misi RPJMD, khususnya Misi ke-2 (peningkatan daya saing dan pemerataan ekonomi) dan Misi ke-4 (pemerataan infrastruktur yang lestari dan tangguh bencana).

Penyelarasan ini semakin kuat karena pendekatan spasial dalam RTRW juga memperhatikan aspek keberlanjutan, konservasi, dan mitigasi risiko bencana yang merupakan isu strategis dalam RPJMD seperti kualitas lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, dan ketangguhan terhadap bencana. Kawasan Menoreh yang difokuskan sebagai wilayah pariwisata berkelanjutan dan konservasi lingkungan, merupakan bukti konkret implementasi Misi ke-1 dan Misi ke-4. Selain itu, pengembangan konsep seperti *smart agriculture, science techno park,* dan ekonomi sirkular yang terdapat dalam dokumen RTRW juga memperkuat arah RPJMD dalam membangun konektivitas wilayah, fasilitas publik, dan tata kelola pemerintahan berbasis inovasi, selaras dengan prinsip *good governance* dalam Misi ke-3.

Perlu disampaikan bahwa saat dokumen RPJMD ini disusun, proses perubahan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012–2032 telah dimulai sejak tahun 2017 dan telah melalui tahapan tinjauan ulang. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2045 saat ini masih dalam proses evaluasi di tingkat pusat. Meskipun demikian, substansi dari Ranperda RTRW 2025–2045 telah digunakan sebagai acuan karena sebagian besar ketentuan dalam RTRW 2012–2032 sudah tidak lagi relevan dengan dinamika pembangunan terkini.

Sinergi antara RPJMD dan RTRW menjadi sangat penting karena RTRW berfungsi sebagai instrumen teritorial untuk mewujudkan visi jangka panjang RPJPD 2025–2045 serta mendukung agenda pembangunan nasional dalam RPJPN. Pengembangan kawasan industri Sentolo, kawasan aerotropolis Temon, dan agropolitan Kalibawang merupakan contoh konkret keterpaduan arah pembangunan dalam RPJMD dan RTRW untuk mewujudkan visi “SEMARAK” (Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan). Oleh karena itu, keterkaitan dan penyelarasan kedua dokumen ini tidak hanya menjamin efektivitas pembangunan lima tahunan, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat untuk transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045.

1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan KLHS RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029

RPJMD Kabupaten Kulon Progo dan dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD adalah dua dokumen perencanaan yang saling melengkapi. RPJMD memberikan kerangka teknis dan operasional untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, sementara KLHS menganalisis kondisi lingkungan dan dampak potensial dari program pembangunan terhadap lingkungan. Keduanya harus terintegrasi agar perencanaan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo berkelanjutan dan ramah lingkungan. KLHS mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan.

Keterkaitan antara RPJMD dan KLHS sangat penting untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan. Dengan mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam RPJMD, program pembangunan akan lebih berkelanjutan dan mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, KLHS membantu mengidentifikasi peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengembangkan ekonomi hijau di Kabupaten Kulon Progo.

Gambar keterkaitan antara Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3.7-1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 dengan TPB KLHS RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029

1.3.8 Keterkaitan RPJMD dengan RIPJPID

Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sedang menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ PID) Tahun 2025–2030. Dokumen ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, yang menyatakan bahwa RIPJ PID merupakan dokumen sistemik, komprehensif, dan partisipatif yang memuat peran ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

RIPJ PID dirancang untuk mempercepat capaian target program prioritas dalam RPJMD serta menjamin bahwa kebijakan pembangunan di daerah berbasis pada hasil riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan *(science-based policy)*. Dengan demikian, hasil riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah, baik dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan RIPJ PID Kabupaten Kulon Progo juga mengacu pada rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK di tingkat provinsi, serta memperhatikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), khususnya pada pasal 5 yang menugaskan BRIDA untuk menyusun RIPJ PID sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Sejalan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan dari Bappeda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024, fungsi perencanaan daerah kini terintegrasi dengan tugas riset dan inovasi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, saat ini Bapperida Kabupaten Kulon Progo sedang dalam proses menyusun dokumen RIP JPID Tahun 2025–2030. Dokumen RIPJ PID ini akan memuat substansi terkait:

1. Penjelasan gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Kabupaten Kulon Progo.
2. Tema prioritas riset dan inovasi di daerah.
3. Tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah.
4. Kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah.
5. Strategi riset dan inovasi di daerah, dan
6. Peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi daerah yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025-2029.

Dengan adanya RIPJ PID ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diharapkan memiliki dokumen strategis yang memberikan arah implementatif terhadap penguatan IPTEK dan inovasi di daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, guna mendorong peningkatan daya saing dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara lebih akseleratif.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkelanjutan. RPJMD ini berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja), serta memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang terukur untuk periode 2025-2029, sesuai dengan RPJPD dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo.
2. Menganalisis kondisi umum daerah saat ini dalam konteks regional dan nasional untuk menetapkan arah pencapaian visi dan misi kepala daerah.
3. Merumuskan rencana pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang realistis dan berkelanjutan.
4. Menetapkan program prioritas dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif untuk pelaksanaan tahun 2025-2029.
5. Menyediakan acuan resmi bagi pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, serta sebagai tolok ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah (PD).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan serta memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif, teknokratik, politis, *top-down* dan *bottom-up.*

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (meliputi: RPJPN dan RPJMN, RPJPD dan RPJMD DIY, RPJPD Kab. Kulon Progo, KLHS RPJMD, RTRW, RIPJPID), Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat tiga subbab utama, yakni:

Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Menyajikan hasil evaluasi berdasarkan data dan informasi dengan pendekatan empat aspek pembangunan, sekaligus didalamnya memuat arah pembangunan nasional yang tertuang sebagai IE (Indonesia Emas) selama periode Tahun 2020–2024, terutama yang berkaitan dengan IKD (Indikator Kinerja Daerah), sebagaimana diuraikan berikut:

Aspek Geografi dan Demografi

Meliputi: Posisi dan Peran Strategis Daerah; Potensi Sumber Daya Alam; Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan (IE-16); Lingkungan Hidup Berkualitas (IE-15); Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE-17); dan Demografi.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Meliputi: Kesejahteraan Ekonomi; Kesehatan Untuk Semua (IE-1); Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE-2); Perlindungan Sosial yang Adaptif (IE-3); Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (IE-13); serta Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif (IE-14).

Aspek Daya Saing Daerah

Meliputi: Daya Saing dan Sumber Daya Manusia; Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE-4); Transformasi Digital (IE-6); Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (IE-7); Perkotaan dan Perdesaan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan (IE-8); serta Stabilitas Ekonomi Makro (IE-11).

Aspek Pelayanan Umum

Meliputi: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (IE-9); Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial (IE-10); Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan (IE-12); dan Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah (melalui Indikator Kinerja Kunci).

Subbab Gambaran Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

Subbab Permasalahan dan Isu Strategis memuat:

Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada bagian ini, Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang disimpulkan dari kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia terutama merujuk pada capaian Indikator Kinerja Daerah. Rumusan permasalahan disajikan dengan pengelompokan terhadap 4

aspek pembangunan (Aspek Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Pelayanan Umum).

Isu Strategis Daerah

Pada bagian ini, diuraikan mulai dari Isu Strategi pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

BAB III VISI, MISI, VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Didalamnya memuat:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Penahapan Pembangunan RPJMD.

Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Strategi Pembangunan Kewilayahan Berbasis Keistimewaan DIY; dan

Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

BAB IV PROGRAM PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KINERJA

Subbab Program Perangkat Daerah memuat:

Daftar Program Perangkat Daerah yang disertai Target dan Pagu Indikatif.

Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat:

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah

BAB 5 PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial dari dokumen RPJMD, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan uraian mengenai konsistensi perencanaan dan penganggaran, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan, komunikasi publik, dan pembiayaan pembangunan.

BAB II

Gambaran Umum Daerah

Gambaran Umum Kondisi Daerah



Aspek Geografi & Demografi

Kulon Progo terdiri atas 12 Kapanewon, 87 Kalurahan, 1 Kelurahan, 918 Pedukuhan, 1.825 RW, 4.469 RT. Di tahun 2024, jumlah Penduduk **444.994 jiwa** dengan proporsi **49,56%** laki-laki dan **50,44%** perempuan.



Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan data 2024, angka ketergantungan di Kulon Progo berada pada angka **49,57%**, kontribusi PDRB industri pengolahan mencapai **10,11%**, rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum **3,88%**, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja **78,57%**, dan Indeks Inovasi Daerah berada pada **54,68** dengan kategori **Inovatif.**



Aspek Pelayanan Umum

Indeks SPBE tahun 2024 berada pada **3,91**, indeks pelayanan publik **4,55** dengan **predikat A** atau **Pelayanan Prima,** serta crime rate sebesar **62,70.**

Aspek Kesejahteraan Masyarakat



- **Ekonomi**

  Pada tahun 2024, Kulon Progo memiliki laju pertumbuhan ekonomi pada 4,77**%**, PRDB Per Kapita ADHB **37,98 juta rupiah**, rasio gini **0,373**, tingkat kemiskinan **15,62%**, sertda tingkat pengangguran terbuka **2,01%.**

- **Kesehatan**

  Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 adalah sebesar **75,49 tahun**. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua se-DIY setelah Kota Yogyakarta.

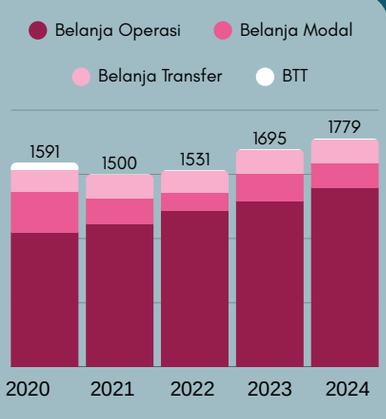
- **Pendidikan**

  Kulon Progo di tahun 2024 memiliki Indeks Pembangunan Manusia **76,18**, Harapan Lama Sekolah **14,49 tahun**, dan Rata-rata Lama Sekolah **9,20 tahun**.

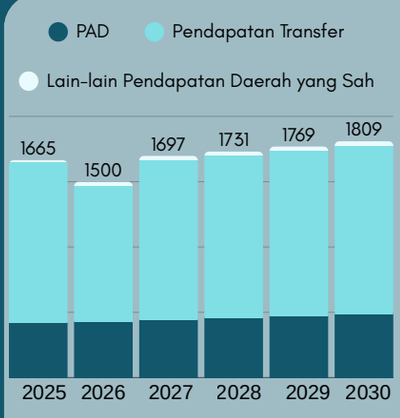
Gambaran Keuangan Daerah



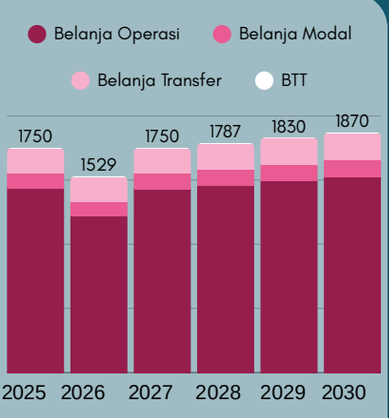
Realisasi Pendapatan Daerah (Rp miliar) Tahun 2020-2024



Realisasi Belanja Daerah (Rp miliar) Tahun 2020-2024



Proyeksi Pendapatan Daerah (Rp miliar) Tahun 2025-2030



Proyeksi Belanja Daerah (Rp miliar Tahun 2025-2030

Permasalahan & Isu Strategis

Permasalahan

Kemandirian pangan, ketahanan air, ketahanan energi, kualitas lingkungan hidup, dan indeks ketahanan daerah masih rendah.

Belum optimalnya tingkat kesejahteraan ekonomi, perlindungan sosial yang inklusif, kesetaraan gender, tingkat pendidikan, tingkat kebudayaan dan tingkat keberagamaan, serta kualitas keluarga.

Belum optimalnya daya saing SDM, stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan iptek dan inovasi, serta integrasi ekonomi domestik dan global.

Belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemerintah.

Isu Strategis



Kualitas SDM



Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan



Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya



Peningkatan Daya Saing & Kemandirian Daerah



Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah



Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah



Reformasi Fiskal dan Tata Kelola Digital



Perwujudan Wilayah yang Aman & Nyaman



Optimalisasi Kecukupan Pangan & Air Bersih



Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana & Perubahan Iklim



Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup & Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis Geografis dan Demografis memberikan gambaran serta evaluasi mengenai kondisi suatu wilayah, mencakup karakteristik fisik, potensi perkembangan, tingkat kerentanan terhadap bencana, serta luas wilayah dan batas administrasi pemerintahan. Kedua aspek ini merupakan informasi fundamental dalam mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan manusia, yang menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat wilayah provinsi, dengan pusat pemerintahan berada di Kapanewon Wates. Secara administratif, Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kapanewon, 87 kalurahan, 1 kelurahan, 918 padukuhan, 1.825 rukun warga, dan 4.469 rukun tetangga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas wilayah Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 577,22 km². Namun demikian, menurut data yang dirilis oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)* Kabupaten Kulon Progo, luas wilayah tercatat sebesar 576,88 km². Perbedaan data tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses sinkronisasi data spasial, yang akan diselaraskan lebih lanjut dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo yang tengah disusun.

Jika dilihat berdasarkan cakupan wilayah tiap kapanewon, Kapanewon Kokap merupakan wilayah administratif terluas dengan luas 70,16 km² atau setara dengan 12,16 persen dari total luas Kabupaten Kulon Progo. Sebaliknya, Kapanewon Galur tercatat sebagai wilayah administratif dengan cakupan terkecil, yaitu seluas 32,36 km² atau 5,61 persen dari total wilayah. Sementara itu, Kapanewon Wates, meskipun merupakan pusat pemerintahan kabupaten, memiliki luas wilayah terkecil kedua, yaitu 32,68 km² atau setara dengan 5,66 persen. Informasi lebih lanjut mengenai sebaran luas wilayah antar-kapanewon dan kalurahan disajikan pada Tabel 2.1.1.1-1.

Tabel 2.1.1.1-1 Luas Wilayah (Km²) dan Persentase Luas Seluruh Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo

NO.	KODE KAPANEWON	NAMA KAPANEWON	NO.	KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	LUAS KAPANEWON (km²)	PERSENTASE LUAS KAPANEWON (%)	LUAS KALURAHAN (km²)
1.	34.01.01	Temon				36,49	6,32	
			1.	34.01.01.2001	Jangkaran			3,51
			2.	34.01.01.2002	Sindutan			3,06
			3.	34.01.01.2003	Palihan			3,64
			4.	34.01.01.2004	Glagah			6,02
			5.	34.01.01.2005	Kalidengen			1,53
			6.	34.01.01.2006	Plumbon			3,06
			7.	34.01.01.2007	Kedundang			1,43
			8.	34.01.01.2008	Demen			0,96
			9.	34.01.01.2009	Kulur			2,83
			10.	34.01.01.2010	Kaligintung			2,48
			11.	34.01.01.2011	Temon Wetan			2,16
			12.	34.01.01.2012	Temon Kulon			1,55
			13.	34.01.01.2013	Kebonrejo			1,76
			14.	34.01.01.2014	Janten			1,23
			15.	34.01.01.2015	Karangwuluh			1,27
2.	34.01.02	Wates				32,68	5,66	
			-	-	Wates			4,55
			16.	34.01.02.2001	Karangwuni			7,16
			17.	34.01.02.2002	Sogan			2,51
			18.	34.01.02.2003	Kulwaru			2,52
			19.	34.01.02.2004	Ngestiharjo			2,53
			20.	34.01.02.2005	Bendungan			3,42
			21.	34.01.02.2006	Triharjo			4,84
			22.	34.01.02.2007	Giripeni			5,15
3.	34.01.03	Panjatan				44,17	7,65	

NO.	KODE KAPANEWON	NAMA KAPANEWON	NO.	KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	LUAS KAPANEWON (km²)	PERSENTASE LUAS KAPANEWON (%)	LUAS KALURAHAN (km²)
			23.	34.01.03.2001	Garongan			6,25
			24.	34.01.03.2002	Pleret			6,37
			25.	34.01.03.2003	Bugel			6,35
			26.	34.01.03.2004	Kanoman			2,27
			27.	34.01.03.2005	Depok			2,67
			28.	34.01.03.2006	Bojong			3,80
			29.	34.01.03.2007	Tayuban			2,08
			30.	34.01.03.2008	Gotakan			3,32
			31.	34.01.03.2009	Panjatan			1,19
			32.	34.01.03.2010	Cerme			3,89
			33.	34.01.03.2011	Krembangan			5,98
4.	**34.01.04**	**Galur**				**32,36**	**5,61**	
			34.	34.01.04.2001	Banaran			8,89
			35.	34.01.04.2002	Kranggan			2,29
			36.	34.01.04.2003	Nomporejo			1,79
			37.	34.01.04.2004	Karangsewu			9,19
			38.	34.01.04.2005	Tirtorahayu			5,70
			39.	34.01.04.2006	Pandowan			1,38
			40.	34.01.04.2007	Brosot			3,12
5.	**34.01.05**	**Lendah**				**37,55**	**6,51**	
			41.	34.01.05.2001	Wahyuharjo			1,70
			42.	34.01.05.2002	Bumirejo			8,73
			43.	34.01.05.2003	Jatirejo			6,28
			44.	34.01.05.2004	Sidorejo			8,75
			45.	34.01.05.2005	Gulurejo			6,08
			46.	34.01.05.2006	Ngentakrejo			6,02
6.	**34.01.06**	**Sentolo**				**53,83**	**9,33**	

NO.	KODE KAPANEWON	NAMA KAPANEWON	NO.	KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	LUAS KAPANEWON (km²)	PERSENTASE LUAS KAPANEWON (%)	LUAS KALURAHAN (km²)
			47.	34.01.06.2001	Demangrejo			3,46
			48.	34.01.06.2002	Srikayangan			7,33
			49.	34.01.06.2003	Tuksono			10,77
			50.	34.01.06.2004	Salamrejo			4,42
			51.	34.01.06.2005	Sukoreno			10,13
			52.	34.01.06.2006	Kaliagung			7,13
			53.	34.01.06.2007	Sentolo			5,91
			54.	34.01.06.2008	Banguncipto			4,69
7.	**34.01.07**	**Pengasih**				**57,98**	**10,04**	
			55.	34.01.07.2001	Tawangsari			3,18
			56.	34.01.07.2002	Karangsari			12,48
			57.	34.01.07.2003	Kedungsari			5,40
			58.	34.01.07.2004	Margosari			4,86
			59.	34.01.07.2005	Pengasih			6,18
			60.	34.01.07.2006	Sendangsari			11,83
			61.	34.01.07.2007	Sidomulyo			14,06
8.	**34.01.08**	**Kokap**				**70,16**	**12,16**	
			62.	34.01.08.2001	Hargomulyo			14,82
			63.	34.01.08.2002	Hargorejo			15,45
			64.	34.01.08.2003	Hargowilis			13,17
			65.	34.01.08.2004	Kalirejo			13,19
			66.	34.01.08.2005	Hargotirto			13,54
9.	**34.01.09**	**Girimulyo**				**55,31**	**9,58**	
			67.	34.01.09.2001	Jatimulyo			16,72
			68.	34.01.09.2002	Giripurwo			15,25
			69.	34.01.09.2003	Pendoworejo			9,82
			70.	34.01.09.2004	Purwosari			13,51

NO.	KODE KAPANEWON	NAMA KAPANEWON	NO.	KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	LUAS KAPANEWON (km²)	PERSENTASE LUAS KAPANEWON (%)	LUAS KALURAHAN (km²)
10.	**34.01.10**	**Nanggulan**				**39,11**	**6,78**	
			71.	34.01.10.2001	**Banyuroto**			7,78
			72.	34.01.10.2002	**Donomulyo**			10,06
			73.	34.01.10.2003	**Wijimulyo**			6,46
			74.	34.01.10.2004	**Tanjungharjo**			5,83
			75.	34.01.10.2005	**Jatisarono**			4,36
			76.	34.01.10.2006	**Kembang**			4,62
11.	**34.01.11**	**Samigaluh**				**66,32**	**11,49**	
			77.	34.01.11.2001	**Kebonharjo**			7,33
			78.	34.01.11.2002	**Banjarsari**			8,44
			79.	34.01.11.2003	**Purwoharjo**			9,70
			80.	34.01.11.2004	**Sidoharjo**			11,99
			81.	34.01.11.2005	**Gerbosari**			11,03
			82.	34.01.11.2006	**Ngargosari**			7,02
			83.	34.01.11.2007	**Pagerharjo**			10,81
12.	**34.01.12**	**Kalibawang**				**51,25**	**8,88**	
			84.	34.01.12.2001	**Banjararum**			11,97
			85.	34.01.12.2002	**Banjarasri**			10,99
			86.	34.01.12.2003	**Banjarharjo**			12,52
			87.	34.01.12.2004	**Banjaroyo**			15,77
Kabupaten Kulon Progo (Total)						***577,22***	***100,00***	***577,22***

Keterangan:

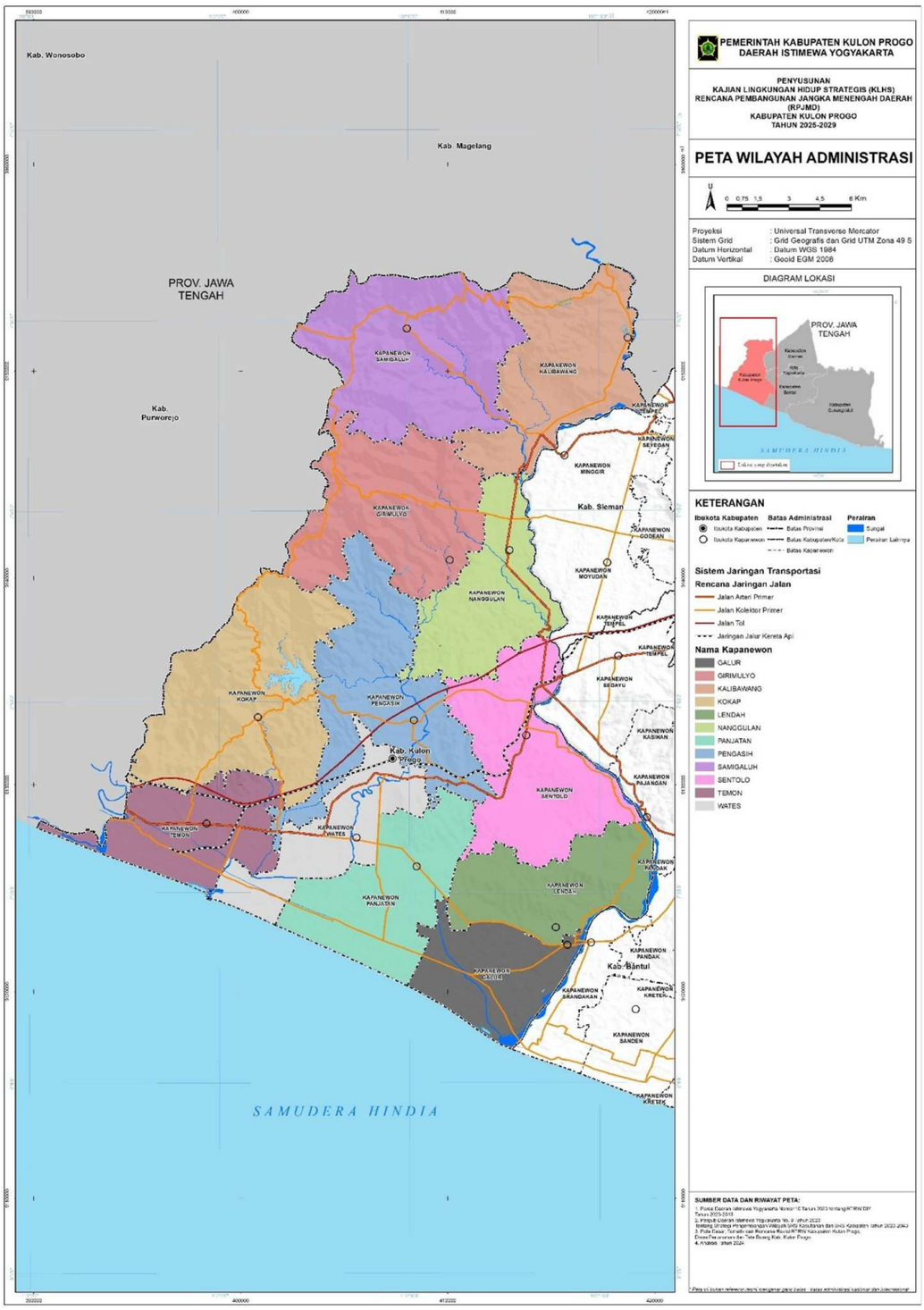
- Baris berwarna kuning tua, menunjukkan data kapanewon.
- Kolom *Luas Kalurahan (km²)* disajikan menggunakan skala warna, semakin kontras menunjukkan angka yang semakin luas.

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025

Secara astronomis, Kabupaten Kulon Progo terletak antara 7°38'30" hingga 7°58'3" Lintang Selatan dan 110°1'37" hingga 110°16'26" Bujur Timur. Sementara itu, secara geografis, wilayah ini berada di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah utara: berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebelah timur: berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul;
3. Sebelah selatan: berbatasan dengan Samudera Hindia;
4. Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Letak geografis Kabupaten Kulon Progo tergolong strategis, karena posisinya sebagai penghubung antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah barat Provinsi Jawa Tengah. Keunggulan ini memberikan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah secara menyeluruh. Gambaran lebih lanjut mengenai letak geografis dan batas wilayah administratif Kabupaten Kulon Progo ditunjukkan pada Gambar 2.1.1.1-1.



Gambar 2.1.1.1-1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Bapperida Kulon Progo, 2025

Kabupaten Kulon Progo memiliki garis pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, yang membuka peluang strategis dalam pengembangan sektor perdagangan serta peningkatan konektivitas internasional, termasuk potensi hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga seperti Australia. Letak geostrategis ini turut memperkuat aksesibilitas wilayah dan mendukung integrasi perdagangan serta hubungan antarwilayah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Posisi geospasial Kulon Progo juga diperkuat dengan keberadaan Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) di Kapanewon Temon yang menjadi simpul

konektivitas udara serta berpotensi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat DIY. Jalur wisata yang menghubungkan YIA dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur di Kabupaten Magelang semakin mempertegas peran Kulon Progo sebagai koridor pariwisata dan layanan penunjang skala internasional.

Selain itu, pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang melintasi kawasan pesisir Kulon Progo menciptakan akses distribusi baru bagi barang dan jasa menuju wilayah selatan Pulau Jawa. Keberadaan infrastruktur ini memperkuat posisi Kulon Progo sebagai simpul pertumbuhan ekonomi strategis, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara menyeluruh.

Keunggulan posisi wilayah Kulon Progo menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan karakteristik fisik dan topografi yang beragam. Secara umum, wilayah ini terbagi menjadi tiga kawasan berdasarkan elevasi: kawasan pesisir (0–100 mdpl), kawasan daratan (100–500 mdpl), dan kawasan pegunungan (500–1.000 mdpl). Setiap kawasan memiliki karakteristik spesifik yang mendukung pengembangan sektor unggulan secara geografis dan sektoral. Wilayah pesisir berpotensi untuk sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari; kawasan daratan mendukung pertanian, permukiman, serta infrastruktur dasar; sementara kawasan pegunungan berperan penting dalam konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya air, dan ekowisata berbasis alam.

Keterhubungan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan kawasan strategis nasional maupun internasional tersebut, khususnya di bagian utara yang berbatasan langsung dengan KSPN Borobudur, menuntut penguatan tata kelola ruang dan kewilayahan secara presisi. Dalam konteks ini, penegasan batas wilayah desa/kalurahan menjadi krusial. Kejelasan batas administratif merupakan prasyarat penting dalam pembangunan wilayah yang terintegrasi, terutama untuk mendukung kepastian hukum, menghindari konflik spasial, serta menjamin efektivitas alokasi sumber daya dan pelayanan publik hingga ke tingkat lokal.

Penetapan dan penegasan batas wilayah desa/kalurahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan mendukung kelancaran pembangunan desa. Ketidakjelasan batas wilayah tidak hanya menghambat pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah dan antarwarga. Oleh sebab itu, penegasan batas desa menjadi prioritas strategis yang harus dilaksanakan secara sistematis.

Secara normatif, landasan hukum penetapan batas wilayah desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang diakui negara. Dalam konteks DIY, kewenangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang memberikan mandat khusus terhadap pengelolaan urusan pertanahan dan tata ruang, termasuk penataan batas wilayah desa/kalurahan.

Sebagai bentuk implementasi urusan pertanahan dalam kerangka keistimewaan DIY, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kalurahan secara bertahap sejak tahun 2020. Seluruh kegiatan ini dibiayai melalui Dana Keistimewaan DIY dan menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Bupati. Adapun rincian pelaksanaannya sebagai berikut:

Tahun 2020

Lokus: 7 kalurahan di Kapanewon Temon (Jangkaran, Sindutan, Kebonrejo, Janten, Karangwuluh, Glagah, dan Palihan).
Dasar: Perbup Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2021.
Catatan: Glagah dan Palihan melakukan penegasan secara mandiri karena terdampak pembangunan Bandara YIA.

Tahun 2021

Lokus: 5 kalurahan di Kapanewon Temon (Temon Kulon, Temon Wetan, Kaligintung, Kulur, Kedundang).
Dasar: Perbup Nomor 30 Tahun 2022.

Tahun 2022

Lokus: 5 kalurahan (Kalidengan, Demen, Plumbon, Sogan, Karangwuni).
Dasar: Perbup Nomor 73 Tahun 2023.

Tahun 2023

Lokus: 5 kalurahan di Kapanewon Wates (Kulwaru, Ngestiharjo, Triharjo, Bendungan, Giripeni).
Dasar: Perbup Nomor 47 Tahun 2024.
Catatan: Kegiatan juga mencakup Kelurahan Wates.

Tahun 2024

Lokus: 11 kalurahan di Kapanewon Panjatan (Garongan, Pleret, Bugel, Kanoman, Depok, Bojong, Tayuban, Gotakan, Panjatan, Cerme, Krembangan).

Tahun 2025

Fokus kegiatan: verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan verifikasi yuridis oleh Kementerian Dalam Negeri.
Tujuan: mengeliminasi error topologi, menyempurnakan peta batas digital, dan memastikan sinkronisasi dengan data spasial nasional.
Dasar: Surat Kemendagri Nomor 140/3838/BPD Tahun 2022.

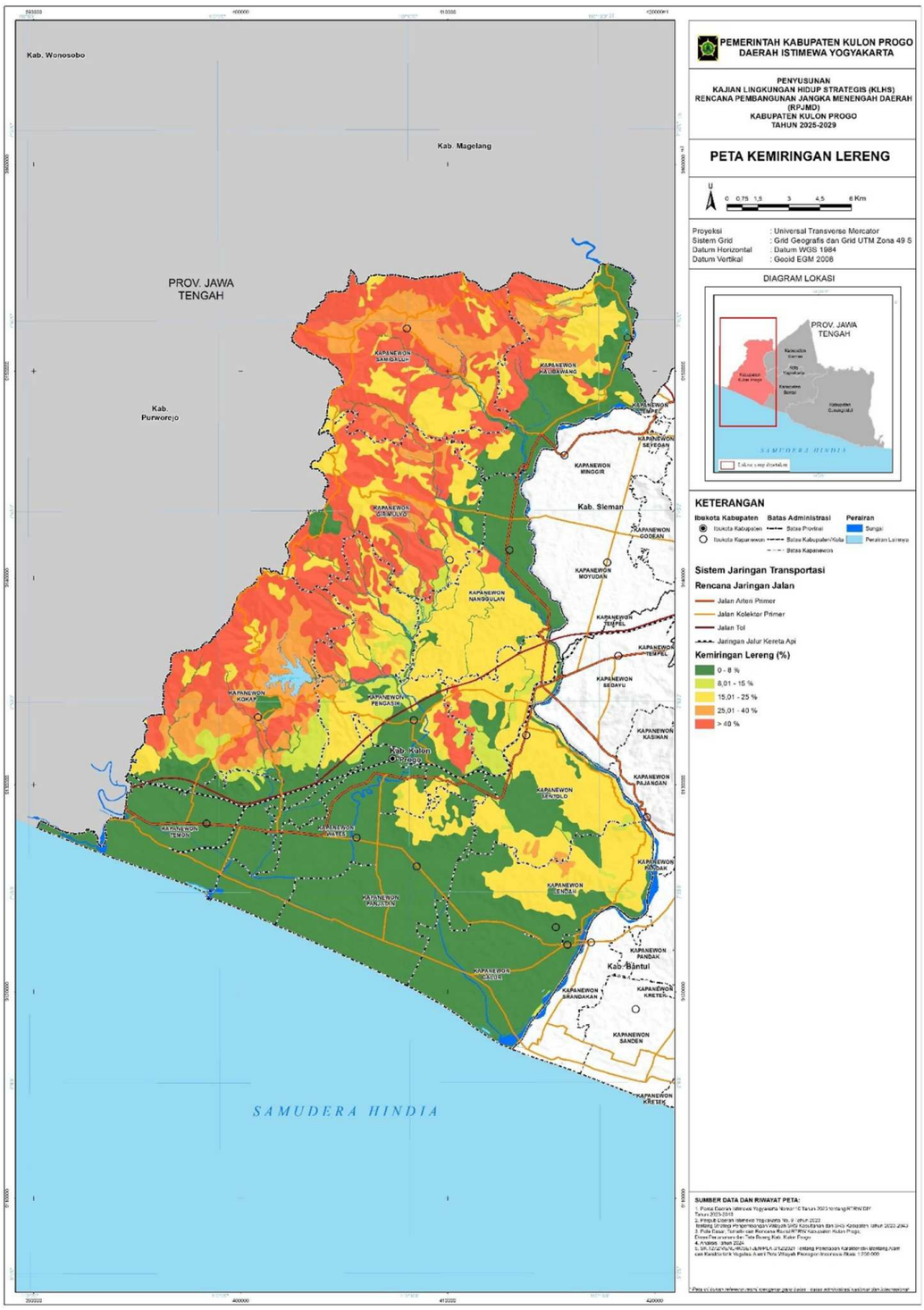
Dengan pelaksanaan yang sistematis dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk memastikan seluruh kalurahan memiliki batas wilayah yang sah, presisi, dan sesuai dengan standar geospasial nasional. Kejelasan batas desa tidak hanya memperkuat aspek legal dan administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan aset desa, penyaluran dana desa, serta pengendalian ruang dan kawasan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.1.1.1-2 Luas Wilayah berdasarkan Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024

NO.	KEMIRINGAN LERENG	LUAS (km²)	PERSENTASE (%)
1	**0–8,00%**	242,56	42,02
2	**8,01–15,00%**	22,01	3,81
3	**15,01–25,00%**	146,59	25,40
4	**25,01–40,00%**	48,31	8,37
5	**> 40,00%**	117,75	20,40
-	**Kab. Kulon Progo**	**577,22**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kulon Progo 2025-2029, diolah

Kemiringan lereng dan ketinggian lahan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan perencanaan ruang dan investasi infrastruktur. Sekitar 40,11% wilayah Kulon Progo memiliki kemiringan <2°, yang sangat sesuai untuk pengembangan kawasan terbangun. Sebaliknya, wilayah dengan kemiringan lereng >40° mencapai 18,73%, yang umumnya berada di kawasan barat seperti Kokap, Samigaluh, Kalibawang, dan Girimulyo. Wilayah-wilayah ini memerlukan pendekatan pembangunan yang adaptif terhadap risiko bencana geologi dan lingkungan. Distribusi kelas lereng di Kabupaten Kulon Progo secara spasial dapat diamati pada Peta Gambar 2.1.1.1-2.



Gambar 2.1.1.1-2 Peta Kelas Kemiringan Lereng Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Peta Tematik RTRW DIY 2023–2043

Tabel 2.1.1.1-3 Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024

NO.	KETINGGIAN LAHAN	KETERANGAN	NO.	CAKUPAN KAPANEWON
A.	**500–1000 m dpl**	Perbukitan tinggi, kaki gunung	1	Kapanewon Girimulyo
			2	Kapanewon Kokap*
			3	Kapanewon Samigaluh
			4	Kapanewon Kalibawang
B.	**100–500 m dpl**	Perbukitan rendah	5	Kapanewon Sentolo
			6	Kapanewon Pengasih
			7	Kapanewon Nanggulan
			8	Kapanewon Kokap*
C.	**0–100 m dpl**	Dataran rendah, lembah, pesisir	9	Kapanewon Temon
			10	Kapanewon Wates
			11	Kapanewon Panjatan
			12	Kapanewon Galur
			13	Kapanewon Lendah

Sumber: KLHS RPJMD Kulon Progo 2025-2029, diolah

Berdasarkan ketinggian lahan, sebagian besar wilayah Kulon Progo berada di rentang 100-500 m dpl (33%), yang menjadi zona potensial untuk sektor pertanian dan permukiman. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 m dpl (11,37%) memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui konservasi dan sebagai penyangga wilayah tangkapan air.

Pemahaman terhadap variasi topografi dan ketinggian wilayah menjadi fondasi penting dalam merumuskan strategi pembangunan berbasis wilayah *(place-based development)*, agar intervensi pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tabel 2.1.1.1-4 Pengelompokan Batuan Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Kulon Progo

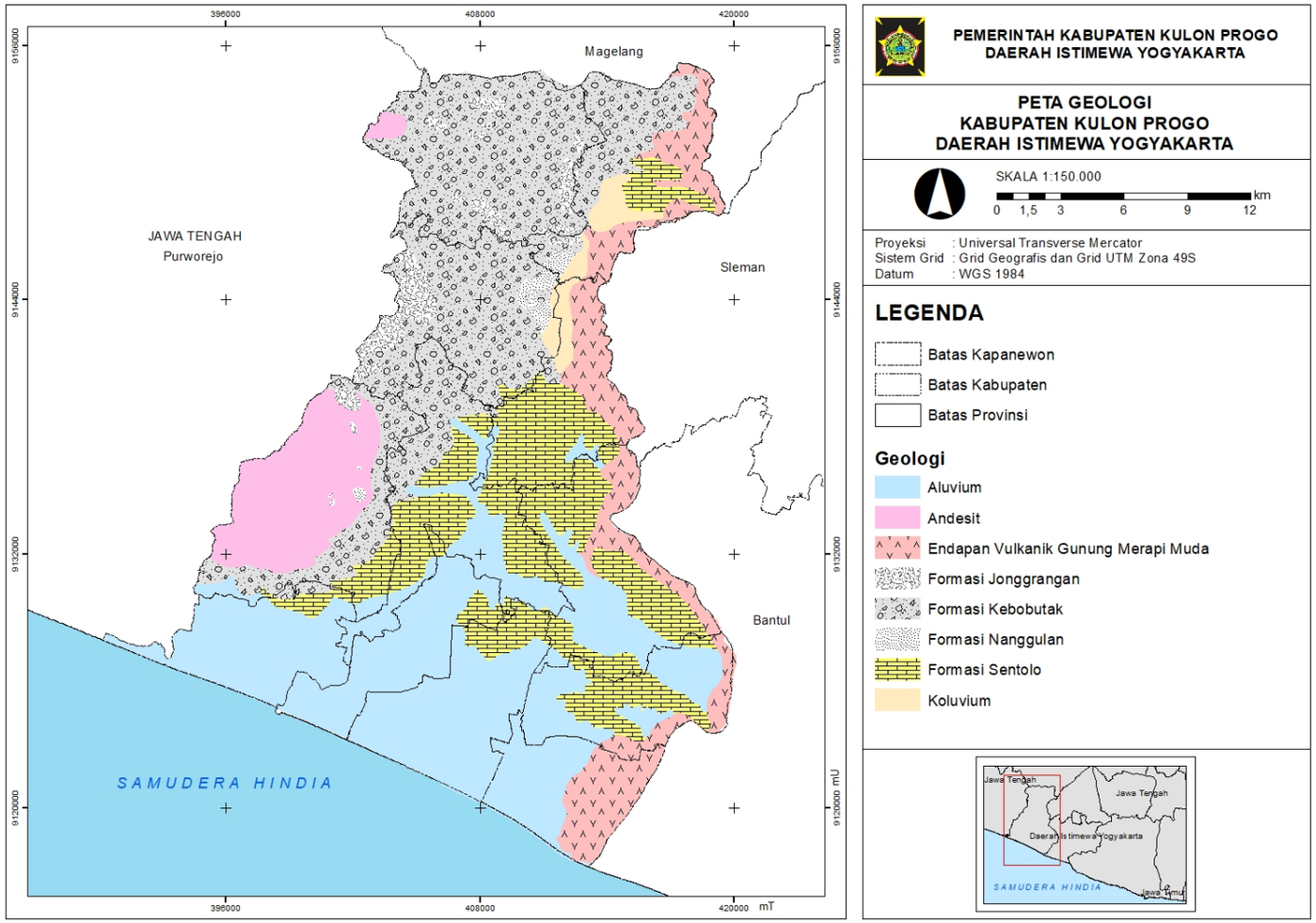
NO.	KAPANEWON	LUAS SATUAN BATUAN (ha)				LUAS TOTAL (ha)
		ENDAPAN GUNUNG API	BATUAN SEDIMEN	BATUAN GUNUNG API	BATUAN INTRUSI	
1	Temon	3.688,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00
2	Wates	3.063,00	138,00	0,00	0,00	3.201,00
3	Panjatan	3.872,00	588,00	0,00	0,00	4.460,00
4	Galur	2.229,00	0,00	1.063,00	0,00	3.292,00
5	Lendah	2.009,00	1.075,00	475,00	0,00	3.559,00
6	Sentolo	3.165,00	1.175,00	925,00	0,00	5.265,00
7	Pengasih	4.342,00	1.825,00	0,00	0,00	6.167,00
8	Kokap	550,00	4.230,00	0,00	2.600,00	7.380,00
9	Girimulyo	125,00	5.366,00	0,00	0,00	5.491,00
10	Nanggulan	250,00	2.736,00	975,00	0,00	3.961,00
11	Samigaluh	0,00	6.929,00	0,00	0,00	6.929,00
12	Kalibawang	375,00	3.971,00	950,00	0,00	5.296,00
-	**Kab. Kulon Progo**	**23.668,00**	**28.033,00**	**4.388,00**	**2.600,00**	**58.689,00**
-	**Persentase (%)**	**40,33**	**47,77**	**7,48**	**4,43**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kulon Progo 2025-2029, diolah

Dari aspek geologi, Kabupaten Kulon Progo memiliki struktur batuan yang kompleks dan bervariasi, mencakup formasi perlipatan, sesar regional maupun lokal, serta kekar batuan yang tersebar di sejumlah kapanewon. Keberadaan struktur geologi ini berimplikasi pada risiko bencana geologi seperti gempa bumi, namun juga menyimpan potensi pemanfaatan sumber daya mineral dan air tanah.

Sebaran formasi batuan di wilayah ini terdiri dari endapan gunung api (40,37%), batuan sedimen (47,81%), batuan gunung api tua (7,48%), dan batuan intrusi (4,43%). Selain sebagai aset geologi, formasi ini juga menjadi basis bagi perencanaan penggunaan lahan, konservasi kawasan lindung, hingga pemanfaatan ekonomi berbasis sumber daya alam secara bijaksana.

Pemahaman terhadap kondisi geologi dan stratigrafi menjadi penting tidak hanya dalam eksplorasi potensi sumber daya, tetapi juga dalam mitigasi risiko dan pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur strategis. Karakteristik geologi wilayah Kabupaten Kulon Progo secara spasial dapat dilihat pada Peta Gambar 2.1.1.1-3.



Gambar 2.1.1.1-3 Peta Geologi Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

Kabupaten Kulon Progo memiliki susunan stratigrafi yang cukup kompleks, merepresentasikan sejarah geologi yang panjang serta beragam. Stratigrafi ini terdiri atas beberapa satuan formasi geologi yang berbeda umur, litologi, dan ketebalannya, yang mencerminkan proses pembentukan wilayah ini dari masa ke masa. Secara lebih rinci, stratigrafi Kabupaten Kulon Progo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Formasi Nanggulan, merupakan formasi tertua di daerah Pegunungan Kulon Progo. Batuan dari Formasi Nanggulan terdiri atas batupasir dengan lignit, napal pasiran, batulempung dengan konkresi limonit, sisipan napal dan batugamping, batupasir, serta tuff yang kaya akan fosil foraminifera dan moluska. Ketebalan formasi ini diperkirakan sekitar 300 meter.
2. Formasi Andesit Tua, tersusun atas breksi andesit, tuff, tuff lapilli, aglomerat, dan aliran lava andesit. Formasi ini membentuk gunung api tua di daerah ini, seperti Gunung Gajah, Gunung Ijo, dan Gunung Menoreh. Umur formasi ini diperkirakan berasal dari Oligosen Atas hingga Miosen Bawah.
3. Formasi Kaligesing, terdiri atas breksi laharik dengan sisipan lava andesit dan batu pasir tufaan. Berumur Oligosen, formasi ini menumpang di atas Formasi Nanggulan.
4. Formasi Dukuh, tersusun atas breksi, batupasir kerikil, batu gamping, dan batu lempung. Formasi ini berumur Oligo-Miosen dan ditemukan di daerah Dukuh, Kapanewon Samigaluh.
5. Formasi Jonggrangan, terdiri atas konglomerat, napal tufaan, batu pasir gampingan dengan sisipan lignit. Berumur Miosen Tengah, formasi ini terletak di atas Formasi Andesit Tua.
6. Formasi Sentolo, terdiri atas aglomerat, napal, dan batu gamping berlapis. Umur formasi ini diperkirakan berasal dari Miosen Tengah dan memiliki ketebalan sekitar 950 meter.
7. Endapan Vulkanik Kuarter, merupakan endapan Gunung Merapi yang terdiri atas breksi dengan sisipan lava dan endapan lahar. Formasi ini berumur Pliosen-Pleistosen.
8. Endapan Aluvial, merupakan endapan kerikil, pasir, lanau, lempung, dan bongkah yang tersebar di sepanjang sungai dan dataran pantai.

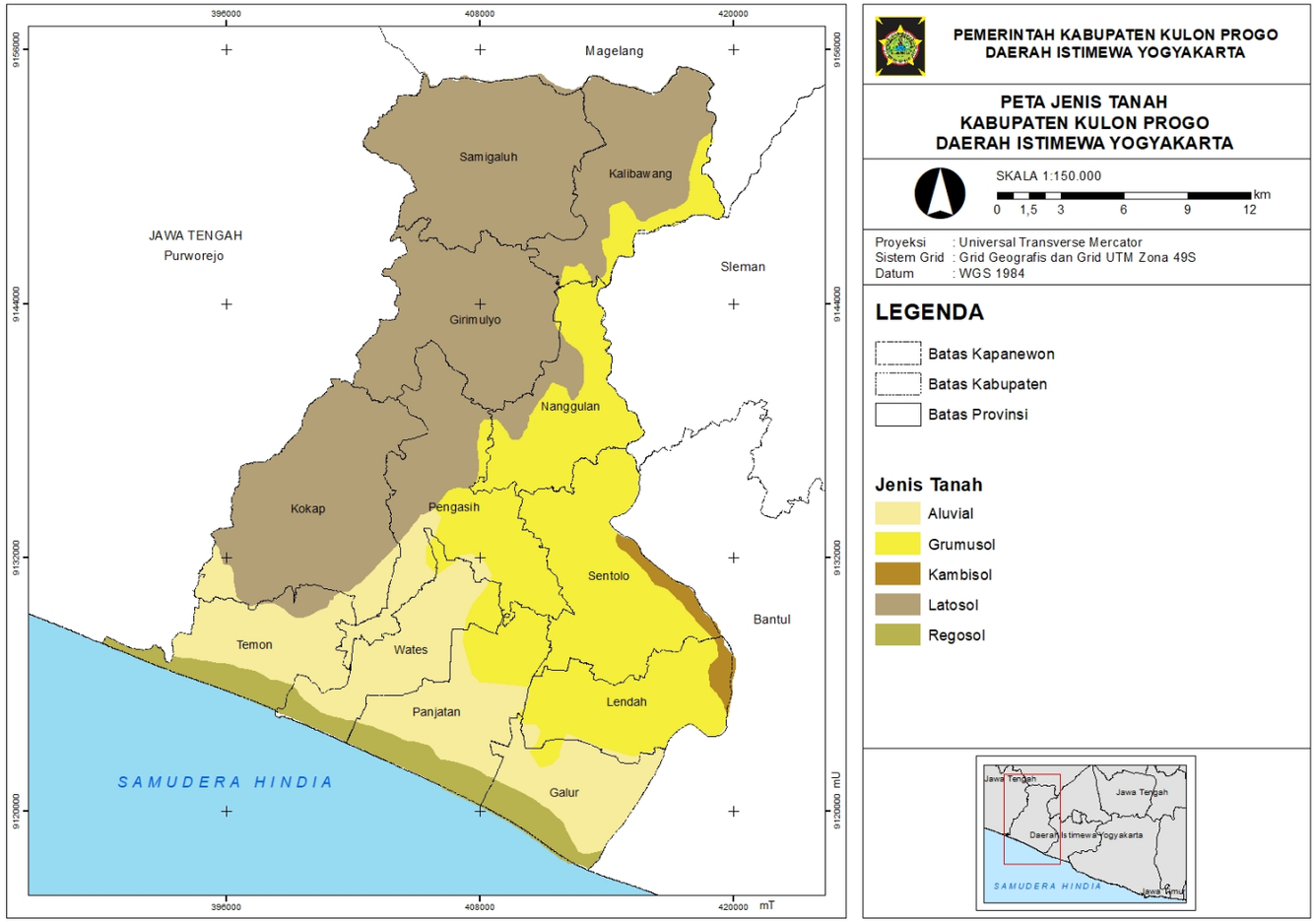
Pemahaman terhadap susunan stratigrafi ini sangat penting dalam mendukung kajian geologi, mengetahui sejarah pembentukan wilayah, serta menilai potensi sumber daya alam di masing-masing formasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan komprehensif mengenai karakteristik tiap formasi batuan tersebut, disajikan dalam Tabel 2.1.1.1-5 Stratigrafi Formasi Geologi Kabupaten Kulon Progo berikut ini:

Tabel 2.1.1.1-5 Stratigrafi Formasi Geologi di Kabupaten Kulon Progo

NO.	UMUR	FORMASI	DESKRIPSI LITOLOGI	KETEBALAN (m)
1	***Kuarter***	Aluvium	Kerikil, pasir, lanau dan lempung sepanjang sungai dan dataran pantai.	100
2	***Pliosen - Pleistosen***	Endapan Vulkanik Kuarter	breksi sisipan lava dan endapan lahar	20
3	***Miosen Bawah***	Sentolo	Bagian atas batu gamping berlapis baik kaya foraminifera Bagian bawah konglomerat alas diatasnya napal tufaan bersalangan dengan vitriks tuff	950
4	***Miosen Bawah***	Jonggrangan	Bagian atas batu gamping berlapis ke arah atas menjadi batu gamping koral Bagian bawah konglomerat di atasnya napal tufaan dan bapsir gampingan berselang-seling dengan lignit	250
5	***Oligo Miosen***	Dukuh	Perselangselingan antara breksi, batu pasir kerikilan, batu gamping dan batu lempung	660
6	***Oligosen***	Kaligesing	breksi laharik dengan sisipan lava andesit, batu pasir tufaan	600
7	***Oligo Miosen***	Andesit Tua	Breksi andesit, tuf, lapilli tuf, aglomerat dan berselingan dengan lava andesit Terdapat fragmen batuan lebih tua.	660
8	***Eosen Atas Oligosen***	Nanggulan	Batu pasir seling-seling dengan lignit, napal pasiran, batu lempung gampingan struktur konkresi, selang-seling napal dan batu gamping, batu pasir dan tuf, kaya foraminifera dan moluska foraminifera dan moluska	300

Sumber: KLHS RPJMD Kulon Progo 2025-2029, diolah

Sebaran jenis tanah di Kabupaten Kulon Progo ditampilkan dalam Gambar 2.1.1.1-4 yang menunjukkan variasi jenis tanah yang memengaruhi potensi dan pemanfaatan ruang wilayah. Jenis tanah tersebut antara lain; aluvial, grumusol, kambisol, latosol, dan regosol, dengan persebaran yang mencerminkan karakteristik geologis, topografis, serta proses pembentukan tanah yang berbeda-beda di setiap zona wilayah.



Gambar 2.1.1.1-4 Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Bapperida Kulon Progo 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.1.2.A Sumber Daya Air

Berdasarkan data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Opak Progo, sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo termasuk ke dalam cakupan DAS Progo dan DAS Serang, dengan sebagian kecil wilayah yang berada dalam DAS Bogowonto. Sementara itu, menurut Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Kabupaten Kulon Progo berada dalam dua Wilayah Sungai (WS) utama, yaitu Wilayah Sungai Serang-Bogowonto dan Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang.

Kabupaten Kulon Progo memiliki cadangan sumber daya air yang cukup besar, dengan kontribusi utama berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan DAS Serang. Berdasarkan *Neraca Sumber Daya Air Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 dan 2022,* DAS Progo merupakan sistem utama penyedia kebutuhan air di wilayah ini, sekaligus berperan penting dalam suplai air untuk Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Hal ini diperkuat oleh luasnya daerah tangkapan DAS Progo yang sebagian besar berada di luar batas administratif DIY.

Pada tahun 2022, potensi sumber daya air di DAS Progo tercatat sebesar 2.021,33 juta m^3, dengan kebutuhan sebesar 279,77 juta m^3, menghasilkan saldo positif sebesar 1.741,56 juta m^3. Sebelumnya, pada tahun 2018, saldo positif DAS Progo mencapai 1.431,81 juta m^3, menunjukkan tren peningkatan ketersediaan air dalam empat tahun terakhir.

Sementara itu, DAS Serang memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan DAS Progo. Pada tahun 2022, potensi air di DAS Serang tercatat sebesar 209,03 juta m^3 dengan kebutuhan sebesar 126,04 juta m^3, sehingga menghasilkan saldo positif sebesar 82,99 juta m^3. Dibandingkan tahun 2018, terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik dari sisi potensi maupun ketersediaan air bersih.

Perbandingan data tahun 2018 dan 2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan potensi air di kedua DAS tersebut, yang menunjukkan adanya peluang bagi pengembangan sektor pertanian, perikanan, serta penyediaan air baku bagi permukiman dan kawasan industri. Neraca sumber daya air yang positif ini mencerminkan kapasitas daya dukung wilayah dalam menghadapi pertumbuhan kebutuhan air di masa mendatang, sepanjang pengelolaan sumber daya dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

2.1.1.2.B Sumber Daya Mineral

Secara geologis, Kabupaten Kulon Progo memiliki kekayaan sumber daya mineral yang sangat variatif dan tersebar di berbagai wilayah kapanewon. Karakteristik batuan dan struktur geologi wilayah, seperti keberadaan formasi andesit tua, batuan sedimen, dan endapan vulkanik, menjadikan daerah ini kaya akan bahan galian industri, logam, serta bahan bangunan. Potensi tersebut berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor konstruksi, energi, dan industri pengolahan.

Tabel 2.1.1.2.B-1 Bahan Galian yang Memiliki Nilai Strategis di Kabupaten Kulon Progo

NO.	BAHAN GALIAN	DESKRIPSI
1	**Gipsum**	Lokasi sebaran bahan galian gipsum ini terdapat di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah cadangan tereka sebesar 538.961 m3. Bahan galian gipsum ini digunakan sangat luas dalam berbagai industri seperti industri konstruksi, kedokteran , industri semen dan industri keramik.
2	**Batu Pasir**	Lokasi sebaran bahan galian pasir terdapat Kabupaten Kulon Progo : Kapanewon Samigaluh dengan jumlah cadangan tereka sebesar 111.020.000 ton. Batu pasir merupakan bahan umum untuk bangunan dan jalan. Karena kekerasan dan kesamaan ukuran butirannya, batupasir menjadi bahan yang sangat baik untuk dibuat menjadi batu asah (grindstone) yang digunakan untuk menajamkan pisau dan berbagai kegunaan lainnya.
3	**Pasir**	Lokasi sebaran bahan galian pasir terdapat di Kabupaten Kulon Progo : sepanjang aliran Sungai Progo dengan jumlah cadangan tereka sebesar 2.177.902 m3. Kegunaan bahan galian sangat luas untuk bahan konstruksi bangunan dan campuran semen.
4	**Tras**	Lokasi sebaran bahan galian tras terdapat di Kabupaten Kulon Progo : Kapanewon Kokap dengan jumlah cadangan tereka sebesar 1.593.480 m3; Kapanewon Samigaluh dengan jumlah cadangan tereka sebesar 155.875.300 m3. Kegunaan tras adalah untuk bahan baku batako, industri semen, campuran bahan bangunan dan semen alam
5	**Batu Lanau Tufan**	Lokasi sebaran bahan galian Batulanau tufan terdapat di Kabupaten Kulon Progo : Kapanewon Samigaluh dengan jumlah cadangan tereka sebesar 133.560 m3
6	**Pasir Besi**	Lokasi sebaran terdapat di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah cadangan tereka sebesar 27.300.000 ton. Kegunaannya pasir besi ini selain untuk industri logam besi juga telah banyak dimanfaatkan pada industri semen. Selain itu manfaat dan kegunaan pasir besi adalah bahan dasar untuk tinta kering (toner) pada mesin fotokopi dan tinta laser, bahan utama untuk pita kaset, pewarna serta campuran (filter) untuk cat, bahan dasar untuk industri magnet permanen.
7	**Bentonit**	Lokasi sebaran bahan galian bentonit terdapat di Kabupaten Kulon Progo : Kapanewon Nanggulan dengan jumlah cadangan tereka sebesar 583.125 m3
8	**Mangan**	Lokasi penyebaran bahan galian mangan terdapat di Kabupaten Kulon Progo di Kapanewon Nanggulan dan Kapanewon Kokap dengan jumlah cadangan tereka sebesar 286.000 m3
9	**Batu Gamping**	Lokasi penyebaran bahan galian batu gamping terdapat di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah cadangan tereka sebesar 923.307.340 m3
10	**Emas**	Lokasi penyebaran bahan galian emas terdapat di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah cadangan 1930.215 ton.
11	**Tanah Liat**	Lokasi penyebarannya sangat luas di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah cadangan tereka sebesar 19.914.984 m3. Kegunaan bahan galian Tanah Liat untuk industri batu bata dan genteng
12	**Andesit**	Lokasi penyebaran bahan galian andesit terdapat di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah cadangan tereka sebesar 4.661.363.119 m3. Kegunaan andesit antara lain untuk bahan bangunan dan pondasi jalan. Dalam masyarakat andesit sering disebut batu gunung.
13	**Breksi Andesit**	Lokasi penyebaran bahan galian breksi andesit terdapat di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah cadangan tereka sebesar 130.750.000 m3
14	**Batubara**	Lokasi sebaran bahan galian batu bara terdapat di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah cadangan tereka sebesar 2.100 m3.

Sumber: KLHS RPJMD Kulon Progo 2025-2029, diolah

Secara keseluruhan, terdapat setidaknya 14 jenis bahan galian di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa diantaranya, seperti andesit, tras, dan batugamping, memiliki cadangan dalam skala besar dan bernilai ekonomi tinggi. Meski sebagian besar bahan tambang bersifat tidak terbarukan *(non-renewable)*, material seperti pasir memiliki potensi alami

untuk pulih melalui aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang merupakan sumber utama material sedimen di wilayah selatan DIY.

Pemanfaatan potensi mineral ini perlu diarahkan secara bijak dan berkelanjutan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta keseimbangan antara aspek ekonomi dan konservasi. Strategi pengelolaan sumber daya mineral yang terukur diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi daerah tanpa mengorbankan kelestarian alam jangka panjang.

2.1.1.2.C Sumber Daya Hutan

Kabupaten Kulon Progo memiliki kawasan hutan yang tersebar pada Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi, khususnya di Kelompok Hutan Kulon Progo dan Suaka Margasatwa Sermo. Kawasan ini termasuk dalam peta PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan PIPPIB Tahun 2023 Periode II. Dalam kawasan hutan lindung dan konservasi ini, fungsi utama diarahkan pada perlindungan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati, sehingga pemanfaatannya lebih difokuskan pada hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, bukan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.

Tabel 2.1.1.2.C-1 Rekapitulasi Bahan Baku Industri Kayu Tanaman Seluruh Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2023-2024

BAHAN BAKU INDUSTRI	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Kayu Tanaman	Bantul	17.540,03	11.013,90
	Gunungkidul	38.670,53	38.080,74
	Kulon Progo	**41.834,78**	**39.651,27**
	Sleman	4.566,61	5.167,00
	Yogyakarta	271,26	282,36
-	Total	102.883,21	94.195,27

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, 2025

Berdasarkan data Rekapitulasi Bahan Baku Industri Kayu Tanaman di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tabel 2.1.1.2.C-1, produksi bahan baku industri dari kayu tanaman di Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 41.834,78 m^3 pada tahun 2023, dan mengalami penurunan menjadi 39.651,27 m^3 pada tahun 2024. Penurunan sebesar sekitar 5,22 persen ini mencerminkan dinamika pasokan kayu dari hutan rakyat atau sumber-sumber produksi lain di luar kawasan hutan lindung dan konservasi.

Sebelumnya, berdasarkan perbandingan data tahun 2018 dan 2022, telah terjadi penurunan signifikan pada volume hasil hutan kayu, terutama pada jenis kayu bulat dan kayu gergajian. Kayu Bulat mengalami penurunan drastis dari 127.297,55 m^3 menjadi 2.566,26 m^3 (turun 98%), dan Kayu Gergajian dari 7.213,83 m^3 menjadi 2.982,38 m^3 (turun 59%). Produksi Kayu Hutan Rakyat juga menurun sebesar 25%, sedangkan Kayu Olahan justru mengalami kenaikan 4%.

Penurunan volume hasil hutan tersebut dapat dikaitkan dengan perubahan pola produksi dan preferensi pemanfaatan kayu rakyat, tekanan terhadap daya dukung lahan, serta meningkatnya praktik konservasi berbasis masyarakat. Namun demikian, argumen

sebelumnya yang mengaitkan langsung penurunan produksi dengan kebijakan penghentian perizinan pada kawasan konservasi dan lindung perlu diluruskan. Berdasarkan ketentuan fungsional kawasan, hutan lindung dan konservasi memang tidak diperuntukkan bagi kegiatan eksploitasi kayu, melainkan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan seperti wisata alam, konservasi air, dan penyerapan karbon.

Ke depan, strategi pengelolaan hutan di Kabupaten Kulon Progo perlu diarahkan pada pendekatan multi-fungsi yang berkelanjutan, dengan penguatan peran hutan rakyat sebagai sumber utama bahan baku industri kayu, pengembangan komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial. Di samping itu, potensi jasa lingkungan dari kawasan lindung dan konservasi dapat menjadi sumber ekonomi alternatif yang sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan dan keadilan ekologi.

2.1.1.2.D Sumber Daya Laut

Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari wilayah pengelolaan laut yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI) 573, yaitu kawasan perairan Samudra Hindia yang meliputi wilayah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara bagian barat. Penetapan wilayah ini didasarkan pada pendekatan ekologi, karakteristik geografis, serta ketersediaan sumber daya ikan, guna mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

WPP-RI 573 memiliki luas wilayah perairan sebesar 96.448.792,251 hektare, dengan kawasan konservasi seluas 4.070.626,33 hektar pada tahun 2017. Luasan ini mengalami peningkatan menjadi 4.412.312,33 hektar pada tahun 2020, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas kawasan perlindungan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/KEPMEN-KP/2016, WPP-RI 573 memiliki potensi lestari sebesar 929.330 ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebanyak 743.464 ton per tahun. Potensi lestari merupakan batas tangkapan ikan yang tetap menjaga keberlangsungan regenerasi populasi ikan di laut, sebagai bentuk pengelolaan berbasis daya dukung ekosistem.

Adapun jenis ikan dominan yang tertangkap di wilayah ini, berdasarkan Kepmen KP No.77 Tahun 2016, meliputi lemuru, cakalang, tongkol, layang, dan mandi dihang. Jenis-jenis tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan komoditas perikanan tangkap unggulan yang mendukung mata pencaharian nelayan serta industri pengolahan hasil perikanan.

Dengan keberadaan Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian dari WPP-RI 573, maka wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus memanfaatkan potensi perikanan tangkap secara berkelanjutan. Hal ini membuka peluang pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik dari sisi peningkatan produksi, pengolahan hasil laut, maupun penguatan ekonomi pesisir berbasis komunitas nelayan.

2.1.1.2.E Potensi Penyerapan Karbon

1. Potensi Penyerapan dan Perdagangan karbon dari Kawasan Hutan

Potensi penyerapan dari kawasan hutan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif dengan menyimpan karbon di dalam biomassa pohon, tanah, dan serasah. Selain memberikan manfaat ekonomi, mekanisme perdagangan karbon juga turut mendukung pelestarian lingkungan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca serta berkontribusi pada pencapaian target netral karbon *(net-zero emission)*.

Berdasarkan Buku Statistik Kehutanan DIY Tahun 2019–2021, terdapat fluktuasi dalam perhitungan nilai potensi penyerapan karbon. Pada tahun 2019, potensi penyerapan karbon di kawasan hutan Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 123.799,77 ton CO , yang terdiri dari tegakan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Dengan asumsi nilai karbon sebesar Rp1.000,00 per ton CO , maka potensi perdagangan karbon pada tahun tersebut mencapai Rp123.799.770,00. Namun demikian, pada tahun 2021, perhitungan hanya dilakukan pada kawasan hutan lindung, dengan hasil potensi penyerapan sebesar 21.884,32 ton CO , yang ekuivalen dengan nilai potensi perdagangan karbon sebesar Rp21.884.320,00.

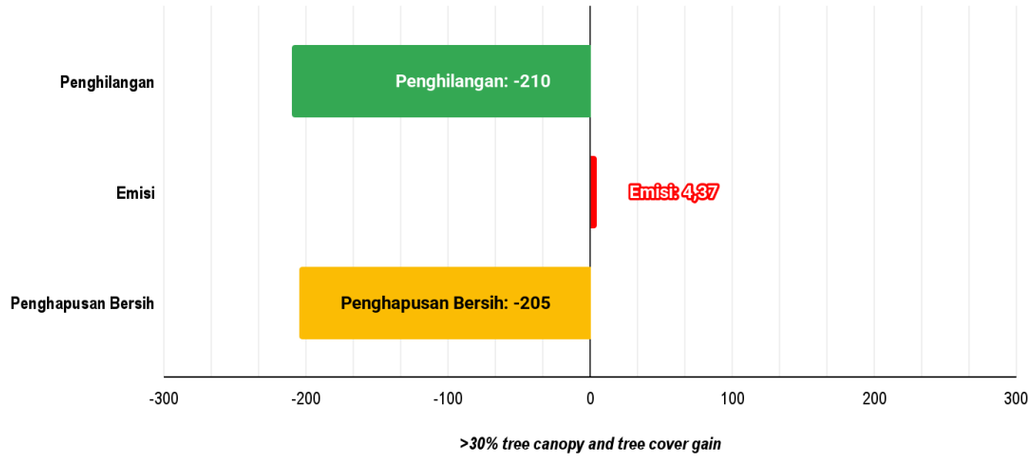
Tabel 2.1.1.2.E-1 Potensi Penyerapan dan Perdagangan Karbon dari Kawasan Hutan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019-2021

URAIAN	DETAIL URAIAN	SATUAN	TAHUN		
			2019	2020	2021
Luas Kawasan Hutan yang Telah Diidentifikasi					
	Hutan Konservasi	ha	184,99	181,00	184,99
	Hutan Lindung	ha	255,61	254,90	-
	Hutan Produksi	ha	605,89	601,60	-
	Total	ha	1.046,49	1.037,50	184,99
Potensi Penyerapan dan Perdagangan Karbon					
	Potensi Penyerapan Karbon	ton CO2	123.799,77	122.736,25	21.884,32
	Potensi Perdagangan Karbon (x Rp 1000/ton)	Rp	123.799.770,00	122.736.250,00	21.884.320,00

Sumber: Buku Statistik Kehutanan DLHK DIY

Dengan pendekatan perhitungan yang serupa, pada tahun 2024, potensi penyerapan karbon dari hutan di Kabupaten Kulon Progo diperkirakan mencapai 51.943,17 ton CO . Potensi ini berasal dari kawasan Suaka Margasatwa seluas 185,10 ha dan Hutan Lindung seluas 253,98 ha. Jika mengacu pada harga perdagangan karbon di Indonesia pada bulan Oktober 2024, yakni sebesar Rp58.000,00 per ton CO , maka nilai potensi perdagangan karbon dari kawasan hutan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp3.012.703.925,00.

Berdasarkan data dari *Global Forest Watch*, selama periode tahun 2001 hingga 2024, Kabupaten Kulon Progo mengalami rata-rata emisi sebesar 4,34 kiloton (kt) CO e per tahun akibat hilangnya tutupan hutan dengan tingkat kanopi lebih dari 30 persen. Secara kumulatif, emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer selama periode tersebut mencapai 99,9 kt CO e.



Gambar 2.1.1.2.E-1 Grafik Fluks Gas Rumah Kaca dari Kawasan Hutan di Kabupaten Kulon Progo (rata-rata tahunan, dalam ktCO e, periode 2001–2024)

Sumber:Global Forest Watch (GFW)

Gambar 2.1.1.2.E-1 menunjukkan rata-rata tahunan fluks gas rumah kaca dari kawasan hutan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2001–2024. Kawasan hutan didefinisikan sebagai area dengan lebih dari 30% tutupan kanopi pohon, sebagaimana dimaksud dalam metodologi *Global Forest Watch.* Selama periode tersebut, hutan di Kabupaten Kulon Progo menghasilkan emisi rata-rata sebesar 4,37 ktCO e per tahun dan penyerapan sebesar -210 ktCO e per tahun, sehingga berkontribusi sebagai penyerap karbon bersih *(net carbon sink)* dengan penghapusan bersih sebesar -205 ktCO e per tahun.

Fungsi serapan karbon ini menunjukkan pentingnya upaya konservasi kawasan hutan guna mempertahankan dan meningkatkan kapasitas penyerapan karbon. Keberadaan hutan yang terjaga tidak hanya berperan dalam mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat lokal berpotensi memperoleh manfaat ekonomi melalui proyek konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, seperti pengembangan ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan penerapan praktik agroforestri yang mendukung ketahanan pangan.

Lebih lanjut, hutan menyediakan berbagai sumber daya penting seperti pangan, obat-obatan, dan bahan bangunan alami. Keberlanjutan kawasan hutan juga berdampak positif terhadap kualitas udara dan air, yang pada gilirannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan akan memperkuat rasa memiliki, meningkatkan tanggung jawab kolektif, serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah DIY tentang ekonomi hijau yang tertuang dalam Perda DIY No.1 Tahun 2024

2. Potensi Penyerapan Karbon dari Kawasan Hutan Mangrove

Mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, diantaranya adalah sebagai simpanan karbon dan penyerap karbon dioksida di Bumi. Kabupaten Kulon Progo terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kawasan mangrove di sepanjang muara Sungai Bogowonto, tepatnya di sepanjang Pantai Pasir Mendit dan keberadaannya berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Estimasi simpanan karbon dalam Hutan Mangrove Kulon Progo memiliki hasil tertinggi pada batang yaitu sebesar 45,87 ton/ha yang diikuti dengan sedimen 37,47 ton/ha dan terendah yaitu serasah daun sebesar 0,55 ton/ha. Perbandingan serapan CO2 dalam Hutan Mangrove Kulon Progo terbesar oleh *above ground* yang terdiri dari batang dan serasah daun mangrove yang mampu berkontribusi sebesar 46,43% setara 170,38 ton/ha sedangkan *below ground* yang berasal dari sedimen mampu menyerap 37,47% atau setara 137,53 ton/ha (Pratiwi, Hartoko, & Febrianto, 2023).

Tabel 2.1.1.2.E-2 Potensi Penyerapan dan Perdagangan Karbon dari Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Kulon Progo

URAIAN	DETAIL URAIAN	RATA-RATA (ton C/ha)	PERSENTASE (%)
Biomassa (ton/ha)	Batang	168,35	54,67
C-Organik (%)	Serasah Daun	2,04	0,49
Biomassa (ton/ha)	Sedimen	137,53	44,67
-	**Total Serapan CO2 (ton)**	307,91	100,00
-	**Potensi Perdagangan Karbon (x Rp 58.000/ton)***	17.858.780,00	-

Keterangan: *) nilai perdagangan karbon bulan oktober 2024 di bursa karbon indonesia

Sumber: Pratiwi, Hartoko, & Febrianto, 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.1.1.2.E-2, dapat disimpulkan bahwa Hutan Mangrove merupakan ekosistem yang sangat efektif dalam menyerap dan menyimpan karbon. Akar dan tanah di sekitar mangrove menyimpan karbon dalam jumlah besar, yang dikenal sebagai *"blue carbon"* Mangrove dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam biomassa dan tanah sehingga mengurangi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global.

2.1.1.2.F Potensi Geologi Strategis

Kabupaten Kulon Progo memiliki kekayaan geologi yang signifikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan *Geopark* Nasional Jogja. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 171.K/GL.01/MEM.G/2025 tentang Penetapan Taman Bumi *(Geopark)* Nasional Jogja, Geopark Nasional Jogja telah diakui secara nasional sebagai kawasan yang memiliki warisan geologi *(geoheritage)* yang terkait dengan aspek keragaman geologi *(geodiversity),* keanekaragaman hayati *(biodiversity),* dan keragaman budaya *(cultural diversity)*. Di wilayah Kulon Progo tersebar 5 (lima) geosite yang memiliki karakteristik geologi unik dan bernilai ilmiah tinggi di antaranya Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang, Mangan Kliripan-Karangsari, Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo, Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari, dan Goa Kiskendo.

1. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang

Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang merupakan singkapan batubara tertua di Pulau Jawa yang berumur Eosen (54-36 juta tahun lalu). Geosite ini secara administratif berada di Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.

2. **Mangan Kliripan-Karangsari**

   Mangan Kliripan-Karangsari dapat dianggap sebagai lokasi dari berbagai tipe endapan mangan yang berada pada busur vulkanik di Indonesia. Geosite ini secara administratif berada di Pedukuhan Kliripan, Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, serta Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

3. **Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo**

   Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil-Suroloyo merupakan bukti kaldera tertua di Pulau Jawa yang berumur *Oligosen-Miosen* dari Gunungapi Purba Menoreh. Gunung Kendil secara administratif terletak di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, Puncak Suroloyo secara administratif terletak di Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.

4. **Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari**

   Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari merupakan sisa Gunung Api Purba Menoreh berumur *Oligosen-Miosen,* ditunjukkan oleh endapan piroklastik yang memiliki komposisi fragmen/litik, batu apung, dan kristal *kuarsa-hornlenda. Geosite* ini secara administratif terletak di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo.

5. **Goa Kiskendo**

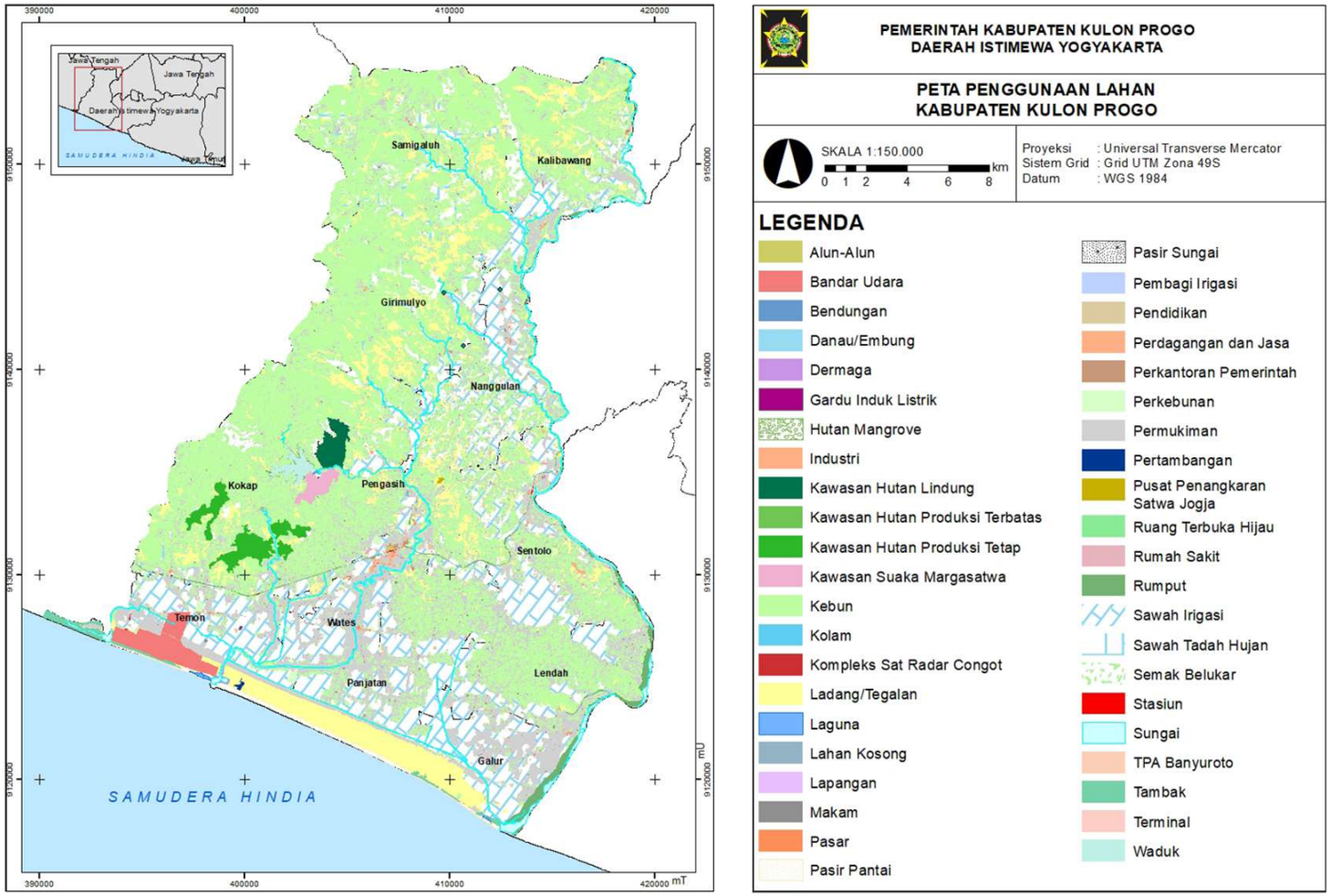
   Goa Kiskendo merupakan salah satu goa karst yang tinggi di Pulau Jawa dengan elevasi 700 mdpl. *Geosite* ini secara administratif berada di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keberadaan lima geosite ini tidak hanya menjadi aset pelestarian geologi, tetapi juga membuka peluang besar dalam pengembangan pariwisata berbasis konservasi, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari *Geopark* Nasional Jogja, *geosite* di Kulon Progo memiliki peran strategis dalam mendukung integrasi pembangunan wilayah yang berbasis potensi lokal. Pengelolaan dan pengembangan geosite ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan, serta memperkuat identitas daerah sebagai kawasan dengan nilai geologis dan ekologis yang tinggi.

2.1.1.2.G Perkembangan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo diklasifikasikan berdasarkan pendekatan penutup lahan sebagaimana diatur dalam SNI 7654:2010, yang membagi penggunaan lahan ke dalam dua kelompok utama, yaitu daerah bervegetasi dan daerah tak bervegetasi. Daerah bervegetasi terdiri atas lahan pertanian dan lahan non-pertanian, sedangkan daerah tak bervegetasi meliputi lahan terbuka, permukiman, dan perairan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, struktur penggunaan lahan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 terdiri atas 77% daerah bervegetasi dan 23% daerah tak bervegetasi. Komposisi daerah bervegetasi mencakup 73% lahan pertanian dan 4% lahan non-pertanian, sementara daerah tak bervegetasi terdiri atas 20,4% lahan permukiman, 2,3% perairan, dan 0,5% lahan terbuka. Komposisi ini menunjukkan bahwa lahan pertanian masih menjadi bentuk dominan penggunaan ruang, yang mencerminkan karakteristik wilayah dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah agraris. Sebaran spasial penggunaan lahan tersebut divisualisasikan dalam Gambar 2.1.1.2.G-1, yang memperlihatkan distribusi masing-masing kategori penggunaan lahan.



Gambar 2.1.1.2.G-1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kab.Kulon Progo, Tahun 2025

Struktur penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan konsistensi karakteristik wilayah agraris, dengan dominasi lahan kebun, permukiman, dan sawah irigasi. Adapun 10 penggunaan lahan terluas di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kelas penggunaan lahan pada tahun 2023 dan 2024 diuraikan pada tabel 2.1.1.2.G-1 berikut.

Tabel 2.1.1.2.G-1 Perkembangan Penggunaan Lahan di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2023–2024 (dalam persen)

NO.	PENGGUNAAN LAHAN	2023		2024	
		ha	%	ha	%
1	**Kebun**	25.155,62	43,59	25.218,52	43,79
2	**Permukiman**	10.449,03	18,11	10.421,25	18,10
3	**Sawah Irigasi**	9.864,50	17,09	9.881,12	17,16
4	**Ladang**	5.707,84	9,89	5.479,53	9,52
5	**Sawah Tadah Hujan**	1.358,65	2,35	1.320,05	2,29
6	**Sunga**	985,23	1,71	926,94	1,61
7	**Semak Belukar**	736,18	1,28	738,49	1,28
8	**Kawasan Hutan Produksi Tetap**	605,48	1,05	605,48	1,05
9	**Bandar Udara/Pelabuhan**	595,29	1,03	594,20	1,03
10	**Rumput**	503,21	0,87	502,88	0,87

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kab.Kulon Progo, Tahun 2025

Pada tahun 2024, lahan kebun tercatat seluas 25.218,52 hektare atau mencakup 43,79% dari total luas wilayah, menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Komponen lahan ini masih menjadi bentuk penggunaan lahan terbesar dan merepresentasikan keberlanjutan dominasi sektor pertanian tanaman tahunan. Di posisi kedua, lahan permukiman menempati 10.421,25 hektare atau 18,10%, mengalami penurunan tipis dari tahun 2023 sebesar 10.449,03 hektare (18,11%). Penurunan ini lebih disebabkan oleh adanya penyesuaian pendetailan data penggunaan lahan, bukan semata-mata karena penyusutan ruang permukiman secara fisik.

Sementara itu, penggunaan lahan sebagai sawah irigasi mencatatkan peningkatan dari 9.864,50 hektare menjadi 9.881,12 hektare (17,16%), yang dapat diartikan sebagai hasil dari perluasan lahan produktif melalui kegiatan cetak sawah baru atau perbaikan sistem irigasi yang memungkinkan konversi dari lahan sawah tadah hujan atau ladang. Di sisi lain, luasan ladang dan sawah tadah hujan justru mengalami penurunan, yang menunjukkan adanya pergeseran fungsi lahan menuju bentuk pertanian yang lebih intensif dan beririgasi.

Jenis penggunaan lahan lainnya seperti sungai, semak belukar, kawasan hutan produksi tetap, bandara/pelabuhan, dan padang rumput menunjukkan perubahan yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan stabilitas dalam fungsi ekologis dan infrastruktur pendukung wilayah.

Secara keseluruhan, dinamika penggunaan lahan selama dua tahun terakhir mencerminkan adanya tekanan terhadap ruang-ruang produktif, namun juga menunjukkan upaya adaptif dalam optimalisasi fungsi lahan melalui konversi yang terukur. Fakta ini perlu menjadi bahan pertimbangan utama dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kebijakan ketahanan pangan, mengingat keterbatasan lahan di tengah tuntutan pembangunan ekonomi dan permukiman yang terus meningkat.

Lebih jauh, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menunjukkan bahwa dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Kulon Progo tidak terlepas dari tekanan alih fungsi lahan akibat pembangunan infrastruktur skala besar. Pembangunan empat mega proyek, yaitu Bandara Internasional Yogyakarta di Kapanewon Temon, Bedah Bukit Menoreh sepanjang 63 kilometer, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 122,9 kilometer, serta Jalan Bebas Hambatan dengan tiga titik exit tol, mendorong percepatan konversi lahan hijau menjadi lahan terbangun. Perkembangan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, rest area, rumah toko, dan kawasan perumahan turut memperbesar tekanan alih fungsi lahan, terutama di sekitar pusat kegiatan dan jaringan jalan baru.

Kajian Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2023 juga menunjukkan bahwa penyusutan terbesar terjadi pada penggunaan perkebunan dengan tanaman berkayu keras sebesar 618,95 hektare (menyusut 2,41%). Sementara itu, permukiman, semak belukar, sawah, dan tambak justru mengalami peningkatan luasan. Alih fungsi lahan ini membawa konsekuensi ekologis, antara lain berkurangnya tutupan vegetasi, penurunan habitat flora-fauna, perubahan pola hidrologi berupa menyusutnya debit sumber mata air, serta meningkatnya risiko banjir bandang dan erosi.

Jika tren alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun tidak dikendalikan, maka proyeksi jasa lingkungan pendukung keanekaragaman hayati pada tahun 2045 menunjukkan tren penurunan signifikan. Hal ini berpotensi mengancam keberlanjutan fungsi ekologis sekaligus melemahkan basis agraris Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, integrasi pengendalian alih fungsi lahan dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial di masa mendatang.

2.1.1.2.H Keanekaragaman Hayati: Ekosistem dan Habitat Alami *(In Situ)*

Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk akibat pengaruh alam sekitar. Bukan akibat dari campur tangan manusia seperti sungai, laut serta gunung. Sedangkan pengertian ekosistem buatan yakni ekosistem yang dibentuk dengan campur tangan manusia. Terdapat sejumlah komponen yang membentuk suatu ekosistem. Komponen pembentuk ekosistem berupa komponen tak hidup atau abiotik serta komponen hidup atau biotik. Komponen-komponen tersebut memiliki suatu ciri-ciri yang khas yang membuat ekosistem ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ekosistem alami yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. **Ekosistem Karst**

   Tipe Ekosistem Karst merupakan ekosistem yang wilayah tersusun atas batuan yang mudah larut oleh air sebagian besar merupakan batuan gamping, sehingga membentuk wilayah yang berpori di mana air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Pada daerah kawasan karst biasanya ditemukan goa-goa dan sungai-sungai bawah tanah. Kawasan ekosistem karst kawasan dataran tinggi di Kapanewon Nanggulan, Samigaluh, Kokap dan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. Karakter flora yang dapat berkembang di tipe ekosistem ini juga unik, karena ekosistem karst cenderung memiliki permukaan yang keras yaitu kekeringan dan solum tanah yang dangkal. Jenis tumbuhan yang dapat hidup di daerah ini antara lain adalah oleh Beringin *(Ficus spp),* Kesambi *(Schleichera oleosa)* Randu alas *(Salmalia malabarica),* Walikukun *(Schoutenia ovata)* dan

Lutungan *(Macaranga spp.)*. Spesies semak di daerah ini antara lain, Landepan *(Barleria spp.),* Apa-apa *(Flemingia spp.),* Gembili *(Dioscorea spp.)*. Herba di daerah ini salah satunya dicirikan oleh hadirnya Kembang Sungsang *(Gloriosa superba)*. Rumput yang khas di daerah ini adalah rumput jagoan *(Themeda spp.),* dan Gerinting *(Cynodon dactylon)*. Kawasan ini memiliki beberapa nilai penting yang penting dan rentan bila tidak dilindungi di antaranya adalah; nilai geologis yang meliputi sistem eksokarst dan endokarst, nilai biologi dan ekosistem karst, nilai hidrogeologi karst, nilai arkeologi karst dan nilai sosial budaya masyarakat perbukitan menoreh.

2. **Ekosistem Dataran Tinggi**

   Kawasan ekosistem dataran tinggi merupakan suatu tipe ekosistem yang ada pada dataran dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Kawasan ekosistem dataran tinggi kawasan dataran tinggi di Kapanewon Nanggulan, Samigaluh, Kokap dan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo; Bahan organik yang tersedia pada jenis ekosistem ini cukup tinggi, sehingga memiliki kemampuan yang baik dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan vegetasi. Vegetasi dapat berkembang baik pada tipe ekosistem ini. vegetasi yang dapat tumbuh dan berkembang dengan pada tipe ekosistem ini di antaranya adalah Jenis-jenis Bambu *(Bambusa spp.),* Jati *(Tectona grandis),* Mahoni *(Swietenia macrophylla),* Sengon *(Falcataria moluccana),* Nogosari *(Mesua ferrea),* Nangka *(Artocarpus heterophyllus)* selain itu masih banyak lagi jenis vegetasi yang ada pada tipe ekosistem ini, karena tipe ekosistem dataran tinggi memiliki komposisi dan struktur vegetasi yang beragam (Fakultas Kehutanan UGM dan BLH DIY, 2017). Tipe ekosistem dataran tinggi juga dapat dikembangkan untuk wilayah budidaya tanaman pertanian dan perkebunan.

3. **Ekosistem Dataran Rendah**

   Tipe ekosistem dataran rendah merupakan ekosistem yang berada pada wilayah permukaan bumi yang relatif rendah dengan ketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki permukaan tanah yang relatif datar dan luas. Kawasan ekosistem dataran rendah terdapat di Kapanewon Galur, Wates, Temon dan Lendah Kabupaten Kulon Progo. Vegetasi yang dapat berkembang dan tumbuh dengan baik pada tipe ekosistem ini diantaranya adalah Jati *(Tectona grandis),* bambu *(Bambusa spp.),* Mahoni *(Swietenia macrophylla),* Mangga *(Mangifera indica),* Jambu mete *(Anacardium occidentale),* Nangka *(Artocarpus heterophyllus),* Akasia *(Acacia auriculiformis),* Jambu Biji *(Psidium guajava),* Sonokeling (Dalbergia latifolia), Sono Kembang *(Dalbergia sissoo),* Melinjo *(Gnetum gnemon),* Johar *(Cassia siamea)* dan Cendana *(Santalum album)* (Fakultas Kehutanan UGM dan BLH DIY, 2017).

4. **Ekosistem Mangrove**

   Tipe ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang berada di wilayah pasang surut pantai yang memiliki komunitas tumbuhan yang mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan yang memiliki kadar salinitas tinggi. Tanah di ekosistem mangrove merupakan tanah Aluvial, terjadi karena proses pengendapan hasil erosi dari hulu, dibawa oleh aliran sungai secara periodik. Waktu musim penghujan sungai membawa hasil erosi dari hulu yang dapat berupa fraksi pasir, debu, lempung dan humus dan diendapkan pada muara sungai yang berbatasan dengan laut. Air tawar dari sungai bercampur dengan air laut yang asin, sehingga airnya

menjadi payau. Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2015, tipe ekosistem mangrove tersebar di wilayah Kapanewon Temon.

5. **Ekosistem Pantai**

   Ekosistem pantai merupakan daerah pertemuan antara ekosistem akuatik dan ekosistem terestrial yang masih dipengaruhi oleh aktivitas pasang tertinggi dan surut air laut terendah. Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2015, Ekosistem Pantai tersebar di Kapanewon Galur dan Temon. Pada ekosistem pantai Kulon Progo terdapat lokasi pendaratan penyu yaitu di Pantai Bugel, Pantai Trisik dan Pantai Congot.

6. **Ekosistem Akuatik**

   Ekosistem akuatik adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang didominasi oleh air sebagai habitat dari komponen-komponen tersebut. Ekosistem perairan terdiri dari bioma hidup yang bergantung satu sama lain dan lingkungannya. Dua jenis utama ekosistem perairan adalah ekosistem laut dan ekosistem air tawar. Kawasan ekosistem perairan tawar meliputi sungai, telaga, danau dan waduk yang ada di seluruh wilayah Kulon Progo.

2.1.1.2.I Keanekaragaman Hayati: Kawasan Ekosistem Esensial

Kawasan Ekosistem Esensial, secara tersirat dalam Undang-Undang No.5/1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya masuk dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan secara tersurat dalam peraturan pemerintah (PP) No.28/2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) disebut dalam pasal 24 ayat (1). Dalam penjelasannya yang dimaksud "kawasan ekosistem esensial" adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA. Ekosistem esensial merupakan sistem penyangga kehidupan yang berupa ekosistem atau wilayah yang memiliki keunikan dan/atau fungsi dari habitat dan/atau jenis. Ekosistem esensial juga merupakan ekosistem yang potensial sebagai habitat tumbuhan atau satwa yang dilindungi dan terancam punah, kawasan yang mempunyai potensi non hayati seperti karst dan gejala alam lainnya serta mempunyai potensi untuk melindungi kawasan yang berada di sekitar dan di bawahnya dan berada di luar kawasan pelestarian alam/kawasan suaka alam.

Di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat beberapa kawasan yang memenuhi kriteria kawasan ekosistem esensial antara lain: Habitat Burung Migran Trisik dan Kawasan Mangrove Jangkaran.

1. **Habitat Burung Migran Trisik**

   Kawasan Pantai Trisik meliputi Kawasan sepanjang muara Sungai Progo ke arah barat hingga Pantai Trisik yang terletak di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Kalurahan Banaran terletak kurang lebih 4 km ke arah barat daya dari Kapanewon Galur dengan luas wilayah mencapai 9,07 km (27,57% dari luas keseluruhan wilayah Kapanewon Galur) yang terbagi menjadi 13 padukuhan. Kalurahan Banaran secara geografis terletak pada koordinat 110°12'32" BT dan 7º58'17" LS. Dusun Sidorejo terletak di ujung tenggara Kalurahan Banaran. Kawasan Pantai Trisik memiliki beberapa tipe lahan basah yang membentang dari muara Sungai Progo di sisi timur hingga pantai berpasir di

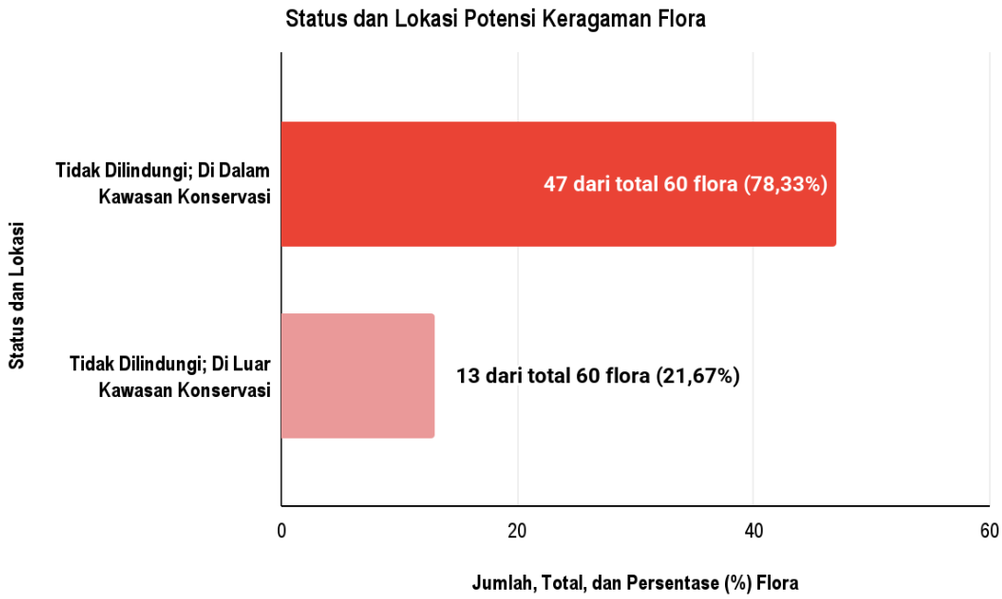
sisi barat, selain itu juga terdapat laguna, tambak budidaya udang, dan sawah tadah hujan. Kawasan muara Sungai Progo merupakan salah satu bentang lahan fluvial yang terbentuk dari proses pengendapan sungai serta didominasi oleh dataran aluvial yang membentuk delta, baik delta besar maupun delta kecil yang semuanya berpasir, basah (lembab), cenderung datar, dan terbuka. Kondisi tersebut disukai oleh burung pantai dan burung air lainnya untuk singgah dan mencari makan. Beberapa jenis burung pantai yang memiliki paruh dan kaki yang panjang maupun pendek dapat dengan mudah mencari berupa *makrozoobentos* yang hidup di area berlumpur. *Calidris tenuirostris* dan Calidris canutus merupakan jenis burung migran yang memangsa *makrozoobentos* berupa moluska dengan menusuk substrat berlumpur (Sumartono et al., 2019). Beberapa jenis burung migran juga dapat ditemukan di laguna yang berada di barat muara Sungai Progo. Daerah antara laguna dan garis pantai didominasi oleh *Casuarina equisetifolia, Spinifex littoreus,* dan Pandanus tectorius. Daerah ini biasa digunakan sebagai tempat bersarangnya Cerek Jawa *(Charadrius javanicus)*. Beberapa jenis burung migran lainnya dapat dijumpai mencari makan di kawasan laguna, baik di tepian laguna atau di tengah laguna. Jenis burung-burung migran dari famili *Charadriidae* dan *Scolopacidae* dapat ditemukan mencari makan di tepian laguna, sedangkan jenis-jenis burung dari famili *Clariidae* dapat ditemukan di tengah laguna sedang menyambar mangsanya.

2. Kawasan Mangrove Jangkaran

Kawasan pesisir Jangkaran terletak di Kalurahan Jangkaran, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Kalurahan Jangkaran terletak kurang lebih 5 km ke arah barat dari Kantor Kapanewon Temon dengan luas kawasan mencapai 365,64 Ha (10,08% dari total kawasan dalam Kapanewon Temon). Kalurahan Jangkaran secara geografis berada di koordinat 110°02'25" BT dan 7°53'05" LS. Kawasan pesisir Jangkaran merupakan wilayah pesisir (pantai) yang berada di wilayah administrasi Kalurahan Jangkaran di sebelah barat Pantai Congot. Wilayah ini terdiri atas beberapa penggunaan lahan saat ini *(existing land use),* antara lain: vegetasi mangrove, vegetasi pantai Cemara udang, tambak udang, dan budidaya pertanian. Kawasan pesisir Jangkaran, mulai dikenal luas oleh masyarakat DIY dan sekitarnya sejak adanya wisata mangrove yang dikembangkan di wilayah ini, yaitu Mangrove Wana Tirta.

2.1.1.2.J Keanekaragaman Hayati: Spesies Flora dan Fauna Potensial

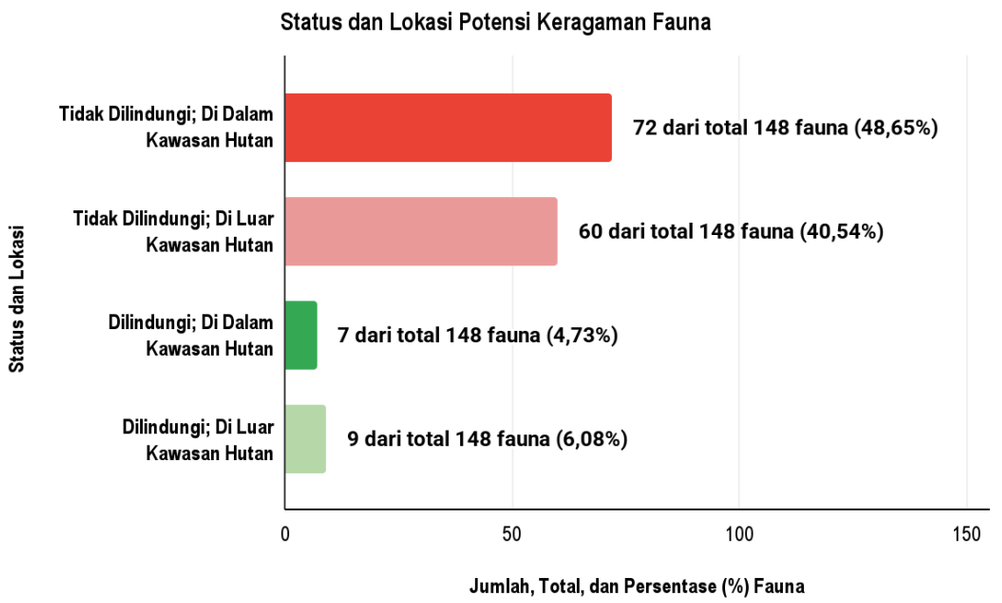
Keanekaragaman hayati di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan potensi yang tinggi, didukung oleh kondisi ekologis khas seperti kawasan Perbukitan Menoreh dan keberadaan kawasan konservasi in-situ Suaka Margasatwa Sermo. Potensi flora dan fauna yang tersebar di berbagai wilayah administratif tersebut dirangkum dalam grafik rekapitulasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.1.1.2.J-1 dan Gambar 2.1.1.2.J-2 berikut.



Gambar 2.1.1.2.J-1 Grafik Rekapitulasi Status dan Lokasi Potensi Keragaman Flora di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Balai KSDA Yogyakarta, diolah

Gambar 2.1.1.2.J-1 memperlihatkan komposisi status dan lokasi sebaran spesies flora potensial di Kabupaten Kulon Progo. Dari total 60 spesies yang teridentifikasi, sebanyak 78,33 persen telah tercatat memiliki potensi tinggi dan persebaran yang signifikan pada wilayah tertentu, sementara sisanya (21,67 persen) masih tergolong memiliki sebaran terbatas atau status konservasi yang belum optimal. Temuan ini mengindikasikan pentingnya penguatan upaya perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap kekayaan flora lokal.



Gambar 2.1.1.2.J-2 Grafik Rekapitulasi Status dan Lokasi Potensi Keragaman Fauna di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Balai KSDA Yogyakarta, diolah

Gambar 2.1.1.2.J-2 memperlihatkan persebaran dan status konservasi spesies fauna di Kabupaten Kulon Progo. Dari total 148 jenis fauna yang berhasil di dokumentasikan, sebanyak 48,65 persen merupakan fauna dengan tingkat sebaran luas dan potensi konservasi tinggi. Sementara itu, 40,54 persen spesies berada dalam kategori sebaran menengah, dan sisanya terdiri atas 4,73 persen spesies langka serta 6,08 persen yang masuk dalam kategori prioritas konservasi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pelestarian yang lebih sistematis, khususnya untuk spesies yang tergolong langka atau rawan punah.

Setelah mencermati hasil rekapitulasi keanekaragaman hayati pada uraian sebelumnya, selanjutnya akan disajikan daftar lengkap keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo dalam Tabel 2.1.1.2.J-1 dan Tabel 2.1.1.2.J-2 berikut.

Tabel 2.1.1.2.J-1 Keanekaragaman Hayati (Flora) di Kabupaten Kulon Progo

NO.	KATEGORI	NAMA LOKAL	*NAMA LATIN*	STATUS	LOKASI
1.	Flora	-	*Acacia Auriculiformis*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
2.	Flora	-	*Belum Diketahui*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
3.	Flora	-	*Eucalyptus Alba*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
4.	Flora	-	*Eucalyptus Deglupta*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
5.	Flora	-	*Memecylon Coeruleum*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
6.	Flora	-	*Podocarpus Nakaii*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
7.	Flora	-	*Xiphidium Caeruleum*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
8.	Flora	**Akasia**	*Acacia Auriculiformis*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
9.	Flora	**Akasia**	*Acacia Mangium*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
10.	Flora	**Anggrek**	*Bryobium Retusum*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
11.	Flora	**Anggrek**	*Nervilia Plicata*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
12.	Flora	**Anggrek Merpati**	*Dendrobium Crumenatum*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
13.	Flora	**Anggrek Merpati**	*Dendrobium Crumenatum*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
14.	Flora	**Aren**	*Arenga Pinnata*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
15.	Flora	**Asam Jawa**	*Tamarindus Indica*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
16.	Flora	**Awar-Awar**	*Ficus Septica*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
17.	Flora	**Bambu Apus**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
18.	Flora	**Bambu Gading**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
19.	Flora	**Beringin**	*Ficus Benjamina*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
20.	Flora	**Bidara**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
21.	Flora	**Bunga Suweg**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
22.	Flora	**Cabe Puyang**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
23.	Flora	**Cendana**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
24.	Flora	**Ebony**	*Diospyros Celebica*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
25.	Flora	**Gayam**	*Inocarpus Fagifer*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
26.	Flora	**Jamur Cepaki**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi

NO.	KATEGORI	NAMA LOKAL	*NAMA LATIN*	STATUS	LOKASI
27.	Flora	**Jamur Sp**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
28.	Flora	**Jati**	*Tectona Grandis*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
29.	Flora	**Jati**	*Tectona Grandis*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
30.	Flora	**Jati Lanang (Sungkai)**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
31.	Flora	**Johar**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
32.	Flora	**Kayu Putih**	*Melaleuca Leucadendron*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
33.	Flora	**Kemiri**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
34.	Flora	**Kenanga**	*Cananga Odorata*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
35.	Flora	**Kirinyuh**	*Eupatorium Odoratum*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
36.	Flora	**Lempeni**	*Ardisia Elliptica*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
37.	Flora	**Mahoni**	*Swietenia Mahagoni*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
38.	Flora	**Mahoni**	*Swietenia Sp.*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
39.	Flora	**Manggis**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
40.	Flora	**Melinjo**	*Gnetum Gnemon*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
41.	Flora	**Pecut Kuda**	*Stachytarpheta Jamaicensis*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
42.	Flora	**Pinus Merkusii**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
43.	Flora	**Ploso, Tanaman Native Sm Sermo**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
44.	Flora	**Pohon Kayu Putih**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
45.	Flora	**Pohon Wunut**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
46.	Flora	**Preh**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
47.	Flora	**Preh Wulung**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
48.	Flora	**Putri Malu**	*Mimosa Pudica*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
49.	Flora	**Randu**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
50.	Flora	**Randu**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan konservasi
51.	Flora	**Randu Alas**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
52.	Flora	**Salam**	*Syzygium Polyanthum*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
53.	Flora	**Secang**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
54.	Flora	**Sirsak**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi

NO.	KATEGORI	NAMA LOKAL	*NAMA LATIN*	STATUS	LOKASI
55.	Flora	**Sirsat**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
56.	Flora	**Sono Kembang**	*Dalbergia Sissoo*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
57.	Flora	**Sonokeling**	*Dalbergia Latifolia*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
58.	Flora	**Suweg**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
59.	Flora	**Tembelekan**	*Lantana Camara*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi
60.	Flora	**Tidak Diketahui**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan konservasi

Sumber: Balai KSDA Yogyakarta, diolah

Tabel 2.1.1.2.J-2 Keanekaragaman Hayati (Fauna) di Kabupaten Kulon Progo

NO.	KATEGORI	NAMA LOKAL	*NAMA LATIN*	STATUS	LOKASI
1.	Fauna	-	*Acalolepta*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
2.	Fauna	-	*Acantholipini Sp*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
3.	Fauna	-	*Arctornis Cygna*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
4.	Fauna	-	*Cotesia Congregata*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
5.	Fauna	-	*Cupha Erymanthis*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
6.	Fauna	-	*Enoplea*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
7.	Fauna	-	*Euploea Doubledayi*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
8.	Fauna	-	*Graphium Agamemnon*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
9.	Fauna	-	*Junonia Hedonia*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
10.	Fauna	-	*Junonia Hedonia*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
11.	Fauna	-	*Junonia Iphita*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
12.	Fauna	-	*Mantis Sp*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
13.	Fauna	-	*Muscicapa Dauurica*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
14.	Fauna	-	*Neptis Sappho (Common Glider)*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
15.	Fauna	-	*Parantica Aglea (Glassy Tiger)*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
16.	Fauna	-	*Yoma Sabina*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
17.	Fauna	-	*Zizinia Labrador*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
18.	Fauna	-	*Zizula Hylax (Tiny Grass Blue)*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
19.	Fauna	**Alap-Alap Sapi**	*Falco Moluccensis*	Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
20.	Fauna	**Ayam Hutan Hijau**	*Gallus Varius*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
21.	Fauna	**Ayam Hutan Hijau**	*Gallus Varius*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
22.	Fauna	**Bajing Kelapa**	*Callosciurus Notatus*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
23.	Fauna	**Belalang Ranting**	*Phobaeticus Kirbyi*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
24.	Fauna	**Belalang Sembah**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
25.	Fauna	**Biawak Jawa**	*Varanus Salvator*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
26.	Fauna	**Bidara**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan

NO.	KATEGORI	NAMA LOKAL	*NAMA LATIN*	STATUS	LOKASI
27.	Fauna	**Blekok Sawah**	*Ardeola Speciosa*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
28.	Fauna	**Bondol Haji**	*Lonchura Maja*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
29.	Fauna	**Bondol Peking**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
30.	Fauna	**Bondol Peking**	*Lonchura Punctulata*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
31.	Fauna	**Bubut Jawa**	*Centropus Nigrorufus*	Dilindungi	Di luar kawasan hutan
32.	Fauna	**Bunglon Hutan**	*Gonocephalus Chamaeleontinus*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
33.	Fauna	**Burung Gereja**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
34.	Fauna	**Burung Madu Jawa**	*Aethopyga Mystacalis*	Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
35.	Fauna	**Burung Madu Jawa**	*Aethopyga Mystacalis*	Dilindungi	Di luar kawasan hutan
36.	Fauna	**Burung Madu Kelapa**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
37.	Fauna	**Burung Madu Kelapa**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
38.	Fauna	**Burung Madu Kelapa**	*Anthreptes Malacensis*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
39.	Fauna	**Burung Madu Kelapa**	*Anthreptes Malacensis*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
40.	Fauna	**Burung Madu Sriganti**	*Cinnyris Jugularis*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
41.	Fauna	**Burung Madu Sriganti**	*Cinnyris Jugularis*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
42.	Fauna	**Cabai Bunga-Api**	*Dicaeum Trigonostigma*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
43.	Fauna	**Cabai Jawa**	*Dicaeum Trochileum*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
44.	Fauna	**Cabai Jawa**	*Dicaeum Trochileum*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
45.	Fauna	**Cabe Polos**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
46.	Fauna	**Cabe Polos**	*Dicaeum Concolor*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
47.	Fauna	**Cacing Kepala Martil**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
48.	Fauna	**Caladi Ulam**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
49.	Fauna	**Cangak Abu**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
50.	Fauna	**Capung**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
51.	Fauna	**Capung**	*Brachythemis Contaminata*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
52.	Fauna	**Cekakak Jawa**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
53.	Fauna	**Cekakak Jawa**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
54.	Fauna	**Cekakak Sungai**	*Todirhamphus Chloris*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan

NO.	KATEGORI	NAMA LOKAL	*NAMA LATIN*	STATUS	LOKASI
55.	Fauna	**Cekakak Sungai**	*Todirhamphus Chloris*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
56.	Fauna	**Celepuk Jawa**	*Otus Angelinae*	Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
57.	Fauna	**Cici Padi**	*Cisticola Juncidis*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
58.	Fauna	**Cinenen Kelabu**	*Prinia Familiaris*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
59.	Fauna	**Cinenen Pisang**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
60.	Fauna	**Cleret Gombel**	*Draco Volans*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
61.	Fauna	**Cucak Kuning**	*Pycnonotus Melanicterus*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
62.	Fauna	**Cucak Kuning**	*Pycnonotus Melanicterus*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
63.	Fauna	**Cucak Kuning / Kutilang Emas**	*Pycnonotus Melanicterus / Rubigula Dispar*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
64.	Fauna	**Cucak Kuning / Kutilang Emas**	*Pycnonotus Melanicterus / Rubigula Dispar*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
65.	Fauna	**Dara Laut**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
66.	Fauna	**Delimukan Zamrud**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
67.	Fauna	**Elang-Alap Cina**	*Accipiter Soloensis*	Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
68.	Fauna	**Elang-Alap Cina**	*Accipiter Soloensis*	Dilindungi	Di luar kawasan hutan
69.	Fauna	**Elang-Alap Jambul**	*Accipiter Trivirgatus*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
70.	Fauna	**Elang-Ular Bido**	*Spilornis Cheela*	Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
71.	Fauna	**Elang-Ular Bido**	*Spilornis Cheela*	Dilindungi	Di luar kawasan hutan
72.	Fauna	**Gajahan Erasia**	*Numenius Arquata*	Dilindungi	Di luar kawasan hutan
73.	Fauna	**Hiu Paus**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
74.	Fauna	**Jingjing Batu**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
75.	Fauna	**Kacer Jawa**	*Copsychus Sechellarum*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
76.	Fauna	**Kadal**	*Eutropis Multifasciata*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
77.	Fauna	**Kadal**	*Eutropis Rugifera*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
78.	Fauna	**Kadalan Birah**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
79.	Fauna	**Kancilan Bakau**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
80.	Fauna	**Kedasih**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan

NO.	KATEGORI	NAMA LOKAL	*NAMA LATIN*	STATUS	LOKASI
81.	Fauna	**Kedasih**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
82.	Fauna	**Kedasih Hitam**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
83.	Fauna	**Kehicap Ranting**	*Hypothymis Azurea*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
84.	Fauna	**Kerak Ungu**	*Acridotheres Tristis*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
85.	Fauna	**Kipasan Belang**	*Rhipidura Javanica*	Dilindungi	Di luar kawasan hutan
86.	Fauna	**Kodok**	*Bufo Duttaprinus*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
87.	Fauna	**Kumbang Permata**	*Chrysochroa*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
88.	Fauna	**Kuntul Kerbau**	*Bubulcus Ibis*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
89.	Fauna	**Kupu Kupu**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
90.	Fauna	**Kupu-Kupu**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
91.	Fauna	**Kupu-Kupu**	*Unidentified*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
92.	Fauna	**Kutilang**	*Pycnonotus Aurigaster*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
93.	Fauna	**Kutilang**	*Pycnonotus Aurigaster*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
94.	Fauna	**Kutilang Emas**	*Pycnonotus Melanicterus*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
95.	Fauna	**Kutilang Emas**	*Pycnonotus Melanicterus*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
96.	Fauna	**Lalat Buah**	-	Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
97.	Fauna	**Layang-Layang Asia**	*Hirundo Rustica*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
98.	Fauna	**Layang-Layang Asia**	*Hirundo Rustica*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
99.	Fauna	**Luwak**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
100.	Fauna	**Merbah Cerukcuk**	*Pycnonotus Goiavier*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
101.	Fauna	**Merbah Corok Corok**	*Pycnonotus Simplex*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
102.	Fauna	**Monyet Ekor Panjang**	*Macaca Fascicularis*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
103.	Fauna	**Monyet Ekor Panjang**	*Macaca Fascicularis*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
104.	Fauna	**Musang Luwak**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
105.	Fauna	**Pelanduk Topi Hitam**	*Pellorneum Capistratum*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
106.	Fauna	**Pelatuk Tukik Tikus**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
107.	Fauna	**Penyu Lekang**	*Lepidochelys Olivacea*	Dilindungi	Di luar kawasan hutan
108.	Fauna	**Penyu Sisik**	*Eretmochelys Imbricata*	Dilindungi	Di luar kawasan hutan

NO.	KATEGORI	NAMA LOKAL	*NAMA LATIN*	STATUS	LOKASI
109.	Fauna	**Perkutut**	*Geopelia Striata*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
110.	Fauna	**Perkutut**	*Geopelia Striata*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
111.	Fauna	**Pipit Bondol Jawa**	*Lonchura Leucogastroides*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
112.	Fauna	**Pipit Bondol Jawa**	*Lonchura Leucogastroides*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
113.	Fauna	**Prenjak Lumut**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
114.	Fauna	**Prenjak Lumut**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
115.	Fauna	**Prenjak Sawah**	*Prinia Inornata*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
116.	Fauna	**Prenjak Tamu**	*Jawa*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
117.	Fauna	**Punai Gading**	*Treron Vernans*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
118.	Fauna	**Raja Udang Meninting**	*Alcedo Meninting*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
119.	Fauna	**Raja-Udang Biru**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
120.	Fauna	**Sanca Batik**	*Phyton Reticulatus*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
121.	Fauna	**Sanca Kembang**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
122.	Fauna	**Sanca Kembang**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
123.	Fauna	**Sarang Madu Sriganti**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
124.	Fauna	**Sepah Kecil**	*Pericrocotus Cinnamomeus*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
125.	Fauna	**Sepah Kecil**	*Pericrocotus Cinnamomeus*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
126.	Fauna	**Serak Jawa**	*Tyto Alba*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
127.	Fauna	**Sikatan Emas**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
128.	Fauna	**Sikep-madu Asia**	*Pernis Ptilorhynchus*	Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
129.	Fauna	**Sikep-madu Asia**	*Pernis Ptilorhynchus*	Dilindungi	Di luar kawasan hutan
130.	Fauna	**Sirtu / Cipoh Kacat**	*Aegithina Tiphia*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
131.	Fauna	**Sirtu / Cipoh Kacat**	*Aegithina Tiphia*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
132.	Fauna	**Takur Ungkut-Ungkut**	*Coppersmith Barbet*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
133.	Fauna	**Tekukur Biasa**	*Streptopelia Chinensis*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
134.	Fauna	**Tepekong**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
135.	Fauna	**Tepekong Jambul**	*Hemiprocne Longipennis*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
136.	Fauna	**Tokek Rumah**	*Gecko*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan

NO.	KATEGORI	NAMA LOKAL	*NAMA LATIN*	STATUS	LOKASI
137.	Fauna	**Tokek Rumah**	*Gecko*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
138.	Fauna	**Trinil Pantai**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
139.	Fauna	**Trinil Pantai**	*Tringa Hypoleucos*	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
140.	Fauna	**Trinil Semak**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
141.	Fauna	**Tupai**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
142.	Fauna	**Tupai Kekes**	*Tupaia Javanica*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
143.	Fauna	**Ular Tampar**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
144.	Fauna	**Ular Weling**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
145.	Fauna	**Walet Linchi**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
146.	Fauna	**Wiwik Kelabu**	-	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
147.	Fauna	**Wiwik Kelabu**	-	Tidak Dilindungi	Di luar kawasan hutan
148.	Fauna	**Wiwik Lurik**	*Cacomantis Sonneratii*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan
149.	Fauna	**Wiwik Lurik**	*Cacomantis Sonneratii*	Tidak Dilindungi	Di dalam kawasan hutan

Sumber: Balai KSDA Yogyakarta, diolah

2.1.1.2.K Klimatologi

Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Iklim muson ditandai dengan perubahan arah angin secara periodik sekitar enam bulanan. Muson Barat bertiup pada Oktober–April dan membawa massa udara basah yang menimbulkan musim penghujan, sedangkan Muson Timur bertiup pada April–Oktober dan bersifat kering sehingga menimbulkan musim kemarau.

Sebagai daerah beriklim tropis, Kabupaten Kulon Progo memiliki suhu relatif tinggi sepanjang tahun yang berkontribusi pada tingginya penguapan dan pembentukan awan hujan. Selain itu, kedekatan dengan Samudra Hindia menjadikan wilayah ini mendapat tambahan uap air laut yang memperbesar potensi curah hujan.

Berdasarkan klasifikasi iklim *Schmidt–Ferguson* yang menggunakan nisbah antara jumlah bulan kering dan bulan basah, Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam tipe iklim C (daerah agak basah). Hal ini ditunjukkan oleh data rata-rata periode 2015–2019, yaitu 3,83 bulan kering dan 7,17 bulan basah dengan nilai Q sebesar 53,49 persen. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah masih menerima curah hujan cukup tinggi, meskipun terdapat periode kemarau yang jelas.

Pola curah hujan di Kabupaten Kulon Progo dipantau melalui lima stasiun hujan (Gejagan, Singkung, Gembongan, Beji, dan Brosot). Secara umum, curah hujan dan jumlah hari hujan berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan musiman yang konsisten. Puncak musim penghujan terjadi pada Januari–April serta November–Desember, sedangkan periode kemarau berlangsung pada Mei–September. Hasil pengamatan curah hujan dan hari hujan selama tahun 2022–2024 menunjukkan adanya variasi tahunan yang cukup tajam, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1.1.2.K-1 dan Gambar 2.1.1.2.K-1 berikut.

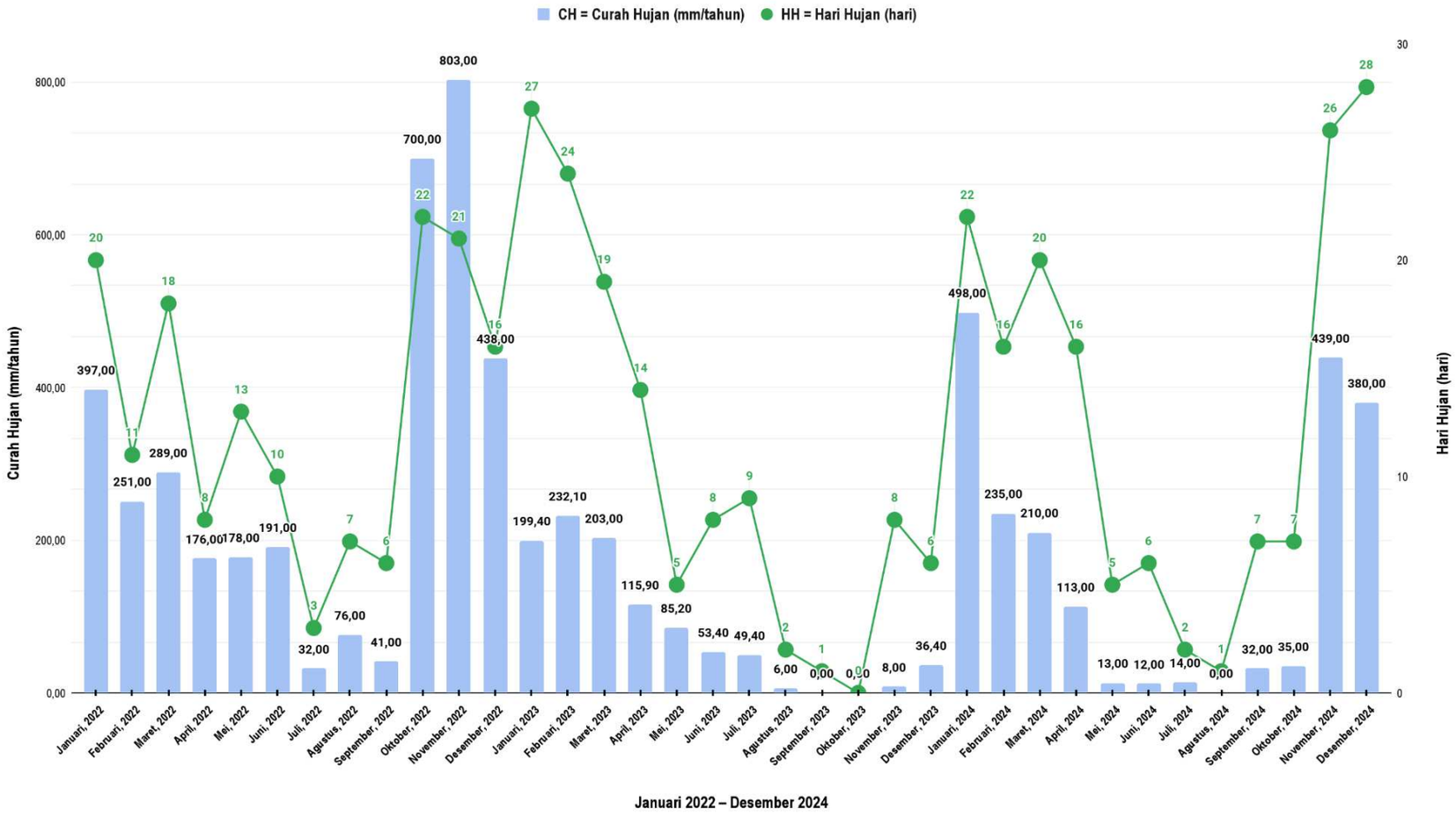
Tabel 2.1.1.2.K-1 Curah Hujan dan Hari Hujan Per-Bulan di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2022–2024

NO.	BULAN	2022		2023		2024	
		CH (mm/tahun)	HH (hari)	CH (mm/tahun)	HH (hari)	CH (mm/tahun)	HH (hari)
1	Januari	397,00	20,00	199,40	27,00	498,00	22,00
2	Februari	251,00	11,00	232,10	24,00	235,00	16,00
3	Maret	289,00	18,00	203,00	19,00	210,00	20,00
4	April	176,00	8,00	115,90	14,00	113,00	16,00
5	Mei	178,00	13,00	85,20	5,00	13,00	5,00
6	Juni	191,00	10,00	53,40	8,00	12,00	6,00
7	Juli	32,00	3,00	49,40	9,00	14,00	2,00
8	Agustus	76,00	7,00	6,00	2,00	0,00	1,00
9	September	41,00	6,00	0,00	1,00	32,00	7,00
10	Oktober	700,00	22,00	0,00	0,00	35,00	7,00
11	November	803,00	21,00	8,00	8,00	439,00	26,00
12	Desember	438,00	16,00	36,40	6,00	380,00	28,00
-	Jumlah	3.572,00	155,00	988,80	123,00	1.981,00	156,00
-	Rata-rata	297,67	12,92	82,40	10,25	165,08	13,00

Keterangan:

- CH = Curah Hujan (mm/tahun)
- HH = Hari Hujan (hari)

Sumber: BPS Kab. Kulon Progo, Tahun 2025



Gambar 2.1.1.2.K-1 Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2022–2024

Sumber: BPS Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel dan Gambar 2.1.1.2.K-1, pola curah hujan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam antar tahun. Pada tahun 2022, total curah hujan mencapai 3.572 mm dengan rata-rata bulanan 297,67 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 155 hari. Angka ini tergolong sangat tinggi dan mencerminkan kondisi basah yang relatif ekstrem, terutama pada bulan Oktober dan November yang mencatat curah hujan masing-masing 700 mm dan 803 mm.

Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan, dengan total curah hujan hanya 988,80 mm, rata-rata bulanan 82,40 mm, dan jumlah hari hujan 123 hari. Kondisi ini menunjukkan anomali iklim yang cukup kering dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan pada beberapa bulan, seperti September dan Oktober 2023, tercatat curah hujan 0 mm.

Pada tahun 2024, kondisi curah hujan kembali mengalami peningkatan dengan total 1.981 mm, rata-rata bulanan 165,08 mm, dan jumlah hari hujan 156 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (498 mm) dan November (439 mm), sedangkan periode kering masih terjadi pada bulan Agustus (0 mm).

Secara umum, pola musiman tetap konsisten, puncak hujan berlangsung pada bulan Januari–April dan November–Desember, sedangkan periode kemarau jatuh pada bulan Mei–September. Variabilitas antar tahun yang cukup tinggi mengindikasikan adanya pengaruh fenomena iklim global seperti *ENSO (El Niño–La Niña)* terhadap curah hujan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kondisi ini sekaligus mengonfirmasi bahwa secara klimatologis, Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam tipe iklim C (daerah agak basah) menurut klasifikasi *Schmidt–Ferguson,* meskipun tetap memiliki potensi risiko kekeringan musiman pada periode tertentu.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.3.A Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa penyediaan air bersih menggambarkan kemampuan lingkungan dalam menyediakan air bersih bagi manusia, yang dapat berasal dari air tanah, air hujan, atau air permukaan. Ketersediaan air bersih ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis tanah, jenis batuan, intensitas hujan, dan tutupan lahan, sehingga kapasitas penyediaan air akan bervariasi di setiap ekoregion.

Kabupaten Kulon Progo memiliki status daya dukung air yang secara umum lebih banyak mengalami surplus dibandingkan defisit. Pada tahun 2021, kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 712.468.800,01 m^3, sedangkan ketersediaan air mencapai 772.640.481,65 m^3. Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo berada dalam kondisi surplus daya dukung air.

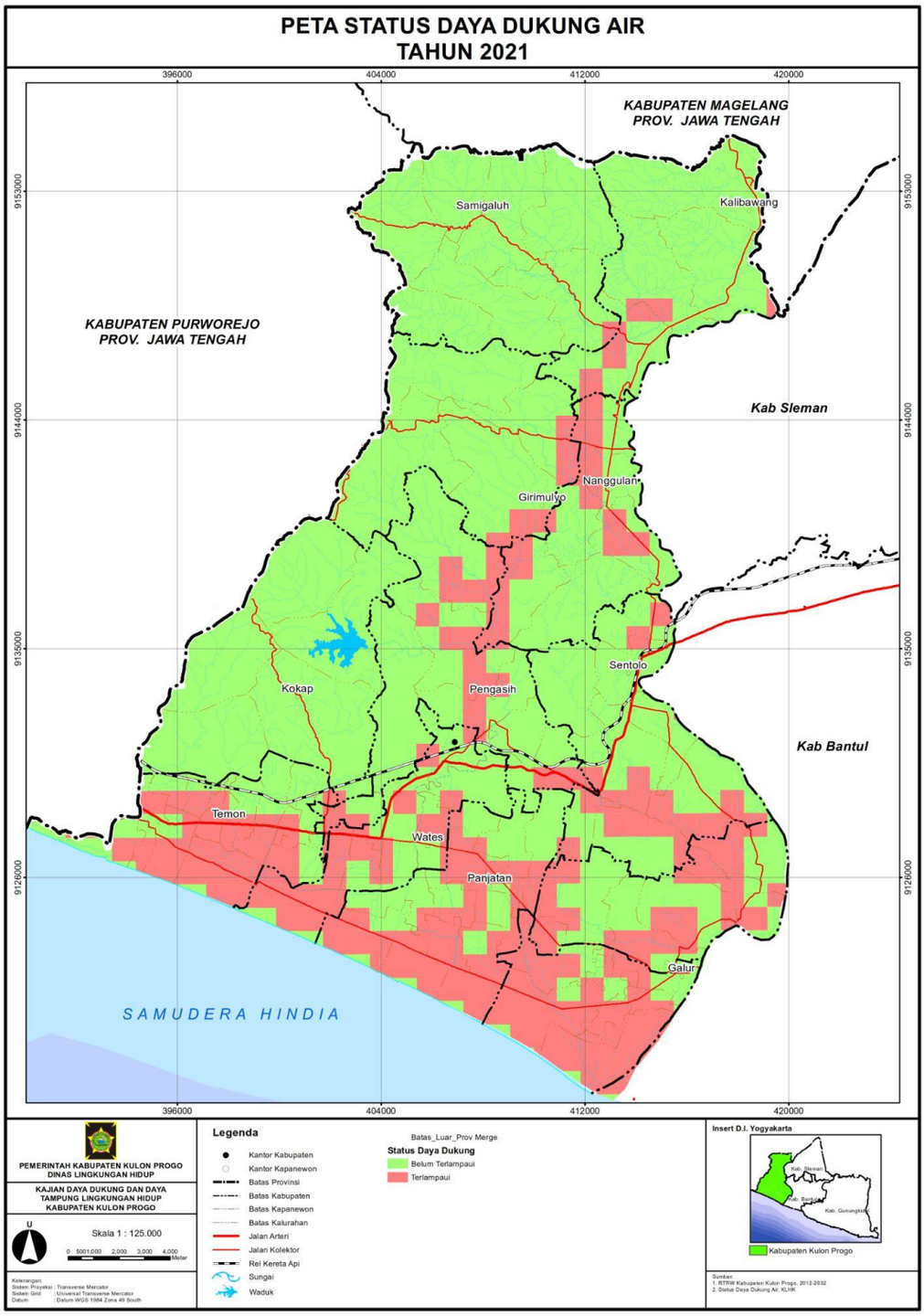
Berdasarkan analisis daya dukung air di 12 kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, ditemukan bahwa tujuh kapanewon memiliki status surplus, yang berarti kapasitas penyediaan air di wilayah tersebut masih mencukupi. Ketujuh kapanewon tersebut adalah Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Pengasih, Samigaluh, dan Sentolo. Di sisi lain, empat kapanewon menunjukkan status defisit atau telah melampaui daya dukung air, yang memerlukan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya air yang lebih optimal. Kapanewon dengan status defisit tersebut adalah Galur, Wates, Lendah, dan Panjatan.

Dengan kondisi ini, diperlukan strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, termasuk konservasi air, optimalisasi sistem distribusi, serta peningkatan efisiensi pemanfaatan air di sektor domestik, pertanian, dan industri. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air, sehingga daya dukung lingkungan di Kabupaten Kulon Progo dapat tetap terjaga dalam jangka panjang.

Tabel 2.1.1.3.A-1 Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Air serta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Kulon Progo

NO	KAPANEWON	LUAS KAPANEWON (m^2)	TOTAL KOEFISIEN RUN OFF (PENGGUNAAN LAHAN)	CURAH HUJAN	NILAI CURAH HUJAN	JUMLAH PENDUDUK	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	STATUS
1	**Temon**	36.554.022,00	0,34	1000 - 1500 mm/th	1.250,00	29.033,00	65.248.930,00	46.452.800,00	Surplus
2	**Wates**	31.454.655,00	0,36	1000 - 1500 mm/th	1.250,00	49.184,00	59.449.297,00	78.694.400,00	Defisit
3	**Panjatan**	44.403.928,00	0,34	1000 - 1500 mm/th	1.250,00	39.003,00	45.292.007,00	62.404.800,00	Defisit
4	**Galur**	32.127.923,00	0,29	1500 - 2000 mm/th	1.750,00	32.930,00	16.304.921,00	52.688.000,00	Defisit
5	**Lendah**	37.462.829,00	0,42	1500 - 2000 mm/th	1.750,00	41.180,00	27.535.179,00	65.888.000,00	Defisit
6	**Sentolo**	54.751.132,00	0,38	1500 - 2000 mm/th	1.750,00	50.224,00	83.113.136,00	80.358.400,00	Surplus
7	**Pengasih**	58.137.218,00	0,37	1500 - 2000 mm/th	1.750,00	51.460,00	86.043.082,00	82.336.000,00	Surplus
8	**Kokap**	70.038.806,00	0,35	1000 - 1500 mm/th	1.250,00	36.539,00	128.696.307,00	58.462.400,00	Surplus
9	**Girimulyo**	55.994.592,00	0,25	1500 - 2000 mm/th	1.750,00	25.216,00	55.994.592,00	40.345.600,00	Surplus
10	**Nanggulan**	39.048.980,00	0,34	1500 - 2000 mm/th	1.750,00	30.706,00	53.106.613,00	49.129.600,00	Surplus
11	**Samigaluh**	68.365.072,00	0,22	> 2500 mm/th	2.500,00	28.741,00	116.562.448,00	45.985.600,00	Surplus
12	**Kalibawang**	50.382.552,00	0,31	1000 - 1500 mm/th	1.250,00	31.077,00	81.997.604,00	49.723.200,00	Surplus
-	**Jumlah**	**578.721.710**	**-**	**-**	**-**	**445.293**	**772.640.482**	**712.468.800**	**Surplus**

Sumber: Dokumen Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, DLH Kab. Kulon Progo 2021 (diolah)



Gambar 2.1.1.3.A-1 Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021

Sumber: DLH Kab. Kulon Progo 2021

Tabel 2.1.1.3.A-2 Proyeksi Daya Dukung Dan Daya Tampung Air di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

NO.	KAPANEWON	KETERSEDIAAN (m^3) 2024	KEBUTUHAN (m^3)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	**Temon**	65.230.388,03	62.773.184,50	62.792.280,31	62.811.530,74	62.830.935,79	62.850.495,46
2	**Wates**	53.928.664,85	54.058.671,57	54.078.937,93	54.099.204,29	54.119.660,05	54.140.210,52
3	**Panjatan**	70.092.635,49	77.360.696,02	77.385.006,55	77.409.566,85	77.434.293,66	77.459.186,98
4	**Galur**	51.212.471,42	65.829.476,57	65.838.743,11	65.848.009,65	65.857.276,20	65.866.619,32
5	**Lendah**	57.103.458,91	60.654.871,98	60.669.118,19	60.683.444,90	60.697.771,60	60.712.259,27
6	**Sentolo**	82.061.796,88	70.231.226,44	70.254.480,40	70.277.896,42	70.301.393,46	70.325.052,55
7	**Pengasih**	95.297.408,11	66.601.056,78	66.649.293,72	66.697.922,03	66.747.039,56	66.796.646,31
8	**Kokap**	94.594.675,28	16.616.691,96	16.634.782,43	16.653.026,21	16.698.942,28	16.689.820,39
9	**Girimulyo**	71.338.808,04	18.783.709,02	18.790.890,60	18.798.072,18	18.805.253,76	18.812.514,26
10	**Nanggulan**	59.829.352,58	50.524.876,33	50.537.215,10	50.549.635,06	50.562.136,18	50.574.637,31
11	**Samigaluh**	85.499.534,70	14.314.211,96	14.321.783,70	14.329.355,44	14.336.997,29	14.344.639,14
12	**Kalibawang**	70.053.349,57	25.210.724,10	25.218.579,30	25.226.434,50	25.234.362,43	25.242.290,36
-	**Total**	**856.242.543,86**	**582.959.397,23**	**583.171.111,36**	**583.384.098,26**	**583.626.062,25**	**583.814.371,86**

... lanjutan tabel 2.1.1.3.A-2 ...

NO.	KAPANEWON	SELISIH 2025 (m^3)	STATUS 2025	SELISIH 2026 (m^3)	STATUS 2026	SELISIH 2027 (m^3)	STATUS 2027	SELISIH 2028 (m^3)	STATUS 2028	SELISIH 2029 (m^3)	STATUS 2029
1	**Temon**	2.457.203,53	Belum Terlampaui	2.438.107,72	Belum Terlampaui	2.418.857,29	Belum Terlampaui	2.399.452,24	Belum Terlampaui	2.379.892,57	Belum Terlampaui
2	**Wates**	-130.006,72	Terlampaui	-150.273,08	Terlampaui	-170.539,44	Terlampaui	-190.995,21	Terlampaui	-211.545,67	Terlampaui
3	**Panjatan**	-7.268.060,53	Terlampaui	-7.292.371,06	Terlampaui	-7.316.931,36	Terlampaui	-7.341.658,17	Terlampaui	-7.366.551,48	Terlampaui

NO.	KAPANEWON	SELISIH 2025 (m^3)	STATUS 2025	SELISIH 2026 (m^3)	STATUS 2026	SELISIH 2027 (m^3)	STATUS 2027	SELISIH 2028 (m^3)	STATUS 2028	SELISIH 2029 (m^3)	STATUS 2029
4	**Galur**	-14.617.005,15	Terlampaui	-14.626.271,69	Terlampaui	-14.635.538,24	Terlampaui	-14.644.804,78	Terlampaui	-14.654.147,90	Terlampaui
5	**Lendah**	-3.551.413,06	Terlampaui	-3.565.659,28	Terlampaui	-3.579.985,98	Terlampaui	-3.594.312,68	Terlampaui	-3.608.800,36	Terlampaui
6	**Sentolo**	11.830.570,44	Belum Terlampaui	11.807.316,47	Belum Terlampaui	11.783.900,45	Belum Terlampaui	11.760.403,41	Belum Terlampaui	11.736.744,33	Belum Terlampaui
7	**Pengasih**	28.696.351,32	Belum Terlampaui	28.648.114,39	Belum Terlampaui	28.599.486,08	Belum Terlampaui	28.550.368,55	Belum Terlampaui	28.500.761,80	Belum Terlampaui
8	**Kokap**	77.977.983,32	Belum Terlampaui	77.959.892,85	Belum Terlampaui	77.941.649,07	Belum Terlampaui	77.895.733,01	Belum Terlampaui	77.904.854,90	Belum Terlampaui
9	**Girimulyo**	52.555.099,02	Belum Terlampaui	52.547.917,44	Belum Terlampaui	52.540.735,86	Belum Terlampaui	52.533.554,28	Belum Terlampaui	52.526.293,78	Belum Terlampaui
10	**Nanggulan**	9.304.476,25	Belum Terlampaui	9.292.137,48	Belum Terlampaui	9.279.717,52	Belum Terlampaui	9.267.216,40	Belum Terlampaui	9.254.715,27	Belum Terlampaui
11	**Samigaluh**	71.185.322,74	Belum Terlampaui	71.177.751,00	Belum Terlampaui	71.170.179,26	Belum Terlampaui	71.162.537,41	Belum Terlampaui	71.154.895,56	Belum Terlampaui
12	**Kalibawang**	44.842.625,47	Belum Terlampaui	44.834.770,27	Belum Terlampaui	44.826.915,07	Belum Terlampaui	44.818.987,14	Belum Terlampaui	44.811.059,21	Belum Terlampaui
-	**Total**	**273.283.146,62**	**-**	**273.071.432,50**	**-**	**272.858.445,60**	**-**	**272.616.481,61**	**-**	**272.428.172,00**	**-**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2025

Hasil proyeksi kebutuhan air tahun 2029 bila dibandingkan dengan ketersediaan air tanah dan air permukaan maka daya dukung dan daya tampung air secara umum di Kabupaten Kulon di tahun 2029 belum terlampaui. Kebutuhan air pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 583.814.371,86 m3 sedangkan ketersediaan air mencapai 856.242.543,86 m3 Namun bila dilihat per kapanewon, terdapat kapanewon yang memiliki daya dukung dan daya tampung air terlampaui baik di tahun 2025 hingga tahun 2029. Kapanewon tersebut adalah Kapanewon Galur, Kapanewon Lendah, Kapanewon Panjatan dan Kapanewon Wates. Daya dukung dan daya tampung air yang dominan belum terlampaui dapat menjadi modal dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, namun juga harus dilakukan dengan seksama untuk menjaga ketersediaan air yang ada.

2.1.1.3.B Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi pertanian aktual dari setiap komoditas di wilayah tersebut, dengan menjumlahkan hasil produksi seluruh komoditas menggunakan harga sebagai faktor konversi. Pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan perbedaan satuan di antara berbagai komoditas pertanian.

Analisis daya dukung lahan tanaman pangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah produksi per komoditas dengan harga komoditas untuk mendapatkan nilai produksi pertanian. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai kesediaan lahan, nilai produksi dibagi dengan harga beras dan dikalikan dengan 1 per produktivitas beras lokal, yang dihitung berdasarkan produktivitas beras di masing-masing kapanewon.

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perbandingan *supply-demand,* dari 12 kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, hanya Kapanewon Kokap yang memiliki kesediaan lahan tanaman pangan dalam kondisi defisit. Hal ini berarti luas lahan yang tersedia di kapanewon tersebut tidak mencukupi kebutuhan pangan untuk memenuhi standar hidup layak. Kondisi ini terjadi karena Kapanewon Kokap memiliki luas lahan pertanian tanaman pangan terkecil di Kabupaten Kulon Progo, sehingga kapasitas produksinya lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan adanya kondisi defisit di Kapanewon Kokap, diperlukan upaya peningkatan produktivitas pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta penerapan teknologi pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan di wilayah tersebut. Selain itu, strategi distribusi pangan antar-kapanewon dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan daya dukung lahan di Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.

Tabel 2.1.1.3.B-1 Daya Dukung Pangan Kabupaten Kulon Progo

NO	KAPANEWON	*TOTAL NILAI PRODUKSI	**HARGA BERAS	PRODUKTIVITAS BERAS (Kg/Ha)	KESEDIAAN LAHAN	JUMLAH PENDUDUK	***KEBUTUHAN FISIK MINIMUM	KEBUTUHAN LAHAN	STATUS DAYA DUKUNG LAHAN
1	Temon	71.514.822.800,00	8.200,00	4.220,30	2.066,52	27.480,00	82,20	535,24	**Surplus**
2	Wates	64.568.623.280,00	8.200,00	4.226,89	1.862,89	49.395,00	82,20	960,58	**Surplus**
3	Panjatan	83.032.072.480,00	8.200,00	4.247,34	2.384,05	37.096,00	82,20	717,93	**Surplus**
4	Galur	91.212.113.000,00	8.200,00	4.262,38	2.609,67	31.720,00	82,20	611,72	**Surplus**
5	Lendah	59.525.925.920,00	8.200,00	4.254,03	1.706,44	40.347,00	82,20	779,62	**Surplus**
6	Sentolo	126.836.682.280,00	8.200,00	4.219,72	3.665,62	49.802,00	82,20	970,14	**Surplus**
7	Pengasih	92.218.499.560,00	8.200,00	4.228,50	2.659,61	50.726,00	82,20	986,09	**Surplus**
8	Kokap	13.941.613.760,00	8.200,00	4.271,05	398,07	32.234,00	82,20	620,37	**Defisit**
9	Girimulyo	34.345.591.480,00	8.200,00	4.243,74	986,98	22.822,00	82,20	442,06	**Surplus**
10	Nanggulan	105.327.309.640,00	8.200,00	4.230,65	3.036,13	30.184,00	82,20	586,46	**Surplus**
11	Samigaluh	71.741.064.680,00	8.200,00	4.261,84	2.052,85	26.596,00	82,20	512,97	**Surplus**
12	Kalibawang	68.289.120.040,00	8.200,00	4.276,40	1.947,42	28.018,00	82,20	538,56	**Surplus**

Keterangan:

- *: Data hasil pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo;
- **: Harga pokok beras DIY per September 2021 (DPKP DIY);
- ***: Jumlah Konsumsi Beras DIY 2020 (Bappeda DIY).

Sumber: KLHS RPJMD Kulon Progo 2025-2029, diolah

Tabel 2.1.1.3.B-2 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029

NO.	KAPANEWON	KEBUTUHAN (ha)	PRODUKTIVITAS (kg/ha)	KEBUTUHAN FISIK MINIMUM (kg/jiwa)	POPULASI (jiwa)				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Temon	2.066,52	4.220,30	82,20	29.399	29.646	29.895	30.146	30.399
2	Wates	1.862,89	4.226,89	82,20	49.728	49.942	50.156	50.372	50.589
3	Panjatan	2.384,05	4.247,34	82,20	39.527	39.819	40.114	40.411	40.710
4	Galur	2.609,67	4.262,38	82,20	32.603	32.724	32.845	32.966	33.088
5	Lendah	1.706,44	4.254,03	82,20	41.172	41.349	41.527	41.705	41.885
6	Sentolo	3.665,62	4.219,72	82,20	51.284	51.571	51.860	52.150	52.442
7	Pengasih	2.659,61	4.228,50	82,20	54.782	55.275	55.772	56.274	56.781
8	Kokap	398,07	4.271,05	82,20	36.330	36.566	36.804	37.403	37.284
9	Girimulyo	986,98	4.243,74	82,20	24.503	24.594	24.685	24.776	24.868
10	Nanggulan	3.036,13	4.230,65	82,20	31.062	31.214	31.367	31.521	31.675
11	Samigaluh	2.052,85	4.261,84	82,20	27.692	27.800	27.908	28.017	28.126
12	Kalibawang	1.947,42	4.276,40	82,20	29.978	30.086	30.194	30.303	30.412

... lanjutan Tabel 2.1.1.3.B-2 ...

NO.	KAPANEWON	KEBUTUHAN (ha)					SELISIH					STATUS
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Temon	572,61	577,42	582,27	587,16	592,09	1.493,91	1.489,10	1.484,25	1.479,36	1.474,43	Surplus
2	Wates	967,06	971,22	975,38	979,58	983,80	895,83	891,67	887,51	883,31	879,09	Surplus
3	Panjatan	764,98	770,63	776,34	782,09	787,87	1.619,07	1.613,42	1.607,71	1.601,96	1.596,18	Surplus
4	Galur	628,75	631,08	633,42	635,75	638,10	1.980,92	1.978,59	1.976,25	1.973,92	1.971,57	Surplus
5	Lendah	795,56	798,98	802,42	805,86	809,34	910,88	907,46	904,02	900,58	897,10	Surplus
6	Sentolo	999,01	1.004,60	1.010,23	1.015,88	1.021,57	2.666,61	2.661,02	2.655,39	2.649,74	2.644,05	Surplus
7	Pengasih	1.064,94	1.074,52	1.084,18	1.093,94	1.103,80	1.594,67	1.585,09	1.575,43	1.565,67	1.555,81	Surplus
8	Kokap	699,20	703,74	708,32	719,85	717,56	-301,13	-305,67	-310,25	-321,78	-319,49	Defisit
9	Girimulyo	474,62	476,38	478,14	479,90	481,69	512,36	510,60	508,84	507,08	505,29	Surplus

NO.	KAPANEWON	KEBUTUHAN (ha)					SELISIH					STATUS
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
10	**Nanggulan**	603,52	606,48	609,45	612,44	615,43	2.432,61	2.429,65	2.426,68	2.423,69	2.420,70	Surplus
11	**Samigaluh**	534,11	536,19	538,27	540,38	542,48	1.518,74	1.516,66	1.514,58	1.512,47	1.510,37	Surplus
12	**Kalibawang**	576,23	578,31	580,38	582,48	584,57	1.371,19	1.369,11	1.367,04	1.364,94	1.362,85	Surplus

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2025-2029

Hasil proyeksi daya dukung dan daya tampung pangan tahun 2025-2029 tersaji sebagaimana pada Tabel 2.1.1.3.B-2. Proyeksi yang dilakukan selain mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk juga mempertimbangkan pertumbuhan wilayah berdasarkan rencana tata ruang yang ada. Status daya dukung pangan ini juga dipengaruhi oleh isu lingkungan di Kabupaten Kulon Progo yaitu isu mengenai alih fungsi lahan seiring pembangunan mega proyek. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan lahan pertanian yang merupakan penyedia pangan di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa lahan yang memiliki produktivitas tinggi terhadap penyediaan pangan apabila tidak dilindungi akibat tekanan pertumbuhan pembangunan akan menurunkan daya dukung pangan di Kabupaten Kulon Progo.

2.1.1.3.C Daya Dukung Permukiman

Daya dukung wilayah untuk permukiman merupakan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan ruang permukiman yang memadai untuk menampung jumlah penduduk tertentu agar dapat tinggal secara layak. Konsep ini mencakup tidak hanya penyediaan lahan untuk tempat tinggal, tetapi juga ketersediaan ruang untuk fasilitas pelayanan dasar, infrastruktur, dan ruang terbuka sesuai dengan standar kebutuhan lahan per kapita.

Berdasarkan Dokumen Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo, dengan luasan mencapai 16.874,88 m², berada dalam kategori belum terlampaui. Kategori ini menunjukkan bahwa kapasitas lingkungan di wilayah tersebut masih mencukupi untuk mendukung aktivitas permukiman yang ada tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap sumber daya alam maupun kualitas lingkungan. Kondisi ini mencerminkan situasi yang relatif aman dan berkelanjutan, serta menjadi peluang bagi pengembangan wilayah ke depan. Sebagian kecil wilayah, seluas 542,76 m², telah berada dalam kondisi optimum, sementara tidak terdapat wilayah yang tergolong terlampaui dalam konteks daya dukung permukiman pada tahun tersebut.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara spasial, Kabupaten Kulon Progo masih memiliki kapasitas untuk pengembangan permukiman, khususnya di wilayah-wilayah dengan karakteristik perdesaan. Namun demikian, perlu diantisipasi adanya tekanan terhadap ruang akibat pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan, yang berpotensi menurunkan kapasitas daya dukung di masa mendatang. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan tata ruang dan kebijakan permukiman menjadi krusial dalam memastikan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga menjamin keadilan spasial bagi seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo.Berdasarkan Dokumen Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo, dengan luasan mencapai 16.874,88 m², berada dalam kategori belum terlampaui. Kategori ini menunjukkan bahwa kapasitas lingkungan di wilayah tersebut masih mencukupi untuk mendukung aktivitas permukiman yang ada tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap sumber daya alam maupun kualitas lingkungan. Kondisi ini mencerminkan situasi yang relatif aman dan berkelanjutan, serta menjadi peluang bagi pengembangan wilayah ke depan. Sebagian kecil wilayah, seluas 542,76 m², telah berada dalam kondisi optimum, sementara tidak terdapat wilayah yang tergolong terlampaui dalam konteks daya dukung permukiman pada tahun tersebut.

Berdasarkan Dokumen Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kulon Progo, dengan luasan mencapai 16.874,88 m², berada dalam kategori belum terlampaui. Kategori ini menunjukkan bahwa kapasitas lingkungan di wilayah tersebut masih mencukupi untuk mendukung aktivitas permukiman yang ada tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap sumber daya alam maupun kualitas lingkungan. Kondisi ini mencerminkan situasi yang relatif aman dan berkelanjutan, serta menjadi peluang bagi pengembangan wilayah ke depan. Sebagian kecil wilayah, seluas 542,76 m², telah berada dalam kondisi optimum, sementara tidak terdapat wilayah yang tergolong terlampaui dalam konteks daya dukung permukiman pada tahun tersebut.

Capaian ini menunjukkan bahwa secara spasial, Kabupaten Kulon Progo masih memiliki kapasitas untuk pengembangan permukiman, khususnya di wilayah-wilayah dengan karakteristik perdesaan. Namun demikian, perlu diantisipasi adanya tekanan terhadap ruang akibat pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan, yang berpotensi menurunkan kapasitas daya dukung di masa mendatang. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan tata ruang dan kebijakan permukiman menjadi krusial dalam memastikan pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga menjamin keadilan spasial bagi seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.1.1.3.C-1 Status Daya Dukung Permukiman di Kab. Kulon Progo

NO.	KAPANEWON	TIPE POLA RUANG PERMUKIMAN	JUMLAH PENDUDUK 2021	LUAS POLA RUANG PERMUKIMAN	DAYA DUKUNG PERMUKIMAN 2021	STATUS DAYA DUKUNG PERMUKIMAN 2021
1	Galur	Permukiman Perdesaan	32.930,00	3.129.804,00	3,66	Belum Terlampaui
2	Girimulyo	Permukiman Perdesaan	25.216,00	4.961.680,00	7,57	Belum Terlampaui
3	Kalibawang	Permukiman Perdesaan	31.077,00	4.718.283,30	5,84	Belum Terlampaui
4	Kokap	Permukiman Perdesaan	35.876,00	11.300.637,94	12,12	Belum Terlampaui
	Kokap	Permukiman Perkotaan	663,00	292.363,16	16,96	Belum Terlampaui
5	Lendah	Permukiman Perdesaan	41.180,00	1.809.214,19	1,69	Optimum
6	Nanggulan	Permukiman Perdesaan	30.706,00	3.191.729,46	4,00	Belum Terlampaui
7	Panjatan	Permukiman Perdesaan	39.003,00	4.660.341,62	4,60	Belum Terlampaui
8	Pengasih	Permukiman Perdesaan	49.860,00	8.138.151,00	6,28	Belum Terlampaui
	Pengasih	Permukiman Perkotaan	1.600,00	365.594,00	8,79	Belum Terlampaui
9	Samigaluh	Permukiman Perdesaan	28.741,00	3.896.013,00	5,21	Belum Terlampaui
10	Sentolo	Permukiman Perdesaan	50.224,00	3.378.743,00	2,59	Belum Terlampaui
11	Temon	Permukiman Perdesaan	28.302,00	3.731.638,88	5,07	Belum Terlampaui
	Temon	Permukiman Perkotaan	731,00	135.020,35	7,10	Belum Terlampaui
12	Wates	Permukiman Perdesaan	41.866,00	3.327.891,40	3,06	Belum Terlampaui
	Wates	Permukiman Perkotaan	7.318,00	814.321,91	4,28	Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029

2.1.1.3.D Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pencapaian target indikator pada pilar-pilar TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) memiliki hubungan yang erat dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Indikator pada pilar-pilar TPB dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dengan menghubungkan indikator TPB dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Hasil kajian KLHS menyebutkan bahwa ada 205 indikator TPB yang sesuai dan relevan dengan kondisi Kabupaten Kulon Progo. Sebanyak 205 indikator TPB itu terbagi atas 4 pilar sebagai berikut:

1. Pilar Sosial: 95 indikator,
2. Pilar Ekonomi: 53 indikator,
3. Pilar lingkungan: 36 indikator, dan
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola: 21 indikator.

Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Terdapat 4 kriteria yang menjadi capaian indikator TPB, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS): 118 indikator (57,56%)
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB): 40 indikator (19,51%)
3. Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB): 14 indikator (6,83%)
4. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD): 33 indikator (16,10%)

Menurut dokumen KLHS, hingga 2023, kinerja pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan hasil yang cukup baik tetapi masih memiliki beberapa tantangan. Dari total indikator TPB, ada 118 indikator (57,56%) telah mencapai target nasional (SS), menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor pembangunan. Namun, masih ada 40 indikator (19,51%) yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), serta 14 indikator (6,83%) yang belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB). Selain itu, 33 indikator (16,10%) masih belum memiliki data yang cukup untuk penilaian (TAD). Kinerja ini menunjukkan bahwa meski ada kemajuan yang nyata, masih diperlukan upaya dan komitmen yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua indikator TPB dapat dicapai.

Tabel 2.1.1.3.D-1 Capaian indikator TPB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 terhadap Target Nasional RPJMN 2019 Berdasarkan Pilar

PILAR	Sudah Mencapai Target Nasional (SS)	Belum Mencapai Target Nasional (SB)	Belum Tercapai (BB)	Tidak/Belum Ada Data (TAD)	TOTAL
Sosial	58	18	1	18	95
	61,05%	18,95%	1,05%	18,95%	100%
Ekonomi	25	16	5	7	53
	47,17%	30,19%	9,43%	13,21%	100%
Lingkungan	20	3	8	5	36
	55,56%	8,33%	22,22%	13,89%	100%
Hukum & Tata Kelola	15	3	3	0	21
	71,43%	14,29%	0,00%	14,29%	100%
TOTAL	**119**	**39**	**14**	**33**	**205**
	58,05%	**19,02%**	**6,83%**	**16,10%**	**100%**

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kulon Progo 2025-2029, diolah

Kinerja pencapaian indikator TPB di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 menunjukkan variasi yang signifikan di antara berbagai pilar. Pilar Ekonomi mencapai 47,17% indikator yang sudah mencapai target nasional (SS), dengan 30,19% masih belum mencapai target (SB), 9,43% belum dilaksanakan (BB), dan 13,21% tidak memiliki data yang cukup (TAD). Pilar Hukum dan Tata Kelola menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan 71,43% indikator SS dan hanya 14,29% SB dan TAD masing-masing. Pilar lingkungan memiliki 55,56% indikator SS, tetapi juga 22,22% BB dan 13,89% TAD. Pilar Sosial memiliki persentase SS tertinggi yaitu 61,05%, namun juga terdapat 18,95% SB dan TAD. Secara keseluruhan, 58,05% indikator TPB di Kabupaten Kulon Progo telah mencapai target nasional (SS), 19,02% masih belum mencapai target (SB), 6,83% belum dilaksanakan (BB), dan 16,10% tidak memiliki data yang cukup (TAD). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan yang nyata dalam beberapa pilar, masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam pengumpulan data dan pencapaian target di beberapa sektor.

Tabel 2.1.1.3.D-2 Capaian TPB Berdasarkan PD Pengampu Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2023

NO.	PERANGKAT DAERAH	Sudah Mencapai Target Nasional (SS)	Belum Mencapai Target Nasional (SB)	Belum Tercapai (BB)	Tidak/Belum Ada Data (TAD)	TOTAL
1	Dinas Kesehatan	**14**	**21**	0	**5**	**40**
2	Badan Pusat Statistik	**11**	**8**	0	**3**	**22**
3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	**3**	**9**	0	**3**	**15**
4	Dinas Lingkungan Hidup	**4**	**2**	**5**	**3**	**14**
5	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	**10**	0	**1**	**2**	**13**
6	Dinas Tenaga Kerja	**7**	**1**	0	**4**	**12**
7	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	**4**	**5**	**2**	**1**	**12**

NO.	PERANGKAT DAERAH	Sudah Mencapai Target Nasional (SS)	Belum Mencapai Target Nasional (SB)	Belum Tercapai (BB)	Tidak/Belum Ada Data (TAD)	TOTAL
	Perlindungan Anak					
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	3	0	0	11
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	5	0	2	9
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	3	0	0	8
11	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	0	3	3	0	6
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4	1	0	0	5
13	Sekretariat Daerah	3	1	1	0	5
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	0	1	1	5
15	Dinas Pariwisata	2	1	0	2	5
16	Dinas Pertanian dan Pangan	1	0	0	3	4
17	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	0	0	2	3
18	Satuan Polisi Pamong Praja	0	2	0	1	3
19	Dinas Perhubungan	2	0	0	0	2
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	0	0	0	2
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	0	0	2
22	Inspektorat Daerah	1	1	0	0	2
23	Sekretariat DPRD	1	0	0	1	2
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	0	0	1
25	PDAM	1	0	0	0	1
26	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	0	0	1	0	1
-	TOTAL	91	67	14	33	205

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kulon Progo 2025-2029, diolah

Secara keseluruhan, dari total 205 indikator TPB yang terdapat di berbagai PD di Kabupaten Kulon Progo, sebanyak 91 indikator (44,39%) telah mencapai target nasional (SS), 67 indikator (32,68%) sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), 14 indikator (6,83%) belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB), serta 33 indikator (16,10%) masih belum memiliki data yang cukup (TAD).

Dari sisi per PD, Badan Pusat Statistik memiliki capaian tertinggi dengan 22 indikator, diikuti oleh Dinas Kesehatan dengan 40 indikator. Sementara itu, beberapa PD seperti Bakesbangpol dan Dinas Perhubungan memiliki capaian yang relatif rendah. Selain itu, sebagian PD masih memiliki sejumlah indikator yang belum memiliki data yang cukup (TAD), sehingga perlu diperhatikan dalam pengumpulan dan pelaporan data ke depannya.

Pencapaian TPB di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya kemajuan yang nyata di berbagai sektor, namun tetap ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam meningkatkan capaian indikator yang belum mencapai target dan mengatasi ketiadaan data untuk beberapa indikator.

Pencapaian TPB di Kabupaten Kulon Progo memiliki hubungan yang erat dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Indikator TPB yang telah mencapai target nasional (SS) menunjukkan bahwa dalam sektor-sektor tersebut, ada keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Misalnya, jika indikator pangan mencapai target, ini dapat berarti bahwa praktik pertanian yang lestari telah diterapkan, menjaga kesuburan tanah dan siklus air, sehingga tidak melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Di sisi lain, indikator TPB yang belum mencapai target nasional (SB) atau belum dilaksanakan (BB) dapat menunjukkan potensi tekanan pada lingkungan. Contohnya, jika indikator pengurangan limbah belum tercapai, ini dapat berarti adanya peningkatan polusi yang dapat melebihi daya tampung lingkungan. Hal ini dapat mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengancam keberlanjutan pembangunan.

Selain itu, indikator TPB yang tidak memiliki data yang cukup (TAD) menunjukkan adanya kesenjangan dalam monitoring dan evaluasi dampak pembangunan terhadap lingkungan. Tanpa data yang akurat, sulit untuk menilai apakah pembangunan yang dilakukan masih dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja TPB harus selalu diiringi dengan pemantauan yang ketat terhadap dampak lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan pendekatan yang seimbang antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, Kabupaten Kulon Progo dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan sejati.

Berdasarkan kesimpulan KLHS, isu pembangunan berkelanjutan strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

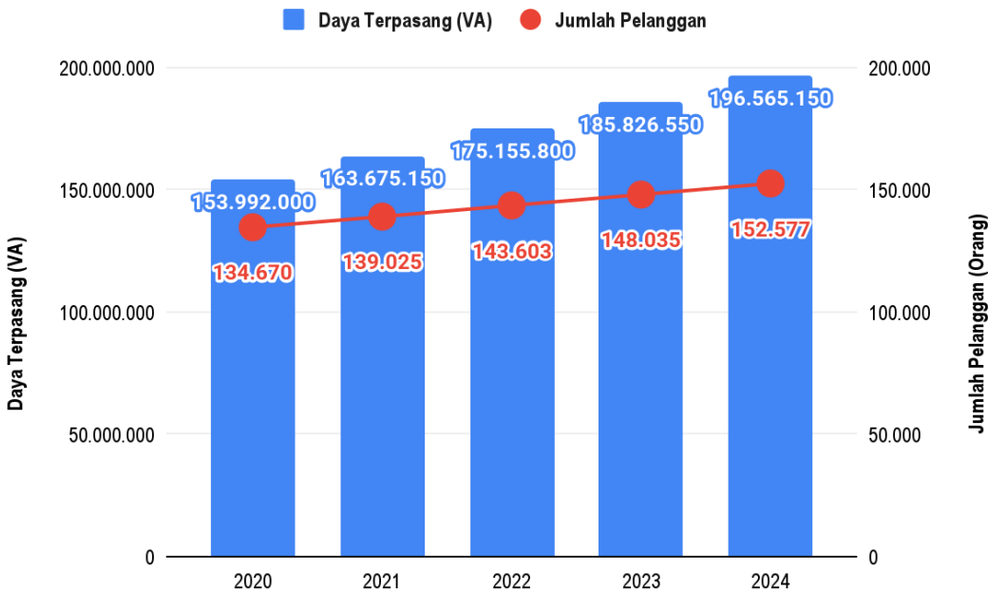
1. **Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air**: Berpotensi menyebabkan tekanan pada sumber daya air di Kulon Progo, memperburuk daya dukung lingkungan terutama di bidang pertanian dan kehidupan air. Kualitas air yang rendah juga dapat memengaruhi kesehatan penduduk setempat.
2. **Alih Fungsi Lahan yang tidak Sesuai Rencana Tata Ruang**: berpotensi menyebabkan degradasi tanah dan kehilangan sumber daya alam lainnya. Perubahan penggunaan lahan yang tidak terencana juga dapat meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor.
3. **Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal**: Perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak melebihi batas daya dukung dan daya tampung lingkungan dan berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.
4. **Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah**: berpotensi menyebabkan kebijakan lingkungan yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan.

5. **Pembangunan SDM belum Optimal**: Peningkatan kapasitas SDM penting untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
6. **Ancaman Bencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim**: berpotensi memperburuk daya dukung lingkungan dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir, kekeringan, dan longsor. Perubahan iklim juga dapat memengaruhi pola curah hujan dan siklus air.
7. **Kurangnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Lokal**: Kebudayaan lokal seringkali memiliki pengetahuan dan praktik berkelanjutan yang dapat mendukung pelestarian lingkungan. Kurangnya pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan dan praktik tersebut.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.4.A Konsumsi Listrik

Ketahanan energi di Kabupaten Kulon Progo menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, meskipun kewenangan utama pengelolaan energi berada pada pemerintah provinsi dan pusat. Peran pemerintah kabupaten diwujudkan melalui fasilitasi, kolaborasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan aksesibilitas energi secara berkeadilan.



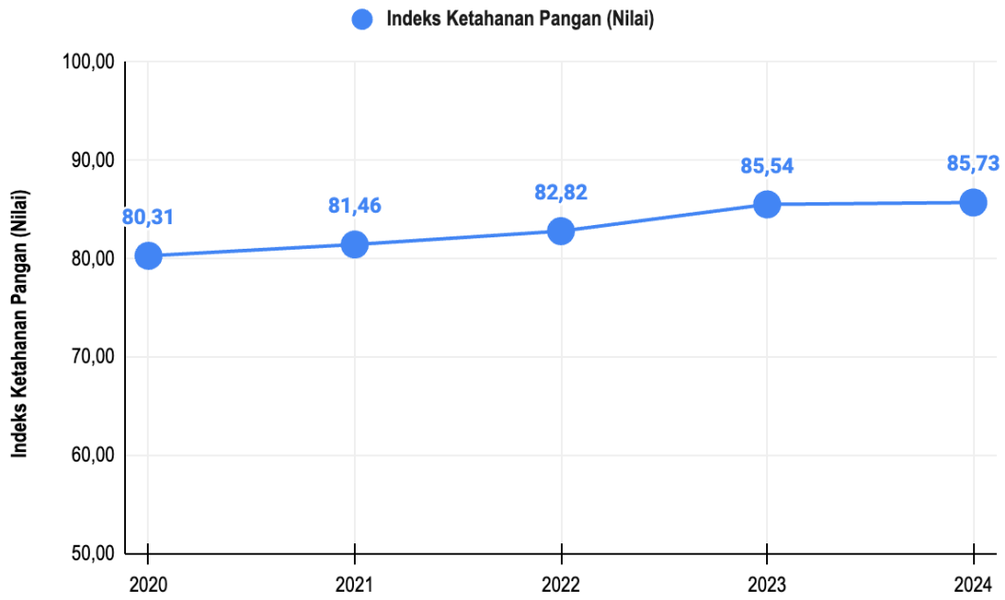
Gambar 2.1.1.4.A-1 Perkembangan Daya Terpasang dan Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.1.1.4.A-1, selama periode 2020–2024 daya terpasang listrik pelanggan di Kabupaten Kulon Progo meningkat dari 153,99 juta VA pada tahun 2020 menjadi 196,56 juta VA pada tahun 2024, atau naik sekitar 27,7 persen. Pada periode yang sama, jumlah pelanggan listrik bertambah dari 134.670 pelanggan menjadi 152.577 pelanggan, atau naik sekitar 13,3 persen. Peningkatan daya terpasang dan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan adanya perluasan akses listrik masyarakat, yang selanjutnya berkontribusi pada peningkatan konsumsi listrik per kapita sebagai salah satu Indikator Utama Pembangunan. Sebagai catatan, data daya terpasang dan jumlah

pelanggan yang ditampilkan pada Gambar 2.1.1.4.A-1 masih digunakan sebagai indikator proksi untuk menggambarkan perkembangan ketahanan energi di Kabupaten Kulon Progo.

2.1.1.4.B Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu daerah, dengan mempertimbangkan empat dimensi utama, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan. IKP menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi sejauh mana suatu wilayah mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan.



Gambar 2.1.1.4.B-1 Grafik Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2025

Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan IKP yang konsisten selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan perbaikan kondisi ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2020, IKP tercatat sebesar 80,31, kemudian mengalami kenaikan menjadi 81,46 pada tahun 2021, 82,82 pada tahun 2022, 85,54 pada tahun 2023, dan mencapai 85,73 pada tahun 2024. Nilai ini menempatkan Kabupaten Kulon Progo dalam kategori daerah dengan ketahanan pangan yang cukup tinggi dan stabil.

Peningkatan IKP tersebut secara langsung berdampak positif terhadap sejumlah aspek pembangunan sosial, seperti penurunan angka kemiskinan, pencegahan stunting, serta peningkatan capaian layanan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian dan distribusi pangan, tetapi juga berdampak lintas sektor terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan, antara lain melalui:

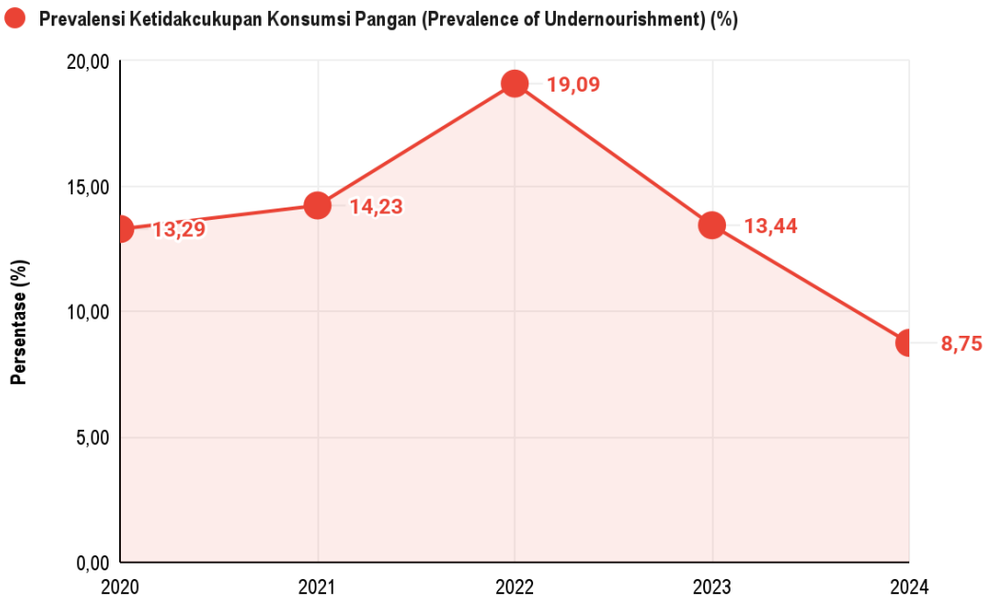
1. Peningkatan produksi pangan lokal berbasis potensi wilayah;
2. Penguatan sistem distribusi dan infrastruktur logistik pangan;
3. Diversifikasi konsumsi pangan bergizi dan aman;
4. Peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan, khususnya petani dan UMKM;

5. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dengan implementasi kebijakan ketahanan pangan yang terarah dan berkelanjutan, Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan indeks ketahanan pangan, sebagai fondasi penting menuju pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

2.1.1.4.C Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah merancang berbagai program untuk memperkuat ketahanan pangan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, edukasi konsumsi pangan bergizi seimbang, serta intervensi kebijakan yang menyasar kelompok rentan. Meski demikian, tantangan masih dihadapi terutama dalam menjaga keberlanjutan akses pangan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk daerah perdesaan dan kantong-kantong kemiskinan.



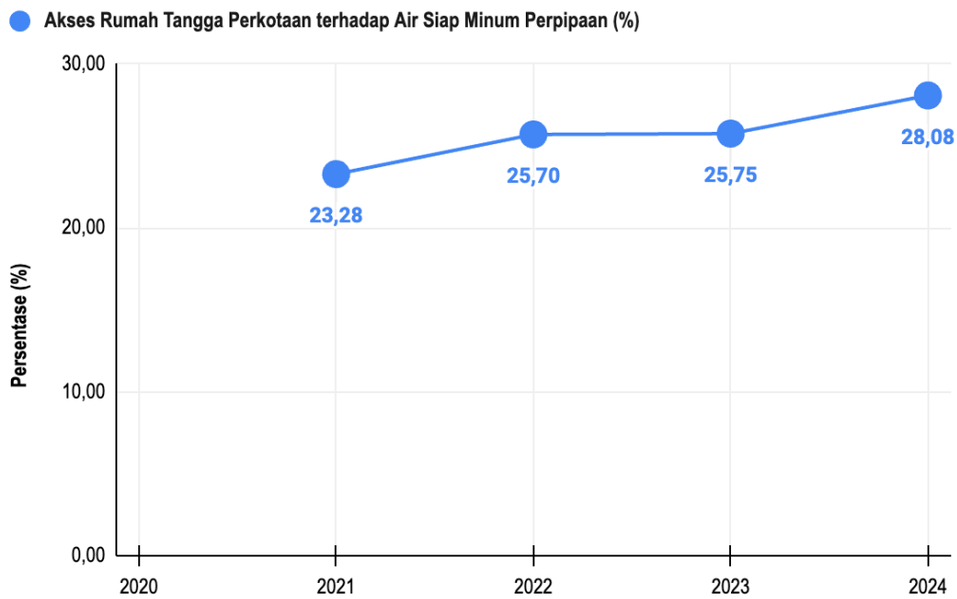
Gambar 2.1.1.4.C-1 Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 2.1.1.4.C-1. Realisasi indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, yang merepresentasikan proporsi penduduk dengan asupan pangan di bawah standar kecukupan energi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, tercatat sebesar 13,29 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 14,23 persen pada tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada 2022 hingga mencapai 19,09 persen, yang mengindikasikan semakin banyak penduduk mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan, sehingga berpotensi menurunkan kesehatan dan produktivitas. Namun, capaian ini membaik pada tahun-tahun berikutnya, dengan penurunan menjadi 13,44 persen pada 2023 dan 8,75 persen pada 2024. Tren penurunan ini mencerminkan perbaikan akses dan ketersediaan pangan yang lebih baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas gizi, yang selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

2.1.1.4.D Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat dan pemenuhan hak dasar atas air bersih. Indikator ini menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun keberlanjutan distribusinya. Peningkatan akses air minum berkontribusi langsung terhadap penurunan risiko penyakit yang ditularkan melalui air, perbaikan status gizi, serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.1.1.4.D-1 Grafik Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber : DPUPKP Kab. Kulon Progo, 2025

Peningkatan dari 23,28% pada tahun 2021 menjadi 28,08% pada tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penyediaan sarana air minum yang lebih merata dan berkualitas bagi rumah tangga. Meskipun pertumbuhan relatif stabil, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi, mengingat capaian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga belum sepenuhnya memiliki akses yang optimal terhadap air minum layak. Faktor-faktor yang memengaruhi capaian indikator ini antara lain:

1. Ketersediaan infrastruktur air bersih (jaringan perpipaan, sumur bor, dan lain-lain);
2. Kualitas dan keberlanjutan sumber air;
3. Kondisi geografis dan keterpencilan wilayah;
4. Tingkat literasi dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi air bersih.

Untuk meningkatkan akses air minum, diperlukan langkah strategis seperti pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis wilayah, perluasan layanan PDAM dan jaringan air bersih, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air lokal. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang meliputi semua benda, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan makhluk hidup. Di Kabupaten Kulon Progo, proyek-proyek strategis yang sedang dibangun membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat, yang juga membawa risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat menurunkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan, yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik.

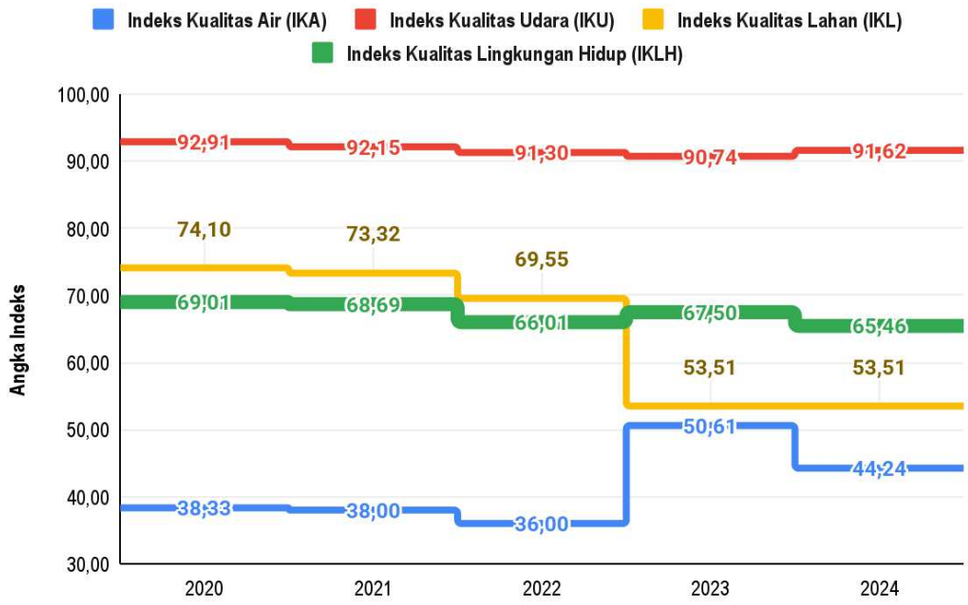
2.1.1.5.A Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 27 Tahun 2021, IKLH terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Metodologi Pengukuran yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air dihitung dari delapan parameter yang diukur pada sembilan sungai utama di Kulon Progo, yaitu Sungai Serang, Papah, Papak, Sudu, Nagung, Tedunan/Gede, Tinalah, Ngrancah, dan Pening. Parameter tersebut meliputi pH, DO, BOD, COD, TSS, NO3-N, T-Phosphate, dan Fecal Coliform.
2. Indeks Kualitas Udara dihitung dari parameter SO dan NO yang dipantau di 13 lokasi perwakilan area perkantoran, industri, permukiman, dan transportasi.
3. Indeks Kualitas Lahan diperoleh dari analisis data spasial terkait tutupan vegetasi.

Sehingga dari uraian tersebut, perhitungan IKLH menggunakan formula sebagai berikut: ***IKLH = (37,6% x IKA) + (40,5% x IKU) + (21,9% x IKL)***

Selanjutnya, nilai IKLH Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 cenderung fluktuatif. Capaian tahun 2024 sebesar 65,46 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini ditopang oleh tingginya capaian IKU dan meningkatnya IKA dibandingkan tahun sebelumnya. Gambar 2.1.1.5.A-1 berikut menyajikan capaian lengkap seluruh komponen IKLH selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.1.1.5.A-1 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, 2025

IKA tahun 2024 tercatat sebesar 44,24 (kategori *"Kurang"*), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 (50,61). Penurunan ini antara lain disebabkan oleh variasi musim yang mempengaruhi pola pencemaran dan dinamika air sungai. Pemantauan yang dilakukan pada dua periode (musim kemarau dan musim penghujan) menunjukkan adanya pengaruh sedimentasi saat kemarau dan peningkatan kekeruhan saat musim hujan.

Sungai yang telah melebihi baku mutu lingkungan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil pemantauan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Sungai Serang Periode 1 dan 2 pada Parameter Total *Phosphate;*
2. Sungai Papah Periode 1 dan 2 pada Parameter Total *Suspended Solid (TSS),* Total *Phosphate,* dan *Fecal Coliform;*
3. Sungai Papak Periode 1 dan 2 pada Parameter Total *Phosphate* dan *Fecal Coliform;*
4. Sungai Sudu Periode 1 dan 2 pada Parameter Total *Suspended Solid (TSS),* Total *Phosphate,* dan *Fecal Coliform;*
5. Sungai Nagung Periode 1 dan 2 pada Parameter Total *Phosphate, Chemical Oxygen Demand (COD),* dan *Fecal Coliform;*
6. Sungai Sumitro Periode 1 dan 2 pada Parameter Total *Phosphate,* Nitrat, dan *Fecal Coliform;*
7. Sungai Tinalah Periode 1 dan 2 pada Parameter Total *Phosphate* dan *Fecal Coliform;*
8. Sungai Ngrancah Periode 1 dan 2 pada Parameter Total *Suspended Solid (TSS), Total Phosphate,* dan *Fecal Coliform;*
9. Sungai Pening Periode 1 dan 2 pada Parameter Total *Phosphate* dan *Fecal Coliform.*

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian besar sungai mengalami pencemaran melebihi baku mutu, khususnya pada parameter TSS, *Total Phosphate,* dan *Fecal Coliform.* Sumber pencemar berasal dari limpasan permukaan, aktivitas lokal (limbah cair buangan manusia dan kegiatan rumah tangga), limbah pertanian, dan limbah

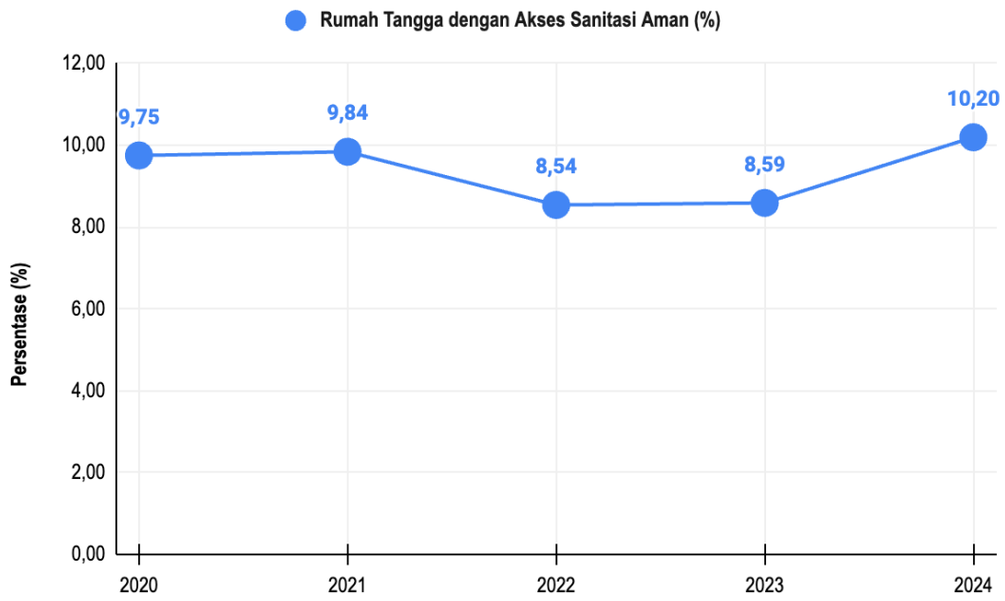
hewan ternak. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika pencemaran dari hulu ke hilir.

Capaian IKU pada tahun 2024 adalah sebesar 91,62 (kategori *"Sangat Baik"*). Lokasi pemantauan kualitas udara berada di 13 lokasi yaitu DLH Kabupaten Kulon Progo, Perumahan Kasatriyan Giripeni, sekitar PT. Aneka Sinendo Sentolo, Kantor Cabang BRI Karangnongko, Perumahan Gondangdia Margosari, Kawasan Peruntukan Industri Tuksono, Perempatan Ngeplang Sentolo, Pertigaan Brosot, Jalan Ngentakrejo Lendah, Jalan Plono, Perempatan Dekso Kalibawang, Perempatan Kenteng Nanggulan, Jalan sekitar Kiskendo Jatimulyo. Parameter NO dan SO digunakan sebagai indikator utama, masing-masing merepresentasikan emisi dari kendaraan berbahan bakar bensin dan aktivitas industri/transportasi berbahan bakar solar.

Nilai IKL pada tahun 2024 adalah 53,51 (kategori *"Sedang"*), dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan stagnasi dalam perubahan tutupan vegetasi. Ketepatan data IKL sangat bergantung pada ketersediaan data spasial yang terbarui dan telah melalui proses delineasi. Oleh karena itu, kolaborasi antar perangkat daerah dalam menyajikan data spasial yang akurat, *up-to-date,* dan terstandar menjadi krusial.

2.1.1.5.B Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses terhadap sanitasi yang aman merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat dan upaya pemenuhan hak dasar atas lingkungan sehat. Indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman mengukur persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak, terjaga, dan tidak mencemari lingkungan. Ketersediaan sanitasi aman berdampak langsung terhadap pencegahan penyakit, pengurangan stunting, serta peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.1.1.5.B-1 Grafik Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber : DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan data perkembangan selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai indikator tercatat sebesar 9,75 persen dan meningkat menjadi 9,84 persen pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 8,54 persen yang kemudian sedikit membaik menjadi 8,59 persen di tahun 2023. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 10,195 persen, menjadikannya nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir.

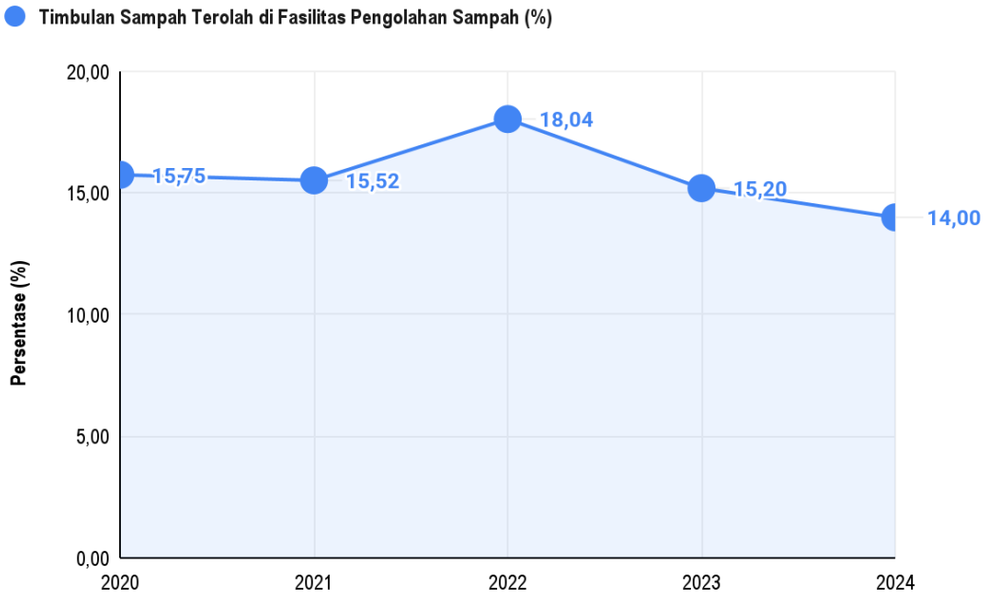
Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam pemenuhan infrastruktur sanitasi dasar, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kapasitas anggaran, kondisi geografis, perilaku masyarakat, serta keberlanjutan program sanitasi berbasis komunitas. Meskipun terdapat kemajuan di tahun terakhir, capaian ini masih relatif rendah dan menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi aman.

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui pembangunan sarana sanitasi di wilayah tertinggal, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga donor, dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan sistem sanitasi aman dan inklusif. Strategi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target akses sanitasi universal sebagaimana ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak untuk Semua.

2.1.1.5.C Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah adalah jumlah timbulan sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan sampah, baik berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, maupun unit pengolahan lainnya. Indikator ini mencerminkan kapasitas sistem pengelolaan persampahan suatu daerah dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan.

Total timbulan sampah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2024 sebesar 79.177,19. Angka ini diperoleh dari jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Kulon Progo dalam rentang waktu 1 tahun dengan rata-rata per orang menghasilkan 0,488/Kg. Timbulan tersebut ditangani melalui fasilitas pengolahan sampah di TPA Banyuroto sebesar 11.085,05 Ton di tahun 2024.



Gambar 2.1.1.5.C-1 Grafik Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan Gambar 2.1.1.5.C-1, tren timbulan sampah yang terolah menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah sampah terolah tercatat sebesar 15,75 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 15,52 persen pada tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian tertinggi sebesar 18,04 persen, yang mencerminkan adanya optimalisasi fasilitas pengolahan pada tahun tersebut. Namun, angka ini kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 15,20 persen, dan berlanjut menurun pada tahun 2024 hingga mencapai 14,00 persen.

Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa kapasitas dan keberlanjutan operasional fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Kulon Progo masih menghadapi tantangan. Penurunan timbulan sampah yang terolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya infrastruktur dan armada pengangkutan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber, serta belum optimalnya pengelolaan fasilitas yang ada.

Pada tahap ini, Kabupaten Kulon Progo belum memiliki pusat daur ulang sampah. Fasilitas pemrosesan akhir sampah ada di TPA Banyuroto dan residu sampah dari TPS3R dibuang di TPA Banyuroto. Upaya peningkatan jumlah sampah yang terolah perlu dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, perluasan infrastruktur pengolahan sampah terpadu, serta integrasi kebijakan persampahan dengan pendekatan ekonomi sirkular. Selain itu, penguatan edukasi publik mengenai pemilahan sampah dan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga menjadi strategi kunci untuk memperkuat ketahanan sistem pengelolaan sampah jangka panjang.

2.1.1.5.D Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Ketersediaan layanan pengumpulan sampah yang menyeluruh merupakan indikator penting dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat. Proporsi rumah tangga (RT) yang memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah mencerminkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah yang terorganisir dan terstandarisasi. Realisasi capaian indikator ini di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, sebagaimana tersaji secara lengkap dalam Tabel 2.1.1.5.D-1 berikut.

Tabel 2.1.1.5.D-1 Capaian Indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020–2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CARA PERHITUNGAN & ELEMEN DATA PENYUSUN INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	KET.
1	**Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah *) di seluruh wilayah Kab. Kulon Progo**	**%**	**(Total Jumlah Pelanggan / Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Kulon Progo) x 100%**	**1,82**	**1,93**	**2,07**	**3,55**	**8,36**	***) di seluruh wilayah Kab. Kulon Progo**
			Total Jumlah Pelanggan (Orang)	*2.777,00*	*2.982,00*	*3.204,00*	*5.544,00*	*13.130,00*	
			Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Kulon Progo (RT)	*153.000,00*	*154.444,00*	*155.000,00*	*156.000,00*	*157.000,00*	
2	**Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah *) di Perkotaan Wates**	**%**	**(Total Jumlah Pelanggan / Jumlah Rumah Tangga di Wates) x 100%**	**57,65**	**61,84**	**66,06**	**72,67**	**86,07**	***) Hanya di Perkotaan Wates**
			Total Jumlah Pelanggan (Orang)	*2.777,00*	*2.982,00*	*3.204,00*	*3.617,00*	*4.225,00*	
			Jumlah Rumah Tangga di Wates (RT)	*4.817,00*	*4.822,00*	*4.850,00*	*4.977,00*	*4.909,00*	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, 2025

Secara agregat, proporsi RT yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo meningkat dari 1,82 persen pada tahun 2020 menjadi 8,36 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan jumlah pelanggan layanan pengumpulan sampah dari 2.777 rumah tangga pada tahun 2020 menjadi 13.130 rumah tangga pada tahun 2024, sementara jumlah total rumah tangga secara keseluruhan meningkat lebih moderat dari 153.000 menjadi 157.000 dalam kurun waktu yang sama. Hal ini menunjukkan adanya perluasan cakupan layanan penuh pengumpulan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Sebagai perbandingan, capaian proporsi RT dengan layanan pengumpulan sampah di kawasan perkotaan Wates menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, yaitu meningkat dari 57,65 persen pada tahun 2020 menjadi 86,07 persen pada tahun 2024. Jumlah pelanggan layanan di wilayah ini tumbuh dari 2.777 menjadi 4.225, dengan jumlah rumah tangga relatif stabil di kisaran 4.800 hingga 4.900 rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan pengumpulan sampah lebih terfokus dan efektif di wilayah perkotaan, terutama karena ketersediaan infrastruktur, kemudahan aksesibilitas, cakupan yang lebih kecil (spesifik) dan sistem pengelolaan yang lebih mapan.

Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam hal peningkatan jumlah pelanggan dan proporsi RT yang terlayani, tantangan utama masih terletak pada perluasan akses di wilayah perdesaan dan kawasan yang belum terjangkau layanan reguler. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan skema kemitraan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta optimalisasi pembiayaan berbasis kinerja untuk mempercepat pencapaian target layanan pengumpulan sampah yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.6.A Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan analisis risiko bencana, Kabupaten Kulon Progo mengidentifikasi 12 potensi bencana, yaitu: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah/tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, epidemi/wabah penyakit, serta kegagalan teknologi. Tiap bencana memiliki tingkat risiko yang bervariasi, bergantung pada faktor geologi, hidrometeorologi, dan kondisi sosial ekonomi setempat.

Dengan bentang alam yang beragam, wilayah pesisir lebih rentan terhadap tsunami dan gelombang ekstrem, sedangkan kawasan perbukitan memiliki potensi tinggi terhadap gerakan tanah dan tanah longsor. Perubahan iklim juga mempertinggi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, kekeringan, dan cuaca ekstrem.

Upaya mitigasi yang komprehensif melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan infrastruktur tahan bencana, dan optimalisasi sistem peringatan dini serta respons penanggulangan diharapkan mampu meminimalisir dampak bencana dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Informasi klasifikasi tingkat risiko masing-masing potensi bencana ditampilkan pada Tabel 2.1.1.6.A-1.

Tabel 2.1.1.6.A-1 Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Kulon Progo

#	KATEGORI BENCANA	NO.	JENIS POTENSI BENCANA	TINGKAT RISIKO BENCANA
A.	**Geologi**			
		1	Gempa Bumi	Tinggi
		2	Tsunami	Tinggi
		3	Letusan Gunung Api	Rendah
		4	Gerakan Tanah / Tanah Longsor	Tinggi
B.	**Hidrometeorologi**			
		5	Banjir	Tinggi
		6	Banjir Bandang	Tinggi
		7	Kekeringan	Tinggi
		8	Cuaca Ekstrem	Tinggi
		9	Gelombang Ekstrem	Sedang
		10	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang
C.	**Biologi**			
		11	Epidemi / Wabah Penyakit	Tinggi
D.	**Anthropogenik**			
		12	Kegagalan Teknologi	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

Tingkat risiko bencana tidak hanya ditentukan oleh potensi bahaya, tetapi juga oleh frekuensi kejadian yang tercatat di masing-masing wilayah. Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo mengalami berbagai jenis kejadian bencana dengan intensitas yang berbeda-beda di setiap kapanewon. Data rekapitulasi kejadian menunjukkan bahwa beberapa wilayah seperti Kokap, Pengasih, Girimulyo, dan Samigaluh menjadi lokasi dengan jumlah kejadian tertinggi, khususnya terkait dengan bencana hidrometeorologi

seperti kekeringan, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Bencana tanah longsor dan kekeringan merupakan jenis yang paling sering terjadi, mengindikasikan kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim dan karakteristik topografi. Sementara itu, pada tahun 2024 tidak terjadi bencana tsunami, letusan gunung api, gelombang ekstrem, wabah penyakit, kegagalan panen, dan kebakaran hutan.

Meskipun begitu, jenis-jenis bencana tersebut tetap dalam pemantauan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Rincian jumlah kejadian bencana per jenis dan per kapanewon selama tahun 2024 secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.1.1.6.A-2 berikut ini.

Tabel 2.1.1.6.A-2 Rekapitulasi Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

NO.	KAPANEWON	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LESTUSAN GUNUNG API	GELOMBANG EKSTREM	CUACA EKSTRIM / ANGIN KENCANG	KEKERINGAN	WABAH PENYAKIT	KEGAGALAN PANEN	KONFLIK SOSIAL	KEBAKARAN LAHAN	KEBAKARAN GEDUNG	KEBAKARAN HUTAN	KEBAKARAN PERMUKIMAN	KEBAKARAN LAIN-LAIN	TOTAL KEJADIAN
1	Temon	0	0	0	2	0	0	22	0	0	0	0	6	0	0	2	0	32
2	Wates	0	0	7	4	0	0	23	0	0	0	0	5	2	0	10	2	53
3	Panjatan	0	0	0	0	0	0	63	38	0	0	0	4	0	0	2	0	107
4	Galur	0	0	0	1	0	0	37	0	0	0	1	4	1	0	4	0	48
5	Lendah	0	0	3	0	0	0	28	0	0	0	0	3	0	0	2	1	37
6	Sentolo	1	0	0	0	0	0	27	0	0	0	2	5	1	0	5	1	42
7	Pengasih	0	0	5	20	0	0	31	48	0	0	0	7	1	0	6	0	118
8	Kokap	0	0	0	91	0	0	52	359	0	0	0	7	0	0	6	0	515
9	Girimulyo	0	0	0	28	0	0	29	140	0	0	0	0	0	0	3	0	200
10	Nanggulan	0	0	1	3	0	0	24	3	0	0	0	2	1	0	5	1	40
11	Samigaluh	0	0	0	37	0	0	28	124	0	0	0	1	0	0	2	0	192
12	Kalibawang	0	0	0	21	0	0	42	66	0	0	0	0	0	0	2	0	131
-	Total	1	0	16	207	0	0	406	778	0	0	3	44	6	0	49	5	1515

Keterangan:

- Pada kolom Gempa Bumi hingga Kebakaran Lain-lain, data disajikan menggunakan *color scale;*
- Warna lebih kontras menunjukkan jumlah kejadian bencana yang semakin banyak.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

Pemetaan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah rawan bencana merupakan langkah krusial dalam pengelolaan risiko dan perencanaan mitigasi yang efektif. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo memiliki populasi yang terdampak oleh satu atau lebih jenis ancaman bencana, dengan variasi tingkat kerentanan yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis dan demografis masing-masing wilayah.

Sebagian besar penduduk terpapar risiko bencana gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran, dan epidemi/wabah penyakit. Kelima jenis bencana ini tersebar hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo, dan kolom yang memuat data terkait dalam Tabel 2.1.1.6.A-3 mencerminkan angka absolut jumlah penduduk tiap kapanewon. Dengan demikian, data tersebut secara langsung mengindikasikan tingkat kerawanan yang tinggi secara menyeluruh terhadap lima jenis bencana tersebut.

Sementara itu, paparan terhadap ancaman spesifik seperti tsunami dan tanah longsor menunjukkan distribusi yang lebih spasial. Beberapa wilayah seperti Temon, Wates, dan Panjatan memiliki jumlah penduduk yang signifikan tinggal di zona rawan tsunami, sedangkan Kokap, Samigaluh, dan Girimulyo mencatat jumlah yang cukup besar berada di wilayah rawan tanah longsor.

Informasi ini menjadi dasar penting dalam penentuan prioritas wilayah dan kelompok sasaran untuk program pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. Rincian lengkap data jumlah penduduk per kapanewon menurut jenis ancaman bencana disajikan dalam Tabel 2.1.1.6.A-3 berikut.

Tabel 2.1.1.6.A-3 Jumlah Penduduk Per Kapanewon yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana, Tahun 2024 (dalam jiwa)

NO.	KAPANEWON	JUMLAH PENDUDUK PER KAPANEWON PADA SETIAP JENIS ANCAMAN BENCANA									
		GEMPA BUMI	TSUNAMI	LETUSAN GUNUNG API	LONGSOR	BANJIR	KEKERINGAN	CUACA EKSTREM	GELOMBANG EKSTREM	KEBAKARAN	EPIDEMI / WABAH PENYAKIT
1	Temon	29.125	29.125	0	7.714	29.125	29.125	29.125	9.414	29.125	29.125
2	Wates	48.948	26.630	0	0	48.948	48.948	48.948	3.526	48.948	48.948
3	Panjatan	38.784	38.784	0	0	38.784	38.784	38.784	13.097	38.784	38.784
4	Galur	32.749	32.749	12.997	0	32.749	32.749	32.749	13.851	32.749	32.749
5	Lendah	41.108	18.152	29.885	0	41.108	41.108	41.108	0	41.108	41.108
6	Sentolo	50.042	3.378	26.683	0	50.042	50.042	50.042	0	50.042	50.042
7	Pengasih	52.529	4.929	0	31.567	35.934	52.529	52.529	0	52.529	52.529
8	Kokap	36.115	17.568	0	36.115	0	36.115	36.115	0	36.115	36.115
9	Girimulyo	24.621	0	0	24.621	5.652	24.621	24.621	0	24.621	24.621
10	Nanggulan	30.883	0	15.458	24.345	30.883	30.883	30.883	0	30.883	30.883
11	Samigaluh	27.093	0	0	27.093	0	27.093	27.093	0	27.093	27.093
12	Kalibawang	29.877	0	29.877	29.877	29.877	29.877	29.877	0	29.877	29.877
-	Total	441.874	171.315	114.900	181.332	343.102	441.874	441.874	39.888	441.874	441.874

Keterangan:

- Kolom jenis ancaman bencana disajikan menggunakan skala warna *(color scale);* semakin kontras warna menunjukkan jumlah penduduk yang semakin besar.
- Kolom Gempa Bumi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Kebakaran, dan Epidemi/Wabah Penyakit menyajikan angka absolut jumlah penduduk per kapanewon itu sendiri.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kulon Progo, 2025

Wilayah Rawan Bencana Geologi

Wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki sejumlah karakteristik geologi yang menjadikannya rentan terhadap berbagai jenis bencana geologi, meliputi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah (tanah longsor).

Secara tektonik, Kabupaten Kulon Progo berada di zona dengan potensi aktivitas seismik yang cukup tinggi akibat keberadaan beberapa struktur sesar aktif. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko kejadian gempa bumi di sejumlah wilayah, yang tersebar merata terutama di bagian selatan dan tengah.

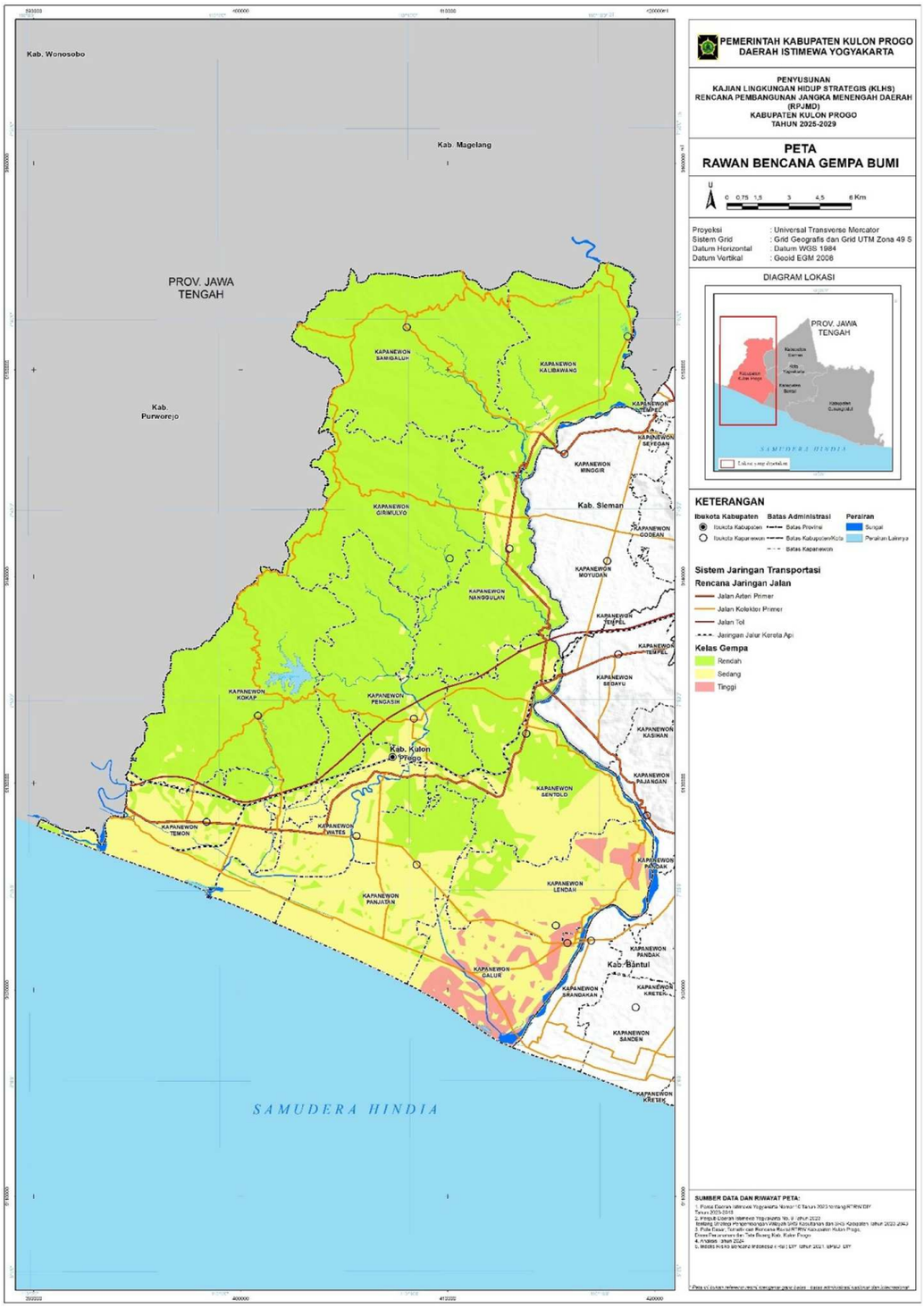
Terkait potensi tsunami, berdasarkan pemodelan BMKG (2021), skenario gempa megathrust berkekuatan M8,8 di selatan Pulau Jawa dapat memicu gelombang tsunami yang berdampak pada wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo. Sebanyak 4 kapanewon dan 31 kalurahan teridentifikasi berada dalam zona terdampak, dengan estimasi waktu tiba gelombang antara 38–42 menit, ketinggian maksimum 18–22 meter, dan jarak genangan mencapai hingga 7 km ke daratan. Upaya pengurangan risiko telah dilakukan, antara lain melalui pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana, pengembangan sistem peringatan dini, dan penyiapan jalur serta titik evakuasi.

Sementara itu, wilayah bagian utara dan barat Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh topografi berbukit dengan kemiringan lereng curam hingga sangat curam (>40°). Kapanewon Kokap, Samigaluh, dan Girimulyo merupakan kawasan dengan potensi tanah longsor yang paling tinggi, disusul oleh sebagian wilayah Kalibawang, Pengasih, dan Nanggulan. Kerentanan ini meningkat terutama saat musim hujan dan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ruang dan pembangunan infrastruktur.

Sebagai bentuk komitmen dalam meminimalkan risiko longsor, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi, baik struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan melalui intervensi pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana, seperti pembangunan talud penahan tanah, pemasangan sistem peringatan dini *(Early Warning System/EWS),* dan penguatan sistem drainase. Sementara itu, mitigasi non-struktural diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan, penyusunan regulasi di tingkat kalurahan, kajian risiko bencana, pembuatan standar operasional prosedur (SOP), serta pelaksanaan simulasi dan gladi evakuasi. Pendekatan ini secara komprehensif difasilitasi dalam program Desa/Kalurahan Tangguh Bencana.

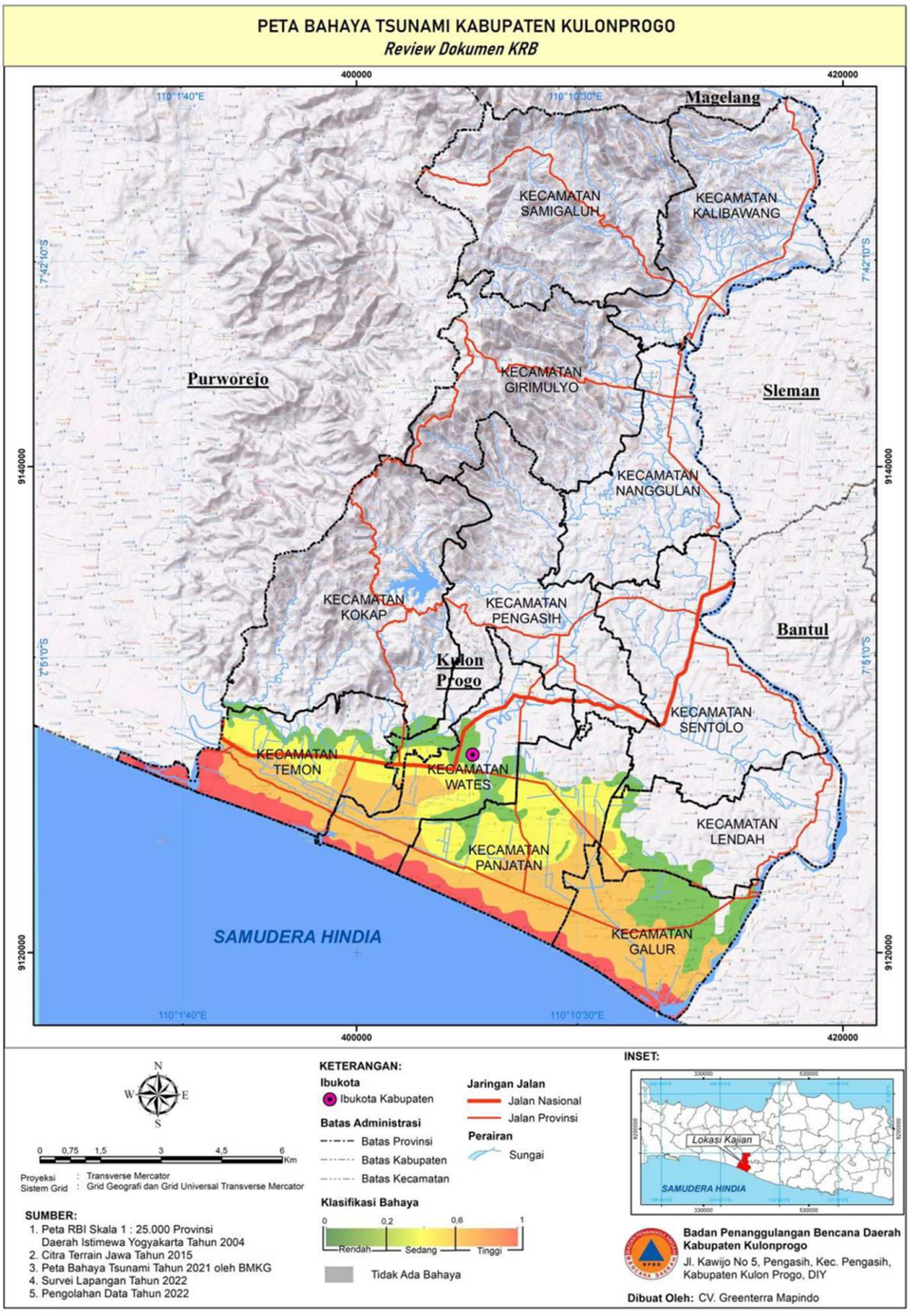
Sebaran spasial wilayah rawan terhadap bencana geologi di Kabupaten Kulon Progo disajikan pada peta-peta berikut:

1. Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi;
2. Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami; dan
3. Peta Wilayah Rawan Bencana Longsor.



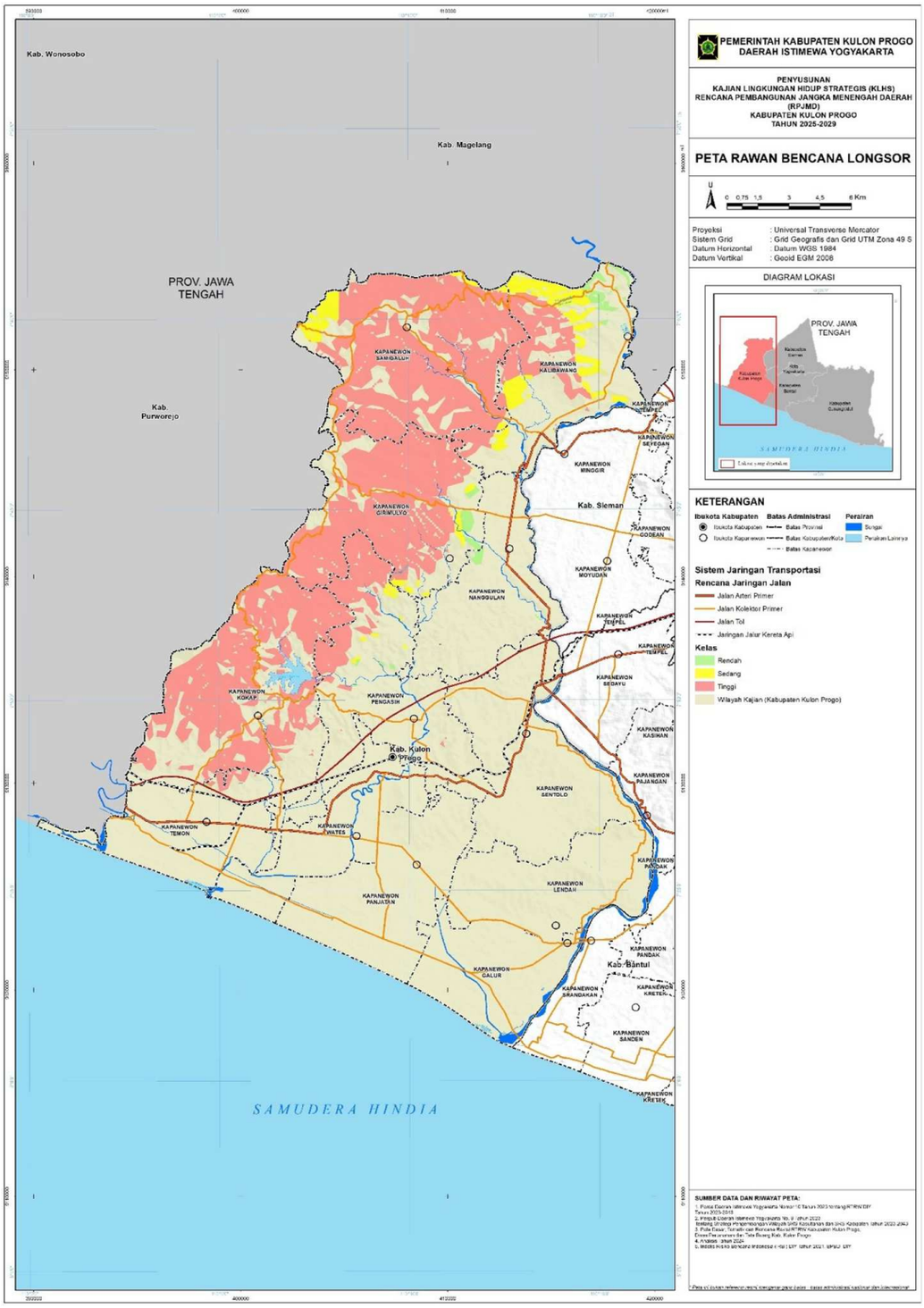
Gambar 2.1.1.6.A-1 Peta Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2025–2029



Gambar 2.1.1.6.A-2 Peta Wilayah Rawan Bencana Tsunami

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022



Gambar 2.1.1.6.A-3 Peta Wilayah Rawan Bencana Longsor

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2025–2029

Wilayah Rawan Bencana Hidrometeorologi

Wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi, terutama banjir, banjir bandang, kekeringan, dan cuaca ekstrem.

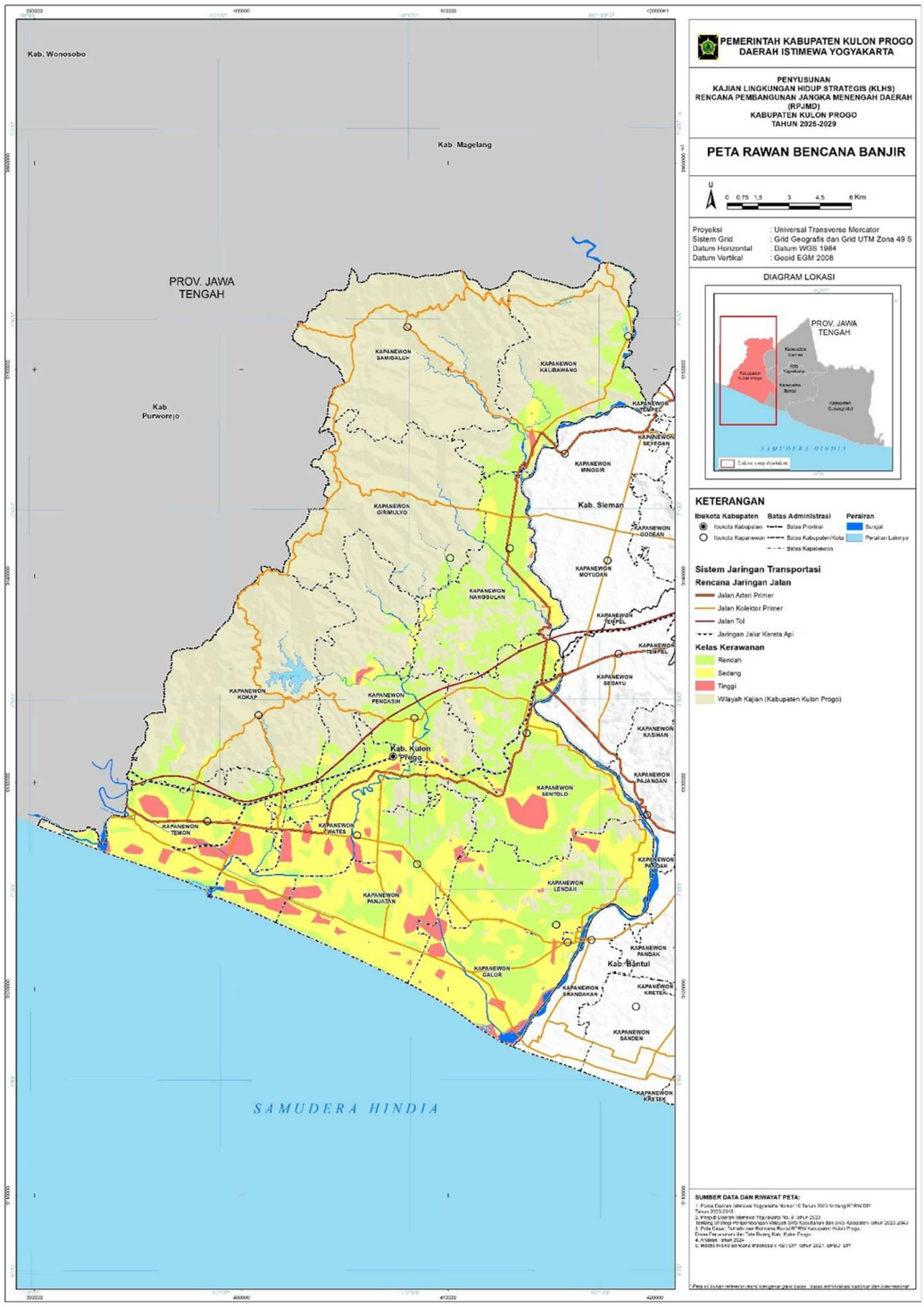
Bencana banjir dan banjir bandang umumnya dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan, terbatasnya kapasitas sistem drainase, serta kerentanan morfologi wilayah. Kabupaten Kulon Progo dilintasi oleh sejumlah DAS besar, seperti DAS Progo dan DAS Bogowonto, yang berkontribusi terhadap limpasan permukaan dengan debit besar, khususnya saat musim hujan. Banjir terjadi secara rutin di wilayah seperti Panjatan dan Temon, sementara banjir bandang berpotensi tinggi di wilayah perbukitan menoreh seperti Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Sentolo, Pengasih, Kokap, dan Nanggulan, yang memiliki kemiringan lereng curam dan indeks potensi banjir bandang *(Flash Flood Potential Index-FFPI)* tinggi. Penanganan banjir dilakukan melalui upaya konservatif (pengurangan laju limpasan dengan vegetasi), teknis (rehabilitasi dan normalisasi saluran), serta proyek *multiyears* pengendali banjir yang tengah berlangsung saat ini di sekitar Bandara *New Yogyakarta International Airport* (YIA) oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Kementerian PUPR.

Kekeringan juga menjadi tantangan tahunan, upaya dalam rangka menanggulangi bencana kekeringan dilakukan secara komprehensif dari berbagai pihak. Mulai dari upaya (edukasi) pelestarian sumber mata air yang digagas masyarakat, PAMSIMAS, SPAM Kalurahan, SPAM Mandiri Masyarakat, penambahan jaringan air bersih oleh Perumda Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo. Dalam kondisi kekeringan parah dan panjang upaya droping air bersih dilakukan dengan pelibatan kolaborasi berbagai stakeholder dari Pemerintah Kabupaten, BAZNAS, PMI, Perumda Air Minum Tirta Binangun dan lembaga lainnya.

Cuaca ekstrem di Kabupaten Kulon Progo meliputi fenomena hujan lebat, angin kencang, petir, serta cuaca panas ekstrem. Kejadian ini kerap menyebabkan kerusakan seperti pohon tumbang, gangguan jaringan listrik dan komunikasi, serta peningkatan risiko banjir dan longsor. Penyebab terjadinya cuaca ekstrem ini antara lain akibat peningkatan aliran udara basah dari Asia menuju wilayah Jawa. Selain itu juga faktor siklon tropis Savannah, yang berdampak pada ketersediaan uap air melimpah dalam pembentukan awan hujan di wilayah Pulau Jawa.

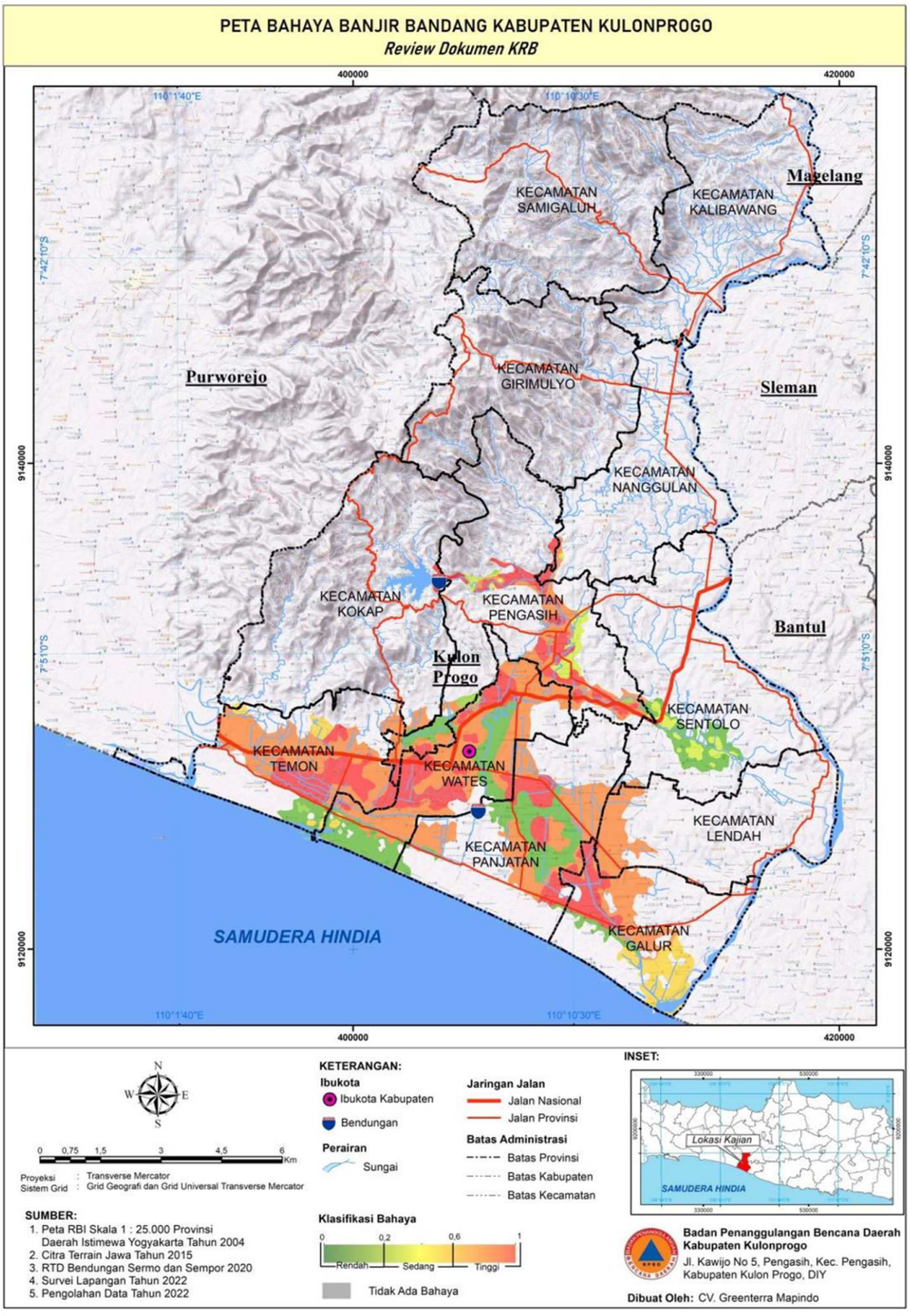
Sebaran wilayah yang memiliki potensi kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi di Kabupaten Kulon Progo disajikan dalam peta-peta tematik berikut:

1. Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir;
2. Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang;
3. Peta Wilayah Rawan Bencana Kekeringan; dan
4. Peta Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrem.



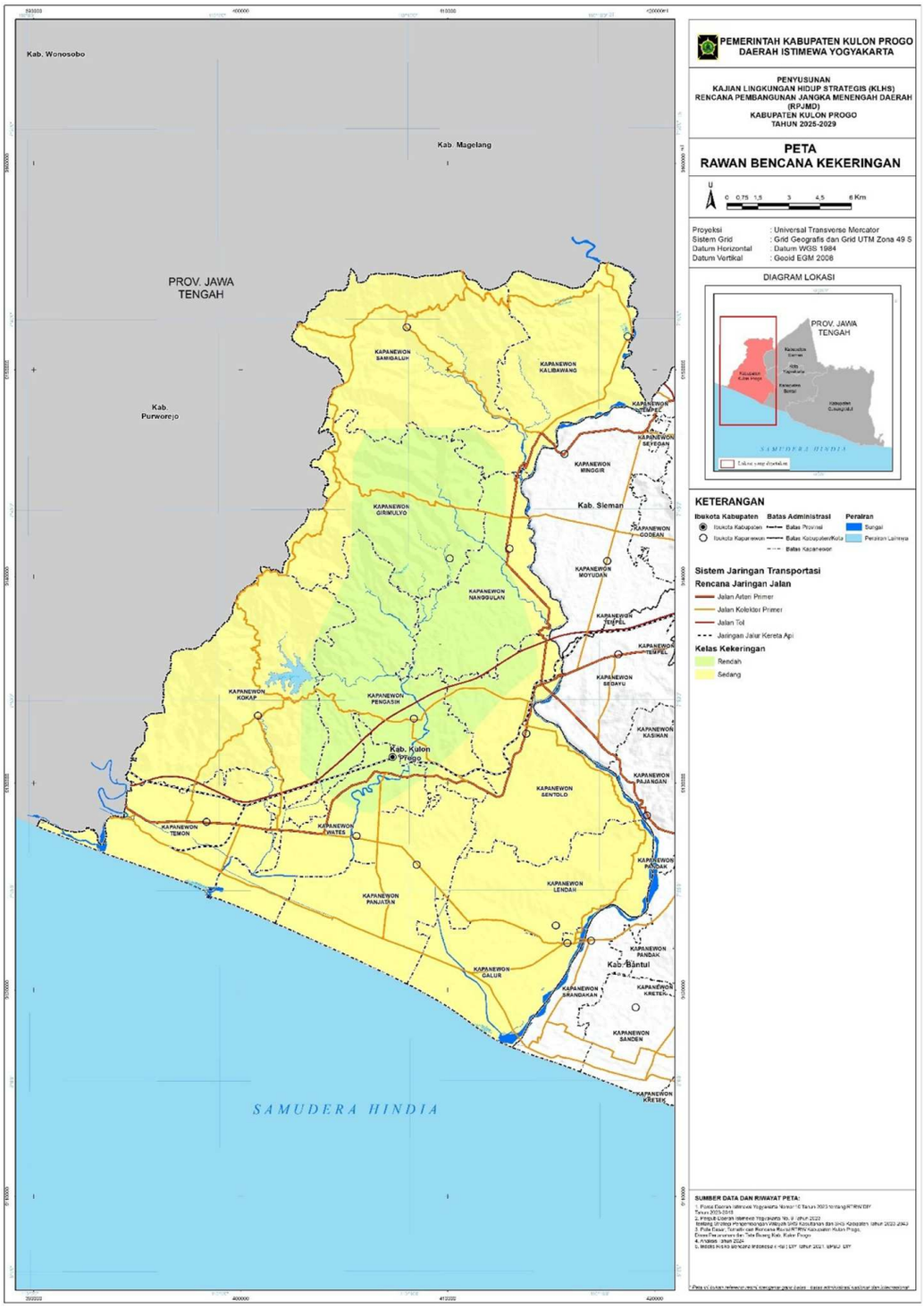
Gambar 2.1.1.6.A-4 Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2025–2029



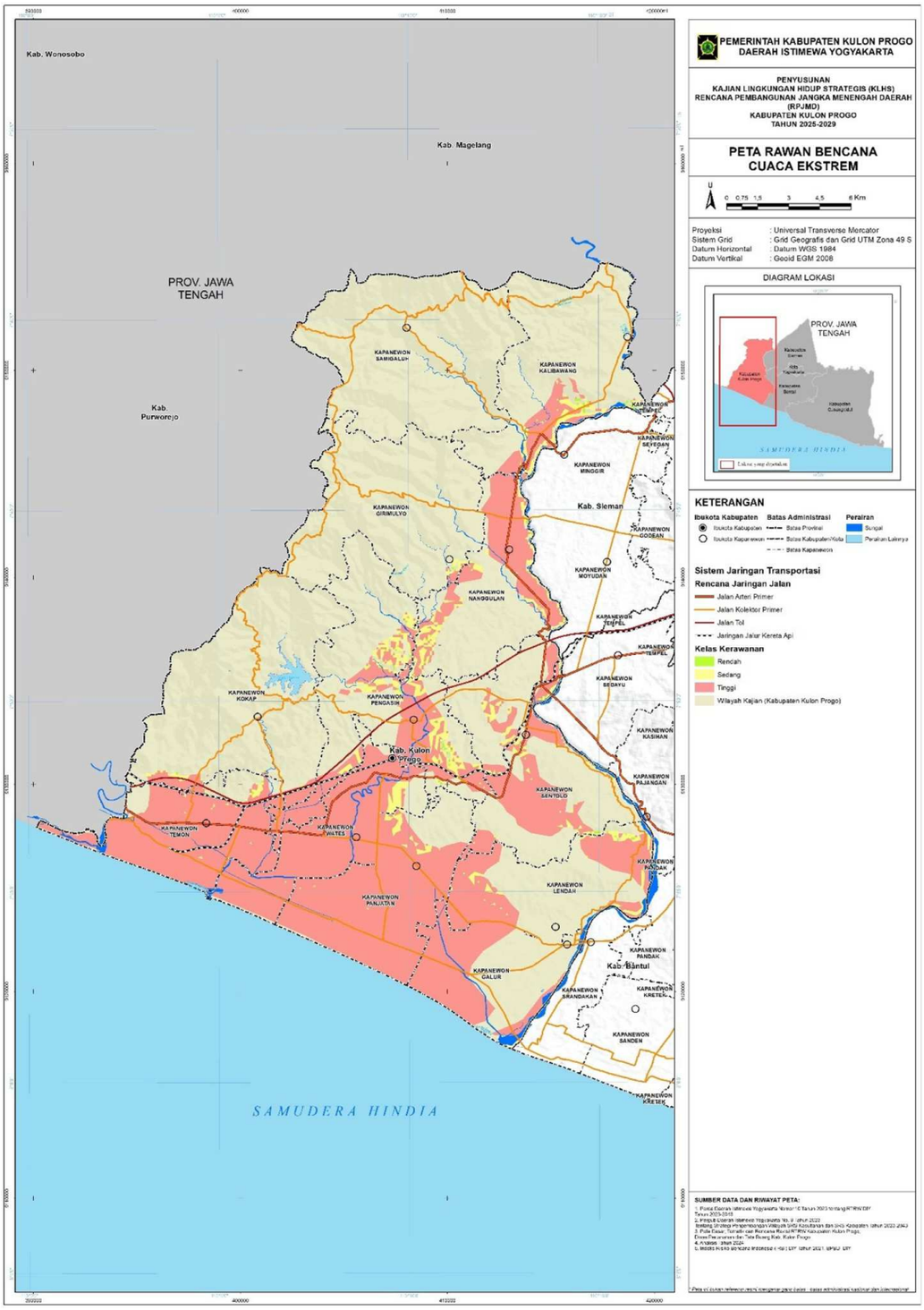
Gambar 2.1.1.6.A-5 Peta Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022



Gambar 2.1.1.6.A-6 Peta Wilayah Rawan Bencana Kekeringan

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2025–2029



Gambar 2.1.1.6.A-7 Peta Wilayah Rawan Bencana Cuaca Ekstrem

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2025–2029

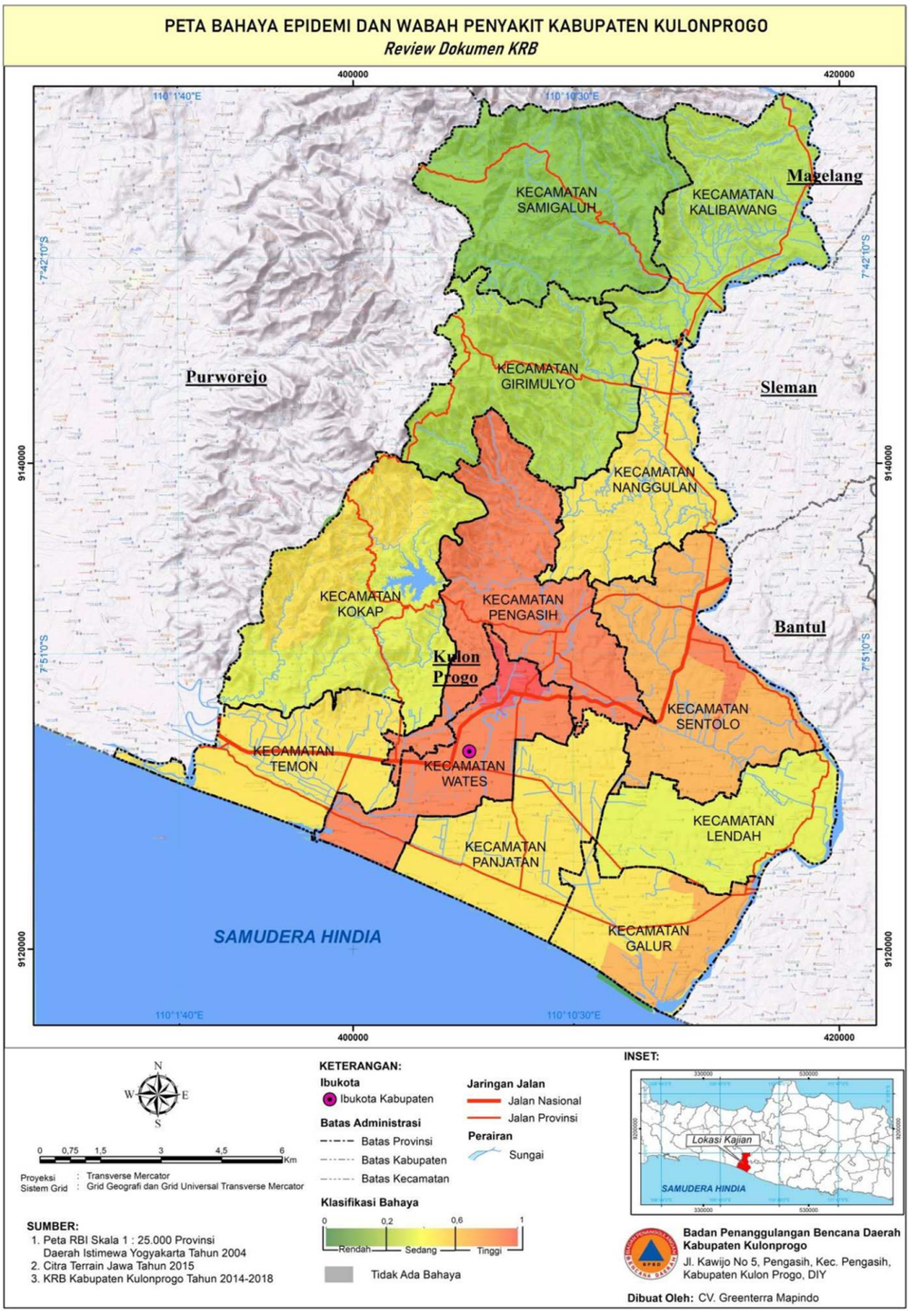
Wilayah Rawan Bencana Biologi dan Antropogenik

Bencana biologi dan antropogenik merupakan dua kategori bencana yang memerlukan perhatian khusus karena karakteristiknya yang tidak selalu bersifat alamiah dan dapat dipicu oleh aktivitas manusia serta dinamika sistem kehidupan. Salah satu jenis bencana biologi yang relevan di Kabupaten Kulon Progo adalah epidemi atau wabah penyakit, yang berpotensi meningkat akibat perubahan iklim, kepadatan penduduk, serta mobilitas sosial yang tinggi. Penyebaran penyakit menular ini dapat memicu kondisi darurat kesehatan masyarakat yang mengancam keselamatan jiwa, memerlukan sistem respons yang cepat, serta koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, dalam kategori bencana antropogenik, kegagalan teknologi menjadi isu strategis yang mencakup kejadian bencana akibat kesalahan desain, kerusakan sistem, atau kelalaian dalam penggunaan teknologi dan infrastruktur. Di Kulon Progo, salah satu potensi nyata kegagalan teknologi adalah risiko banjir bandang akibat jebolnya tanggul Waduk Sermo yang mengancam wilayah Perkotaan Wates. Untuk memitigasi ancaman ini, diperlukan pendekatan pengurangan risiko melalui penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan evakuasi, dan peningkatan standar keselamatan infrastruktur kritikal.

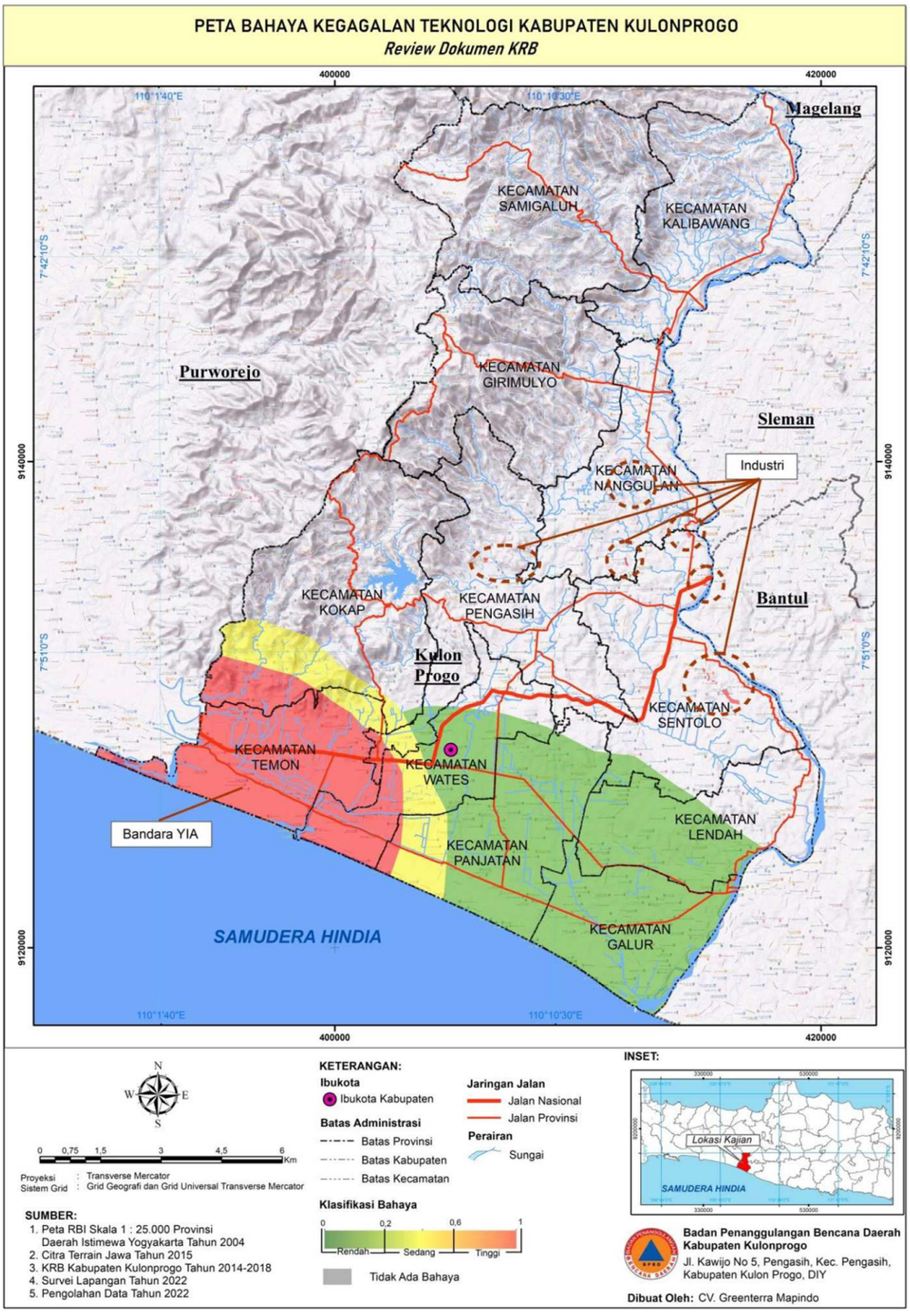
Gambaran spasial terhadap wilayah-wilayah rawan terhadap kedua kategori bencana ini ditunjukkan dalam peta berikut:

1. Peta Wilayah Rawan Bencana Epidemi/Wabah Penyakit; dan
2. Peta Wilayah Rawan Bencana Kegagalan Teknologi.



Gambar 2.1.1.6.A-8 Peta Wilayah Rawan Bencana Epidemi/Wabah Penyakit

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2022



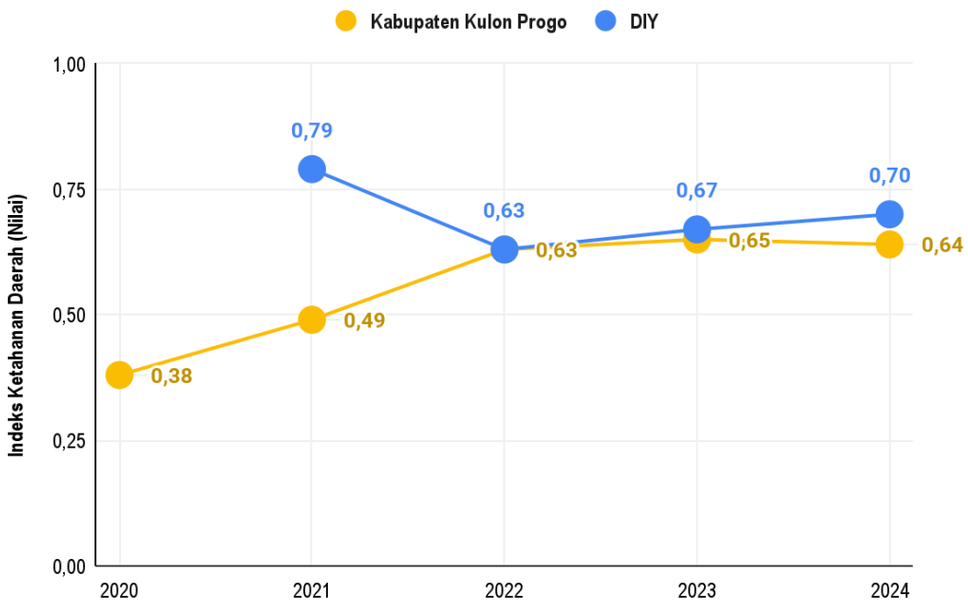
Gambar 2.1.1.6.A-9 Peta Wilayah Rawan Bencana Kegagalan Teknologi

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kulon Progo Tahun 2025–2029

2.1.1.6.B Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana serta potensi tekanan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. IKD mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam melakukan adaptasi, mitigasi, serta pemulihan terhadap berbagai ancaman, termasuk bencana alam, perubahan iklim, gangguan sosial, maupun tekanan ekonomi.

Pengukuran IKD melibatkan sejumlah dimensi seperti kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan bencana, kondisi infrastruktur dasar, tata kelola lingkungan, serta resiliensi sosial-ekonomi. Indikator ini menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tangguh terhadap risiko, terutama dalam konteks perubahan iklim dan ketidakpastian global.



Gambar 2.1.1.6.B-1 Grafik Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: Bapperida Kabupaten Kulon Progo, 2025

Berdasarkan Gambar 2.1.1.6.B-1, sejak tahun 2021 Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan signifikan dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dari 0,472 pada tahun 2021 menjadi 0,63 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan dalam aspek kesiapsiagaan, tata kelola risiko, dan kemampuan adaptif daerah. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 0,65, sebelum sedikit menurun menjadi 0,64 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian DIY, IKD Kabupaten Kulon Progo berada di bawah rata-rata DIY. DIY mencatat nilai 0,79 pada tahun 2021, 0,63 pada tahun 2022, 0,67 pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 0,70 pada tahun 2024. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun tren ketahanan daerah di Kulon Progo positif, masih terdapat ruang peningkatan untuk menyamai atau melampaui kinerja DIY.

Penurunan IKD pada tahun 2024 tidak serta-merta menunjukkan kemunduran, tetapi dapat menjadi indikator perlunya penguatan lanjutan pada aspek-aspek tertentu, seperti:

1. Mitigasi risiko bencana berbasis komunitas;
2. Integrasi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan wilayah;

3. Penguatan sistem logistik dan infrastruktur respons darurat; dan
4. Peningkatan kelembagaan kebencanaan dan kapasitas pemerintah daerah.

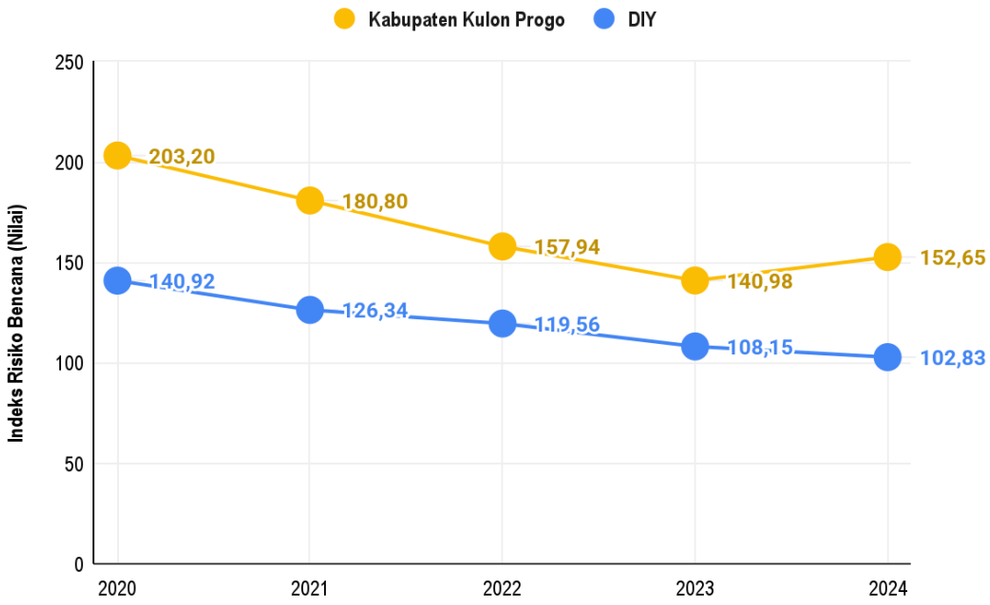
Secara umum, capaian IKD Kabupaten Kulon Progo yang mendekati angka 1 menunjukkan kategori ketahanan sedang menuju tinggi. Hal ini mencerminkan kondisi wilayah yang relatif tangguh, namun masih memerlukan intervensi kebijakan yang berkelanjutan. Ke depan, diperlukan sinergi lintas sektor dalam membangun ketahanan daerah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, pengurangan risiko bencana (*Disaster Risk Reduction*), serta tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kerentanan wilayah.

2.1.1.6.C Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi ancaman bencana. IRB menggambarkan sejauh mana risiko bencana dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, lingkungan, serta pembangunan sosial dan ekonomi di suatu daerah. Pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari berbagai jenis bencana, baik alam maupun non-alam, dengan mempertimbangkan tiga komponen utama:

1. Bahaya *(hazard)* sebagai potensi kejadian bencana;
2. Kerentanan *(vulnerability)* sebagai kondisi sosial, ekonomi, dan fisik yang meningkatkan dampak bencana;
3. Kapasitas *(capacity)* sebagai kemampuan suatu wilayah untuk mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana.

Interaksi antara ketiga komponen ini menghasilkan potensi risiko bencana yang mencerminkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Nilai IRB diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: sangat rendah (<13), sedang (13-144), dan tinggi (>144).



Gambar 2.1.1.6.C-1 Grafik Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: BNPB, 2025

Berdasarkan Gambar 2.1.1.6.C-1, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu dari 203,20 pada tahun 2020 menjadi 140,98 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek pengurangan risiko bencana, baik melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, maupun pelaksanaan program mitigasi berbasis wilayah.

Meskipun demikian, pada tahun 2024 nilai IRB meningkat menjadi 152,65. Kenaikan ini mengindikasikan adanya potensi kerentanan baru atau peningkatan intensitas ancaman yang perlu menjadi perhatian, yang dapat disebabkan oleh:

1. Perubahan iklim yang memicu frekuensi kejadian cuaca ekstrem;
2. Peningkatan eksposur penduduk dan aset pada wilayah rawan; dan
3. Keterbatasan kapasitas tanggap darurat atau belum optimalnya koordinasi lintas sektor.

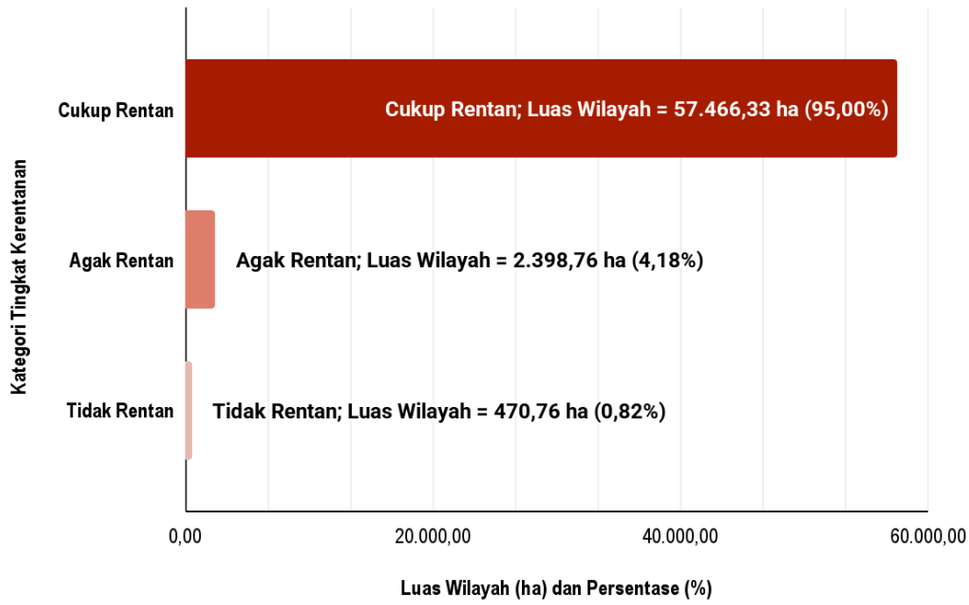
Jika dibandingkan dengan rata-rata IRB Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga menurun dari 140,92 pada tahun 2020 menjadi 102,83 pada tahun 2024, nilai IRB Kabupaten Kulon Progo masih berada di atas rata-rata provinsi, sehingga upaya pengurangan risiko tetap perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit kenaikan pada tahun terakhir, tren IRB Kabupaten Kulon Progo tetap positif dan terkendali. Ke depan, pengendalian risiko bencana dapat terus dioptimalkan melalui pendekatan pengurangan risiko berbasis komunitas, penguatan sistem peringatan dini, penerapan tata ruang berbasis kebencanaan, serta peningkatan edukasi dan literasi kebencanaan bagi masyarakat.

2.1.1.6.D Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak terhadap berbagai segi kehidupan. Dampak Ekstrem dari perubahan iklim adalah

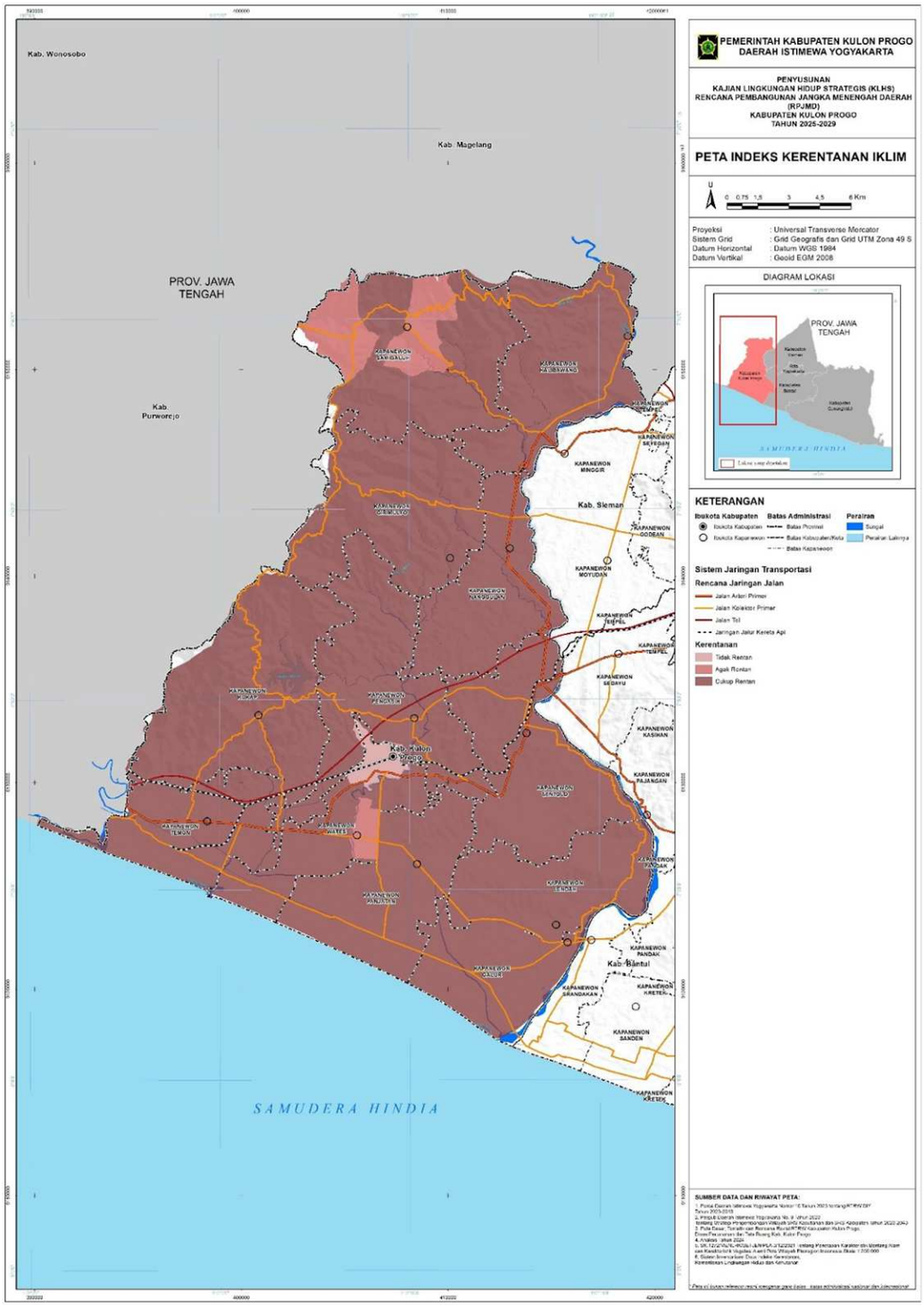
terjadinya kenaikan temperatur serta pergeseran musim. Untuk memantau perubahan tingkat kerentanan di Daerah dan Nasional, serta untuk melihat dan atau mengukur efektivitas pengaruh kebijakan pembangunan pada perubahan tingkat kerentanan, maka dikembangkan Sistem Inventarisasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Kondisi terkait perubahan iklim dilakukan melalui data SIDIK Tahun 2018 dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: SK.46/PKTL/IPSDH/PLA.1/20/2021 tentang Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.



Gambar 2.1.1.6.D-1 Grafik Klasifikasi Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: KLHK, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), 2024

Berdasarkan data SIDIK, tingkat kerentanan perubahan iklim terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu agak rentan, cukup, sangat rentan, dan tidak rentan. Kabupaten Kulon Progo memiliki kerentanan perubahan iklim kategori cukup rentan yang mencapai 95% dari luas wilayah total sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.1.1.6.D-1. Sebagai pelengkap, peta klasifikasi tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Kulon Progo disajikan dalam Gambar 2.1.1.6.D-2.



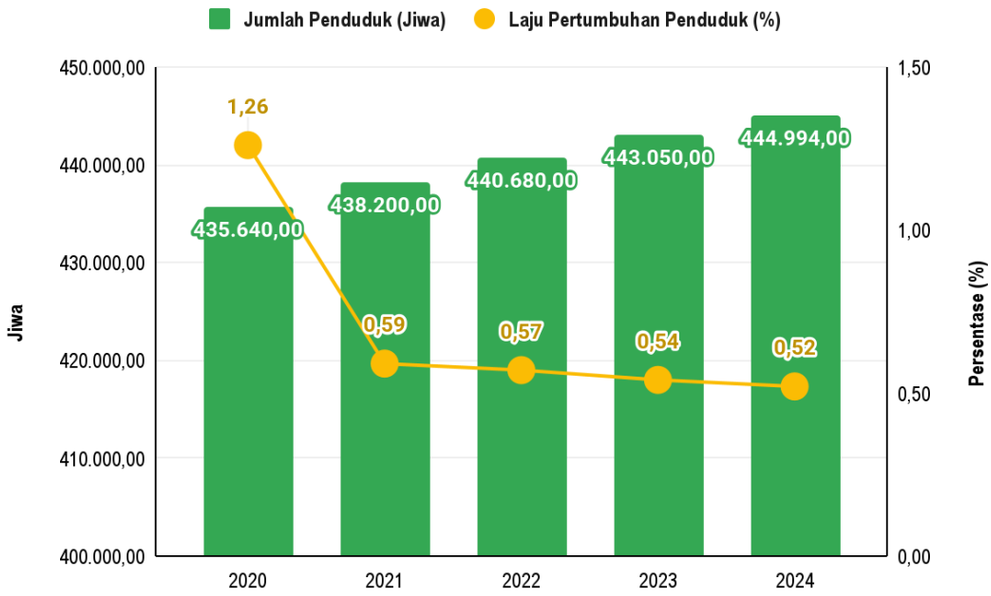
Gambar 2.1.1.6.D-2 Peta Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: KLHK, Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), 2024

2.1.1.7 Demografi

2.1.1.7.A Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 435.640 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,26%. Selanjutnya, pada tahun 2021, jumlah penduduk mengalami kenaikan menjadi 438.200 jiwa dengan laju pertumbuhan turun ke 0,59%. Tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk 440.680 jiwa dan laju pertumbuhan 0,57%. Pada tahun 2023, jumlah penduduk sedikit meningkat menjadi 443.050 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,54%, dan diperkirakan pada tahun 2024 jumlah penduduk akan mencapai 444.994 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,52%.

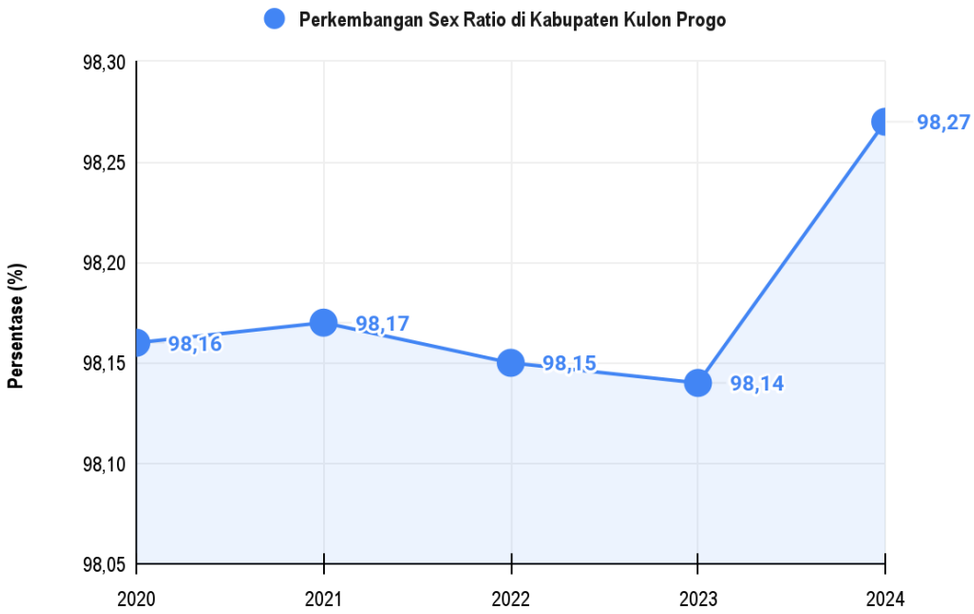


Gambar 2.1.1.7.A-1 Grafik Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, diolah 2025

2.1.1.7.B Komposisi Penduduk

Sex ratio merupakan indikator aspek demografi yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Angka ini digunakan untuk memahami komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kulon Progo, yang dapat memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan perencanaan pembangunan.



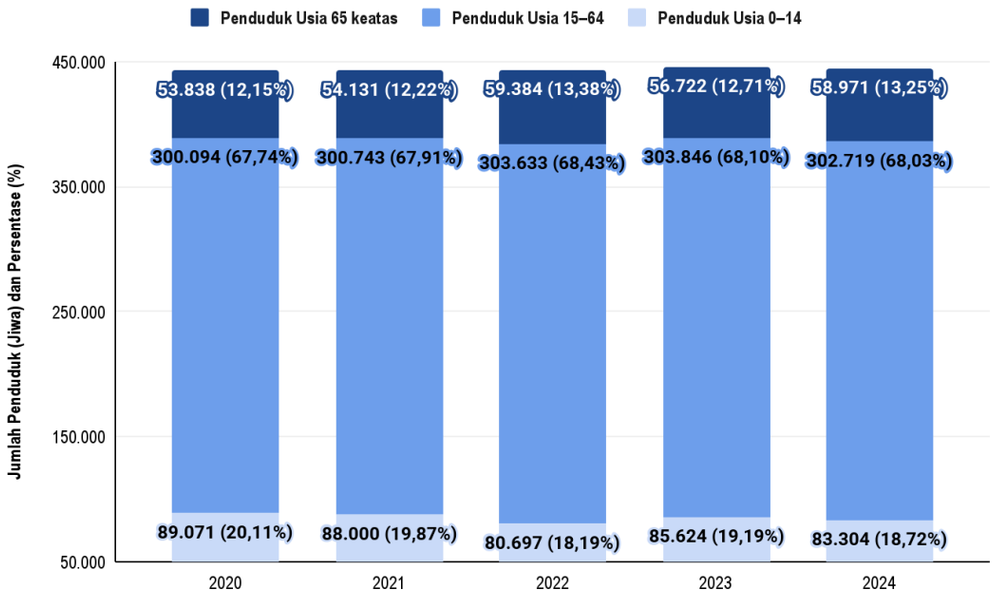
Gambar 2.1.1.7.B-1 Grafik Perkembangan *Sex Ratio* di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, diolah 2025

Berdasarkan Gambar 2.1.1.7.B-1, grafik yang ditampilkan menunjukkan rasio jenis kelamin di Kulon Progo dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin tercatat sebesar 98,16%, kemudian sedikit meningkat menjadi 98,17% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, rasio ini mengalami penurunan menjadi 98,15%, dan terus menurun hingga mencapai 98,14% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, sex ratio kembali meningkat menjadi 98,27%.

Secara umum, sex ratio yang berada di bawah angka 100 mengindikasikan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Fluktuasi kecil dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan stabilitas struktur penduduk menurut jenis kelamin, dengan kecenderungan dominasi jumlah perempuan yang konsisten. Meskipun perubahannya relatif kecil, pemantauan sex ratio tetap penting dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif secara sosial, terutama dalam hal penyediaan layanan dasar, penyusunan kebijakan kependudukan, serta perencanaan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.

Selain berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk juga dianalisis menurut kelompok usia, yang terbagi menjadi tiga: usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan usia tua (65 tahun ke atas).



Gambar 2.1.1.7.B-2 Grafik Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024 (dalam Jiwa dan Persentase)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo, 2025

Komposisi penduduk di Kabupaten Kulon Progo menurut kelompok usia selama kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika struktur demografi. Proporsi penduduk usia muda (0–14 tahun) mengalami penurunan dari 20,11% pada tahun 2020 menjadi 18,72% pada tahun 2024. Sementara itu, penduduk usia produktif (15–64 tahun) tetap mendominasi komposisi penduduk dengan kecenderungan meningkat secara perlahan, dari 67,74% pada tahun 2020 menjadi 68,03% pada tahun 2024. Di sisi lain, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, dari 12,15% pada tahun 2020 menjadi 13,25% pada tahun 2024.

Perubahan struktur usia ini mengindikasikan terjadinya transisi demografi yang ditandai dengan menyusutnya proporsi usia muda dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Kulon Progo sedang bergerak menuju tahap masyarakat menua, yang secara bertahap dapat meningkatkan rasio ketergantungan lansia. Di satu sisi, dominasi penduduk usia produktif tetap memberikan peluang untuk optimalisasi bonus demografi, namun di sisi lain diperlukan antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan layanan sosial dan kesehatan lansia, serta penguatan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, arah pembangunan daerah akan lebih berfokus pada investasi sumber daya manusia sepanjang siklus hidup dan penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan struktur usia penduduk.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap struktur usia penduduk Kabupaten Kulon Progo, disajikan pula Tabel 2.1.1.7.B-1, yang memuat data rinci komposisi penduduk tahun 2020-2024 berdasarkan kelompok usia sebagai berikut.

Tabel 2.1.1.7.B-1 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

NO.	KELOMPOK UMUR	2020	2021	2022	2023	2024
1	0–4	26.372	25.506	19.970	24.546	23.365
2	5–9	30.322	29.933	29.111	29.217	28.688
3	10–14	32.377	32.561	31.616	31.861	31.251
4	15–19	31.299	31.065	31.574	31.819	31.875
5	20–24	32.480	32.196	31.822	31.321	31.156
6	25–29	30.860	31.666	31.574	31.482	31.312
7	30–34	27.403	27.656	29.312	29.365	29.797
8	35–39	31.787	30.829	28.578	28.782	27.905
9	40–44	31.412	31.665	32.065	32.366	31.837
10	45–49	30.280	30.589	30.703	30.861	31.495
11	50–54	31.457	31.153	30.533	30.626	29.534
12	55–59	28.167	28.725	30.553	30.490	31.304
13	60–64	24.949	25.199	26.919	26.734	26.504
14	65–69	18.366	19.049	21.088	20.765	21.735
15	70–74	12.984	13.261	14.780	14.312	15.165
16	>75	22.488	21.821	23.516	21.645	22.071
-	TOTAL	443.003	442.874	443.591	446.192	444.994

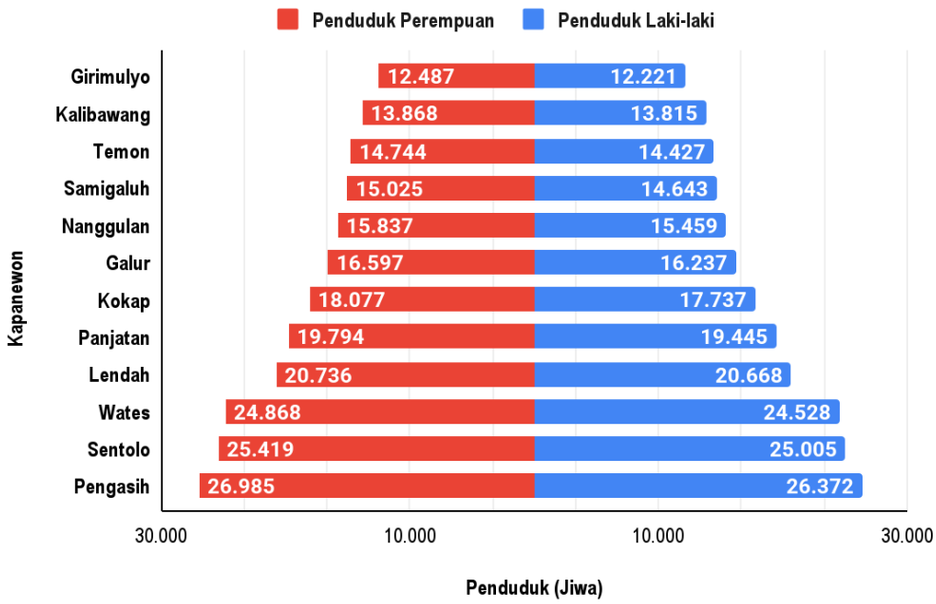
Keterangan:

- Kolom tahun 2020–2024 disajikan menggunakan *color scale*; warna lebih kontras menunjukkan jumlah penduduk yang lebih besar.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kulon Progo, 2025

2.1.1.7.C Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk yang tersebar di wilayah administrasi Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu aspek fundamental yang memengaruhi arah pembangunan wilayah, khususnya dalam konteks pemerataan pelayanan dasar dan pemanfaatan ruang. Pemahaman terhadap sebaran jumlah penduduk dan tingkat kepadatannya pada masing-masing kapanewon menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan yang berkeadilan. Gambar 2.1.1.7.C-1 dan Tabel 2.1.1.7.C-1 berikut menyajikan data lengkap mengenai piramida penduduk, jumlah penduduk, luas wilayah, serta kepadatan penduduk pada masing-masing kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.



Gambar 2.1.1.7.C-1 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024

Sumber: BPS 2025, diolah

Berdasarkan Gambar 2.1.1.7.C-1, Struktur piramida penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 menunjukkan bahwa distribusi penduduk menurut jenis kelamin relatif seimbang di seluruh kapanewon, dengan proporsi penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini tampak konsisten pada hampir semua wilayah, seperti di Kapanewon Pengasih (perempuan: 26.985 jiwa, laki-laki: 26.372 jiwa), Sentolo (perempuan: 25.419 jiwa berbanding laki-laki: 25.005 jiwa), dan Wates (perempuan: 24.868 jiwa berbanding laki-laki: 24.528 jiwa).

Dominasi jumlah penduduk perempuan juga terjadi pada kapanewon-kapanewon lain, meskipun selisihnya cenderung kecil. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelayanan dasar, terutama yang bersifat spesifik gender, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan, serta program-program pemberdayaan perempuan.

Lebih lanjut, berdasarkan data distribusi dan kepadatan penduduk tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.1.7.C-1, penduduk di Kabupaten Kulon Progo tersebar tidak merata antar kapanewon. Kapanewon Pengasih merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 53.357 jiwa (11,99% dari total penduduk), diikuti oleh Sentolo (50.424 jiwa) dan Wates (49.396 jiwa). Di sisi lain, Kapanewon Girimulyo dan Kalibawang merupakan dua wilayah dengan jumlah penduduk terendah, masing-masing sebesar 24.708 jiwa dan 27.683 jiwa.

Dari sisi kepadatan penduduk, Kapanewon Wates yang juga sekaligus menjadi Ibu kota Kabupaten mencatat tingkat kepadatan tertinggi yaitu 1.543 jiwa/km², disusul oleh Lendah (1.163 jiwa/km²) dan Galur (997 jiwa/km²). Sementara itu, tingkat kepadatan terendah tercatat di Samigaluh (428 jiwa/km²), Girimulyo (450 jiwa/km²), dan Kokap (485 jiwa/km²), yang juga merupakan kawasan dengan karakteristik topografi perbukitan dan luas wilayah relatif besar.

Tabel 2.1.1.7.C-1 Distribusi Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024

NO.	KAPANEWON	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK (%)	LUAS WILAYAH (km^2)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km^2)
1	Temon	29.171	6,56	36,49	803,63
2	Wates	49.396	11,10	32,68	1.543,51
3	Panjatan	39.239	8,82	44,17	879,95
4	Galur	32.834	7,38	32,36	997,62
5	Lendah	41.404	9,30	37,55	1.163,30
6	Sentolo	50.424	11,33	53,83	957,66
7	Pengasih	53.357	11,99	57,98	865,28
8	Kokap	35.814	8,05	70,16	485,29
9	Girimulyo	24.708	5,55	55,31	450,02
10	Nanggulan	31.296	7,03	39,11	790,17
11	Samigaluh	29.668	6,67	66,32	428,15
12	Kalibawang	27.683	6,22	51,25	522,68
-	**Kab. Kulon Progo**	**444.994,00**	**100,00**	**577,22**	**759,01**

Keterangan:

- Mulai dari kolom Jumlah Penduduk hingga Kepadatan Penduduk disajikan menggunakan *color scale*; warna lebih kontras menunjukkan nilai yang lebih besar.

Sumber: BPS 2025, diolah

Variasi distribusi dan kepadatan ini mencerminkan adanya ketimpangan spasial dalam persebaran penduduk, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan infrastruktur dasar, pengelolaan tata ruang, serta pelayanan publik berbasis kewilayahan secara lebih proporsional.

2.1.1.7.D Proyeksi Demografi Lima Tahun ke Depan

Perencanaan pembangunan daerah yang efektif perlu didasarkan pada data kependudukan yang mutakhir dan proyeksi demografi jangka menengah. Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2018. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta telah merilis data proyeksi terbaru yang disusun berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, melalui dokumen Proyeksi Penduduk Kapanewon Se-DIY Tahun 2020–2035.

Dengan demikian, penyusunan proyeksi demografi Kabupaten Kulon Progo untuk kurun waktu 2025 hingga 2030 dalam dokumen ini mengacu pada data tersebut. Informasi proyeksi tersebut disajikan secara tabular dalam Tabel 2.1.1.7.D-1 dan divisualisasikan dalam Gambar 2.1.1.7.D-1, menggunakan data dasar resmi hasil proyeksi BPS DIY berdasarkan Sensus Penduduk 2020.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan moderat dalam lima tahun ke depan. Total penduduk diperkirakan bertambah dari 447,46 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 456,68 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan rata-rata sekitar 1.844 jiwa per tahun atau sekitar 0,4 persen

per tahun, yang tergolong stabil dalam konteks pertumbuhan penduduk daerah. Struktur jenis kelamin penduduk menunjukkan dominasi penduduk perempuan yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan rasio jenis kelamin yang sedikit menurun dari 98,10 pada tahun 2025 menjadi 97,93 pada tahun 2030. Artinya, terdapat sekitar 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, menandakan kondisi yang perlu dicermati dalam perencanaan pembangunan berbasis gender.

Dari sisi kepadatan, jumlah jiwa per kilometer persegi diperkirakan mengalami kenaikan dari 775 jiwa/km² pada tahun 2025 menjadi 791 jiwa/km² pada tahun 2030. Kenaikan kepadatan ini perlu menjadi perhatian dalam penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan, terutama di wilayah padat penduduk. Selanjutnya, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) cenderung stagnan di kisaran 298–301 ribu jiwa, dan penduduk usia muda (0–14 tahun) diproyeksi akan turun dari 87,60 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 86,22 ribu jiwa pada tahun 2030. Sebaliknya, jumlah penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) meningkat signifikan dari 61,17 ribu jiwa menjadi 69,15 ribu jiwa pada tahun 2030.

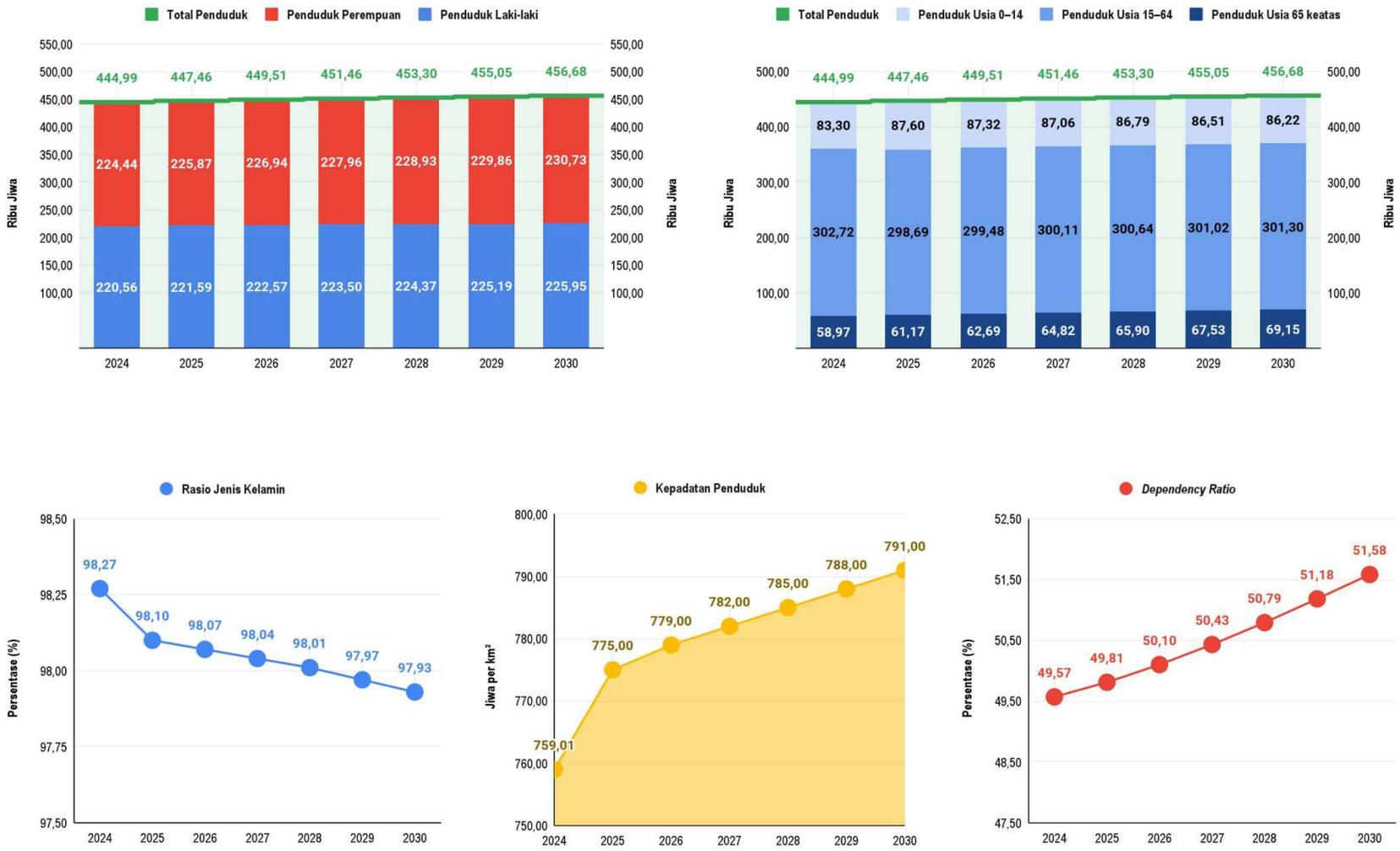
Tren ini berdampak langsung pada angka rasio ketergantungan *(dependency ratio)* yang meningkat dari 49,81 persen pada tahun 2025 menjadi 51,58 persen pada tahun 2030. Artinya, setiap 100 orang usia produktif harus menanggung beban sekitar 52 orang usia non-produktif. Kecenderungan ini menunjukkan adanya potensi tekanan demografis yang semakin besar, seiring dengan proses *aging population* yang terus berlangsung di Kulon Progo. Secara keseluruhan, proyeksi demografi lima tahun ke depan menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan struktur penduduk, khususnya dalam menyongsong bonus demografi yang semakin menyempit dan ancaman beban ketergantungan yang meningkat. Strategi pembangunan ke depan perlu diarahkan pada penguatan kualitas SDM usia produktif, peningkatan layanan bagi kelompok lansia, serta penyesuaian tata kelola kependudukan dan ruang yang responsif terhadap dinamika demografi tersebut.

Tabel 2.1.1.7.D-1 Proyeksi Demografi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO.	PARAMETER	URAIAN	SATUAN	BASELINE 2024	PROYEKSI TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Berdasarkan Jenis Kelamin**									
		Penduduk Laki-laki	Ribu Jiwa	220,56	221,59	222,57	223,50	224,37	225,19	225,95
		Penduduk Perempuan	Ribu Jiwa	224,44	225,87	226,94	227,96	228,93	229,86	230,73
		Rasio Jenis Kelamin	%	98,27	98,10	98,07	98,04	98,01	97,97	97,93
2	**Komposisi dan Kepadatan Penduduk**									
		Total Penduduk	Ribu Jiwa	444,99	447,46	449,51	451,46	453,30	455,05	456,68
		Kepadatan Penduduk	Jiwa per km²	759,01	775,00	779,00	782,00	785,00	788,00	791,00
3	**Berdasarkan Kelompok Umur**									
		Penduduk Usia 0–14	Ribu Jiwa	83,30	87,60	87,32	87,06	86,79	86,51	86,22
		Penduduk Usia 15–64	Ribu Jiwa	302,72	298,69	299,48	300,11	300,64	301,02	301,30
		Penduduk Usia 65 keatas	Ribu Jiwa	58,97	61,17	62,69	64,82	65,90	67,53	69,15
4	**Rasio Ketergantungan**									
		Dependency Ratio	%	49,57	49,81	50,10	50,43	50,79	51,18	51,58

Sumber:

- *Baseline 2024: BPS (Kabupaten Kulon Progo dalam Angka Tahun 2025), diolah*
- *Proyeksi Tahun 2025–2030: BPS (Proyeksi Penduduk Kapanewon Se-DIY, hasil sensus penduduk tahun 2020), diolah*



Gambar 2.1.1.7.D-1 Kompilasi Grafik Proyeksi Demografi di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS 2016). PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarnya PDRB bergantung pada pemanfaatan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan semangat kewirausahaan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin dalam PDRB dengan harga konstan, yang menghindarkan perhitungan PDRB dari bias inflasi.

Tabel 2.1.2.1-1 PDRB ADHK (=2010) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rupiah)

NO.	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022*	2023**	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishing	1.224,80	1.244,66	1.267,43	1.283,51	1.294,36
2	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	127,05	124,14	125,78	134,03	134,95
3	Industri Pengolahan / Manufacturing	978,20	994,97	1.009,18	1.051,75	1.097,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	8,20	8,35	8,95	9,60	10,60
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	10,69	11,10	11,84	12,22	12,81
6	Konstruksi / Construction	1.390,05	1.433,22	1.491,30	1.565,35	1.669,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.081,96	1.098,83	1.169,49	1.215,41	1.278,88
8	Transportasi dan Pergudangan / Transportation and Storage	651,57	693,72	1.017,89	1.207,62	1.276,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation and Food Service	281,61	311,06	157,66	378,15	400,89
10	Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	605,44	735,78	351,87	780,94	813,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	218,87	221,84	747,10	257,89	279,36
12	Real Estate / Real Estate Activities	297,39	300,48	233,94	317,21	330,08
13	Jasa Perusahaan / Business Activities	26,54	28,64	307,74	33,06	34,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	596,45	584,77	30,63	613,82	652,66
15	Jasa Pendidikan / Education	501,58	523,43	601,68	548,76	575,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health and Social Work Activities	144,68	150,89	529,61	165,99	175,82
17	Jasa lainnya / Other Services Activities	269,25	312,93	357,24	376,63	388,70
-	**PDRB ADHK**	**8.414,32**	**8.778,80**	**9.419,36**	**9.951,95**	**10.426,23**

Sumber: BPS DIY, 2025

Secara umum, PDRB atas dasar harga konstan (menggunakan tahun dasar 2010) Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, PDRB ADHK Kabupaten Kulon Progo berada pada nilai 8,41 triliun rupiah. Namun, PDRB Kulon Progo sudah berhasil naik menjadi 8,77 triliun rupiah pada tahun 2021, dan meningkat lebih signifikan pada tahun 2022 menjadi 9,41 triliun rupiah. Nilai ini terus meningkat hingga mencapai 10,42 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo dapat memulihkan perekonomian dari krisis dampak pandemi Covid-19 dengan cukup baik.

Tabel 2.1.2.1-2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2021-2024

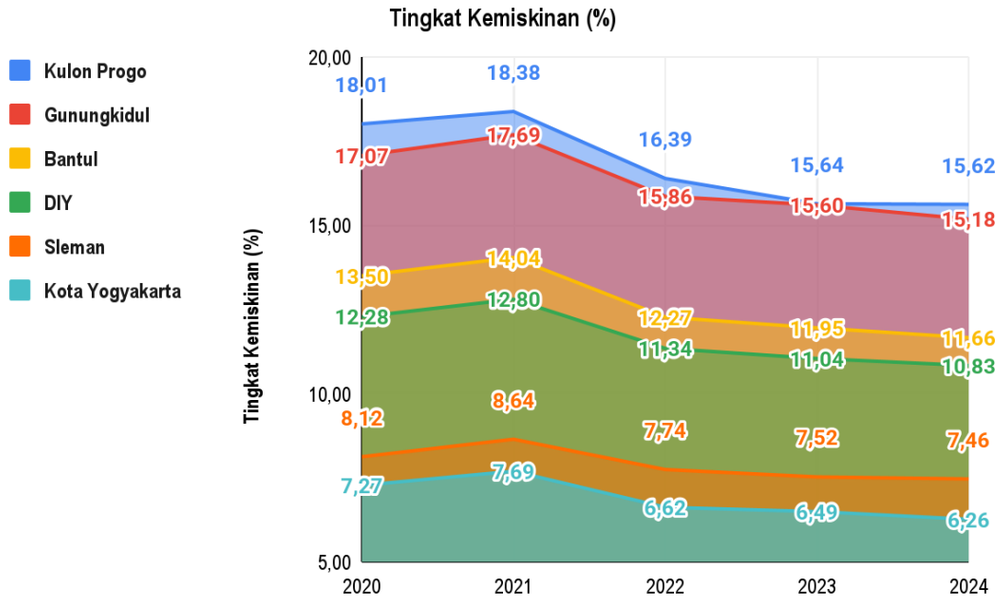
KAB/KOTA	2021	2022	2023*	2024**
Sleman	5,61	5,15	5,09	5,19
Yogyakarta	5,16	5,12	5,08	5,05
Bantul	5,00	5,19	5,06	5,04
DIY	5,58	5,15	5,07	5,03
Gunungkidul	5,31	5,37	5,04	4,81
Kulon Progo	***4,37***	***6,58***	***5,65***	***4,77***

***) Angka Sementara**

****) Angka Sangat Sementara**

Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

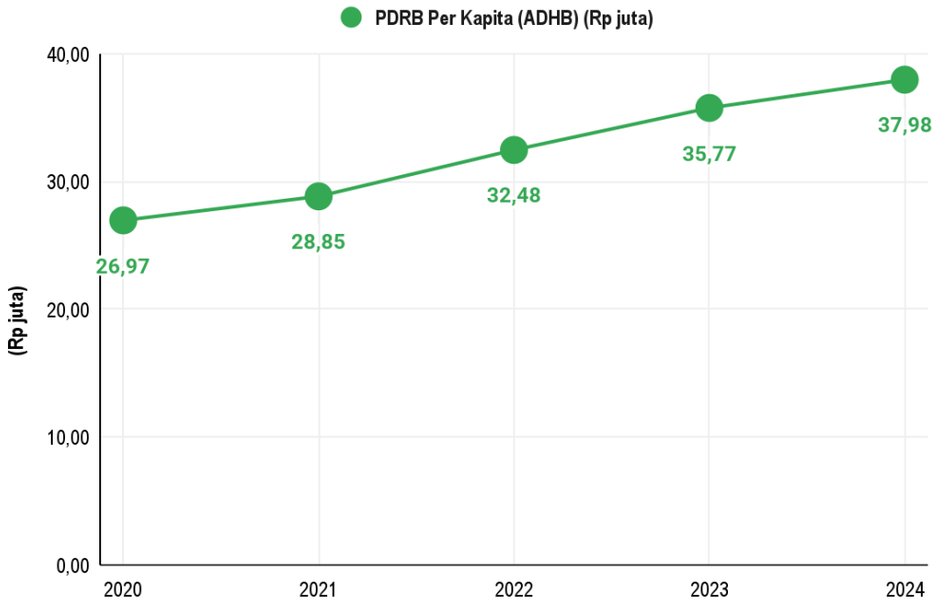
Jika ditinjau berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, Kabupaten Kulon Progo mencatatkan pertumbuhan PDRB sebesar 4,37 persen, yang merupakan nilai terendah di antara kabupaten/kota di DIY pada empat tahun terakhir. Namun, pada 2022 pertumbuhan PDRB mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai 6,58 persen dan menjadi yang tertinggi DIY. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan ekonomi atau stimulus lokal yang efektif pasca pandemi. Meski demikian, pada 2023 pertumbuhan menurun menjadi 5,65 persen dan kembali turun menjadi 4,77 persen pada 2024. Nilai keduanya masih berada di bawah rata-rata provinsi pada masing-masing tahun perhitungan. Penurunan bertahap ini mengindikasikan perlunya strategi lanjutan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan, seperti penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing ekonomi lokal.



Gambar 2.1.2.1-1 Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY, 2020-2024

Sumber: BPS 2025, diolah

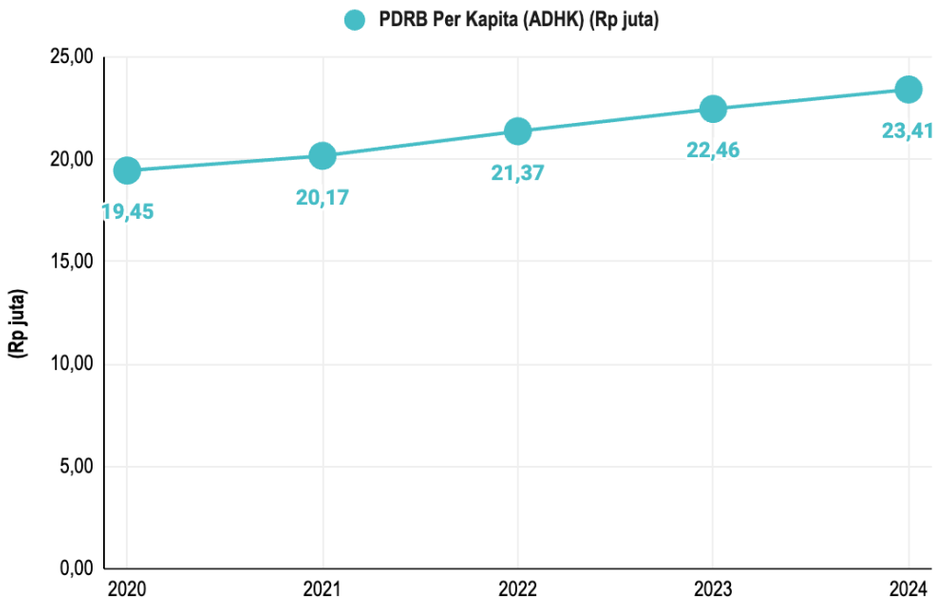
Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo secara konsisten mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupaten yang ada di D.I.Yogyakarta. Pada 2020, persentase penduduk miskin di Kulon Progo mencapai angka 18,01 persen dan meningkat menjadi 18,38 persen pada 2021, menandakan dampak signifikan pandemi terhadap kondisi sosial ekonomi. Peningkatan ini dapat langsung diredam pada tiga tahun berikutnya, sehingga tingkat kemiskinan secara bertahap dapat turun menjadi 16,39 persen pada 2022 dan menjadi 15,62 persen pada 2024. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan Kulon Progo tetap lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan kabupaten/kota lain. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo masih menjadi salah satu kantong kemiskinan *(poverty pocket)* di wilayah DIY.



Gambar 2.1.2.1-2 Grafik PDRB PerKapita ADHB di Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Sumber: Bapperida 2025, diolah

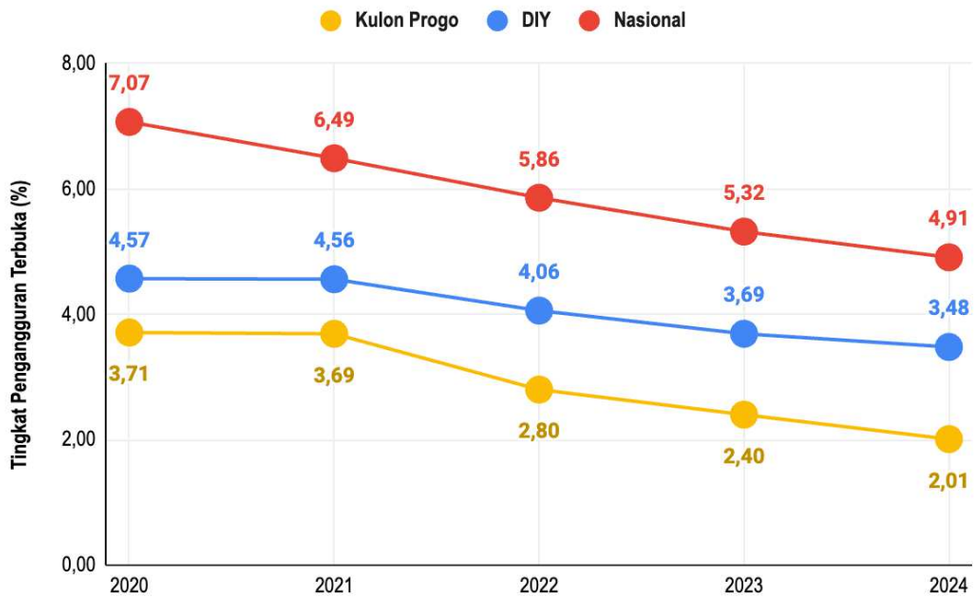
Untuk menggambarkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di suatu daerah, PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai proksi yang sesuai karena dapat mengukur rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020-2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 26,97 juta, kemudian meningkat menjadi Rp28,85 juta pada 2021. Pertumbuhan berlanjut hingga mencapai Rp32,48 juta pada 2022, Rp35,77 juta pada 2023, dan memuncak menjadi Rp37,98 juta pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo, baik dari sisi produksi maupun pendapatan masyarakat secara nominal.



Gambar 2.1.2.1-3 Grafik PDRB PerKapita ADHK (=2010) di Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

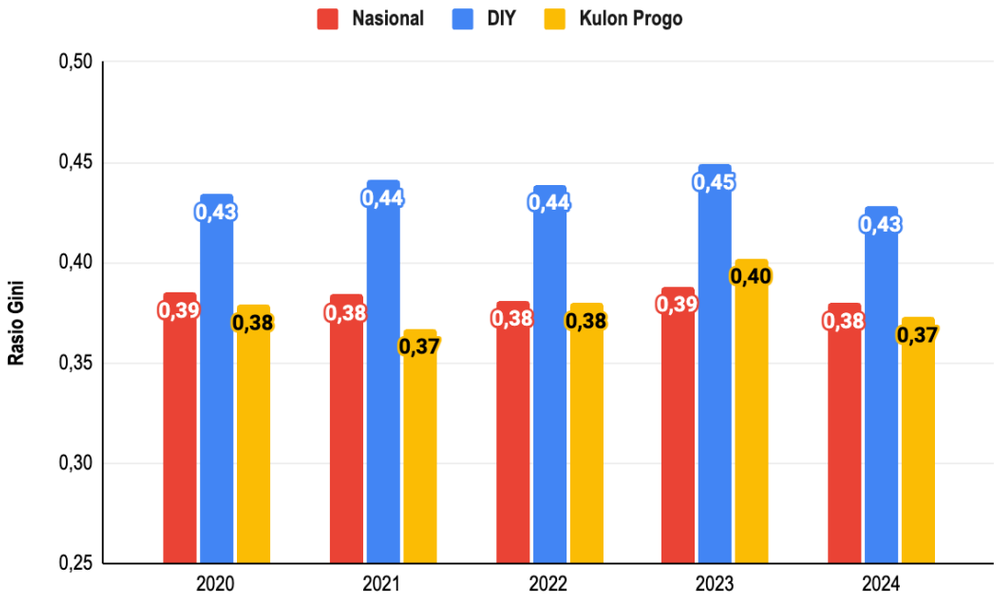
Sejalan dengan tren peningkatan PDRB per kapita ADHB, perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 (ADHK) di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020-2024. Data menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun, mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi riil masyarakat tanpa dipengaruhi oleh inflasi. Pada 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 19,45 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 20,17 juta (2021), Rp 21,37 juta (2022), Rp 22,46 juta (2023), dan mencapai Rp 23,41 juta pada 2024. Pertumbuhan ini menandakan adanya perbaikan produktivitas ekonomi di wilayah Kulon Progo.



Gambar 2.1.2.1-4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional (%), Tahun 2020-2024

Sumber: BPS DIY, 2025

Secara keseluruhan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu lebih rendah dibandingkan dengan TPT di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan nasional. Sejak tahun 2020, TPT di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren penurunan yang konsisten, hingga mencapai 2,01% pada tahun 2024. Penurunan konsisten setelah nilai TPT meningkat tajam pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 mencerminkan keberhasilan upaya pemulihan ekonomi daerah yang dilakukan. Fakta bahwa penurunan TPT di Kabupaten Kulon Progo terjadi lebih cepat dibandingkan dengan tingkat DIY dan nasional mengindikasikan adanya efektivitas kebijakan dan program pemulihan ekonomi yang diterapkan di tingkat lokal. Namun, penting untuk terus memantau dan mengembangkan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Hal ini diperlukan agar tren positif tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo dapat ditekan lebih rendah lagi di masa mendatang.



Gambar 2.1.2.1-5 Grafik Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional, Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY 2025, diolah

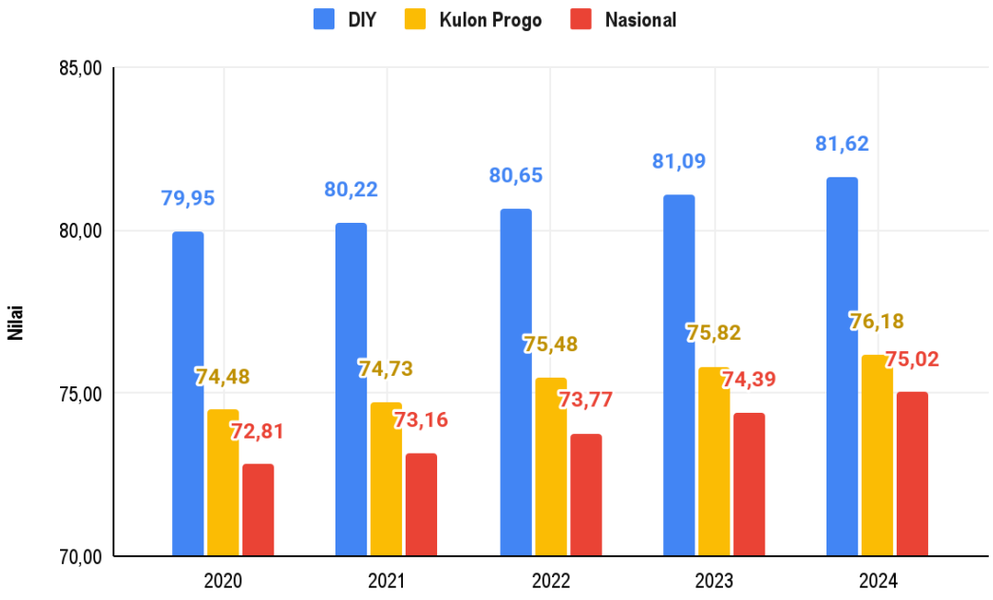
Dalam menganalisis kesejahteraan ekonomi daerah, Indeks Gini menjadi penting karena dapat mengukur pemerataan distribusi pendapatan penduduk serta ketimpangannya. Rasio Gini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai 1, semakin besar ketimpangan pendapatan penduduk, yang mengindikasikan kondisi ketimpangan yang hampir sempurna. Sebaliknya, semakin dekat nilainya ke 0, distribusi pendapatan semakin merata, mendekati kondisi pemerataan yang sempurna.

Gambar 2.1.2.1-5 menunjukkan bahwa Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo sepanjang periode 2020–2024 cenderung fluktuatif namun berada di bawah rata-rata DIY dan Nasional. Pada tahun 2020, Rasio Gini Kulon Progo tercatat sebesar 0,379, kemudian menurun ke titik terendah pada 2021 sebesar 0,367. Selanjutnya, rasio ini meningkat hingga mencapai 0,402 pada 2023, sebelum akhirnya menurun lagi menjadi 0,373 pada 2024. Sementara itu, Rasio Gini DIY relatif lebih tinggi, dengan tren sedikit meningkat pada 2023 (0,449) sebelum turun pada 2024 (0,428). Rasio Gini Nasional relatif stabil di kisaran 0,38–0,39. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan ketimpangan distribusi

pendapatan di Kulon Progo masih lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi dan nasional, yang mengindikasikan tingkat pemerataan pendapatan di Kulon Progo relatif lebih baik.

Meski begitu, tren fluktuasi Rasio Gini yang cenderung meningkat ini menjadi suatu anomali mengingat pergerakan ketimpangan pendapatan yang tidak sejalan dengan penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kulon Progo diantaranya dapat disebabkan oleh kesenjangan yang signifikan antara kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dengan kelompok berpendapatan tinggi. Kondisi ini berpotensi mengarah pada ancaman *middle income trap*, yaitu situasi di mana suatu daerah yang telah mencapai tingkat pendapatan menengah atas (berdasarkan standar Bank Dunia, sekitar Rp72.000.000–Rp224.000.000 per kapita) mengalami stagnasi dan kesulitan untuk bertransisi menjadi daerah maju dengan masyarakat berpendapatan tinggi.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena Kulon Progo sebagai *poverty pocket* dengan *middle income trap* ini cukup beragam, diantaranya adalah rendahnya pendapatan masyarakat akibat keterbatasan keterampilan dan tingkat pendidikan yang belum memenuhi kualifikasi pasar kerja. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses terhadap pelatihan keterampilan dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya membatasi peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Selain itu, ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi dan sektor pekerjaan, serta kurangnya infrastruktur penunjang usaha juga turut memengaruhi tingginya angka kemiskinan di wilayah ini. Hal-hal tersebut membatasi peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, diperlukan upaya untuk membangun motivasi individu sejak dini agar tidak terjebak dalam zona nyaman dengan pendapatan menengah ke atas, melainkan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan mereka.



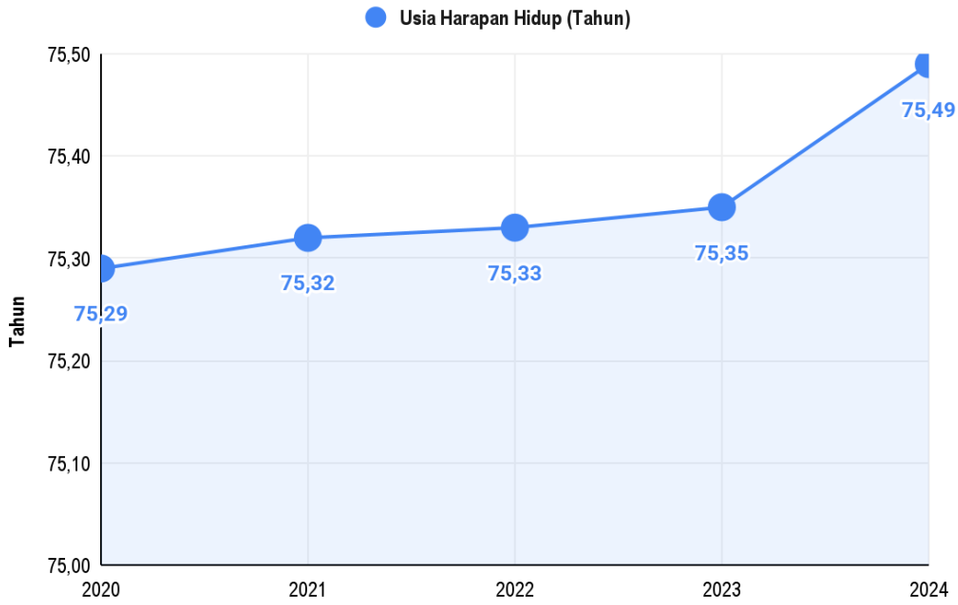
Gambar 2.1.2.1-6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo, DIY, dan Nasional, 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah

Meski begitu, sepanjang periode 2020-2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 74,48 pada tahun 2020 menjadi 76,18 pada tahun 2024. Peningkatan IPM dapat mencerminkan

perbaikan yang berkesinambungan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi di wilayah Kulon Progo. Jika dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional, Kabupaten Kulon Progo tetap berada dalam posisi yang lebih unggul selama lima tahun terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), nilai IPM Kabupaten Kulon Progo masih jauh berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan manusia di Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan peningkatan agar mampu mencapai atau melampaui standar yang telah dicapai di tingkat provinsi.

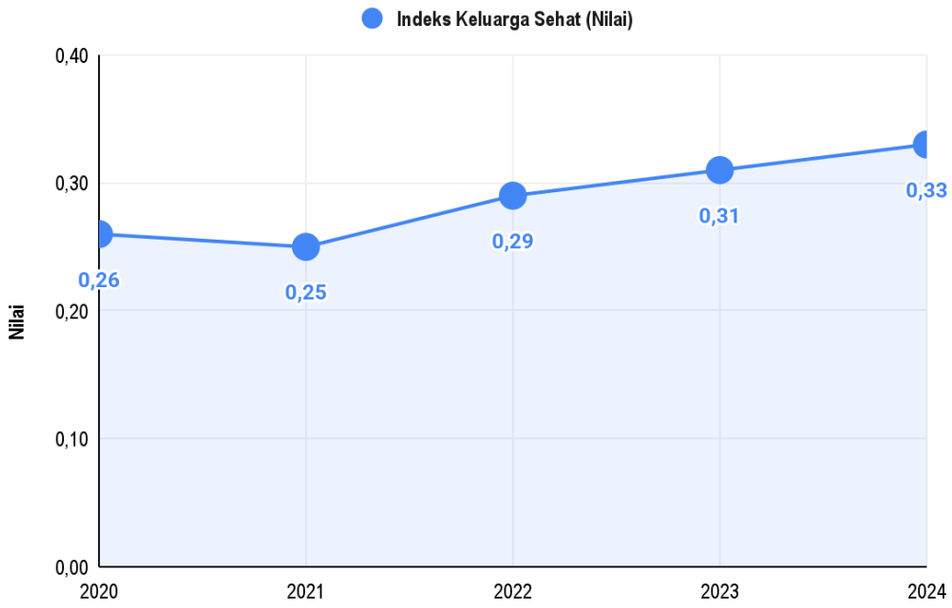
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua



Gambar 2.1.2.2-1 Grafik Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

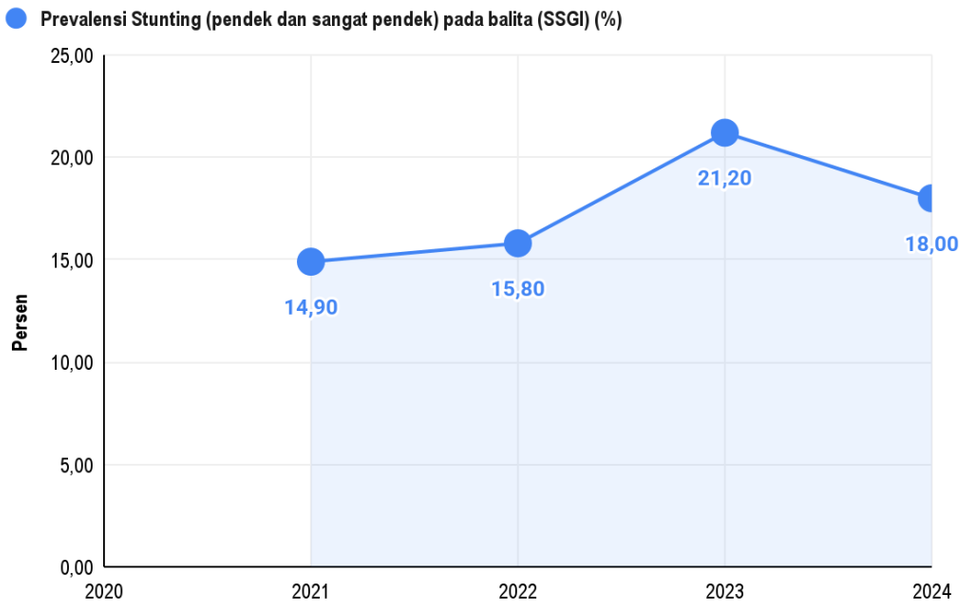
Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, usia dapat menjadi gambaran panjang umur potensial seseorang. Tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2021-2024 memperlihatkan tren peningkatan yang stabil, mencerminkan perbaikan dalam aspek kesehatan, gizi, dan kualitas hidup masyarakat. Pada 2021, UHH tercatat sebesar 75,32 tahun, kemudian sedikit meningkat menjadi 75,33 tahun pada 2022 dan 75,35 tahun pada 2023. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada 2024, dengan tingkat UHH mencapai 75,49 tahun. Meskipun peningkatannya relatif kecil dari tahun ke tahun, tren positif ini menunjukkan bahwa masyarakat Kulon Progo secara umum berpotensi hidup lebih lama, seiring dengan membaiknya pelayanan kesehatan dan kondisi sosial ekonomi. Tingginya angka UHH ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memastikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, termasuk penyediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan yang memadai, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. Faktor stabilitas sosial politik dan keamanan juga turut mendukung hal ini.



Gambar 2.1.2.2-2 Grafik Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Seiring dengan tingkat UHH yang terus meningkat, nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Kulon Progo juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021-2024. Hal ini mengindikasikan perbaikan kondisi kesehatan keluarga secara bertahap. Pada 2021, IKS berada di angka 0,25, kemudian naik menjadi 0,29 di 2022, 0,31 di 2023, dan pada akhirnya mencapai 0,33 pada 2024. Kenaikan indeks ini mencerminkan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat, serta membaiknya kondisi lingkungan tempat tinggal keluarga di Kulon Progo. Meskipun nilainya masih tergolong rendah secara absolut, tren positif ini menunjukkan kemajuan yang perlu terus didorong melalui intervensi lintas sektor.



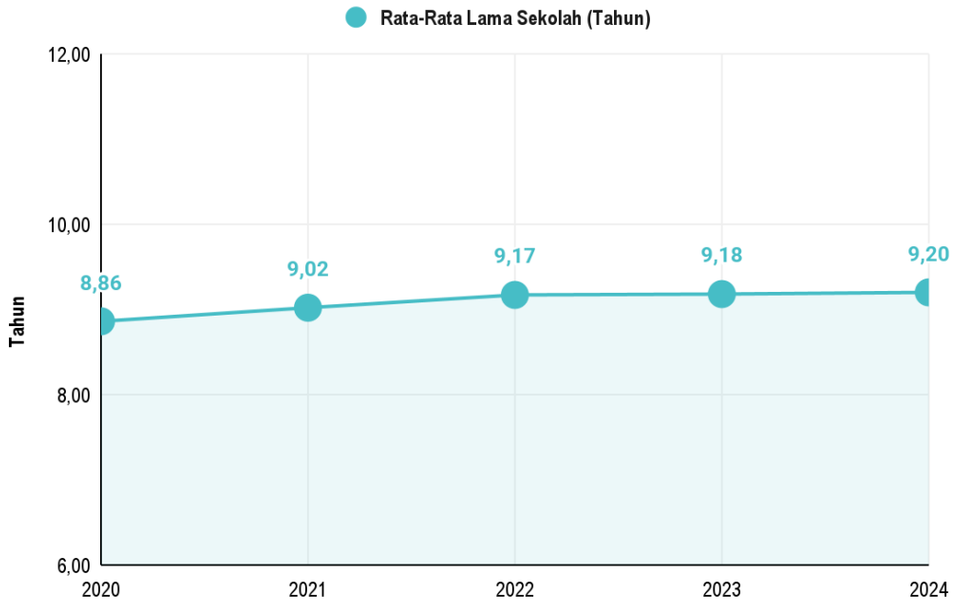
Gambar 2.1.2.2-3 Grafik Prevalensi Stunting di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2021-2024

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi kesehatan dan status gizi anak di suatu wilayah. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1.2.2-3, tren prevalensi stunting di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang menunjukkan tantangan yang masih signifikan. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 14,90%, meningkat menjadi 15,80% pada 2022, kemudian melonjak tajam menjadi 21,20% pada 2023. Meskipun realisasi pada tahun 2024 berada di 18,00%, angka tersebut masih berada di atas ambang batas yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia *(WHO),* yaitu di bawah 20%.

Perkembangan ini mengindikasikan perlunya penguatan intervensi yang lebih intensif dan terpadu lintas sektor, mencakup peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi dan akses air bersih, edukasi gizi keluarga, serta penguatan ketahanan pangan rumah tangga. Upaya konvergensi program percepatan penurunan stunting perlu terus ditingkatkan agar target nasional dan daerah dapat dicapai secara berkelanjutan.

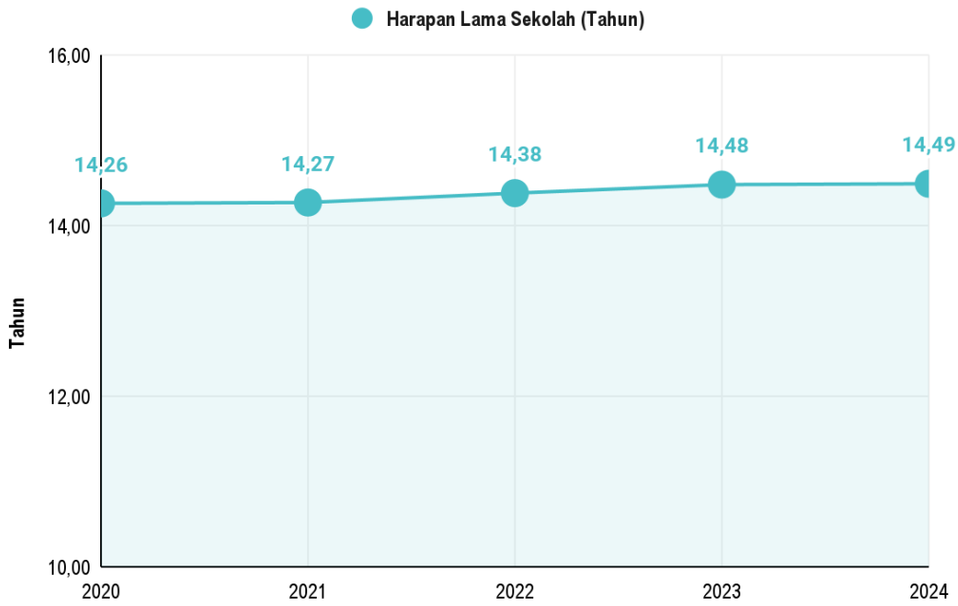
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata



Gambar 2.1.2.3-1 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

Antara tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai indikator kinerja pendidikan. Rata-rata lama sekolah meningkat secara bertahap dari tercatat sebesar 8,86 tahun pada tahun 2020 hingga menjadi 9,2 tahun di 2024. Ini artinya, rata-rata anak di Kabupaten Kulon Progo dapat menyelesaikan pendidikan menengah pertama pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam akses dan partisipasi pendidikan. Meski begitu, nilai yang tercapai masih berada dibawah durasi pendidikan menengah penuh (12 tahun), sehingga upaya peningkatan kualitas dan keberlanjutan pendidikan masih perlu terus didorong.

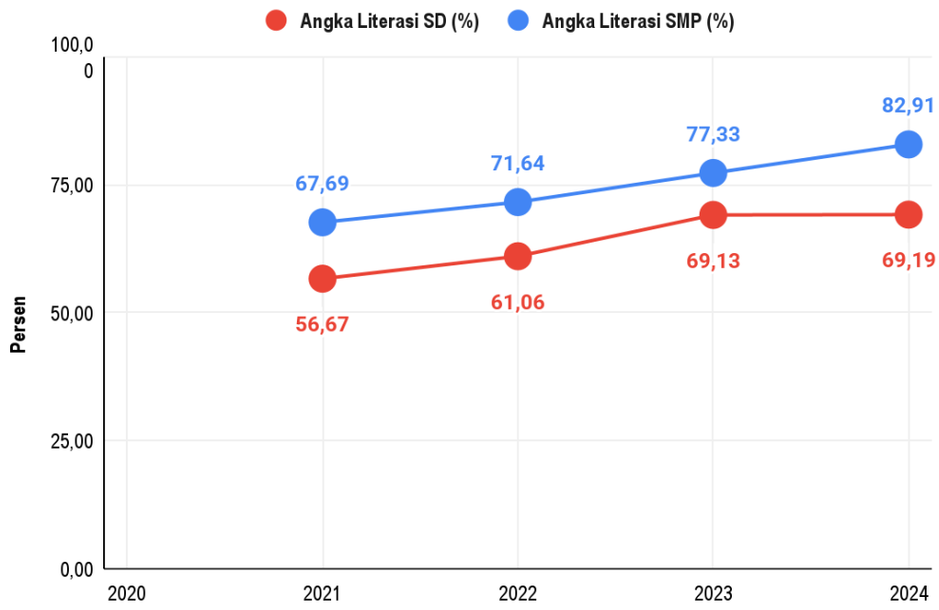


Gambar 2.1.2.3-2 Grafik Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

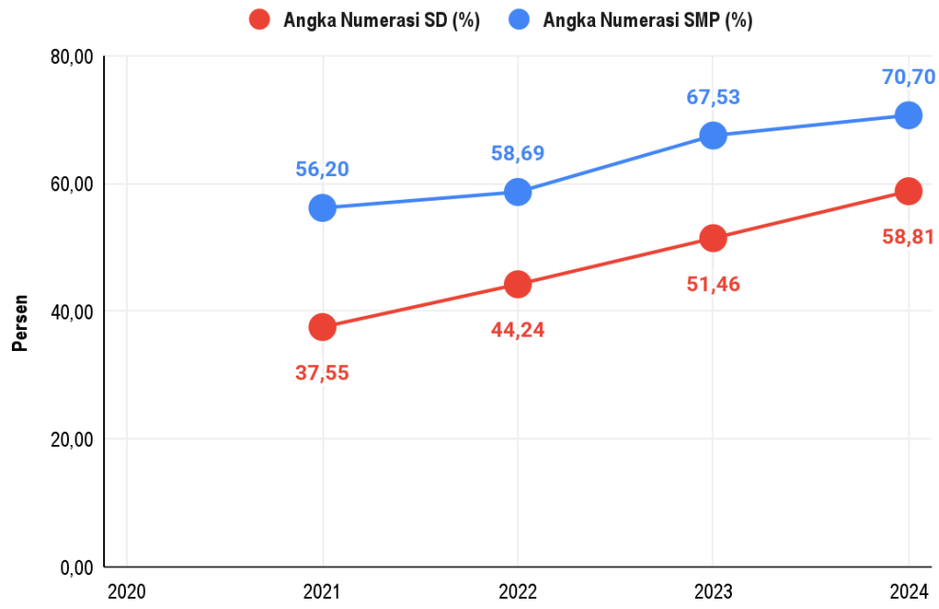
Searah dengan rata-rata lama sekolah, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan optimisme terhadap akses pendidikan di masa depan. HLS mengukur perkiraan lama waktu (dalam tahun) yang akan dijalani oleh anak usia 7 tahun dalam sistem pendidikan, jika mengikuti pola partisipasi pendidikan saat ini.

Berdasarkan grafik di atas, HLS di Kulon Progo meningkat dari sekitar 14,26 tahun pada 2020 menjadi lebih dari 14,49 tahun pada 2024. Artinya, anak-anak di daerah ini diperkirakan akan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas bahkan mendekati perguruan tinggi. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam aksesibilitas, minat melanjutkan sekolah, dan kebijakan pendidikan lokal, sekaligus menjadi indikator positif terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Namun demikian, tantangan terkait mutu pendidikan dan penyebaran fasilitas pendidikan yang merata tetap perlu diperhatikan untuk memastikan peningkatan HLS diikuti oleh kualitas yang sepadan.



Gambar 2.1.2.3-3 Grafik Angka Literasi SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2025

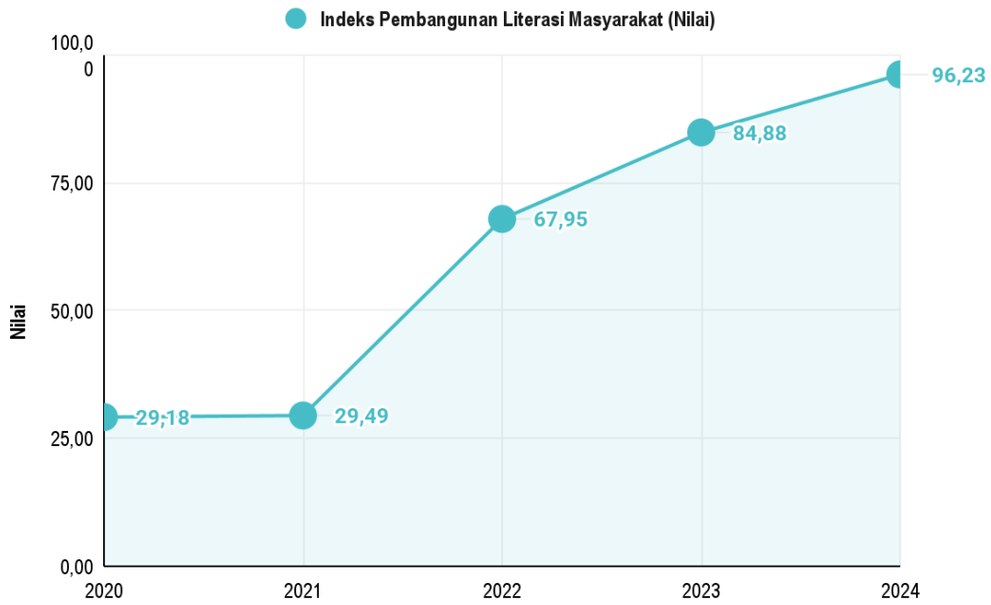


Gambar 2.1.2.3-4 Grafik Angka Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2025

Selama periode 2021-2022, Kabupaten Kulon Progo mencatat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan literasi dan numerasi di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tingkat kemampuan literasi siswa SD meningkat dari 56,67 pada tahun 2021 menjadi 69,19 pada tahun 2024, sedangkan pada siswa SMP, kemampuan literasi meningkat dari 67,69 pada 2021 menjadi 82,91 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyaknya siswa SD dan SMP yang mencapai kompetensi minimum dalam membaca dan memahami teks. Lebih lanjut, kemampuan

numerasi siswa SD juga mengalami peningkatan dari 37,55 pada 2021 menjadi 58,81 pada 2024. Dibersamai dengan kemampuan numerasi siswa SMP yang meningkat dari 56,2 pada 2021 menjadi 70,7 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan dampak positif dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Kulon Progo. Namun, meskipun terdapat kemajuan, nilai numerasi di tingkat SD masih relatif rendah, menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk memperkuat pemahaman konsep matematika dasar di jenjang tersebut.



Gambar 2.1.2.3-5 Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo, 2025

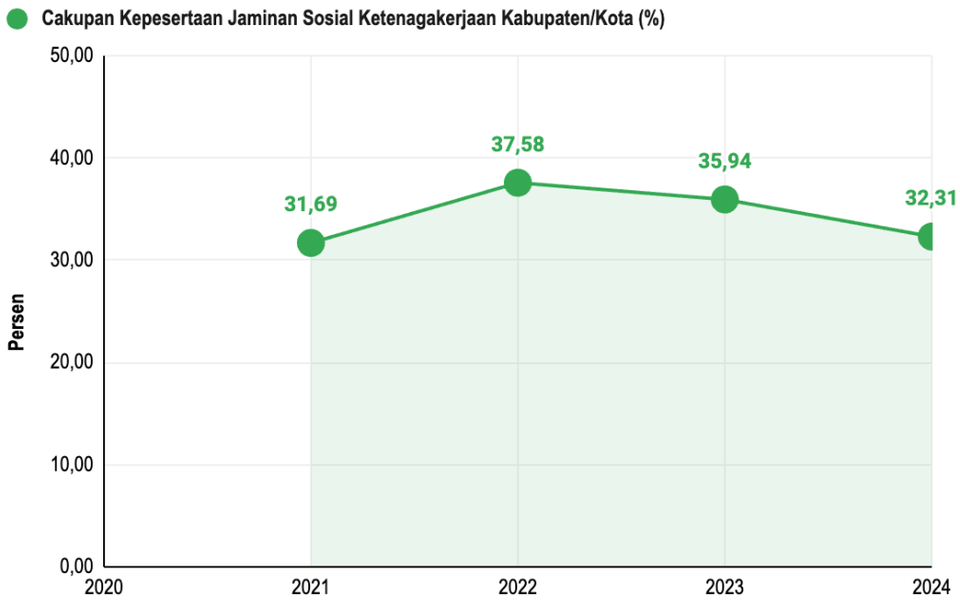
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren yang konsisten meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Meski dengan rumus perhitungan yang lama, nilai IPLM meningkat dari 29,18 pada tahun 2020 menjadi 29,49 pada tahun 2021. Setelah dihitung berdasarkan rumus baru, nilai IPLM yang sebelumnya sebesar 67,95 pada 2022 juga meningkat secara signifikan dan konsisten hingga mencapai nilai 96,23 dalam 2 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan perubahan dalam akses, kualitas, dan daya dukung terhadap kegiatan literasi masyarakat.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif dapat dimaknai sebagai *"Setiap penduduk mendapatkan perlindungan sosial sepanjang siklus hidup yang menghindarkan dari kemiskinan dan mempertahankan kehidupan yang layak"*[2]. Pemerintah menempatkan pendekatan ini sebagai motor penggerak dalam percepatan pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Perlindungan sosial adaptif tidak hanya mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan tenaga kerja serta peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan standardisasi kegiatan ekonomi yang

[2] *Perpres No. 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.*

selama ini kurang teridentifikasi, seperti pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan *(caregiving),* sebagai bagian integral dari strategi perlindungan sosial.



Gambar 2.1.2.4-1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.1.2.4-1, upaya peningkatan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan menunjukkan dinamika yang perlu disoroti. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tercatat sejak tahun 2021 hingga 2024 mengalami fluktuasi, sebagaimana tersaji pada Gambar 2.1.2.4-1. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan berada pada angka 31,69 persen, kemudian meningkat menjadi 37,58 persen pada tahun 2022. Namun, capaian tersebut mengalami penurunan berturut-turut pada tahun-tahun berikutnya, yakni menjadi 35,94 persen pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 32,31 persen pada tahun 2024.

Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun terdapat inisiatif untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial, keberlanjutan dan konsistensi implementasi masih menghadapi tantangan. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi pasca pandemi, dominasi sektor informal, dan rendahnya literasi tentang pentingnya jaminan sosial turut memengaruhi tingkat partisipasi.

Untuk memperkuat perlindungan sosial yang adaptif ke depan, diperlukan langkah strategis yang mencakup peningkatan cakupan dan kualitas layanan jaminan sosial, integrasi data kependudukan dan ketenagakerjaan untuk penargetan yang lebih akurat, serta penguatan sinergi antar-lembaga dalam menjangkau kelompok-kelompok pekerja rentan dan informal. Selain itu, perluasan skema jaminan sosial yang lebih fleksibel dan sesuai konteks lokal dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk mempercepat inklusi sosial dan ketenagakerjaan yang lebih adil.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berintegritas, toleran, dan berdaya saing. Penguatan peran agama sebagai sumber nilai spiritual, etika, dan moral menjadi modal sosial utama dalam mendorong kehidupan masyarakat yang maslahat, harmonis, dan inklusif. Sementara itu, pemajuan kebudayaan berfungsi memperteguh jati diri bangsa dan memperkuat ketahanan budaya di tengah arus globalisasi dan dinamika perubahan zaman.

Di Kabupaten Kulon Progo, penguatan aspek keberagamaan dilakukan melalui berbagai inisiatif pembinaan umat beragama, fasilitasi rumah ibadah, dialog antarumat, serta penguatan kapasitas kelembagaan keagamaan. Upaya ini diarahkan untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat multikultural.

Pada aspek kebudayaan, mulai tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo secara resmi mengukur capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai indikator komposit untuk menilai kontribusi kebudayaan dalam pembangunan daerah. IPK ini mengacu pada *Culture Development Indicators (CDIs)* yang dikembangkan oleh UNESCO, dan telah menjadi bagian dari kebijakan nasional sejak diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018. Pengukuran IPK merupakan langkah strategis untuk melihat sejauh mana budaya telah menjadi bagian dari investasi masa depan pembangunan—melampaui ketergantungan pada sumber daya alam (SDA), menuju pemanfaatan sumber daya kebudayaan (SDB) yang bersifat lestari dan berdaya ungkit tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran awal, IPK Kabupaten Kulon Progo tercatat pada angka 63,31 pada tahun 2024. Angka ini memberikan baseline awal untuk merancang kebijakan pemajuan kebudayaan yang lebih terukur dan strategis pada tahun-tahun mendatang. Capaian ini sekaligus mencerminkan adanya ruang perbaikan di berbagai dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan[3], seperti:

1. Dimensi Ekonomi Budaya;
2. Dimensi Pendidikan;
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya;
4. Dimensi Warisan Budaya;
5. Dimensi Ekspresi Budaya;
6. Dimensi Budaya Literasi; dan
7. Dimensi Gender.

Namun demikian, untuk memperkuat efektivitas IPK sebagai alat bantu perencanaan dan evaluasi kebijakan, terdapat sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain:

1. Diperlukan peningkatan nilai pada dimensi warisan budaya, khususnya pada indikator-indikator yang bersumber dari data sekunder, melalui pembaruan basis data dan pemetaan potensi lokal yang lebih komprehensif.
2. Pelaksanaan kajian IPK hendaknya didukung oleh alokasi waktu yang memadai (idealnya 3–4 bulan), guna memastikan kualitas data dan kedalaman analisis.

---

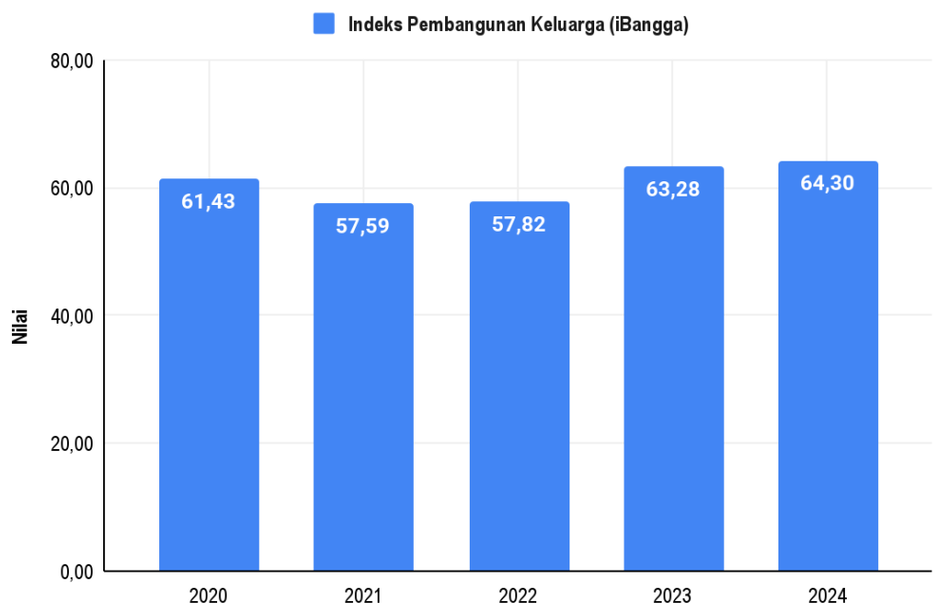
[3] *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan; Pasal 3, Ayat 3.*

3. Pemilihan responden dalam survei IPK sebaiknya menerapkan pendekatan Proportional Cluster Random Sampling yang tersebar merata dan representatif terhadap karakter sosial-budaya wilayah.
4. Pelaksanaan survei langsung dilapangan tetap menjadi komponen penting, dengan penjadwalan waktu dan alokasi tenaga yang mencukupi untuk menghasilkan data primer yang valid dan kontekstual. Rekomendasi ini penting untuk meningkatkan akurasi dan kebermanfaatan IPK sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti dalam bidang kebudayaan.

Ke depan, pembangunan yang berlandaskan keberagamaan dan kebudayaan akan terus diarahkan untuk memperkuat karakter masyarakat Kulon Progo sebagai masyarakat yang religius, berbudaya, serta memiliki ketahanan sosial yang tinggi. Hal ini menjadi landasan fundamental dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang menempatkan nilai-nilai luhur sebagai pilar utama dalam setiap aspek kehidupan.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ketiganya saling terkait dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang individu, partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat, serta pemenuhan hak-hak dasar tanpa diskriminasi. Analisis pada subbab ini mencerminkan kondisi dan dinamika capaian pembangunan daerah dalam mewujudkan keluarga tangguh, mempersempit ketimpangan gender, serta mendorong masyarakat yang inklusif dan partisipatif.

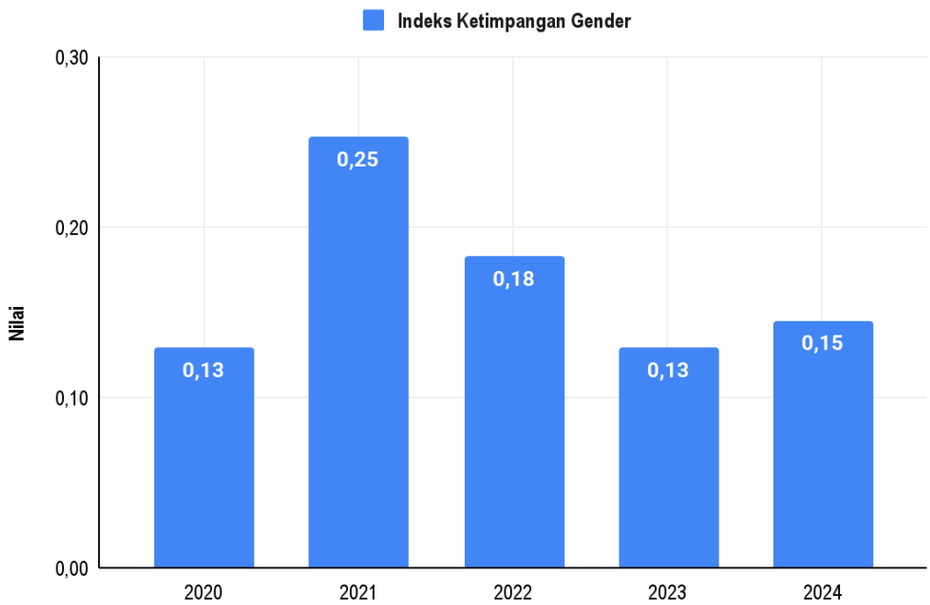


Gambar 2.1.2.6-1 Grafik Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2025, diolah

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.1.2.6-1 menunjukkan tren yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Setelah sempat mengalami penurunan dari 61,43 pada tahun 2020 menjadi 57,59 pada 2021, indeks ini mulai mengalami perbaikan secara konsisten,

yakni mencapai 57,82 pada 2022, meningkat tajam menjadi 63,28 pada 2023, dan kembali naik ke angka 64,30 pada tahun 2024. Nilai-nilai ini secara konsisten menempatkan Kabupaten Kulon Progo dalam kategori berkembang (rentang nilai 40–70), dengan kecenderungan menuju ambang batas atas klasifikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan keluarga di wilayah ini terus membaik, mengindikasikan mulai efektifnya kebijakan dan program pembangunan keluarga di daerah, terutama dalam memperkuat peran keluarga sebagai unit sosial dasar dalam pembangunan masyarakat. Capaian ini juga mencerminkan perbaikan dalam aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga sebagai tiga dimensi utama penyusun iBangga, sekaligus mengarah pada visi jangka panjang untuk mewujudkan keluarga yang tangguh secara sosial, ekonomi, dan psikologis.



Gambar 2.1.2.6-2 Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

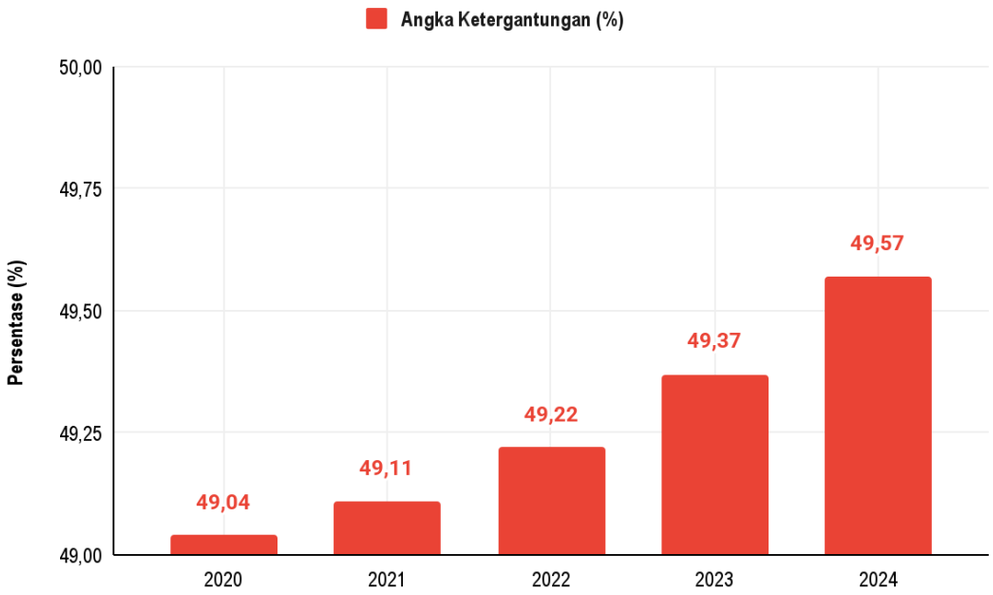
Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, serta partisipasi ekonomi dan politik. Semakin rendah nilai IKG, semakin kecil tingkat ketimpangan gender yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan Gambar 2.1.2.6-2, realisasi IKG di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, IKG tercatat sebesar 0,13, kemudian mengalami peningkatan tajam menjadi 0,25 pada tahun 2021. Angka ini menurun pada tahun 2022 menjadi 0,18, dan kembali mencapai level rendah sebesar 0,13 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 0,15. Secara umum, nilai IKG Kabupaten Kulon Progo berada pada kisaran yang relatif rendah, mengindikasikan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja cenderung kecil. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya penguatan kebijakan dan intervensi yang konsisten untuk menjaga dan meningkatkan kesetaraan gender, terutama dalam bidang partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset strategis dan sekaligus penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Daya saing SDM tidak hanya ditentukan oleh kuantitas, tetapi juga oleh kualitas, produktivitas, dan kapasitas adaptasinya terhadap perubahan sosial, teknologi, dan pasar kerja. Oleh karena itu, penguatan SDM menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, daya saing SDM diukur antara lain melalui indikator seperti angka ketergantungan yang mencerminkan beban tanggungan produktif terhadap kelompok usia non-produktif. Subbab ini menguraikan kondisi dan tantangan pembangunan SDM di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 2020-2024.

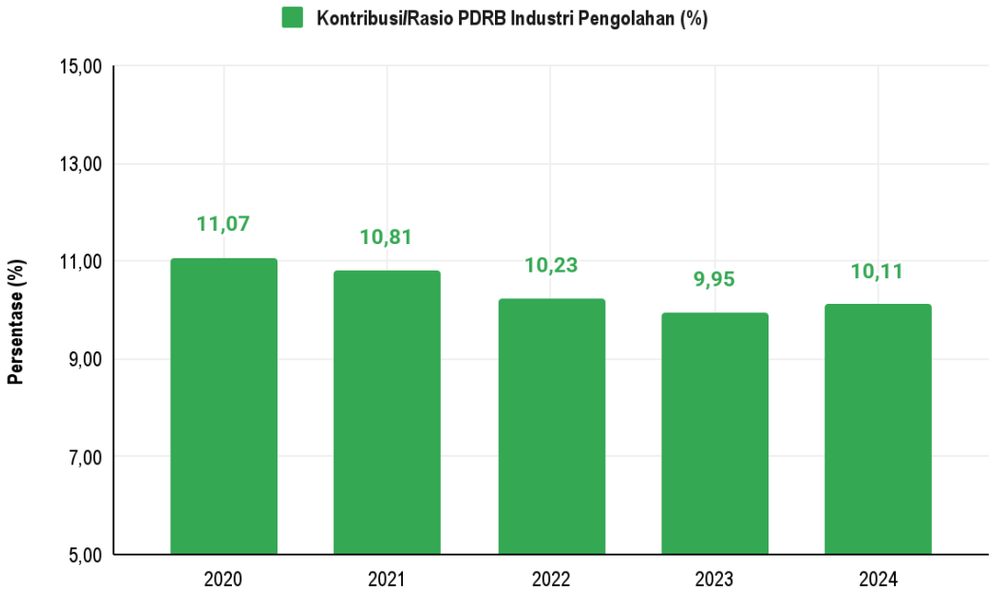


Gambar 2.1.3.1-1 Grafik Angka Ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Angka Ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan bertahap dari 49,04 pada tahun 2020 menjadi 49,57 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa beban penduduk usia produktif untuk menopang kelompok usia non-produktif (anak-anak dan lansia) semakin meningkat, yang dapat menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun perubahan nilainya relatif kecil, tren ini menandakan perlunya perhatian terhadap dinamika demografi daerah, khususnya dalam merespons kebutuhan perlindungan sosial, penguatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan kualitas layanan dasar. Upaya strategis seperti pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan kelompok rentan perlu terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan beban ketergantungan secara berkelanjutan.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

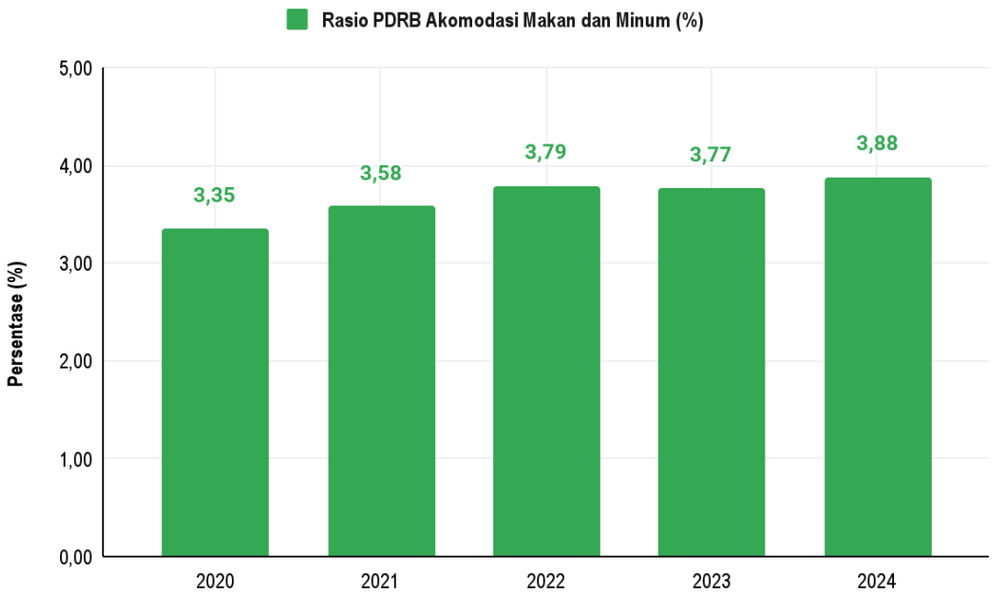
Ilmu pengetahuan, teknologi (Iptek), dan inovasi merupakan pilar strategis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, Iptek dan inovasi tidak hanya berfungsi sebagai pendukung efisiensi, tetapi juga sebagai akselerator pertumbuhan sektor-sektor unggulan, termasuk industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta kewirausahaan. Penguatan kapasitas inovatif daerah akan berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing jangka panjang. Oleh karena itu, gambaran kondisi Iptek dan inovasi di Kabupaten Kulon Progo disajikan melalui sejumlah indikator seperti Rasio PDRB sektor industri pengolahan, Rasio PDRB sektor akomodasi dan makan minum, Proporsi PDRB ekonomi kreatif, Rasio kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta Indeks Inovasi Daerah.



Gambar 2.1.3.2-1 Grafik Kontribusi/Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kulon Progo (diolah), 2025

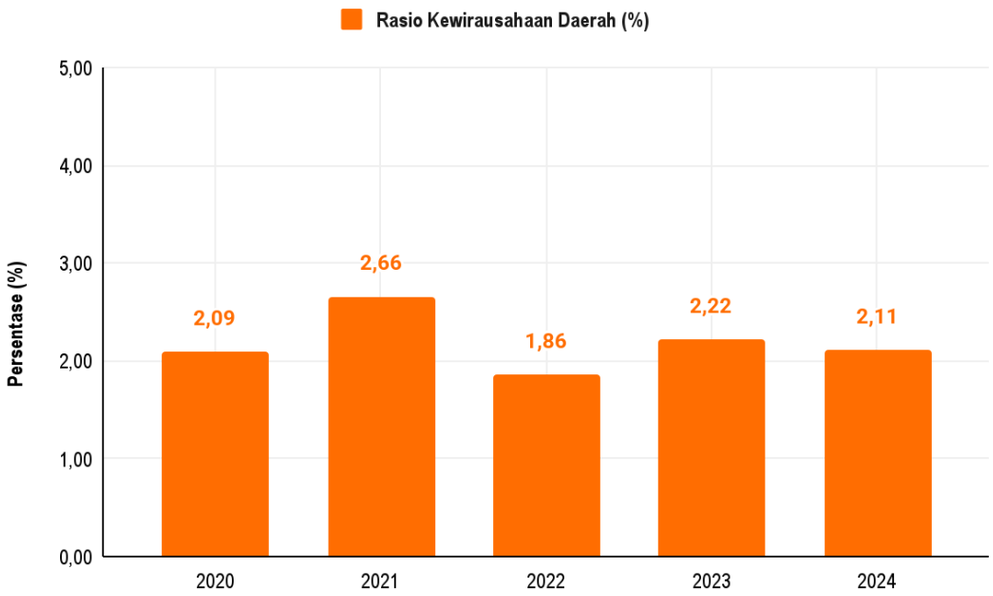
Kontribusi/Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren penurunan bertahap dari 11,07 pada tahun 2020 menjadi 9,95 pada tahun 2023, dengan sedikit peningkatan menjadi 10,11 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan melemahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total perekonomian daerah selama lima tahun terakhir. Meskipun terdapat perbaikan pada tahun terakhir, capaian tersebut masih berada di bawah angka awal tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi strategis untuk memperkuat daya saing dan produktivitas sektor industri, melalui penguatan inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi yang relevan guna mendorong keberlanjutan dan transformasi struktur ekonomi daerah.



Gambar 2.1.3.2-2 Grafik Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kulon Progo (diolah), 2025

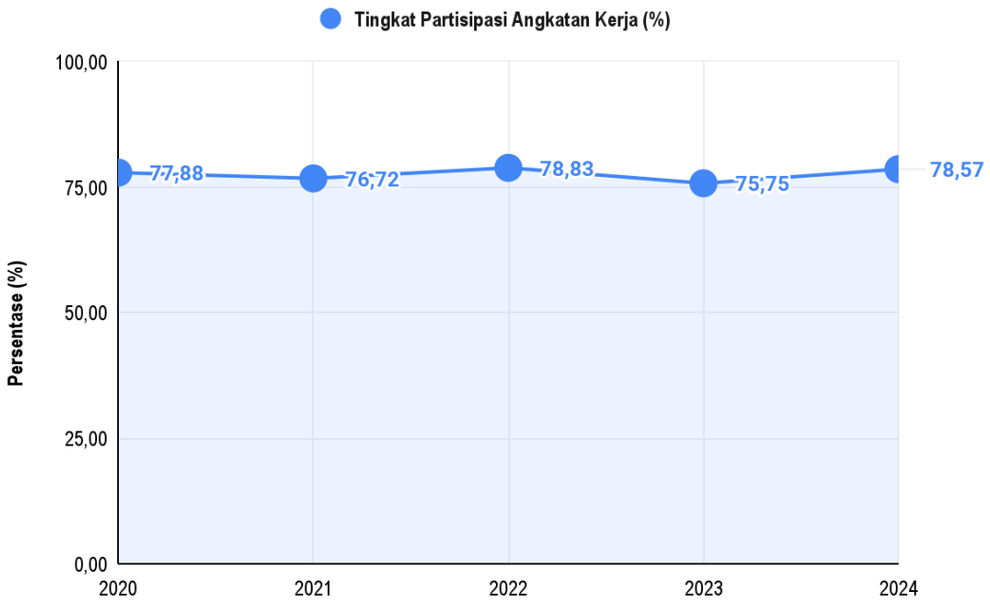
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan bertahap dari 3,35 pada tahun 2020 menjadi 3,88 pada tahun 2024. Meskipun sempat terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023, capaian pada tahun berikutnya kembali menunjukkan penguatan. Pola ini mencerminkan tumbuhnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi makan dan minum terhadap perekonomian daerah, yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan pelayanan pendukungnya. Tren ini mengindikasikan peluang positif bagi pengembangan ekonomi lokal, khususnya dalam sektor jasa, yang perlu direspons melalui penguatan kualitas layanan, kapasitas SDM, dan infrastruktur pendukung pariwisata yang berkelanjutan.



Gambar 2.1.3.2-3 Grafik Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan pola fluktuatif sepanjang periode 2020-2024, dengan nilai tertinggi pada 2021 sebesar 2,66 dan terendah pada 2022 sebesar 1,86. Capaian tahun 2023 meningkat menjadi 2,22 tetapi sedikit menurun pada tahun 2024 yakni sebesar 2,11. Variasi ini mengindikasikan belum stabilnya ekosistem kewirausahaan di daerah, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi, akses terhadap pembiayaan, serta kualitas pendampingan usaha. Ke depan, diperlukan intervensi strategis untuk mendorong pertumbuhan kewirausahaan yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan, termasuk penguatan inkubasi usaha dan kolaborasi lintas sektor.

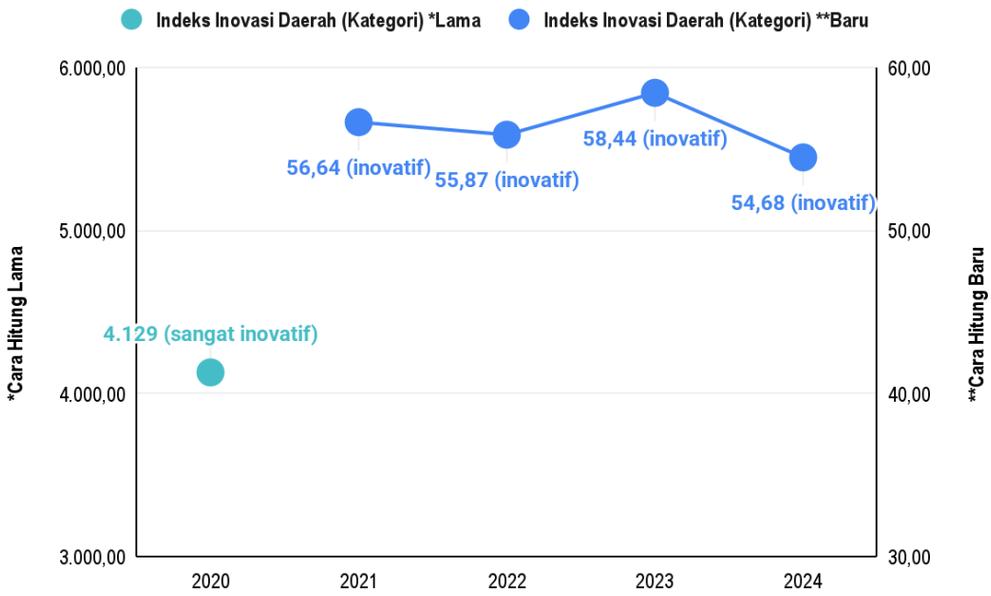


Gambar 2.1.3.2-4 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 78,83%, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 75,75%. Setelah mengalami penurunan pada 2023, capaian TPAK kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 78,57%, mendekati angka tertingginya.

Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika kondisi ketenagakerjaan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan struktur ekonomi, migrasi tenaga kerja, serta dampak pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kenaikan kembali pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan dalam integrasi penduduk usia kerja ke dalam pasar tenaga kerja, yang menjadi indikasi positif terhadap pemulihan aktivitas ekonomi dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 2.1.3.2-6 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kecenderungan yang konsisten dalam kategori Inovatif selama periode 2021 hingga 2024, dengan nilai berturut-turut sebesar 56,64, 55,87, 58,44, dan 54,68. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 4,129 dan dikategorikan sebagai Sangat Inovatif, namun perlu dicatat bahwa skor tersebut diperoleh berdasarkan metode perhitungan lama, sehingga tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun berikutnya yang menggunakan metode baru. Meski demikian, tren skor selama empat tahun terakhir mencerminkan bahwa kapasitas inovasi daerah relatif stabil, dan tetap berada pada kategori yang cukup kompetitif secara nasional.

Stabilitas kategori "Inovatif" menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki landasan kelembagaan dan kebijakan inovasi yang cukup kuat untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting dalam konteks mendorong keberlanjutan produktivitas ekonomi, khususnya dalam sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi seperti industri pengolahan, pariwisata (akomodasi dan makan-minum), serta ekonomi kreatif. Upaya penguatan ekosistem inovasi menjadi kunci dalam memperkuat struktur ekonomi lokal, mendorong kewirausahaan berbasis teknologi, serta memperluas lapangan kerja produktif. Oleh karena itu, peningkatan Indeks Inovasi Daerah perlu terus diakselerasi melalui sinergi kebijakan litbang daerah, dukungan inkubasi usaha, serta adopsi teknologi di sektor-sektor unggulan.

Beberapa Inovasi yang dilaksanakan sudah berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut diantaranya adalah:

1. Panganku

Secara umum program Bansos Pangan-KU yang dimulai sejak tahun 2019 adalah mensinergikan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan kebijakan Kabupaten Kulon Progo berupa perlindungan pada produk lokal. Kebijakan tersebut dipadukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar pangan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam bentuk jaminan sosial untuk 4.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 12 bulan per Rp200.000,00 dalam satu tahun. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diantaranya adalah fakir miskin, difabel, lanjut usia,

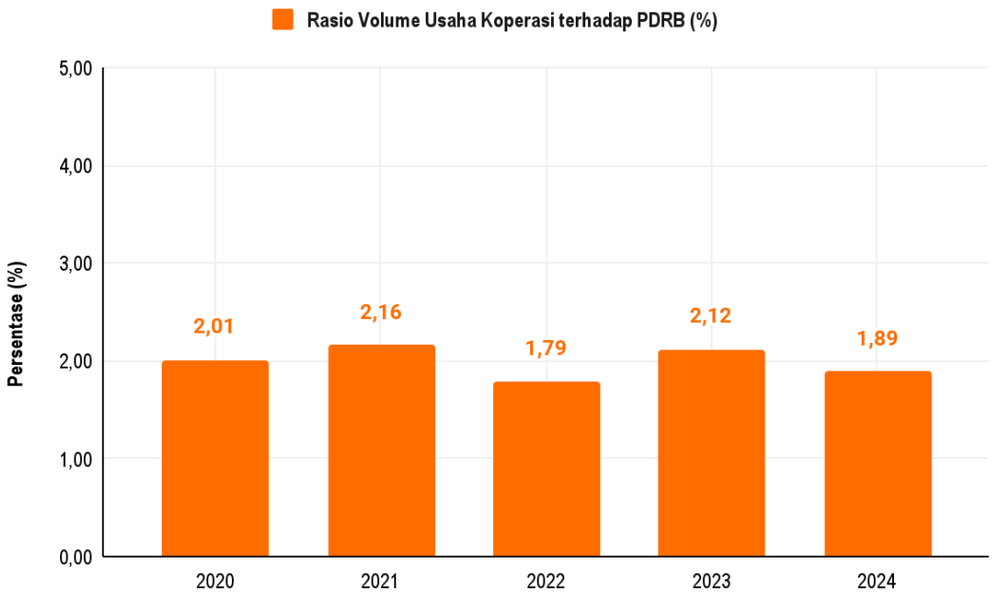
dan warga terlantar yang diusulkan oleh pemerintah kalurahan dan diverifikasi oleh Dissos P3A.

Pada tahun 2022 komoditas berkembang ke pemenuhan kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan vitamin mineral. Semua komoditas 100% merupakan produk Kulon Progo, lebih banyak pihak yang terlibat dan mendapatkan manfaat dari program ini. Ada nilai tambah untuk petani beras, sayur, dan buah; peternak ayam petelur dan pembudidaya ikan lele; perajin tahu tempe, serta produsen gula merah. Penyaluran dilakukan oleh KUBE E-Warong yang bermitra dengan Bank penyalur.

Inovasi Pangan-KU melibatkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) E-Warong dan masyarakat kurang mampu yang terdiri dari kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok budidaya ikan, peternak telur dan ayam, perajin tempe dan tahu, serta penyadap nira dibawah binaan Perangkat Daerah mitra. Hal ini menimbulkan multiplier effect yang sistematis dan terencana dalam proses pencapaian tujuan utama penanggulangan kemiskinan, uang beredar di orang miskin bukan lari ke pemilik modal dimana sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) menikmati produk mereka sendiri. Roda ekonomi berputar oleh dan untuk masyarakat sendiri dan pada akhirnya satu-persatu keluar dari lingkaran kemiskinan

2. Cabai Paku

Cabai Paku adalah inovasi budidaya tanaman cabai pada lahan pantai di Kulon Progo. Inovasi merupakan agribisnis dari hulu sampai hilir dengan penggunaan teknologi yang selalu berkembang, modern dan spesifik lokasi sehingga menghasilkan produktivitas 10 ton/ha. Selain itu juga dilakukan Pasar Lelang secara online untuk meningkatkan posisi tawar petani serta peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil cabai. Inovasi ini mampu memberdayakan pemberdayaan Petani sejumlah 4.770 orang meliputi 4 Gapoktan, 25 Kelompok Tani, 21 Pasar Lelang, 2 Kelompok Wanita Tani dan tenaga kerja dari luar. *Stakeholder* yang berkolaborasi dalam inovasi ini mencakup Perguruan Tinggi, BPTP, Perbankan, Bank Indonesia, Pemkab, Pemerintah DIY. Dampak dari inovasi Cabai Paku, diantaranya adalah: Meningkatkan produksi, menjadi penyumbang 12 besar produksi cabai Nasional, Juara II Sub Sektor Hortikultura dalam Apresiasi Kinerja Program Pengendalian Inflasi tingkat Nasional pada tahun 2016, Peningkatan produksi cabai di kawasan lahan pantai dan Tumbuhnya usaha pengolahan hasil cabai dengan omzet Rp180 juta per tahun.



Gambar 2.1.3.2-7 Grafik Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 2,01%, kemudian meningkat pada 2021 menjadi 2,16%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 ke angka 1,79%, sebelum kembali naik menjadi 2,12% di tahun 2023.

Fluktuasi ini dapat diinterpretasikan sebagai cerminan dari tantangan dan peluang yang dihadapi sektor koperasi, baik dari sisi manajemen internal, daya saing usaha koperasi, maupun kondisi makroekonomi. Penurunan pada 2022 dipengaruhi oleh ketatnya persaingan usaha serta penyesuaian pasca pandemi, sedangkan peningkatan kembali pada 2023 mengindikasikan adanya pemulihan aktivitas usaha koperasi, termasuk perbaikan dalam manajemen, pemasaran, dan daya serap pasar.

Meningkatkan konsistensi dan keberlanjutan kontribusi koperasi terhadap PDRB memerlukan penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, digitalisasi koperasi, serta pengembangan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan BUMDes. Dengan strategi tersebut, koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang lebih signifikan dan inklusif dalam pembangunan daerah.



Gambar 2.1.3.2-8 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

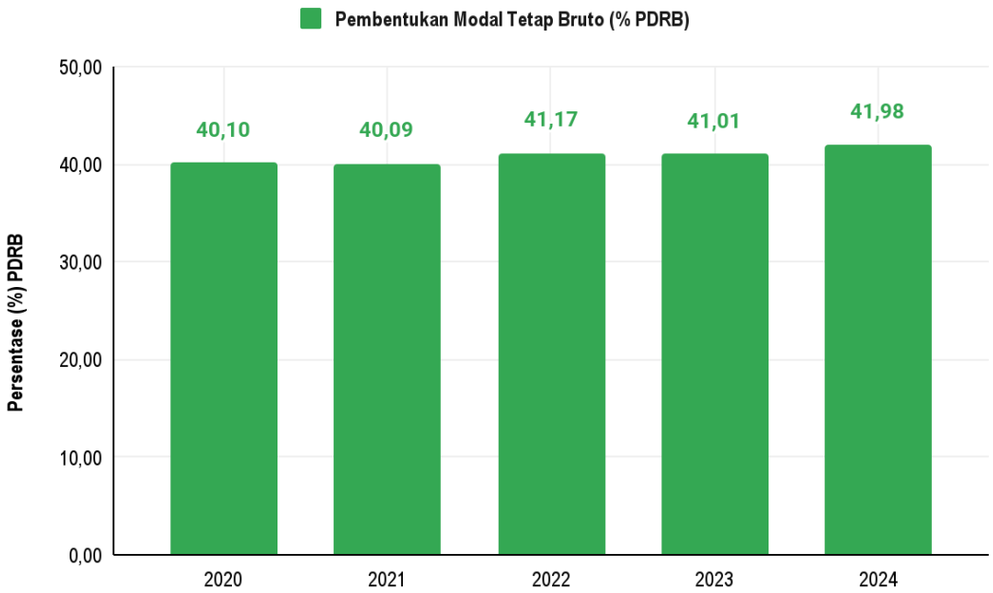
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan kecenderungan menurun pada akhir periode. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 70,16%, sempat turun menjadi 68,32% di tahun 2021, kemudian naik signifikan menjadi 70,99% pada 2022. Namun, terjadi penurunan tajam di tahun 2023, mencapai titik terendah sebesar 66,31%.

Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika partisipasi tenaga kerja perempuan yang bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti perubahan kebutuhan domestik, kondisi kesehatan keluarga, akses terhadap lapangan kerja yang ramah gender, hingga dampak ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. Penurunan pada 2023 patut menjadi perhatian, karena dapat mencerminkan kendala struktural maupun kultural yang membatasi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja.

Untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan secara berkelanjutan, diperlukan intervensi kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja inklusif, pelatihan vokasi yang responsif gender, serta dukungan terhadap sistem kerja fleksibel dan layanan penitipan anak. Upaya ini penting guna memperkuat peran perempuan dalam perekonomian daerah dan mewujudkan kesetaraan kesempatan kerja.

2.1.3.3 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan fondasi penting bagi penguatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah dalam jangka panjang. Dalam konteks Kabupaten Kulon Progo, integrasi ini mencakup keterhubungan antar wilayah dalam negeri serta peran aktif dalam rantai nilai dan pasok regional maupun global. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi salah satu indikator utama untuk menilai seberapa besar investasi terhadap aset tetap produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui peningkatan PMTB, terlihat upaya konkret dalam memperkuat kapasitas produksi dan memperluas konektivitas ekonomi daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional.



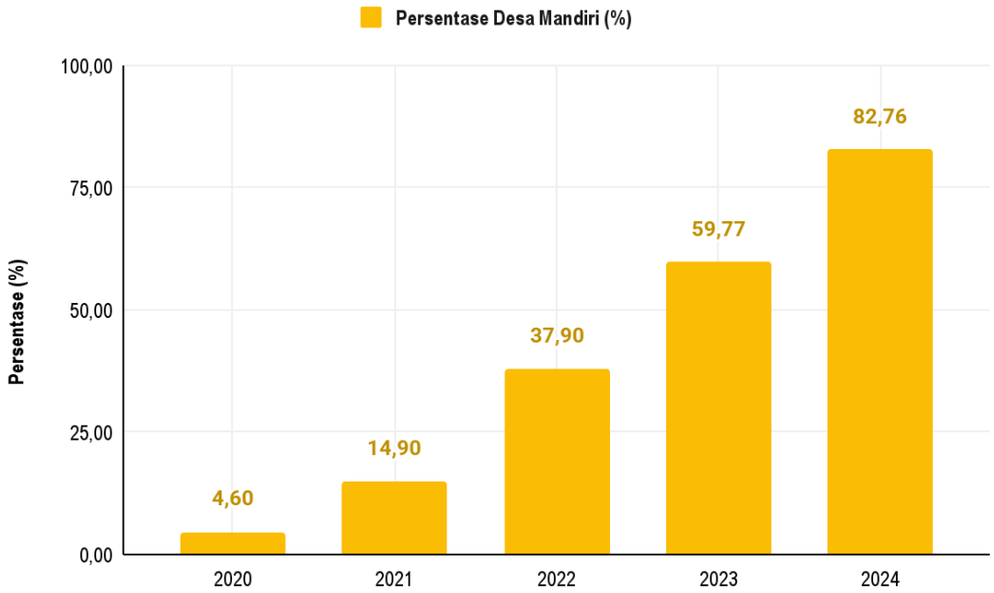
Gambar 2.1.3.3-1 Grafik Perkembangan Pembentukan Modal Tetap bruto Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kulon Progo, 2025

Data menunjukkan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Kulon Progo cenderung mengalami peningkatan sepanjang periode 2020 hingga proyeksi 2024, dengan nilai yang naik dari 40,10 pada tahun 2020 menjadi 41,98 pada tahun 2024. Meski sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, tren secara keseluruhan mengindikasikan tumbuhnya investasi terhadap aset tetap, seperti infrastruktur dan peralatan produksi. Kecenderungan ini mencerminkan dinamika pembangunan ekonomi daerah yang secara bertahap semakin terintegrasi dengan aktivitas ekonomi domestik dan regional, serta menunjukkan adanya keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Kulon Progo ke depan.

2.1.3.4 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan yang seimbang merupakan fondasi penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Kawasan perkotaan berperan strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa, sementara kawasan perdesaan menjadi basis produksi, ketahanan pangan, serta pelestarian sumber daya alam dan budaya lokal. Untuk memastikan peran strategis keduanya dapat dioptimalkan, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, akses terhadap hunian layak, dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengukuran terhadap indikator yang menjadi kewenangan daerah menjadi penting dalam menilai sejauh mana pembangunan wilayah telah berjalan secara terintegrasi dan berkeadilan, guna mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo.



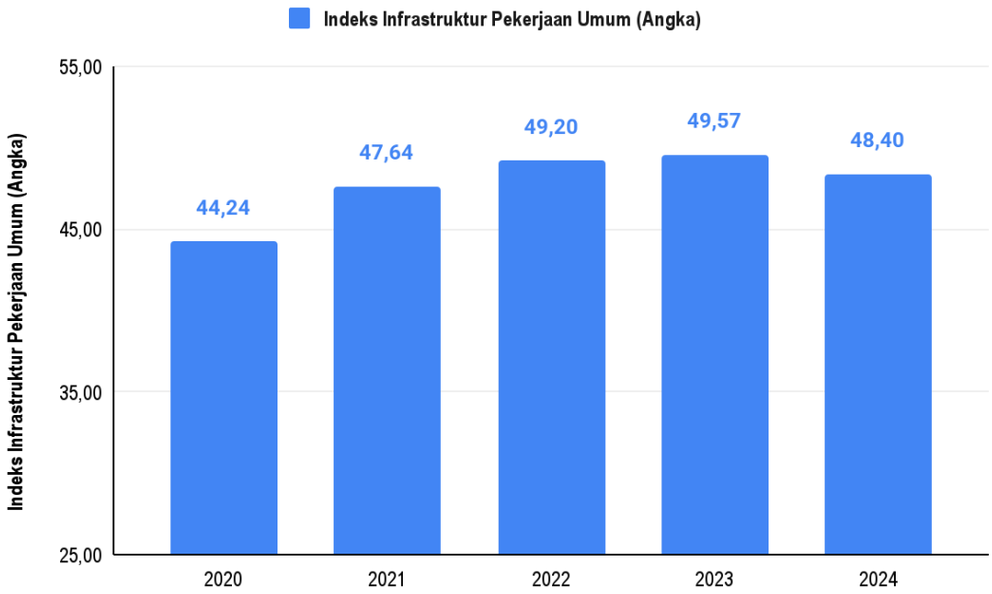
Gambar 2.1.3.4-1 Grafik Perkembangan Desa Mandiri di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Perkembangan persentase desa mandiri di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren yang sangat positif dan progresif sepanjang periode 2020-2024. Pada tahun 2020, persentase desa mandiri baru mencapai 4,6%, namun angka ini meningkat tajam setiap tahunnya: 14,9% di tahun 2021, 37,9% pada 2022, 59,77% pada 2023, dan mencapai 82,76% pada 2024.

Peningkatan signifikan ini mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pembangunan desa, termasuk optimalisasi penggunaan Dana Desa, penguatan kapasitas kelembagaan desa, serta peningkatan pelayanan dasar dan ekonomi lokal. Hal ini juga menunjukkan efektivitas strategi pendampingan dan pembinaan desa yang konsisten, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis potensi lokal.

Capaian ini merupakan indikasi bahwa sebagian besar desa di Kulon Progo telah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam hal tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi. Meski demikian, keberlanjutan capaian ini memerlukan strategi konsolidasi, terutama untuk menjaga kualitas kemandirian desa serta mendorong desa yang belum mandiri agar segera naik kelas. Penguatan inovasi desa,

digitalisasi layanan, dan pengembangan kemitraan ekonomi lokal menjadi kunci untuk mendorong transformasi desa yang berkelanjutan.



Gambar 2.1.3.4-2 Grafik Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Perkembangan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan meskipun bersifat moderat dan sempat mengalami koreksi. Sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.1.3.4-2, indeks ini mengalami kenaikan dari angka 44,24 pada tahun 2020 menjadi 47,64 pada 2021, kemudian meningkat lebih lanjut menjadi 49,20 pada tahun 2022 dan 49,57 pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan ke angka 48,40.

Kenaikan yang terjadi pada tiga tahun pertama mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan drainase, irigasi, serta prasarana air bersih yang menjadi penopang konektivitas dan kualitas hidup di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Sementara itu, penurunan pada tahun 2024 perlu dicermati sebagai sinyal adanya potensi stagnasi atau penurunan kualitas layanan infrastruktur, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, beban pemeliharaan infrastruktur lama, atau belum optimalnya pengelolaan aset publik.

Secara umum, capaian indeks ini memperlihatkan bahwa meskipun telah terdapat kemajuan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum, kualitas dan pemerataan layanan masih perlu ditingkatkan untuk menunjang peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi yang saling menguatkan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan infrastruktur yang lebih terintegrasi dan berbasis spasial, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan wilayah agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pusat kota, tetapi juga menjangkau kawasan pinggiran dan desa-desa produktif.

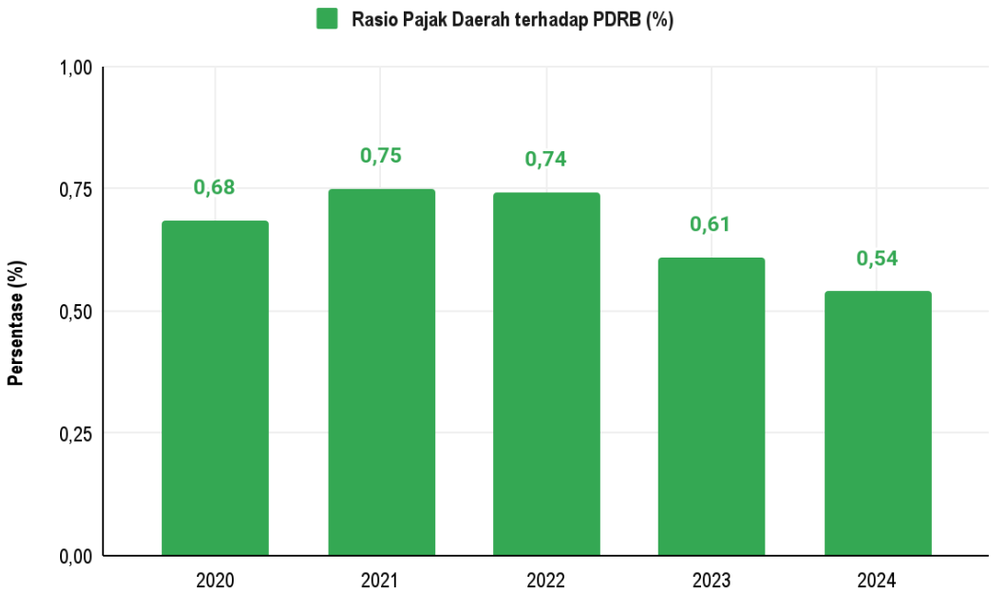
Ke depan, peningkatan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum perlu didukung melalui inovasi pendanaan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeliharaan infrastruktur, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan serta perawatan sarana

prasarana publik. Upaya ini menjadi krusial dalam mewujudkan struktur ruang dan wilayah yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berdaya saing di Kabupaten Kulon Progo.

2.1.3.5 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan landasan penting dalam menciptakan iklim pembangunan daerah yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif. Dalam konteks daerah, stabilitas ini diwujudkan melalui kesinambungan fiskal yang ditopang oleh optimalisasi pendapatan asli daerah, pengendalian inflasi, serta pengelolaan belanja publik yang efisien dan tepat sasaran. Di sisi lain, stabilitas moneter dan sektor keuangan lokal juga memainkan peran krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi produktif. Oleh karena itu, analisis terhadap indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB dan rasio total kredit terhadap PDRB menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi ketahanan dan kinerja ekonomi makro di Kabupaten Kulon Progo.

Capaian rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Kulon Progo secara lengkap tersaji dalam grafik pada gambar 2.1.3.5-1 berikut.



Gambar 2.1.3.5-1 Grafik Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

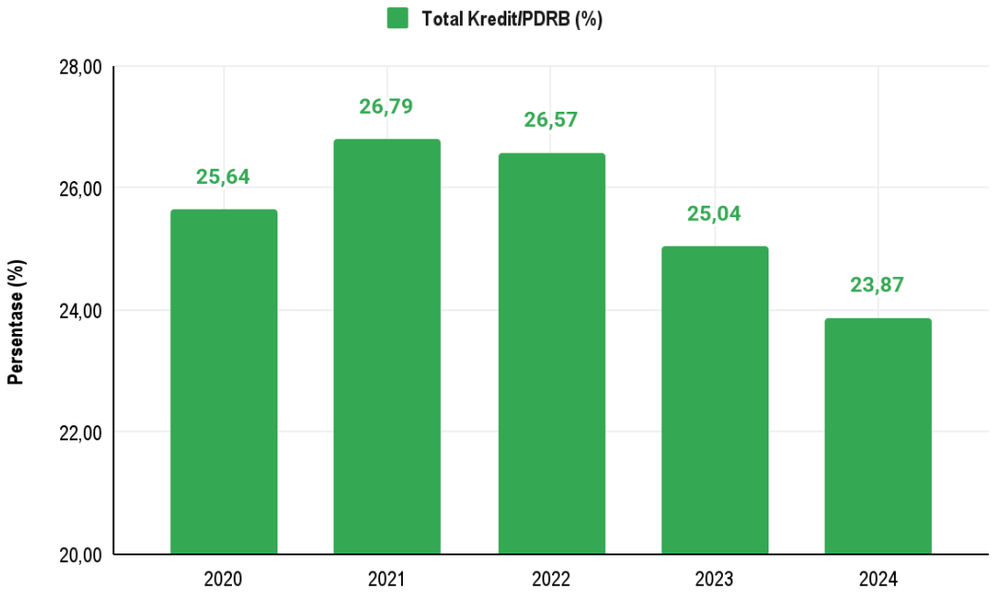
Sumber: BPS Kulon Progo (diolah), 2025

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020-2024 menunjukkan tren penurunan setelah sempat mengalami peningkatan di awal periode. Pada tahun 2020, rasio ini berada pada level 0,68%, naik menjadi 0,75% pada 2021, dan relatif stabil di 0,74% pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi penurunan menjadi 0,61%, dan semakin menurun menjadi 0,54% pada 2024.

Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap total output ekonomi daerah (PDRB) cenderung melemah. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya basis pajak daerah, lemahnya optimalisasi potensi pajak, atau pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Di sisi lain, ini juga bisa mencerminkan tantangan dalam perluasan objek pajak serta efektivitas pemungutan dan kepatuhan pajak masyarakat.

Rasio yang rendah ini menunjukkan perlunya peningkatan kinerja fiskal daerah, khususnya dalam menggali potensi pendapatan asli daerah secara lebih optimal dan berkelanjutan. Upaya seperti digitalisasi sistem pajak, penguatan regulasi pajak daerah,

serta edukasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi penting agar rasio pajak terhadap PDRB dapat ditingkatkan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Peningkatan rasio ini juga penting untuk mendukung kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.



Gambar 2.1.3.5-2 Grafik Total Kredit/PDRB (%) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2.1.3.5-2, Rasio Total Kredit terhadap PDRB di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 25,64%, meningkat menjadi 26,79% pada 2021, lalu mengalami sedikit penurunan menjadi 26,57% pada 2022. Namun, penurunan yang lebih signifikan terjadi pada 2023 dan 2024, dengan capaian masing-masing sebesar 25,04% dan 23,87%.

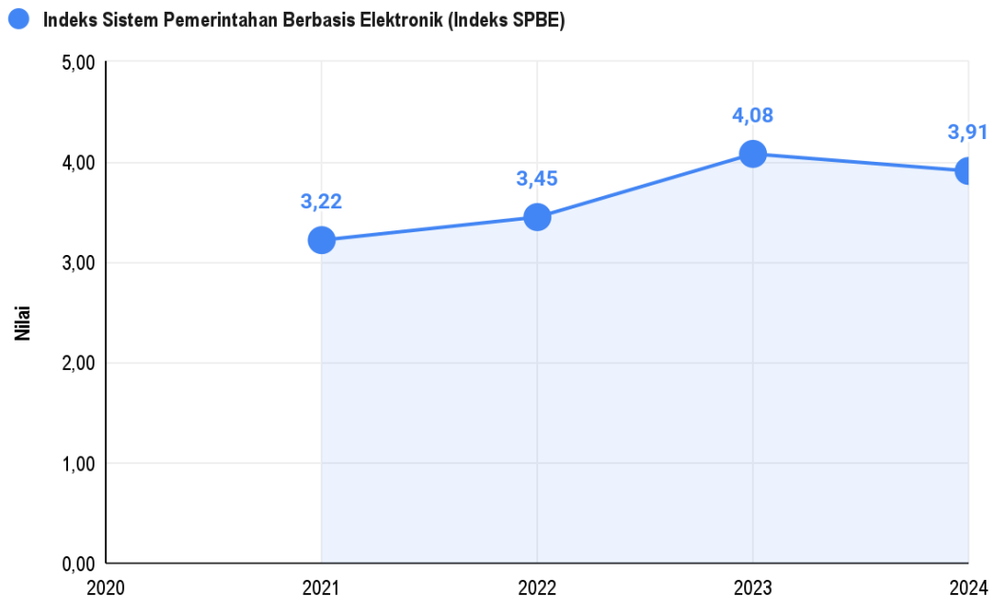
Penurunan rasio Total Kredit terhadap PDRB ini dapat diinterpretasikan sebagai sinyal melemahnya fungsi intermediasi keuangan di tingkat lokal, baik akibat perlambatan permintaan kredit dari dunia usaha maupun pengetatan kebijakan penyaluran kredit oleh perbankan. Selain itu, pertumbuhan PDRB yang tidak diimbangi oleh peningkatan signifikan dalam volume kredit juga turut berkontribusi terhadap penurunan rasio ini.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memperkuat konektivitas antara sektor keuangan dan sektor riil. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM, penguatan literasi keuangan masyarakat, serta pengembangan ekosistem ekonomi lokal yang berbasis potensi unggulan daerah. Dengan demikian, sektor keuangan dapat berkontribusi lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

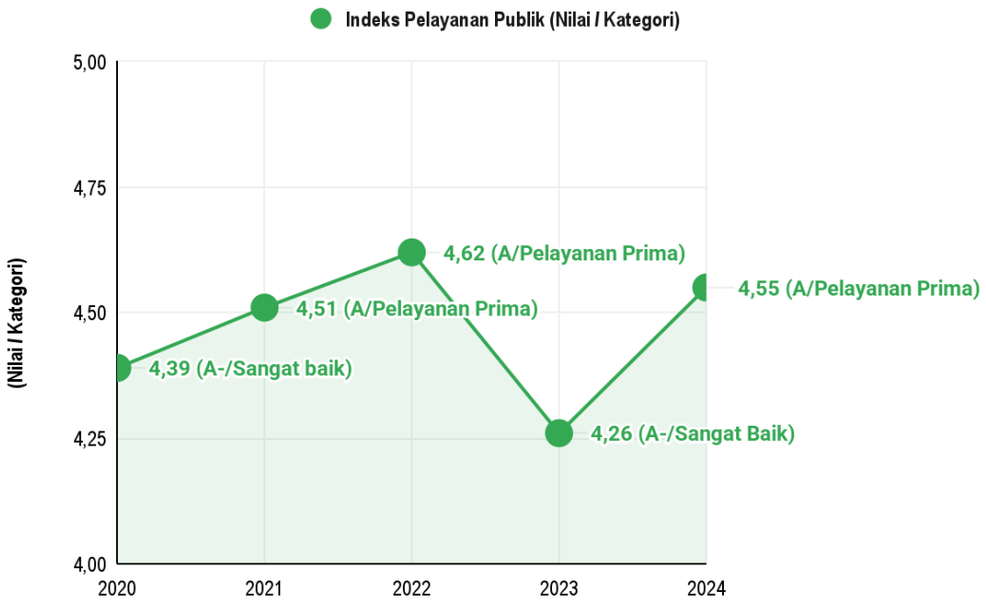
Regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap kerangka hukum, keterbukaan informasi publik, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Untuk mengukur kondisi dan kemajuan tata kelola tersebut, digunakan sejumlah indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Indeks Pelayanan Publik. Subbab ini menguraikan kondisi aktual dan capaian Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024 dalam mewujudkan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.



Gambar 2.1.4.1-1 Grafik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, 2025

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan konsisten dari tahun 2020 (2,91) hingga mencapai puncaknya pada 2023 (4,08), mencerminkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi tata kelola pemerintahan. Namun, penurunan skor pada 2024 menjadi 3,91 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kinerja, yang dapat disebabkan oleh transisi kebijakan, perubahan struktur kelembagaan, atau kendala teknis. Hal ini menandakan pentingnya penguatan tata kelola digital yang berkelanjutan, termasuk evaluasi rutin, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi sistem yang lebih solid.



Gambar 2.1.4.1-2 Grafik Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

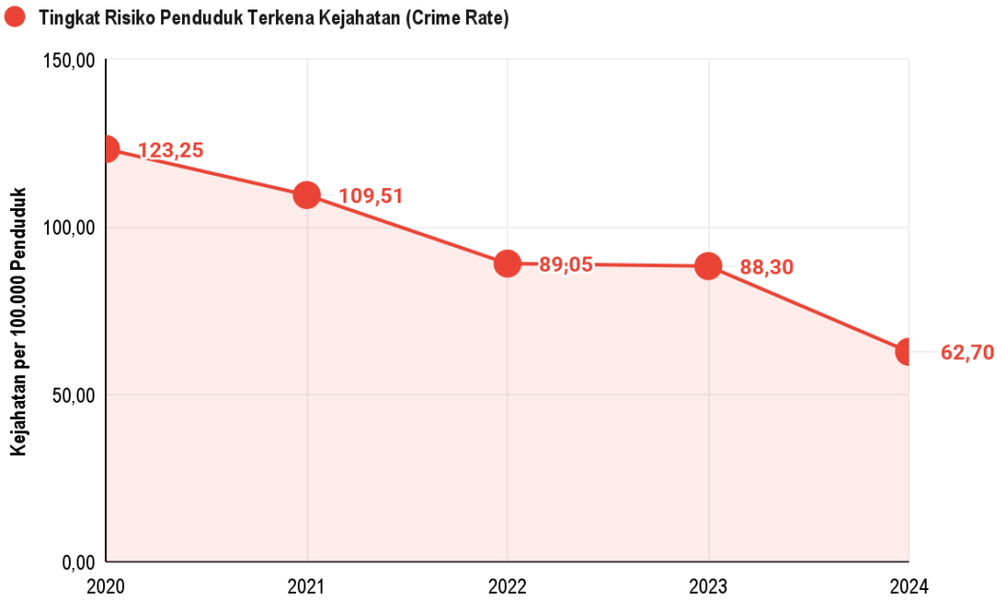
Sumber: Bagian Organisasi, Setda Kabupaten Kulon Progo, 2025

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kulon Progo menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan stabil selama periode 2020-2024, dengan skor berkisar antara 4,26 hingga 4,62. Peningkatan bertahap dari tahun 2020 (4,39) hingga 2022 (4,62) mencerminkan perbaikan kualitas layanan publik, namun sempat menurun pada 2023 (4,26) sebelum kembali meningkat pada 2024 (4,55). Fluktuasi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi dalam menjaga konsistensi mutu layanan, khususnya melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi prosedur layanan, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis umpan balik masyarakat. Pendekatan partisipatif dan inovatif juga menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan publik.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan hukum dan demokrasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, dan mengedepankan keadilan. Supremasi hukum yang berkeadilan diarahkan untuk menciptakan kepastian dan kemanfaatan hukum yang mampu melindungi seluruh warga negara. Di sisi lain, pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang tidak hanya prosedural, tetapi juga mencerminkan partisipasi rakyat secara nyata dan bermakna. Selain itu, penguatan keamanan nasional menjadi elemen krusial dalam menjamin stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat.

Pada Indikator Persentase Penegakan Perda Kabupaten Kulon Progo menunjukkan konsistensi penuh selama periode 2020 hingga 2024, dengan capaian 100% setiap tahunnya. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan regulasi daerah serta kapasitas kelembagaan yang kuat dalam menegakkan aturan.



Gambar 2.1.4.2-1 Grafik Perkembangan Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan *(Crime Rate)* di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

Perkembangan indikator Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate) di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan, dihitung berdasarkan jumlah tindak kejahatan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2020, angka tersebut tercatat sebesar 123,25, kemudian menurun menjadi 109,51 pada tahun 2021. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dengan angka masing-masing sebesar 89,05 dan 88,30. Capaian terbaik terjadi pada tahun 2024, ketika tingkat risiko penduduk terkena kejahatan berhasil ditekan hingga mencapai 62,70.

Tren penurunan ini mencerminkan perbaikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, serta menunjukkan efektivitas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan menjamin rasa aman bagi seluruh warga. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo percaya, bahwa konsistensi kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan tren positif ini.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan daerah merupakan elemen strategis dalam memperkuat posisi dan daya saing wilayah dalam konteks nasional maupun regional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ketangguhan ini tercermin melalui kemampuan daerah dalam memperjuangkan kepentingan strategis, membangun kemitraan yang konstruktif lintas wilayah, serta meningkatkan daya saing daerah dalam berbagai bidang pembangunan. Selain itu, kapasitas pertahanan kawasan juga menyiratkan kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan ketahanan wilayah dari berbagai tantangan. Untuk menilai dimensi ini, digunakan indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah serta indikator lainnya yang relevan dengan konteks kewenangan dan urusan pemerintahan daerah.

Meskipun data Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kulon Progo belum tersedia untuk tahun 2020 dan 2021, tren dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan

yang positif, dari 3,23 (2022) menjadi 3,48 (2023), dan mencapai 3,73 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek-aspek pendukung daya saing seperti infrastruktur, kelembagaan, dan kapasitas ekonomi daerah. Namun demikian, ketiadaan data di awal periode menjadi catatan penting dalam konsistensi pengukuran dan pemantauan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem data dan integrasi kebijakan lintas sektor agar strategi peningkatan daya saing daerah dapat lebih terukur, adaptif, dan berkelanjutan.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.4.4.A Pendidikan

Kinerja fokus Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 tercermin dari capaian sejumlah indikator partisipasi pendidikan formal dan kesetaraan. Gambaran lengkap atas tren capaian Indikator Kinerja Kunci ini disajikan dalam Tabel 2.1.4.4.A-1. Secara umum, indikator tersebut menunjukkan komitmen daerah dalam memperluas akses dan inklusivitas pendidikan dasar dan menengah, serta mendukung pengurangan angka putus sekolah melalui layanan pendidikan kesetaraan.

Pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), partisipasi warga usia 5–6 tahun berada pada kisaran yang relatif tinggi, meskipun menunjukkan gejala fluktuasi. Setelah mencapai 97,87 persen pada tahun 2023, angka partisipasi menurun menjadi 90,38 persen di tahun 2024. Demikian pula, partisipasi pendidikan dasar untuk usia 7–12 tahun mengalami tren penurunan, dari 98,29 persen di tahun 2022 menjadi 95,76 persen pada tahun 2024. Penurunan ini diduga berkaitan dengan dinamika pasca pandemi yang memengaruhi kestabilan sosial ekonomi rumah tangga, keterbatasan sarana-prasarana di beberapa wilayah, serta tantangan dalam mempertahankan kesinambungan kehadiran anak di sekolah, terutama bagi keluarga rentan dan wilayah terpencil.

Sebaliknya, tingkat partisipasi pendidikan pada kelompok usia 13–15 tahun tetap stabil dalam rentang 94–96 persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan mempertahankan transisi dari jenjang pendidikan dasar ke menengah pertama, yang relatif tidak terpengaruh oleh gejolak penurunan pada jenjang sebelumnya.

Perkembangan paling menonjol tampak pada indikator partisipasi pendidikan kesetaraan bagi warga usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Dari capaian awal 2,03 persen di tahun 2020, indikator ini meningkat tajam hingga mencapai 88,92 persen pada tahun 2024. Peningkatan signifikan ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya ijazah pendidikan formal sebagai prasyarat utama dalam dunia kerja. Selain itu, model pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang terintegrasi dengan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi turut meningkatkan minat dan partisipasi, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda yang sempat terputus dari jalur pendidikan reguler.

Secara keseluruhan, capaian indikator pendidikan menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo telah menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dengan cukup baik, meskipun terdapat penurunan partisipasi pada usia dini dan dasar yang perlu ditindaklanjuti dengan intervensi berbasis wilayah dan keluarga. Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi mencakup penguatan mutu pendidikan PAUD dan dasar, perbaikan pemerataan layanan pendidikan di wilayah perdesaan, serta konsistensi penguatan pendidikan kesetaraan yang berbasis keterampilan dan kebutuhan lokal.

Tabel 2.1.4.4.A-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PENDIDIKAN											
	1.a.1	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD**		%	**97,05**	**97,08**	**92,98**	**97,87**	**90,38**		
			Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD			*5.649,00*	*10.409,00*	*11.023,00*	*10.132,00*	*Disdikpora*	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan			*5.819,00*	*11.195,00*	*11.263,00*	*11.211,00*	*Disdukcapil*	
	1.a.2	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**		%	**97,04**	**97,05**	**98,29**	**95,69**	**95,76**		
			Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar			*30.050,00*	*35.719,00*	*34.897,00*	*34.227,00*	*Disdikpora*	
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan			*30.962,00*	*36.339,00*	*36.470,00*	*35.742,00*	*Disdukcapil*	
	1.a.3	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama**		%	**94,81**	**94,87**	**94,24**	**94,29**	**95,80**		
			Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama			*12.363,00*	*18.640,00*	*18.867,00*	*18.884,00*	*Disdikpora*	
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan			*13.032,00*	*19.779,00*	*20.010,00*	*19.711,00*	*Disdukcapil*	
	1.a.4	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**		%	**2,03**	**70,94**	**77,39**	**77,93**	**88,92**		

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan			*918,00*	*746,00*	*678,00*	*1.075,00*	*Disdikpora*	
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan			*1.294,00*	*964,00*	*870,00*	*1.209,00*	*Disdikpora*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.B Kesehatan

Kinerja fokus Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan pada berbagai indikator layanan kesehatan dasar dan rujukan. Capaian ini mencerminkan penguatan sistem pelayanan kesehatan dalam menjangkau kelompok prioritas, memperluas cakupan skrining, serta menjaga mutu layanan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Gambaran komprehensif atas capaian kinerja tersebut disajikan dalam Tabel 2.1.4.4.B-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci fokus Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020–2024.

Evaluasi terhadap indikator yang ditampilkan dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, dan anak usia pendidikan dasar mengalami peningkatan, terutama setelah tahun 2022. Hal ini mencerminkan dampak positif dari penguatan layanan primer serta sinergi antarpemangku kepentingan di tingkat puskesmas, rumah sakit, dan komunitas.

Dalam hal layanan rumah sakit rujukan, rasio daya tampung tempat tidur mencapai 1,58 per 1.000 penduduk pada tahun 2024, ditopang oleh peningkatan kapasitas dan akreditasi rumah sakit. Sejak 2022, seluruh rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten telah terakreditasi, yang menjadi indikator penting dalam menjamin mutu dan keselamatan pelayanan.

Pada dimensi pelayanan individu, terjadi peningkatan signifikan cakupan skrining kesehatan, termasuk bagi penderita hipertensi dan diabetes melitus, serta kelompok usia produktif (15–59 tahun) dan lanjut usia (≥60 tahun). Meski demikian, penurunan tajam cakupan skrining usia produktif pada tahun 2024 menjadi perhatian, yang memerlukan langkah korektif dan penguatan program promotif dan preventif.

Sementara itu, cakupan layanan bagi ODGJ berat, penderita TBC, dan kelompok risiko HIV menunjukkan tren positif dan konsisten, dengan capaian di atas 90% pada tahun terakhir. Peningkatan ini menandakan efektivitas pelaksanaan program berbasis keluarga, serta dukungan jejaring layanan kesehatan jiwa dan penyakit menular.

Berdasarkan SKI 2023, persentase remaja putri anemia di Kabupaten Kulon Progo merupakan yang tertinggi di DIY dengan 43,67%. Secara jangka panjang, anemia pada remaja putri akan menimbulkan risiko bayi yang dilahirkan mengalami berat dan panjang rendah dan berisiko *stunting*. Strategi jangka menengah yang dilakukan antara lain:

Kampanye Aksi Bergizi bagi Anak Sekolah;

1. Menggiatkan Minum tablet tambah darah (TTD) bagi anak sekolah;
2. Menerbitkan MoU antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kemenag, tentang TTD bagi remaja di sekolah SMP, SMA, dan sederajat;
3. Memantau Remaja putri minum TTD melalui aplikasi Mobscreen

Data Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kulon Progo cenderung mengalami peningkatan stabil, namun pertumbuhannya cenderung kecil dan sudah dilewati oleh Kota Yogyakarta. AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kesehatan, kesejahteraan, serta sumber daya manusia, Pemkab Kulon Progo mengupayakan untuk akselerasi peningkatan AHH dengan cara:

1. Memperluas cakupan jaminan kesehatan
2. Penurunan angka stunting dengan perbaikan kualitas gizi
3. Penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Secara umum, capaian fokus pelayanan Kesehatan menunjukkan arah perbaikan yang signifikan. Tantangan yang masih perlu mendapat perhatian meliputi peningkatan jangkauan layanan, pemulihan cakupan skrining usia produktif, serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan agar mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Tabel 2.1.4.4.B-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
KESEHATAN											
	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		per 1.000 penduduk	1,52	0,15	1,56	1,53	1,58		
			Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota			*680,00*	*692,00*	*684,00*	*704,00*	*Diskes*	
			Jumlah penduduk di kabupaten/kota			*442.874,00*	*443.591,00*	*446.192,00*	*444.994,00*	*Disdukcapil*	
	1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		%	33,33	42,86	100,00	100,00	100,00		
			Jumlah RS rujukan yang terakreditasi			*6,00*	*15,00*	*15,00*	*16,00*	*Diskes*	
			Jumlah RS di kabupaten/kota			*14,00*	*15,00*	*15,00*	*16,00*	*Diskes*	
	1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		%	95,76	91,27	87,95	98,20	91,29		
			Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan			*4.400,00*	*3.947,00*	*3.881,00*	*3.353,00*	*Diskes*	
			Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota			*4.821,00*	*4.488,00*	*3.952,00*	*3.673,00*	*Diskes*	
	1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		%	99,73	92,61	89,80	99,62	99,85		
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan			*4.475,00*	*4.030,00*	*3.937,00*	*3.406,00*	*Diskes*	
			Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota			*4.832,00*	*4.488,00*	*3.952,00*	*3.411,00*	*Diskes*	
	1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		%	85,26	82,17	85,41	95,25	98,71		
			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			*3.875,00*	*3.833,00*	*3.891,00*	*3.374,00*	*Diskes*	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
			Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota			*4.716,00*	*4.488,00*	*4.085,00*	*3.418,00*	*Diskes*	
	1.b.6	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar**		**%**	**60,16**	**63,85**	**93,15**	**96,43**	**94,96**		
			Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			*18.369,00*	*18.211,00*	*19.194,00*	*19.291,00*	*Diskes*	
			Jumlah balita di kabupaten/kota			*28.767,00*	*19.550,00*	*19.904,00*	*20.314,00*	*Diskes*	
	1.b.7	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**%**	**57,87**	**51,70**	**89,41**	**90,03**	**92,79**		
			Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			*27.517,00*	*29.003,00*	*47.643,00*	*51.454,00*	*Diskes*	
			Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota			*53.229,00*	*32.438,00*	*52.918,00*	*55.453,00*	*Diskes*	
	1.b.8	**Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**%**	**84,09**	**91,82**	**97,17**	**96,31**	**26,77**		
			Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			*40.126,00*	*50.190,00*	*66.964,00*	*73.939,00*	*Diskes*	
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota			*43.702,00*	*51.650,00*	*69.531,00*	*276.215,00*	*Disdukcapil*	
	1.b.9	**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**		**%**	**32,24**	**54,06**	**94,42**	**93,67**	**71,28**		
			Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			*36.682,00*	*38.713,00*	*50.049,00*	*60.928,00*	*Diskes*	
			Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota			*67.857,00*	*41.000,00*	*53.429,00*	*85.475,00*	*Disdukcapil*	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
	1.b.10	**Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**%**	**13,16**	**21,09**	**93,61**	**99,58**	**94,73**		
			Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			*4.771,00*	*4.496,00*	*10.447,00*	*12.946,00*	*Diskes*	
			Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota			*22.624,00*	*4.803,00*	*10.491,00*	*13.666,00*	*Diskes*	
	1.b.11	**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**		**%**	**31,63**	**43,84**	**96,23**	**99,49**	**98,07**		
			Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			*2.489,00*	*2.425,00*	*3.934,00*	*4.870,00*	*Diskes*	
			Jumlah penderita DM di kabupaten/kota			*5.678,00*	*2.520,00*	*3.954,00*	*4.966,00*	*Diskes*	
	1.b.12	**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**		**%**	**76,23**	**76,30**	**87,99**	**90,27**	**93,54**		
			Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			*1.207,00*	*1.253,00*	*1.410,00*	*1.418,00*	*Diskes*	
			Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota			*1.582,00*	*1.424,00*	*1.562,00*	*1.516,00*	*Diskes*	
	1.b.13	**Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar**		**%**	**42,00**	**72,93**	**88,94**	**85,33**	**93,30**		
			Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			*3.251,00*	*2.935,00*	*4.078,00*	*4.318,00*	*Diskes*	
			Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota			*4.458,00*	*3.300,00*	*4.779,00*	*4.628,00*	*Diskes*	
	1.b.14	**Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**		**%**	**43,32**	**53,69**	**99,85**	**93,75**	**94,39**		

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			*3.620,00*	*4.040,00*	*4.877,00*	*5.671,00*	*Diskes*	
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota			*6.743,00*	*4.046,00*	*5.202,00*	*6.008,00*	*Diskes*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

Selain capaian indikator kinerja kunci, salah satu aspek penting dalam pemantauan pembangunan kesehatan adalah pengendalian penyakit menular, khususnya kejadian yang dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemantauan KLB menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi potensi wabah dan menentukan langkah penanggulangan secara cepat dan tepat.

Kejadian Luar Biasa (KLB) merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Sementara itu, wabah diartikan sebagai berjangkitnya penyakit menular pada masyarakat dengan jumlah penderita yang meningkat secara nyata, melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta berpotensi menimbulkan dampak luas.

Jenis penyakit menular yang berpotensi menimbulkan KLB/wabah di Indonesia telah diatur dalam Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ketentuan tersebut menjadi acuan nasional bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan langkah antisipasi.

Tabel 2.1.4.4.B-2 Rekapitulasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2020-2024

JENIS KLB	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH KASUS PER KLB
Keracunan Makanan	27	30	156	339	352	904
Parotitis	-	-	-	-	333	333
Malaria	-	-	59	5	4	68
Diare	-	-	-	63	-	63
Chikungunya (suspect)	-	46	-	-	-	46
Varicella	-	-	-	-	38	38
Chikungunya	-	33	-	-	-	33
Leptospirosis	-	-	-	26	-	26
Pertussis	-	-	-	11	5	16
Muntaber/diare	-	-	-	11	-	11
Suspek difteri	1	-	-	-	-	1
TOTAL KLB	***28***	***109***	***215***	***455***	***732***	***1539***

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.1.4.4.B-2 Rekapitulasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2020–2024, kasus keracunan makanan merupakan yang paling banyak terjadi selama periode tersebut, dengan total 904 kasus. Jumlah kasus ini mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2022 yang tercatat 156 kasus, kemudian naik menjadi 352 kasus pada tahun 2024. Selain itu, lonjakan juga terjadi pada kejadian Parotitis (gondongan), di mana pada tahun 2020–2023 tidak tercatat adanya kasus, namun pada tahun 2024 terdata sebanyak 333 kasus. Lebih lanjut, Kejadian Luar Biasa juga disajikan secara lengkap untuk setiap bulan dalam kurun waktu 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.B-3.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kesehatan beserta jejaringnya telah merumuskan skenario pencegahan dan penanggulangan KLB/wabah yang memuat tahapan deteksi dini, respon cepat, koordinasi lintas sektor, hingga pemulihan pasca-kejadian. Rincian skenario tersebut disajikan secara

lengkap pada Tabel 2.1.4.4.B-4 Skenario Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo bersama dengan Jejaring.

Wabah lain yang berpotensi terjadi yaitu Leptospirosis di mana di DIY sudah terjadi 282 kasus hingga pertengahan Juli 2025. Permasalahan leptospirosis menjadi akar masalah kesehatan lingkungan yang menjadi salah satu komponen dari indikator Usia Harapan Hidup. Edukasi PHBS oleh Dinas Kesehatan dilaksanakan dengan kampanye PHBS dan kesehatan lingkungan. Pemkab Kulon Progo mengantisipasi potensi wabah leptospirosis dengan beberapa upaya pengendalian, yaitu:

1. Gerakan pengendalian tikus kerjasama dengan POPT pertanian
2. Penyelidikan epidemiologi kasus leptospirosis
3. Penyuluhan leptospirosis ke kelompok risiko
4. Skrining leptospirosis ke kelompok tani.

Tabel 2.1.4.4.B-3 Rincian Kejadian Luar Biasa (KLB) Perbulan Selama Tahun 2020-2024

NO.	TAHUN	BULAN	JENIS KLB	PUSKESMAS	KALURAHAN / KELURAHAN	JUMLAH KASUS
1	2020	Januari	Suspek difteri	Kokap 2	Hargowilis	1
2	2020	November	Keracunan Makanan	Sentolo 1	Sukoreno	7
3	2020	November	Keracunan Makanan	Nanggulan	Banyuroto	5
4	2020	Desember	Keracunan Makanan	Temon 2	Karangwuluh	15
1	2021	Februari	Keracunan Makanan	Temon I	Kulur	10
2	2021	Maret	Keracunan Makanan	Kokap II	Hargotirto	7
3	2021	Mei	Keracunan Makanan	Temon II	Jangkaran	2
4	2021	Desember	Keracunan Makanan	Lendah II	Gulurejo	2
5	2021	Desember	Keracunan Makanan	Temon II	Sindutan (Temon II)	6
6	2021	Desember	Chikungunya *(suspect)*	Temon I	Temon Wetan	46
7	2021	Desember	Chikungunya	Sentolo I	Sentolo	33
8	2021	Desember	Keracunan Makanan	Sentolo I	Sentolo	3
1	2022	Januari	Keracunan Makanan	Kokap II	Hargotirto	2
2	2022	April	Keracunan Makanan	Kokap I	Hargorejo	45
3	2022	Mei	Malaria	Samigaluh II	Gerbosari dan Ngargosari	56
4	2022	Juli	Keracunan Makanan	Galur II	Kranggan	28
5	2022	Oktober	Keracunan Makanan	Girimulyo II	Purwosari	81
6	2022	Oktober	Malaria	Samigaluh II	Banjarsari	1
7	2022	November	Malaria	Kokap I	Kalirejo	2
1	2023	Januari	Malaria	Samigaluh II	Pagerharjo	1
2	2023	Februari	Keracunan makanan	Pengasih I	Sidomulyo	34
3	2023	Februari	Malaria	Kokap II	Hargotirto	2
4	2023	Maret	Muntaber/diare	Lendah I	Jatirejo	11

NO.	TAHUN	BULAN	JENIS KLB	PUSKESMAS	KALURAHAN / KELURAHAN	JUMLAH KASUS
5	2023	Maret	Keracunan makanan	Samigaluh I	Sidoharjo	6
6	2023	April	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	4
7	2023	Mei	Keracunan makanan	Sentolo I	Sukoreno	54
8	2023	Juni	Diare	Sentolo II	Tuksono	40
9	2023	Juli	Leptospirosis	Nanggulan, Girimulyo I	Pendoworejo, Giripurwo, Tanjungharjo, Donomulyo, Wijimulyo, Jatisarono, Kembang	26
10	2023	Juli	Diare	Wates	Triharjo	23
11	2023	Juli	Pertussis	Wates	Bendungan	1
12	2023	September	Keracunan makanan	Wates	Terbah	49
13	2023	Oktober	Pertussis	Girimulyo I	Pendoworejo	4
14	2023	Oktober	Keracunan makanan	Kokap II	Hargotirto	3
15	2023	Oktober	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
16	2023	November	Keracunan makanan	Samigaluh I	Ngargosari	23
15	2023	Oktober	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
16	2023	November	Keracunan makanan	Samigaluh I	Jatimulyo	
17	2023	November	Keracunan makanan	Lendah II	Jatimulyo	
18	2023	November	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	76
19	2023	November	Keracunan makanan	Girimulyo II	Jatimulyo	5
20	2023	November	Keracunan makanan	Sentolo I	Kaliagung	7
21	2023	Desember	Keracunan makanan	Nanggulan	Wijimulyo	62
22	2023	Desember	Keracunan makanan	Kokap I	Hargorejo	16
23	2023	Desember	Pertussis	Pengasih I	Sendangsari	6
1	2024	Februari	Pertussis	Wates	Triharjo	5
2	2024	Februari	Keracunan Makanan	Wates	SDN 2 Wates	34
3	2024	Februari	Malaria	Samigaluh II	Banjarsari	3

NO.	TAHUN	BULAN	JENIS KLB	PUSKESMAS	KALURAHAN / KELURAHAN	JUMLAH KASUS
4	2024	Maret	Keracunan Makanan	Wates	Giripeni	116
5	2024	April	Malaria	Kokap II	Hargotirto	1
6	2024	April	Keracunan Makanan	Lendah II	Ngentakrejo	41
7	2024	April	Keracunan Makanan	Nanggulan	Banyuroto	12
8	2024	Mei	Keracunan Makanan	Temon II	Puskesmas	20
9	2024	Mei	Keracunan Makanan	Wates	Triharjo	2
10	2024	Juli	Keracunan Makanan	Samigaluh I	Ngargosari	24
11	2024	Agustus	Keracunan Makanan	Girimulyo II	Purwosari	3
12	2024	Agustus	Parotitis	Temon II	Jangkaran	196
13	2024	Agustus	Keracunan Makanan	Wates	Triharjo	26
14	2024	September	Keracunan Makanan	Kalibawang	Banjarharjo	50
15	2024	September	Varicella	Wates	SDN Karangwuni	22
16	2024	September	Parotitis	Nanggulan	SDN Jatisarono	24
17	2024	Oktober	Keracunan Makanan	Sentolo II	Tuksono	4
18	2024	Oktober	Keracunan Makanan	Kokap I	Hargorejo	4
19	2024	Oktober	Varicella	Nanggulan	SDN Lengkong	6
20	2024	Oktober	Parotitis	Samigaluh I	SDN Samigaluh	28
21	2024	November	Keracunan Makanan	Galur I	SD Muh Wonopeti 2	10
22	2024	November	Parotitis	Nanggulan	SMP N 2 Nanggulan	9
23	2024	November	Keracunan Makanan	Panjatan I	Gotakan	3
24	2024	November	Keracunan Makanan	Sentolo I	Kaliagung	3
25	2024	November	Parotitis	Kokap I	SMP N 2 Kokap	63
26	2024	November	Parotitis	Temon I	Kulur	13
27	2024	Desember	Varicella	Sentolo I	TK Bantar i	10

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, Tahun 2024

Tabel 2.1.4.4.B-4 Skenario Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Bersama dengan Jejaring.

BENTUK MITIGASI	NO.	TAHAPAN MITIGASI	PENJELASAN
Upaya Pencegahan	1	Surveilans pengamatan penyakit/Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	pelaporan melalui Event Based Surveillance (EBS) 1x24 jam dan pelaporan melalui Indicator Based Surveillance (IBS) mingguan dengan target kinerja ketepatan dan kelengkapan laporan
	2	Kajian Tim Epidemiologi Kabupaten dan Puskesmas	Kajian dilakukan setiap selasa dari hasil analisis trend kasus mingguan untuk pengamatan peningkatan kasus
	3	Peringatan dini/respon alert	respon pada alert/sinyal peningkatan kasus yang muncul dengan tindak lanjut investigasi
	4	Vaksinasi/imunisasi	Upaya pencegahan penularan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
	5	Promosi kesehatan/penyuluhan	upaya promosi kesehatan untuk pencegahan penularan kasus
	6	Analisis/pemetaan risiko	pemetaan risiko dilakukan pada potensi risiko terjadinya KLB, untuk penyakit infeksi emerging dilakukan secara rutin setahun sekali dengan dokumen pemetaan dan rekomendasi
	7	Pendidikan dan pelatihan	upaya peningkatan kompetensi baik pada petugas maupun pada kelompok yang memiliki risiko kejadian KLB seperti pelatihan TGC, pelatihan pada penjamah makanan, pelatihan one health, pelatihan penyusunan rancangan simulasi KLB, dll
	8	Penyusunan dokumen rencana kontijensi	Kulon Progo memiliki dokumen rencana kontijensi untuk SARS Cov yang disusun bersama lintas sektor pada tahun 2022. Termasuk berkontribusi pada penyusunan rencana kontijensi dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta sebagai upaya pencegahan penyakit menular di pintu masuk negara
	9	Penyelidikan epidemiologi	melakukan investigasi dan penyelidikan kasus penyakit potensial KLB di wilayah
	10	Pengorganisasian dan kerjasama lintas sektor lintas program	koordinasi dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan KLB, seperti : Tikorda Zoonosis dan PIB Kabupaten Kulon Progo, Tim Gerak Cepat baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan, dll
	11	Pemantauan faktor risiko dan lingkungan	pemantauan faktor risiko seperti upaya pemantauan pada tempat pengolahan makanan,

BENTUK MITIGASI	NO.	TAHAPAN MITIGASI	PENJELASAN
			pengendalian vektor (nyamuk, tikus, dll), peningkatan sanitasi lingkungan
Upaya Penanggulangan	1	Penyelidikan epidemiologi	melakukan investigasi dan penyelidikan kasus penyakit potensial KLB di wilayah
	2	Tatalaksana kasus maupun pemberian profilaksis	koordinasi dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan KLB, seperti: Tikorda Zoonosis dan PIB Kabupaten Kulon Progo, Tim Gerak Cepat baik di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan, dll
	3	Pengambilan spesimen dan pemeriksaan laboratorium	Pengambilan spesimen/sampel untuk dikirim ke laboratorium rujukan sebagai upaya penegakan diagnosa dan kepastian dugaan penyebab kejadian KLB
	4	Pengkajian cepat hasil investigasi	Melakukan kajian cepat pada hasil investigasi dan pengamatan faktor risiko di wilayah sebagai upaya untuk pengambilan kebijakan penanganan dan pengendalian penyakit
	5	Kajian Tim Epidemiologi Kabupaten dan Puskesmas	Kajian dilakukan setiap selasa dari hasil analisis trend kasus mingguan untuk pengamatan peningkatan kasus
	6	Promosi kesehatan (komunikasi risiko)	Upaya komunikasi risiko dan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penularan penyakit
	7	Koordinasi lintas sektor dan lintas program	Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program untuk melakukan reaksi cepat dalam penanggulangan penyakit
	8	Pengendalian vektor	Upaya pembasmian dan pemusnahan vektor yang diduga sebagai sumber penularan penyakit
	9	Karantina/isolasi	Melakukan karantina/isolasi pada pasien untuk meminimalkan potensi penularan penyakit
	10	Penanganan faktor risiko KLB	Melakukan penanganan dan meminimalkan faktor risiko kejadian KLB di wilayah
	11	Pemantauan kasus dan wilayah sampai KLB berakhir	Pemantauan pada pasien, kontak erat maupun potensi risiko di wilayah sampai periode KLB berakhir

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, Tahun 2024

2.1.4.4.C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja fokus Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian indikator yang beragam, mencerminkan kompleksitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di tingkat daerah. Gambaran lengkap mengenai realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.C-1.

Secara umum, indikator terkait pengendalian risiko bencana banjir dan abrasi pantai di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota tidak menunjukkan perkembangan berarti, dengan capaian rasio infrastruktur pengendali banjir maupun pengaman pantai yang stagnan di angka 0% sejak tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki wilayah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten, sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali secara administratif berada di luar kewenangan langsung pemerintah daerah.

Sementara itu, tingkat layanan irigasi menunjukkan capaian yang sangat stabil dan optimal, dengan rasio layanan terhadap daerah irigasi mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut. Ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan fungsi layanan jaringan irigasi pada seluruh cakupan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

Kinerja penyediaan air minum bagi rumah tangga terus mengalami peningkatan, dari 93,12% pada tahun 2020 menjadi 97,75% pada tahun 2024. Hal ini menandakan upaya intensif untuk memperluas akses terhadap layanan dasar yang layak dan aman. Demikian pula, persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tercatat cukup tinggi dan stabil, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024. Penurunan ini perlu dicermati dalam konteks pengelolaan infrastruktur limbah yang lebih berkelanjutan.

Dari sisi penataan bangunan, rasio kepatuhan terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menunjukkan konsistensi yang tinggi, yakni 100% selama lima tahun terakhir, menunjukkan tata kelola perizinan yang cukup tertib.

Tingkat kemantapan jalan kabupaten meningkat secara bertahap dari 69,14% pada tahun 2020 menjadi 74,29% pada tahun 2024, menggambarkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan. Namun demikian, pada indikator rasio tenaga kerja konstruksi bersertifikat, terjadi fluktuasi capaian dari 52,16% di tahun 2020, mencapai puncaknya pada 2021 sebesar 68,43%, lalu kembali turun hingga 51,19% pada 2024. Fenomena ini mengindikasikan perlunya penguatan pelatihan dan sertifikasi tenaga teknis konstruksi secara berkelanjutan.

Terakhir, indikator keselamatan konstruksi menunjukkan performa optimal, dengan seluruh proyek yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah tidak mengalami kecelakaan konstruksi selama lima tahun terakhir. Ini mencerminkan pelaksanaan prinsip keselamatan kerja yang baik di lingkungan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi daerah.

Secara keseluruhan, kinerja fokus Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kulon Progo menunjukkan capaian yang relatif stabil dan positif pada sejumlah indikator strategis, khususnya dalam layanan dasar seperti irigasi, akses air minum, pengolahan air limbah domestik, kemantapan jalan, serta kepatuhan terhadap perizinan bangunan. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek pengendalian

kawasan rawan bencana dan peningkatan kompetensi tenaga konstruksi. Kondisi inimenunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan pembaruan strategi teknis serta kelembagaan untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur dan penataan ruang yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan ke depan.

Tabel 2.1.4.4.C-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	1.c.1	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota**			**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**		**Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan kabupaten**
			Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)			*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*DPUPKP*	
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*DPUPKP*	
	1.c.2	**Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota**			**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**		**Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan kabupaten**
			Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)			*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*DPUPKP*	
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*DPUPKP*	
	1.c.3	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
			Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasi dan pelihara (ha)			*1.928,00*	*1.961,00*	*1.961,00*	*1.975,00*	*DPUPKP*	
			luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota			*1.928,00*	*1.961,00*	*1.961,00*	*1.975,00*	*DPUPKP*	
	1.c.4	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**		**%**	**93,12**	**93,98**	**94,25**	**96,52**	**97,75**		
			jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota			*143.632,00*	*145.780,00*	*151.319,00*	*153.303,00*	*DPUPKP*	
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut			*152.833,00*	*154.674,00*	*156.775,00*	*156.824,00*	*DPUPKP*	
	1.c.5	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**		**%**	**97,17**	**98,47**	**99,96**	**100,00**	**98,86**		
			jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD			*119.217,00*	*154.608,00*	*156.775,00*	*120.530,00*	*DPUPKP*	
			Jumlah rumah di kabupaten/ kota			*121.070,00*	*154.674,00*	*156.775,00*	*121.921,00*	*DPUPKP*	
	1.c.6	**Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
			Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya			*70.574,00*	*71.202,00*	*71.429,00*	*71.578,00*	*DPUPKP*	
			Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku			*70.574,00*	*71.202,00*	*71.429,00*	*71.578,00*	*DPUPKP*	
	1.c.7	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota**		**%**	**69,14**	**72,01**	**72,70**	**73,40**	**74,29**		
			Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap			*942.309,00*	*951,37*	*960.482,00*	*972.232,00*	*DPUPKP*	
			Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota			*1.308.645,00*	*1.308,65*	*1.308.645,00*	*1.308.645,00*	*DPUPKP*	
	1.c.8.1	**Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**		**%**	**52,16**	**68,43**	**66,22**	**66,05**	**51,19**		
			Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis			*739,00*	*690,00*	*852,00*	*172,00*	*DPUPKP*	
			Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kabupaten/kota			*1.080,00*	*1.042,00*	*1.290,00*	*336,00*	*DPUPKP*	
	1.c.8.2	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			*216,00*	*239,00*	*150,00*	*86,00*	*DPUPKP*	
			jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			*216,00*	*239,00*	*150,00*	*86,00*	*DPUPKP*	

Tabel 2.1.4.4.C-2 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020–2024

NO.	JENIS RENCANA TATA RUANG	PERSENTASE KESESUAIAN TATA RUANG PADA TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Struktur Ruang	86,38	87,00	87,22	87,33	87,36
2	Pola Ruang	89,67	89,58	89,88	89,78	89,86
3	Rata-rata Struktur Ruang dan Pola Ruang	88,03	88,29	88,55	88,56	88,61

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

Selanjutnya, kinerja fokus Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga tercermin melalui capaian kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.C-2, persentase kesesuaian tata ruang pada aspek struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren yang relatif meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kesesuaian struktur ruang tercatat sebesar 86,38 persen dan meningkat menjadi 87,36 persen pada tahun 2024. Demikian pula, pola ruang menunjukkan capaian yang tinggi dan stabil, dari 89,67 persen pada tahun 2020 menjadi 89,86 persen pada tahun 2024. Secara rata-rata, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap struktur dan pola ruang meningkat dari 88,03 persen pada awal periode menjadi 88,61 persen pada akhir periode.

Namun demikian, Persentase Kawasan yang tidak sesuai pemanfaatan ruang pada tahun 2024 adalah sebesar 10,23 persen, sebagian besar ketidaksesuaiannya terjadi pada rencana pola ruang Kawasan Peruntukan Industri, dimana hingga tahun 2025 belum terwujud sesuai dengan rencana. Persentase ketidaksesuaian struktur ruang pada tahun 2024 adalah sebesar 12,63 persen. Pada dasarnya ketidaksesuaian yang ada bukan karena belum terwujud sama sekali, namun dari jumlah yang seharusnya diwujudkan masih terdapat beberapa kekurangan. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan sinkronisasi antara indikasi program yang ada pada RTRW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah)

Capaian yang ada merupakan hasil dari pelaksanaan sejumlah program prioritas di bidang penataan ruang. Pada struktur ruang, kesesuaian tertinggi tercapai melalui program perwujudan sistem pusat pelayanan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem prasarana lainnya. Sementara itu, program perwujudan sistem jaringan energi masih memerlukan penguatan agar lebih sejalan dengan arah struktur ruang. Di sisi pola ruang, capaian kesesuaian tertinggi terlihat pada program perwujudan kawasan pariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan, serta kawasan perikanan. Sebaliknya, kawasan perkebunan dan kawasan pertambangan menghadapi tantangan dalam mencapai kesesuaian secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian kesesuaian pemanfaatan ruang selama lima tahun terakhir mencerminkan konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dengan tetap menyisakan ruang untuk penguatan di sektor-sektor strategis. Hal ini menjadi catatan penting bagi kebijakan penataan ruang ke depan, khususnya dalam memperkuat integrasi perencanaan spasial dengan pengembangan wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang yang responsif terhadap dinamika pembangunan dan lingkungan hidup.

Tabel 2.1.4.4.C-3 Dokumen Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo

JENIS DOKUMEN	NO.	URAIAN DOKUMEN	JUMLAH DOKUMEN
RTRW			
	1	Revisi RTRW Kabupaten Kulon Progo	1
RDTR			
	2	Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta 2023-2043	1
	3	Perkotaan Wates 2024-2044	1
	4	Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur	1
	5	Kulon Progo Utara	1
	6	Kulon Progo Tengah	1
	7	Kulon Progo Selatan	1
TOTAL DOKUMEN			7

Dalam konteks kelembagaan dan regulasi, penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo juga menghadapi sejumlah dinamika kebijakan, khususnya sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan ini membawa perubahan signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya (PP Nomor 15 Tahun 2010), terutama dalam penataan hirarki dokumen rencana tata ruang dan penghapusan kewenangan perencanaan kawasan strategis kabupaten dalam dokumen RDTR. Sebagai akibatnya, pemerintah kabupaten perlu melakukan penyesuaian terhadap substansi, metodologi, dan cakupan wilayah dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang.

Secara normatif, penyelenggaraan penataan ruang meliputi enam aspek utama, yaitu: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, dan kelembagaan. Dari aspek perencanaan, Kabupaten Kulon Progo memiliki target penyusunan tujuh dokumen rencana tata ruang, terdiri dari satu dokumen RTRW dan enam dokumen RDTR. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.C-3, dokumen tersebut mencakup kawasan strategis seperti sekitar Bandara *New Yogyakarta International Airport*, Kawasan Otorita Pariwisata Borobudur, Perkotaan Wates, hingga wilayah-wilayah sub regional seperti Kulon Progo Utara, Tengah, dan Selatan.

Namun demikian, proses penyusunan dan penetapan dokumen tata ruang kerap mengalami hambatan, baik dari aspek koordinasi antar-tingkat pemerintahan, keterbatasan SDM perencana yang tersertifikasi, hingga kebutuhan harmonisasi dengan peta tematik nasional dan sistem OSS-RBA. Lamanya proses pengesahan RTRW dan RDTR berimplikasi pada tertundanya kepastian hukum dalam perizinan berbasis pemanfaatan ruang, serta potensi deviasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata ruang yang tertib, akuntabel, dan responsif terhadap arah pembangunan wilayah, dibutuhkan penguatan pada seluruh siklus penyelenggaraan penataan ruang, termasuk percepatan legalisasi dokumen RTRW dan RDTR, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta konsolidasi data spasial secara lintas sektor. Selain itu, penting pula memastikan integrasi antara dokumen tata ruang dan dokumen pembangunan daerah, sebagai prasyarat utama dalam menciptakan kesesuaian antara arah kebijakan spasial dan prioritas pembangunan tematik yang inklusif dan

berkelanjutan. Adapun progress penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 2.1.4.4.C-4.

Dalam rangka menyesuaikan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan regulasi terbaru sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan wilayah perencanaan RDTR di Kabupaten Kulon Progo. Penyesuaian ini tidak hanya berdampak pada nomenklatur dokumen, tetapi juga pada cakupan wilayah dan substansi perencanaan yang sebelumnya berbasis kewilayahan administratif kecil (kapanewon atau kawasan tematik), kini diintegrasikan menjadi kawasan subregional yang lebih komprehensif dan fungsional.

Sebagai langkah percepatan, maka yang semula direncanakan akan menyusun 16 dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten) kemudian melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan topografi dan karakteristik wilayah dirangkum menjadi 8 dokumen RDTR. Adapun perubahan penyusunan dokumen Rencana Rinci Tata Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.C-5.

Tabel 2.1.4.4.C-4 Capaian Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo

NO.	DOKUMEN RENCANA TATA RUANG	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	**RTRW**	- Reviu PK RTRW dan substansi RTRW menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021. - Proses Pra Loket Persetujuan Substansi.	- Klinik Pra Loket Persetujuan Substansi. - Verifikasi Lapangan terkait penyelesaian substansi Lahan Sawah yang Dilindungi sesuai Kepmen ATR/BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021. - Verifikasi Lapangan terkait penyelesaian Audit Tata Ruang (Indikasi Pelanggaran Tata Ruang di Kabupaten Kulon Progo).	- Klinik ke 5 dengan Kementerian ATR. - Penyesuaian substansi revisi RTRW terkait dengan KP2B dan harmonisasi substansi dengan RTRW DIY 2023–2043. - Proses perbaikan dokumen sebagai tindaklanjut dari hasil asistensi dengan Kementerian ATR.	- Finalisasi luasan KP2B pada substansi revisi RTRW. - Proses perbaikan dokumen revisi RTRW.	- Update Peta Dasar Kabupaten Kulon Progo. - Konfirmasi KLHS RTRW Kulon Progo ke Dinas Lingkungan Hidup DIY terkait KRP validasi KLHS di tahun 2018 dan KRP Pra Linsek. - Perbaikan berdasarkan hasil asistensi. - Target Rapat Linsek (Lintas Sektor).

NO.	DOKUMEN RENCANA TATA RUANG	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	**RDTR**	- Reviu substansi RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, RDTR Perkotaan Kokap dan Kalibawang menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021. - Rekomendasi BIG terbit atas peta dasar RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta.	- Proses penyiapan pra-validasi KLHS, pengajuan pleno rekomendasi BIG dan persetujuan substansi untuk reviu RDTR Perkotaan Wates. - Proses pengajuan validasi KLHS RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta dan persiapan pembahasan lintas sektor di Kemen ATR/BPN. - Proses penyusunan reviu RDTR Kawasan Sekitar BOP Borobudur beserta KLHS-nya (pendetailan delineasi khusus wilayah Kabupaten Kulon Progo).	- Penetapan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta 2023–2043 - Klinik ke-2 pra-loket RDTR Perkotaan Wates dengan Kementerian ATR dan proses tindaklanjut perbaikannya dan pemenuhan kelengkapan menuju proses persetujuan substansi. - Klinik ke-1 pra-loket RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dengan Kementerian ATR dan proses tindaklanjut perbaikannya dan pemenuhan kelengkapan menuju proses persetujuan substansi. - Proses penyusunan RDTR Kulon Progo Utara beserta KLHSnya.	- Penetapan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang RDTR Perkotaan Wates 2024–2044. - Proses lanjutan perbaikan dokumen RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur. - Penyusunan dokumen RDTR Kulon Progo Tengah beserta KLHSnya. - Penyusunan dokumen RDTR Kulon Progo Selatan beserta KLHSnya.	- Integrasi RDTR Perkotaan Wates kedalam Sistem OSS. - Fasub RDTR Kawasan Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur (Target Rapat Lintas Sektor). - Bimbingan Teknis RDTR Kulon Progo Tengah oleh Kementerian ATR. - Proses lanjutan perbaikan RDTR Kulon Progo Utara. - Proses lanjutan perbaikan RDTR Kulon Progo Selatan.

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

Tabel 2.1.4.4.C-5 Perubahan Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo

NO.	DOKUMEN RENCANA RINCI TATA RUANG		KETERANGAN
	SEMULA	MENJADI	
1	RDTR Perkotaan Wates	RDTR Perkotaan Wates	RDTR Perkotaan Wates ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2024
2	RDTR Perkotaan Kokap	RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta	Sebagian wilayah masuk dalam delineasi RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta. RDTR Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2023
3	RDTR Perkotaan Samigaluh	- RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur - RDTR Kulon Progo Utara	Sebagian wilayah masuk dalam delineasi RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dan sebagian lainnya masuk dalam delineasi RDTR Kulon Progo Utara
4	RDTR Dekso	RDTR Kulon Progo Utara	RDTR Kulon Progo Utara meliputi sebagian Kapanewon Kalibawang, sebagian Kapanewon Samigaluh dan Kapanewon Girimulyo
5	RDTR Kawasan Agropolitan Kalibawang		
6	RDTR Perkotaan Kalibawang		
7	RDTR Perkotaan Girimulyo		
8	RDTR Perkotaan Nanggulan	RDTR Kulon Progo Tengah	RDTR Kulon Progo Tengah meliputi sebagian Kapanewon Kokap, sebagian Kapanewon Pengasih dan Kapanewon Nanggulan
9	RDTR Kawasan Minapolitan Nanggulan		
10	RDTR Perkotaan Sentolo	RDTR Kulon Progo Selatan	Meliputi Sebagian Kapanewon Wates, Sebagian Kapanewon Sentolo, Kapanewon Lendah, Kapanewon Galur, dan Kapanewon Panjatan
11	RDTR Perkotaan Lendah		
12	RDTR Perkotaan Panjatan		
13	RDTR Perkotaan Galur		
14	RDTR Brosot		
16	RDTR Kawasan Strategis Sekitar Bandara internasional Yogyakarta	RDTR Kawasan Strategis Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta	Sudah Penetapan
17	RDTR Kawasan Sekitar BOP Borobudur	RDTR Sekitar Zona Otoritas Kawasan Pariwisata Borobudur	Sedang proses Fasub Kementerian ATR
18	RDTR Perkotaan Wates	RDTR Perkotaan Wates	Sudah Penetapan

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

Lebih lanjut, realisasi indikator kinerja program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 memberikan gambaran capaian yang beragam, sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.C-6. Secara umum, capaian tersebut mencerminkan kemajuan dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pengelolaan ruang wilayah, meskipun beberapa indikator menunjukkan dinamika yang perlu dicermati.

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami sedikit fluktuasi namun menunjukkan tren positif, meningkat dari 62,85% pada tahun 2020 menjadi 64,65% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pemeliharaan dan perbaikan sistem irigasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pertanian daerah.

Kemajuan signifikan terlihat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan capaian akses air minum layak meningkat dari 93,12% menjadi 97,75%. Ini menandakan keberhasilan intervensi daerah dalam memperluas cakupan pelayanan air bersih yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat.

Namun, tantangan masih terlihat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman meningkat drastis dari 1,42% pada tahun 2020 ke 9,84% pada 2021, namun kemudian stagnan dan sedikit menurun pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka terakhir sebesar 8,15% pada 2024. Fluktuasi ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan sanitasi dan pembiayaan infrastruktur air limbah yang lebih terarah.

Program Penataan Bangunan Gedung mencatat capaian yang relatif stagnan. Persentase gedung pemerintah dan bangunan lainnya dalam kondisi baik hanya mengalami peningkatan marginal dari 58,18% di tahun 2020 menjadi 58,73% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas fisik bangunan belum menjadi prioritas utama dalam kurun waktu evaluasi, atau masih terkendala oleh keterbatasan anggaran rehabilitasi.

Sebaliknya, Program Penyelenggaraan Jalan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Rasio penanganan jalan meningkat dari 2,45% pada tahun 2020 menjadi 7,77% pada tahun 2024, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemantapan infrastruktur jalan yang mendukung konektivitas antar wilayah dan efisiensi logistik lokal.

Di sektor jasa konstruksi, capaian Program Pengembangan Jasa Konstruksi sangat konsisten dan optimal. Layanan jasa konstruksi serta proporsi tenaga kerja konstruksi bersertifikat kompetensi (SKK) sama-sama menunjukkan capaian penuh sebesar 100% sejak tahun 2021 hingga 2024. Konsistensi ini menunjukkan sistem pembinaan dan sertifikasi SDM konstruksi telah berjalan baik dan perlu dipertahankan.

Dalam aspek penataan ruang, indikator persentase perencanaan penataan ruang mengalami peningkatan bertahap dari 50% pada tahun 2020 hingga mencapai 77,78% pada 2023, namun mengalami penurunan tajam menjadi 28,57% di tahun 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dinamika restrukturisasi wilayah RDTR dan perubahan kebijakan pasca diterbitkannya PP 21 Tahun 2021, yang berdampak pada kebutuhan adaptasi substansi dan metode penyusunan dokumen. Sebaliknya, indikator pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang menunjukkan capaian penuh 100% pada tahun 2024, mencerminkan konsistensi dalam pengendalian tata ruang di lapangan.

Secara keseluruhan, evaluasi atas indikator program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan kemajuan signifikan pada beberapa aspek strategis,

terutama dalam peningkatan akses air minum, pengendalian ruang, serta jasa konstruksi. Namun, masih diperlukan penguatan pada sektor sanitasi, perencanaan ruang yang adaptif, dan peningkatan kondisi bangunan publik guna mendorong pelayanan infrastruktur yang lebih merata, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan daerah ke depan.

Tabel 2.1.4.4.C-6 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	62,85	61,25	62,68	63,68	64,65
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian Akses Air Minum Layak	%	93,12	93,62	94,25	96,52	97,75
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	1,42	9,84	8,54	7,96	8,15
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Baik	%	58,18	58,26	58,66	58,70	58,73
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Penanganan Jalan	%	2,45	3,28	5,23	5,65	7,77
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Capaian Layanan Jasa Konstruksi	%		100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Kompetensi Kerja SKK	%		100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Perencanaan Penataan Ruang	%	50,00	55,56	66,67	77,78	28,57
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	%					100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

2.1.4.4.D Perumahan

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan perumahan di Kabupaten Kulon Progo pada kurun waktu 2020 hingga 2024 tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.D-1. Secara umum, upaya penyediaan dan peningkatan kualitas hunian layak menunjukkan arah yang positif, meskipun masih terdapat dinamika capaian antar tahun serta tantangan dalam pemenuhan hunian untuk kelompok rentan, seperti korban bencana dan warga terdampak relokasi.

Pada indikator terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, kinerja Kabupaten Kulon Progo tergolong konsisten. Setelah pada tahun 2020 tidak terdapat kegiatan penanganan (0%), tingkat realisasi mencapai 100% pada tahun 2021 hingga 2024. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan pasca bencana secara cepat dan proporsional terhadap jumlah unit yang direncanakan. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani dalam rentang 2021–2024 bersifat fluktuatif, tetapi seluruhnya dapat ditangani sesuai target per tahun.

Sementara itu, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi menunjukkan capaian tertinggi hanya pada tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 100% dengan masing-masing satu rumah tangga penerima layanan. Pada tahun 2023 dan 2024, tidak terdapat program relokasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak ada capaian yang dilaporkan. Hal ini menandakan bahwa indikator ini bersifat event-based dan bergantung pada adanya program pembangunan atau penataan kawasan yang menyebabkan relokasi penduduk.

Indikator pengurangan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare menunjukkan capaian yang juga relatif baik. Persentase kawasan kumuh yang berhasil ditangani mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2024, meskipun sempat menurun menjadi 89,33% pada tahun 2023. Capaian ini konsisten dengan data luas kawasan kumuh yang ditangani, yaitu 6,75 hektare dari total kawasan kumuh 6,75 hektare pada tahun-tahun tersebut.

Indikator lainnya yang juga menjadi perhatian adalah pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Persentase unit RTLH mengalami fluktuasi selama periode evaluasi, dari 6,03% pada tahun 2020 menjadi 5,17% pada tahun 2024. Secara umum, terdapat tren penurunan, meskipun pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan (5,6%). Hal ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi RTLH terus dilakukan secara bertahap, meskipun diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif untuk mencapai target pengurangan RTLH secara signifikan dan berkelanjutan.

Sementara itu, indikator terkait kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada kawasan perumahan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Persentase perumahan yang dilengkapi PSU mencapai 100% pada seluruh tahun evaluasi. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi PSU relatif fluktuatif karena bergantung pada proyek pembangunan perumahan yang berjalan di masing-masing tahun, namun seluruhnya menunjukkan bahwa pengembangan perumahan di Kulon Progo telah mengindahkan prinsip hunian layak dan berfungsi secara optimal dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, fokus layanan perumahan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kinerja yang solid dan adaptif. Pemerintah daerah mampu menjaga capaian yang tinggi pada aspek-aspek krusial seperti penanganan hunian pascabencana, pengurangan kawasan kumuh, dan penyediaan PSU. Namun demikian, tantangan dalam pengurangan RTLH secara signifikan dan keberlanjutan fasilitasi relokasi masih

memerlukan strategi lintas sektor dan sumber pendanaan yang lebih kuat. Ke depan, peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, pemanfaatan data spasial RTLH yang akurat, serta penguatan program berbasis komunitas menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kulon Progo.

Tabel 2.1.4.4.D-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perumahan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PERUMAHAN											
	1.d.1	**Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**		**%**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022			*1,00*	*6,00*	*3,00*	*3,00*	*DPUPKP*	
			jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021			*1,00*	*6,00*	*3,00*	*3,00*	*DPUPKP*	
	1.d.2	**Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota**		**unit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**		
			Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni			*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*DPUPKP*	*Pada tahun 2024 tidak terdapat relokasi rumah akibat program pemerintah*
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan			*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*DPUPKP*	
	1.d.3	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani**		**%**	**64,85**	**89,33**	**100,00**	**89,33**	**100,00**		
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)			*6,03*	*6,75*	*6,03*	*6,75*	*DPUPKP*	
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha			*6,75*	*6,75*	*6,75*	*6,75*	*DPUPKP*	
	1.d.4	**Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**		**Unit**	**6,03**	**5,65**	**4,70**	**5,60**	**5,17**		

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
			Jumlah unit rumah tidak layak huni			*6.840,00*	*5.701,00*	*6.818,00*	*6.299,00*	*DPUPKP*	
			Jumlah total unit rumah kabupaten/kota			*121.070,00*	*121.387,00*	*121.693,00*	*121.921,00*	*DPUPKP*	
	1.d.5	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU			*2.837,00*	*30,00*	*2.820,00*	*2.128,00*	*DPUPKP*	
			Jumlah unit rumah kabupaten/kota			*2.837,00*	*30,00*	*2.820,00*	*2.128,00*	*DPUPKP*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

Lebih lanjut, realisasi indikator kinerja program urusan perumahan dan kawasan permukiman selama periode 2020–2024 memberikan tambahan perspektif terhadap capaian pembangunan di sektor ini. Terdapat empat program utama yang menjadi perhatian evaluatif, yakni pengembangan perumahan, penanganan kawasan permukiman, peningkatan PSU, dan pembangunan jalan lingkungan.

Pada Program Pengembangan Perumahan, indikator persentase keterisian hunian menunjukkan kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir. Setelah mencapai 54,39% pada 2022, angka ini menurun menjadi 48,61% pada 2023 dan kembali turun menjadi 45,86% pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam mengisi unit-unit perumahan yang telah dibangun, yang umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian lokasi, keterbatasan aksesibilitas, atau belum optimalnya fasilitas pendukung kawasan. Penentuan target persentase keterisian hunian dilihat dari trend penghuni rusunawa Tambak dan Tuksono. Penghuni Rusunawa belum bisa optimal antara lain karena peminat pada lantai paling atas sangat rendah karena tidak ada fasilitas lift, kemudian juga faktor para penghuni yang menyukai hunian sewa tanpa ada paguyuban di dalamnya.

Indikator penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Program Kawasan Permukiman menunjukkan capaian yang fluktuatif, dengan persentase tertinggi sebesar 16,17% pada 2022, namun kemudian menurun menjadi 10,32% pada tahun 2024. Meski secara nominal angka ini mencerminkan intervensi yang signifikan, tren penurunan dalam dua tahun terakhir menunjukkan perlunya revitalisasi pendekatan—baik dalam bentuk penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan data RTLH berbasis spasial, maupun perluasan skema pembiayaan.

Sementara itu, capaian penanganan kawasan kumuh dalam Program Peningkatan PSU menunjukkan tren positif. Persentasenya meningkat dari 27,01% pada 2020 menjadi 54,98% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program-program peningkatan kualitas permukiman, khususnya di wilayah dengan karakteristik kawasan padat dan minim infrastruktur dasar. Hal ini juga memperkuat temuan sebelumnya terkait pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 hektare yang berhasil ditangani sepenuhnya pada tahun-tahun tertentu.

Namun, capaian pembangunan jalan lingkungan justru mengalami penurunan pada tahun terakhir. Setelah relatif stabil pada kisaran 39,80% hingga 40,31% pada periode 2021–2023, capaian tahun 2024 hanya sebesar 29,55%. Penanganan jalan lingkungan yang optimal menjadi penting karena turut menentukan aksesibilitas, kualitas lingkungan, dan kenyamanan hunian bagi warga di kawasan padat penduduk maupun perumahan baru.

Secara keseluruhan, evaluasi program urusan perumahan dan kawasan permukiman menunjukkan adanya kemajuan dalam penanganan kawasan kumuh dan penyediaan PSU, namun disertai tantangan dalam peningkatan keterisian hunian dan pengurangan RTLH secara konsisten. Ke depan, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara perencanaan spasial, penyediaan infrastruktur dasar, dan intervensi sosial-ekonomi, guna mewujudkan hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.

Tabel 2.1.4.4.D-2 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Keterisian Hunian	%		53,32	54,39	48,61	45,86
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%		6,30	16,17	10,57	10,32
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	27,01	48,93	49,41	52,14	54,98
	Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun	%		39,80	40,01	40,31	29,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

2.1.4.4.E Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi capaian indikator kinerja kunci untuk fokus layanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 memberikan gambaran mengenai kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, menjamin ketertiban, dan meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana. Gambaran lengkap realisasi capaian tersebut disajikan dalam Tabel 2.1.4.4.E-1.

Secara umum, capaian indikator pada urusan ini menunjukkan konsistensi yang cukup tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan penegakan regulasi daerah. Selama lima tahun terakhir, persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tercatat selalu mencapai 100%. Hal ini mencerminkan respons cepat dan tuntas terhadap laporan gangguan trantibum, meskipun terdapat penurunan signifikan dalam jumlah pengaduan yang ditangani, dari 695 kasus pada tahun 2021 menjadi hanya 14 kasus pada tahun 2024. Penurunan ini dapat ditafsirkan sebagai hasil positif dari menurunnya jumlah gangguan aktual di lapangan, namun juga perlu ditinjau lebih lanjut apakah terdapat perubahan mekanisme pelaporan atau kanal pengaduan yang memengaruhi statistik tersebut.

Indikator lain, yakni persentase perda dan perkada yang ditegakkan, juga menunjukkan capaian sempurna sebesar 100% setiap tahunnya. Meski jumlah regulasi yang memuat sanksi sedikit menurun dari 21 menjadi 18 dokumen pada tahun 2024, proporsi penegakan tetap terjaga. Hal ini menunjukkan efektivitas satuan penegak perda dalam menjalankan mandat hukum secara menyeluruh.

Dalam aspek perlindungan masyarakat terhadap bencana, indikator jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencapai lebih dari 87% pada 2024, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang mencapai angka 100%. Hal ini terjadi seiring penurunan jumlah warga yang dilayani secara langsung dari 354.369 jiwa pada 2023 menjadi 267.019 jiwa pada 2024, sementara target pelayanan meningkat. Demikian pula, capaian layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga mengalami penurunan persentase sejak tahun 2022. Setelah mencapai 64,90% di tahun tersebut, angka capaian menurun menjadi 55,12% pada 2024. Rendahnya rasio ini disebabkan oleh meningkatnya populasi yang tinggal di kawasan rawan bencana, yang tidak secara langsung sebanding dengan peningkatan cakupan layanan yang diberikan.

Sementara itu, indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menunjukkan capaian maksimal sebesar 100% sejak tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa seluruh warga terdampak bencana berhasil memperoleh layanan penyelamatan, baik melalui perangkat daerah maupun relawan. Tren yang sama juga terlihat dalam indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang tercatat mencapai 100% setiap tahunnya. Ini memperlihatkan koordinasi dan kecepatan layanan pemadam kebakaran Kabupaten Kulon Progo yang telah memenuhi standar waktu tanggap secara konsisten.

Meskipun demikian, waktu tanggap *(response time)* penanganan kebakaran selama periode evaluasi menunjukkan dinamika yang fluktuatif, dengan capaian tercepat pada tahun 2023 sebesar 10,36 menit dan meningkat kembali menjadi 11,27 menit pada tahun 2024. Walaupun seluruh kejadian kebakaran ditangani secara tuntas, penguatan kapasitas armada, distribusi pos pemadam, serta sistem deteksi dan pelaporan dini tetap menjadi prioritas untuk menjaga efisiensi waktu tanggap.

Secara keseluruhan, pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kinerja yang stabil dengan capaian indikator outcome yang dominan berada pada tingkat maksimal. Ke depan, dibutuhkan penguatan aspek preventif, adaptasi teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan respons kedaruratan, serta perluasan jejaring relawan dan kesiapsiagaan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan kualitas layanan dan peningkatan resiliensi wilayah terhadap gangguan dan risiko kebencanaan

Tabel 2.1.4.4.E-1 Indikator Kinerja Kunci Fokus Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
TRANTIBUMLINMAS											
	1.e.1	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah pengaduan yang ditangani			*695,00*	*613,00*	*370,00*	*14,00*	*Satpol PP*	
			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk			*695,00*	*613,00*	*370,00*	*14,00*	*Satpol PP*	
	1.e.2	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan			*21,00*	*21,00*	*21,00*	*18,00*	*Satpol PP*	
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi			*21,00*	*21,00*	*21,00*	*18,00*	*Satpol PP*	
	1.e.3	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**		**%**	**356.442,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**87,98**		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			*353.669,00*	*354.069,00*	*354.369,00*	*267.019,00*	*BPBD*	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan			*353.669,00*	*354.069,00*	*354.369,00*	*303.510,00*	*BPBD*	
	1.e.4	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**		**%**	**244.519,00**	**242.320,00**	**64,90**	**55,05**	**55,12**		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			*242.320,00*	*242.930,00*	*243.240,00*	*243.550,00*	*BPBD*	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			*0,00*	*374.297,00*	*441.874,00*	*441.874,00*	*BPBD*	*Pada tahun 2020 dan 2021 IKK ini hanya meminta data pembilang tanpa ada penyebut*
	1.e.5	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		**%**	**1.302,00**	**9.443,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			*9.443,00*	*5.303,00*	*11.199,00*	*9.377,00*	*BPBD*	
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana			*0,00*	*5.303,00*	*11.199,00*	*9.377,00*	*BPBD*	*Pada tahun 2020 dan 2021 IKK ini hny meminta data pembilang tanpa ada penyebut*
	1.e.6	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah			*36,00*	*39,00*	*118,00*	*104,00*	*BPBD*	
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota			*36,00*	*39,00*	*118,00*	*104,00*	*BPBD*	
	1.e.7	**Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran**	**Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran**		**9,30**	**12,17**	**10,87**	**10,36**	**11,27**	**BPBD**	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.F Sosial

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan sosial di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 memberikan gambaran konsistensi kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, serta korban bencana alam dan sosial. Gambaran lengkap atas capaian tersebut disajikan dalam Tabel 2.1.4.4.F-1.

Capaian indikator pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti mengalami tren positif dan stabil. Setelah berada pada angka 99,59% di tahun 2020, capaian meningkat menjadi 99,83% di tahun 2021 dan mencapai angka 100% selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan sosial minimal bagi kelompok rentan di luar lembaga/panti, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peningkatan ini juga selaras dengan akurasi pendataan dan efektivitas program intervensi lapangan. Meskipun terjadi fluktuasi pada jumlah absolut penerima manfaat, yaitu dari 9.997 jiwa di tahun 2021 menjadi 9.826 jiwa di tahun 2024, capaian 100% tetap tercapai karena seluruh populasi sasaran telah menerima layanan yang dibutuhkan.

Selanjutnya, capaian indikator terhadap korban bencana alam dan sosial juga menunjukkan tren sangat positif. Selama lima tahun berturut-turut, Kabupaten Kulon Progo mampu memastikan bahwa 100% korban bencana yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada masa tanggap darurat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Capaian ini diperoleh meskipun terjadi penurunan signifikan pada jumlah populasi yang terdampak, dari 1.798 jiwa di tahun 2021 menjadi 397 jiwa di tahun 2024. Penurunan jumlah korban dapat mencerminkan peningkatan mitigasi risiko dan penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, sekaligus menegaskan kesiapan logistik dan kelembagaan dalam menghadapi situasi darurat.

Konsistensi capaian 100% pada dua indikator utama ini menandakan keberhasilan pelaksanaan fungsi perlindungan sosial oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menjamin hak-hak dasar kelompok rentan dan korban bencana. Untuk memperkuat capaian tersebut ke depan, perlu ditingkatkan integrasi data sosial, sistem layanan berbasis digital, serta sinergi lintas sektor dan kemitraan masyarakat sipil guna memperluas jangkauan dan keberlanjutan intervensi sosial.

Tabel 2.1.4.4.F-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Sosial

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
SOSIAL											
	1.f.1	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)**		**%**	**99,59**	**99,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			*9.997,00*	*9.079,00*	*9.603,00*	*9.826,00*	*Dissos P3A*	
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis			*10.014,00*	*9.079,00*	*9.603,00*	*9.826,00*	*Dissos P3A*	
	1.f.2	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran			*1.798,00*	*1.096,00*	*327,00*	*397,00*	*Dissos P3A*	
			populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota			*1.798,00*	*1.096,00*	*327,00*	*397,00*	*Dissos P3A*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

Di samping capaian indikator kinerja, gambaran kebutuhan layanan sosial secara lebih mendalam dapat ditelaah melalui data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Data ini menggambarkan jumlah kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial dan potensi kelembagaan sosial yang tersedia untuk menjangkau mereka.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yaitu program perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial dilakukan melalui kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi kelompok PPKS. Sementara itu, pemberdayaan sosial difokuskan pada penguatan peran serta masyarakat melalui PSKS sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, pelaksanaan program kesejahteraan sosial masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan sosial, sumber daya manusia yang belum merata, sarana prasarana pendukung yang terbatas, serta kurang optimalnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Di sisi lain, berbagai permasalahan sosial yang muncul terutama yang berkaitan dengan keberadaan penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, orang terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, maupun korban bencana menuntut respons yang cepat dan terpadu.

Sebagai gambaran, total PPKS yang terdata di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 mencapai lebih dari 11.000 jiwa, dengan kelompok terbesar adalah penyandang disabilitas sebanyak 5.347 jiwa dan lanjut usia terlantar sebanyak 3.233 jiwa. Distribusi sebaran PPKS per kapanewon dapat dilihat secara lengkap dalam Tabel 2.1.4.4.F-2.

Sementara itu, keberadaan PSKS sebagai pelaksana pelayanan sosial berbasis masyarakat juga menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir. Elemen PSKS seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Organisasi Sosial, dan Karang Taruna menjadi pilar utama dalam menjangkau kelompok PPKS di berbagai wilayah. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 288 orang PSM, 128 personel Tagana, serta 30 kelompok Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo. Rincian data lengkap elemen PSKS dapat ditinjau pada Tabel 2.1.4.4.F-3.

Optimalisasi layanan kesejahteraan sosial ke depan memerlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial masyarakat, serta jejaring PSKS yang ada, termasuk melalui pelatihan, fasilitasi kelembagaan, dan pendanaan berkelanjutan.

Tabel 2.1.4.4.F-2 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seluruh Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

NO.	KAPANEWON	ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)	PENYANDANG DISABILITAS	ANAK BALITA TERLANTAR (ABT)	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN (ADK)	LANJUT USIA TERLANTAR	ANAK TERLANTAR	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS (KBSP)	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE)
1	**Temon**	3	365	14	24	294	101	11	99
2	**Wates**	25	431	8	32	350	96	49	141
3	**Panjatan**	5	513	6	25	224	83	68	167
4	**Galur**	3	455	15	18	301	112	83	181
5	**Lendah**	4	581	5	25	273	75	12	153
6	**Sentolo**	3	678	10	70	408	133	20	148
7	**Pengasih**	5	537	4	32	355	121	44	155
8	**Kokap**	7	460	10	19	426	124	19	63
9	**Girimulyo**	4	271	10	23	124	87	10	44
10	**Nanggulan**	2	433	4	32	152	130	30	74
11	**Samigaluh**	1	325	3	14	114	43	10	38
12	**Kalibawang**	11	298	4	19	212	97	53	61
-	**TOTAL**	**73**	**5.347**	**93**	**333**	**3.233**	**1.202**	**409**	**1.324**

Keterangan:

- Warna pada tabel disusun dalam *color scale* vertikal per jenis PPKS.
- Semakin kontras warna menunjukkan jumlah PPKS yang semakin tinggi pada tiap Kapanewon.

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kulon Progo, 2024

Tabel 2.1.4.4.F-3 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

NO.	ELEMEN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Karang Taruna	Kelompok	31	31	101	101	101
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	n/a	12	12	12	12
3	Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial	Unit	17	50	50	50	24
4	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	342	1111	211	293	288
5	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Orang	150	155	131	127	128
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Kelompok	30	30	32	32	30

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kulon Progo, 2024

2.1.4.4.G Ketenagakerjaan

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo sepanjang periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika pelaksanaan kebijakan tenaga kerja daerah dalam mendukung ketersediaan, kualitas, serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Gambaran lengkap capaian kinerja ini tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.G-1, yang menggambarkan hasil kerja pemerintah daerah dalam mengelola perencanaan tenaga kerja, penguatan kompetensi, produktivitas, penempatan tenaga kerja, serta penerapan norma kerja yang layak di tingkat perusahaan.

Capaian indikator "Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)" secara konsisten berada pada angka 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan ketenagakerjaan yang dilaksanakan telah dirancang dan dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan teknokratik tenaga kerja, mencerminkan kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.

Pada aspek peningkatan kualitas tenaga kerja, indikator "Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi" mengalami fluktuasi signifikan. Setelah mencapai 22,37% di tahun 2020, terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 (5,03%) dan 2022 (5,14%). Namun, lonjakan besar terlihat pada tahun 2023 sebesar 69,64%, meskipun kembali turun menjadi 48,23% pada 2024. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh dinamika program pelatihan dan sertifikasi, ketersediaan anggaran, serta perubahan cakupan data tenaga kerja secara keseluruhan.

Capaian indikator "Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja" juga memperlihatkan tren yang sangat bervariasi. Nilai produktivitas mengalami lonjakan signifikan pada 2021 dan 2024, yang dipengaruhi oleh perubahan perhitungan nilai PDRB dan jumlah angkatan kerja yang menjadi pembagi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan konsistensi dalam metodologi pengukuran produktivitas agar tren ini dapat lebih bermakna untuk pengambilan kebijakan.

Indikator "Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak" cenderung mengalami penurunan, dari 45,86% di tahun 2020 menjadi 35,12% di tahun 2024. Meski secara absolut jumlah perusahaan yang menerapkan praktik kerja layak meningkat, namun peningkatan jumlah perusahaan secara umum menyebabkan penurunan proporsi. Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam mendorong perluasan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, termasuk penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pembentukan LKS Bipartit, dan keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, indikator "Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja" menunjukkan capaian yang relatif stabil di atas 69%, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 84,86%. Hal ini menandakan efektivitas layanan antar kerja yang dikelola oleh pemerintah daerah, meskipun tetap diperlukan penguatan dalam hal peningkatan mutu informasi pasar kerja serta konektivitas dengan sektor industri.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja ketenagakerjaan menunjukkan adanya pencapaian yang baik pada aspek perencanaan dan layanan penempatan tenaga kerja. Namun, tantangan masih terdapat pada aspek kualitas tenaga kerja dan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan. Untuk itu, pada periode RPJMD 2025–2029, diperlukan upaya strategis dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan, termasuk melalui perluasan akses sertifikasi, peningkatan investasi SDM, serta kemitraan lebih erat dengan sektor swasta dan lembaga pelatihan kerja.

Tabel 2.1.4.4.G-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Ketenagakerjaan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
KETENAGAKERJAAN											
	2.a.1	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD			*5,00*	*5,00*	*6,00*	*6,00*	*Disnaker*	
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota			*5,00*	*5,00*	*6,00*	*6,00*	*Disnaker*	
	2.a.2	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**		**%**	**22,37**	**5,03**	**5,14**	**69,64**	**48,23**		
			Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi			*12.393,00*	*12.621,00*	*20.567,00*	*5.327,00*	*Disnaker*	
			Jumlah tenaga kerja keseluruhan			*246.572,00*	*245.440,00*	*29.532,00*	*11.044,00*	*Disnaker*	
	2.a.3	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**			**3,24**	**3.560.339.373,49**	**3.365,11**	**3.786,70**	**46.964.365,35**		
			PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)			*8.778.800.000.000,00*	*9.419.100,00*	*9.951.950,00*	*10.426.230.000.000,00*	*Disnaker*	
			Jumlah tenaga kerja			*246.572,00*	*279.905,00*	*262.813,00*	*222.003,00*	*Disnaker*	
	2.a.4	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)**		**%**	**45,86**	**13,31**	**40,94**	**38,00**	**35,12**		
			Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak			*43,00*	*52,00*	*57,00*	*59,00*	*Disnaker*	
			Jumlah perusahaan			*323,00*	*127,00*	*150,00*	*168,00*	*Disnaker*	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
	2.a.5	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**		**%**	**71,26**	**69,33**	**84,86**	**81,02**	**82,40**		
			Jumlah pencari kerja yang ditempatkan			*3.242,00*	*3.592,00*	*3.458,00*	*3.464,00*	*Disnaker*	
			Jumlah pencari kerja yang terdaftar			*4.676,00*	*4.233,00*	*4.268,00*	*4.204,00*	*Disnaker*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.H Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengarusutamaan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta respons terhadap kekerasan berbasis gender. Gambaran lengkap capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.H-1.

Capaian indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 1,98% pada tahun 2020 menjadi 6,44% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan penguatan komitmen kelembagaan dalam mendukung kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan. Meningkatnya proporsi ARG terhadap total belanja langsung menandakan bahwa semakin banyak program dan kegiatan pemerintah yang memperhatikan kebutuhan, akses, partisipasi, dan kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Indikator Persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait mencatat capaian yang sangat baik dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) dengan realisasi 100%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam memberikan layanan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan, termasuk aspek identifikasi kasus, perlindungan darurat, hingga rujukan layanan lanjutan. Meskipun secara absolut jumlah kasus yang ditangani relatif kecil, konsistensi dalam penanganan seluruh kasus yang tercatat menjadi indikator keberhasilan sistem perlindungan anak tingkat kabupaten.

Sementara itu, indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) menunjukkan tren yang meningkat dari 0,24 per 100.000 penduduk perempuan pada tahun 2020 menjadi 36,1 pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat dimaknai secara dualistik. Di satu sisi, hal ini bisa mencerminkan peningkatan kasus kekerasan yang sebenarnya, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi hasil dari perbaikan mekanisme pelaporan dan pendataan, serta meningkatnya keberanian korban untuk melapor. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk melalui edukasi masyarakat, layanan pengaduan yang mudah diakses, dan peningkatan kualitas SDM pelaksana layanan.

Secara umum, kinerja P3A di Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan arah yang positif, terutama dalam hal peningkatan alokasi anggaran responsif gender dan penanganan kasus anak korban kekerasan. Namun demikian, peningkatan rasio kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa tantangan struktural dan kultural masih perlu diatasi secara lebih sistemik. Pada periode RPJMD 2025–2029, penguatan sinergi antar perangkat daerah, pemanfaatan data terpilah, serta pelibatan komunitas dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor kunci untuk memastikan perlindungan yang lebih menyeluruh dan inklusif bagi perempuan dan anak.

Tabel 2.1.4.4.H-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	2.g.1	**Persentase ARG pada belanja langsung APBD**		**%**	**1,98**	**4,27**	**5,23**	**5,13**	**6,44**		
			Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD			*28.203.290.499,00*	*71.213.190.476,00*	*77.523.306.282,00*	*108.199.132.719,00*	*Dissos P3A*	
			Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD			*661.116.518.185,21*	*1.361.318.009.558,00*	*1.509.886.670.881,00*	*1.680.018.271.585,00*	*BKAD*	
	2.g.2	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota**		**%**	**0,09**	**0,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi			*81,00*	*62,00*	*43,00*	*45,00*	*Dissos P3A*	
			Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)			*112.809,00*	*62,00*	*43,00*	*45,00*	*Dissos P3A*	
	2.g.3	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**		**per 100.000 penduduk**	**0,24**	**14,32**	**12,06**	**18,67**	**36,10**		
			Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan			*32,00*	*27,00*	*42,00*	*43,00*	*Dissos P3A*	
			Jumlah penduduk perempuan			*223.527,00*	*223.815,00*	*224.943,00*	*119.103,00*	*Disdukcapil*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.I Pangan

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan pangan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 memberikan potret dinamika upaya pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan cadangan pangan strategis, khususnya beras dan jagung. Gambaran lengkap terhadap capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.I-1.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan ini adalah Persentase ketersediaan pangan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah cadangan pangan aktual dan kebutuhan cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan. Selama tiga tahun pertama (2020–2022), capaian indikator ini berada dalam posisi surplus yang signifikan, yakni di atas 200%—dengan puncak capaian pada tahun 2020 sebesar 360,35%. Hal ini menunjukkan adanya ketahanan stok pangan yang kuat, baik dari sisi perencanaan maupun realisasi pengadaan cadangan pangan di tingkat daerah.

Namun demikian, mulai tahun 2023 terjadi penurunan relatif, dan pada tahun 2024 capaian indikator ini mengalami penurunan tajam menjadi hanya 34,78%, jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya. Penurunan drastis ini tidak sepenuhnya mencerminkan lemahnya kinerja penyediaan pangan, tetapi lebih disebabkan oleh perubahan metodologi perhitungan. Mulai tahun 2024, penghitungan indikator ini dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merujuk pada Instruksi Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2018, sebagaimana tertuang dalam pembaruan pedoman umum pengisian LPPD. Perubahan tersebut berdampak langsung pada besaran angka yang dicatat, baik dari sisi jumlah cadangan pangan aktual (yang turun menjadi 32,92 ton) maupun target kebutuhan cadangan (menurun menjadi 94,65 ton).

Secara umum, meskipun tren data tampak menurun di akhir periode, hal ini lebih merupakan refleksi dari penyesuaian teknis pengukuran daripada penurunan nyata dalam kapasitas ketersediaan pangan daerah. Oleh karena itu, interpretasi kinerja perlu mempertimbangkan konteks metodologis dan regulatif yang melatarbelakangi perubahan data. Ke depan, penguatan ketahanan pangan daerah perlu difokuskan pada peningkatan akurasi perencanaan, integrasi sistem logistik pangan lokal, serta penyesuaian regulasi yang adaptif terhadap dinamika produksi dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi krisis pangan akibat bencana alam maupun gangguan rantai pasok global.

Tabel 2.1.4.4.I-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pangan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PANGAN											
	2.h.1	**Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)**		**%**	**360,35**	**251,42**	**226,79**	**226,13**	**34,78**		
			Jumlah cadangan pangan			*77.642,14*	*82.280,85*	*82.562,68*	*32,92*	*Dispertapang*	*Penurunan angka yang signifikan pada tahun 2024 tersebut dikarenakan adanya perubahan Pedoman Umum yang mengubah cara penghitungan menggunakan dokumen perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah mendasar Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2018,*
			Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan			*30.881,81*	*36.280,25*	*36.511,89*	*94,65*	*Dispertapang*	*Penurunan angka yang signifikan pada tahun 2024 tersebut dikarenakan adanya perubahan Pedoman Umum yang mengubah cara penghitungan menggunakan dokumen perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah mendasar Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2018,*

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.J Pertanahan

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan pertanahan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan capaian maksimal di sebagian besar indikator. Gambaran lengkap capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.J-1.

Indikator Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi secara umum menunjukkan tingkat kepatuhan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tinggi. Selama empat dari lima tahun terakhir, capaian indikator ini berada pada tingkat 100%, dengan sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 97,77%, sebelum kembali mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas mekanisme perizinan dan pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan lahan sesuai dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Capaian Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum secara konsisten berada pada tingkat 100% sepanjang periode evaluasi, yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan dasar prasarana publik melalui penetapan legalitas tanah secara tepat waktu dan sesuai rencana. Kondisi serupa juga terjadi pada indikator Tersedianya tanah untuk masyarakat, yang secara teknis mengukur keterpenuhan izin membuka tanah, dan terus menunjukkan nilai capaian 100% dalam lima tahun terakhir, termasuk pada tahun 2024 dengan luasan sesuai izin sebesar 1.037 meter persegi.

Sementara itu, indikator Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal menunjukkan capaian tinggi di semua tahun, meskipun pada 2023 sempat menurun menjadi 94,34% sebelum kembali ke 100% pada 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dinamika realisasi kegiatan investasi dan tingkat utilisasi lahan yang sedikit lebih rendah dari total izin yang diterbitkan.

Untuk indikator Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan, capaian bervariasi. Tahun 2020 dan 2024 menunjukkan nilai nol, yang menandakan tidak tersedianya objek landreform dari tanah kelebihan maksimum maupun tanah absentee untuk didistribusikan. Sebaliknya, capaian 100% pada 2021 hingga 2023 menunjukkan kesiapan dan implementasi program reforma agraria pada tahun-tahun tersebut.

Adapun indikator Penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi memperlihatkan capaian maksimal 100% secara konsisten selama lima tahun. Hal ini menunjukkan kemampuan institusi daerah dalam menyelesaikan konflik agraria melalui pendekatan non-litigasi yang efektif dan responsif terhadap pengaduan masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja fokus layanan pertanahan di Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020–2024 menampilkan stabilitas capaian dan kapasitas kelembagaan yang cukup baik, terutama dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang, penyediaan tanah untuk kepentingan publik, serta resolusi konflik agraria. Namun, ke depan, tantangan terhadap ketersediaan tanah reform dan kebutuhan akan transparansi tata ruang dalam mendukung investasi tetap memerlukan perhatian khusus melalui penguatan sistem informasi pertanahan dan integrasi data spasial lintas sektor.

Tabel 2.1.4.4.J-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pertanahan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PERTANAHAN											
	2.i.1	**Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan**		%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**97,77**	**100,00**		
			Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)			*1,00*	*1,00*	*397.279,00*	*112.860,00*	*Dispertaru*	
			Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)			*1,00*	*1,00*	*406.321,00*	*112.860,00*	*Dispertaru*	
	2.i.2	**Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum**		%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			*2.023,00*	*2.023,00*	*20.237,00*	*576,00*	*Dispertaru*	
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			*2.023,00*	*2.023,00*	*20.237,00*	*576,00*	*Dispertaru*	
	2.i.3	**Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal**		%	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**94,34**	**100,00**		
			Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)			*1,00*	*1,00*	*383.343,00*	*8.666,00*	*Dispertaru*	
			Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan			*1,00*	*1,00*	*406.321,00*	*8.666,00*	*Dispertaru*	

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
	2.i.4	**Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**		**%**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**		
			Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha			*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*Dispertaru*	
			Jumlah penerima tanah obyek landreform			*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*Dispertaru*	
	2.i.5	**Tersedianya tanah untuk masyarakat**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah			*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1.037,00*	*Dispertaru*	*Pada tahun 2024 tidak ada izin membuka tanah yang diterbitkan (terakhir yang memiliki kesesuaian adalah 1.037 pada tahun 2022)*
			luas izin membuka tanah yang diterbitkan			*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1.037,00*	*Dispertaru*	
	2.i.6	**Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani			*10,00*	*10,00*	*15,00*	*10,00*	*Dispertaru*	
			Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			*10,00*	*10,00*	*15,00*	*10,00*	*Dispertaru*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

Selanjutnya, realisasi indikator kinerja program urusan pertanahan pada kurun waktu 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.4.4.J-2. Realisasi indikator tersebut menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi pada dua dari tiga program utama, sementara satu program menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan meski masih belum mencapai capaian optimal.

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan mencatat capaian 100% secara konsisten setiap tahun pada indikator Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan, yang mengindikasikan responsivitas tinggi pemerintah daerah dalam menangani konflik kepemilikan atau penguasaan lahan, khususnya tanah garapan. Hal ini sejalan dengan capaian indikator outcome terkait penanganan sengketa tanah melalui mediasi yang juga menunjukkan hasil maksimal pada periode yang sama.

Capaian sempurna juga ditunjukkan oleh Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, melalui indikator Persentase tertib administrasi pemanfaatan tanah kalurahan, yang selalu berada pada angka 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini merefleksikan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjamin legalitas, administrasi, dan kejelasan status tanah kas desa yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Sementara itu, Program Penatagunaan Tanah, yang diukur melalui indikator Persentase tertib administrasi tanah Pemerintah Daerah, menunjukkan pola peningkatan yang progresif dari tahun ke tahun. Capaian awal sebesar 0,59% pada tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 74,23% pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan upaya yang sistematis dalam menata dan menertibkan administrasi aset tanah milik pemerintah daerah, meskipun capaian tersebut mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang, terutama dalam aspek validasi dokumen, pemutakhiran data spasial, dan penyelesaian legalitas aset.

Secara keseluruhan, capaian indikator program urusan pertanahan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek penyelesaian sengketa dan tata kelola tanah desa, serta kemajuan signifikan dalam penataan administrasi tanah pemda. Hal ini menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan tata kelola pertanahan ke depan, khususnya dalam mendukung pengendalian ruang, penguatan kepastian hukum hak atas tanah, dan akselerasi program reforma agraria di tingkat lokal.

Tabel 2.1.4.4.J-2 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan**	**%**	**(Jumlah Masalah Pertanahan yang difasilitasi Penyelesaiannya / Jumlah Masalah Pertanahan) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Jumlah Masalah Pertanahan yang difasilitasi Penyelesaiannya (masalah)	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
			Jumlah Masalah Pertanahan (masalah)	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan**	**%**	**(Pembayaran Sewa Tanah Kalurahan yang dilaksanakan / Jumlah Obyek Sewa Tanah Kalurahan yang dimanfaatkan Pemda) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			Pembayaran Sewa Tanah Kalurahan yang dilaksanakan (obyek sewa)	*401,00*	*398,00*	*398,00*	*388,00*	*396,00*
			Jumlah Obyek Sewa Tanah Kalurahan yang dimanfaatkan Pemda (obyek sewa)	*401,00*	*398,00*	*398,00*	*388,00*	*396,00*
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase Tertib Administrasi Tanah PEMDA**	**%**	**(Luas Tanah Pemda yang didaftarkan di BPN / Luas Tanah Pemda) x 100%**	**0,59**	**13,72**	**14,21**	**35,54**	**74,23**
			Luas Tanah Pemda yang didaftarkan di BPN (m2)	*239.923,00*	*673.657,00*	*697.861,00*	*1.745.348,00*	*3.645.969,00*
			Luas Tanah Pemda (m2)	*40.978.953,00*	*4.911.447,00*	*4.911.447,00*	*4.911.447,00*	*4.911.447,00*

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

Urusan pertanahan merupakan salah satu unsur keistimewaan yang membedakan Pemda DIY dengan provinsi yang lain, yaitu pada status kepemilikan tanahnya. Selain tanah milik masyarakat dan tanah negara, terdapat tiga status kepemilikan tanah lainnya yaitu tanah Kasultanan (Sultan Ground), tanah Kadipaten (Paku Alam Ground) dan tanah Kalurahan. Menurut Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah Keprabon dan tanah bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Sedangkan tanah Kadipaten adalah tanah hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan disebutkan bahwa Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari kasultanan dan/atau kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan Hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.J-3 Kondisi sebaran dan status kepastian hukum Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan sampai dengan tahun 2024.

Tanah Kasultanan banyak tersebar di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo, sedangkan tanah Kadipaten tersebar di wilayah selatan antara lain meliputi Kapanewon Temon, Wates, Panjatan dan Galur. Apabila dilihat berdasarkan status kepastian hukumnya, baik tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta Tanah Desa masih belum semua bidang tanah bersertifikat sampai dengan tahun 2024. Maka, dalam rangka menjamin kepastian hukum dari tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah Kalurahan, Pemerintah DIY melalui Dana Keistimewaan setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk percepatan pendaftaran atau pengurusan sertifikat tanah-tanah tersebut.

Tabel 2.1.4.4.J-3 Kondisi dan Sebaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

NO.	KAPANEWON	TANAH KASULTANAN (BIDANG)		TANAH KADIPATEN (BIDANG)		TANAH DESA (BIDANG)	
		SS	BS	SS	BS	SS	BS
1	Temon	-	-	55	39	490	40
2	Wates	-	-	88	42	233	30
3	Pengasih	114	267	-	-	454	56
4	Lendah	12	148	-	-	220	8
5	Nanggulan	76	52	-	-	368	39
6	Kokap	89	28	-	-	196	4
7	Kalibawang	230	188	-	-	320	64
8	Girimulyo	188	194	-	-	129	213
9	Samigaluh	20	163	-	-	229	24
10	Sentolo	116	63	-	-	404	25
11	Panjatan	-	-	40	79	228	17
12	Galur	-	-	65	371	329	12
-	Total	845	1103	248	531	3.600	532
		Tanah Kasultanan (Bidang)		Tanah Kadipaten (Bidang)		Tanah Desa (Bidang)	
		1.948		779		4.132	

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kab.Kulon Progo, Tahun 2025

2.1.4.4.K Lingkungan Hidup

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo pada kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan gambaran kinerja urusan ini sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.K-1. Secara umum, tren capaian menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian, terutama dalam hal penguatan kualitas lingkungan, pengelolaan sampah, serta pengawasan dan penegakan ketaatan terhadap regulasi lingkungan oleh pelaku usaha.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami tren penurunan dari nilai 69,01 pada tahun 2020 menjadi 65,46 pada tahun 2024. Meskipun fluktuatif, kecenderungan menurun ini mengindikasikan bahwa aspek pencemaran udara, kualitas air, dan tutupan lahan sebagai komponen penyusun indeks memerlukan penguatan intervensi. Penurunan IKLH dapat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, tekanan terhadap daya dukung lingkungan, dan terbatasnya infrastruktur pengendalian pencemaran.

Pada aspek pengelolaan sampah, capaian persentase sampah yang tertangani meningkat signifikan dari 2,78% pada tahun 2020 menjadi 46,27% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan kinerja dalam penyediaan layanan persampahan, baik melalui perluasan cakupan pelayanan, peningkatan fasilitas pengangkutan, maupun kolaborasi dengan komunitas dan sektor informal. Namun, dengan total timbunan sampah yang terus meningkat dari 62.879 ton pada tahun 2021 menjadi 80.033 ton pada tahun 2024, tantangan dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh masih besar dan memerlukan strategi lanjutan berbasis ekonomi sirkular dan pengurangan sampah dari sumbernya.

Indikator ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan juga menunjukkan fluktuasi signifikan. Setelah mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023, angka tersebut turun menjadi 37,33% pada tahun 2024. Hal ini diduga akibat meningkatnya jumlah inspeksi atau audit lingkungan yang dilakukan, dari 60 entitas pada 2023 menjadi 150 pada 2024, yang berdampak pada identifikasi lebih banyak pelanggaran. Meskipun demikian, capaian ini tetap menunjukkan perlunya penguatan sistem pemantauan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten dan preventif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja lingkungan hidup menunjukkan adanya kemajuan pada aspek pengelolaan sampah, namun dibarengi tantangan serius dalam penguatan kualitas lingkungan secara menyeluruh dan pengawasan kepatuhan usaha. Penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, optimalisasi teknologi pengelolaan lingkungan, serta pendekatan berbasis data dalam pengambilan kebijakan menjadi kunci untuk mendorong perbaikan IKLH dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel 2.1.4.4.K-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Lingkungan Hidup

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
LINGKUNGAN HIDUP											
	2.j.1	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**		**Nilai**	**69,01**	**68,69**	**66,01**	**67,50**	**65,46**	**DLH**	
	2.j.2	**Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota**		**%**	**2,78**	**43,43**	**45,26**	**46,24**	**46,27**	**DLH**	
			Total volume sampah yang dapat ditangani			*27.311,31*	*29.295,29*	*37.008,07*	*37.032,32*		
			Total volume timbunan sampah kabupaten/kota			*62.879,89*	*64.730,71*	*80.033,09*	*80.033,90*	*DLH*	
	2.j.3	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota**		**%**	**0,00**	**32,00**	**100,00**	**100,00**	**37,33**	**DLH**	
			Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota			*16,00*	*50,00*	*60,00*	*56,00*		
			usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan			*50,00*	*50,00*	*60,00*	*150,00*	*DLH*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

Sebagai kelanjutan dari capaian Indikator Kinerja Kunci, gambaran lengkap realisasi indikator kinerja program untuk urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.K-2. Tabel tersebut menyajikan hasil pelaksanaan berbagai program yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024.

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menunjukkan variasi tingkat tindak lanjut atas hasil pengawasan, dengan capaian tertinggi sebesar 100% pada tahun 2021 dan 2022, namun menurun menjadi 66,20% pada 2023 dan 50,00% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya perbaikan mekanisme pengawasan dan penegakan kepatuhan, termasuk peningkatan kapasitas pengawasan dan kejelasan sanksi administratif.

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, jumlah parameter uji laboratorium meningkat dari 9 pada 2022 menjadi 21 pada 2024. Tren ini mencerminkan upaya penguatan instrumen ilmiah dalam pengendalian kualitas lingkungan, yang diharapkan mampu memberikan dasar data yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup menunjukkan konsistensi dengan capaian 100% untuk penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup sejak tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menjadi indikator positif dalam penyediaan perangkat perencanaan berbasis lingkungan untuk memastikan kegiatan pembangunan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sementara itu, Program Pengelolaan Persampahan mencatat capaian proporsi cakupan layanan pengelolaan sampah sebesar 22,17% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan masih terbatasnya jangkauan layanan persampahan, terutama di wilayah-wilayah non-perkotaan, yang menuntut strategi perluasan layanan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) mencapai 28,30% dalam peningkatan konservasi lingkungan hidup pada tahun 2024. Ini mencerminkan awal dari integrasi konservasi dalam pembangunan wilayah, namun capaian tersebut masih memerlukan penguatan lebih lanjut, baik dalam perlindungan kawasan penting maupun rehabilitasi ekosistem.

Dalam hal kualitas ruang terbuka hijau, capaian indikator "Persentase Taman dalam Kondisi Baik" mengalami peningkatan signifikan, dari di bawah 1% pada 2020–2023 menjadi 73,47% pada 2024. Capaian ini menunjukkan adanya intervensi besar pada pengelolaan dan perawatan taman publik, yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup perkotaan dan mitigasi perubahan iklim.

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai merupakan salah satu upaya strategis dalam menjaga kualitas fungsi lingkungan secara optimal. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyediakan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayahnya. RTH tidak hanya berperan sebagai instrumen ekologis untuk mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan estetika, seperti ruang rekreasi, kenyamanan visual, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan data audit penataan ruang, RTH saat ini tercatat mencapai 47,83% dari total luas wilayah. Proporsi tersebut terdiri atas RTH publik sebesar 0,41% dan RTH privat

sebesar 47,42%. Komposisi ini menunjukkan bahwa dominasi RTH di Kulon Progo masih berada pada sektor privat, utamanya berupa kebun dan perkebunan milik masyarakat. Sementara itu, capaian RTH publik masih jauh dari ketentuan minimal, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas RTH publik. Pemerintah daerah terus mendorong penguatan penyediaan RTH publik melalui berbagai inisiatif, termasuk koordinasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang lebih inklusif, adaptif, dan berdaya guna dalam mendukung ekosistem lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Penanganan pengaduan lingkungan hidup tercapai 100% pada tahun 2024, menunjukkan responsivitas dan sistem penanganan pengaduan yang berjalan baik. Hal ini perlu dijaga dengan sistem pengaduan yang mudah diakses dan ditindaklanjuti secara transparan.

Terakhir, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup mencatat peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan dari 0,90% pada tahun 2021–2022 menjadi 76,54% pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan keberhasilan dalam mobilisasi partisipasi publik melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan program lingkungan hidup di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, capaian indikator program urusan lingkungan hidup menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan kinerja sangat baik, beberapa aspek masih memerlukan penguatan tata kelola, pendanaan, dan partisipasi multipihak untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan secara lebih merata dan inklusif.

Tabel 2.1.4.4.K-2 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALISASI TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi	%	67,27	100,00	100,00	66,20	50,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan	Parameter	n.a	n.a	9,00	13,00	21,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	%		100,00	100,00	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Proporsi Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	%					22,17
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup	%					28,30
	Persentase Taman Kondisi Baik	%	0,67	0,67	0,88	0,73	73,47
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%					100,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup	%		0,90	0,90	0,91	76,54

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

2.1.4.4.L Kependudukan dan Catatan Sipil

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian output layanan dasar administrasi kependudukan, sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.L-1. Indikator ini mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menjamin identitas hukum dan akses penduduk terhadap layanan publik melalui kepemilikan dokumen kependudukan.

Perekaman KTP Elektronik menunjukkan tren capaian yang relatif tinggi dan stabil di atas 97% selama lima tahun terakhir. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 99,46%, mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk wajib KTP telah direkam dan memiliki identitas kependudukan digital. Data penyusun indikator ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman secara konsisten dari 337.752 orang pada tahun 2021 menjadi 346.467 orang pada tahun 2024, meskipun fluktuasi pada jumlah wajib KTP menyebabkan sedikit variasi rasio tahunan.

Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0–17 tahun mengalami perkembangan cukup signifikan. Setelah mengalami lonjakan tajam pada 2022 hingga hampir 100%, capaian indikator ini sempat menurun menjadi 74,37% pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 81,71% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program KIA mulai terinstitusionalisasi, meskipun konsistensi distribusi dan kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan.

Kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0–18 tahun juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Nilainya sempat mengalami penurunan menjadi 93,80% pada 2023 namun kembali meningkat menjadi 99,48% pada tahun 2024. Data ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak sipil dasar bagi anak, melalui penyediaan layanan pencatatan kelahiran yang luas dan terjangkau, termasuk perluasan layanan melalui kemitraan dengan fasilitas kesehatan.

Sementara itu, indikator pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah masih menunjukkan capaian yang fluktuatif. Dari 42 perangkat daerah, hanya sekitar 14–27% yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sepanjang periode evaluasi. Capaian tertinggi sebesar 26,83% terjadi pada 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran antar Perangkat Daerah untuk mengakses dan menggunakan data kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Meski demikian, capaian ini menunjukkan bahwa integrasi data masih perlu ditingkatkan melalui literasi data, penguatan sistem, dan fasilitasi kerja sama lintas sektor.

Secara keseluruhan, kinerja fokus kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan kecenderungan membaik, terutama dalam cakupan perekaman identitas dan kepemilikan akta. Namun demikian, perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas layanan berbasis digital, percepatan penerbitan dokumen bagi kelompok rentan, serta perluasan pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh perangkat daerah secara sistemik dan kolaboratif.

Tabel 2.1.4.4.L-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Kependudukan dan Catatan Sipil

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL											
	2.k.1.1	**Perekaman KTP Elektronik**		**%**	**98,29**	**98,57**	**97,35**	**99,44**	**99,46**		
			Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman			*337.752,00*	*340.603,00*	*342.789,00*	*346.467,00*	*Disdukcapil*	
			Jumlah penduduk wajib KTP-el			*342.658,00*	*349.892,00*	*344.716,00*	*348.351,00*	*Disdukcapil*	
	2.k.1.2	**Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA**		**%**	**71,77**	**74,61**	**99,79**	**74,37**	**81,71**		
			Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA			*74.772,00*	*99.775,00*	*78.236,00*	*78.970,00*	*Disdukcapil*	
			Jumlah anak usia 0-17 tahun			*100.216,00*	*99.983,00*	*105.198,00*	*96.643,00*	*Disdukcapil*	
	2.k.1.3	**Kepemilikan akta kelahiran**		**%**	**97,25**	**98,17**	**99,99**	**93,80**	**99,48**		
			Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir			*110.743,00*	*105.897,00*	*104.313,00*	*102.524,00*	*Disdukcapil*	
			Jumlah anak usia 0-18 tahun			*112.809,00*	*105.909,00*	*111.208,00*	*103.062,00*	*Disdukcapil*	
	2.k.1.4	**Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**		**Perangkat daerah**	**21,43**	**26,19**	**14,29**	**21,43**	**26,83**		
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			*11,00*	*6,00*	*9,00*	*11,00*	*Disdukcapil*	
			Jumlah Perangkat Daerah			*42,00*	*42,00*	*42,00*	*41,00*	*Bag. Organisasi*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.M Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 memberikan gambaran atas dinamika status perkembangan desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM), serta efektivitas intervensi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Gambaran lengkap atas indikator ini tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.M-1.

Indikator persentase pengentasan desa tertinggal menunjukkan capaian yang fluktuatif dengan pola pelaporan yang terpengaruh oleh dinamika metodologi dan kesepakatan pengisian data e-LPPD. Sejak tahun 2020 sudah tidak terdapat desa tertinggal di Kabupaten Kulon Progo.

Sementara itu, indikator peningkatan status desa mandiri menunjukkan tren kinerja yang progresif dan konsisten. Pada tahun 2020, capaian awal sebesar 32,26% terus meningkat secara signifikan hingga mencapai capaian sempurna 100% pada tahun 2023 dan Pada tahun 2024 sudah tidak terdapat desa berkembang di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini menunjukkan transformasi pesat desa berkembang menjadi desa mandiri di Kulon Progo. Berdasarkan data penyusun, sebanyak 87 desa berkembang berhasil dikembangkan menjadi desa mandiri pada 2024, yang menandakan bahwa seluruh desa yang sebelumnya berstatus berkembang telah ditingkatkan kapasitasnya menjadi desa mandiri. Ini merupakan capaian strategis yang menunjukkan keberhasilan program-program penguatan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya berbasis potensi lokal.

Dengan tidak adanya lagi desa tertinggal maupun desa berkembang pada tahun 2024, maka Kabupaten Kulon Progo telah menuntaskan agenda besar dalam penguatan status desa, sekaligus mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pendekatan pembangunan berbasis komunitas dan wilayah. Meski demikian, capaian ini perlu dijaga dan diperkuat melalui skema monitoring berkelanjutan, pengembangan inovasi desa, serta perlindungan terhadap potensi kemunduran status akibat ketimpangan pelayanan dasar atau tekanan sosial-ekonomi tertentu.

Tabel 2.1.4.4.M-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pemberdayaan Masyarakat Desa

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	2.I.1	**Persentase pengentasan desa tertinggal**		**%**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**		
			Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun			*1,00*	-	*0,00*	*87,00*	*DPMKal Dalduk KB*	*Sejak tahun 2020 sudah tidak terdapat desa tertinggal di Kabupaten Kulon Progo dan adanya perubahan kesepakatan pengisian dalam pengisian e-LPPD.*
			Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)			*1,00*	-	*1,00*	*87,00*	*DPMKal Dalduk KB*	
	2.I.2	**Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri**		**%**	**32,26**	**60,47**	**65,38**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun			*26,00*	*17,00*	*28,00*	*87,00*	*DPMKal Dalduk KB*	*Pada tahun 2024 sudah tidak terdapat desa berkembang di Kabupaten Kulon Progo*
			Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)			*43,00*	*26,00*	*28,00*	*87,00*	*DPMKal Dalduk KB*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.N Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tentang kinerja pengendalian fertilitas, capaian pelayanan kontrasepsi modern, serta pemenuhan kebutuhan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Gambaran lengkap indikator kinerja tersebut tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.N-1.

Indikator Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)* menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan signifikan dari 1,58 pada tahun 2020 menjadi 1,22 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan keberhasilan strategi pengendalian fertilitas dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. Dengan TFR yang sudah berada di bawah angka pengganti generasi *(replacement level),* kondisi ini dapat menjadi sinyal demografis penting bagi pergeseran struktur penduduk dan implikasi jangka panjang terhadap kebijakan sosial-ekonomi, termasuk ketenagakerjaan dan pelayanan dasar.

Sementara itu, Persentase pemakaian kontrasepsi modern *(modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)* mengalami fluktuasi selama periode evaluasi. Setelah mencapai angka 75,2% pada tahun 2020, capaian mengalami penurunan tajam menjadi 61,82% di tahun 2022, sebelum sedikit membaik menjadi 68,24% pada 2024. Variabilitas capaian ini mencerminkan adanya dinamika dalam aksesibilitas, preferensi metode kontrasepsi, serta efektivitas pelaksanaan program KB yang perlu dievaluasi lebih dalam. Jumlah peserta KB aktif modern menurun dari 45.329 (2021) menjadi 43.399 (2024), meskipun jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang turut memengaruhi rasio mCPR secara keseluruhan.

Indikator kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)* menunjukkan pola yang cukup berfluktuasi. Setelah berada di kisaran 8–9% pada 2020 dan 2021, angka unmet need melonjak tajam menjadi 21,19% pada 2022, kemudian menurun signifikan menjadi 8,57% pada 2024. Lonjakan pada 2022 menandakan adanya hambatan substantif dalam pelayanan KB atau pergeseran preferensi terhadap metode kontrasepsi tertentu, yang tidak dapat sepenuhnya difasilitasi oleh sistem layanan yang ada saat itu. Penurunan kembali ke kisaran satu digit pada 2024 menjadi indikasi perbaikan dalam efektivitas pelayanan KB dan peningkatan pemenuhan permintaan PUS terhadap kontrasepsi yang sesuai.

Secara umum, evaluasi terhadap fokus ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mampu menjaga kinerja positif dalam pengendalian angka kelahiran, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas pemakaian kontrasepsi modern dan meminimalkan unmet need. Ke depan, dibutuhkan penguatan sistem layanan KB yang adaptif, peningkatan edukasi reproduksi berbasis gender dan keluarga, serta integrasi pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan lintas sektor, terutama dalam menghadapi potensi transisi demografi.

Tabel 2.1.4.4.N-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB											
	2.m.1	**TFR (Angka Kelahiran Total)**			**1,58**	**1,58**	**1,48**	**1,27**	**1,22**		
	2.m.2	**Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**		**%**	**75,20**	**74,51**	**61,82**	**69,26**	**68,24**		
			Jumlah peserta KB aktif modern			*45.329,00*	*38.068,00*	*43.687,00*	*43.399,00*	*DPMKal Dalduk KB*	
			Jumlah pasangan usia subur			*60.840,00*	*61.576,00*	*63.079,00*	*63.599,00*	*DPMKal Dalduk KB*	
	2.m.3	**Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**		**%**	**8,23**	**8,89**	**21,19**	**11,48**	**8,57**		
			Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani			*5.409,00*	*13.050,00*	*7.239,00*	*5.452,00*	*DPMKal Dalduk KB*	
			Jumlah Pasangan Usia Subur			*60.840,00*	*61.576,00*	*63.079,00*	*63.599,00*	*DPMKal Dalduk KB*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.O Perhubungan

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk fokus perhubungan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam pembangunan sistem transportasi daerah. Gambaran lengkap indikator kinerja tersebut tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.O-1.

Indikator Rasio Konektivitas, yang menggambarkan tingkat keterhubungan antar-wilayah dalam mendukung mobilitas barang dan orang, mengalami fluktuasi tajam sepanjang periode evaluasi. Setelah berada pada nilai 50,2 pada tahun 2020 dan 49,1 pada 2021, terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 dan 2023 hingga ke angka 0,34, sebelum kembali meningkat menjadi 5,85 pada tahun 2024. Penurunan signifikan ini disebabkan oleh adanya perubahan metodologi perhitungan. Peningkatan pada tahun 2024 dapat dimaknai sebagai hasil dari upaya perbaikan konektivitas melalui penataan simpul transportasi dan penguatan aksesibilitas antar-kawasan, khususnya yang terhubung dengan pusat pertumbuhan baru seperti Bandara *Yogyakarta International Airport (YIA)* dan kawasan sekitar.

Sementara itu, *Volume to Capacity Ratio (V/C Ratio)* di jalan kabupaten/kota menunjukkan tren yang cenderung stabil dan relatif rendah, yang mengindikasikan masih cukup longgarnya kapasitas jalan terhadap volume lalu lintas harian. Nilai *V/C Ratio* tercatat sebesar 0,24 pada 2020 dan sempat menurun menjadi 0,16 pada 2021. Meskipun naik ke 0,33 di tahun 2022, angka ini kembali menurun signifikan hingga mencapai 0,1 pada 2024. Rendahnya nilai *V/C Ratio* menunjukkan bahwa kemacetan lalu lintas belum menjadi isu kritis pada jaringan jalan kabupaten/kota di Kulon Progo, meskipun hal ini juga dapat mengindikasikan kurangnya aktivitas ekonomi atau mobilitas masyarakat di wilayah tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa *V/C Ratio* dijaga dalam ambang optimal.

Secara keseluruhan berdasarkan capaian IKK, fokus pelayanan perhubungan masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi dan inklusif, terutama dalam konteks penguatan konektivitas wilayah perdesaan, kawasan strategis, serta akses ke fasilitas pelayanan dasar. Ke depan, pengembangan perhubungan di Kabupaten Kulon Progo memerlukan kebijakan yang menekankan pada konektivitas, peningkatan pelayanan angkutan umum berbasis kebutuhan lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem transportasi yang cerdas dan berkelanjutan.

Tabel 2.1.4.4.O-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perhubungan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PERHUBUNGAN											
	2.n.1	Rasio konektivitas		nilai	50,20	49,10	0,34	0,34	5,85	Dishub	
	2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota		nilai	0,24	0,16	0,33	0,13	0,10	Dishub	

Sumber: Bapperida 2025, diolah

Tabel 2.1.4.4.O-2 Realisasi Indikator Kinerja Program Urusan Perhubungan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020-2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	**%**	**(Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang Tersedia / Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang Sesuai Standar Pelayanan) x 100%**	**-**	**68,42**	**70,53**	**72,63**	**56,43**
			Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang Tersedia	-	*65,00*	*67,00*	*69,00*	*79,00*
			Fasilitas Utama	-	*48,00*	*50,00*	*52,00*	*50,00*
			Fasilitas Pendukung	-	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*29,00*
			Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Sesuai Standar Pelayanan	-	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*140,00*
			Fasilitas Utama	-	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*92,00*
			Fasilitas Pendukung	-	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*48,00*
	Ketersediaan Perlengkapan Jalan	**%**	**(Jumlah Perlengkapan Jalan yang Ada / Jumlah Perlengkapan Jalan yang Seharusnya Ada) x 100%**	**14,30**	**15,78**	**16,71**	**18,38**	**19,24**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah perlengkapan jalan yang ada	*14.465,00*	*8.599,00*	*9.107,00*	*10.029,00*	*10.497,00*
			LPJU	*2.767,00*	*3.447,00*	*3.548,00*	*3.687,00*	*3.997,00*
			APILL	*7,00*	*23,00*	*24,00*	*26,00*	*26,00*
			Warning Lamp	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
			Rambu LL	*1.144,00*	*1.196,00*	*1.270,00*	*1.392,00*	*1.440,00*
			Cermin Tikungan	*50,00*	*60,00*	*72,00*	*111,00*	*121,00*
			Guardrail	*3.672,00*	*3.872,00*	*4.192,00*	*4.812,00*	*4.912,00*
			Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Seharusnya Ada	*101.179,00*	*54.485,00*	*54.485,00*	*54.555,00*	*54.555,00*
			LPJU	*19.122,00*	*19.122,00*	*19.122,00*	*19.122,00*	*19.122,00*
			APILL	*22,00*	*22,00*	*22,00*	*22,00*	*22,00*
			Warning Lamp	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
			Rambu LL	*4.298,00*	*4.298,00*	*4.298,00*	*4.298,00*	*4.298,00*
			Cermin Tikungan	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*110,00*	*110,00*
			Guardrail	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

Lebih lanjut, kinerja program dalam urusan perhubungan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang relatif fluktuatif. Gambaran lengkap capaian indikator program disajikan pada Tabel 2.1.4.4.O-2. Salah satu program utama, yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), memiliki dua indikator yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan teknis transportasi darat di daerah.

Indikator pertama, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, mencatat peningkatan bertahap dari 68,42% pada tahun 2021 menjadi 72,63% pada tahun 2023. Sementara pada 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 56,43%, tetapi dibersamai dengan meningkatnya jumlah penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai standar pelayanan yang melonjak dari sebelumnya 95 unit (tahun 2020–2023), menjadi 140 unit pada tahun 2024.

Sementara itu, indikator ketersediaan perlengkapan jalan menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 14,30% pada 2020 menjadi 19,24% pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek keselamatan jalan, seperti pemasangan rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan perlengkapan lainnya. Tren ini menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan kelayakan fasilitas jalan untuk menekan angka kecelakaan dan mendukung kelancaran mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai pelengkap, turut disajikan pula Tabel 2.1.4.4.O-3,4,5 dan 6 yang secara berurutan memuat data terkait perkembangan jumlah kendaraan bermotor, kejadian kecelakaan, titik rawan kecelakaan, serta rincian detail *VC Ratio* dan tingkat pelayanan jalan kabupaten di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.1.4.4.O-3 Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024 (dalam unit)

#	NO.	KATEGORI DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR	WARNA TNKB	2020	2021	2022	2023	2024
A.		**SEPEDA MOTOR**		**164.663**	**166.478**	**172.974**	**177.063**	**182.188**
	1	*Sepeda Motor Roda 2*	putih, tulisan hitam	*163.081*	*164.883*	*171.380*	*175.527*	*180.718*
	2	*Sepeda Motor Roda 3*	putih, tulisan hitam	*366*	*364*	*388*	*340*	*314*
	3	*Sepeda Motor Roda 2*	*merah, tulisan putih*	*1.197*	*1.202*	*1.184*	*1.167*	*1.127*
	4	*Sepeda Motor Roda 3*	*merah, tulisan putih*	*19*	*29*	*22*	*29*	*29*
B.		**MOBIL PENUMPANG UMUM BUKAN (PLAT HITAM)**		**15.886**	**16.695**	**17.686**	**18.234**	**18.987**
	1	*Jeep*	putih, tulisan hitam	*1.804*	*1.717*	*1.739*	*1.652*	*1.578*
	2	*Sedan*	putih, tulisan hitam	*730*	*768*	*780*	*799*	*832*
	3	*Minibus (< 8)*	putih, tulisan hitam	*13.220*	*14.086*	*15.038*	*15.631*	*16.420*
	4	*Mikro Bus (9–10)*	putih, tulisan hitam	*132*	*124*	*129*	*152*	*157*
	5	*Bus (> 30)*	putih, tulisan hitam	-	-	-	-	-
C.		**MOBIL BARANG BUKAN UMUM (PLAT HITAM)**		**5.296**	**5.427**	**5.656**	**5.601**	**5.644**
	1	*Mobil Niaga (Pick–up)*	putih, tulisan hitam	*3.900*	*4.058*	*4.267*	*4.236*	*4.310*
	2	*Mobil Niaga (Truck)*	putih, tulisan hitam	*1.396*	*1.369*	*1.389*	*1.365*	*1.334*
D.		**MOBIL PENUMPANG UMUM (PLAT KUNING)**		**196**	**173**	**181**	**189**	**193**
	1	*Jeep*	*kuning, tulisan hitam*	-	-	-	-	-

#	NO.	KATEGORI DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR	WARNA TNKB	2020	2021	2022	2023	2024
	2	*Sedan*	*kuning, tulisan hitam*	-	-	-	-	-
	3	*Minibus (< 8)*	*kuning, tulisan hitam*	*30*	*31*	*33*	*38*	*39*
	4	*Mikro Bus (9–10)*	*kuning, tulisan hitam*	*158*	*133*	*137*	*137*	*134*
	5	*Bus (> 30)*	*kuning, tulisan hitam*	*8*	*9*	*11*	*14*	*20*
E.		**MOBIL BARANG BUKAN UMUM (PLAT KUNING)**		**415**	**394**	**407**	**384**	**403**
	1	*Mobil Niaga (Pick–up)*	*kuning, tulisan hitam*	*13*	*12*	*12*	*11*	*14*
	2	*Mobil Niaga (Truck)*	*kuning, tulisan hitam*	*402*	*382*	*395*	*373*	*389*
F.		**MOBIL PENUMPANG UMUM (PLAT MERAH)**		**273**	**282**	**297**	**288**	**297**
	1	*Jeep*	*merah, tulisan putih*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*
	2	*Sedan*	*merah, tulisan putih*	*6*	*9*	*8*	*4*	*8*
	3	*Minibus (< 8)*	*merah, tulisan putih*	*259*	*262*	*273*	*269*	*272*
	4	*Mikro Bus (9–10)*	*merah, tulisan putih*	*7*	*10*	*9*	*9*	*10*
	5	*Bus (> 30)*	*merah, tulisan putih*	*0*	*0*	*5*	*4*	*6*
G.		**MOBIL BARANG UMUM (PLAT MERAH)**		**61**	**67**	**69**	**75**	**66**
	1	*Mobil Niaga (Pick–up)*	*merah, tulisan putih*	*43*	*44*	*43*	*51*	*41*
	2	*Mobil Niaga (Truck)*	*merah, tulisan putih*	*18*	*23*	*26*	*24*	*25*
-	*-*	***Jumlah Total***		***186.790***	***189.516***	***197.270***	***201.834***	***207.778***

Keterangan:

- Kolom Warna TNKB disusun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dalam Perpol No. 7 Tahun 2021.

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo, 2025

Melihat secara keseluruhan berdasarkan jumlah total pada Tabel 2.1.4.4.O-3, terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor secara konsisten di Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2020-2024. Hal ini menjadi penting bagi Pemerintah Daerah karena dapat mengakibatkan tingginya kepadatan lalu lintas, terutama apabila tidak diimbangi dengan pengembangan sarana dan prasarana jalan yang memadai. Sehingga dapat menjadi potensi pada peningkatan kejadian kecelakaan lalu lintas. Peningkatan kepadatan lalu lintas harian rerata (LHR) juga diperkirakan meningkat seiring beroperasinya Bandara New Yogyakarta International Airport (YIA) dan fasilitas pendukungnya, sehingga menambah kompleksitas permasalahan lalu lintas di wilayah ini. Hal tersebut perlu mendapat perhatian agar potensi ini tidak memperbesar angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kulon Progo.

Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.O-4, Jumlah kejadian kecelakaan paling tinggi menyentuh angka 958 kejadian pada tahun 2022, namun dengan jumlah kerugian materill tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar Rp 825.000.000,00 dari 870 kejadian kecelakaan. Lokasi kecelakaan paling rawan berada di Ruas Jalan Jogja–Wates Km 19–20 (Sukoreno, Kapanewon Sentolo) serta Jalan Wates–Purworejo Km 8–11 (Kapanewon Temon). Faktor penyebab utama kecelakaan didominasi oleh kesalahan manusia *(human error),* minimnya keterampilan berkendara, kelelahan, rendahnya etika berlalu lintas, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan lalu lintas.

Tabel 2.1.4.4.O-4 Rekapitulasi Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Jumah Kecelakaan**	Kejadian	592,00	615,00	958,00	877,00	870,00
2	**Kerugian Materiil**	Rp	106.400.000,00	196.150.000,00	273.665.000,00	559.225.500,00	825.000.000,00
3	**Jumlah Korban**	Orang	957,00	1.064,00	1.625,00	1.494,00	1.543,00
-	*a. Meninggal Dunia*	*Orang*	*34,00*	*68,00*	*89,00*	*62,00*	*74,00*
-	*b. Luka Berat*	*Orang*	*1,00*	*3,00*	*0,00*	*1,00*	*2,00*
-	*c. Luka Ringan*	*Orang*	*922,00*	*993,00*	*1.536,00*	*1.431,00*	*1.467,00*

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo, 2025

Melanjutkan dari pembahasan pada uraian sebelumnya, Tabel 2.1.4.4.O-5 berikut menyajikan daftar titik rawan kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo..

Tabel 2.1.4.4.O-5 Titik Rawan Kecelakaan di Kabupaten Kulon Progo

NO.	TITIK RAWAN KECELAKAAN
1	Simpang 3 barat Jalan Bantar
2	Simpang 3 utara SMPN 2 Sentolo
3	Simpang 3 arah Perumahan Pongangan s/d S3 Ngeseng, Sentolo
4	Depan SMPN 1 Sentolo
5	Simpang 3 Dudukan Sukoreno Sentolo
6	Simpang 3 Lapangan Sukoreno Sentolo
7	Wora-wari, Kalimenur, Sentolo
8	Depan SPBE Sentolo
9	Depan SPBU Kalimenur, Sentolo
10	Depan SMPN 2 Pengasih, Kedungsari, Pengasih
11	SPBU Ngramang Pengasih
12	BBVet s/d Samsat baru Wates
13	Simpang 3 Gadingan Wates
14	SPBU Wates
15	SMPN 5 Wates s/d Kantor KPPN Wates
16	Simpang 3 Dalangan
17	Pasar Temon, Depan Kantor Kecamatan Temon
18	Simpang 3 Mlangsen Temon
19	Simpang 3 Pos PJR Congot
20	Simpang 3 Sogan Wates (sudah dipasang APILL)
21	Depan Bandara YIA Temon (sudah dipasang APILL)
22	Jln Daendels (Letter S Garongan)
23	Jln Daendels (Simpang 3 Ngremang)
24	Jln Kepek-Kalimanggis
25	Simpang 4 Boro, Galu

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo, 2025

Sebagai pelengkap atas data *Volume to Capacity (V/C) Ratio* yang telah disajikan dalam Tabel 2.1.4.4.O-1, turut disertakan pula data pendukung lainnya sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.O-6.

Tabel 2.1.4.4.O-6 VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2024

#	NO.	RASIO JALAN	VC RATIO	TINGKAT PELAYANAN
I.		**Kapanewon Wates**		
	1	Jl. Tunjungan	0,14	A
	2	Jl. Kulwaru–Kuwirun	0,09	A

#	NO.	RASIO JALAN	VC RATIO	TINGKAT PELAYANAN
	3	Jl. Toyan–Granti	0,13	A
II.		**Kapanewon Galur**		
	1	Tegal Buret–Pasar Sewu Galur	0,15	A
	2	Cangakan–Ngremang	0,16	A
	3	Tirtorahayu–Karangsewu	0,10	A
	4	Prembulan–Boro	0,14	A
	5	Karangsewu–Pathuk	0,09	A
III.		**Kapanewon Kokap**		
	1	Hargorejo–Gunung Pentul	0,06	A
	2	Klepu–Anjir	0,07	A
	3	Pripih–Jurangkah	0,12	A
	4	Kokap–Pripih	0,08	A
IV.		**Kapanewon Panjatan**		
	1	Cicikan–Pantai Bugel	0,08	A
	2	Bugel–Karangwuni	0,10	A
	3	Cerme–Demangan	0,09	A
	4	Gotakan–Cerme	0,11	A
V.		**Kapanewon Lendah**		
	1	Botokan–Bangeran	0,09	A
	2	Sidorejo–Sumur Muling	0,08	A
	3	Diran–Karangasem	0,06	A
	4	Sedan–Diran	0,06	A
	5	Sudo–Kasihan	0,07	A
VI.		**Kapanewon Temon**		
	1	Jangkaran–Pantai Congot	0,12	A
	2	Demen–Girigondo	0,10	A
	3	Palihan–Glaheng	0,09	A
	4	Weton–Dumpoh	0,08	A
	5	Pripih–Sangon	0,08	A
VII.		**Kapanewon Pengasih**		
	1	Kalinongko–Cerme	0,13	A
	2	Clereng–Girinyono	0,14	A
	3	Milir–Krembangan	0,16	A
	4	Margosari–Kepek	0,15	A

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo, 2025

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Bina Jalan Kota, volume lalu lintas didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam satuan waktu tertentu. Volume lalu lintas ini diukur menggunakan rasio volume

terhadap kapasitas jalan *(Volume to Capacity Ratio atau V/C Ratio),* yaitu perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Semakin tinggi nilai *V/C Ratio,* maka tingkat pelayanan jalan semakin rendah, dan sebaliknya.

Pengukuran *V/C Ratio* pada 30 ruas jalan kabupaten yang tersebar di Kapanewon Wates, Galur, Kokap, Panjatan, Lendah, Temon, dan Pengasih menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,10. Nilai *V/C Ratio* yang rendah mengindikasikan bahwa ruas-ruas jalan tersebut memiliki tingkat pelayanan yang tinggi, dengan klasifikasi rata-rata berada pada tingkat pelayanan A. Tingkat pelayanan jalan ditentukan berdasarkan beberapa indikator, yaitu kecepatan kendaraan, waktu tempuh perjalanan, kebebasan bergerak, dan aspek keselamatan. Tingkat pelayanan A menggambarkan kondisi arus bebas dengan volume lalu lintas rendah, serta memberikan keleluasaan bagi pengguna jalan untuk memilih kecepatan sesuai kehendaknya. Sementara itu, tingkat pelayanan B menunjukkan kondisi arus yang masih stabil, namun kecepatan kendaraan mulai dibatasi oleh volume lalu lintas, umumnya terjadi pada jalur-jalur dengan peruntukan luar kota.

Dengan demikian, evaluasi terhadap indikator kinerja kunci, program, serta data pendukung dalam urusan perhubungan di Kabupaten Kulon Progo menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Ke depan, diperlukan penguatan dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, disertai dengan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

2.1.4.4.P Komunikasi dan Informatika

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci pada fokus urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 memberikan gambaran kinerja yang relatif stabil dengan beberapa capaian signifikan dalam perluasan layanan digital dan diseminasi informasi publik. Gambaran lengkap capaian indikator tersebut tersaji pada Tabel 2.1.4.4.P-1.

Selama periode tersebut, seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo (42 Perangkat Daerah) telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini menunjukkan konsistensi ketersediaan infrastruktur dasar digital pada sektor pemerintahan, serta kesiapan teknis perangkat daerah dalam mendukung transformasi layanan berbasis elektronik.

Selain infrastruktur jaringan, kemajuan juga dicapai dalam penyelenggaraan layanan publik secara daring dan terintegrasi. Persentase layanan publik daring meningkat signifikan dari 63,98% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Meski jumlah total layanan publik yang dihitung pada tahun 2024 menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, pencapaian 100% pada tahun terakhir tetap mencerminkan optimalisasi terhadap integrasi layanan strategis yang tersisa. Capaian ini tidak terlepas dari penguatan tata kelola sistem informasi dan kesiapan teknologi pendukung integrasi data antar-perangkat daerah.

Dalam kaitannya dengan penyebaran informasi publik, persentase masyarakat yang menjadi sasaran informasi dan mengetahui program prioritas pemerintah mencapai angka maksimal 100% pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Kinerja ini mengindikasikan efektivitas saluran diseminasi informasi, baik melalui kanal digital, media sosial pemerintah, maupun platform informasi lainnya.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo telah bergerak secara progresif dalam penerapan digital government. Penguatan interoperabilitas sistem dan keterpaduan aplikasi antar perangkat daerah juga telah menjadi perhatian. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merujuk pada standar interoperabilitas yang diinisiasi Pemerintah Daerah DIY, meliputi dokumentasi kamus data primer, perancangan lintas aplikasi, serta infrastruktur pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), sebagaimana diarahkan dalam kerangka *E-Government Interoperability Framework (E-GIF)*.[4]

Ke depan, untuk memperkuat keberlanjutan transformasi digital, perlu dilakukan harmonisasi regulasi internal, penguatan kapasitas SDM digital, serta pengembangan pusat data daerah yang aman dan terstandar. Dukungan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar ekosistem digital yang dibangun mampu menopang tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

[4] *Standar Interoperabilitas | Wiki Pemda DIY, dapat diakses melalui link https://wiki.jogjaprov.go.id/diskominfo/PEDOMANTEKNISPEMBANGUNANTEKNOLOGIINFORMASIDANKOMUNIKASISISTEMPEMERINTAHANBERBASISELEKTRONIKDILINGKUNGANPEMERINTAHDAERAHDAERAHISTIMEWAYOGYAKARTA/DokumenStandarTIK/StandarPengembanganAplikasi/Standar Interoperabilitas*

Tabel 2.1.4.4.P-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Komunikasi dan Informatika

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
KOMINFO											
	2.o.1	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo			*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*Diskominfo*	
			Jumlah Perangkat Daerah			*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*Bag. Organisasi*	
	2.o.2	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**		**%**	**63,98**	**78,29**	**78,29**	**73,74**	**100,00**		
			Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi			*256,00*	*256,00*	*205,00*	*42,00*	*Diskominfo*	
			Jumlah layanan publik			*327,00*	*327,00*	*278,00*	*42,00*	*Diskominfo*	
	2.o.3	**Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**%**	**68,78**	**100,00**	**66,03**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota			*442.874,00*	*292.887,00*	*303.846,00*	*302.719,00*	*Diskominfo*	
			Jumlah penduduk			*442.874,00*	*443.591,00*	*303.846,00*	*302.719,00*	*Disdukcapil*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.Q Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020 hingga 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan kelembagaan ekonomi kerakyatan yang ditunjukkan dalam Tabel 2.1.4.4.Q-1. Secara umum, indikator yang digunakan mencerminkan dua hal penting, yakni kualitas koperasi aktif dan proporsi usaha mikro yang telah bertransformasi menjadi unit wirausaha.

Capaian indikator "Meningkatnya koperasi yang berkualitas" menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Persentasenya meningkat dari 33,58% pada tahun 2020 menjadi 76,21% pada tahun 2024. Kenaikan ini didasarkan pada bertambahnya jumlah koperasi yang memenuhi kriteria kualitas seperti menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), memiliki volume usaha yang meningkat, serta pencatatan aset yang sehat. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2021 hingga 2022, namun sempat turun pada 2023 sebelum kembali naik pada tahun terakhir. Dinamika tersebut turut dipengaruhi oleh menurunnya jumlah koperasi aktif dari 282 koperasi aktif pada 2022 menjadi 206 pada 2024 yang menyebabkan perhitungan persentase kualitas koperasi menjadi lebih tinggi meskipun jumlah koperasi berkualitas relatif konstan.

Sementara itu, indikator "Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha" menunjukkan capaian maksimal (100%) secara konsisten selama lima tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha mikro yang terdata telah menjalankan aktivitas kewirausahaan yang mandiri, baik dalam bentuk usaha tetap maupun berkembang. Data penyusun indikator ini menunjukkan pertumbuhan jumlah unit usaha mikro dari 42.791 pada tahun 2021 menjadi 52.404 pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan minat masyarakat dalam sektor informal yang produktif, terutama sebagai respons adaptif pasca-pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi lokal.

Capaian ini menegaskan bahwa ekosistem koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek kelembagaan dan pemberdayaan. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pertumbuhan, ke depan perlu difokuskan pada penguatan pembinaan koperasi berbasis sektor potensial, digitalisasi koperasi dan UMKM, serta penguatan akses terhadap pembiayaan dan pasar. Langkah-langkah ini akan memperkokoh fondasi ekonomi lokal sekaligus mendukung pencapaian inklusi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2.1.4.4.Q-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
KOPERASI DAN UKM											
	2.p.1	**Meningkatnya Koperasi yang berkualitas**		**%**	**33,58**	**57,61**	**74,47**	**72,17**	**76,21**		
			Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset			*159,00*	*210,00*	*153,00*	*157,00*	*Disperinkop UKM*	
			Jumlah koperasi aktif			*276,00*	*282,00*	*212,00*	*206,00*	*Disperinkop UKM*	
	2.p.2	**Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha			*42.791,00*	*44.890,00*	*51.538,00*	*52.404,00*	*Disperinkop UKM*	
			Jumlah usaha mikro keseluruhan			*42.791,00*	*44.890,00*	*51.538,00*	*52.404,00*	*Disperinkop UKM*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.R Penanaman Modal

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tentang fluktuasi investasi daerah, sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.R-1. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan ini adalah persentase peningkatan investasi yang mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Capaian indikator ini menunjukkan tren yang sangat dinamis, ditandai dengan lonjakan signifikan pada tahun 2021 yang mencapai 117,35%, dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 17,35%. Namun, tren ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, bahkan mengalami penurunan tajam pada tahun 2022 (2,64%) dan tahun 2023 (2,27%). Pada tahun 2024, capaian meningkat kembali menjadi 14,53%. Variasi yang mencolok ini menunjukkan bahwa investasi di Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi nasional dan global, iklim usaha, serta proyek-proyek strategis yang masuk dalam periode waktu tertentu.

Data LPPD menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam nilai investasi tahunan PMDN dan PMA. Tahun 2021 mencatat investasi senilai Rp 12,75 triliun, yang kemudian turun drastis pada tahun 2022 menjadi Rp 351,25 miliar. Nilai tersebut melonjak kembali pada 2023 menjadi Rp 13,64 triliun, sebelum kembali menurun di 2024 menjadi Rp 309,78 miliar. Pola ini menunjukkan bahwa capaian indikator persentase peningkatan investasi sangat bergantung pada proyek-proyek skala besar yang sifatnya tidak reguler, seperti pembangunan infrastruktur atau sektor industri strategis, yang tidak setiap tahun terjadi secara konsisten.

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap fluktuasi tersebut adalah dinamika perizinan, kesiapan lahan dan infrastruktur pendukung investasi, serta efektivitas promosi potensi daerah kepada investor. Selain itu, Kabupaten Kulon Progo juga berkomitmen untuk mencermati bahwasannya beberapa lonjakan investasi berasal dari sektor-sektor tertentu yang memiliki nilai investasi tinggi namun tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan atau peningkatan nilai tambah lokal.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, ke depan diperlukan strategi penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal, peningkatan kapasitas promosi investasi berbasis potensi lokal, serta konsolidasi regulasi yang mendukung kemudahan berusaha. Konsistensi dalam mengelola basis data investasi, termasuk pemetaan sektor prioritas dan kesiapan kawasan, juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya tarik investasi secara berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.1.4.4.R-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Penanaman Modal

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PENANAMAN MODAL											
	2.q	**Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota**		%	**17,35**	**117,35**	**2,64**	**2,27**	**14,53**		
			Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2023			*12.753.698.053.158,00*	*351.247.934.226,00*	*13.646.501.684.122,00*	*309.779.771.979,00*	*DPMPTSP*	
			Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2024			*10.867.965.040.663,00*	*13.295.253.749.896,40*	*13.956.281.456.101,00*	*354.782.806.989,00*	*DPMPTSP*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.S Kepemudaan dan Olahraga

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat beberapa tantangan dari sisi kesinambungan dan kualitas pelaksanaan program. Gambaran lengkap capaian indikator tersebut disajikan dalam Tabel 2.1.4.4.S-1.

Indikator pertama, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, menunjukkan tren peningkatan dari 0,7% pada tahun 2020 dan 2021, menjadi 0,8% pada 2022, dan mengalami lonjakan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 1,49% dan 1,54%. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda, yang ditopang oleh berbagai program fasilitasi dan inkubasi usaha. Data LPPD menunjukkan bahwa jumlah pemuda yang berwirausaha meningkat hampir dua kali lipat dari 664 orang (2021) menjadi 1.440 orang (2024), di tengah jumlah populasi pemuda yang relatif stabil. Selanjutnya, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan juga mengalami peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2024. Setelah stagnan di angka sekitar 5,4% dari tahun 2020 hingga 2022, indikator ini meningkat menjadi 5,5% pada 2023, dan melonjak tajam ke 17,59% di tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pemuda yang aktif berorganisasi hingga mencapai 16.482 orang dari total populasi pemuda sebanyak 93.711. Lonjakan partisipasi ini dapat dikaitkan dengan upaya masif pemerintah daerah dalam revitalisasi kelembagaan kepemudaan serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial.

Pada dimensi olahraga, indikator peningkatan prestasi olahraga menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Setelah tidak terdapat capaian pada tahun 2020 dan 2021, jumlah medali yang diperoleh melonjak drastis menjadi 592 pada 2022, kemudian menurun menjadi 264 pada 2023, dan merosot tajam menjadi 11 pada 2024. Penurunan tajam pada tahun terakhir tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan kinerja substansial, melainkan disebabkan oleh perubahan definisi indikator yang hanya menghitung capaian di tingkat nasional dan internasional, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang juga mencakup tingkat provinsi dan lokal.

Secara keseluruhan, capaian fokus urusan kepemudaan dan olahraga dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi, terutama dalam penguatan peran pemuda sebagai aktor pembangunan dan meningkatnya perhatian terhadap pengembangan potensi atlet daerah. Namun demikian, tantangan kedepan perlu diperkuat dengan kesinambungan pembinaan, sistem data dan pelaporan yang adaptif, serta kolaborasi multipihak, termasuk dengan komunitas, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, guna menciptakan ekosistem kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2.1.4.4.S-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Kepemudaan dan Olahraga

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	2.r.1	**Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**		**%**	**0,70**	**0,70**	**0,80**	**1,49**	**1,54**		
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota			*664,00*	*761,00*	*1.406,00*	*1.440,00*	*Disdikpora dan Disperinkop UKM*	
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota			*94.290,00*	*94.585,00*	*94.293,00*	*93.711,00*	*Disdukcapil*	
	2.r.2	**Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**		**%**	**5,42**	**5,42**	**5,42**	**5,50**	**17,59**		
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota			*5.113,00*	*5.125,00*	*5.185,00*	*16.482,00*	*Disdikpora dan Bakesbangpol*	
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota			*94.290,00*	*94.585,00*	*94.293,00*	*93.711,00*	*Disdukcapil*	
	2.r.3	**Peningkatan Prestasi Olahraga**		**%**	**0,00**	**0,00**	**592,00**	**264,00**	**11,00**		
			Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional			*0,00*	*592,00*	*264,00*	*11,00*	*Disdikpora*	*Penurunan angka yang signifikan pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya perubahan definisi penghitungan, yang semula mencakup seluruh event termasuk tingkat provinsi, namun kemudian dibatasi hanya pada event tingkat nasional dan internasional.*

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.T Statistik

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan Statistik di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal, sebagaimana tergambarkan dalam Tabel 2.1.4.4.T-1. Dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan ini mencerminkan pemanfaatan data statistik secara menyeluruh oleh seluruh perangkat daerah dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah.

Indikator pertama, yaitu persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, mencatat capaian sebesar 100% secara konsisten sepanjang lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Kulon Progo telah mengintegrasikan pendekatan berbasis data dalam proses perencanaan pembangunan, yang merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Capaian ini didukung oleh data LPPD yang menunjukkan bahwa dari total 42 perangkat daerah yang ada, seluruhnya teridentifikasi menggunakan data statistik dalam perencanaan.

Indikator kedua, yakni persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, juga menunjukkan capaian sempurna sebesar 100% setiap tahun selama periode 2020–2024. Konsistensi ini menandakan adanya kesadaran kolektif dan kelembagaan yang kuat di lingkungan pemerintah daerah akan pentingnya evaluasi berbasis data untuk mengukur efektivitas kebijakan dan program pembangunan.

Pencapaian penuh atas dua indikator ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberhasilan dalam penguatan fungsi statistik sektoral dan kolaborasi lintas OPD. Meskipun demikian, tantangan ke depan adalah menjaga kualitas, keterbaruan, dan interoperabilitas data statistik yang digunakan, termasuk integrasi sistem informasi, standarisasi metadata, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data. Pendekatan statistik yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitik dan prediktif, akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Tabel 2.1.4.4.T-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Statistik

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
STATISTIK											
	2.s.1	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*Diskominfo*	
			Jumlah Perangkat Daerah			*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*Bag. Organisasi*	
	2.s.2	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*Diskominfo*	
			Jumlah Perangkat Daerah			*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*Bag. Organisasi*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

Selain capaian indikator kinerja kunci fokus layanan statistik yang menunjukkan tren optimal, penguatan tata kelola statistik daerah dibahas secara lebih rinci melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) pada bagian berikut.

EPSS merupakan instrumen penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Pengukuran ini dilakukan secara sistematis melalui penilaian mandiri, verifikasi, dan validasi, yang kemudian menghasilkan *output* berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Terdapat 5 dimensi utama dalam pengukuran IPS, yaitu:

1. Dimensi Prinsip Satu Data Indonesia
2. Kualitas Data
3. Proses Bisnis Statistik
4. Kelembagaan
5. Statistik Nasional

Kabupaten Kulon Progo mulai mengikuti pengukuran IPS pada tahun 2023 dengan capaian nilai 2,00 yang berada pada kategori “Cukup”. Pada tahun 2024, meskipun masih dalam kategori yang sama, nilai IPS meningkat menjadi 2,44. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola statistik, termasuk melalui peningkatan kualitas pembinaan data sektoral oleh BPS serta penguatan peran Forum Satu Data Indonesia Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapperida sebagai Koordinator Forum Satu Data. Pembinaan ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh mencakup lima dimensi penilaian IPS, serta ditunjang melalui bimbingan teknis rutin bagi produsen dan walidata perangkat daerah, khususnya terkait pengolahan, penyajian, dan analisis data.

Sejalan dengan penguatan tata kelola statistik melalui EPSS, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga berpartisipasi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang diselenggarakan oleh Bappenas sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat. Kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dilandasi oleh kebutuhan pemerintah terhadap data yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan secara nasional. Peraturan ini menjadi dasar perbaikan tata kelola data agar dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat terdistribusi dengan baik antar instansi.

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat maupun instansi daerah dalam menyelenggarakan tata kelola data. Tujuannya adalah mendukung penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti, mendorong keterbukaan, serta meningkatkan transparansi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Dalam

konteks ini, kolaborasi lintas instansi pusat dan daerah menjadi langkah strategis menuju transformasi digital yang terintegrasi dan efisien.

Evaluasi Penyelenggaraan SDI bertujuan untuk memetakan kinerja implementasi kebijakan SDI di tingkat pusat dan daerah. Penilaian mencakup tiga domain utama, yakni Domain Kebijakan dan Kelembagaan, Domain Penyelenggaraan SDI, dan Domain Data Leadership. Seluruh domain ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam delapan aspek penilaian, yaitu:

1. Aspek Kebijakan;
2. Aspek Kelembagaan;
3. Aspek Perencanaan;
4. Aspek Pengumpulan;
5. Aspek Pemeriksaan;
6. Aspek Penyebarluasan;
7. Aspek Pemanfaatan Data; dan
8. Aspek Pembiayaan.

Pada pelaksanaan tahun 2023, Kabupaten Kulon Progo memperoleh nilai sebesar 56,77 dengan predikat “Cukup”. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam struktur dan pelaksanaan kebijakan data, meskipun penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi proses bisnis data lintas sektor masih perlu ditingkatkan secara bertahap.

2.1.4.4.U Persandian

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan Persandian di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dan menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan keamanan informasi pemerintah daerah. Gambaran lengkap capaian indikator ini disajikan dalam Tabel 2.1.4.4.U-1.

Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja fokus ini adalah tingkat keamanan informasi pemerintah. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian ditunjukkan sebesar 100%, mencerminkan pemenuhan penuh terhadap parameter keamanan informasi yang berlaku saat itu. Namun demikian, mulai tahun 2022, terjadi perubahan dalam metodologi penilaian, ditandai dengan peningkatan jumlah area penilaian dari 18 menjadi 645 area. Perubahan metodologis ini secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja, yang tampak menurun menjadi 40,31% pada tahun 2022 dan kemudian meningkat bertahap menjadi 60,62% di tahun 2023 dan 68,06% di tahun 2024.

Data penyusun indikator menunjukkan bahwa peningkatan skor pada periode 2022–2024, dari 260 menjadi 439 poin, mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam penguatan sistem keamanan informasi, meskipun belum mencapai angka maksimal. Hal ini menjadi cerminan dari upaya bertahap Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menyesuaikan diri terhadap standar keamanan informasi yang lebih komprehensif dan kompleks.

Secara teknokratis, peningkatan indikator ini menjadi krusial dalam era transformasi digital pemerintahan, mengingat informasi publik menjadi aset vital yang rentan terhadap ancaman siber, manipulasi data, maupun kebocoran dokumen. Oleh karena itu, pencapaian yang meningkat secara bertahap ini menunjukkan adanya perbaikan kapasitas teknis, tata kelola sistem informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi keamanan

informasi. Ke depan, perlu difokuskan peningkatan kualitas tata kelola keamanan informasi yang mencakup tiga aspek utama, yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan *(confidentiality),* integritas *(integrity),* dan ketersediaan *(availability)* informasi, agar sistem persandian daerah dapat menopang proses pemerintahan digital yang andal dan berkelanjutan.

Tabel 2.1.4.4.U-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Persandian

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PERSANDIAN											
	2.t	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**		**%**	**100,00**	**100,00**	**40,31**	**60,62**	**68,06**		
			Jumlah nilai per area keamanan informasi			*18,00*	*260,00*	*391,00*	*439,00*	*Diskominfo*	
			Jumlah area penilaian			*18,00*	*645,00*	*645,00*	*645,00*	*Diskominfo*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk: a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Terdapat 5 domain dalam pengukuran IPS yaitu: 1. Dimensi Prinsip Satu Data Indonesia, 2. Kualitas Data, 3. Proses Bisnis Statistik, 4. Kelembagaan, 5. Statistik Nasional. Pengukuran IPS dimulai pada tahun 2023, Kabupaten Kulon Progo meraih nilai 2,00 atau Predikat Cukup, kemudian pada tahun 2024 capaian IPS kembali meraih predikat Cukup tapi nilainya meningkat menjadi 2,44.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian nilai IPS adalah melalui kegiatan pembinaan data sektoral yang dilaksanakan oleh pembina data yaitu BPS Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan pembinaan statistik sektoral untuk produsen data dilaksanakan dalam 5 kali pelaksanaan sesuai dengan dimensi pengukuran IPS mulai dari Dimensi Prinsip Satu Data Indonesia sampai dengan Statistik Nasional. Selain itu Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kulon Progo melalui Bapperida selaku Sekretariat Forum Satu Data juga secara rutin melaksanakan bimbingan teknis tentang pengolahan, penyajian dan analisis data untuk produsen dan walidata perangkat daerah.

2.1.4.4.V Budaya

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo pada kurun waktu 2020 hingga 2024 memberikan gambaran konsistensi kinerja pelestarian cagar budaya yang cukup stabil dan maksimal. Gambaran lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.V-1.

Selama lima tahun terakhir, capaian indikator "Terlestarikannya Cagar Budaya" secara konsisten menunjukkan angka 100 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa seluruh objek cagar budaya yang telah terdata di Kabupaten Kulon Progo juga telah tercakup dalam upaya pelestarian oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 106 objek cagar budaya yang dilestarikan, jumlah tersebut meningkat secara bertahap hingga mencapai 191 objek pada tahun 2024. Kinerja ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga warisan budaya, baik dalam bentuk perlindungan fisik, dokumentasi, maupun revitalisasi fungsi sosial budaya objek-objek tersebut.

Dari sisi manajerial, keberhasilan menjaga rasio pelestarian 100 persen terhadap jumlah cagar budaya yang terdata menunjukkan adanya sistem pendataan, pengelolaan, serta penganggaran yang cukup baik dalam mendukung upaya pelestarian budaya. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat adat, komunitas pelestari budaya, serta dukungan regulatif dari pemerintah daerah turut memperkuat keberlanjutan program ini.

Namun demikian, tantangan ke depan terletak pada aspek kualitas pelestarian yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas atau pelaporan administratif, tetapi juga pada nilai edukatif, partisipatif, dan integrasi objek cagar budaya ke dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Penguatan fungsi kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola cagar budaya, serta pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi dan diseminasi budaya.

Tabel 2.1.4.4.V-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Budaya

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
BUDAYA											
	2.u	**Terlestarikannya Cagar Budaya**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah cagar budaya yang dilestarikan			*106,00*	*146,00*	*171,00*	*191,00*	*Disbud*	
			Jumlah cagar budaya yang terdata			*106,00*	*146,00*	*171,00*	*191,00*	*Disbud*	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.W Perpustakaan

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan perpustakaan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 memberikan gambaran peningkatan yang signifikan terhadap perilaku literasi masyarakat. Gambaran lengkap capaian kinerja tersebut tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.W-1.

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan urusan perpustakaan adalah nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Nilai ini menunjukkan tren positif yang berkesinambungan, yaitu dari 44,47 persen pada tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 49,71 persen pada 2022, lalu melonjak menjadi 60,71 persen pada 2023, dan akhirnya mencapai 74,55 persen pada tahun 2024. Capaian ini diperoleh melalui survei atau kajian terhadap perilaku membaca masyarakat, yang mencerminkan keberhasilan program literasi berbasis inklusi sosial, perluasan akses layanan perpustakaan, serta integrasi kegiatan literasi dengan program-program pemberdayaan komunitas.

Selanjutnya, indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) juga menunjukkan kemajuan pesat selama lima tahun terakhir. Sebagaimana telah diuraikan dalam Subbab 2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata, nilai IPLM pada awalnya meningkat sedikit dari 29,18 (2020) ke 29,49 (2021), berdasarkan metode perhitungan lama. Namun setelah menggunakan rumus baru yang lebih komprehensif dan berbasis dimensi Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM), capaian IPLM melonjak drastis menjadi 67,95 pada tahun 2022, dan terus meningkat hingga mencapai 96,23 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan penguatan ekosistem literasi di Kulon Progo yang melibatkan kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip, sekolah, komunitas baca, serta peran aktif masyarakat dalam mendorong budaya literasi sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya.

Peningkatan signifikan dua indikator ini tidak terlepas dari strategi digitalisasi layanan, optimalisasi perpustakaan desa, serta program pelibatan masyarakat dalam pengelolaan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di sisi lain, keberhasilan ini juga perlu ditopang oleh kebijakan literasi berkelanjutan, peningkatan kualitas pustakawan, serta perluasan jangkauan layanan bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terpencil.

Tabel 2.1.4.4.W-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perpustakaan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PERPUSTAKAAN											
	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		%	44,47	44,47	49,71	60,71	74,55	Disperpusip	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
	2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		nilai	29,18	29,49	67,95	84,88	96,23	Disperpusip	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo 2025, diolah

2.1.4.4.X Kearsipan

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan kearsipan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020 hingga 2024 memberikan gambaran atas penguatan fungsi arsip sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Gambaran lengkap capaian kinerja tersebut tersaji dalam Tabel 2.1.4.4.X-1.

Indikator pertama yang digunakan untuk menilai kinerja layanan kearsipan adalah tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional. Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang positif selama lima tahun terakhir, dari 33,66 persen pada tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 40,32 persen pada 2022, kemudian naik menjadi 49,6 persen pada 2023, dan mencapai 59,48 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah arsip aktif yang telah didaftarkan dalam sistem kearsipan dan didukung oleh pembenahan manajemen arsip di perangkat daerah, baik melalui pelatihan teknis, pendampingan penyusunan daftar arsip, maupun digitalisasi arsip aktif.

Indikator kedua yaitu tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat, juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Setelah mencapai 78,17 persen pada tahun 2020 dan 2021, capaian meningkat menjadi 83,33 persen pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 81,67 persen di 2023 dan bertahan di 81,49 persen pada tahun 2024. Indikator ini dibangun dari pengukuran kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta konsistensi dalam penerapan regulasi kearsipan di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, kinerja layanan kearsipan di Kulon Progo menunjukkan adanya komitmen terhadap tata kelola arsip yang modern dan berstandar nasional. Namun demikian, tantangan ke depan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola arsip, penguatan infrastruktur arsip statis dan dinamis, serta percepatan transformasi digital untuk memastikan ketersediaan arsip yang andal, mudah diakses, dan mendukung efisiensi birokrasi.

Tabel 2.1.4.4.X-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Kearsipan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
KEARSIPAN											
	2.w.1	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional**		%	**33,66**	**33,66**	**40,32**	**49,60**	**59,48**		
			Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip			*33,66*	*40,32*	*49,60*	*59,48*	*Disperpusip*	
	2.w2	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat**		%	**78,17**	**78,17**	**83,33**	**81,67**	**81,49**		
			Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK			*78,17*	*83,33*	*81,67*	*81,49*	*Disperpusip*	

2.1.4.4.Y Kelautan dan Perikanan

Realisasi capaian Indikator Kinerja Kunci untuk fokus layanan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil, sebagaimana tergambarkan secara lengkap dalam Tabel 2.1.4.4.Y-1. Indikator kinerja kunci yang digunakan adalah jumlah total produksi perikanan, mencakup perikanan tangkap dan budidaya, dengan satuan ton. Selama lima tahun terakhir, produksi perikanan mengalami kenaikan dari 18.791,6 ton pada tahun 2020 menjadi 19.158,66 ton pada tahun 2024.

Kinerja tersebut ditopang oleh dua elemen utama, yakni produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya konsisten menjadi penyumbang terbesar, dengan capaian yang meningkat dari 16.666,03 ton pada tahun 2020 menjadi 16.968,63 ton pada tahun 2024. Sementara itu, produksi perikanan tangkap juga menunjukkan kestabilan, meskipun dengan fluktuasi kecil dari 2.125,57 ton pada tahun 2020 menjadi 2.190,03 ton pada tahun 2024.

Berdasarkan data pada Tabel 2.1.4.4.Y-2, cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan capaian yang fluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dimana 11 dari 31 kelompok nelayan mendapat bantuan dari Pemda. Selanjutnya pada persentase pemanfaatan lahan budidaya ikan, menandai bahwasannya pemanfaatan lahan budidaya ikan di Kabupaten Kulon Progo perlu mendapat sorotan agar dapat mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia. Sementara itu sebagai pelengkap, data jumlah nelayan per kapanewon didominasi oleh Kapanewon Temon dengan 78 orang, Kapanewon Wates dengan 43 orang dan Kapanewon Galur dengan 45 orang.

Tren data tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan, khususnya pada subsektor budidaya. Capaian ini mencerminkan keberlanjutan upaya peningkatan kapasitas produksi, penguatan kelembagaan pembudidaya ikan, serta pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Ke depan, peningkatan kualitas infrastruktur produksi, penguatan akses pasar, serta adopsi teknologi tepat guna menjadi faktor kunci dalam mendorong produktivitas dan daya saing sektor ini secara berkelanjutan.

Tabel 2.1.4.4.Y-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Kelautan dan Perikanan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi		ton	18.791,60	18.889,06	18.904,35	18.987,29	19.158,66		(sumber data: one data KKP)
			Produksi ikan budidaya (ton)		*16.666,03*	*16.699,00*	*16.714,00*	*16.803,44*	*16.968,63*		
			Produksi ikan tangkap (ton)		*2.125,57*	*2.190,06*	*2.190,35*	*2.183,85*	*2.190,03*		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kulon Progo, 2025

Tabel 2.1.4.4.Y-2 Pembinaan Nelayan dan Pemanfaatan Lahan Budidaya Perikanan, Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**	**%**	**16,13**	**12,90**	**35,48**	**23,68**	**4,17**
	Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun ke-n	*Kelompok*	*5,00*	*4,00*	*11,00*	*9,00*	*2,00*
	Jumlah Kelompok Nelayan	*Kelompok*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*38,00*	*48,00*
2	**Persentase Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan**	**%**	**0,62**	**0,61**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
	Pemanfaatan Lahan Budidaya Ikan	*ha*	*140,18*	*138,19*	*138,51*	*137,06*	*137,18*
	Potensi Lahan Budidaya Ikan	*ha*	*22.759,00*	*22.759,00*	*22.759,00*	*22.759,00*	*22.759,00*

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kulon Progo, 2025

2.1.4.4.Z Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu pilar penggerak ekonomi daerah yang terus didorong melalui strategi pemulihan pasca pandemi dan penguatan daya saing destinasi. Evaluasi terhadap kinerja sektor ini dilakukan berdasarkan sejumlah indikator kinerja kunci yang mencerminkan dinamika pertumbuhan wisatawan, tingkat pemanfaatan fasilitas akomodasi, serta kontribusi ekonomi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran lengkap capaian kinerja sektor pariwisata selama periode 2020–2024 disajikan pada Tabel 2.1.4.4.Z-1.

Dimulai dari indikator kunci pertama, yakni persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan, yang sejak tahun 2022 mulai dapat dihitung secara akurat seiring dengan perbaikan sistem pencatatan kategori wisatawan domestik dan mancanegara. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 22.277%, yang mencerminkan lonjakan pasca pembukaan pembatasan mobilitas internasional. Namun demikian, tren tersebut tidak sepenuhnya berkelanjutan, dengan pertumbuhan menurun menjadi 468% pada tahun 2023 dan mengalami kontraksi hingga -30,25% pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya penguatan strategi promosi wisata internasional serta perbaikan aksesibilitas dan pelayanan bagi pasar wisatawan mancanegara.

Sementara itu, pertumbuhan perjalanan wisatawan nusantara menunjukkan tren pemulihan yang lebih stabil. Setelah mengalami kontraksi tajam sebesar -45,55% pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19,* jumlah wisatawan domestik mulai meningkat signifikan pada tahun 2022 (72,07%) dan tetap tumbuh meskipun melambat pada tahun 2023 (22,62%) dan tahun 2024 (0,31%). Fluktuasi ini mencerminkan adanya ketergantungan pariwisata lokal terhadap kondisi eksternal, sekaligus mengindikasikan perlunya inovasi dalam pengembangan dan diversifikasi pasar wisata lokal.

Tingkat hunian akomodasi sebagai indikator keterisian kamar juga menunjukkan fluktuasi, dari 7,9% pada masa awal pandemi tahun 2020, meningkat hingga 39,59% pada 2021, namun secara bertahap menurun hingga 23,37% pada 2024. Penurunan tersebut di tengah peningkatan jumlah kamar yang tersedia menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, sehingga perlu dilakukan pengaturan kapasitas serta penguatan strategi pemasaran destinasi dan jasa akomodasi.

Dari sisi kontribusi ekonomi, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan tren yang cenderung positif, meningkat dari 3,44% pada 2020 menjadi 3,88% pada 2024. Tren ini merefleksikan peningkatan nilai tambah sektor pariwisata terhadap total perekonomian daerah, meskipun pertumbuhannya cenderung moderat. Indikator ini penting sebagai tolok ukur efektivitas program peningkatan kualitas destinasi, penguatan SDM pariwisata, dan integrasi rantai pasok lokal.

Selanjutnya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024, mencapai 8,12% dibandingkan hanya 1,72% pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan tajam pendapatan dari sektor pariwisata, khususnya dari retribusi objek wisata dan jasa layanan terkait. Hal ini menjadi sinyal positif terhadap upaya optimalisasi penerimaan daerah dari subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata, serta perlu dipertahankan melalui sistem retribusi yang transparan dan digitalisasi layanan destinasi.

Secara keseluruhan, evaluasi atas lima indikator utama ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, tren pemulihan dan kontribusi ekonomi telah berada pada jalur yang relatif progresif. Tantangan ke depan mencakup perlunya peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, pemulihan daya tarik destinasi, serta peningkatan kapabilitas pelaku pariwisata lokal dalam menghadapi persaingan regional dan global.

Tabel 2.1.4.4.Z-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pariwisata

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PARIWISATA											
	3.b.1	**Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan**		**%**	**n/a**	**n/a**	**22.277,78**	**468,97**	**-30,26**		**Perhitungan Kategorisasi antara jumlah wisnus dan wisman, baru dimulai per tahun 2022. Sehingga menyebabkan data tahun 2020-2021 n/a**
			Jumlah wisatawan mancanegara tahun n-1		*n/a*	*9,00*	*2.005,00*	*9.445,00*	*-3.467,00*	*Dispar*	
			Jumlah wisatawan mancanegara tahun ke-n		*0,00*	*9,00*	*2.014,00*	*11.459,00*	*7.992,00*	*Dispar*	
	3.b.2	**Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota**		**%**	**-45,55**	**-6,22**	**72,07**	**22,62**	**0,31**		**Adanya pandemi covid-19 menyebabkan penurunan drastis ditahun 2020. Kemudian kembali pulih pada tahun 2021**
			Jumlah wisatawan nusantara tahun n-1		*-808.441,00*	*-60.140,00*	*653.132,00*	*352.723,00*	*5.912,00*	*Dispar*	
			Jumlah wisatawan nusantara tahun ke-n		*966.432,00*	*906.292,00*	*1.559.424,00*	*1.912.147,00*	*1.918.059,00*	*Dispar*	*Jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2019 adalah 1.774.873 orang*
	3.b.3	**Tingkat Hunian Akomodasi**		**%**	**7,90**	**39,59**	**35,29**	**34,77**	**23,37**	**Dispar**	
			Jumlah kamar yang terjual			30.631,00	43.640,00	79.228,00	89.655,00		
			Jumlah kamar yang tersedia			*77.380,00*	*123.644,00*	*227.865,00*	*383.615,00*	*Dispar*	
	3.b.4	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku**		**%**	**3,44**	**3,64**	**3,81**	**3,77**	**3,88**		
			Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku			*453,73*	*544,72*	*597,42*	*655,55*	*Dispar*	
			Total PDRB harga berlaku			*12.443,06*	*14.303,54*	*15.847,21*	*16.911,59*	*Dispar*	
	3.b.5	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**		**%**	**1,31**	**1,07**	**1,67**	**1,72**	**8,12**		
			Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata			*3.282.444.000,00*	*5.131.499.000,00*	*5.587.290.000,00*	*29.091.057.495,00*	*Dispar*	
			Jumlah total PAD			*307.154.342.135,73*	*308.158.513.918,32*	*324.058.666.353,00*	*358.093.000.000,00*	*BKAD*	

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo, 2025

2.1.4.4.AA Pertanian

Kinerja pembangunan fokus pertanian di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam dua indikator kinerja kunci: produktivitas pertanian dan penurunan kasus penyakit hewan menular. Evaluasi lengkap terhadap capaian indikator ini dapat dilihat secara komprehensif pada Tabel 2.1.4.4.AA-1, yang menggambarkan tren capaian kinerja beserta elemen data penyusunnya dari tahun ke tahun.

Indikator produktivitas pertanian per hektar per tahun menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2021. Capaian tahun 2020 berada pada angka 765,35 ton per hektar per tahun, turun drastis menjadi 303,37 ton pada tahun 2021, namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan relatif stabil di kisaran 750 ton pada tahun 2022 hingga 2024. Penurunan tajam pada tahun 2021 dipengaruhi oleh gangguan iklim, kendala distribusi sarana produksi, atau gangguan pada fase panen. Meski demikian, tren setelahnya menunjukkan pemulihan produktivitas, yang mengindikasikan adanya adaptasi teknis dan peningkatan efisiensi lahan pertanian.

Di sisi lain, indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular menunjukkan dinamika ekstrem dengan variabilitas angka yang sangat tinggi. Capaian tahun 2022 melonjak hingga 315,92%, yang merupakan akibat dari kejadian luar biasa (KLB) penyakit hewan menular, khususnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabah secara nasional. Namun lonjakan kasus di tahun tersebut menyebabkan baseline yang tinggi, sehingga ketika jumlah kasus menurun tajam pada tahun 2023, justru tercatat sebagai capaian negatif ekstrem sebesar -2252,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan metode penghitungan indikator masih sangat dipengaruhi oleh kejadian luar biasa yang tidak rutin serta penyebaran penyakit yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, sektor pertanian Kulon Progo berada dalam posisi yang cukup adaptif terhadap tantangan teknis maupun gangguan biologis. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem monitoring yang lebih responsif dan indikator yang lebih representatif, khususnya dalam mengukur ketahanan produksi dan pengendalian penyakit hewan. Di masa mendatang, strategi penguatan kelembagaan petani, perlindungan risiko usaha tani, serta manajemen data pertanian yang presisi harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Tabel 2.1.4.4.AA-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pertanian

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PERTANIAN											
	3.c1	**Produktivitas pertanian per hektar per tahun**		**ton**	**765,35**	**303,37**	**777,41**	**750,04**	**751,59**		
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun			*80.920,01*	*196.817,00*	*194.459,37*	*191.506,14*	*Dispertapang*	
			Luas Panen			*26.674,00*	*25.317,00*	*25.926,39*	*25.480,20*	*Dispertapang*	
	3.c2	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**		**%**	**-12,73**	**-9,13**	**315,92**	**-2.252,98**	**-13,45**		**Penghitungan elemen data LPPD (Pembilang) menggunakan rumus: jumlah kejadian penyakit tahun berjalan (t) - tahun sebelumnya (t-1). Kondisi tersebut disebabkan adanya kejadian luar biasa penyakit hewan menular di tahun 2022 sehingga capaian pada tahun tersebut melonjak drastis, selanjutnya terjadi penurunan kejadian secara drastis pada tahun 2023 maka menyebabkan capaian di tahun 2023 juga menurun secara drastis.**
			Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2021			*855,45*	*2.455,68*	*-3.095,60*	*-549,00*	*Dispertapang*	
			Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2022			*777,32*	*777,32*	*137,40*	*4.083,00*	*Dispertapang*	

2.1.4.4.AB Ekonomi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pembangunan fokus ekonomi dan sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang spesifik pada isu pengelolaan energi terbarukan, khususnya pemanfaatan panas bumi. Gambaran lengkap atas capaian indikator kinerja kunci pada fokus Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.AB-1.

Indikator persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten/kota mengalami ketidakkonsistenan capaian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, indikator ini mencapai 100% karena seluruh perusahaan yang teridentifikasi saat itu telah mengantongi izin resmi. Namun pada tahun 2020, 2023, dan 2024, capaian tercatat 0%, sementara pada tahun 2022 bahkan tidak tersedia data yang dapat dipublikasikan (BUP). Fluktuasi ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan penafsiran dan metode pelaporan antara tim evaluasi daerah dan nasional, terutama terkait definisi perusahaan pemanfaatan serta status izin yang sah menurut peraturan terkini.

Secara substantif, perusahaan pemanfaatan panas bumi di wilayah Kabupaten Kulon Progo hanya berjumlah satu entitas selama periode evaluasi, dengan status perizinan yang sempat aktif namun kemudian mengalami pembaruan regulasi atau perubahan administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun indikator menunjukkan dinamika, kondisi lapangan cenderung stagnan karena terbatasnya jumlah pelaku usaha dalam subsektor energi panas bumi.

Evaluasi terhadap indikator ini menggarisbawahi pentingnya penyelarasan data dan pemutakhiran regulasi perizinan, terutama dalam sektor yang berada di bawah kewenangan lintas level pemerintahan. Ke depan, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, validasi rutin atas data perusahaan energi, serta fasilitasi investasi hijau yang adaptif terhadap peluang energi terbarukan di daerah. Pemerintah daerah juga perlu memperjelas peran dan kewenangan dalam mendukung percepatan pengembangan sumber daya mineral berbasis keberlanjutan dan kepatuhan terhadap kebijakan nasional.

Tabel 2.1.4.4.AB-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
ESDM											
	3.e	**Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kabupaten/kota**		**%**	**0,00**	**100,00**	**BUP**	**0,00**	**0,00**		**Variasi data dalam capaian kinerja dan elemen data tersebut disebabkan oleh perbedaan penafsiran tim evaluasi daerah maupun nasional dalam pengisiannya.**
			Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin			*1,00*	*1,00*	-	*0,00*	*DPMPTSP dan Bag. Pem*	
			Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi			*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*DPMPTSP dan Bag. Pem*	

2.1.4.4.AC Perdagangan

Kinerja pembangunan fokus perdagangan di Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan upaya bertahap dalam peningkatan formalitas usaha, ketepatan distribusi sarana produksi, serta penguatan perlindungan konsumen. Gambaran lengkap atas capaian indikator kinerja kunci pada fokus perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.AC-1.

Indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan memperlihatkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai 32,08%, setelah sempat berfluktuasi di bawah 15% pada tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan ini menunjukkan efektivitas penyempurnaan basis data izin dan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan resmi, khususnya untuk IUPP dan IUTM/SIUP Toko Swalayan. Namun demikian, perubahan cakupan data pada tahun-tahun awal evaluasi menyebabkan ketidakkonsistenan angka, sehingga ke depan diperlukan harmonisasi definisi dan klasifikasi dalam sistem informasi perizinan.

Indikator kinerja realisasi pupuk bersubsidi cenderung stabil namun masih berada di bawah 50%, dengan capaian tertinggi sebesar 47,86% pada tahun 2024. Kesenjangan antara Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan realisasi pupuk mengindikasikan perlunya optimalisasi rantai distribusi dan akurasi perencanaan kebutuhan kelompok tani. Tingkat penyerapan yang relatif rendah juga dapat dipengaruhi oleh faktor teknis, termasuk efektivitas pendataan, mekanisme distribusi, serta partisipasi petani dalam program subsidi.

Sementara itu, indikator persentase alat UTTP yang bertanda tera sah dan berlaku menunjukkan tren perbaikan moderat, naik dari 45,93% di tahun 2021 menjadi 56,58% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan peran aktif Unit Metrologi Legal dalam mendorong perlindungan konsumen dan kepastian transaksi perdagangan. Namun demikian, capaian tersebut masih menyisakan ruang peningkatan, terutama dalam hal jangkauan pelayanan tera ulang serta literasi pelaku usaha terhadap kewajiban metrologi.

Secara umum, capaian sektor perdagangan menunjukkan progres positif, namun belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat tantangan terkait akurasi pendataan, kesenjangan implementasi kebijakan di lapangan, dan perlunya penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Ke depan, diperlukan penguatan sistem perizinan berbasis digital, peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perdagangan, serta konsistensi pelayanan tera dan distribusi pupuk secara lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.1.4.4.AC-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perdagangan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PERDAGANGAN											
	3.f.1	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**		**%**	**12,04**	**2,13**	**7,30**	**12,48**	**32,08**		
			Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan			*236,00*	*870,00*	*1.642,00*	*68,00*	*Disdag*	*Pada tahun sebelumnya masih menghitung data pelaku usaha yang memperoleh izin (belum spesifik pada jenis izin IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)*
			Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota			*11.055,00*	*11.925,00*	*13.159,00*	*212,00*	*Disdag*	
	3.f.2	**Persentase kinerja realisasi pupuk**		**%**	**45,73**	**34,93**	**42,06**	**42,25**	**47,86**		
			Realisasi pupuk			*10.683,00*	*13.482,92*	*10.223,38*	*11.581,00*	*Dispertapang*	
			Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)			*30.581,00*	*32.054,25*	*24.194,59*	*24.195,68*	*Dispertapang*	
	3.f.3	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**		**%**	**62,98**	**45,93**	**49,55**	**56,51**	**56,58**		
			Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan			*4.915,00*	*5.302,00*	*6.103,00*	*6.128,00*	*Disdag*	
			Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota			*10.700,00*	*10.700,00*	*10.800,00*	*10.830,00*	*Disdag*	

2.1.4.4.AD Perindustrian

Evaluasi terhadap kinerja pembangunan fokus perindustrian Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam, baik dari sisi pertumbuhan jumlah unit usaha, efektivitas regulasi perizinan, hingga kelengkapan basis data informasi industri. Gambaran lengkap atas capaian indikator kinerja kunci pada fokus ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.AD-1.

Capaian indikator pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) menunjukkan tren yang cenderung stagnan dan kurang stabil. Tahun 2020 mencatat rasio negatif sebesar -8,42%, mencerminkan penurunan jumlah IKM yang terdampak oleh tekanan pandemi. Meskipun terjadi pemulihan bertahap hingga mencapai 0,81% pada tahun 2024, tingkat pertumbuhannya masih relatif rendah dan menunjukkan perlunya dukungan fasilitasi yang lebih kuat, baik dari sisi pembiayaan, perizinan, maupun penguatan rantai nilai industri lokal.

Indikator pencapaian sasaran pembangunan industri sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) mencerminkan lonjakan signifikan, dari hanya 1% pada tahun 2022 menjadi 107,92% pada tahun 2024. Kenaikan tajam ini mencerminkan terbitnya dokumen RPIK sebagai acuan perencanaan pembangunan industri yang mulai diimplementasikan secara sistematis. Meskipun demikian, perbedaan persepsi dalam evaluasi pusat dan daerah sempat menjadi catatan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga ke depan diperlukan harmonisasi metodologi evaluasi yang lebih terintegrasi.

Sementara itu, efektivitas pengawasan terhadap izin industri menunjukkan pola fluktuatif. Indikator persentase hasil pemantauan terhadap izin usaha industri (IUI) besar mencapai capaian penuh (100%) pada tahun 2021 dan 2023, tetapi anjlok drastis menjadi hanya 0,6% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan perubahan metode penghitungan penyebut, yang pada tahun 2024 mencakup seluruh izin yang masih berlaku, bukan hanya izin yang diterbitkan tahun berjalan. Kondisi serupa juga terjadi pada indikator pemantauan izin perluasan industri (IPUI) dan izin kawasan industri (IUKI/IPKI), yang selama beberapa tahun tidak menunjukkan aktivitas berarti karena belum diterbitkannya izin-izin tersebut secara substansial di Kabupaten Kulon Progo.

Indikator tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini menunjukkan perbaikan pada tahun terakhir evaluasi, meningkat dari 95 menjadi 115 data informasi pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat basis data industri sebagai landasan kebijakan berbasis bukti *(evidence-based policy),* meskipun masih perlu ditingkatkan dalam hal keterpaduan data antar sektor serta keterbukaan data kepada publik dan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, capaian sektor perindustrian menunjukkan kemajuan dalam aspek perencanaan strategis dan penguatan kelembagaan, tetapi masih menghadapi tantangan serius pada sisi pengembangan industri riil dan efektivitas pengawasan perizinan. Ke depan, strategi perindustrian perlu difokuskan pada fasilitasi pertumbuhan IKM, integrasi pengawasan berbasis sistem informasi, serta akselerasi implementasi RPIK yang selaras dengan potensi unggulan daerah.

Tabel 2.1.4.4.AD-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perindustrian

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PERINDUSTRIAN											
	3.g.1	**Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota**		**rasio**	**-8,42**	**0,70**	**1,66**	**0,73**	**0,81**		
			Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2024 - jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023		-	*15.481,00*	*15.847,00*	*15.962,00*	*130,00*	*Disdag*	*Elemen data 2024 untuk data pembilang diisi hasil pengurangan antara tahun N - (N-1) (data tahun N = 16.092), sementara elemen data tahun sebelumnya hanya diisi data Tahun N*
			Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2023			*115.589,00*	*15.589,00*	*15.847,00*	*15.962,00*	*Disdag*	
	3.g.2	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK**		**%**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**77,02**	**107,92**		
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		-	*0,00*	*1,00*	*77,02*	*107,92*	*Disdag*	*Pada tahun 2020 dan 2021 belum memiliki Dokumen RPIK dan setelahnya masih terjadi perbedaan persepsi baik tim evaluasi pusat maupun daerah sehingga angka capaian tiap tahunnya berbeda jauh. Sebaiknya berpedoman dari yg th terakhir*
	3.g.3	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait**		**%**	**0,00**	**100,00**	**87,37**	**100,00**	**0,60**		
			Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan		-	*2,00*	*83,00*	*47,00*	*65,00*	*Disdag*	
			Jumlah izin yang dikeluarkan		-	*2,00*	*95,00*	*47,00*	*10.832,00*	*DPMPTSP*	*Pada tahun-tahun sebelumnya, penyebut indikator hanya menghitung jumlah izin yang diterbitkan pada tahun berjalan (tahun N). Namun, pada tahun 2024, perhitungan berubah dengan menghitung jumlah izin yang masih berlaku.*

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
	3.g.4	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait**		**%**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan		-	-	-	*0,00*	*0,00*	*Disdag*	*Sampai dengan tahun 2024 belum pernah ada Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, sehingga belum pernah dilaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap IPUI Kecil dan Menengah.*
			Jumlah izin yang dikeluarkan			-	-	*1,00*	*1,00*	*DPMPTSP*	
	3.g.5	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota**		**%**	**0,00**	**100,00**	**BUP**	**0,00**	**0,00**		
			Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan		-	-	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*Disdag*	*Sampai dengan tahun 2024 belum pernah ada Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang diterbitkan, sehingga belum pernah dilaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap IPUI Kecil dan Menengah.*
			Jumlah izin yang dikeluarkan			-	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*DPMPTSP*	
	3.g.6	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**		**Jumlah informasi**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**115,00**		
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			*95,00*	*95,00*	*95,00*	*115,00*	*Disdag*	

2.1.4.4.AE Perencanaan dan Keuangan

Evaluasi terhadap fokus Perencanaan dan Keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 memberikan gambaran menyeluruh atas efektivitas perencanaan fiskal, efisiensi pengelolaan anggaran, penguatan kelembagaan pengawasan internal, serta konsistensi dalam pencapaian tata kelola keuangan yang akuntabel. Gambaran lengkap dari capaian indikator-indikator kunci pada fokus ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.AE-1.

Indikator rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan dinamika yang cukup mencolok. Setelah meningkat dari 21,29% pada tahun 2020 menjadi puncaknya di 53,26% pada tahun 2022, capaian indikator ini kemudian mengalami penurunan tajam hingga mencapai 19,27% di tahun 2024. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai penyesuaian belanja, baik dari sisi perencanaan kebutuhan pegawai, perubahan struktur belanja pegawai, maupun dinamika formasi ASN di luar sektor prioritas pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tren stabil dan cenderung meningkat secara gradual dari 15,2% di tahun 2020 menjadi 20,4% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan kemampuan fiskal daerah yang membaik dan peran strategis PAD dalam mendukung kemandirian fiskal. Kendati demikian, capaian ini tetap menempatkan PAD pada porsi yang relatif kecil dibanding total pendapatan, sehingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD harus terus diperkuat ke depan.

Pada aspek pengendalian intern, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan stabilitas di level 3 sepanjang tahun 2020–2024, dengan pengecualian penurunan sementara ke level 2 pada tahun 2021. Level 3 mengindikasikan bahwa pengendalian intern telah dilaksanakan secara formal dan terdokumentasi, meskipun belum sepenuhnya menjadi budaya organisasi. Kinerja ini berjalan seiring dengan peningkatan kapabilitas APIP, yang mengalami kenaikan moderat dari 3,0 di tahun 2020 menjadi 3,15 pada tahun 2023, sebelum kembali ke nilai 3,0 di tahun 2024. Penurunan ini perlu menjadi catatan bagi penguatan peran APIP, terutama dalam mendukung kualitas perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan program.

Indikator rasio belanja urusan pemerintahan umum dikurangi belanja transfer terhadap total belanja menunjukkan kecenderungan naik signifikan dari 63,03% (2020) hingga puncaknya di 88,36% (2023), sebelum menurun kembali menjadi 70,88% pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan dominasi pengeluaran untuk urusan pemerintahan umum dalam struktur APBD, yang perlu ditelaah secara lebih dalam agar tidak menggeser proporsi belanja yang seharusnya dialokasikan untuk layanan publik yang langsung menyentuh masyarakat.

Capaian indikator opini laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut berada pada nilai maksimal (10) sejak tahun 2022, menandakan konsistensi dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tren positif ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah telah berjalan baik dan perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas data, kepatuhan prosedural, dan integritas tata kelola anggaran.

Secara umum, capaian indikator fokus Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Kulon Progo mencerminkan arah positif dalam pengelolaan fiskal yang akuntabel, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan volatilitas tinggi akibat

tekanan eksternal maupun penyesuaian struktural internal. Ke depan, penguatan kapasitas fiskal daerah, efisiensi belanja pegawai, serta pengendalian keuangan yang lebih adaptif dan terintegrasi menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan berbasis tata kelola yang baik.

Tabel 2.1.4.4.AE-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Perencanaan dan Keuangan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PERENCANAAN DAN KEUANGAN											
	4.a.1	**Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan**		**%**	**21,29**	**33,91**	**53,26**	**37,17**	**19,27**		
			Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan			*215.593.042.826,00*	*358.221.929.224,00*	*252.165.999.603,00*	*345.029.008.248,16*	*BKAD*	
			Total belanja APBD			*635.746.691.953,00*	*672.547.518.676,00*	*678.456.114.751,00*	*1.790.599.744.210,03*	*BKAD*	
	4.a.2	**Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**%**	**15,20**	**18,85**	**20,14**	**19,11**	**20,40**		
			Jumlah PAD			*307.154.342.135,73*	*308.158.513.918,32*	*324.053.666.353,01*	*358.092.879.847,53*	*BKAD*	
			Jumlah Pendapatan pada APBD			*1.629.730.063.142,73*	*1.530.235.035.264,30*	*1.695.973.944.128,01*	*1.755.531.869.338,53*	*BKAD*	
	4.a.3	**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**		**nilai**	**3,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**		
			Tingkat Maturitas SPIP			*2,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*Irda*	
	4.a.4	**Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**		**nilai**	**3,00**	**3,00**	**3,08**	**3,15**	**3,00**		
			Tingkat Kualitas APIP			*3,00*	*3,08*	*3,15*	*3,00*	*Irda*	
	4.a.5	**Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)**		**%**	**63,03**	**68,49**	**85,14**	**88,36**	**70,88**		
			Total Belanja Urusan Pemerintahan – transfer expenditures			*1.027.327.180.781,10*	*1.303.697.108.915,27*	*1.607.283.942.152,73*	*1.269.247.982.185,80*	*BKAD*	
			Total belanja APBD			*1.499.994.321.770,10*	*1.531.202.507.232,27*	*1.818.996.970.903,00*	*1.790.599.744.210,03*	*BKAD*	
	4.a.6	**Opini Laporan Keuangan**		**nilai**	**7,00**	**8,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**		
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota 10 Tahun terakhir			*8,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*BKAD*	

2.1.4.4.AF Pengadaan

Evaluasi terhadap fokus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang kompleks dalam hal efektivitas pelaksanaan, efisiensi belanja, dan dukungan terhadap pelaku ekonomi lokal. Capaian kinerja indikator-indikator utama yang digunakan dalam menilai efektivitas sistem pengadaan dirinci secara menyeluruh pada Tabel 2.1.4.4.AF-1, yang menyajikan elemen data pembentuk indikator beserta tren capaiannya selama lima tahun terakhir.

Indikator pertama, yaitu persentase jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya dan ditandatangani pada kuartal pertama, secara konsisten menunjukkan angka 0% sepanjang periode evaluasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya proyek konstruksi multiyears pada kurun waktu tersebut. Dengan demikian, kinerja indikator ini lebih bersifat administratif dan cenderung tidak mencerminkan efektivitas keseluruhan sistem pengadaan konstruksi secara aktual.

Pada aspek kompetisi dalam pengadaan, persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif masih menunjukkan capaian yang relatif rendah. Meskipun sempat meningkat secara nominal dari 1,55% di tahun 2021 menjadi 1,8% pada 2023, angka tersebut kembali menurun drastis menjadi hanya 0,15% pada 2024. Penurunan tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat penggunaan metode kompetitif merupakan indikator penting bagi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Koreksi metodologi perhitungan juga sempat terjadi, khususnya pada tahun 2020, sehingga membatasi validitas perbandingan lintas tahun secara penuh.

Indikator rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan menunjukkan tren positif dan mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan bahwa seluruh belanja operasi dan modal telah terfasilitasi melalui sistem pengadaan barang/jasa. Kenaikan rasio ini patut diapresiasi sebagai hasil dari perbaikan manajemen pengadaan dan integrasi sistem perencanaan belanja daerah dengan platform pengadaan elektronik.

Sementara itu, indikator peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-Koperasi) dalam pelaksanaan pengadaan menunjukkan capaian yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami pertumbuhan positif pada 2021 dan 2022, capaian indikator ini menurun tajam hingga -9,43% pada 2023, sebelum akhirnya melesat ke angka 68,6% di tahun 2024. Penurunan tajam pada 2023 disebabkan oleh perubahan rumus yang menggunakan pendekatan selisih nilai tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya, yang mencerminkan bukan hanya hasil pengadaan, tetapi juga konsistensi kebijakan prioritas lokal tahun ke tahun. Kinerja positif pada 2024 merupakan sinyal baik dari penguatan keberpihakan terhadap produk dalam negeri dan pelaku UMK-Koperasi, serta pemanfaatan katalog lokal dan e-purchasing.

Secara umum, pengelolaan pengadaan di Kabupaten Kulon Progo telah mengalami perbaikan dalam aspek efisiensi belanja dan peningkatan peran pelaku ekonomi lokal, namun masih menghadapi tantangan serius dalam hal peningkatan kualitas kompetisi dan konsistensi perumusan indikator. Perluasan penggunaan metode kompetitif, penguatan monitoring evaluasi berbasis data, serta pengarusutamaan produk dalam negeri perlu menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pengadaan ke depan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, inklusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 2.1.4.4.AF-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Pengadaan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
PENGADAAN											
	4.b.1	**Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama**		%	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**		
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*Bag. PBJ*	*Data kosong pada tahun 2020-2022 tersebut disebabkan oleh Angka capaian pada indikator tersebut adalah 0 (nol) karena pada tahun-tahun tersebut tidak terdapat proyek konstruksi yang bersifat multiyears.*
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022			*53,00*	*78,00*	*120,00*	*60,00*	*Bag. PBJ*	
	4.b.2	**Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif**		%	**192,50**	**1,55**	**1,75**	**1,80**	**0,15**		
			Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif			*90,00*	*105,00*	*132,00*	*60,00*	*Bag. PBJ*	*Pada tahun 2020 tersebut untuk penyebut masih menggunakan indikator Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif. Baru tahun berikutnya diubah menjadi jumlah seluruh pengadaan*
			Jumlah seluruh pengadaan			*5.812,00*	*5.994,00*	*7.321,00*	*39.331,00*	*Bag. PBJ*	
	4.b.3	**Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan**		%	**9,55**	**65,11**	**20,50**	**46,88**	**100,00**		
			Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan			*386.718.510.598,00*	*279.127.286.336,00*	*707.877.654.524,73*	*850.123.821.046,87*	*Bag. PBJ*	
			total belanja operasi dan modal			*593.928.851.934,05*	*1.361.318.009.558,30*	*1.509.892.815.285,73*	*850.123.821.046,87*	*Bag. PBJ*	
	4.b.4	**Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah**		%	**0,00**	**17,26**	**11,86**	**-9,43**	**68,60**		
			Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi			*57.623.545.315,00*	*46.430.215.545,00*	*-41.280.132.803,00*	*112.126.233.406,00*	*Bag. PBJ*	*Data minus pada tahun 2023 disebabkan oleh rumus pembilangnya adalah Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk*

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
			Tahun 2023								*Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1). Dan data Jumlah Nilai PBJ tahun N lebih rendah dibanding N-1*
			Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2024			*333.848.536.885,00*	*391.472.082.200,00*	*437.902.000.000,00*	*163.457.823.802,00*	*Bag. PBJ*	

2.1.4.4.AG Kepegawaian

Gambaran capaian indikator kinerja kepegawaian secara rinci disajikan pada Tabel 2.1.4.4.AG-1. Tabel tersebut memuat elemen data komposit LPPD yang digunakan dalam penghitungan setiap indikator serta menunjukkan perkembangan nilai capaian selama lima tahun terakhir sebagai dasar dalam menyusun strategi pembangunan kepegawaian ke depan.

Kinerja Fokus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam hal kualitas pendidikan, profesionalisme jabatan fungsional, dan kompetensi teknis. Evaluasi terhadap indikator kinerja kunci menunjukkan dinamika capaian yang menuntut penguatan sistem manajemen talenta serta penyusunan strategi perencanaan kebutuhan ASN yang lebih adaptif dan berbasis data.

Indikator rasio pegawai dengan pendidikan tinggi terhadap pegawai pendidikan menengah dan dasar (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) menunjukkan fluktuasi cukup tajam selama lima tahun terakhir. Setelah mencatat rasio sangat tinggi pada tahun 2020 (112,16%), angka ini sempat menurun drastis pada 2021, kemudian mengalami pemulihan hingga mencapai 64,08% pada tahun 2024. Pergerakan indikator ini dipengaruhi oleh dinamika jumlah PNS non-guru dan non-nakes serta mobilitas kepegawaian akibat pensiun dan mutasi. Penurunan proporsi pegawai berpendidikan tinggi menjadi perhatian strategis yang perlu direspons melalui kebijakan peningkatan kapasitas SDM berbasis pendidikan berkelanjutan, termasuk skema beasiswa dan pelatihan formal.

Pada aspek rasio jabatan fungsional terhadap total PNS non-guru dan non-nakes, terdapat tren peningkatan moderat dari 16,51% pada 2020 menjadi 28,74% pada tahun 2024. Capaian ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang mendorong perampingan jabatan struktural dan peningkatan jabatan fungsional, khususnya pasca restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Namun demikian, peningkatan kuantitas jabatan fungsional ini masih memerlukan dukungan penguatan kualitas, terutama dalam hal kompetensi dan produktivitas pegawai.

Hal tersebut tercermin pada indikator rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi, yang menunjukkan tren penurunan dari 85,28% pada 2020 menjadi hanya 46,31% pada 2024. Penurunan ini patut menjadi perhatian, mengingat sertifikasi kompetensi menjadi prasyarat penting dalam menjamin akuntabilitas dan profesionalitas jabatan fungsional. Kesenjangan antara jumlah jabatan fungsional dan jumlah yang tersertifikasi menandakan perlunya upaya percepatan sertifikasi, pelatihan teknis, serta kemitraan dengan lembaga pelatihan nasional untuk mendukung peningkatan kapasitas ASN secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, fokus kepegawaian di Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan arah transformasi kelembagaan menuju birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berbasis kinerja. Namun demikian, ke depan dibutuhkan kebijakan manajemen SDM yang lebih progresif dan sistematik dalam menyikapi perubahan komposisi pegawai, kebutuhan kompetensi baru, dan tantangan digitalisasi layanan publik.

Tabel 2.1.4.4.AG-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Kepegawaian

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
KEPEGAWAIAN											
	4.c.1	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**		**%**	**112,16**	**21,80**	**62,18**	**65,40**	**64,08**		
			Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas			*1.257,00*	*1.312,00*	*1.310,00*	*1.149,00*	*BKPSDM / Bag. Pem*	
			Total seluruh PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			*5.767,00*	*2.110,00*	*2.003,00*	*1.793,00*	*BKPSDM / Bag. Pem*	
	4.c.2	**Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**		**%**	**16,51**	**25,30**	**25,36**	**25,36**	**28,74**		
			Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)			*543,00*	*535,00*	*508,00*	*555,00*	*BKPSDM / Bag. Pem*	
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			*2.146,00*	*2.110,00*	*2.003,00*	*1.931,00*	*BKPSDM / Bag. Pem*	
	4.c.3	**Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**		**%**	**85,28**	**68,69**	**65,98**	**73,82**	**46,31**		
			Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi			*373,00*	*353,00*	*375,00*	*257,00*	*BKPSDM / Bag. Pem*	
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			*543,00*	*535,00*	*508,00*	*555,00*	*BKPSDM / Bag. Pem*	

2.1.4.4.AH Manajemen Keuangan

Kinerja Fokus Manajemen Keuangan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 menunjukkan tren perbaikan yang signifikan, khususnya dalam hal efisiensi pelaksanaan anggaran dan penguatan pengelolaan fiskal daerah. Evaluasi terhadap beberapa indikator kunci fokus ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berhasil menekan deviasi antara anggaran dan realisasi secara konsisten, serta menunjukkan tata kelola keuangan yang lebih terkendali dari tahun ke tahun. Rincian lengkap Kinerja Fokus Manajemen Keuangan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2020–2024 terdapat pada tabel 2.1.4.4.AH-1.

Indikator deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam APBD menunjukkan penurunan deviasi yang sangat tajam dari 64,76% pada tahun 2020 menjadi hanya 0,83% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan peningkatan akurasi dalam proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja, sekaligus mengindikasikan peningkatan disiplin fiskal dan efektivitas pelaksanaan program kerja di seluruh perangkat daerah. Nilai realisasi belanja yang terus meningkat dari Rp 1,49 triliun (2021) menjadi Rp 1,79 triliun (2024), dengan deviasi yang semakin kecil terhadap total belanja yang direncanakan, menegaskan tercapainya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD juga menunjukkan tren membaik. Meskipun sempat mengalami deviasi tinggi pada tahun 2021 (30,38%) dan menurun signifikan pada tahun 2024 menjadi 5,5%, hal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam memperkirakan potensi pendapatan secara lebih realistis. Nilai absolut realisasi PAD meningkat dari Rp 307 miliar (2021) menjadi Rp 358 miliar (2024), sementara target PAD juga meningkat, menunjukkan pertumbuhan kapasitas fiskal yang lebih baik. Membaiknya rasio deviasi PAD merupakan indikasi positif terhadap akurasi target PAD dan efektivitas mekanisme pemungutan yang lebih adaptif terhadap dinamika perekonomian daerah.

Pada aspek pengelolaan aset daerah, nilai indikator *Assets Management* tetap konsisten pada angka 4 dari tahun 2020 hingga 2024. Konsistensi skor ini menandakan keberlanjutan praktik tata kelola aset yang baik, termasuk dalam pencatatan, inventarisasi, serta optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah. Stabilitas skor ini juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi aset, meskipun masih diperlukan penguatan sistem digitalisasi pengelolaan aset untuk mendorong efisiensi dan integrasi antar unit kerja.

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya atau yang dikenal sebagai rasio SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), menunjukkan kecenderungan menurun dari 9,46% pada tahun 2020 menjadi 4,39% pada tahun 2024. Penurunan rasio SiLPA ini menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang semakin tinggi, dengan nilai SiLPA yang menurun dari Rp 216 miliar (2021) menjadi Rp 77 miliar (2024). Ini mengindikasikan bahwa belanja daerah telah semakin tepat sasaran dan efisien, serta mengurangi potensi dana menganggur yang tidak segera dimanfaatkan untuk pelayanan publik.

Secara umum, capaian fokus Manajemen Keuangan selama periode 2020–2024 menggambarkan penguatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan fiskal daerah, didukung oleh sistem informasi keuangan yang semakin solid dan perbaikan kapasitas kelembagaan. Meskipun menunjukkan kemajuan yang nyata, tantangan yang perlu diantisipasi ke depan antara lain adalah menjaga kestabilan pertumbuhan PAD, meningkatkan integrasi manajemen aset daerah, serta memastikan bahwa efisiensi pelaksanaan anggaran tetap

sejalan dengan kualitas dan hasil pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Tabel 2.1.4.4.AH-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Manajemen Keuangan

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
MANAJEMEN KEUANGAN											
	4.d.1	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD**		**%**	**64,76**	**97,17**	**26,07**	**4,40**	**0,83**		
			Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi			*1.499.994.321.770,05*	*1.531.202.507.232,27*	*1.694.765.786.617,73*	*1.790.599.744.210,03*	*BKAD*	*Definisi Operasional Pembilang: Nilai realisasi belanja daerah dalam APBD tahun pelaporan yang merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus.*
			Total belanja APBD dikurangi satu			*1.543.635.179.323,00*	*1.214.553.641.788,00*	*1.623.397.757.352,00*	*1.775.945.264.405,00*	*BKAD*	*Definisi Operasional Penyebut: Total anggaran belanja APBD tahun pelaporan sebelum perubahan.*
	4.d.2	**Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD**		**%**	**82,16**	**30,38**	**16,17**	**15,19**	**5,50**		
			Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi			*307.154.342.135,73*	*308.158.513.918,32*	*324.053.666.353,01*	*358.092.879.847,53*	*BKAD*	*Definisi Operasional Pembilang: Nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus.*
			Total PAD dalam APBD dikurangi satu			*235.572.599.824,00*	*265.273.403.802,00*	*281.331.590.510,00*	*339.425.088.390,00*	*BKAD*	*Definisi Operasional Penyebut: Total anggaran PAD dalam APBD tahun pelaporan*

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
											sebelum perubahan.
	4.d.3	**Assets Management**	**Total Assets Management**	**nilai**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**BKAD**	
	4.d.4	**Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya**		**%**	**9,46**	**14,42**	**11,02**	**7,87**	**4,39**		
			Nilai realisasi SiLPA			*216.357.696.129,17*	*165.274.234.829,22*	*120.449.064.138,50*	*77.980.775.320,00*	*BKAD*	
			Total belanja anggaran tahun sebelumnya			*1.500.039.941.735,10*	*1.499.994.321.770,05*	*1.531.202.507.232,27*	*1.775.945.264.405,00*	*BKAD*	

2.1.4.4.AI Transparansi dan Partisipasi Publik

Selama periode 2020–2024, kinerja fokus transparansi dan partisipasi publik di Kabupaten Kulon Progo yang disajikan dalam tabel 2.1.4.4.AI-1 menunjukkan konsistensi dalam keterbukaan informasi, khususnya dalam aspek penyediaan informasi keuangan daerah dan sumber daya pelayanan publik. Capaian ini merupakan hasil penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis prinsip akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat. Gambaran lengkap capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.4.4.AI-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Transparansi dan Partisipasi Publik di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020–2024.

Capaian indikator "Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan" menunjukkan rasio di atas 90% sepanjang periode, dengan angka tertinggi tercapai pada tahun 2020 sebesar 107,02%. Meskipun terdapat fluktuasi, khususnya pada tahun 2023 dan 2024, hal ini lebih disebabkan oleh perbedaan penafsiran atas metode pengukuran indikator, dari sebelumnya berbasis unit (jumlah OPD) menjadi berbasis total belanja pelayanan publik yang dapat diakses publik melalui situs resmi pemerintah daerah. Penyesuaian metode ini secara substansi justru memperkuat keterbukaan data fiskal di tingkat operasional.

Sementara itu, indikator "Akses publik terhadap informasi keuangan daerah" secara konsisten menunjukkan capaian 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini didukung oleh keterpenuhan publikasi 12 dokumen keuangan strategis pada laman resmi Pemerintah Daerah, mulai dari dokumen perencanaan dan penganggaran hingga pelaporan keuangan dan opini audit. Ketersediaan dokumen tersebut menegaskan komitmen daerah terhadap keterbukaan informasi publik dan integritas fiskal.

Secara keseluruhan, kinerja transparansi dan partisipasi publik di Kabupaten Kulon Progo selama periode evaluasi telah menunjukkan tata kelola yang akuntabel, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance.* Ke depan, tantangan yang perlu dikelola mencakup penguatan literasi publik terhadap data keuangan, peningkatan kualitas visualisasi dan kemudahan akses data, serta konsistensi dalam metodologi evaluasi agar indikator tetap relevan dan terukur secara tepat.

Tabel 2.1.4.4.AI-1 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Fokus Transparansi dan Partisipasi Publik

FOKUS	NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	ELEMEN DATA LPPD	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN					OPD WALI DATA	KETERANGAN
					2020	2021	2022	2023	2024		
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK											
	4.e.1	**Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan**		**%**	**107,02**	**100,00**	**100,00**	**93,17**	**95,51**		
			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda			*42,00*	*42,00*	*1.694.765.786.617, 73*	*1.790.599.744.210, 03*	*BKAD dan Bag. Pem*	*Perbedaan angka pada tahun 2023 dan 2024 tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran atas indikator yang ada oleh tim evaluasi daerah/nasional. Pada awalnya indikator tsb dimaknai sebagai jumlah unit pelayanan yang menginformasikan anggaran dan belanja nya sehingga jumlahnya 42 (OPD). Namun pada perkembangannya indikator tsb dimaknai sebagai jumlah anggaran dan realisasi dari unit pelayanan yang kemudian bisa diakses di website pemda sehingga jumlahnya adalah anggaran dan realisasi APBD yang tersebar di 42 OPD tsb.*
			Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda			*42,00*	*42,00*	*1.818.996.970.903, 00*	*1.874.718.088.900, 00*	*BKAD dan Bag. Pem*	
	4.e.2	**Akses publik terhadap informasi keuangan daerah**		**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
			Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda			*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*BKAD dan Bag. Pem*	*Ke-12 dokumen tersebut adalah: Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD.*
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci			*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*BKAD dan Bag. Pem*	

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika pemerintahan daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan.

Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara "*revenue* dan *expenditure*". Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal *(fiscal sustainability)* daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak dapat dicukupi dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020-2024 mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran selama lima tahun terakhir, yang mencakup pencapaian pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Rincian capaian tersebut disajikan secara lengkap dalam Tabel 2.2.1-1 berikut.

Tabel 2.2.1-1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R(%)
Pendapatan	**1.579.693,19**	**1.629.729,79**	**1.530.236,28**	**1.695.996,92**	**1.755.011,58**	**2,84%**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	254.367,33	307.154,07	308.159,76	324.053,67	358.092,88	9,19%
Pendapatan Transfer	1.276.698,51	1.274.276,30	1.215.582,52	1.363.943,25	1.395.982,70	2,44%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48.627,35	48.299,42	6.494,00	8.000,00	936,00	-38,08%
Belanja	**1.591.170,76**	**1.499.954,32**	**1.531.202,51**	**1.694.771,93**	**1.778.569,82**	**2,99%**
Belanja Operasi	1.045.404,57	1.115.704,99	1.215.304,34	1.290.495,16	1.399.220,08	7,57%
Belanja Modal	322.430,92	202.257,02	146.013,67	219.397,65	188.155,12	-7,27%
Belanja Tak Terduga	54.408,44	3.432,98	3.047,01	1.092,33	2.536,79	-9,21%
Belanja Transfer	168.926,83	178.559,33	166.837,49	183.786,79	188.657,84	2,99%
Surplus / (Defisit)	-11.477,57	129.775,47	-966,22	1.224,99	-23.558,24	-895,34%
Pembiayaan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Penerimaan Pembiayaan	102.804,96	141.788,20	216.356,83	165.115,93	125.267,73	10,67%
Pengeluaran Pembiayaan	43.412,43	55.236,83	50.116,37	45.873,19	12.107,81	-16,03%
Pembiayaan Netto	59.392,53	86.551,37	166.240,46	119.242,74	113.159,92	26,11%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	47.914,96	216.326,83	165.274,23	120.467,73	89.601,68	68,79%

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 (diolah)

Tabel 2.2.1-1 menunjukkan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024, selama periode tersebut realisasi total pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,84 persen per tahun. Selama periode tersebut total realisasi pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2020, realisasi total pendapatan Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 1,58 triliun meningkat signifikan menjadi Rp 1,63 triliun pada tahun 2020. Realisasi pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga mencapai Rp 1,53 triliun. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan meningkat hingga mencapai Rp 1,70 triliun. Realisasi pendapatan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 hingga mencapai Rp 1,76 triliun

Realisasi belanja yang meliputi belanja operasi, modal, tak terduga, dan transfer mengalami peningkatan yakni mencapai rata-rata sebesar 2,99 persen per tahun, dari sebesar Rp 1,59 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1,78 triliun pada tahun 2024. Selama periode tersebut total realisasi belanja mengalami penurunan pada 2020-2021, namun kembali meningkat pada dua tahun berikutnya. Realisasi belanja ini dipengaruhi penurunan signifikan selama masa pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021 hingga 6,00 persen daripada tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari pola perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, terjadi defisit APBD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020, 2022, dan 2024. Sedangkan surplus anggaran terjadi pada tahun 2021 dan 2023. Pada tahun 2020 dan 2022 terjadi defisit anggaran berturut-turut sebesar Rp 11,48 miliar dan Rp 966,22 juta. Kemudian, pada tahun 2024, defisit anggaran mencapai Rp 23,56 miliar. Pada tahun 2021, surplus anggaran mencapai Rp 129,74 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi surplus anggaran sebesar Rp 1,22 miliar.

2.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kategorisasi pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

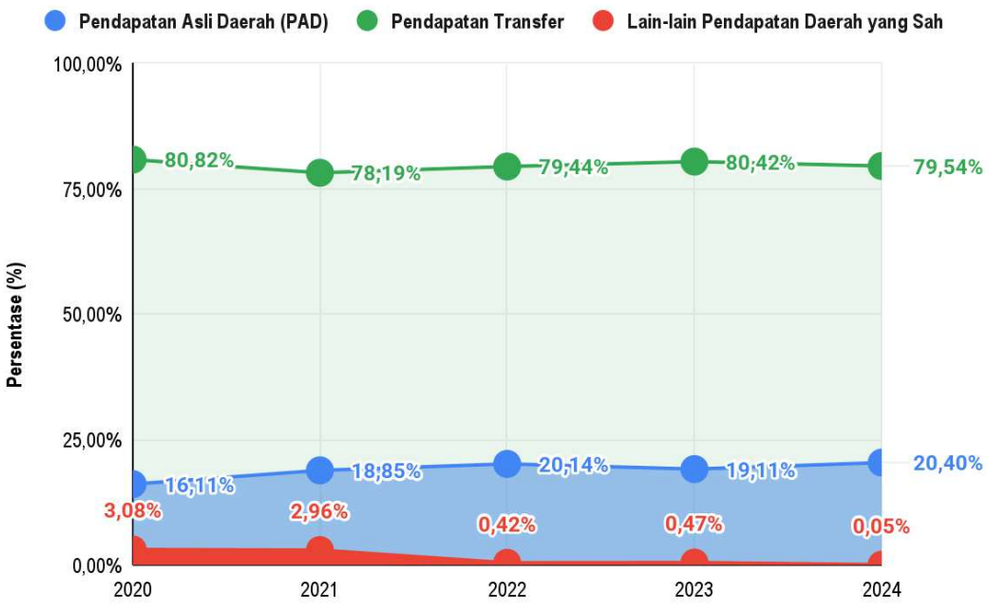
Tabel 2.2.1.1-1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R(%)
Pendapatan Daerah	**1.579.747,89**	**1.629.730,00**	**1.530.236,28**	**1.695.996,92**	**1.755.011,58**	**2,84%**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**254.422,03**	**307.154,00**	**308.159,76**	**324.053,67**	**358.092,88**	**9,18%**
Pajak Daerah	80.314,81	94.479,00	106.215,33	96.627,18	91.690,00	3,98%
Retribusi Daerah	8.877,08	8.137,00	11.115,78	12.060,32	215.270,00	430,43%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.652,22	13.245,00	15.652,12	18.348,27	19.880,00	12,11%
Lain-lain PAD yang Sah	152.577,92	191.293,00	175.176,52	197.017,90	31.250,00	-13,68%
Pendapatan Transfer	**1.276.698,51**	**1.274.276,00**	**1.215.582,52**	**1.363.943,25**	**1.395.982,70**	**2,44%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.018.059,40**	**1.139.961,00**	**1.045.394,30**	**1.148.566,33**	**-**	**-21,61%**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	258.639,11	134.315,00	**170.188,23**	**215.376,93**	-	-23,70%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	48.627,35	48.299	**6.494,00**	**8.000,00**	936	-38,08%
Pendapatan Hibah	48.627,35	7.100,00	**6.494,00**	**8.000,00**	936,00	-39,76%
Dana Darurat						
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		**41.199,00**				

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.2.1.1-1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020-2024 realisasi total pendapatan mengalami fluktuasi, dengan penurunan signifikan pada masa pandemi Covid 19. Pada 2020 realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan hingga 5,37 persen dari sebesar Rp 1,67 triliun pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 1,58 triliun. Tahun berikutnya, realisasi pendapatan kembali meningkat hingga mencapai Rp 1,63 triliun pada 2021. Realisasi pendapatan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga mencapai Rp 1,53 triliun. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan meningkat hingga mencapai Rp 1,70 triliun kemudian meningkat signifikan hingga Rp 1,76 triliun pada 2024. Secara keseluruhan pada periode 2020-2024, kontribusi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Kulon Progo masih berasal dari pendapatan transfer, khususnya dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah selama periode menunjukkan tren peningkatan. Selama periode 2020-2024 PAD mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,18 persen per tahun. Berdasarkan struktur PAD, Lain-lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan yang dominan dengan rata-rata kontribusi mencapai 51,40 persen pada 2020-2023. Adapun pada tahun 2024 terjadi penyesuaian rekening pendapatan dari sebagian penghasilan lain-lain PAD yang Sah menjadi pendapatan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, pada 2024, struktur PAD didominasi oleh pendapatan retribusi daerah. Peningkatan PAD khususnya pada potensi penerimaan melalui pajak dan retribusi tetap perlu diupayakan diantaranya melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan melalui digitalisasi. Selain itu, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan inovasi sumber penerimaan salah satunya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai salah satu komponen PAD yang belum dioptimalkan kinerjanya diantaranya melalui bagi hasil pembiayaan dan BUMD.

Di sisi lain, dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan masih sangat didominasi oleh besarnya kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum. Lain-lain pendapatan yang sah dan PAD, masih menjadi sumber yang memiliki kontribusi paling sedikit dibandingkan pendapatan transfer sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.2.1.1-1 berikut.



Gambar 2.2.1.1-1 Grafik Struktur Pendapatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.2.1.1-1 menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo sepanjang 2020-2024. Pada periode tersebut terlihat bahwa pendapatan transfer memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 79,68 persen. Selanjutnya, PAD merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 18,92 persen. Adapun lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,40 persen. Berdasarkan pola perkembangan capaian selama periode tersebut, kontribusi pendapatan transfer fluktuatif, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami tren penurunan dan PAD mengalami fluktuasi.

Tabel 2.2.1.1-2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta)

TAHUN ANGGARAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	SELISIH
2020	1.641.670,00	1.579.747,89	96,23%	-59.234,38
2021	1.570.796,12	1.629.730,06	103,75%	58.933,94
2022	1.503.689,36	1.530.236,28	101,77%	26.546,92
2023	1.699.595,93	1.695.996,92	99,79%	-3.599,01
2024	1.702.228,32	1.755.011,58	103,10%	59.329,84

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.2.1.1-2, selama periode tahun 2020-2024 realisasi target pendapatan daerah sudah cukup baik, namun pada 2020 dan 2023 belum mencapai 100 persen. Berdasarkan target yang ditentukan, Realisasi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 103,75 persen dan 2024 sebesar 103,10 persen, disusul tahun 2022 dengan capaian 101,77 persen. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar 96,23 persen namun dengan defisit yang paling besar selama periode 2020-2024.

2.2.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja daerah meliputi belanja operasi, modal, dan belanja tak terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Sedangkan, Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer daerah meliputi transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

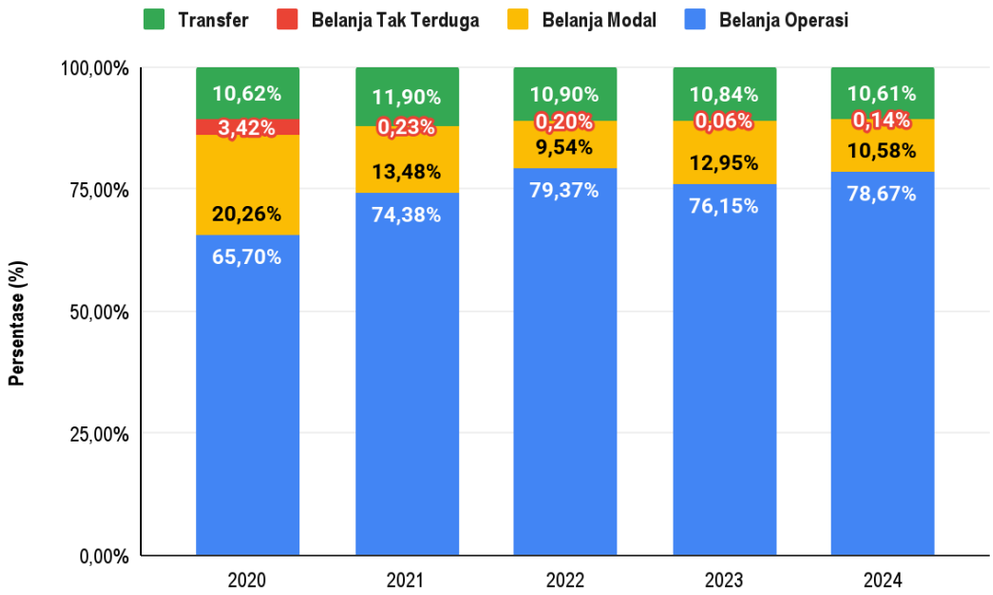
Tabel 2.2.1.2-1 berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan realisasi total belanja daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Jumlah realisasi belanja daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 sebesar Rp 1,59 triliun yang kemudian meningkat hingga menjadi Rp 1,78 triliun pada 2024 dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,99 persen per tahun.

Tabel 2.2.1.2-1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R(%)
Belanja Daerah	**1.591.170,76**	**1.499.954,32**	**1.531.202,51**	**1.694.771,93**	**1.778.569,82**	**2,99%**
Belanja Operasi	**1.045.404,57**	**1.115.705**	**1.215.304,34**	**1.290.495,16**	**1.399.220,08**	**7,57%**
Belanja Pegawai		635.655	672.476,78	678.460,42	749.270,00	
Belanja Barang Jasa		391.672	445.206,66	488.475,76	519.970,00	
Belanja Subsidi			548,8	1.556,76	1.620,00	
Belanja Hibah		74.168	80.132,74	102.941,29	111.390,00	
Belanja Bantuan Sosial		14.210	16.939,37	19.059,09	16.980,00	
Belanja Modal	**322.430,92**	**202.257**	**146.013,67**	**219.397,65**	**188.155,12**	**-7,27%**
Belanja Modal		202.257	146.013,67	219.397,65	188.155,12	
Belanja Tidak Terduga	**54.408,44**	**3.433**	**3.047,01**	**1.092,33**	**2.536,79**	**-9,21%**
Belanja Tidak Terduga		3.433	3.047,01	1.092,33	2.536,79	
Belanja Transfer	**168.926,83**	**178.559**	**166.837,49**	**183.786,79**	**188.657,84**	**2,99%**
Belanja Bagi Hasil			11.778,75	10.289,88	10.940,00	
Belanja Bantuan Keuangan			155.058,74	173.496,91	177.720,00	

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 (diolah)

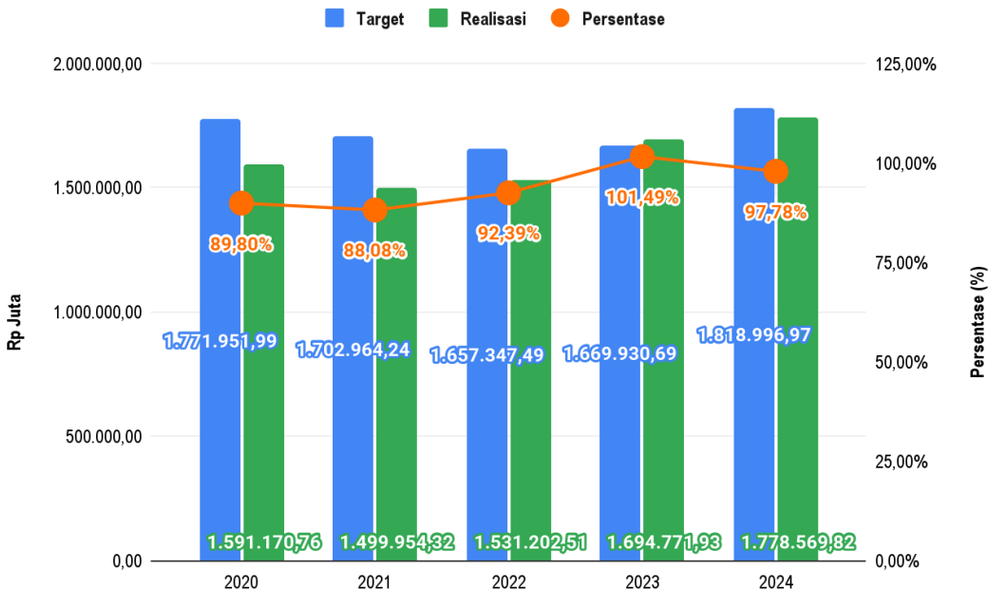
Selanjutnya jika ditelaah, struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja dan transfer maka terlihat kontribusi terbesar belanja daerah dialokasikan pada belanja operasi. Selama periode 2020 hingga 2024, rata-rata kontribusi dari Belanja Operasi sebesar 74,85% dengan tren meningkat meski sedikit menurun pada 2023. Adapun pos belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sementara itu, proporsi belanja modal merupakan terbesar kedua dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,36 persen dengan alokasi terbesar pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal gedung dan bangunan. Adapun transfer memberikan kontribusi terbesar ketiga dengan rata-rata capaian sebesar 10,97 persen. Di sisi lain, belanja tidak terduga fluktuatif namun dengan kontribusi rendah. Capaian kontribusi belanja tak terduga rata-rata sebesar 0,81 persen.



Gambar 2.2.1.2-1 Grafik Struktur Belanja Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo,2020-2024 (diolah)

Selama periode tahun 2020-2024, target belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data rata-rata realisasi belanja yang mencapai kurang dari 100 persen. Selama periode 2020-2024, realisasi belanja mencapai lebih dari 100 persen pada tahun 2023. Adapun capaian realisasi berkisar pada 88,08 persen-101,49 persen dari anggaran.



Gambar 2.2.1.2-2 Grafik Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta)

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo 2020-2024 (diolah)

2.2.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Namun ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel 2.2.1.3-1 menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kulon Progo bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan dana bergulir. Adapun pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 26,11 persen per tahun.

Tabel 2.2.1.3-1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	R(%)
Pembiayaan Daerah	**59.392,53**	**86.551,37**	**166.240,46**	**119.242,74**	**113.159,92**	**26,11%**
Penerimaan Pembiayaan	**102.804,96**	**141.788**	**216.356,83**	**165.115,93**	**125.267,73**	**10,67%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		141.788	216.356,83	165.115,93	120.470,00	
Pencairan Dana Cadangan						
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					4.800,00	
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					-	
Pengeluaran Pembiayaan	**43.412,43**	**55.237**	**50.116,37**	**45.873,19**	**12.107,81**	**-16,03%**
Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-	
Penyertaan Modal Daerah		55.237	50.116,37	45.873,19	7.310,00	
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
Pemberian Pinjaman Daerah					4.800,00	
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo 2019-2023 (diolah

2.2.1.4 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah.

Neraca daerah menyajikan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek), dan ekuitas suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Kulon Progo pada periode tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mencapai Rp 2,70 triliun atau meningkat 3,95 persen dari total aset pada 2023 yang sebesar Rp 2,59 triliun. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kewajiban daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Pada tahun 2023, jumlah kewajiban daerah Kabupaten Kulon Progo mencapai nilai sebesar Rp 31,07 miliar kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 hingga mencapai Rp 31,51 miliar atau meningkat sebesar 1,41 persen.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2020-2024, nilai ekuitas pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 nilai ekuitas daerah Kabupaten Kulon Progo mencapai nilai sebesar Rp 2,56 triliun kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 2,70 triliun pada tahun 2024.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur

kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 2.2.1.4-1 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta)

RASIO	RUMUS	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	185.672,51	276.542,24	196.790,10	153.867,07	157.338,16
	Kewajiban Jangka Pendek	16.732,83	39.744,04	22.741,94	31.068,73	31.507,00
	Rasio Lancar	11,10	6,96	8,65	4,95	4,99
	Aset Lancar Persediaan	30.090,12	27.720,83	24.537,43	24.699,80	31.781,76
	Kewajiban Jangka Pendek	16.732,83	39.744,04	22.741,94	31.068,73	31.507,00
	Quick Ratio	1,80	0,70	1,08	0,80	1,01
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	16.732,83	39.744,04	22.741,94	31.068,73	31.507,00
	Total Aset	2.358.800,58	2.501.713,54	2.628.298,18	2.593.831,71	2.969.354,10
	Rasio Total Hutang (%)	0,71	1,59	0,87	1,20	1,06
	Total Hutang	16.732,83	39.744,04	22.741,94	31.068,73	31.507,00
	Total Ekuitas	2.342.067,74	2.461.969,51	2.605.556,24	2.562.762,98	2.664.847,10
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,71	1,61	0,87	1,21	1,18

Sumber: Neraca Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (diolah)

Nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2020-2024 relatif tinggi, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2024 mencapai 4,99 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah 4,99 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selama periode 2020-2024 rasio cepat di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan nilai >1 pada pada tahun 2020, 2022, dan 2024. Adapun capain rasio cepat pada 2021 dan 2023 masih <1. Peningkatan quick ratio perlu terus diupayakan khususnya melalui peningkatan aset lancar persediaan.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari Tabel 2.2.1.4-1, rasio total hutang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 sebesar 1,06 persen artinya sebesar Rp 1,06 dari setiap Rp 1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang didanai oleh hutang adalah sebesar 0,95 persen, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Sedangkan dari tahun 2020-2024, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang hampir sama dengan rasio total hutang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

2.2.1.5 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 2020-2024 ditunjukkan oleh Tabel 2.2.1.5-1 berikut:

Tabel 2.2.1.5-1 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024

TAHUN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP JUTA)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP JUTA)	PERSENTASE
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
2020	643.715,50	1.634.583,19	39,38%
2021	635.655,35	1.555.191,16	40,87%
2022	672.476,78	1.581.318,88	42,53%
2023	678.460,42	1.740.645,12	38,98%
2024	749.270,00	1.790.677,63	41,84%
RATA-RATA	**675.915,61**	**1.660.483,20**	**40,72%**

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (diolah)

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, baik dari segi nominal maupun proporsinya terhadap total pengeluaran. Pada tahun 2020, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp 643,72 miliar, kemudian menurun hingga mencapai Rp 635,66 miliar di tahun 2021. Pada tahun 2022 nominal belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat menjadi Rp 672,48 miliar, kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi Rp 678,46 miliar pada tahun 2023. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali meningkat pada tahun 204 hingga mencapai Rp 749,27 miliar. Sementara itu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga berfluktuasi. Selama periode 2019-2023 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah berkisar antara 38,98 persen hingga 42,53 persen, dengan rata-rata proporsi selama periode tersebut sebesar 40,72 persen. Berdasarkan data tersebut, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah kurang dari 50 persen sehingga biaya pemenuhan kebutuhan aparatur bukan merupakan porsi besar dalam beban total realisasi belanja, namun perlu dioptimalisasi kembali sehingga belanja yang memiliki manfaat langsung kepada masyarakat meningkat serta untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat bahwa pemenuhan belanja aparatur kurang dari 30 persen dari total pengeluaran.

2.2.1.6 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/defisit riil APBD Kabupaten Kulon Progo selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.2.1.6-1.

Tabel 2.2.1.6-1 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.579.747,89	1.629.730,06	1.530.236,28	1.695.996,92	1.755.011,58
2	Belanja Daerah	1.591.170,76	1.499.954,32	1.531.202,51	1.694.771,93	1.778.569,82
	Surplus/Defisit	-11.422,87	129.775,74	-966,23	1.224,99	-23.558,24
3	Pembiayaan Daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	102.804,96	141.788,20	216.356,83	165.115,93	125.267,73
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	43.412,43	55.236,83	50.116,37	45.873,19	12.107,81
	Pembiayaan Netto	59.392,53	86.551,37	166.240,46	119.242,74	113.159,92
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	47.969,66	216.327,11	165.274,23	120.467,73	89.601,68

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024(diola)

Berdasarkan Tabel 2.2.1.6-1, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2020-2024 terjadi pola fluktuasi pembiayaan netto setiap tahunnya. Adapun pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan dengan tidak ada pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun 2020, pembiayaan netto Kabupaten Kulon Progo mencapai nilai sebesar Rp 102,80 miliar, mengalami peningkatan cukup signifikan pada 2021 yakni hingga menjadi

Rp 141,79 miliar. Pada tahun 2022, pembiayaan netto kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga nilai pembiayaan netto mencapai Rp 216,36 miliar. Pada tahun 2023-2024, nilai pembiayaan netto Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan hingga mencapai nilai sebesar Rp 165,12 miliar dan Rp 120,47 miliar.

Tabel 2.2.1.6-2 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp juta)

NO.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.579.747,89	1.629.730,06	1.530.236,28	1.695.996,92	1.755.011,58
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	1.591.170,76	1.499.954,32	1.531.202,51	1.694.771,93	1.778.569,82
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	43.412,43	55.236,83	50.116,37	45.873,19	12.107,81
	Surplus/Defisit Riil	-54.835,31	74.538,91	-51.082,60	-44.648,20	-35.666,05

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (diolah)

Tabel 2.2.1.6-3 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kulon Progo (Rp Juta), T.A. 2020–2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	102.804,96	141.788,20	216.356,83	165.115,93	120.470,00
Pinjaman Dalam Negeri					
Penerimaan Kembali Piutang					4.800,00
Penerimaan Pinjaman Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo 2020-2024

2.2.1.7 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah setelah dikeluarkannya pendapatan-pendapatan yang sudah tertentu penggunaannya dan dipenuhinya belanja yang bersifat wajib. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS dan berbagai jenis pendapatan yang bersifat (*earmarked*; ditentukan penggunaannya). Semakin besar ruang fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD.

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya ruang fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Sesuai dengan hasil perhitungan ruang fiskal Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024 ditemukan ruang fiskal Kabupaten Kulon Progo cukup terbatas dalam mendanai penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah. Tabel

2.2.1.7-1 menunjukkan hasil analisis ruang fiskal daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2020-2024. Sepanjang tahun 2020-2024, ruang fiskal daerah Kabupaten Kulon Progo fluktuatif. Rata-rata ruang fiskal daerah hanya sebesar 9,11 persen sehingga ketersediaan ruang dalam anggaran sangat terbatas. Adapun nilai ruang fiskal tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 182,43 miliar. Nilai yang pasang surut secara signifikan seiring dengan dinamika realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan efektivitas penganggaran masih perlu diupayakan perencanaan yang semakin matang, sehingga semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal. Penyertaan modal menjadi alternatif langkah yang dapat dilakukan guna meningkatkan PAD Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2.2.1.7-1 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan	**1.682,55**	**1.771,59**	**1.746,60**	**1.861,11**	**1.880,28**
Pendapatan Mengikat	**386,48**	**469,35**	**390,32**	**464,67**	**423,19**
Dak	267,09	294,98	252,96	297,72	281,16
Hibah	51,32	7,1	6,5	8	0.94
Dana Penyesuaian	68,07	71,38	42,71	54,26	36,8
Dana Desa	-	95,89	88,15	104,69	105,23
Belanja Mengikat	**691,62**	**722,06**	**760,62**	**757,83**	**849,14**
Belanja Pegawai	609,04	635,66	672,28	666,41	749,27
Belanja Bunga	0,14	-	-	-	
Belanja Bagi Hasil	7,44	11,4	11,78	10,29	10,94
Belanja Adum (5%*Belanja)	75	75	76,56	81,13	88,93
Belanja Wajib	**431,82**	**421,43**	**419,8**	**456,18**	**486,41**
Belanja Pendidikan	178,2	172,87	171,78	191,26	205,86
Belanja Kesehatan	89,1	86,43	85,89	95,63	102,93
Belanja Infrastruktur	164,52	162,13	162,13	169,3	177,62
Total Pendapatan Dan Belanja Mengikat Serta Belanja Wajib	**1.509,92**	**1.612,84**	**1.570,74**	**1.678,69**	**1.758,74**
Ruang Fiskal	**172,63**	**158,75**	**175,86**	**182,43**	**121,54**

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (diolah)

2.2.1.8 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan.Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada pasal 1 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Adapun Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Tabel 2.2.1.8-1 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020-2024

URAIAN	TAHUN	NILAI	KATEGORI
Indeks KFD	2020	0,73	Rendah
	2021	0,913	Sedang
Rasio KFD	2022	1,492	Rendah
	2023	1,174	Rendah
	2024	1,102	Rendah

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2024

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Capaian RKFD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022-2024 berturut-turut sebesar 1,492. 1,174, dan 1,102 dan termasuk dalam kategori rendah.

2.2.1.9 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

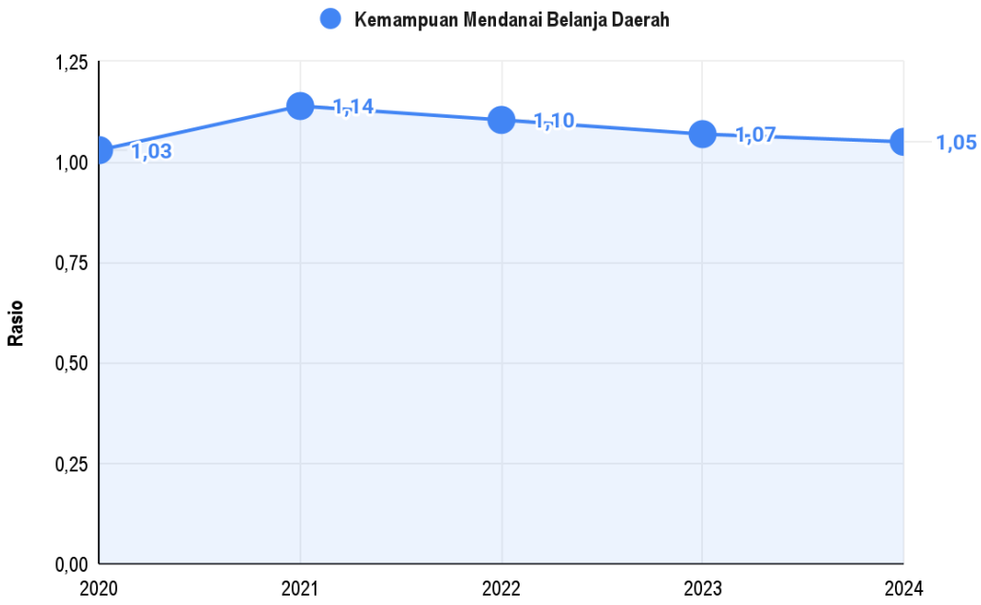
Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi selama periode tahun 2019-2023. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 yakni sebesar 1,18, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni menjadi sebesar 1,15 Selanjutnya pada tahun 2021, kemampuan mendanai belanja daerah meningkat menjadi 1,29. Pada tahun 2022, terjadi penurunan dengan capaian menjadi 1,23 dan di tahun 2023 terjadi penurunan hingga menjadi 1,20 Berkaitan dengan kondisi tersebut, meskipun tahun sepanjang 2019-2023 nilai telah >1, namun masih diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis

serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan, dan menyikapi tantangan ke depan.

Tabel 2.2.1.9-1 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020–2024 (Rp Juta)

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL BELANJA	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENGELUARAN	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
2020	1.579.693,19	102.804,96	1.682.498,15	1.591.170,76	43.412,43	1.634.583,19	1,03
2021	1.629.729,79	141.788,20	1.771.517,99	1.499.954,32	55.236,83	1.555.191,15	1,14
2022	1.530.236,28	216.356,83	1.746.593,11	1.531.202,51	50.116,37	1.581.318,88	1,10
2023	1.695.996,92	165.115,93	1.861.112,85	1.694.771,93	45.873,19	1.740.645,12	1,07
2024	1.755.011,58	125.267,73	1.880.279,31	1.778.569,82	12.107,81	1.790.677,63	1,05

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (diolah)



Gambar 2.2.1.9-1 Grafik Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2020-2024

Sumber: LRA Kabupaten Kulon Progo, 2020-2024 (diolah)

2.2.1.10 Sistem Pengelolaan Anggaran dan Inovasi Fiskal

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah yang semakin kompleks, dinamis, dan menuntut efisiensi berbasis data, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara progresif mengintegrasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mendasar dan strategis. Implementasi ETPD dimaksudkan untuk mengubah paradigma pengelolaan keuangan konvensional menuju sistem yang berbasis teknologi digital, menciptakan ekosistem fiskal yang transparan, akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital.

ETPD bukan sekadar digitalisasi administratif, tetapi sebuah kerangka transformasional yang mengintervensi secara sistemik terhadap seluruh siklus anggaran—baik pada sisi pendapatan maupun belanja. Transformasi ini diwujudkan melalui pemanfaatan kanal transaksi nontunai yang aman, cepat, dan terdokumentasi secara real-time, mencakup: QRIS, *virtual account, e-wallet,* e-SPTPD, SP2D *Online, Cash Management System (CMS),* serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Sejak pendirian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada tahun 2020, Kabupaten Kulon Progo secara bertahap menunjukkan tren peningkatan integrasi kanal digital dalam sistem keuangan publik.

Per akhir tahun 2024, tercatat lebih dari 70% transaksi penerimaan daerah telah terekam secara non-tunai, menandai capaian substansial dalam kerangka efisiensi fiskal, pencegahan kebocoran PAD, serta percepatan akses terhadap data kas daerah secara langsung. Hal ini menegaskan peran ETPD sebagai tulang punggung dalam realisasi prinsip *value for money* dan integritas fiskal daerah.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2020, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2025 hingga tahun 2029 mendatang.

Proyeksi pendapatan Kabupaten Kulon Progo dilakukan berdasarkan analisis tren pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2020–2024 serta perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024. Proyeksi ini juga diperkuat dengan justifikasi kualitatif terhadap angka pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan belanja dari para stakeholder pengelolanya. Pada tahun 2024–2025, diasumsikan bahwa dengan telah terbentuknya penyesuaian masyarakat terhadap masa pemulihan ekonomi di Indonesia, akan mendorong kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga dapat memasuki momentum pasca pemulihan ekonomi.

Data realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 menunjukkan bahwa pendapatan daerah mencapai nilai sebesar Rp1,76 triliun. Berdasarkan penghitungan proyeksi dengan asumsi pertumbuhan moderat, pendapatan daerah pada APBD tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp1,66 triliun dan menjadi Rp1,83 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,71 persen. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan berasal dari pendapatan transfer, khususnya dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif signifikan dengan peningkatan rata-rata mencapai 3,39 persen. Pertumbuhan ini diharapkan berasal dari kontribusi komponen pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun demikian, pada beberapa pos PAD tertentu terjadi proyeksi penurunan dalam kurun waktu 2025–2029, terutama pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah, antara lain disebabkan oleh:

1. Pendapatan dari denda pajak daerah tidak dimasukkan dalam RAPBD Murni tahun berjalan karena sifatnya yang tidak pasti dan hanya terjadi apabila terdapat pelanggaran. Denda atau bunga pajak lebih difungsikan sebagai instrumen penegakan hukum dan pendorong kepatuhan, bukan sebagai sumber pendapatan utama daerah.
2. Pendapatan BLUD yang semula seluruhnya dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah, mulai Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan klasifikasi menjadi bagian dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga mengurangi nominal pada kelompok pendapatan sebelumnya.
3. Pendapatan dari bunga atas penempatan uang pemerintah daerah mengalami penurunan, karena uang kas daerah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai kebutuhan belanja, sehingga mengurangi saldo kas menganggur yang biasanya menghasilkan bunga.

Di sisi lain, proyeksi terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada periode 2025–2027 juga lebih rendah dibandingkan baseline tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu:

1. Tidak dilaksanakannya penyertaan modal daerah sesuai jadwal pada tahun 2024, 2025, dan 2026, yang menyebabkan delusi atau penurunan persentase kepemilikan

saham Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah. Akibatnya, nilai bagi hasil (dividen) dari kepemilikan tersebut ikut menurun.

2. Penurunan kinerja badan usaha milik daerah, khususnya PT Selo Adikarto, juga berkontribusi terhadap rendahnya perolehan dividen dalam periode proyeksi.

Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah juga menunjukkan tren yang sejalan dengan asumsi pertumbuhan moderat. Belanja daerah pada APBD Tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp1,74 triliun. Kemudian, pada Tahun 2026, nominal proyeksi belanja daerah sebesar Rp1,51 triliun sebelum memperhitungkan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, dalam struktur proyeksi keuangan Tahun 2026, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setara dengan nilai pendapatan dari DAK yang belum diperhitungkan dalam komponen belanja. Pola ini berlanjut hingga Tahun 2030, dengan nilai Belanja Daerah pada periode 2026–2030 terus meningkat hingga mencapai Rp1,66 triliun pada akhir periode. Adapun rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 2,48 persen.

Tabel 2.2.2-1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo, T.A. 2025–2030 (Rp Juta)

KODE REK.				URAIAN	BASELINE 2024	PROYEKSI					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1				**PENDAPATAN DAERAH**	**1.741.601,24**	**1.665.105,38**	**1.499.536,48**	**1.697.408,16**	**1.730.395,73**	**1.768.900,91**	**1.809.114,22**
1	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**351.588,22**	**422.983,13**	**426.003,87**	**443.521,38**	**455.694,35**	**472.760,49**	**490.891,60**
1	1	1		Pajak Daerah	113.474,90	141.976,90	158.698,95	168.271,84	172.421,16	181.662,09	191.000,17
1	1	2		Retribusi Daerah	189.103,52	255.137,82	242.180,00	249.609,60	255.467,88	262.530,06	270.208,04
1	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.733,01	19.780,56	18.569,99	18.184,90	19.902,56	20.346,33	20.945,95
1	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	29.276,79	6.087,86	6.554,92	7.455,04	7.902,76	8.222,02	8.737,43
1	**2**			**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.389.077,02**	**1.230.665,09**	**1.044.838,21**	**1.225.192,38**	**1.246.006,98**	**1.267.446,01**	**1.289.528,22**
1	2	1		**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.173.176,41**	**1.109.049,56**	**871.198,62**	**1.102.087,36**	**1.122.901,96**	**1.144.341,00**	**1.166.423,20**
1	2	1	1	Dana Desa	105.234,65	97.403,86	97.403,86	97.403,86	97.403,86	97.403,86	97.403,86
1	2	1	2	Insentif Fiskal	24.064,82	14.793,60	14.827,62	14.827,62	14.827,62	14.827,62	14.827,62
1	2	1	3	Dana Bagi Hasil (DBH)	19.331,34	25.215,72	25.615,73	25.615,73	25.615,73	25.615,73	25.615,73
1	2	1	4	Dana Alokasi Umum (DAU)	729.474,50	741.634,96	733.351,42	753.559,76	774.374,36	795.813,39	817.895,60
1	2	1	4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	295.071,11	230.001,42	-	210.680,39	210.680,39	210.680,39	210.680,39
1	2	2		**Transfer Antar Daerah**	**215.900,60**	**121.615,53**	**173.639,58**	**123.105,02**	**123.105,02**	**123.105,02**	**123.105,02**
1	2	2	1	Pendapatan Bagi Hasil	106.370,57	65.445,01	60.152,58	53.105,02	53.105,02	53.105,02	53.105,02
1	2	2	2	Bantuan Keuangan	109.530,03	56.170,52	113.487,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	**3**			**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**936,00**	**11.457,16**	**28.694,40**	**28.694,40**	**28.694,40**	**28.694,40**	**28.694,40**
1	3	1		Pendapatan Hibah	936,00	-	-	-	-	-	-
1	3	2		Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	11.457,16	28.694,40	28.694,40	28.694,40	28.694,40	28.694,40

KODE REK.				URAIAN	BASELINE 2024	PROYEKSI					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
2				**BELANJA DAERAH**	**1.854.806,05**	**1.750.207,07**	**1.518.936,48**	**1.750.332,71**	**1.787.284,36**	**1.829.852,67**	**1.870.333,61**
2	**1**			**BELANJA OPERASI**	**1.458.975,30**	**1.440.025,31**	**1.216.932,10**	**1.430.728,98**	**1.460.105,55**	**1.493.947,35**	**1.526.128,40**
2	1	1		Belanja Pegawai	778.281,04	814.264,22	662.976,28	794.272,06	802.214,78	810.236,93	818.339,30
2	1	2		Belanja Barang dan Jasa	536.746,64	530.466,22	481.223,27	562.982,13	595.419,51	619.547,08	615.707,74
2	1	4		Belanja Subsidi	1.716,94	1.394,11	828,23	848,30	749,66	898,29	1.183,90
2	1	5		Belanja Hibah	124.900,99	76.662,96	59.419,79	59.839,35	46.728,50	49.790,76	75.112,08
2	1	6		Belanja Bantuan Sosial	17.329,70	17.237,80	12.484,54	12.787,14	14.993,10	13.474,30	15.785,38
2	**2**			**BELANJA MODAL**	**201.666,69**	**118.462,64**	**107.689,91**	**122.772,19**	**125.728,32**	**129.133,78**	**132.373,75**
2	2	1		Belanja Modal Tanah	1.594,11	2.696,00	195,00	197,95	314,32	258,27	213,42
2	2	2		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.299,46	42.639,20	22.619,02	22.744,86	25.145,66	19.370,07	22.503,26
2	2	3		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.641,55	40.640,56	37.610,10	51.849,67	55.823,37	50.943,28	56.377,29
2	2	4		Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.923,47	30.221,80	46.941,96	47.650,99	44.004,91	58.110,20	52.948,85
2	2	5		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.545,39	2.093,08	125,15	127,04	251,46	193,70	132,37
2	2	6		Belanja Modal Aset Lainnya	662,71	172,00	198,67	201,67	188,59	258,27	198,56
2	**3**			**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.949,78**	**3.442,61**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2	3	1		Belanja Tidak Terduga	2.949,78	3.442,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	**4**			**BELANJA TRANSFER**	**191.214,27**	**188.276,50**	**189.314,47**	**191.831,54**	**196.450,50**	**201.771,53**	**206.831,45**
2	4	1		Belanja Bagi Hasil	13.495,23	16.658,89	16.296,85	16.636,56	23.574,06	20.177,15	26.888,09
2	4	2		Belanja Bantuan Keuangan	177.719,05	171.617,62	173.017,62	175.194,98	172.876,44	181.594,38	179.943,36
				TOTAL SURPLUS/DEFISIT	**-113.204,81**	**-85.101,68**	**-19.400,00**	**-52.924,55**	**-56.888,63**	**-60.951,76**	**-61.219,39**
3				**PEMBIAYAAN**							
3	**1**			**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**130.467,73**	**89.601,68**	**28.900,00**	**67.424,55**	**71.388,63**	**70.951,76**	**71.219,39**

KODE REK.				URAIAN	BASELINE 2024	PROYEKSI					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	1	1		SILPA	120.467,73	89.601,68	28.900,00	67.424,55	71.388,63	70.951,76	71.219,39
3	1	2		Penerimaan pinjaman daerah	10.000,00	-	-	-	-	-	-
3	**2**			**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**17.262,92**	**4.500,00**	**9.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
3	2	1		Penyertaan modal daerah	7.262,92	4.500,00	9.500,00	14.500,00	14.500,00	10.000,00	10.000,00
3	2	2		Pengeluaran Pembiayaan	10.000,00	-	-	-	-	-	-
				PEMBIAYAAN NETTO	**113.204,81**	**85.101,68**	**19.400,00**	**52.924,55**	**56.888,63**	**60.951,76**	**61.219,39**
				Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Keterangan:

- Dana Alokasi Khusus (DAK)*: Tahun 2025 termasuk DAK fisik dan non fisik. Sementara proyeksi 2027-2030 hanya DAK non fisik dengan pertimbangan DAK fisik fluktuatif sesuai kebijakan pusat.
- Belanja 2026 belum termasuk DAK

Sumber: BKAD (diolah), 2025

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Analisis permasalahan pembangunan daerah pada bagian ini disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan yang telah diuraikan dalam Subbab 2.1.1 hingga 2.1.4. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kesenjangan *(gap analysis)* antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan sebagaimana tercermin dalam capaian indikator utama pembangunan (IUP) yang relevan. Identifikasi permasalahan ini bersifat makro dan strategis sebagai dasar perumusan kebijakan daerah, sementara uraian yang lebih rinci dan teknis akan disampaikan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) pengampunya.

2.3.1.1 Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini permasalahan yang disajikan secara garis besar merujuk dan selaras dengan gambaran umum kondisi daerah sebagaimana telah dipaparkan dalam Subbab 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi. Uraian ini juga memuat pengelompokan permasalahan yang dikaitkan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 (tertuang sebagai IE: Indonesia Emas), yakni:

1. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan (IE 16);
2. Lingkungan Hidup Berkualitas (IE 15);
3. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE 17); dan
4. Demografi.

2.3.1.1.A Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

- ***Indeks Ketahanan Pangan belum Optimal***

Kondisi ideal yang diharapkan untuk ketahanan pangan adalah indeks ketahanan pangan yang tinggi dan stabil. Data menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan meningkat dari 80,31 pada 2020 menjadi 85,73 pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan kemandirian pangan yang merata. Upaya peningkatan Ketahanan Pangan dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Pada dimensi ketersediaan, rendahnya produksi pangan lokal akibat input pertanian yang terbatas, degradasi lahan, dan minimnya teknologi menjadi penyebab utama. Di sisi akses, tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur jalan dan pasar, serta harga pangan yang tidak stabil menghambat distribusi dan keterjangkauan. Sementara pada dimensi pemanfaatan, masalah gizi buruk, sanitasi yang rendah, dan minimnya edukasi gizi menjadi tantangan serius. Karena itu, diperlukan kebijakan pertanian yang terpadu, penguatan kelembagaan petani, program perlindungan sosial, perbaikan infrastruktur dasar, serta promosi konsumsi pangan bergizi dan beragam berbasis potensi lokal.

- ***Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan masih Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang rendah. Data menunjukkan bahwa prevalensi ini mengalami fluktuasi, dari 13,29% pada 2020 hingga 8,75% pada 2024. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, harga pangan yang fluktuatif, akses terbatas ke pasar, dan rendahnya literasi gizi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan program perlindungan sosial berbasis pangan, subsidi harga pangan lokal, peningkatan akses

infrastruktur distribusi pangan, serta edukasi konsumsi pangan bergizi melalui intervensi lintas sektor yang dikoordinasikan secara terintegrasi.

Terkait kecukupan pangan, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Perda No. 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan serta Perbup No. 85 tahun 2020 tentang Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Setiap tahun, pemda KP telah mengalokasikan anggaran untuk cadangan pangan pemerintah secara bertahap. Rencana program di sektor pertanian dengan mengoptimalkan potensi komoditas unggulan di masing-masing wilayah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan harapannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Terkait harga pangan, pemerintah kabupaten Kulon progo telah memiliki Tim Pengendali Inflasi yang harapannya dapat menjaga kecukupan stok/ketersediaan pangan dan stabilitas harga komoditas pangan.

- ***Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum masih Rendah***

Kondisi ideal adalah akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum yang tinggi. Data menunjukkan bahwa akses meningkat dari 23,28% pada 2021 menjadi 28,08% pada 2024. Rendahnya nilai indikator ini seringkali disebabkan oleh infrastruktur air bersih yang belum merata, kualitas sumber air yang tercemar, serta rendahnya kapasitas pengelolaan air oleh masyarakat atau lembaga lokal. Kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah pembangunan dan rehabilitasi sarana air minum berbasis komunitas, peningkatan layanan PDAM atau BUMDesa Air, edukasi perilaku higienis, serta penguatan regulasi dan monitoring kualitas air. Pemerintah Daerah juga dapat mengembangkan kerjasama dengan swasta untuk memperkuat kerjasama dalam pengelolaan air minum.

2.3.1.1.B Lingkungan Hidup Berkualitas

- ***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Mengalami Penurunan***

Kondisi ideal adalah indeks kualitas lingkungan hidup yang tinggi. Data menunjukkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan dari 69,01 pada 2020 menjadi 65,46 pada 2024. Nilai IKLH yang rendah biasanya disebabkan oleh tingginya pencemaran udara dari aktivitas domestik dan transportasi, buruknya kualitas badan air akibat limbah rumah tangga dan pertanian, serta degradasi lahan karena alih fungsi kawasan hijau. Kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran melalui regulasi dan teknologi ramah lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, serta edukasi publik agar lebih optimal berperan dalam pelestarian lingkungan.

- ***Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman belum Optimal***

Kondisi ideal adalah akses sanitasi aman yang tinggi. Data menunjukkan bahwa akses sanitasi aman meningkat dari 9,75% pada 2020 menjadi 10,20% pada 2024. Dalam kondisi seperti ini, masih diperlukan upaya mengatasi keterbatasan infrastruktur sanitasi, rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih, memberikan subsidi kepada keluarga berpendapatan rendah, serta penguatan kelembagaan desa dalam pengelolaan limbah domestik.

- ***Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah masih Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah timbulan sampah terolah yang tinggi. Data menunjukkan bahwa timbulan sampah terolah mengalami fluktuasi, dari 15,75% pada 2020 hingga 14,01% pada 2024. Artinya masih perlu upaya peningkatan pelayanan di fasilitas

pengolahan sampah, yang seharusnya mencakup proses pemilahan, daur ulang, komposting, atau teknologi pengolahan lainnya sesuai prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan *(reduce, reuse, recycle)*. Selain itu masih diperlukan upaya penambahan fasilitas pengolahan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah, serta penguatan sistem pengumpulan dan transportasi sampah ke tempat pengolahan. Kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah pembangunan dan revitalisasi fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi tepat guna, penguatan sistem pengangkutan dan pemilahan di tingkat desa/kelurahan, pelibatan komunitas dalam bank sampah, serta kampanye edukatif yang masif.

- ***Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Persampahan belum Merata***

Variabel ini masih terkait dengan variabel di atas. Kondisi yang diharapkan adalah proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah yang tinggi. Data menunjukkan bahwa proporsi meningkat dari 57,65% pada 2020 menjadi 86,07% pada 2024. Berdasarkan kondisi riil di lapangan, masih ada permasalahan layanan yang belum merata. Beberapa hal mempengaruhinya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang belum memadai. Upaya yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki infrastruktur pengumpulan sampah.

- ***Permasalahan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan dari Lahan Produktif menjadi Lahan Terbangun***

Kondisi ideal pengelolaan lahan adalah tercapainya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi lahan, sehingga alokasi ruang dapat mendukung ketahanan lingkungan, produktivitas pertanian, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam kondisi demikian, perubahan penggunaan lahan berlangsung terkendali, sesuai dengan rencana tata ruang, serta mampu menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Namun kondisi eksisting di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa dinamika penggunaan lahan cenderung mengarah pada peningkatan alih fungsi lahan produktif, khususnya sawah, menjadi pemukiman maupun kawasan terbangun lainnya. Laju alih fungsi ini lebih cepat dibandingkan dengan upaya penyediaan lahan pengganti atau penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian. Selain itu, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang serta keterbatasan instrumen insentif–disinsentif menjadikan potensi konflik antar fungsi lahan semakin tinggi.

Gap antara kondisi ideal dan eksisting tersebut mencerminkan masih lemahnya implementasi pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Jika tidak diatasi, hal ini berimplikasi pada menurunnya kualitas lingkungan, berkurangnya lahan produktif, serta meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap risiko sosial, ekonomi, maupun bencana ekologis.

2.3.1.1.C Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

- ***Indeks Ketahanan Daerah masih Rendah***

Kondisi ideal adalah capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang tinggi. Data menunjukkan bahwa IKD Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dari 0,49 pada tahun 2021 menjadi 0,64 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian DIY, posisi

Kabupaten Kulon Progo masih sedikit lebih rendah, di mana IKD DIY pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,79 dan pada tahun 2024 berada pada angka 0,70.

Rendahnya IKD mengindikasikan lemahnya kesiapsiagaan dan kapasitas tanggap darurat, meskipun tingkat risiko bencana tidak selalu tinggi. Kondisi ini dapat berdampak pada keterlambatan respons, hambatan koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lambatnya proses pemulihan pascabencana. Dampak lanjutan yang mungkin timbul antara lain meningkatnya kerugian, bertambahnya beban sosial dan ekonomi, serta berkepanjangannya masa krisis di masyarakat.

Beberapa penyebab rendahnya IKD meliputi keterbatasan infrastruktur ketahanan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat infrastruktur adaptif, meningkatkan pendidikan dan literasi kebencanaan, serta membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

- ***Indeks Risiko Bencana Meningkat***

Kondisi ideal adalah capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) yang rendah. Nilai IRB yang tinggi akan berdampak langsung terhadap resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Di Kabupaten Kulon Progo, tren IRB menunjukkan penurunan dari 203,20 pada tahun 2020 menjadi 140,98 pada tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 152,65 pada tahun 2024. Dibandingkan dengan DIY yang mengalami penurunan konsisten dari 140,92 pada tahun 2020 menjadi 102,83 pada tahun 2024, nilai IRB Kabupaten Kulon Progo masih tergolong tinggi.

Tingginya risiko bencana berdampak serius terhadap keselamatan jiwa, kerusakan aset publik maupun rumah tangga, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi. Sektor-sektor vital seperti pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan rentan lumpuh saat bencana terjadi, sehingga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan. Risiko bencana yang tinggi juga meningkatkan beban anggaran daerah akibat membengkaknya biaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana. Masyarakat menjadi lebih rentan terhadap kehilangan mata pencaharian, tekanan psikososial, dan pengungsian berkepanjangan. Selain itu, tingginya risiko bencana dapat menghambat investasi swasta dan memperlambat pembangunan infrastruktur. Apabila tidak diantisipasi melalui perencanaan berbasis mitigasi dan adaptasi, kondisi ini berpotensi memperlebar ketertinggalan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

- ***Ancaman Perubahan Iklim***

Kondisi ideal adalah kategori Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim yang berada pada posisi *"tidak rentan"*. Berdasarkan Sistem Inventarisasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Kulon Progo sebagian besar berada pada kategori *"cukup rentan",* dengan cakupan mencapai sekitar 95% dari total luas wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas wilayah masih memiliki kerentanan yang signifikan terhadap dampak perubahan iklim, baik dari sisi paparan, sensitivitas, maupun kapasitas adaptif. Kerentanan yang tinggi ini berimplikasi pada meningkatnya risiko terhadap produktivitas pertanian, ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem. Jika tidak diantisipasi melalui langkah adaptasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, kondisi tersebut berpotensi memperbesar dampak sosial-ekonomi, memperlambat pertumbuhan wilayah, dan menambah beban anggaran daerah untuk penanggulangan maupun pemulihan.

2.3.1.1.D Demografi

- ***Laju Pertumbuhan Penduduk masih Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah laju pertumbuhan penduduk yang stabil. Data menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi, dari -2,43% pada 2020 hingga 0,44% pada 2024. Artinya masih ada ketidakseimbangan antara angka kelahiran, kematian, dan migrasi, yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Laju pertumbuhan yang belum stabil, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, seringkali berkaitan dengan rendahnya akses terhadap layanan Keluarga Berencana (KB), pernikahan usia dini, urbanisasi yang tidak terkendali, serta lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan kependudukan. Ketidakstabilan ini berdampak langsung terhadap tekanan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Karena itu, kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan layanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan literasi demografi di masyarakat, penegakan regulasi usia minimum pernikahan, serta optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

- ***Kepadatan Penduduk yang Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah kepadatan penduduk yang seimbang. Data menunjukkan bahwa kepadatan penduduk mengalami fluktuasi, dari 744 jiwa/km2 pada 2020 menjadi 759,01 jiwa/km2 pada 2024. Penyebabnya adalah konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah tertentu sementara wilayah lain relatif kosong atau kurang berkembang, yang mencerminkan distribusi penduduk tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini sering dipicu oleh pertumbuhan kawasan perkotaan yang cepat, ketimpangan pembangunan antarwilayah, terbatasnya peluang kerja dan layanan publik di daerah pinggiran, serta lemahnya kebijakan persebaran penduduk. Karena itu, kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur dasar, integrasi perencanaan tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta fasilitasi mobilitas penduduk yang produktif.

2.3.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini permasalahan yang disajikan secara garis besar merujuk dan selaras dengan gambaran umum kondisi daerah sebagaimana telah dipaparkan dalam Subbab 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat. Uraian ini juga memuat pengelompokan permasalahan yang dikaitkan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 (tertuang sebagai IE: Indonesia Emas), yakni:

1. Kesejahteraan Ekonomi;
2. Kesehatan Untuk Semua (IE 1);
3. Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE 2);
4. Perlindungan Sosial yang Adaptif (IE 3);
5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (IE 13); dan
6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif (IE 14).

2.3.1.2.A Kesejahteraan Ekonomi

- ***Laju Pertumbuhan Ekonomi masih Fluktuatif***

Pada aspek laju pertumbuhan ekonomi (LPE), kondisi yang diharapkan adalah laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif. Namun data menunjukkan bahwa LPE mengalami fluktuasi, dari -3,45% pada 2020 hingga 4,77% pada 2024. Fluktuasi LPE dapat

disebabkan faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, penyebabnya adalah fluktuasi dalam sektor-sektor ekonomi utama, ketergantungan pada komoditas tertentu, rendahnya diversifikasi ekonomi lokal, lemahnya investasi dan daya saing UMKM, keterbatasan infrastruktur, dan kualitas tenaga kerja yang belum optimal. Dari sisi eksternal ketidakstabilan itu disebabkan harga pasar global dan perubahan iklim. Kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi produk unggulan, fasilitasi investasi daerah, pengembangan ekosistem UMKM dan kewirausahaan, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vokasional. Intervensi tersebut dikoordinasikan secara strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan lebih tahan terhadap gejolak.

- ***Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan***

Idealnya, tingkat kemiskinan harus semakin berkurang seiring dengan peningkatan LPE. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 18,01% pada 2020 menjadi 15,62% pada 2024. Namun, capaian ini belum optimal dan memerlukan akselerasi melalui pendekatan terpadu yang meliputi pengurangan beban hidup, peningkatan pendapatan, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan.

Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, jaminan kesehatan, dan subsidi energi. Di sisi lain, peningkatan pendapatan membutuhkan intervensi berbasis pemberdayaan, seperti penguatan UMKM melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan perluasan pasar digital. Sementara itu, di kantong-kantong kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, dan perumahan layak harus diprioritaskan, didukung program padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal.

Efektivitas strategi ini bergantung pada integrasi kebijakan melalui Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Langkah kuncinya meliputi pemutakhiran data penerima manfaat (DTKS), evaluasi berkala terhadap capaian program, serta alokasi anggaran yang tepat sasaran. Kolaborasi antar-dinas dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan menjadi faktor penentu keberhasilan, memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

- ***Belum Optimalnya PDRB Per Kapita (ADHB)***

Kondisi ideal adalah PDRB per kapita yang tinggi dan terus meningkat. Data menunjukkan bahwa PDRB per kapita meningkat dari 26,97 juta rupiah pada 2020 menjadi 37,98 juta rupiah pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan kesejahteraan yang merata. Penyebabnya adalah rendahnya nilai tambah ekonomi yang dihasilkan di daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk, yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor-sektor berproduktivitas rendah, lemahnya investasi produktif, terbatasnya inovasi dan adopsi teknologi, serta ketergantungan pada sektor informal atau primer tanpa hilirisasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antarwilayah juga turut memperlebar disparitas pendapatan. Karena itu, kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal, peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi dan digitalisasi UMKM, serta perluasan akses terhadap modal dan pasar.

- ***Belum Optimalnya PDRB Per Kapita (ADHK)***

Kondisi ideal adalah PDRB per kapita yang tinggi dan terus meningkat. Data menunjukkan bahwa PDRB per kapita meningkat dari 19,45 juta rupiah pada 2020 menjadi 23,41 juta rupiah pada 2024. Namun, peningkatan tersebut masih dapat ditingkatkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Beberapa penyebabnya adalah rendahnya pertumbuhan output riil per kapita setelah disesuaikan inflasi—yakni PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan—yang mencerminkan produktivitas ekonomi daerah yang belum optimal. Faktor struktural seperti minimnya investasi modal produktif, keterbatasan infrastruktur penunjang produksi, dominasi sektor primer berdaya tambah rendah, serta rendahnya adopsi teknologi dan inovasi oleh pelaku usaha menghambat peningkatan nilai tambah regional. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan iklim investasi, pengembangan infrastruktur fisik dan digital, pendampingan hilirisasi produk unggulan lokal, serta program peningkatan kapabilitas SDM dan adopsi teknologi tepat guna oleh UMKM.

- ***Masih Terdapat Pengangguran***

Kondisi ideal adalah tingkat pengangguran yang rendah. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka menurun dari 3,71% pada 2020 menjadi 2,01% pada 2024. Namun, tingkat pengangguran masih tinggi di beberapa kelompok usia. Penyebabnya adalah tingginya rasio jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja—yang menjadi dasar perhitungan tingkat pengangguran—sebagai akibat dari lemahnya penyerapan tenaga kerja formal, ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar, terbatasnya investasi produktif di sektor padat karya, serta kurang optimalnya program pelatihan dan penempatan kerja. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah pengembangan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, pemberian insentif fiskal untuk investasi padat karya, fasilitasi kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan, serta perkuatan layanan penempatan kerja dan wirausaha muda.

- ***Rasio Gini yang Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah rasio Gini yang rendah, menunjukkan ketimpangan pendapatan yang lebih kecil. Data menunjukkan bahwa rasio Gini mengalami fluktuasi dari 0,379 pada 2020 hingga 0,373 pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah konsentrasi aset dan peluang ekonomi di segelintir kelompok, rendahnya akses pendidikan dan layanan keuangan inklusif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dominasi sektor informal dengan upah rendah. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah percepatan pemerataan ekonomi melalui program inklusi keuangan dan kredit mikro, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan produktivitas, serta insentif usaha kecil menengah di kawasan tertinggal.

- ***Indeks Pembangunan Manusia belum Optimal***

Kondisi ideal adalah indeks pembangunan manusia yang tinggi dan terus meningkat. Data menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia meningkat dari 74,48 pada 2020 menjadi 76,18 pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan kesejahteraan yang merata. Secara umum berdasarkan variabel pembentuknya, maka kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah perluasan akses layanan kesehatan preventif dan promotif di puskesmas, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, program beasiswa dan peningkatan sarana sekolah, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan vokasi dan akses modal mikro.

2.3.1.2.B Kesehatan untuk Semua

- ***Peningkatan Usia Harapan Hidup belum Optimal***

Kondisi ideal adalah ketika Usia Harapan Hidup (UHH) berada pada angka yang tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Di Kabupaten Kulon Progo, UHH meningkat dari 75,29 tahun pada tahun 2020 menjadi 75,49 tahun pada tahun 2024. Meskipun peningkatan ini menunjukkan arah yang positif, namun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesehatan yang merata di seluruh wilayah dan kelompok penduduk. UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk status kesehatan, kesejahteraan sosial-ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks tersebut, ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang seimbang, dan sanitasi lingkungan yang layak masih menjadi tantangan utama. Selain itu, tingginya prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular turut memberikan kontribusi negatif terhadap pencapaian UHH.

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong peningkatan UHH yang lebih inklusif, diperlukan pendekatan intervensi yang menyeluruh dan lintas sektor. Strategi utama meliputi perluasan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, percepatan penurunan angka stunting melalui perbaikan kualitas gizi terutama pada ibu hamil dan anak balita, serta penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) secara konsisten di tingkat komunitas. Di samping itu, penguatan layanan kesehatan dasar seperti posyandu dan puskesmas berbasis desa/kelurahan, peningkatan cakupan imunisasi dan layanan maternal-neonatal, perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan sanitasi lingkungan, serta peningkatan kapasitas dan distribusi tenaga kesehatan di wilayah juga merupakan langkah-langkah kunci yang perlu terus diperkuat. Dengan sinergi kebijakan yang berfokus pada aspek promotif, preventif, dan kuratif secara terpadu, diharapkan capaian usia harapan hidup di Kabupaten Kulon Progo dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan merata.

- ***Indeks Keluarga Sehat masih Rendah***

Kondisi ideal adalah indeks keluarga sehat yang tinggi. Data menunjukkan bahwa indeks keluarga sehat meningkat dari 0,26 pada 2020 menjadi 0,33 pada 2024. Namun, indeks tersebut masih rendah. Beberapa Penyebabnya adalah rendahnya skor komponen penyusun indeks itu yang meliputi cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak (imunisasi, posyandu), akses Keluarga Berencana, pemenuhan gizi, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), ketidakterpaduan program lintas sektor, rendahnya partisipasi kader, serta keterbatasan akses informasi dan layanan di tingkat desa. Oleh karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) untuk layanan keluarga sejahtera terpadu, peningkatan kapasitas kader dan fasilitas posyandu, sosialisasi PHBS dan KB, serta penyediaan intervensi gizi berbasis rumah tangga.

- ***Prevalensi Stunting masih Tinggi***

Kondisi ideal adalah prevalensi stunting yang rendah. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting meningkat dari 14,9% pada 2021 menjadi 18,00% pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah malnutrisi ibu selama kehamilan, pemberian makanan pendamping ASI yang tidak adekuat, infeksi berulang akibat sanitasi dan kebersihan yang buruk, serta akses layanan kesehatan primer dan pemantauan tumbuh kembang yang terbatas. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan program perbaikan gizi ibu hamil dan balita melalui suplementasi dan diversifikasi pangan

lokal, promosi ASI eksklusif dan pemberian MP-ASI sesuai standar, intervensi WASH untuk mencegah infeksi, serta penguatan posyandu dan edukasi gizi keluarga.

- ***Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Sosial belum Maksimal***

Kondisi ideal adalah cakupan kepesertaan yang tinggi. Data menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan meningkat dari 89,98% pada 2020 hingga 99,25% pada 2024. Namun, masih ada masyarakat yang belum tercover. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, terutama pada aspek kegotongroyongan dalam jaminan kesehatan sosial, dan sejumlah warga miskin yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah optimalisasi update dan verifikasi basis data calon peserta, penyederhanaan proses registrasi di tingkat desa, peningkatan kampanye literasi JKN di komunitas, dan alokasi subsidi premi tepat sasaran.

2.3.1.2.C Pendidikan Berkualitas yang Merata

- ***Rata-Rata Lama Sekolah belum Optimal***

Kondisi ideal adalah rata-rata lama sekolah yang tinggi. Data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,86 tahun pada 2020 menjadi 9,2 tahun pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan kualitas pendidikan yang merata. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah

Masih adanya angka putus sekolah, keterbatasan akses fisik ke jenjang pendidikan menengah, beban ekonomi keluarga, kualitas pembelajaran yang kurang memadai, serta fasilitas kejar paket pendidikan non formal. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah pemberian beasiswa dan subsidi biaya sekolah, pembangunan dan pemerataan sarana jalan dan transportasi ke sekolah, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, serta program kampanye pentingnya pendidikan lanjutan.

- ***Peningkatan Harapan Lama Sekolah belum Optimal***

Kondisi ideal adalah harapan lama sekolah yang tinggi. Data menunjukkan bahwa harapan lama sekolah meningkat dari 14,26 tahun pada 2020 menjadi 14,49 tahun pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan kualitas pendidikan yang merata. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah rendahnya ekspektasi lama sekolah yang dihitung dari akumulasi angka partisipasi per usia—yakni proyeksi tahun sekolah berdasarkan rasio gross enrollment di setiap jenjang—yang terhambat oleh rendahnya partisipasi siswa usia dini, tingginya angka putus sekolah di SMP/SMA, dan ketimpangan akses antarwilayah. Faktor ekonomi keluarga, keterbatasan infrastruktur sekolah di desa terpencil, serta kualitas guru yang belum merata juga menurunkan nilai indikator ini.

- ***Masih Rendahnya Angka Literasi SD***

Kondisi ideal adalah angka literasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa angka literasi SD meningkat dari 56,67% pada 2021 menjadi 69,19% pada 2024. Namun, angka tersebut masih rendah. Beberapa penyebab rendahnya kondisi itu adalah terbatasnya program literasi dini, rendahnya kapasitas guru dalam pembelajaran baca-tulis, minimnya akses terhadap bahan bacaan berkualitas di sekolah maupun rumah, serta kurangnya dukungan keluarga dalam kebiasaan membaca.

- ***Masih Rendahnya Angka Numerasi SD***

Kondisi ideal adalah angka numerasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa angka numerasi SD meningkat dari 37,55% pada 2021 menjadi 58,81% pada 2024. Namun, angka tersebut masih rendah. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab rendahnya angka numerasi SD adalah karena kelemahan penguasaan konsep matematika dasar, kurangnya latihan problem solving kontekstual, serta minimnya sarana dan bahan ajar interaktif di kelas. Kualitas pembelajaran matematika yang belum merata, beban guru yang tinggi tanpa dukungan pelatihan khusus, serta rendahnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi belajar juga memperburuk kondisi ini.

- ***Masih Rendahnya Angka Literasi SMP***

Kondisi ideal adalah angka literasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa angka literasi SMP meningkat dari 67,69% pada 2021 menjadi 82,91% pada 2024. Namun, angka tersebut masih rendah. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab rendahnya angka literasi SMP adalah keterbatasan waktu pembelajaran berbasis literasi dalam kurikulum SMP, kapasitas guru Bahasa Indonesia yang belum terlatih metode pengajaran literasi kritis, minimnya akses ke bahan bacaan bermutu di sekolah dan rumah, serta rendahnya dukungan keluarga dalam membiasakan kegiatan membaca.

- ***Masih Rendahnya Angka Numerasi SMP***

Kondisi ideal adalah angka numerasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa angka numerasi SMP meningkat dari 56,2% pada 2021 menjadi 70,70% pada 2024. Namun, angka tersebut masih rendah. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab masih rendahnya angka numerasi SMP adalah kompetensi guru matematika yang belum memadai dalam strategi pengajaran numerasi, metode pembelajaran yang kurang kontekstual, serta minimnya bahan ajar interaktif dan praktik problem solving terintegrasi. Keterbatasan waktu pengajaran numerasi, rendahnya dukungan belajar di rumah, dan terbatasnya pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan kurikulum juga memperburuk kondisi ini. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah pelatihan intensif guru dalam pedagogi numerasi kontekstual, penyediaan modul dan media pembelajaran inovatif, implementasi program remedial terstruktur, serta penguatan monitoring hasil belajar berbasis data dan pendirian pusat literasi numerik di tingkat kecamatan.

- ***Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat***

Kondisi ideal adalah indeks pembangunan literasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat meningkat dari 29,18 pada 2020 menjadi 96,23 pada 2024. Namun, indeks tersebut masih rendah pada beberapa kelompok. Beberapa penyebabnya adalah budaya baca yang belum terbentuk, infrastruktur literasi yang terbatas, dan kesenjangan digital di tingkat masyarakat desa. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penyediaan perpustakaan desa dan pojok baca berbasis masyarakat, mobilisasi perpustakaan keliling, program kampanye gemar membaca melalui kemitraan sekolah dan komunitas, pelatihan tenaga literasi lokal, dukungan dana operasional literasi, serta peningkatan akses internet dan sumber bacaan digital.

- ***Masih Rendahnya Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi***

Kondisi ideal adalah persentase satuan pendidikan yang tinggi. Data menunjukkan bahwa persentase satuan pendidikan meningkat dari 76,49% pada 2022 menjadi 80,65% pada 2024. Namun, angka tersebut masih rendah. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah kendala kualitas pembelajaran, terutama kompetensi guru dalam strategi pengajaran literasi kritis, kecukupan materi ajar dan sumber baca, serta rendahnya

motivasi dan kesiapan siswa menghadapi asesmen. Selain itu, manajemen sekolah sering kurang memanfaatkan data asesmen untuk perbaikan kurikulum dan intervensi dini.

- ***Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi masih Rendah***

Kondisi ideal adalah persentase satuan pendidikan yang tinggi. Data menunjukkan bahwa persentase satuan pendidikan meningkat dari 19,64% pada 2022 menjadi 38,6% pada 2024. Namun, angka tersebut masih rendah. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah kompetensi guru dalam pengajaran numerasi yang belum optimal, metode pembelajaran matematika yang kurang kontekstual dan aplikatif, keterbatasan sarana media ajar interaktif, serta minimnya pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan kurikulum. Indikator-indikator di atas merupakan indikator yang mewakili aksesibilitas dan mutu pendidikan dasar di tingkat kabupaten. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bertanggung jawab terhadap indikator aksesibilitas dan mutu pendidikan dasar, jika kedua hal tersebut maksimal, maka peluang meningkatnya capaian APK Pendidikan Tinggi juga akan lebih baik.

2.3.1.2.D Perlindungan Sosial yang Adaptif

- ***Masih Rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja***

Kondisi ideal adalah cakupan kepesertaan yang tinggi. Data menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan mengalami fluktuasi dari 31,69% pada 2021 hingga 32,31% pada 2024. Penyebabnya adalah rendahnya rasio peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja—yang dihitung dari jumlah pekerja terdaftar pada program Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan atau program setara) dibagi total angkatan kerja—akibat besarnya sektor informal tanpa perlindungan sosial, kompleksitas prosedur pendaftaran, data ketenagakerjaan yang terfragmentasi, serta minimnya kesadaran dan literasi jaminan sosial di kalangan pekerja dan pengusaha skala mikro. Menghadapi permasalahan ini, reformasi sistem jaminan sosial nasional perlu diarahkan pada penyederhanaan dan digitalisasi proses pendaftaran, integrasi basis data lintas perangkat daerah, pemberian insentif bagi usaha mikro dan informal, kampanye edukatif tentang hak dan manfaat jaminan sosial, serta penguatan peran pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pendampingan teknis. Kebijakan ini juga harus terintegrasi dengan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang lebih adaptif dan tepat sasaran, serta pengembangan ekonomi perawatan *(care economy)* sebagai bagian dari perlindungan kelompok rentan dan pengakuan terhadap pekerjaan sosial yang belum terstandarisasi secara ekonomi.

2.3.1.2.E Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

- ***Indeks Pembangunan Kebudayaan masih Rendah***

Kondisi ideal adalah indeks pembangunan kebudayaan yang tinggi. Data menunjukkan bahwa indeks pembangunan kebudayaan belum tersedia dari 2020 hingga 2024. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), daerah perlu memperkuat kelembagaan budaya, melindungi warisan budaya, dan mendorong ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Integrasi pendidikan budaya di sekolah dan digitalisasi arsip budaya akan memperluas partisipasi masyarakat. Promosi budaya melalui platform daring juga penting untuk menjangkau generasi muda. Kolaborasi pentahelix antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta harus didorong untuk menciptakan ekosistem budaya

yang hidup. Evaluasi IPK perlu difokuskan pada ekspresi budaya, literasi, dan keberagaman budaya, guna membangun identitas daerah yang kuat dan adaptif terhadap perubahan.

Dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) tahun 2025 memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen kuat dari Pemerintah Daerah untuk melindungi kebudayaan yang ada baik melalui dukungan program, sarana prasarana dan penguatan regulasi kebudayaan. Dibutuhkan perencanaan dan langkah-langkah strategis yang akan melibatkan seluruh stakeholder pemangku budaya untuk sama-sama terlibat dalam pembangunan kebudayaan.
2. Meningkatkan kualitas pengemasan kegiatan pelestarian adat tradisi menjadi wisata budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Membangun sinergitas dan kolaborasi dalam membuat festival seni budaya yang berhubungan dengan kesepuluh Obyek Pemajuan Kebudayaan di pusat-pusat kegiatan masyarakat, lembaga-lembaga Pemerintah dan atau event Pemerintah.
4. Penguatan pada objek kebudayaan yang lain meliputi bahasa, tradisi, adat istiadat, teknologi, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Mengupayakan paten untuk setiap karya dan mempromosikannya dalam kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
5. Membuat event kebudayaan berskala besar sebagai bagian dari promosi budaya. Langkah branding bertujuan memberi kebanggaan masyarakat terhadap potensi budaya daerah dan sebagai pemacu dalam mengembangkan keunggulan yang sudah ada menjadi karya inovatif yang bernilai tinggi.
6. Penggunaan Bahasa Jawa atau budaya ke-Jawa-an di ruang publik perlu ditingkatkan dalam upaya pelestarian nilai tradisi lokal.
7. Perlu adanya edukasi tentang kebudayaan kepedulian masyarakat untuk memelihara kebudayaan bisa meningkat.
8. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pelestari kebudayaan yang telah berjasa memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
9. Perlu adanya penggalian lebih dalam terkait kesepuluh Obyek Pemajuan Kebudayaan yang ada di masyarakat sebagai bahan untuk usulan penetapan Warisan Budaya Tak Benda.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut ditindaklanjuti diantaranya dengan:

1. Rekomendasi nomor (1) dan (2) ditindaklanjuti dengan program strategis bupati Pembangunan rintisan museum yang menjawab komitmen pemkab terhadap perlindungan kebudayaan dan pengemasan budaya menjadi wisata budaya yang meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Rekomendasi nomor (3), (5), (7), (8), dan (9) ditindaklanjuti dengan program strategis Bupati “Mempromosikan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya Secara Berkelanjutan” yang membuat festival seni dan budaya sekaligus nomor (2) meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Rekomendasi nomor (4) dan (6) ditindaklanjuti dengan “Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan” yang berfokus pada pengembangan pendidikan karakter, pengembangan

lumbung mataraman, sistem pertanian tradisional, dan nominasi warisan budaya nasional dan dunia.

2.3.1.2.F Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

- ***Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)***

Kondisi ideal adalah indeks pembangunan keluarga yang tinggi. Data menunjukkan bahwa indeks pembangunan keluarga meningkat dari 61,43 pada 2020 menjadi 64,3 pada 2024. Namun, indeks tersebut masih rendah. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah masih adanya ketimpangan akses layanan dasar seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak, serta dukungan psikososial keluarga. Faktor lain meliputi rendahnya pemahaman keluarga tentang pola asuh yang sehat, minimnya intervensi pemberdayaan ekonomi keluarga, serta keterbatasan program perlindungan sosial yang menyasar keluarga rentan. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan gizi, penyuluhan dan pelatihan pola asuh positif, pemberdayaan ekonomi melalui program bantuan modal usaha kecil, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pendampingan keluarga di tingkat desa dan kelurahan.

- ***Indeks Ketimpangan Gender masih Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah indeks ketimpangan gender yang rendah. Data menunjukkan bahwa indeks ketimpangan gender mengalami fluktuasi dari 0,129 pada 2020 hingga 0,145 pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah norma sosial patriarki, rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, terbatasnya kesempatan kerja formal bagi perempuan, serta minimnya perlindungan hukum dan dukungan kebijakan pemberdayaan gender di tingkat lokal. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan program pendidikan dan pelatihan vokasi khusus perempuan, pemberdayaan ekonomi berbasis perempuan melalui akses kredit dan pelatihan kewirausahaan, penegakan hukum anti-diskriminasi gender, serta pembentukan forum inklusi gender di pemerintahan daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

2.3.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Pada bagian permasalahan yang disajikan secara garis besar merujuk dan selaras dengan gambaran umum kondisi daerah sebagaimana telah dipaparkan dalam Subbab 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah. Uraian ini juga memuat pengelompokan permasalahan yang dikaitkan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 (tertuang sebagai IE: Indonesia Emas), yakni:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE 4);
3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (IE 7);
4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (IE 8); dan
5. Stabilitas Ekonomi Makro (IE 11).

2.3.1.3.A Daya Saing Sumber Daya Manusia

- ***Masih Tingginya Angka Ketergantungan***

Kondisi ideal adalah angka ketergantungan yang rendah, yang bermakna adanya kemandirian ekonomi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa angka ketergantungan meningkat dari 49,04% pada 2020 menjadi 49,57% pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab masih tingginya tingkat ketergantungan adalah masih besarnya proporsi anak dan lansia yang tidak mandiri secara ekonomi, serta rendahnya partisipasi angkatan kerja usia muda akibat keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Ketergantungan ekonomi juga diperparah oleh rendahnya kemandirian keluarga miskin dan terbatasnya akses layanan sosial dasar. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah perluasan akses pendidikan dan pelatihan vokasi bagi remaja, penguatan perlindungan sosial dan layanan lansia berbasis komunitas, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga rentan agar dapat menopang beban ketergantungan rumah tangga secara berkelanjutan.

2.3.1.3.B Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

- ***Kontribusi/Rasio PDRB Industri Pengolahan Menurun***

Idealnya kontribusi PDRB industri pengolahan harus semakin tinggi untuk mendukung perkembangan pola kebutuhan masyarakat. Peningkatan itu juga bermakna adanya kenaikan produktivitas industri pengolahan. Data menunjukkan bahwa kontribusi PDRB industri pengolahan mengalami penurunan dari 11,07% pada 2020 menjadi 10,11% pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah minimnya investasi pada sektor hilir, dominasi bahan mentah dalam struktur ekonomi lokal, keterbatasan infrastruktur industri, rendahnya kapasitas teknologi UMKM pengolahan, serta belum optimalnya kemitraan antara pelaku industri kecil dengan pasar regional dan nasional. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam membangun kawasan industri terpadu dan memberikan insentif investasi masih terbatas. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal, fasilitasi permesinan dan teknologi tepat guna, penyediaan pelatihan teknis dan manajerial bagi pelaku UMKM industri, serta promosi investasi dengan skema insentif fiskal yang mendukung pertumbuhan industri pengolahan berorientasi ekspor dan substitusi impor.

- ***Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum belum Optimal***

Kondisi ideal adalah rasio PDRB akomodasi makan dan minum yang tinggi, menunjukkan sektor pariwisata yang kuat. Data menunjukkan bahwa rasio PDRB akomodasi makan dan minum meningkat dari 3,35% pada 2020 menjadi 3,88% pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan potensi maksimal sektor pariwisata. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata lokal, rendahnya kualitas dan kuantitas usaha kuliner serta penginapan yang memenuhi standar layanan, serta lemahnya promosi destinasi dan integrasi antar pelaku pariwisata. Selain itu, pelaku usaha kecil di sektor ini masih menghadapi kendala perizinan, permodalan, dan keterampilan manajerial. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan ekosistem pariwisata berbasis komunitas, peningkatan kapasitas pelaku UMKM kuliner dan homestay, pembangunan infrastruktur penunjang wisata, serta kampanye promosi terpadu dan digitalisasi pemasaran untuk meningkatkan permintaan terhadap layanan akomodasi dan makanan-minuman lokal.

- ***Rasio Kewirausahaan masih Fluktuatif***

Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah, idealnya rasio kewirausahaan harus meningkat, yang dapat menjadi mengindikasikan tingkat inovasi dan produktivitas yang baik. Data menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan mengalami fluktuasi dari 2,09%

pada 2020 hingga 2,11% pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah terbatasnya akses permodalan, rendahnya literasi kewirausahaan, minimnya pendidikan keterampilan bisnis sejak dini, serta belum optimalnya ekosistem pendampingan usaha rintisan di daerah. Selain itu, stigma terhadap risiko kegagalan usaha dan preferensi terhadap pekerjaan formal turut menghambat pertumbuhan wirausaha baru. Kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penyediaan program pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal, fasilitasi akses pembiayaan mikro dan inkubasi bisnis, integrasi kurikulum kewirausahaan di satuan pendidikan, serta penguatan kolaborasi antar-OPD untuk menciptakan lingkungan usaha yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah terhadap wirausaha pemula serta pelaku UMKM.

- ***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, menunjukkan tingkat keterlibatan dalam aktivitas ekonomi yang baik. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami fluktuasi dari 77,88% pada 2020 hingga 78,57% pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah terbatasnya peluang kerja yang layak, ketidakcocokan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, serta tingginya jumlah perempuan dan pemuda usia produktif yang tidak bekerja karena beban domestik atau minimnya akses pelatihan. Kondisi ini juga diperparah oleh belum optimalnya peran layanan ketenagakerjaan daerah. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan akses pelatihan vokasi berbasis permintaan pasar, fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui balai kerja daerah, penyediaan layanan penitipan anak untuk mendukung partisipasi kerja perempuan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis padat karya dan wirausaha produktif.

- ***Indeks Inovasi Daerah masih Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah indeks inovasi daerah yang tinggi, menunjukkan tingkat inovasi dan produktivitas yang baik. Data menunjukkan bahwa indeks inovasi daerah mengalami fluktuasi dari 4,129 pada 2020 hingga 54,68 pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah masih lemahnya budaya inovasi di birokrasi, minimnya riset terapan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang fokus pada inovasi, serta terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Rendahnya kapasitas ASN dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi inovasi juga menjadi faktor penghambat. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan ekosistem inovasi melalui pembentukan laboratorium inovasi daerah, pelatihan ASN berbasis kompetensi inovatif, kemitraan strategis dengan sektor swasta dan akademisi, serta pemberian insentif dan pengakuan formal atas inovasi yang berdampak nyata terhadap efisiensi layanan dan kesejahteraan masyarakat.

- ***Menurunnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten***

Kondisi ideal adalah proporsi industri kecil dan menengah yang tinggi, menunjukkan tingkat produktivitas dan kemandirian ekonomi yang baik. Data menunjukkan bahwa proporsi industri kecil dan menengah mengalami penurunan dari 2,2% pada 2020 hingga 1,31% pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena terbatasnya akses terhadap pembiayaan, rendahnya adopsi teknologi dan inovasi produk, serta lemahnya daya saing IKM dalam rantai pasok lokal dan nasional. Selain itu, kebijakan pendampingan usaha dan perlindungan terhadap produk lokal sering belum konsisten, dan belum banyak kawasan industri yang ramah bagi pelaku IKM.

Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah fasilitasi pembentukan sentra IKM berbasis potensi unggulan desa, perluasan akses kredit berbunga rendah, inkubasi bisnis terpadu, pelatihan teknis dan digitalisasi usaha, serta penguatan perlindungan produk lokal melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang berpihak kepada IKM.

- ***Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB masih Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang tinggi, menunjukkan tingkat kemandirian ekonomi yang baik. Data menunjukkan bahwa rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami fluktuasi dari 2,01% pada 2020 hingga 1,89% pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena terbatasnya jumlah koperasi yang aktif dan produktif, rendahnya kapasitas manajerial pengurus koperasi, serta minimnya inovasi produk dan integrasi koperasi dalam rantai nilai ekonomi lokal. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi masih rendah akibat praktik pengelolaan yang belum transparan. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah revitalisasi koperasi melalui pelatihan manajemen usaha, digitalisasi pencatatan dan layanan, fasilitasi akses pembiayaan, serta integrasi koperasi dalam program pengadaan barang/jasa dan ekosistem industri lokal, sehingga koperasi dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

- ***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan masih Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang tinggi, menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang baik. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami fluktuasi dari 70,16% pada 2020 hingga 71,79% pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena masih tingginya beban kerja domestik yang tidak dibayar, terbatasnya akses terhadap layanan penitipan anak dan lansia, serta rendahnya fleksibilitas kerja di sektor formal. Norma sosial dan budaya patriarki juga turut membatasi ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan program pelatihan keterampilan berbasis gender, penyediaan pusat layanan penitipan anak di kawasan kerja, pemberian insentif bagi dunia usaha yang menyerap tenaga kerja perempuan, serta kampanye perubahan norma sosial untuk mendorong kesetaraan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

2.3.1.3.C Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

- ***Pembentukan Modal Tetap Bruto belum Maksimal***

Kondisi ideal adalah pembentukan modal tetap bruto yang tinggi, menunjukkan tingkat investasi yang baik. Data menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap bruto meningkat dari 40,1% pada 2020 menjadi 41,98% pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan potensi maksimal investasi. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena terbatasnya realisasi investasi swasta dan publik, lemahnya iklim usaha lokal, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, listrik, dan konektivitas digital. Selain itu, keterbatasan perencanaan spasial dan tata ruang juga menghambat pengembangan kawasan ekonomi produktif. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penyusunan peta potensi investasi daerah, penyediaan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investor, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi, serta penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui koordinasi lintas-OPD yang proaktif dan responsif.

- ***Kontribusi PDRB Kabupaten belum Maksimal***

Kondisi ideal adalah kontribusi PDRB kabupaten yang tinggi, menunjukkan tingkat produktivitas dan kemandirian ekonomi yang baik. Data menunjukkan bahwa kontribusi PDRB kabupaten meningkat dari 8,50% pada 2020 menjadi 8,74% pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan potensi maksimal produktivitas. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena lemahnya sektor-sektor produktif unggulan, kurangnya diversifikasi ekonomi, serta rendahnya nilai tambah dari proses produksi lokal. Ketergantungan pada sektor primer (pertanian dan ekstraktif) tanpa pengolahan lanjutan juga membatasi kontribusi terhadap PDRB secara optimal. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan hilirisasi sektor unggulan lokal, pengembangan industri berbasis sumber daya daerah, investasi dalam infrastruktur ekonomi dan konektivitas pasar, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal melalui pelatihan, insentif fiskal, dan kemitraan strategis lintas-sektor.

2.3.1.3.D Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- ***Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak belum Optimal***

Kondisi ideal adalah rumah tangga dengan akses hunian layak yang tinggi, menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Data menunjukkan bahwa akses hunian layak meningkat dari 45,5% pada 2023 menjadi lebih tinggi pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan kesejahteraan yang merata. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena keterbatasan pendapatan rumah tangga, kurangnya intervensi perumahan dari pemerintah daerah, serta belum optimalnya integrasi program perumahan dengan sistem perlindungan sosial. Banyak rumah tangga miskin tinggal di kawasan informal atau rawan bencana tanpa kepastian hukum atas tanah. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penyediaan bantuan stimulan rumah swadaya, penyusunan rencana tata ruang berbasis hunian inklusif, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pembiayaan untuk membangun kawasan permukiman layak dan terjangkau bagi kelompok rentan.

- ***Persentase Desa Mandiri belum Substansial***

Kondisi ideal adalah persentase desa mandiri yang tinggi, yang menunjukkan adanya kemandirian ekonomi dan sosial di desa. Data menunjukkan bahwa persentase desa mandiri meningkat dari 4,6% pada 2020 menjadi 82,76% pada 2024. Namun, peningkatan tersebut belum mencerminkan kemandirian yang merata. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena terbatasnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa, rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekonomi produktif dan penguatan kelembagaan lokal. Selain itu, integrasi antarprogram pembangunan lintas sektor di tingkat desa seringkali belum efektif. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan berbasis kebutuhan, penguatan perencanaan partisipatif, pengembangan BUMDes yang produktif dan berkelanjutan, serta penyelarasan program Organisasi Perangkat Daerah dengan indikator IDM agar mendorong percepatan status desa dari tertinggal ke mandiri secara sistematis dan terukur.

2.3.1.3.E Stabilitas Ekonomi Makro

- ***Menurunnya Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB***

Kondisi ideal adalah rasio pajak daerah terhadap PDRB yang tinggi, menunjukkan tingkat pendapatan daerah yang baik. Data menunjukkan bahwa rasio pajak daerah terhadap PDRB mengalami penurunan dari 0,68% pada 2020 menjadi 0,54% pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena belum optimalnya realisasi basis pajak, masih tingginya tingkat informalitas ekonomi, lemahnya kepatuhan wajib pajak, serta belum optimalnya inovasi sistem pemungutan dan digitalisasi perpajakan. Selain itu, koordinasi antar-OPD dan sinergi dengan sektor swasta dalam mendukung ekstensifikasi dan intensifikasi pajak juga masih terbatas. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah optimalisasi pemutakhiran basis data pajak berbasis NIK dan kewilayahan, digitalisasi layanan pajak daerah, edukasi perpajakan kepada pelaku usaha kecil, serta reformasi insentif fiskal yang mendukung perluasan basis pajak secara adil dan berkelanjutan.

- **Menurunnya Total Kredit per PDRB**

Kondisi ideal adalah total kredit per PDRB yang tinggi, menunjukkan tingkat inklusivitas keuangan yang baik. Data menunjukkan bahwa total kredit per PDRB mengalami penurunan dari 25,64% pada 2020 menjadi 23,87% pada 2024. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena terbatasnya akses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap lembaga keuangan formal, lemahnya literasi keuangan masyarakat, serta belum optimalnya ekosistem pendukung pembiayaan daerah seperti koperasi dan lembaga penjamin kredit. Selain itu, persepsi risiko tinggi di daerah rural oleh perbankan juga membatasi penyaluran kredit. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan lembaga keuangan mikro berbasis desa, peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui edukasi terprogram, fasilitasi kemitraan UMKM dengan perbankan dan fintech, serta pemberdayaan peran dinas koperasi dan UMKM untuk mendampingi proses perencanaan usaha yang bankable dan layak didanai.

2.3.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian permasalahan yang disajikan secara garis besar merujuk dan selaras dengan gambaran umum kondisi daerah sebagaimana telah dipaparkan dalam Subbab 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum. Uraian ini juga memuat pengelompokan permasalahan yang dikaitkan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 (tertuang sebagai IE: Indonesia Emas), yakni:

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (IE 9);
2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial (IE 10); dan
3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan (IE 12).

2.3.1.4.A Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

- ***Masih Rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)***

Kondisi ideal adalah indeks pemerintahan digital yang tinggi, menunjukkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Data menunjukkan bahwa indeks pemerintahan digital meningkat dari 3,22 pada 2021 menjadi 3,91 pada 2024. Namun, indeks tersebut masih rendah dibandingkan dengan standar ideal. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena belum optimalnya transformasi digital pada tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi aparatur sipil negara dalam teknologi informasi, serta belum

terintegrasinya sistem informasi lintas Organisasi Perangkat Daerah. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penyusunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan kapasitas SDM digital melalui pelatihan teknis berjenjang, penguatan regulasi dan kelembagaan digital daerah, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada keterbukaan data, efisiensi layanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

- ***Indeks Pelayanan Publik masih Fluktuatif***

Kondisi ideal adalah indeks pelayanan publik yang tinggi, menunjukkan kualitas pelayanan yang baik. Data menunjukkan bahwa indeks pelayanan publik meningkat dari 4,39 pada 2020 menjadi 4,55 pada 2024. Namun, indeks tersebut masih fluktuatif dan belum mencerminkan pelayanan prima secara konsisten. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena kualitas manajemen pelayanan belum optimal, keterbatasan kapasitas aparatur, serta belum meratanya digitalisasi dan standar pelayanan minimal di seluruh unit layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan masih rendah. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik, peningkatan kompetensi dan etika layanan aparatur, penyusunan dan implementasi standar pelayanan publik yang akuntabel, serta digitalisasi layanan dengan prinsip keterbukaan, integritas, dan kemudahan akses, sejalan dengan agenda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan mekanisme umpan balik masyarakat.

2.3.1.4.B Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

- ***Persentase Penegakan Perda belum Optimal***

Kondisi ideal adalah persentase penegakan perda yang tinggi, menunjukkan efektivitas dalam penegakan hukum. Data menunjukkan bahwa persentase penegakan perda tetap pada 100% dari 2020 hingga 2024. Namun, angka tersebut belum mencerminkan kualitas penegakan hukum yang merata. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah karena lemahnya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana dan Satpol PP, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan, serta minimnya sosialisasi dan partisipasi publik dalam pengawasan implementasi Perda. Selain itu, masih ada Perda yang tidak memiliki petunjuk teknis operasional yang jelas. Karena itu kebijakan yang perlu diprioritaskan adalah penguatan peran Satpol PP sebagai penegak Perda melalui peningkatan kapasitas personel, alokasi anggaran yang memadai, harmonisasi regulasi antar-OPD, serta optimalisasi pengawasan partisipatif masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan Perda secara transparan dan akuntabel.

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau sebagai peluang di masa depan. Isu juga berpotensi menjadi tantangan di kemudian hari. Selain dari permasalahan, isu strategis juga dapat merujuk pada potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, namun jika potensi tersebut dikelola dengan baik maka dapat menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Mengingat banyaknya dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang sudah ada, untuk menentukan isu strategis diperlukan identifikasi mulai dari isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal

sesuai dengan dinamika yang berkembang saat ini dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kulon progo.

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperbarui konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan memperkenalkan agenda pembangunan global baru yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan dalam SDGs merupakan pengembangan tujuan pembangunan MDGs yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang modern. Melalui mandat SDGs, PBB berusaha untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas secara global, meningkatkan perekonomian tanpa memberikan dampak kerusakan lingkungan yang besar dan mendorong pembangunan yang terus berkelanjutan melalui 17 indikator yang saling berkaitan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya untuk periode 2016-2030 mencakup:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2.3.2.1-1 Tujuan *Sustainable Development Goals*

2.3.2.1.A Teknologi

Perkembangan teknologi menuntut kesiapan adaptasi dari masyarakat. Dalam dua dekade ke depan, teknologi diperkirakan menjadi topik yang paling berpengaruh secara global. Inovasi yang berkembang sangat cepat, seperti *Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence (AI)*, dan robotisasi, merupakan peluang sekaligus tantangan yang kompleks. Di satu sisi, kemajuan teknologi mampu mempermudah berbagai pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi, serta mendorong efektivitas dalam penggunaan sumber daya, waktu, dan jarak. Namun di sisi lain, perubahan teknologi yang bersifat eksponensial juga menimbulkan implikasi luas terhadap hampir seluruh sektor industri.

Kemajuan teknologi berdampak signifikan terhadap dunia kerja. Penerapan AI dan otomasi dapat menggantikan peran manusia dalam berbagai jenis pekerjaan. Sektor padat karya secara perlahan akan tergantikan oleh sistem robotik. Bahkan, AI kini mampu mempelajari dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kompleks yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti analisis data dalam skala besar *(big data forecasting)* dan penciptaan produk-produk kreatif di bidang seni maupun hiburan.

Dari sisi produksi, teknologi berbasis kecerdasan buatan berpotensi menekan biaya produksi dan mengurangi beban sosial. Namun, dampak negatif yang mungkin muncul adalah tergantikannya banyak tenaga kerja manusia oleh mesin serta kemunduran sektor-sektor yang tidak mampu beradaptasi dengan transformasi digital. Perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh besar di berbagai sektor. Dalam industri, robotisasi dan otomasi mendorong proses produksi menjadi lebih efisien, efektif, dan meningkatkan keselamatan kerja. Di sektor pendidikan, pemanfaatan AI dan IoT membuka akses terhadap ilmu pengetahuan secara lebih luas, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Di sektor ekonomi, teknologi digital seperti *e-commerce* dan *marketplace* memperluas jangkauan UMKM dalam mengakses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong peningkatan daya saing di tingkat lokal maupun global. Digitalisasi ini memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk berpartisipasi dalam rantai nilai yang lebih besar, serta menjangkau konsumen secara langsung tanpa batasan geografis.

Sementara itu, di sektor pemerintahan, kemajuan teknologi mendukung peningkatan kecepatan dan efisiensi pelayanan publik, serta memperkuat kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, melakukan transformasi birokrasi, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dan menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.3.2.1.B Ekonomi, Politik, dan Pemerintah

Perkembangan geopolitik global semakin dinamis dan berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan. Dinamika politik antarnegara serta konflik yang terjadi di berbagai kawasan telah memberikan pengaruh signifikan yang meluas. Kemajuan teknologi dan media sosial turut mempercepat penyebaran informasi, membuat masyarakat lebih mudah dalam menyerap dan mengolah berbagai isu global.

Beberapa tantangan geopolitik yang perlu diperhatikan antara lain peningkatan persaingan antarnegara yang memunculkan kekuatan-kekuatan baru. Ketegangan ini berpotensi memicu konflik di berbagai kawasan dunia. Salah satu isu yang relevan adalah dampak dari perang antarnegara, seperti konflik Rusia-Ukraina. Meskipun konflik tersebut tidak terjadi di kawasan Asia Tenggara, dampaknya terasa secara global, antara lain melalui peningkatan inflasi, kelangkaan sumber daya alam, serta dorongan bagi negara-negara lain untuk memperkuat instrumen militer demi menjaga kedaulatan masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan risiko konflik bersenjata di masa depan.

Dari sisi geoekonomi, terjadi pergeseran poros perekonomian dunia. Jika sebelumnya bersifat unipolar dengan dominasi Amerika Serikat, kini mulai bergeser menjadi multipolar, dengan munculnya pengaruh ekonomi yang signifikan dari negara-negara seperti Tiongkok, Arab Saudi, Rusia, dan India. Pergeseran ini turut memengaruhi arah kebijakan ekonomi dan politik global, termasuk di Indonesia.

Di sisi lain, percepatan perkembangan teknologi juga menimbulkan disrupsi terhadap tren perekonomian masa depan. Salah satu contoh nyata adalah pertumbuhan industri kendaraan listrik. Subsektor ini membuka peluang besar bagi negara-negara yang memiliki sumber daya tambang strategis, seperti Indonesia, untuk menjadi pemasok utama bahan baku baterai dan komponen elektronik lainnya.

Prinsip *No Region Can Stand Alone* menjadi semakin relevan. Perubahan zaman yang cepat, ditambah kemajuan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat, menuntut pemerintah termasuk di tingkat regional untuk mampu beradaptasi secara cepat dan efektif. Namun, pemerintah daerah seringkali menghadapi keterbatasan dalam aspek finansial, teknis, maupun kebijakan, yang menghambat pelaksanaan peran dan fungsi secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan model pemerintahan daerah yang lebih adaptif, efektif, dan efisien. Salah satu langkah strategis adalah dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lain, seperti sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Model kerjasama antardaerah yang lebih terbuka dan berorientasi hasil dapat menjadi alternatif dalam memperkuat kapasitas daerah. Dengan model pemerintahan daerah yang lebih responsif dan kolaboratif, diharapkan kemandirian daerah meningkat dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi.

2.3.2.1.C Lingkungan

Kemajuan umat manusia harus diharmonisasikan dengan kelestarian lingkungan. Perkembangan ekonomi dan teknologi yang begitu pesat perlu diimbangi dengan antisipasi terhadap dampak lingkungan. Berdasarkan *United Nations Global Land Outlook* edisi ke-2, sebanyak 70 persen lahan di bumi telah mengalami perubahan dari bentuk alaminya.

Kondisi ini menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan dan berkontribusi terhadap pemanasan global.

Degradasi lingkungan ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti gangguan terhadap pasokan pangan dunia, migrasi paksa, kepunahan keanekaragaman hayati, penurunan kesehatan manusia, munculnya lebih banyak penyakit zoonosis baru, serta konflik dalam perebutan sumber daya alam. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan perlu diintegrasikan dalam perkembangan teknologi dan ekonomi global guna memenuhi kebutuhan energi masa depan, sekaligus secara drastis mengurangi emisi gas rumah kaca, kerawanan pangan, dan kelangkaan air.

Ke depan, perlu dilakukan percepatan dalam pengembangan metode produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan, serta mendorong transisi menuju perekonomian sirkular yang bersifat regeneratif. Pendekatan seperti ekonomi hijau dan ekonomi biru perlu diperkuat dalam rangka mengurangi dampak negatif dari limbah dan polusi terhadap lingkungan.

2.3.2.1.D Kependudukan dan Kesehatan

Pertumbuhan penduduk yang melambat dan perubahan dalam struktur masyarakat menjadi tantangan global tersendiri. Meskipun jumlah penduduk dunia terus meningkat, laju pertumbuhannya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya angka kematian dan meningkatnya harapan hidup, khususnya pada usia bayi. Namun demikian, di beberapa negara terutama negara maju terjadi penurunan signifikan dalam angka kelahiran, yang disebabkan oleh perubahan struktur demografi, seperti meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif.

Situasi ini memunculkan tantangan baru seperti kebutuhan akan perlindungan sosial, berkurangnya angkatan kerja, serta tren demografis yang kompleks. Fenomena sosial seperti meningkatnya mobilitas penduduk, penundaan usia pernikahan, pilihan untuk tidak memiliki anak *(childfree)*, serta permasalahan moral seperti perilaku hidup bebas, pornografi, dan penyimpangan seksual menjadi isu yang memengaruhi fungsi keluarga dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Tantangan lain yang signifikan adalah kesehatan global. Pandemi Covid-19 serta berbagai penyakit *zoonosis* yang dapat menyebar dengan cepat antarnegara menuntut kesiapan infrastruktur dan layanan kesehatan, termasuk perencanaan skenario penanganan krisis kesehatan di masa depan. Selain itu, kesehatan mental juga menjadi isu yang semakin penting sejak pandemi, dan kini menjadi tantangan lintas sektor, termasuk dalam dunia kerja dan kehidupan keluarga.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Pencapaian pembangunan nasional pada dasarnya merupakan agregasi dari capaian pembangunan di tingkat wilayah. Dalam kerangka RPJMN Tahun 2025–2029, pembangunan wilayah ditempatkan sebagai wadah sekaligus instrumen dalam mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Wilayah Jawa, termasuk Kabupaten Kulon Progo yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadapi sejumlah isu strategis yang berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap arah pembangunan daerah. Isu-isu strategis nasional yang relevan dengan konteks pembangunan di wilayah Jawa, antara lain:

1. **Kinerja kawasan perkotaan dan metropolitan yang belum optimal.**

   Rata-rata nilai *Metropolitan Performance Index* di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen. Hal ini menunjukkan adanya inefisiensi kawasan perkotaan dalam melayani wilayah inti maupun daerah hinterland, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap konektivitas dan daya saing wilayah termasuk kawasan-kawasan penyangga di DIY.

2. **Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri.**

   Industri di Jawa masih memiliki nilai tambah rendah akibat keterbatasan adopsi teknologi maju, tercermin dari rasio *robot density* yang hanya 5:10.000, jauh tertinggal dibandingkan Malaysia (55:10.000) maupun Korea Selatan (1.000:10.000). Kondisi ini berdampak pada keterbatasan peningkatan produktivitas, termasuk bagi pelaku usaha di DIY dan Kulon Progo.

3. **Keterbatasan infrastruktur logistik dan sosial, terutama di Jawa bagian selatan.**

   Belum terintegrasinya sistem logistik antarkawasan serta masih adanya kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik maupun sosial menjadi hambatan signifikan bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Isu ini sangat relevan bagi Kulon Progo yang berada di koridor selatan Jawa, di mana penguatan infrastruktur konektivitas menjadi kebutuhan mendesak.

4. **Tingginya kerentanan bencana.**

   Wilayah Jawa memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami di pesisir selatan, tanah longsor serta letusan gunung api, hingga banjir rob dan penurunan muka tanah di pesisir utara. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di pesisir selatan DIY menjadi salah satu wilayah yang paling berisiko terhadap ancaman bencana tersebut, sehingga penanggulangan bencana menjadi isu strategis yang harus diantisipasi.

5. **Kesenjangan keterampilan dan *mismatch* pendidikan-industri.**

   Tingginya pengangguran lulusan SMK (9,31 persen) dan SMA (8,15 persen) di Jawa pada tahun 2023 menunjukkan belum selarasnya keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Kondisi ini menuntut daerah seperti Kulon Progo untuk memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

6. **Masih tingginya masalah gizi dan kesehatan.**

   Prevalensi stunting, wasting, dan underweight di wilayah Jawa masih relatif tinggi dengan rata-rata 20 persen pada tahun 2023. Selain itu, beban kasus TBC juga terkonsentrasi di wilayah padat penduduk. Bagi Kabupaten Kulon Progo, isu ini menegaskan urgensi peningkatan layanan kesehatan preventif dan promotif serta intervensi gizi secara berkelanjutan.

7. **Tingkat kemiskinan yang masih signifikan.**

   Tingkat kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa mencapai 8,11 persen pada 2023, dengan Provinsi DIY mencatat angka tertinggi sekitar 11 persen. Kondisi ini relevan dengan Kabupaten Kulon Progo yang juga menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan. Program pengurangan kemiskinan perlu diarahkan agar

lebih terpadu dengan potensi ekonomi unggulan daerah serta berbasis inovasi pemberdayaan ekonomi pada kantong-kantong kemiskinan.

Secara keseluruhan, isu-isu strategis nasional tersebut menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Kulon Progo tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan wilayah Jawa dan arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, respon daerah terhadap isu strategis nasional harus diwujudkan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada peningkatan daya saing, ketahanan sosial-ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi

2.3.2.3.A Isu Strategis RPJPD Provinsi

Isu strategis Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045 adalah sebagai berikut.

1. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

   Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah tentu harus meningkatkan beberapa upaya yang dilakukan seperti pemerataan pembangunan di seluruh daerah; pengentasan kemiskinan yang inklusif dan terpadu, peningkatan akses serta layanan pendidikan dan kesehatan; memperkuat infrastruktur; serta memberdayakan perempuan dan memperkuat ketahanan keluarga.

2. **Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif**

   Pembangunan yang inklusif adalah sebuah kondisi yang diharapkan dapat menghilangkan eksklusi sosial seperti keterbatasan akses oleh kelompok masyarakat tertentu. Pemenuhan layanan dasar dapat dilakukan melalui pengoptimalan pelayanan publik dengan konsep *Good Governance*. Konsep tersebut memuat beberapa prinsip terkait kesetaraan, partisipasi, dan non diskriminasi. Adanya kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diistilahkan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS merupakan kelompok prioritas penerima manfaat program kesetaraan sosial yang dianggap memiliki kehidupan tidak layak. Untuk mengentaskan permasalahan tersebut dapat dicapai dengan memenuhi dan mempermudah akses terhadap segala layanan dasar baik pada bidang kesehatan dan pendidikan.

3. **Peningkatan Kapasitas SDM**

   Terdapat beberapa langkah strategis untuk mewujudkan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan relevan dengan perkembangan jaman. Dibutuhkan beberapa upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan tersebut. Melalui penyediaan akses pendidikan yang berkualitas dan merata serta penyediaan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Selain itu dukungan tenaga pendidik yang kompeten dan terampil juga penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Keterampilan dan kompetensi tenaga kerja juga dapat diperoleh melalui pelatihan yang bersertifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar baik lokal hingga internasional.

4. **Pelestarian dan Pengelolaan Budaya**

   Kemajuan jaman dan perkembangan teknologi memiliki dampak yang cukup besar terhadap kelestarian budaya lokal. Budaya modern yang bersifat praktis dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan pelestarian kebudayaan daerah dan menambah dinamika dalam perkembangan budaya. Disamping itu, globalisasi juga dapat menjadi salah satu langkah dalam memajukan budaya lokal melalui program

kegiatan yang bersinergi seperti pemanfaatan teknologi interaktif terhadap pelestarian budaya.

5. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi adalah proses menyeluruh dan berkelanjutan untuk memindahkan sumber daya manusia dan sektor-sektor berproduktivitas rendah menuju sektor yang lebih produktif. Upaya peningkatan produktivitas ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Dalam proses transformasi ekonomi, berbagai kebijakan harus diambil untuk memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat peningkatan produktivitas. Transformasi ekonomi adalah upaya untuk keluar dari jebakan sebagai daerah dengan berpenghasilan menengah. Secara bertahap, transformasi ekonomi akan mengubah struktur ekonomi dari yang berbasis komoditas bernilai tambah rendah menjadi industri bernilai tambah tinggi, didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan kompetitif.

6. Penguatan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan merupakan tiga aspek utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sinergitas dan integrasi ketiga aspek tersebut merupakan aspek utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi kerawanan pangan dan gizi secara nasional adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU). Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, PoU DIY selalu di atas rata-rata atau lebih buruk kecuali pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan DIY yang masih tinggi.

7. Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mencapai ekonomi berkelanjutan mengacu pada usaha membangun, mengembangkan, dan merawat infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Ini mencakup berbagai jenis infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan sosial, serta memastikan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar untuk mencapai ekonomi berkelanjutan tidak hanya dilakukan dengan pembangunan infrastruktur fisik saja, tetapi diperlukan juga adanya integrasi prinsip berkelanjutan dalam perencanaan, pengembangan, operasionalisasi infrastruktur.

8. Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang meliputi indeks kualitas air, sungai, air laut, udara dan tutupan lahan merupakan isu yang penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan untuk mendukung kelestarian ekosistem. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, diperlukan sebuah konsep pengukuran yang bisa digunakan untuk mengukur dan memantau penggunaan sumber daya alam di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Isu strategis Neraca Sumber Daya Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta penting untuk menangani kualitas lingkungan hidup.

9. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Mitigasi perubahan iklim mencakup upaya untuk mengurangi atau menghindari penyebab utama perubahan iklim, terutama emisi gas rumah kaca (GRK) seperti

karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrogen oksida (NOx). Mitigasi bertujuan untuk mengurangi dampak jangka panjang perubahan iklim dengan menurunkan emisi GRK, sedangkan adaptasi bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak yang sudah ada atau yang tidak dapat dihindari. Adaptasi terhadap perubahan iklim juga memerlukan pemantauan dan penilaian risiko, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi adaptasi.

10. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian pemanfaatan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi tantangan yang kompleks namun juga penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan pemanfaatan ruang harus mengutamakan konservasi lingkungan hidup, pengendalian banjir, dan mitigasi bencana alam. Kesuksesan pengelolaan pemanfaatan ruang di DIY juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, termasuk penduduk lokal, lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Partisipasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

11. Tata Kelola Pertanahan

Pengelolaan lahan yang berkelanjutan menjadi isu strategis karena pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat lokal. Perlindungan terhadap lahan-lahan penting seperti hutan, lahan basah, dan daerah resapan air juga menjadi fokus dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Pembaruan kebijakan dan regulasi pertanahan yang jelas, transparan, dan efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

12. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Meskipun telah tercapai nilai AKIP yang sangat memuaskan, DIY perlu terus mendorong reformasi birokrasi hingga level pemerintah terdepan agar pemerintahan dapat tetap dinamis, adaptif, dan efisien seiring perubahan zaman. Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui transformasi digital serta memastikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas menjadi visi bersama seluruh elemen pemerintahan.

13. Penguatan Kapasitas Fiskal

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta mengatasi permasalahan pembangunan harus disertai dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Mengingat bahwa kemampuan fiskal DIY dalam pendanaan pembangunan selama ini masih sangat bergantung pada pusat dan sumber penerimaan PAD yang relatif terbatas, maka perhatian terhadap kemampuan keuangan daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pembangunan, perhatian terhadap kualitas belanja juga diperlukan.

14. Penciptaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan yang Kreatif

Untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas layanan publik, penyediaan sarana prasarana layanan dasar, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi sambil tetap

menjaga kelestarian lingkungan, pembiayaan dari pendapatan daerah, terutama PAD, tidaklah cukup. Diperlukan kebijakan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif yang kreatif.

15. **Penguatan Resiliensi dan Manajemen bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan dalam menghadapi Tantangan Lingkungan**

    Kondisi geografis DIY yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan erupsi gunung api, menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Isu strategis ini melibatkan perluasan upaya penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, perlindungan sosial adaptif, serta optimalisasi kolaborasi multi-aktor untuk mengelola risiko bencana yang semakin meningkat. Lalu terkait dengan pembangunan berkelanjutan, diketahui bahwa DIY mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi potensi ancaman bencana dan ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi yang dilakukan tentu harus memperhatikan konservasi lingkungan dan penyesuaian terhadap perubahan iklim.

2.3.2.3.B Isu Strategis RPJMD Provinsi

Selanjutnya, isu strategis Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2022–2027 adalah sebagai berikut.

1. **Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Pedesaan**

   Reformasi Kalurahan meliputi tata kelola birokrasi dan pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi, identifikasi masalah lokal, serta pemanfaatan teknologi, termasuk internet desa. Keberagaman karakter desa menjadi dasar intervensi yang berbasis kekuatan lokal. Kalurahan sebagai subjek pembangunan, sesuai UU Desa dan Pergub DIY No. 131/2018, memegang peran strategis dalam menjalankan urusan keistimewaan, seperti penguatan budaya pemerintahan dan SDM lokal. Nilai-nilai filosofis keistimewaan seperti *Hamemayu Hayuning Bawana* harus menjadi ruh dalam kebijakan desa. Optimalisasi peran Kalurahan membutuhkan dukungan Pemda DIY melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan sumber daya, dan koordinasi lintas sektor, guna mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

2. **Pengembangan Kawasan Selatan DIY**

   Kawasan selatan DIY, termasuk Kabupaten Kulon Progo, merupakan prioritas pembangunan lima tahun ke depan karena masih relatif tertinggal secara sosial-ekonomi. Dengan garis pantai sepanjang 113 km, kawasan selatan DIY ini memiliki potensi besar pada sektor perikanan, garam, pariwisata, serta energi terbarukan. Produksi perikanan dan garam masih rendah, sehingga perlu penguatan kelembagaan dan teknologi. Di sektor pariwisata, kawasan ini menawarkan potensi eksotik yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Kawasan selatan juga menyimpan ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, gumuk pasir, serta potensi energi mikrohidro, surya, bayu, dan gelombang laut. Pembangunan kawasan ini diarahkan melalui prinsip *"development follows infrastructure"* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Kebijakan ini didukung oleh Perdais, Keputusan Gubernur, dan Rencana Induk Pariwisata DIY.

3. Perkembangan Teknologi Informasi

Adaptasi teknologi di sektor industri masih rendah, meskipun revolusi industri 4.0 telah berlangsung. Literasi teknologi di pedesaan, terutama di sektor pertanian, masih rendah. Penguasaan teknologi oleh petani dan generasi muda menjadi tantangan. Revolusi industri 4.0 menuntut penguasaan teknologi untuk menghindari ketertinggalan dan meningkatkan kesejahteraan. DIY menempati posisi kedua nasional dalam Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), dengan infrastruktur digital yang mendukung sektor pariwisata, pendidikan, dan UMKM. *Jogja Smart Province (JSP)* dikembangkan untuk mengakselerasi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera melalui enam dimensi: *Smart Society, Smart Living, Smart Environment, Smart Culture, Smart Governance,* dan *Smart Economy*. Namun, masih ada blank spot internet dan tantangan dalam penggunaan TIK di lingkungan Pemda DIY, termasuk insiden keamanan informasi.

4. Respon Peluang Transnasional

Kegiatan ekonomi DIY terintegrasi dengan ekonomi global melalui arus barang, jasa, informasi, dan permodalan. Komoditas utama adalah pakaian jadi, barang rajutan, dan barang kulit. Impor juga meningkat, dengan Tiongkok, Hongkong, dan Taiwan sebagai pemasok utama. DIY, sebagai bagian dari IORA, fokus pada *blue economy, collaboration and global governance,* dan *The Maritime Silk Road*. *Blue economy* meliputi pengelolaan aset laut, insentif investasi, pengembangan data, rencana tata ruang, kawasan lindung laut, pengelolaan sampah laut, pariwisata berkelanjutan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. *Collaboration and global governance* melibatkan stakeholders termasuk pemerintah, masyarakat lokal, organisasi nirlaba, ilmuwan, dan swasta. *The Maritime Silk Road* menghubungkan Cina dengan negara lain melalui jalur laut. Indonesia, sebagai presiden G20 pada 2022, memberikan peluang bagi DIY untuk terlibat dalam diplomasi kebudayaan. DIY telah menjalin kerjasama dengan daerah lain melalui KSDPL untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

5. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Produktivitas pekerja erat berkaitan dengan tingkat pendidikan, yang menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing DIY, terutama di era industri 4.0. Hasil penelitian *Asia Competitiveness Institute (ACI)* tahun 2020 menempatkan DIY pada posisi 9 dari 34 provinsi di Indonesia, dengan keunggulan di kualitas hidup dan infrastruktur, namun perlu peningkatan di stabilitas makro, pemerintahan, kelembagaan, dan ketenagakerjaan. Program peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja serta kebijakan link and match dunia pendidikan dengan usaha telah dijalankan, namun produktivitas tenaga kerja tetap menjadi fokus utama untuk meningkatkan daya saing DIY.

6. Penyederhanaan Birokrasi dan Pemanfaatan TIK

Penyederhanaan Birokrasi di Pemda DIY dilakukan sesuai dengan standar nasional, dengan menyederhanakan struktur organisasi menjadi dua level tanpa mengubah tipologi perangkat daerah. Tugas fungsi urusan pemerintahan dialihkan ke jabatan fungsional. Tahapan penyederhanaan meliputi: Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan, dan Penyesuaian Sistem Kerja. Kriteria unit organisasi yang disederhanakan mencakup analisis kebijakan, koordinasi, tugas

teknis, kesesuaian dengan jabatan fungsional, dan pelayanan teknis. Unit organisasi yang dipertahankan memiliki kewenangan atributif, berbasis kewilayahan, mandiri, dan pengadaan barang/jasa. Bobot penilaian penyederhanaan mencakup spesialisasi urusan, karakteristik tugas, sifat pelaksanaan, formalisasi, pengelolaan SDM, dan pengelolaan aset.

7. Pemerintahan Simetris-Asimetris

Pemda DIY menerapkan budaya pemerintahan SATRIYA sejak 2008, yang merupakan akronim dari nilai-nilai luhur seperti Selaras, Akal Budi, Teladan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin, dan Ahli. Budaya ini sejalan dengan falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* dan bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui perubahan pola pikir dan cara kerja dalam reformasi birokrasi. Implementasi SATRIYA telah diselaraskan dengan *Core Value* ASN BerAKHLAK, yang mencerminkan employer branding "Bangga Melayani Bangsa." Pemda DIY sedang merumuskan sintesis Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK sebagai strategi transformasi menuju pemerintahan berkelas dunia. Grand Design Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK sedang disusun untuk periode 2023-2030, mencakup seluruh unit kerja di Pemda DIY, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Pemerintah Kalurahan. Budaya pemerintahan ini diharapkan membentuk karakter birokrasi yang berkelas dunia, ditandai dengan pelayanan publik berkualitas tinggi dan tata kelola yang akuntabel, efektif, dan efisien.

8. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan tetap menjadi isu utama pembangunan di DIY, dengan tingkat kemiskinan yang meningkat kembali pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pemda DIY telah menetapkan 15 lokus kapanewon prioritas penanganan kemiskinan di berbagai kabupaten, termasuk Kulon Progo. Strategi penanggulangan kemiskinan DIY meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan akses terhadap sumber daya. Program-program ini mencakup bantuan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, bimbingan mental, pelatihan keterampilan, pembinaan usaha mikro, dan pengembangan infrastruktur penunjang. Penetapan lokus prioritas diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin secara efektif. Upaya pengentasan kemiskinan juga ditujukan untuk mengurangi kejadian kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022. Pemerintah daerah DIY telah menerima data P3KE dan melakukan integrasi serta sinergitas program/anggaran untuk menargetkan individu dan rumah tangga miskin ekstrem. Inisiatif ini harus terus dikembangkan untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem di DIY pada tahun 2024.

9. Upaya Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo

Kebudayaan merupakan aset penting dalam pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Upaya pemajuan kebudayaan meliputi Mengembalikan nilai budaya Yogyakarta yang selaras dengan nilai-nilai kepribadian bangsa, Menguatkan nilai kebudayaan yang terpengaruh, dan Mengembangkan nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman. Pembangunan kebudayaan perlu meningkatkan daya ubah skema kebijakan untuk memengaruhi sektor lain, seperti pendidikan karakter, konservasi lembaga budaya, dan dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Target jangka panjang meliputi Kulon Progo sebagai pusat

kebudayaan dengan identitas budaya yang maju, unggul, dan berbudaya, Kedaulatan pangan dengan produktivitas berkelanjutan, Ciri budaya Kulon Progo yang berkarakter dan beretos kerja tinggi, dan Pengembalian budaya maritim sebagai budaya bangsa. Upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan melalui pariwisata, pendidikan karakter, dan pemberdayaan masyarakat dengan penguatan desa/kalurahan sebagai basis pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan upaya ini, Kulon Progo dapat menjadi daerah yang ramah bagi semua orang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan laut dan budaya cinta bahari.

10. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Seluruh wilayah DIY rentan terhadap berbagai bencana alam, termasuk banjir, longsor, dan kekeringan, yang semakin parah akibat perubahan iklim. Upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi yang perlu diambil meliputi Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pendidikan dan latihan, Pengembangan infrastruktur tahan bencana, seperti bendungan dan tanggul, Implementasi sistem peringatan dini yang efektif, dan 4) Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mengatasi kekeringan. Adaptasi perubahan iklim melibatkan: Pengembangan teknik pertanian yang tahan iklim, Peningkatan pengelolaan hutan dan lahan untuk menjaga ekosistem, Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, dan Peningkatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan risiko bencana dan adaptasi iklim.

11. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pemerintah DIY telah menetapkan kebijakan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk penurunan konflik penggunaan lahan melalui pengelolaan tata ruang yang baik, peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui inovasi teknologi, pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien.

12. Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kulon Progo

Kualitas lingkungan hidup menjadi isu strategis dalam pembangunan di DIY. Arah kebijakannya adalah penurunan masalah ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, peningkatan kualitas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi dan rehabilitasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum dan tata kelola lingkungan, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3 melalui teknologi dan partisipasi masyarakat.

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama yang memengaruhi arah pembangunan suatu daerah. Sumber daya manusia mengacu pada tingkat pendidikan, keterampilan, kompetensi, kesehatan individu yang berkontribusi terhadap produktivitas dan inovasi di suatu daerah. Kualitas SDM yang baik akan mencerminkan tenaga kerja yang terampil sehingga dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Investasi terhadap pengembangan SDM adalah salah satu kunci yang mencapai daya saing daerah pada taraf global dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Kulon Progo sendiri, masih terdapat beberapa faktor yang belum optimal dalam mencapai tujuan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada bidang kesehatan permasalahan mengenai kualitas pelayanan kesehatan masyarakat masih belum tercapai secara optimal. Selain itu, tren terhadap penanganan penyakit *tuberkulosis* juga masih meningkat. Lalu, pada bidang pendidikan rata-rata lama sekolah menjadi salah satu perhatian karena baru mencapai nilai 9.18 yang dapat diartikan bahwa masyarakat Kabupaten Kulon Progo hanya bersekolah hingga tingkat menengah. Lalu, seperti yang diketahui saat ini *bullying* merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan sehingga penting untuk membangun kualitas lingkungan pendidikan yang berkualitas. Dengan Begitu, *output* berupa tenaga kerja yang dihasilkan memiliki kompetensi yang lebih serta memiliki kemampuan beradaptasi yang baik.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia adalah kualitas keluarga dan kesetaraan gender. Kualitas keluarga dan kesetaraan gender yang baik membentuk individu yang lebih sehat, terdidik, dan siap untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Keluarga yang mendukung menyediakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak, sementara kesetaraan gender memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang kerja. Dengan demikian, kedua faktor ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas SDM.

2. Pemenuhan Pelayanan Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Pemenuhan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian mendalam dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan sosial mencakup berbagai program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ketidakpastian ekonomi, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, serta bantuan sosial bagi kelompok rentan. Sementara itu, penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan strategi yang lebih luas, termasuk peningkatan akses pendidikan, perluasan kesempatan kerja, penyediaan perumahan layak, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan kolaborasi strategis multi sektor, termasuk dengan sektor swasta sebagai alternatif pembiayaan, guna mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN serta strategi daerah dalam Pilar Kedua RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang menekankan pentingnya sinergi multipihak dalam mengentaskan kemiskinan. Tantangan dalam pemenuhan pelayanan ini sering kali berkaitan dengan

keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, dan distribusi yang tidak merata. Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan dua aspek yang saling berkesinambungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Di Kabupaten Kulon Progo, persoalan kemiskinan masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Tren peningkatan garis kemiskinan pada tahun 2023 dan tingginya angka pengangguran menjadi indikator adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang harus segera diatasi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya

Peningkatan pelestarian nilai budaya adalah isu penting yang berhubungan dengan menjaga identitas dan warisan budaya di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Nilai-nilai budaya mencakup tradisi, bahasa, seni, dan adat istiadat yang menjadi ciri khas suatu masyarakat dan memberikan rasa kebanggaan serta keterikatan. Namun, perubahan zaman dan perkembangan teknologi seringkali menyebabkan tergerusnya nilai-nilai ini, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan, mendukung kegiatan seni dan budaya, serta mengadakan festival dan acara yang memperingati tradisi lokal. Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan dan mempromosikan budaya kepada audiens yang lebih luas. Melalui langkah-langkah ini, pelestarian nilai budaya dapat ditingkatkan, sehingga warisan budaya tetap hidup dan relevan, serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

4. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah merupakan isu strategis yang esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, berkelanjutan dan inklusif. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan lapangan kerja yang berkualitas. Kemandirian daerah, di sisi lain, berfokus pada kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal secara efektif. Tantangan utama dalam mencapai kedua tujuan ini meliputi kurangnya infrastruktur yang memadai mengakibatkan wilayah tumbuh dengan tidak merata, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, dan regulasi yang kaku. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur yang merata, nilai investasi yang masih rendah, belum siapnya sistem birokrasi kelembagaan, dan belum terciptanya iklim perdagangan. Pemerataan pendapatan juga menjadi isu yang dapat disasar oleh pemerataan pembangunan infrastruktur. Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal sangat penting untuk mendorong inovasi dan memaksimalkan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan daya saing dan kemandirian daerah dapat dicapai.

5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, fasilitas kesehatan, dan jaringan listrik, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Namun, banyak wilayah masih menghadapi tantangan dalam

menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki kondisi geografis yang bermacam-macam, mulai dari pegunungan hingga pesisir. Hal tersebut tentu memberikan tantangan khusus untuk menyediakan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Penggunaan teknologi dan inovasi juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah dapat tercapai, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang inklusif di Kabupaten Kulon Progo juga penting untuk memperhatikan kelompok rentan agar semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok marginal lainnya, memiliki akses yang adil dan merata terhadap fasilitas publik. Hal ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti peningkatan aksesibilitas di jalan, bangunan publik yang ramah disabilitas, dan fasilitas umum yang dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan. Pembangunan yang inklusif tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan tetapi juga mempromosikan kesetaraan sosial dan pemberdayaan komunitas secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

6. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah

Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah menjadi isu penting dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan yang dihadapi mencakup birokrasi yang masih belum efisien, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta rendahnya indeks reformasi birokrasi dan profesionalitas ASN. Penguatan kualitas aparatur menjadi kunci dalam membangun birokrasi yang efektif dan responsif. Sejalan dengan hal tersebut, Reformasi Birokrasi Kalurahan sebagaimana diatur dalam Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 juga menjadi bagian strategis dari agenda ini. Reformasi ini bertujuan menciptakan tata kelola kalurahan yang efektif, kolaboratif, serta berbasis kinerja, dengan pamong kalurahan yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menuntut komitmen kolaboratif antara Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kalurahan secara berkelanjutan. Melalui sinergi reformasi birokrasi dari tingkat kabupaten hingga kalurahan, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan dan keuangan yang optimal, pelayanan publik yang berkualitas, serta kepercayaan masyarakat yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

7. Reformasi Fiskal dan Tata Kelola Digital

Kendati reformasi fiskal berbasis digital, khususnya penerapan ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) di Kabupaten Kulon Progo, telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, akselerasinya masih terkendala oleh berbagai isu struktural dan institusional. Tantangan ini bersifat multi-level, mencakup kapasitas kelembagaan, kesiapan infrastruktur, dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya matang secara digital. Isu-isu strategis yang teridentifikasi meliputi rendahnya literasi digital di kalangan aparatur sipil negara, terutama bendahara pengeluaran dan pejabat pengelola keuangan yang merupakan aktor

kunci dalam eksekusi anggaran. Selain itu, terdapat ketimpangan akses infrastruktur TIK antara wilayah perkotaan dan perdesaan, fragmentasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyebabkan redundansi data, serta resistensi terhadap perubahan dan minimnya adopsi kanal pembayaran digital pada layanan publik konvensional seperti pasar rakyat dan layanan kesehatan primer. Apabila tantangan ini tidak ditangani secara terstruktur, percepatan pergeseran Kabupaten Kulon Progo menuju kategori Indeks ETPD "Digital" yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat terhambat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis sistem dan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Kolaborasi ini harus mencakup dimensi vertikal (antara pemerintah pusat dan daerah) serta horizontal (antar-OPD dan dengan mitra eksternal) untuk menyusun sebuah peta jalan *(roadmap)* yang inklusif, kontekstual, dan terukur guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara mendalam dan berkelanjutan.

8. Perwujudan Wilayah yang Aman dan Nyaman

Wilayah yang aman dan nyaman adalah isu yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat dan daya tarik investasi di suatu daerah. Keamanan mencakup perlindungan dari tindak kriminal, bencana alam, dan ancaman lainnya, sedangkan kenyamanan melibatkan lingkungan yang bersih, infrastruktur yang memadai, dan layanan publik yang efektif. Tantangan dalam menciptakan wilayah yang aman dan nyaman sering kali meliputi tingkat kejahatan yang tinggi, kurangnya fasilitas publik yang memadai, dan penanganan bencana yang kurang optimal. Untuk mengatasi isu ini, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan peningkatan kehadiran dan efektivitas aparat keamanan, perbaikan infrastruktur seperti jalan dan penerangan umum. Selain itu, pemerintah harus memastikan kesiapan menghadapi bencana melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas darurat yang memadai. Dengan menciptakan wilayah yang aman dan nyaman, tidak hanya kesejahteraan masyarakat yang meningkat, tetapi juga daya tarik daerah tersebut bagi investasi dan pengembangan ekonomi akan semakin kuat.

9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lahan berkelanjutan adalah isu yang memiliki keterkaitan terhadap kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati, dan ketahanan ekosistem. Kualitas lingkungan hidup yang baik melibatkan pengendalian polusi udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah yang efektif. Laju pertumbuhan penduduk dan migrasi ke Kabupaten Kulon Progo telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam volume sampah domestik, terutama di kawasan perkotaan. Kehadiran bandara baru di daerah ini juga berkontribusi secara besar terhadap peningkatan jumlah sampah. Meskipun jumlah dan jenis sampah terus meningkat setiap tahun, kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah masih rendah. Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan sosialisasi dan pembinaan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya dalam pengurangan sampah di sumbernya dan penerapan konsep 3R *(Reuse, Reduce, Recycle)*. Kabupaten Kulon Progo memiliki TPA Banyuroto dengan kapasitas terbatas, yang menerima residu dari TPS3R di wilayah tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sumber timbulan sampah yang dominan, penyuluhan dan pendampingan dapat dilakukan lebih efektif di daerah-daerah dengan tingkat sampah tinggi.

Selain penurunan kualitas lingkungan, terdapat isu strategis terkait alih fungsi lahan. Dampak dari perubahan lahan hijau menjadi lahan terbangun, yang dipercepat oleh pembangunan proyek-proyek besar, menjadi perhatian serius dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. Berbagai pembangunan di Kabupaten Kulon Progo telah menyebabkan peningkatan alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun. Dampaknya tidak hanya terbatas pada perubahan lahan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas di sekitarnya, seperti hotel, restoran, dan tempat wisata. Ini memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan alih fungsi lahan ini harus terus diperhatikan dengan memprioritaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

10. Optimalisasi Kecukupan Pangan dan Air Bersih

Pangan yang cukup dan bergizi serta akses terhadap air bersih adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Tantangan Kabupaten Kulon Progo yang dihadapi dalam isu ini meliputi rendahnya kecukupan pangan masyarakat dan infrastruktur air yang kurang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi sumber pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas, serta perbaikan infrastruktur air dan sanitasi. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan pola makan sehat juga sangat penting. Dengan optimalisasi kecukupan pangan dan air bersih, masyarakat dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan kekurangan gizi dan air tidak bersih.

11. Peningkatan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim adalah isu kritis yang membutuhkan perhatian serius untuk melindungi masyarakat dan lingkungan sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan mengenai mitigasi dan adaptasi bencana, serta penguatan sistem peringatan dini. Selain itu, investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana dan praktik pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal harus bekerjasama dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang proaktif, guna membangun ketahanan yang kuat terhadap dampak bencana dan perubahan iklim. Dengan demikian, peningkatan resiliensi akan membantu melindungi aset berharga, menyelamatkan nyawa, dan memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah



Visi Kulon Progo Tahun 2025-2029

Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan

Misi Kulon Progo:	Tujuan Daerah:	Sasaran Daerah:
 1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius	• Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas • Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo • Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius	• Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat • Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat • Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat • Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat
 2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi	• Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah • Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah	• Meningkatnya Kemandirian Daerah • Meningkatnya Daya Saing Daerah • Menurunnya Pengangguran
 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance, aspiratif, serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis	• Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik • Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis	• Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel • Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur lingkungan yang lestari dan tangguh bencana	• Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur • Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	• Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang • Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah • Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup

Program Strategis Bupati



Optimalisasi Fungsi Pelayanan Puskesmas Kalibawang



Peningkatan rata-rata lama sekolah



Beasiswa Mahasiswa Afirmasi Perguruan Tinggi



Relokasi Sekolah Terpadu (Tingkat SD dan SMP)



Peningkatan Pendidikan Karakter



Bimbingan Ketahanan Keluarga untuk Remaja Sekolah



Peningkatan Sarana Olahraga



Pengembangan Aerotropolis: Peningkatan Investasi



Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Warga Miskin



Pengembangan Perbenihan (Mandiri Benih)

Penahapan Pembangunan



BAB 3 VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Periode 2025–2029 merupakan periode pertama dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025–2045, yaitu ***"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)"***. Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025–2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang.

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat.
2. Pemenuhan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan bencana, untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan dan krisis.
3. Peningkatan pelestarian budaya, untuk melestarikan identitas dan nilai budaya lokal yang menjadi fondasi kesejahteraan sosial dan pariwisata.
4. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan sektor-sektor yang mampu meningkatkan daya saing daerah, terutama di tiga wilayah kawasan, yaitu kawasan pariwisata berkelanjutan, kawasan industri dan ekonomi kreatif, serta kawasan *aerotropolis* dan perkotaan Wates.
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur untuk penguatan konektivitas wilayah, dengan membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Proyek strategis yang terkait dengan penguatan konektivitas wilayah tersebut meliputi Bedah Menoreh (trase Temon-Borobudur), Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, kawasan industri Sentolo, Pelabuhan Tanjung Adikarto, pertambangan berkelanjutan pasir besi, kawasan perkotaan Wates, kawasan pantai selatan, SPAM Kamijoro, asrama haji, dan kawasan *aerotropolis*.
6. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen keuangan serta tata kelola pemerintahan.
7. Perwujudan wilayah yang aman dan nyaman, melalui peningkatan keamanan dan kualitas lingkungan hidup.
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lahan berkelanjutan, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
9. Optimalisasi kecukupan pangan dan air bersih, untuk menjamin pasokan yang stabil dan mendukung kesehatan masyarakat.
10. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana alam dan perubahan iklim.

Dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis dan tantangan pembangunan daerah, maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yaitu:



Gambar 3.1.1-1 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, 2025

Visi ***"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan"*** mencerminkan komitmen Kabupaten Kulon Progo dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara inklusif, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga nilai-nilai budaya dan religiusitas, serta memastikan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut:

1. **Makmur:** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang makmur, di mana kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta memiliki akses yang layak terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki pendapatan yang memadai untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, disertai dengan terciptanya peluang kerja yang luas dan lingkungan ekonomi yang stabil.
2. **Mandiri:** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak lain. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan potensi lokal, pemberdayaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang relevan. Dengan semangat kemandirian, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan global dan menjaga keberlanjutan pembangunan melalui inovasi, kreativitas, dan kerjasama komunitas.
3. **Religius**: Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai religius yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan aparatur pemerintah. Masyarakat yang religius diharapkan memiliki keyakinan yang kokoh terhadap ajaran agama yang dianut, yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan moral dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga tercipta harmoni sosial yang dilandasi oleh toleransi, rasa hormat, dan

solidaritas antar umat beragama. Religius tidak hanya diturunkan pada misi pertama, namun juga menjadi penjiwaan dari seluruh misi.

4. **Berbudaya:** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat yang berkelanjutan. Nilai-nilai luhur budaya dijunjung tinggi dan ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pemikiran, sikap, hingga aktivitas sehari-hari. Aspek pendidikan dalam budaya akan menentukan terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu: Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia, Berkebhinekaan Global, Gotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif.
5. **Berkelanjutan:** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan cara ini, budaya lokal yang kaya dapat diwariskan kepada generasi mendatang tanpa mengorbankan ekosistem dan lingkungan hidup, menciptakan harmoni antara tradisi dan modernisasi.

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2025–2029, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan. Pernyataan misi pembangunan tersebut dijelaskan secara terperinci dalam uraian berikut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait arah dan fokus pembangunan yang akan dicapai.

1. **Misi Pertama:** ***Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.***

   Pembangunan lima tahun mendatang diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang makmur, dimana setiap individu dapat menikmati kesejahteraan lahir dan batin. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan pendapatan yang layak. Selain itu, masyarakat Kulon Progo diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesantunan, kesopanan, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Di sisi lain, penguatan nilai-nilai religius yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi prioritas, guna menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan harmonis dalam kehidupan beragama. Religius pada misi pertama ini tidak secara spesifik hanya mencakup misi ini, namun juga menjiwai keseluruhan misi.

2. **Misi Kedua:** ***Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi.***

   Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, industri, dan pariwisata, yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Pembangunan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat agar memiliki keterampilan dan kapasitas untuk berkontribusi dalam perekonomian lokal. Dengan peningkatan daya saing produk daerah yang bernilai tambah tinggi, diharapkan ekonomi daerah dapat berkembang secara merata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

3. **Misi Ketiga:** ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.***

   Pembangunan lima tahun mendatang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* melalui transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi publik. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam lingkungan yang aman dan demokratis, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Stabilitas sosial akan dijaga melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, dan non diskriminatif, dengan menumbuhkan rasa percaya antar-stakeholder pembangunan. Demokrasi yang sehat akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. **Misi Keempat:** ***Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana.***

   Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pemerataan antarwilayah, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar-pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas akan mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, memperhatikan pelestarian lingkungan, serta mitigasi risiko bencana alam. Sebagai daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan menjamin keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang. Infrastruktur tangguh yang dirancang sesuai dengan potensi dan risiko daerah akan menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang aman dan produktif.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan sebagai dasar arsitektur kinerja pembangunan yang mengacu pada visi, misi, dan isu-isu strategis. Tujuan menetapkan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun, sedangkan sasaran mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. RPJMD Kabupaten Kulon Progo menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sekaligus memastikan kesinambungan dengan RPJPD. Hal ini bertujuan agar pembangunan jangka panjang dapat diwujudkan secara bertahap melalui sasaran lima tahunan. Selain itu, tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap sasaran dilengkapi indikator yang terukur, relevan, dan selaras dengan visi pembangunan 2025–2029.

Berdasarkan rumusan visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, ***maka rumusan tujuan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:***

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
2. Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo;
3. Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius;
4. Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah;
5. Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah;
6. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
7. Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis;
8. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur; dan

9. Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana.

Berdasarkan rumusan visi, misi, dan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, ***maka rumusan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:***

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat;
5. Meningkatnya Kemandirian Daerah;
6. Meningkatnya Daya Saing Daerah;
7. Menurunnya Pengangguran;
8. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel;
9. Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang;
11. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah;
12. Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
13. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kulon Progo 2025–2029, telah dirumuskan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang saling berkaitan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keterpaduan ini menggambarkan arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, dengan tujuan ditetapkan berdasarkan visi dan misi, serta sasaran dirancang untuk memastikan pencapaiannya secara sistematis dan terukur. Dengan sinergi ini, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo diharapkan berkesinambungan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 serta keselarasannya terhadap Prioritas Nasional (8 Asta Cita).

Tabel 3.1.2-1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029

VISI	#	MISI	#	TUJUAN	#	SASARAN	8 ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL (PN)
TERWUJUDNYA KULON PROGO YANG MAKMUR, MANDIRI, RELIGIUS, BERBUDAYA YANG BERKELANJUTAN	M1.	Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius	M1.T1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	M1.T1.S1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	***) PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
					M1.T1.S2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	
			M1.T2	Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo	M1.T2.S1	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	***) PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			M1.T3	Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius	M1.T3.S1	Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	***) PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
	M2.	Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi	M2.T1	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah	M2.T1.S1	Meningkatnya Kemandirian Daerah	***) PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. ***) PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. ***) PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
					M2.T1.S2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	

VISI	#	MISI	#	TUJUAN	#	SASARAN	8 ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL (PN)
			M2.T2	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah	M2.T2.S1	Menurunnya Pengangguran	***) PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
	M3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis	M3.T1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	M3.T1.S1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	***) PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
			M3.T1	Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis	M3.T1.S1	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	***) PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). ***) PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
	M4.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	M4.T1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	M4.T1.S1	Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	***) PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. ***) PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
					M4.T1.S2	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	
			M4.T2	Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	M4.T2.S1	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	***) PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. ***) PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta
					M4.T2.S2	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	

VISI	#	MISI	#	TUJUAN	#	SASARAN	8 ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL (PN)
							peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keterangan:

- Misi = ditandai sebagai (M)
- Tujuan = ditandai sebagai (T)
- Sasaran = ditandai sebagai (S)
- 8 Asta Cita atau Prioritas Nasional = ditandai sebagai (PN)

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, 2025

Merujuk pada Tabel 3.1.2-1, RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan visi pembangunan jangka menengah daerah, yaitu ***"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan."*** Dalam rangka menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dan nasional, seluruh misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD ini telah diselaraskan secara sistematis dengan delapan Prioritas Nasional (8 Asta Cita) sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029.

Misi pertama, yaitu mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang makmur, berbudaya, dan religius, difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemakmuran masyarakat, serta penguatan nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan. Tujuan dan sasaran dalam misi ini selaras dengan Prioritas Nasional ke-4 yang menekankan pada penguatan pembangunan SDM, serta Prioritas Nasional ke-8 yang mengedepankan harmoni kehidupan sosial, budaya, dan spiritual.

Misi kedua diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi. Tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah memiliki keterkaitan erat dengan Prioritas Nasional ke-2 tentang transformasi ekonomi, Prioritas Nasional ke-3 mengenai infrastruktur dan kewirausahaan, serta Prioritas Nasional ke-5 tentang hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal. Sementara itu, sasaran terkait penurunan pengangguran dalam misi ini mendukung Prioritas Nasional ke-6 yang berfokus pada pembangunan dari desa serta pemberdayaan masyarakat secara merata.

Selanjutnya, misi ketiga yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, aspiratif, serta kehidupan masyarakat yang aman dan demokratis, dijabarkan melalui tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta memperkuat ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sasaran dalam misi ini mendukung Prioritas Nasional ke-1 terkait penguatan demokrasi dan HAM, serta Prioritas Nasional ke-7 mengenai reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang adil.

Adapun misi keempat diarahkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur serta pelestarian lingkungan dan ketangguhan terhadap bencana. Sasaran pada misi ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah berbasis potensi lokal, dan Prioritas Nasional ke-8 yang mendorong kehidupan yang selaras dengan lingkungan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

Dengan demikian, struktur visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 telah dirancang agar konsisten dan mendukung pencapaian arah pembangunan nasional. Penyelarasan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan yang holistik dan berkesinambungan melalui pendekatan berbasis wilayah dan kebutuhan nyata masyarakat.

Tabel 3.1.2-2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1: **Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.**	**Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**		**1**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Nilai**	**76,18**	**76,00–76,23**	**76,40–76,69**	**76,80–77,16**	**77,20–77,62**	**77,60–78,09**	**78,00–78,55**	**IUP**
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,49	75,50–79,75	75,58–79,83	75,65–79,90	75,73–79,98	75,80–80,05	75,88–80,13	IUP
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,49	14,63–15,72	14,7–15,79	14,78–15,87	14,85–15,94	14,93–16,01	15,00–16,09	IUP
	Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo		**4**	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**15,62**	**14,12–15,12**	**13,69–14,69**	**13,26–14,26**	**12,83–13,83**	**12,40–13,40**	**11,90–12,97**	**IUP**
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	5	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	10.990,00	10.732,40–11.732,40	10.987,60–11.987,60	11.242,80–12.242,80	11.498,00–12.498,00	11.753,20–12.753,20	12.008,40–13.008,40	
	Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius		**6**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	**Nilai**	**63,31**	**64,00–66,00**	**65,00–67,00**	**66,00–68,00**	**67,00–69,00**	**68,00–70,00**	**69,00–71,00**	**IUP**
		Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	7	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	58,91	60,00–61,00	60,50–61,50	61,00–62,00	61,50–62,50	62,00–63,00	62,50–63,50	

MISI	TUJUAN	SASARAN	NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 2: **Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi.**	**Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah**		**8**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,77**	**4,78–5,38**	**4,80–5,40**	**4,82–5,42**	**4,84–5,44**	**4,86–5,46**	**4,88–5,48**	
		Meningkatnya Kemandirian Daerah	9	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,98	41,02–42,22	41,03–42,23	41,04–42,24	41,05–42,25	41,06–42,26	41,07–42,27	
			10	PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	37.976,26	40.043–40.272	42.865–43.357	45.874–46.666	49.087–50.221	52.516–54.036	56.179–58.136	
			11	Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Miliar rupiah	655,55	684,46–1.228,98	766,86–1.360,34	857,40–1.504,26	956,80–1.661,85	1.063,43–1.831,90	1.182,74–2.020,43	
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	12	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	1.709,15	1.892,11–1.984,03	2.048,17–2.159,39	2.216,00–2.349,08	2.396,46–2.554,25	2.592,87–2.778,58	2.801,62–3.018,70	
	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah		**13**	**Rasio Gini**	**Nilai**	**0,37**	**0,372–0,402**	**0,371–0,401**	**0,370–0,400**	**0,369–0,399**	**0,368–0,398**	**0,367–0,397**	**IUP**
		Menurunnya Pengangguran	14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,01	1,95–2,55	1,90–2,50	1,90–2,45	1,90–2,40	1,90–2,35	1,90–2,30	IUP
Misi 3: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.**	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**		**15**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**87,04**	**87,50**	**87,90**	**88,20**	**88,40**	**88,50**	**88,60**	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Nilai	3,91	4,11–4,61	1,41–1,50	1,41–1,50	1,51–1,60	1,51–1,60	1,61–1,70	IUP; Transisi Indikator Baru; Target 2025 adalah Indeks SPBE, Target 2026-2030 adalah Indeks Pemdi

MISI	TUJUAN	SASARAN	NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			17	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	
			18	Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,80	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10	
			20	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
	Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis		**21**	**Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate)**	**kejahatan per 100.000 penduduk**	**62,70**	**62,00**	**61,00**	**60,00**	**59,00**	**58,00**	**57,00**	**IUP**
		Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	22	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Nilai	7,32	7,38	7,42	7,46	7,50	7,54	7,58	
			23	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Misi 4: **Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang**	**Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur**		**24**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**%**	**88,61**	**88,70**	**88,75**	**88,80**	**88,85**	**88,90**	**88,95**	**Hasil Audit Tata Ruang**
		Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	25	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,86	89,90	89,95	90,00	90,05	90,10	90,15	Hasil Audit Tata Ruang

MISI	TUJUAN	SASARAN	NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Lestari dan Tangguh Bencana.		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	26	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Angka	48,40	49,28	50,15	51,03	51,91	52,79	53,66	
			27	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service/LOS)	Kategori	A (0,10)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	V/C Ratio
	Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana		**28**	**Indeks Risiko Bencana**	**Nilai**	**152,65**	**136,71–141,71**	**135,07–140,07**	**133,44–138,44**	**131,80–136,80**	**130,17–135,17**	**128,53–133,53**	**IUP**
		Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65,46	69,75	69,84	69,93	70,03	70,12	70,22	IUP
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	30	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	

Keterangan:

- Blok warna abu-abu sebagai penanda baris tujuan dan indikator tujuan.
- *Tagging* “IUP” pada kolom KET. adalah selaras dengan IUP RPJPD Kulon Progo 2025-2045, yang menjadi kewenangan berdasarkan kesepakatan dengan Pemprov DIY.

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, 2025

Pada bagian ini akan diuraikan secara naratif terkait penajaman terhadap Tabel 3.1.2-2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, yang menjelaskan rasionalisasi penetapan indikator kinerja baik itu pada level Tujuan Daerah maupun Sasaran Daerah. Penyebutan kodefikasi terhadap Misi, Tujuan Daerah, dan Sasaran Daerah yang digunakan dalam uraian ini mengacu pada Tabel 3.1.2-1.

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan

Fokus pada Misi pertama, Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah yang terhimpun dalam misi ini disusun untuk mencerminkan fondasi pembangunan manusia yang holistik dan berakar pada nilai-nilai keberagamaan serta kebudayaan lokal. Penjabaran terhadap Misi 1 ini diwujudkan melalui tiga Tujuan Daerah dan empat Sasaran Daerah dengan penajaman arah pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan penguatan karakter keberagamaan serta kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan Daerah pertama, yaitu Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas (M1.T1), diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipilih sebagai Indikator Tujuan Daerah karena sifatnya yang komposit dan lintas sektor. IPM mencakup tiga dimensi dasar: (1) kesehatan, (2) pendidikan, dan (3) standar hidup, sehingga mampu merepresentasikan pencapaian pembangunan manusia secara menyeluruh. Selanjutnya, Tujuan Daerah tersebut diturunkan menjadi dua Sasaran Daerah sebagai berikut:

> ***Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M1.T1.S1),*** diukur menggunakan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) yang mengukur rata-rata umur harapan hidup bayi yang baru lahir dan mencerminkan akses serta kualitas layanan kesehatan.
> ***Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat (M1.T1.S2),*** diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menggambarkan aksesibilitas dan daya dukung sistem pendidikan terhadap generasi muda di Kabupaten Kulon Progo.

Selanjutnya, Tujuan Daerah kedua, ***Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo (M1.T2),*** telah dirumuskan diukur menggunakan Tingkat Kemiskinan sebagai Indikator Tujuan Daerah. Indikator ini merefleksikan kondisi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan menjadi acuan penting dalam pengukuran *outcome* intervensi lintas sektor, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan struktural. Tujuan Daerah ini diturunkan melalui Sasaran Daerah: ***Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat (M1.T2.S1),*** diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan, yang mencerminkan kemampuan riil rumah tangga dalam konsumsi, setelah disesuaikan dengan tingkat harga (inflasi). Penggunaan indikator ini dirasa sangat penting, sehingga dapat menjadi pelengkap terhadap pengukuran kemiskinan berbasis garis kemiskinan.

Adapun Tujuan Daerah ketiga, ***Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius (M1.T3),*** merupakan penguatan terhadap nilai-nilai keberagamaan dan kebudayaan lokal yang menjadi ciri khas pembangunan di Kabupaten Kulon Progo khususnya dalam periode RPJMD Tahun 2025–2029 ini. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang menilai pencapaian pembangunan kebudayaan secara multidimensional. Turunan dari Tujuan Daerah tersebut yakni Sasaran Daerah ***Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam***

Kehidupan Bermasyarakat (M1.T3.S1), yang diukur menggunakan indikator Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada IPK. Indikator ini mencerminkan empat dimensi kunci yang strategis untuk menilai kontribusi budaya dalam ekonomi lokal, pelestarian warisan budaya, partisipasi aktif dalam ekspresi budaya, serta kekuatan kohesi sosial. Pemilihan indikator ini memberikan pendekatan kontekstual untuk mengintegrasikan aspek religiusitas dan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan aspek sosial masyarakat Kulon Progo yang inklusif dan berakar pada kearifan lokal.

Misi 2:
Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta

Melanjutkan ke Misi ke-2, Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah yang terhimpun dalam misi ini diturunkan ke dalam dua tujuan utama yang mencerminkan dimensi struktural dan distribusional dari pembangunan ekonomi daerah. Misi 2 menekankan pentingnya transformasi ekonomi yang produktif dan berdaya saing sekaligus menjamin distribusi hasil pembangunan yang merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.

Tujuan Daerah pertama, yaitu ***Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah (M2.T1),*** telah dirumuskan menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Indikator Tujuan Daerah. Pertumbuhan ekonomi dipilih karena merefleksikan ekspansi kapasitas produksi barang dan jasa di daerah dan menjadi indikator makro yang komprehensif untuk menilai efektivitas pembangunan sektor riil. Penurunan Tujuan Daerah ini dijabarkan menjadi dua Sasaran Daerah yang menekankan pada aspek kemandirian dan daya saing daerah.

Meningkatnya Kemandirian Daerah (M2.T1.S1), diukur dengan tiga Indikator Sasaran Daerah sebagai berikut:

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang menggambarkan tingkat investasi fisik dalam perekonomian daerah seperti infrastruktur, mesin, dan bangunan produktif. PMTB menjadi sinyal penting untuk menilai kapasitas ekonomi masa depan serta keberlanjutan pertumbuhan.

PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), yang mencerminkan *output* ekonomi per individu dan digunakan untuk memperkirakan standar kesejahteraan masyarakat secara nominal.

Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), yang merupakan indikator strategis untuk menilai kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan baru di Kabupaten Kulon Progo.

Meningkatnya Daya Saing Daerah (M2.T1.S2), diukur menggunakan indikator Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan, sebagai representasi dari kapasitas daerah dalam mengembangkan sektor hilirisasi dan industri bernilai tambah. Industri pengolahan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi yang berdaya saing karena mendorong penciptaan lapangan kerja, diversifikasi ekonomi, serta memperkuat basis ekspor daerah.

Tujuan Daerah kedua dalam Misi 2, yaitu ***Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah (M2.T2),*** diukur melalui Rasio Gini, yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Rasio Gini dipilih sebagai indikator utama karena

mampu menangkap dimensi keadilan ekonomi yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan yang inklusif.

Tujuan Daerah ini diturunkan menjadi Sasaran Daerah: ***Menurunnya Pengangguran (M2.T2.S1)***, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan penciptaan lapangan kerja yang layak, serta sebagai tolok ukur dinamika pasar tenaga kerja yang responsif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan tingkat pengangguran juga merupakan refleksi langsung dari efektivitas program pengembangan SDM, investasi sektor produktif, serta konektivitas antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance,

Menyoroti Misi ke-3, indikator kinerja utama terhimpun dalam misi ini telah dirumuskan untuk mengkonsolidasikan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif dan akuntabel, sekaligus memperkuat sendi-sendi keamanan, ketenteraman, dan kehidupan sosial-politik yang demokratis. Misi ini diurai ke dalam dua Tujuan Daerah yang masing-masing memuat satu Sasaran Daerah disertai sejumlah indikator kinerja utama yang komprehensif.

Tujuan Daerah pertama, ***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (M3.T1),*** diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama. Indeks ini dipilih karena mampu menggambarkan secara menyeluruh efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, termasuk aspek kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, serta akuntabilitas kinerja. Sasaran Daerah yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Daerah ini adalah ***Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel (M3.T1.S1).*** Untuk menilai kinerja sasaran tersebut, digunakan beberapa indikator pendukung yang merepresentasikan pilar utama pemerintahan modern dan berorientasi pada pelayanan, diantaranya:

Indeks SPBE / Indeks Pemdi[5], yang mencerminkan tingkat digitalisasi dan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penggunaan dua indikator ini mencerminkan adanya transisi pengukuran kinerja digitalisasi pemerintahan, dengan Indeks SPBE digunakan pada awal periode (2025) dan beralih ke Indeks Pemdi pada 2026–2030, mengikuti kebijakan nasional yang mengembangkan instrumen pengukuran ini menjadi lebih mutakhir dan komprehensif.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP), sebagai tolok ukur efektivitas perencanaan kinerja dan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang menilai kepatuhan pemerintah terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan auditabel.

[5] *Penggunaan Indeks Pemdi sebagai perwujudan keselarasan terhadap kebijakan nasional: UU No. 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) Tahap pertama (Tahun 2025–2029) "Digital Governance", dan Perpres No. 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.*

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang menilai kualitas pelayanan publik dari perspektif pengguna, sekaligus mendorong partisipasi warga dalam menilai dan memperbaiki pelayanan publik.

Indeks Maturitas SPIP, yang menggambarkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas tata kelola secara menyeluruh.

Seluruh indikator ini dipilih untuk membentuk sistem pengukuran yang saling melengkapi baik dari sisi *input*, proses, maupun *output* tata kelola guna menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif, transparan, dan mampu memenuhi ekspektasi publik secara berkelanjutan.

Tujuan Daerah kedua, ***Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis (M3.T2),*** mencerminkan dimensi sosial-politik dari pembangunan daerah. Indikator utama yang digunakan adalah Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan *(Crime Rate),* yang menggambarkan risiko terjadinya sejumlah tindak kejahatan pada setiap 100.000 orang penduduk dan digunakan sebagai proksi untuk menilai rasa aman dan ketertiban di wilayah Kulon Progo. Tujuan Daerah tersebut kemudian diturunkan dengan Sasaran Daerah: ***Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat (M3.T2.S1).*** Untuk mendukung pengukuran Sasaran Daerah tersebut, digunakan dua indikator utama berikut:

➔ Indeks Harmoni Indonesia (IHaI), sebagai alat ukur tingkat harmoni sosial yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. IHaI mengukur kondisi kohesi sosial masyarakat melalui empat dimensi utama: ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Pemanfaatan IHaI dalam RPJMD Kulon Progo memperlihatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk tidak hanya mengejar capaian fisik dan ekonomi, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai harmoni sosial, kerukunan, dan spiritualitas. Lebih dari sekadar alat ukur statistik, IHaI juga menjadi refleksi partisipasi aktif warga melalui Data Usul, Saran, dan Kritik (DUSK) yang memberikan masukan nyata dalam pengambilan kebijakan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat.

➔ Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda, yang mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam merespons gangguan ketertiban umum dan pelanggaran peraturan daerah secara efektif dan preventif.

Misi 4:
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur,

Pelaksanaan Misi 4 diarahkan untuk memastikan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkeadilan, sejalan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana. Misi ini dijabarkan ke dalam dua tujuan, empat sasaran, serta tujuh indikator kinerja utama, yang keseluruhannya dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur dan lingkungan.

Tujuan Daerah pertama, ***Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur (M4.T1),*** diukur melalui indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara kegiatan pembangunan di lapangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi sebagai cerminan

efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan sebagai ukuran terhadap ketaatan pelaku pembangunan terhadap RTRW. Selanjutnya, Tujuan Daerah tersebut diturunkan menjadi dua Sasaran Daerah sebagai berikut:

Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang (M4.T1.S1), diukur melalui indikator Persentase Kesesuaian Pola Ruang, yang lebih spesifik menilai aspek tata guna lahan dan kesesuaian antara rencana dan realisasi pembangunan secara spasial.

Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah (M4.T1.S2), diukur melalui dua indikator, yakni:

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, yang merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, gedung, bangunan, air bersih, sanitasi, dan drainase.

Tingkat Pelayanan Jalan *(Level of Service/LOS)*. LOS digunakan untuk menilai kualitas pelayanan jaringan jalan berdasarkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan pengguna jalan.

Tujuan Daerah kedua dalam Misi ke-4 adalah, ***Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana (M4.T2),*** yang diukur menggunakan Indeks Risiko Bencana (IRB). Indikator ini mencerminkan tingkat risiko kumulatif suatu wilayah terhadap bencana alam, dihitung berdasarkan kombinasi antara tingkat bahaya *(hazard),* kerentanan *(vulnerability),* dan kapasitas *(capacity)* suatu daerah. Penurunan nilai IRB menunjukkan semakin tangguhnya suatu wilayah dalam mengelola risiko bencana secara holistik. Lebih lanjut, Tujuan Daerah ini diturunkan menjadi dua Sasaran Daerah sebagai berikut:

Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup (M4.T2.S1), diukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan indikator komposit yang menggabungkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKLH mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta menjadi indikator kunci dalam pembangunan berkelanjutan.

Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana (M4.T2.S1), diukur menggunakan Indeks Ketahanan Daerah yang mengukur kapasitas suatu wilayah dalam mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana secara cepat dan efektif. Indeks ini merupakan instrumen penting dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan dan keselamatan masyarakat, serta mendukung agenda adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

Kesimpulan Kerangka Kinerja Utama RPJMD

Penyusunan indikator-indikator dalam keempat misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, yang menggabungkan dimensi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan dalam satu kesatuan kerangka kinerja utama. Misi 1 hingga Misi 4 tidak hanya dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan jangka menengah, tetapi juga untuk memastikan keterhubungan yang kuat dengan arah pembangunan jangka panjang daerah dalam RPJPD 2025–2045. Penekanan pada *result-based planning, evidence-based policy,* serta prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan menunjukkan bahwa pengukuran capaian pembangunan dilakukan secara objektif, sistematis, dan berbasis data.

Struktur kinerja dalam Tabel 3.1.2-2 tidak hanya berperan sebagai alat monitoring dan evaluasi, tetapi juga sebagai kompas strategis yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan daerah secara terencana dan terukur. RPJMD ini menjadi fondasi/pijakan awal untuk mewujudkan ***"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan"*** yang sejalan dengan semangat ***"Pancamulia Masyarakat Jogja",*** menuju ***"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, & Berkelanjutan (SEMARAK)"*** sebagai wujud kontribusi Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung penuh pencapaian ***"Terwujudnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan",*** guna menjemput visi nasional jangka panjang ***"Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan".***

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. Strategi pembangunan pada periode ini dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, mencakup percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Setiap strategi disusun untuk memastikan konsistensi dengan arah pembangunan jangka panjang.

Fokus Strategi Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius.

1. Meningkatkan sinergi lintas sektor, memperkuat layanan kesehatan berbasis data dan teknologi, serta menyederhanakan birokrasi dengan penganggaran berbasis kinerja untuk pemerataan layanan dan peningkatan derajat kesehatan.
2. Meningkatkan sinergi lintas sektor, memperluas akses pendidikan berbasis data dan teknologi, serta menyederhanakan birokrasi dengan penganggaran berbasis kinerja untuk menciptakan pemuda berkarakter, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan.
3. Mendorong sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperluas akses pendidikan berkualitas yang responsif, berbasis data, serta fokus pada peningkatan taraf hidup. Strategi dilaksanakan melalui penyederhanaan birokrasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penganggaran berbasis kinerja yang adil antarkelompok dan wilayah.
4. Menguatkan pelestarian budaya melalui sinergi antara pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan dengan memperkuat pusat kebudayaan dan peribadatan berbasis data, responsif, serta inklusif. Strategi ini dilaksanakan dengan penyederhanaan birokrasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan penganggaran berbasis kinerja untuk memperluas akses, inovasi, dan keberlanjutan fungsi kebudayaan di seluruh wilayah.

Fokus Strategi Misi 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi.

1. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya secara berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur yang memadai dan promosi yang efektif. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan diperkuat untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat lokal akan didorong melalui peningkatan kapasitas dan akses pasar, sementara penyederhanaan birokrasi akan mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Pendekatan berbasis data dan teknologi akan diterapkan untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian, perikanan, dan agroindustri, termasuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan, guna mencapai kemandirian daerah yang berkelanjutan.
2. Memfasilitasi perluasan akses pasar bagi pelaku usaha lokal, mendukung inovasi produk dan pengembangan industri kreatif, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pendekatan berbasis kemitraan diterapkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, sementara pemberdayaan pelaku usaha dipercepat melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis, inklusif, dan berkelanjutan.
3. Memfasilitasi perluasan akses pasar bagi pelaku usaha lokal, mendukung inovasi produk dan pengembangan industri kreatif, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pendekatan berbasis kemitraan diterapkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, sementara pemberdayaan pelaku usaha dipercepat melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis, inklusif, dan berkelanjutan.
4. Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu bagi UMKM dan IKM, memperkuat akses permodalan bagi sektor usaha dan pertanian, serta menyediakan fasilitas pendukung bagi talenta berprestasi. Selain itu, program pelatihan kepemudaan, olahraga, dan kewirausahaan diperluas untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing pemuda. Pendekatan kolaboratif diterapkan dengan penyederhanaan regulasi guna menciptakan ruang kreatif dan inovatif bagi masyarakat dalam menciptakan peluang kerja.
5. Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu bagi UMKM dan IKM, memperkuat akses permodalan bagi sektor usaha dan pertanian, serta menyediakan fasilitas pendukung bagi talenta berprestasi. Selain itu, program pelatihan kepemudaan, olahraga, dan kewirausahaan diperluas untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing pemuda.
6. Memperkuat penerapan perlindungan sosial yang adaptif sebagai motor penggerak untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak. Mengembangkan dan melakukan standarisasi kegiatan produktif yang belum secara umum diakui sebagai bagian dari perekonomian, seperti pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan *(caregiving),* sebagai sektor baru yang inklusif dan bernilai ekonomi. Pendekatan kolaboratif diterapkan dengan penyederhanaan regulasi guna menciptakan ruang kreatif dan inovatif bagi masyarakat dalam menciptakan peluang kerja.

Fokus Strategi Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

1. Mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan fokus pada transparansi dan efisiensi anggaran, serta menyederhanakan birokrasi berbasis hasil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan teknologi akan memastikan pengukuran kinerja yang objektif. Sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan diperkuat untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai dan penguatan kapasitas kelembagaan akan menjamin kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta, strategi ini juga diarahkan untuk mendukung Reformasi Kalurahan sebagaimana diamanatkan dalam Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023, melalui penguatan dua pendekatan utama: reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan. Upaya ini mencakup penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi reformasi kalurahan, pelembagaan monitoring dan evaluasi, serta penetapan tindak lanjut tahunan yang berkesinambungan. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kalurahan, dan Pemerintah Daerah DIY menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang efisien, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada dan peningkatan realisasi penerimaan guna menuju kemandirian fiskal. Strategi peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Kulon Progo dalam RPJMD berfokus pada peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai upaya komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak dan retribusi, penggalian potensi pendapatan secara intensif dan ekstensif, serta sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, optimalisasi sistem informasi perpajakan dan retribusi, peningkatan daya tarik destinasi wisata, dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih sehat, inovatif, dan berdaya saing juga menjadi prioritas.
4. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menempatkan ETPD sebagai kerangka transformasi fiskal yang tidak terpisahkan dari arsitektur kebijakan pembangunan daerah. Dengan memposisikan ETPD sebagai pilar tata kelola keuangan publik, pemerintah kabupaten berupaya memperluas dampaknya tidak hanya pada efisiensi teknis anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik, produktivitas birokrasi, dan kinerja pembangunan ekonomi lokal. Dalam hal ini, pendekatan sistemik yang diterapkan mencakup integrasi proses bisnis lintas sektor, optimalisasi perangkat regulasi, dan penguatan manajemen berbasis hasil *(result-based management)*.
5. Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, dengan meningkatkan ruang interaksi sosial yang aman seperti ruang terbuka hijau. Pemberdayaan komunitas dan inisiatif lokal untuk mempromosikan nilai-nilai gotong royong diperkuat, serta penyederhanaan regulasi dilakukan guna mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban. Pendekatan berbasis data dan teknologi diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, serta memastikan pemerataan dan keberlanjutan hasil di seluruh wilayah.

Fokus Strategi Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana.

1. Memperkuat sinergi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam penataan ruang yang berbasis pada data dan bukti, serta orientasi pada keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan koordinasi antar sektor dilakukan untuk memastikan kebijakan tata ruang mendukung pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang. Penyederhanaan regulasi dan penguatan kapasitas SDM akan dioptimalkan guna mendukung implementasi yang efektif, responsif terhadap dinamika, serta memastikan pemerataan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah.
2. Memperkuat sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus utama adalah peningkatan konektivitas antar wilayah, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, dan penguatan infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan data dan evidensi, penerapan inovasi serta teknologi, dan penyederhanaan regulasi untuk menciptakan sistem infrastruktur yang efisien, merata, dan responsif terhadap dinamika serta kebutuhan daerah.
3. Mendorong pengelolaan kualitas lingkungan hidup berbasis data dan teknologi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan ruang terbuka hijau yang merata dan adaptif terhadap risiko bencana, serta penyederhanaan regulasi dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan perlindungan lingkungan hidup.
4. Memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana melalui sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi peringatan dini berbasis data. Strategi ini dilaksanakan secara responsif, adaptif, dan berkeadilan wilayah, dengan penyederhanaan birokrasi dan penganggaran berbasis kinerja untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

Selanjutnya pada Tabel 3.2.1-1 berikut menyajikan keterpaduan antara misi dan arah kebijakan. Struktur ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Informasi di dalam tabel ini akan dijabarkan secara lebih teknis pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang menjadi pengampu dan atau yang terkait. Hal tersebut dimaksudkan agar tiap perangkat daerah dapat mempedomaninya untuk peningkatan keterpaduan antar perangkat daerah dalam memberikan kontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah.

Tabel 3.2.1-1 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
1	Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dengan memperkuat sinergi lintas sektor, penguatan infrastruktur kesehatan, dan pemerataan tenaga medis. Selain itu, dengan sinergi kebijakan yang berfokus pada aspek promotif, preventif, dan kuratif secara terpadu, diharapkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan merata. Lebih lanjut yang tak kalah penting, penyederhanaan birokrasi melalui penganggaran berbasis kinerja turut memastikan pemerataan layanan yang efisien, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui pemerataan sarana, penguatan kompetensi tenaga pendidik, serta mendorong penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan industri lokal guna mewujudkan SDM yang berdaya saing, religius, dan berbudaya. Upaya ini juga diarahkan untuk mendorong percepatan pengembangan Sekolah Rakyat sesuai prioritas nasional, serta memperkuat pengembangan pendidikan kejuruan yang selaras dengan potensi dan kebutuhan industri lokal sebagai strategi peningkatan relevansi pendidikan dan kesiapan kerja generasi muda daerah.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
		Memperkuat perlindungan sosial dan pelestarian budaya melalui pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multisektor, serta penyederhanaan regulasi guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
		Mengembangkan pusat kebudayaan dan peribadatan sebagai ruang ekspresi dan penguatan nilai-nilai sosial untuk memperkokoh keberagaman dan harmoni masyarakat. Upaya ini dilengkapi dengan penguatan pusat-pusat peribadatan umat beragama, termasuk mendorong pengembangan embarkasi haji serta rintisan museum sebagai wahana edukasi dan pelestarian budaya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendorong Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melakukan pengukuran keberhasilan pembangunan kebudayaan dan kehidupan bermasyarakat secara lebih objektif dan terstandar. Sebagai alternatif, Kabupaten Kulon Progo juga dapat mengembangkan instrumen penilaian sederhana guna mengevaluasi kinerja pembangunan kebudayaan secara kontekstual dan berkelanjutan.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat
2	Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi	Mengembangkan destinasi wisata unggulan berbasis alam dan budaya dengan dukungan infrastruktur yang memadai, serta memperkuat ekonomi kreatif dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Pembinaan industri pariwisata dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan usaha jasa pariwisata melalui pelatihan serta sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan wisatawan. Selain itu, dilakukan pula monitoring dan evaluasi terhadap Usaha Jasa Pariwisata (UJP) guna memastikan bahwa operasional UJP telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Di sisi lain, penguatan ketahanan ekonomi daerah juga dilakukan melalui peningkatan efektivitas Tim Pengendalian	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Kemandirian Daerah

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		Inflasi Daerah (TPID) dalam memantau harga bahan pokok, memastikan ketersediaan pangan, serta memfasilitasi akses masyarakat miskin terhadap layanan sosial. Pengendalian harga dilaksanakan melalui berbagai langkah seperti operasi pasar, penyediaan bahan pangan dari sisi produsen pertanian, distribusi antar daerah melalui kerja sama dengan kota/kabupaten lain, serta penyebarluasan informasi harga kebutuhan pokok secara digital melalui platform https://sikepoku.kulonprogokab.go.id/ Selain itu, guna mendukung ketahanan pangan dan menghindari tekanan terhadap ruang produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2024, serta diperkuat oleh kebijakan fiskal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Insentif diberikan dalam bentuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih rendah bagi lahan pertanian dibandingkan lahan pekarangan, serta dukungan non-fiskal berupa penguatan kelembagaan petani, peningkatan kapasitas SDM melalui penyuluhan dan pelatihan, fasilitasi pembiayaan, akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dukungan pemasaran hasil pertanian. Untuk mencegah degradasi lahan, Program Prioritas Bupati mencakup peningkatan produksi pertanian dan perikanan melalui pendekatan pertanian presisi yang dilaksanakan bersama Kementerian Pertanian. Metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk secara tepat guna menjaga produktivitas dan keberlanjutan lahan. Sejalan dengan hal tersebut, produktivitas sektor perikanan juga ditingkatkan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pemberdayaan nelayan milenial, serta pengembangan kawasan pesisir yang mengedepankan pendekatan ekowisata dan konservasi lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi pesisir sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut secara berkelanjutan.	
		Meningkatkan daya saing daerah melalui fasilitasi akses pasar, inovasi produk, dan pengembangan industri kreatif dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat, dan media. Penyederhanaan regulasi akan diterapkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis dan berkelanjutan. Selain itu, kompetisi inovasi daerah dan penguatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Riset dan Inovasi (Academics, Business, Community, Government, Media) akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) untuk mendorong pertumbuhan yang berbasis pada riset dan teknologi. Di samping itu, penguatan kelembagaan ekonomi lokal di kawasan perdesaan juga dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan Koperasi Merah Putih, dengan fokus pada penguatan badan hukum koperasi, peningkatan kapasitas manajerial melalui pendidikan koperasi, serta pengawasan koperasi secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan kelembagaannya.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Daya Saing Daerah
		Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kawasan ekonomi terpadu, penguatan UMKM dan IKM,	Fokus Arah Kebijakan Penurunan

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		peningkatan akses permodalan, serta pengembangan keterampilan pemuda dengan pelatihan, kewirausahaan, dan ruang kreatif yang inovatif. Selain penciptaan lapangan kerja sektor informal yang menjadi fokus dalam penurunan pengangguran, pemerintah kabupaten Kulon Progo juga mendorong terciptanya lapangan usaha pada sektor formal, antara lain melalui: 1. peningkatan investasi. 2. penguatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). 3. penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja. Memperkuat perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif sebagai penggerak percepatan pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan melalui: penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran berbasis kartu kesejahteraan; digitalisasi dan integrasi layanan bantuan sosial hingga tingkat desa dengan pemanfaatan data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dan sistem SEPAKAT (Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu); serta pengembangan mekanisme graduasi masyarakat miskin dan rentan menuju sejahtera. Mendorong reformasi sistem Jaminan Sosial Nasional melalui peningkatan literasi, perluasan kepesertaan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan skema jaminan sosial adaptif bagi pekerja miskin dan tidak mampu. Selain itu, mengembangkan ekonomi perawatan (care economy) sebagai sektor produktif baru melalui penyediaan layanan pengasuhan kelompok rentan, penguatan kapasitas keluarga dan komunitas, serta skema pendanaan yang berkelanjutan. Memastikan harmonisasi kebijakan dan keberlanjutan program melalui penyusunan payung hukum perlindungan sosial yang komprehensif, sinkronisasi lintas sektor, dan penguatan tata kelola berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).	Pengangguran
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik, yang berfokus pada transparansi, efisiensi anggaran, dan penyederhanaan birokrasi berbasis hasil. Pemanfaatan teknologi untuk pembangunan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan berbasis data akan memastikan akuntabilitas dan responsivitas pelayanan publik. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menciptakan pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Dalam kerangka keistimewaan Yogyakarta, arah kebijakan ini juga mendukung pelaksanaan Reformasi Kalurahan sebagaimana diamanatkan dalam Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023, melalui penguatan reformasi birokrasi kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen mendorong pelaksanaan rencana aksi reformasi kalurahan secara terencana dan berkelanjutan, termasuk pelembagaan monitoring dan evaluasi	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		serta penetapan tindak lanjut tahunan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja pemerintahan di tingkat kalurahan. Kebijakan operasional yang mendukung kemandirian fiskal meliputi pembaruan regulasi, edukasi masyarakat, penguatan sarana dan sistem pemungutan, pengembangan amenitas wisata, dan perbaikan tata kelola BUMD. Secara konkret, target pendapatan dipenuhi melalui pelayanan prima, penyederhanaan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi, pemutakhiran data objek pajak dan retribusi, pengawasan kepatuhan wajib pajak, peningkatan koordinasi lintas instansi, pembangunan infrastruktur pendukung wisata, pembinaan BUMD, pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak digunakan, serta optimalisasi pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan upaya memperoleh insentif fiskal. Arah kebijakan tata kelola keuangan digital Kabupaten Kulon Progo berfokus pada penguatan ekosistem digital secara menyeluruh. Ini mencakup reformasi regulasi dan kelembagaan untuk digitalisasi fiskal, seperti penetapan Peraturan Bupati dan SOP, serta penyesuaian fungsi TP2DD dan Inspektorat. Selain itu, kebijakan ini mendorong interkoneksi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah demi integrasi data yang kuat, digitalisasi komprehensif transaksi pada layanan publik daerah di sektor-sektor prioritas, dan transformasi kompetensi SDM ASN melalui pelatihan adaptif. Terakhir, penguatan ekosistem keuangan digital daerah juga dilakukan dengan mengintegrasikan UMKM dan kearifan lokal melalui e-katalog lokal, belanja produk lokal, dan kemitraan dengan penyedia layanan keuangan.	
		Memperkuat sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dengan menyediakan ruang interaksi sosial yang aman dan inklusif, seperti ruang terbuka hijau. Penguatan nilai gotong royong dan pemberdayaan komunitas akan didorong untuk membangun keharmonisan sosial. Penyederhanaan regulasi dan penerapan teknologi akan memastikan efisiensi dan efektivitas kebijakan yang mendukung tercapainya keamanan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
4	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	Mengembangkan penataan ruang berbasis keberlanjutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan pemangku kepentingan, guna mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis dan selaras dengan rencana tata ruang. Kebijakan ini akan diimplementasikan melalui kemudahan regulasi, penguatan kapasitas SDM, serta penerapan teknologi untuk memastikan pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan. Fokus utama adalah menciptakan pemerataan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Kesesuaian Peruntukan Ruang
		Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang berbasis pada keberlanjutan dan inklusivitas. Fokus utama adalah peningkatan konektivitas antar wilayah, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta penguatan infrastruktur strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini akan mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi inovatif, serta menyederhanakan regulasi untuk memastikan infrastruktur yang efisien, merata, dan responsif terhadap kebutuhan	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		serta dinamika daerah.	
		Memperkuat tata kelola pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif dan berbasis data melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, perluasan ruang terbuka hijau, serta penyederhanaan regulasi dan kemitraan lintas sektor guna menjaga kualitas lingkungan yang lestari dan tangguh terhadap risiko bencana.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
		Mengembangkan dan memperkuat sistem mitigasi bencana yang terintegrasi melalui peningkatan infrastruktur adaptasi iklim yang tahan bencana, penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, serta pemanfaatan teknologi canggih untuk mempercepat respon dan peringatan dini. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan diperkuat, dengan pengurangan hambatan birokrasi dan penganggaran berbasis hasil guna mendukung efektivitas program secara berkelanjutan.	Fokus Arah Kebijakan Peningkatan Ketangguhan Terhadap Bencana

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, 2025

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka memastikan pelaksanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berdampak nyata, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan serangkaian Program Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi instrumen utama dalam mengakselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029. Program-program ini dirancang sebagai perwujudan langsung dari Program Strategis Bupati, dengan mempertimbangkan urgensi lokal, keterkaitan lintas sektor, serta keselarasan vertikal dengan kebijakan nasional dan provinsi melalui integrasi yang dirumuskan menggunakan program prioritas berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Setiap program prioritas disusun melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif, memperhatikan ketersediaan sumber daya, kapasitas pelaksana, serta proyeksi pembiayaan dari berbagai sumber pendanaan yang sah dan potensial. Selain itu, penajaman substansi program dilakukan secara rinci dengan penahapan pelaksanaan tahunan sejak 2025 hingga 2030, guna menjamin kontinuitas implementasi dan keterpaduan antar-tahun dalam kerangka perencanaan lima tahunan.

Tabel 3.2.2-1 menyajikan rumusan Program Prioritas RPJMD yang ditata berdasarkan misi, tujuan, sasaran, *outcome,* dan program prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, dari hasil rumusan Program Prioritas RPJMD tersebut digunakan untuk menyusun Tabel 3.2.2-2 berikut yang menyajikan informasi komprehensif mengenai daftar Program Strategis Bupati, penjabaran program secara tematik dan sektoral, keterkaitannya dengan program dalam SIPD, rencana penahapan pelaksanaan per tahun, penugasan perangkat daerah pelaksana, serta sumber-sumber pendanaan yang digunakan. Penyajian Tabel 3.2.2-2 tersebut dimaksudkan sebagai acuan strategis bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kegiatan prioritas yang selaras, berdampak luas, serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

Tabel 3.2.2-1 Rumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET.
Misi 1	Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas				
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	*Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD Wates*	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD Nyi Ageng Serang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	*Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah*	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo				
			Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	*Meningkatnya pemberdayaan sosial*	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius				
			Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat	*Meningkatnya pelestarian sumber sejarah dan budaya*	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET.
Misi 2	**Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi**	**Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah**				
			Meningkatnya Kemandirian Daerah	*Meningkatnya pelestarian sumber sejarah dan budaya*	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	
				Meningkatnya wisatawan budaya dan sejarah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	
				Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	
				Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	
				Meningkatnya kapasitas kelompok tani lahan surjan dan lumbung kemataraman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi		
				Meningkatnya aksesibilitas kawasan SRS	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	
			Meningkatnya Daya Saing Daerah	*Meningkatnya realisasi pembangunan industri*	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	
				Meningkatnya daya saing UMKM	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET.
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	
		Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah				
			Menurunnya Pengangguran	*Meningkatnya penempatan tenaga kerja*	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	
Misi 3	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis**	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**				
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	*Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi kalurahan*	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	
				Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	
				Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	
		Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis				
			Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	*Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan*	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	
Misi 4	**Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana**	**Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur**				
			Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang*	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	
			Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah	*Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman*	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	
				Meningkatnya aksesibilitas kawasan SRS	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET.
					KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	
				Meningkatnya aksesibilitas kawasan SRS	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	
				Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	
		Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana				
			Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	*Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati*	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	
				Meningkatnya tata kelola persampahan	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	
			Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	*Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

Tabel 3.2.2-2 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO.	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URAIAN PROGRAM STRATEGIS BUPATI	TAHAPAN PELAKSANAAN PER TAHUN						PD PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
M1.PSB-1	Membangun dan Meningkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan Primer dan Sekunder	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Optimalisasi pelayanan RSUD Wates (Peningkatan pelayanan: KJSU - KIA - MRI)	strata kompetensi pelayanan KJSU: madya dan strata kompetensi pelayanan KIA: utama	strata kompetensi pelayanan KJSU: madya dan strata kompetensi pelayanan KIA: utama	strata kompetensi pelayanan KJSU: madya dan strata kompetensi pelayanan KIA: utama	strata kompetensi pelayanan KJSU: madya, strata kompetensi pelayanan KIA: utama, dan pelayanan MRI	strata kompetensi pelayanan kanker: madya, jantung: madya, stroke: utama, uronefrologi: madya, KIA: paripurna, dan MRI	strata kompetensi pelayanan KJSU: utama, strata kompetensi pelayanan KIA: paripurna, dan MRI	DISKES	DAK dan APBD DIY	PSB utk Penanganan Kemiskinan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Perluasan RSUD NAS dan pengembangan layanan trauma center	perubahan status tanah dan pembebasan lahan, dan penyusunan master plan	alih status tanah, pengurukan dan DED gedung I	lahan parkir dan pembangunan struktur gedung I (tahap 1)	pembangunan gedung I (tahap 2) dan DED gedung II dan pengadaan alkes dan SDM trauma center	pembangunan gedung II (tahap 1) & operasional gedung I		DISKES	DAK, Dana Keistimewaan, dan APBD Kabupaten	PSB utk Penanganan Kemiskinan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Optimalisasi Fungsi Pelayanan Puskesmas Kalibawang	puskesmas rawat inap, jumlah tempat tidur 10 bed, belum PONED	Pemenuhan SDMK puskesmas PONED & rawat inap	Pelatihan Tim PONED (APN, Gawat darurat maternal neonatal), magang di RS	Penerapan pelayanan PONED	Optimalisasi pelayanan PONED & rawat inap	Optimalisasi pelayanan PONED & rawat inap	DISKES	DAK dan APBD Kabupaten	PSB utk Penanganan Kemiskinan
M1.PSB-2	Memperluas Akses Pendidikan Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kejar Paket C	Optimalisasi Kejar Paket C	Optimalisasi Kejar Paket C	Optimalisasi Kejar Paket C	Optimalisasi Kejar Paket C	Optimalisasi Kejar Paket C	Optimalisasi Kejar Paket C	DISDIKPORA	APBD Kabupaten	PSB utk Penanganan Kemiskinan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Beasiswa Mahasiswa Afirmasi PT	Penyiapan dan koordinasi konsep beasiswa	Koordinasi Beasiswa mahasiswa	Mendorong Fasilitasi Beasiswa mahasiswa afirmasi	Mendorong Fasilitasi Beasiswa mahasiswa afirmasi	Mendorong Fasilitasi Beasiswa mahasiswa afirmasi	Mendorong Fasilitasi Beasiswa mahasiswa afirmasi	DISDIKPORA	APBD Kabupaten	PSB utk Penanganan Kemiskinan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Relokasi Sekolah Terpadu (Tingkat SD dan SMP)	SD: Penyiapan pemindahan pada tahun ajaran baru & penyediaan sebagian mebelair SMP: Percepatan penyelesaian gedung belakang (ruang kelas dan Lab)	SD: Melengkapi jalur/ ramp difabel SMP: Optimalisasi penataan landscape dan pemindahan	Percepatan proses melengkapi sarana prasarana pendukung lainnya	Percepatan proses melengkapi sarana prasarana pendukung lainnya	Percepatan proses melengkapi sarana prasarana pendukung lainnya	Percepatan proses melengkapi sarana prasarana pendukung lainnya	DISDIKPORA	APBD Kabupaten	PSB utk Penanganan Kemiskinan
M1.PSB-3	Memperkuat Pendidikan Karakter dan Keterampilan Pemuda Agar Berdaya Saing, Menyediakan Ruang Kreatif dan Inovatif Bagi Pemuda	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penguatan IT kerjasama dengan Meta AI		Penyiapan kerjasama dengan Meta AI					DISKOMINFO	APBD Kabupaten	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Peningkatan Pendidikan Karakter	Mendorong implementasi Pendidikan Karakter (keagamaan)	Mendorong implementasi Pendidikan Karakter (keagamaan)	Mendorong implementasi Pendidikan Karakter (keagamaan)	Mendorong implementasi Pendidikan Karakter (keagamaan)	Mendorong implementasi Pendidikan Karakter (keagamaan)	Mendorong implementasi Pendidikan Karakter (keagamaan)	DISDIKPORA	APBD Kabupaten	

NO.	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URAIAN PROGRAM STRATEGIS BUPATI	TAHAPAN PELAKSANAAN PER TAHUN						PD PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Bimbingan Ketahanan Keluarga untuk Remaja Sekolah**	Bimbingan Ketahanan Keluarga untuk Remaja Sekolah	Bimbingan Ketahanan Keluarga untuk Remaja Sekolah	Bimbingan Ketahanan Keluarga untuk Remaja Sekolah	Bimbingan Ketahanan Keluarga untuk Remaja Sekolah	Bimbingan Ketahanan Keluarga untuk Remaja Sekolah	Bimbingan Ketahanan Keluarga untuk Remaja Sekolah	DPMKAL DALDUK KB	APBN dan APBD Kabupaten	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Kawasan Olahraga**	Peningkatan sarana olahraga	Peningkatan sarana olahraga	Pemeliharaan rutin sarana olahraga	Pemeliharaan rutin sarana olahraga	Pemeliharaan rutin sarana olahraga	Pemeliharaan rutin sarana olahraga	DISDIKPORA	APBN dan APBD Kabupaten	Membangun kawasan olahraga, tanah dengan land banking dari APBD Kab, pembangunan dengan anggaran APBN
M1.PSB-2	**Memperluas Akses Pendidikan Berkualitas**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Mendorong Pendirian Sekolah Rakyat**	Penyiapan, koordinasi, pengusulan sekolah rakyat	Mendorong Pendirian dan Fasilitasi Sekolah Rakyat	Fasilitasi Sekolah Rakyat	Fasilitasi Sekolah Rakyat	Fasilitasi Sekolah Rakyat	Fasilitasi Sekolah Rakyat	Dissos P3A	APBN dan APBD Kabupaten	**PSB utk Penanganan Kemiskinan**
M1.PSB-4	**Melaksanakan Pelestarian Budaya**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Pembangunan Rintisan Museum**			Mendorong pembangunan rintisan museum dan DED Pembangunan museum	Mendorong Pembangunan rintisan museum dan Pemeliharaan rintisan museum	Mendorong Pembangunan rintisan museum dan Pemeliharaan rintisan museum	Mendorong Pembangunan rintisan museum dan Pemeliharaan rintisan museum	DISBUD	Dana Keistimewaan	
M2.PSB-5	**Mempromosikan Pariwisata Berbasis Alam dan Budaya Secara Berkelanjutan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Penyelenggaraan Event Wisata Berbasis Alam, Budaya, dan Olahraga Berskala Regional Nasional dan Internasional**	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	Penyelenggaraan event wisata berbasis alam, budaya, dan olahraga	DISBUD	Dana Keistimewaan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Penataan kawasan Geopark (Kliripan, Goa Kiskendo, Widosari, Perbukitan Kendil, Eosen Nangulan dan Kawasan Sermo)**	Penyusunan roadmap penataan kawasan, penyusunan Masterplan Mangan Kliripan - Karangsari serta lanjutan revitalisasi Ampitheater Geosite Goa Kiskendo	Penyediaan visibilitas kawasan Geosite Mangan Kliripan - Karangsari	Penataan kawasan Geosite Mangan Kliripan - Karangsari	Penyusunan Masterplan Geosite Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang, Geosite Puncak Kaldera Gunung Kendil - Suroloyo, Geosite Perbukitan Asal Struktur Geologi Widosari	Penataan Kawasan Geosite Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil - Suroloyo	Penataan Kawasan Geosite Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang	DISPAR	Dana Keistimewaan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Pembangunan Jalan Akses Kawasan Wisata Paralayang**	Penyelesaian fasilitas paralayang	Perbaikan jalan akses kawasan wisata Paralayang (tikungan Tiban)	Perbaikan akses kawasan wisata Paralayang	Perbaikan akses kawasan wisata Paralayang	Perbaikan akses kawasan wisata Paralayang	Perbaikan akses kawasan wisata Paralayang	DISPAR	Dana Keistimewaan	
M2.PSB-6	**Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Pengembangan Smart Agriculture**	Percepatan Pengembangan Smart Agriculture	Percepatan Pengembangan Smart Agriculture	Percepatan Pengembangan Smart Agriculture	Percepatan Pengembangan Smart Agriculture	Percepatan Pengembangan Smart Agriculture	Percepatan Pengembangan Smart Agriculture	DISPERTAPANG	Dana Keistimewaan dan APBD Kabupaten	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Pengembangan Perbenihan (Mandiri Benih)**		Pengembangan Perbenihan (Mandiri Benih)	Pengembangan Perbenihan (Mandiri Benih)	Pengembangan Perbenihan (Mandiri Benih)	Pengembangan Perbenihan (Mandiri Benih)	Pengembangan Perbenihan (Mandiri Benih)	DISPERTAPANG	APBD Kabupaten	

NO.	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URAIAN PROGRAM STRATEGIS BUPATI	TAHAPAN PELAKSANAAN PER TAHUN						PD PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Pengembangan Pertanian Presisi**	Pengembangan Pertanian Presisi	Pengembangan Pertanian Presisi	Pengembangan Pertanian Presisi	Pengembangan Pertanian Presisi	Pengembangan Pertanian Presisi	Pengembangan Pertanian Presisi	DISPERTAPANG	APBN dan APBD Kabupaten	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Cetak Lahan dan Pengembangan Sumber Daya Air Irigasi**	Cetak Lahan dan Pengembangan Sumber Daya Air Irigasi	Cetak Lahan dan Pengembangan Sumber Daya Air Irigasi	Cetak Lahan dan Pengembangan Sumber Daya Air Irigasi	Cetak Lahan dan Pengembangan Sumber Daya Air Irigasi	Cetak Lahan dan Pengembangan Sumber Daya Air Irigasi	Cetak Lahan dan Pengembangan Sumber Daya Air Irigasi	DISPERTAPANG	APBD Kabupaten & APBN	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Penumbuhan dan penguatan Petani Milenial**	Penumbuhan dan penguatan Petani Milenial	Penumbuhan dan penguatan Petani Milenial	Penumbuhan dan penguatan Petani Milenial	Penumbuhan dan penguatan Petani Milenial	Penumbuhan dan penguatan Petani Milenial	Penumbuhan dan penguatan Petani Milenial	DISPERTAPANG	APBD Kabupaten & APBN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Penumbuhan dan Pembinaan Petani dan Nelayan Milenial**	Penumbuhan dan Pembinaan Petani dan Nelayan Milenial	Penumbuhan dan Pembinaan Petani dan Nelayan Milenial	Penumbuhan dan Pembinaan Petani dan Nelayan Milenial	Penumbuhan dan Pembinaan Petani dan Nelayan Milenial	Penumbuhan dan Pembinaan Petani dan Nelayan Milenial	Penumbuhan dan Pembinaan Petani dan Nelayan Milenial	DISLAUTKAN	APBD Kabupaten & APBN Dana Keistimewaan	
M2.PSB-7	**Mengembangkan Sektor Agro Industri Hulu-Hilir**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Pengembangan Agrobisnis Kopi, Kelapa, Teh, Kakao, Panili, Biofarmaka, Cabai, Jamur, Kemukus**	Sentra Jamur (Saemaul dan Dais) Pengembangan Agrobisnis Kopi, Kelapa, Teh, Kakao, Panili, Biofarmaka, Cabai, Jamur, Durian	Pengembangan Agrowisata Jamur (Nanggulan), Pengembangan Agrobisnis Kopi, Kelapa, Teh, Kakao, Panili, Biofarmaka, Cabai, Jamur, Durian	Pengembangan Agrobisnis Kopi, Kelapa, Teh, Kakao, Panili, Biofarmaka, Cabai, Jamur, Durian	Pengembangan Agrobisnis Kopi, Kelapa, Teh, Kakao, Panili, Biofarmaka, Cabai, Jamur, Durian	Pengembangan Agrobisnis Kopi, Kelapa, Teh, Kakao, Panili, Biofarmaka, Cabai, Jamur, Durian	Pengembangan Agrobisnis Kopi, Kelapa, Teh, Kakao, Panili, Biofarmaka, Cabai, Jamur, Durian	DISPERTAPANG	Dana Keistimewaan	
M2.PSB-8	**Memfasilitasi Perluasan Akses Pasar**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Optimalisasi Pasar Rakyat**	Optimalisasi pasar rakyat	Optimalisasi pasar rakyat	Optimalisasi pasar rakyat	Mendorong revitalisasi pasar sentolo	Mendorong revitalisasi pasar sentolo	Mendorong revitalisasi pasar sentolo	DISDAG		
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Fasilitasi dan Penataan PKL di Perkotaan Wates**	Fasilitasi dan Penataan PKL di Perkotaan Wates	Fasilitasi dan Penataan PKL di Perkotaan Wates	Fasilitasi dan Penataan PKL di Perkotaan Wates	Fasilitasi dan Penataan PKL di Perkotaan Wates	Fasilitasi dan Penataan PKL di Perkotaan Wates	Fasilitasi dan Penataan PKL di Perkotaan Wates	DISDAG	APBN dan APBD Kabupaten	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Optimalisasi TPID**	Pemantauan Harga Sembako (55 komoditas di Pasar Wates, Pasar Bendungan, dan Pasar Galur melalui aplikasi Sikepo) dan Operasi Pasar	Pemantauan Harga Sembako (55 komoditas di Pasar Wates, Pasar Bendungan, dan Pasar Galur melalui aplikasi Sikepo) dan Operasi Pasar	Pemantauan Harga Sembako (55 komoditas di Pasar Wates, Pasar Bendungan, dan Pasar Galur melalui aplikasi Sikepo) dan Operasi Pasar	Pemantauan Harga Sembako (55 komoditas di Pasar Wates, Pasar Bendungan, dan Pasar Galur melalui aplikasi Sikepo) dan Operasi Pasar	Pemantauan Harga Sembako (55 komoditas di Pasar Wates, Pasar Bendungan, dan Pasar Galur melalui aplikasi Sikepo) dan Operasi Pasar	Pemantauan Harga Sembako (55 komoditas di Pasar Wates, Pasar Bendungan, dan Pasar Galur melalui aplikasi Sikepo) dan Operasi Pasar	DISDAG	APBD dan Dana Keistimewaan	
M2.PSB-9	**Memfasilitasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Pengembangan Aerotropolis:** **Peningkatan investasi**	Kajian Potensi Investasi		Fasilitasi IPRO Air Front MICE	Fasilitasi IPRO Air Front MICE	Fasilitasi IPRO Air Front MICE	Fasilitasi IPRO Air Front MICE	DPMPTSP	APBD Kabupaten	
			Pengembangan Aerotropolis: **Airfront MICE**	Harmonisasi rencana pembangunan infrastruktur Jalan Tol di kawasan Airfront MICE	Mendorong pengembangan layanan aktivitas MICE, transit dan promosi	Mendorong pengembangan layanan aktivitas MICE, transit dan promosi	Mendorong pengembangan layanan aktivitas MICE, transit dan promosi	Harmonisasi rencana pengembangan kawasan Airport City dengan Kawasan Campuran Intensitas	Mendorong pengembangan layanan aktivitas MICE, transit dan promosi	DISPAR; DISPERTARU; DPMPTSP	Investasi, APBD Kabupaten, APBD DIY	

NO.	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URAIAN PROGRAM STRATEGIS BUPATI	TAHAPAN PELAKSANAAN PER TAHUN						PD PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
					investasi di kawasan Airfront MICE	investasi di kawasan Airfront MICE	investasi di kawasan Airfront MICE	Tinggi di kawasan Aerotropolis dalam rangka review Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar YIA	investasi di kawasan Airfront MICE			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Pengembangan Aerotropolis:** **Smart Agriculture**	Fasilitasi lahan sawah surjan sebagai entitas khas Agro Aerotropolis serta peningkatan nilai tambah produk unggulan pertanian di kawasan Smart Agriculture	Fasilitasi lahan sawah surjan sebagai entitas khas Agro Aerotropolis serta peningkatan nilai tambah produk unggulan pertanian di kawasan Smart Agriculture	Fasilitasi lahan sawah surjan sebagai entitas khas Agro Aerotropolis serta peningkatan nilai tambah produk unggulan pertanian di kawasan Smart Agriculture	Fasilitasi lahan sawah surjan sebagai entitas khas Agro Aerotropolis serta peningkatan nilai tambah produk unggulan pertanian di kawasan Smart Agriculture	Fasilitasi lahan sawah surjan sebagai entitas khas Agro Aerotropolis serta peningkatan nilai tambah produk unggulan pertanian di kawasan Smart Agriculture	Fasilitasi lahan sawah surjan sebagai entitas khas Agro Aerotropolis serta peningkatan nilai tambah produk unggulan pertanian di kawasan Smart Agriculture	DISPERTAPANG	Dana Keistimewaan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Pengembangan Aerotropolis:** **Smart Tourism**	Mendorong Pengembangan daya tarik wisata alam yang diharmonisasikan dengan daya tarik budaya lokal	Mendorong Pengembangan daya tarik wisata alam yang diharmonisasikan dengan daya tarik budaya lokal	Mendorong Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha jasa pariwisata	Fasilitasi Pemanfaatan teknologi dan informasi digital untuk peningkatan promosi dan rantai bisnis usaha jasa pariwisata yang terintegrasi	Fasilitasi Pemanfaatan teknologi dan informasi digital untuk peningkatan promosi dan rantai bisnis usaha jasa pariwisata yang terintegrasi	Fasilitasi Pemanfaatan teknologi dan informasi digital untuk peningkatan promosi dan rantai bisnis usaha jasa pariwisata yang terintegrasi	DISPAR	DAK, Dana Keistimewaan, APBD DIY, APBD Kabupaten	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Pengembangan Aerotropolis:** **Science-Techno City**	Pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung terwujudnya pengembangan Science-Techno City di kawasan Aerotropolis	Pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung terwujudnya pengembangan Science-Techno City di kawasan Aerotropolis	Optimalisasi peran dan fungsi Field Research Center Sekolah Vokasi UGM sebagai pusat inovasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Optimalisasi peran dan fungsi Field Research Center Sekolah Vokasi UGM sebagai pusat inovasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Mendorong pembangunan kawasan berorientasi transit melalui integrasi konektivitas berbagai moda transportasi untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman dan nyaman di Pusat Kota Wates	Mendorong pembangunan kawasan berorientasi transit melalui integrasi konektivitas berbagai moda transportasi untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman dan nyaman di Pusat Kota Wates	DPUPKP	Investasi, DAK, APBN, Dana Keistimewaan, APBD DIY, APBD Kabupaten	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	**Pengembangan Aerotropolis:** **Futuristic Town**	Pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung terwujudnya pengembangan Futuristic Town di kawasan Aerotropolis	Pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung terwujudnya pengembangan Futuristic Town di kawasan Aerotropolis	Pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung terwujudnya pengembangan Futuristic Town di kawasan Aerotropolis	Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif serta peningkatan promosi investasi guna mendorong terwujudnya pengembangan Futuristic Town di kawasan Aerotropolis	Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif serta peningkatan promosi investasi guna mendorong terwujudnya pengembangan Futuristic Town di kawasan Aerotropolis	Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif serta peningkatan promosi investasi guna mendorong terwujudnya pengembangan Futuristic Town di kawasan Aerotropolis	DPUPKP	Investasi, DAK, Dana Keistimewaan, APBD DIY, APBD Kabupaten	
M2.PSB-10	**Mendukung Inovasi Produk Lokal dan Pengembangan Industri Kreatif**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Smart IKM**	Smart IKM	Smart IKM	Smart IKM	Smart IKM	Smart IKM	Smart IKM	DISPERINKOP UKM	APBN dan APBD Kabupaten	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	**Sertifikasi Halal UMKM**	Mendorong implementasi sertifikasi halal untuk UMKM	Mendorong implementasi sertifikasi halal untuk UMKM	Mendorong implementasi sertifikasi halal untuk UMKM	Mendorong implementasi sertifikasi halal untuk UMKM	Mendorong implementasi sertifikasi halal untuk UMKM	Mendorong implementasi sertifikasi halal untuk UMKM	DISPERINKOP UKM	APBN	

NO.	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URAIAN PROGRAM STRATEGIS BUPATI	TAHAPAN PELAKSANAAN PER TAHUN						PD PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Batik Khas Kulon Progo**	Fasilitasi HAKI batik khas Kulon Progo	Fasilitasi pemasaran batik khas Kulon Progo	Fasilitasi pemasaran batik khas Kulon Progo	Fasilitasi pemasaran batik khas Kulon Progo	Fasilitasi pemasaran batik khas Kulon Progo	Fasilitasi pemasaran batik khas Kulon Progo	DISPERINKOP UKM	APBD Kabupaten dan Dana Keistimewaan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Marketplace (Pay-on Pro)**	Marketplace (Pay-on Pro)	Marketplace (Pay-on Pro)	Marketplace (Pay-on Pro)	Marketplace (Pay-on Pro)	Marketplace (Pay-on Pro)	Marketplace (Pay-on Pro)	DISPERINKOP UKM	Dana Keistimewaan dan APBD Kabupaten	
M2.PSB-11	**Memperkuat Kapasitas dan Akses Permodalan bagi Sektor UMKM dan Koperasi**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Pembinaan Koperasi Merah Putih**	Fasilitasi Pendirian Koperasi Merah Putih	Pembinaan Koperasi Merah Putih	Pembinaan Koperasi Merah Putih	Pembinaan Koperasi Merah Putih	Pembinaan Koperasi Merah Putih	Pembinaan Koperasi Merah Putih	DISPERINKOP UKM	APBN, Dana Keistimewaan dan APBD Kabupaten	**PSB utk Penanganan Kemiskinan**
M2.PSB-12	**Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu untuk UMKM dan IKM**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Mendorong Pengembangan Kawasan PLUT Terpadu**	Percepatan Pengembangan Kawasan PLUT Terpadu	Percepatan Pengembangan Kawasan PLUT Terpadu	Percepatan Pengembangan Kawasan PLUT Terpadu	Optimalisasi Kawasan PLUT Terpadu	Optimalisasi Kawasan PLUT Terpadu	Optimalisasi Kawasan PLUT Terpadu	DISPERINKOP UKM	APBN dan APBD Kabupaten	
M2.PSB-13	**Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Warga Miskin**		Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Warga Miskin	Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Warga Miskin	Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Warga Miskin	Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Warga Miskin	Pelatihan Ketenagakerjaan untuk Warga Miskin	DISNAKER	APBD Kabupaten	**PSB utk Penanganan Kemiskinan**
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Pelatihan dan Fasilitasi Calon PMI & Purna PMI**		Pelatihan dan Fasilitasi Calon PMI & Purna PMI	Pelatihan dan Fasilitasi Calon PMI & Purna PMI	Pelatihan dan Fasilitasi Calon PMI & Purna PMI	Pelatihan dan Fasilitasi Calon PMI & Purna PMI	Pelatihan dan Fasilitasi Calon PMI & Purna PMI	DISNAKER	APBD Kabupaten	**PSB utk Penanganan Kemiskinan**
M3.PSB-14	**Menyederhanakan Birokrasi dengan Pendekatan Berbasis Hasil dan Efisiensi Anggaran**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Reformasi Kalurahan**	Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan	Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan	Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan	Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan	Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan	Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Kalurahan	DPMKAL DALDUK KB	Dana Keistimewaan	
M3.PSB-15	**Melakukan Digitalisasi Layanan Publik Guna Meningkatkan Transparansi**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optic**	Percepatan Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optic	Percepatan Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optic	Percepatan Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optic	Percepatan Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optic	Percepatan Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optic	Percepatan Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optic	DISKOMINFO	Dana Keistimewaan dan APBD Kabupaten	
M3.PSB-16	**Menyediakan Fasilitas dan Dukungan yang Memadai untuk Berprestasi**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Fasilitasi kelengkapan lapangan olahraga tingkat kalurahan**	Fasilitasi kelengkapan lapangan olahraga tingkat kalurahan	Fasilitasi kelengkapan lapangan olahraga tingkat kalurahan	Fasilitasi kelengkapan lapangan olahraga tingkat kalurahan	Fasilitasi kelengkapan lapangan olahraga tingkat kalurahan	Fasilitasi kelengkapan lapangan olahraga tingkat kalurahan	Fasilitasi kelengkapan lapangan olahraga tingkat kalurahan	DPMKAL DALDUK KB	APBD Kabupaten	
M3.PSB-17	**Menguatkan Pusat-Pusat Peribadatan Umat Beragama**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Mendorong Penetapan Embarkasi Haji**	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	Mendorong pelaksanaan pembangunan embarkasi haji	SETDA	APBN	

NO.	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URAIAN PROGRAM STRATEGIS BUPATI	TAHAPAN PELAKSANAAN PER TAHUN						PD PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pembangunan Masjid sekitar Alun-alun Wates			Persiapan Perencanaan Pembangunan Masjid Kulon Progo	Perencanaan Pembangunan Masjid Kulon Progo	Pembangunan Tahap I Masjid Kulon Progo	Pembangunan Tahap II Masjid Kulon Progo	SETDA	APBN dan APBD Kabupaten	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, mendorong Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	Lomba CTA, Lomba Da'i, MTQ/STQ tingkat Kulon Progo, Pelatihan Kafilah MTQ/STQ Tingkat DIY, Peringatan hari Santri dan Festival Santri, Seleksi Penghafal Al-Quran, Pengembangan Kampung Moderasi dan Desa Sadar Kerukunan	SETDA	APBN dan APBD Kabupaten	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Optimalisasi penataan dan pemanfaatan masjid Agung Wates			Peninggian halaman masjid dan penataan lingkungan	Penataan lahan parkir (pembongkaran gerbang dan renovasi pagar depan)	Pembangunan ruang transit bagi keluarga pengantar jamaan haji dan penaataan		SETDA	APBD Kabupaten	
M3.PSB-18	Penguatan ideologi pancasila & meningkatkan karakter kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Fasilitasi FGD Ormas dan FKUB	Fasilitasi FGD Ormas dan FKUB	Fasilitasi FGD Ormas dan FKUB	Fasilitasi FGD Ormas dan FKUB	Fasilitasi FGD Ormas dan FKUB	Fasilitasi FGD Ormas dan FKUB	Fasilitasi FGD Ormas dan FKUB	BAKESBANGPOL	APBD Kabupaten	
M4.PSB-19	Penetapan Kebijakan Tata Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Mendorong percepatan penetapan RTRW & 6 RDTR	Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR	Mendorong percepatan penetapan RTRW dan RDTR	Mendorong percepatan penetapan RDTR	Mendorong percepatan penetapan RDTR	Mendorong percepatan penetapan RDTR	Mendorong percepatan penetapan RDTR	DISPERTARU	APBD Kabupaten	
M4.PSB-9	Memfasilitasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Land Banking untuk Kepentingan Pemerintahan dan Fasum	Perumusan kebijakan land banking	Perumusan kebijakan land banking	Pengalokasian anggaran untuk land banking	Pengalokasian anggaran untuk land banking	Pengalokasian anggaran untuk land banking	Pengalokasian anggaran untuk land banking	DISPERTARU	APBD Kabupaten	
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Sertifikasi Tanah Masyarakat untuk Infrastruktur	identifikasi kebutuhan sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur	identifikasi kebutuhan & sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur	identifikasi kebutuhan & sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur	identifikasi kebutuhan & sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur	identifikasi kebutuhan & sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur	identifikasi kebutuhan & sertifikasi tanah masyarakat untuk infrastruktur	DISPERTARU	APBD Kabupaten	
M4.PSB-20	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan Perbaikan Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Mendorong Kelanjutan Pembangunan Jalan Plono-Ngliggo	Mendorong Pembangunan Jalan Plono - Ngliggo	Mendorong Pembangunan Jalan Plono - Ngliggo	Mendorong Pembangunan Jalan Plono - Ngliggo	Mendorong Pembangunan Jalan Plono - Ngliggo			DPUPKP	APBD DIY	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Wisata Pantai		Pemeliharaan Berkala Jalan Glagah - Congot	Pembangunan Jalan Sepanjang Pantai Trisik ke Bugel (tahap I)	Pembangunan Jalan Sepanjang Pantai Trisik ke Bugel (tahap II)	Pembangunan Jalan Sepanjang Bugel ke Karangwuni (Tahap I)	Pembangunan Jalan Sepanjang Bugel ke Karangwuni (Tahap II)	DPUPKP	Dana Keistimewaan, APBD Kabupaten, & APBN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Wisata Paralayang		Pembangunan Jalan Akses Kawasan Wisata Paralayang	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Wisata Paralayang	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Wisata Paralayang	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Wisata Paralayang	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Wisata Paralayang	DPUPKP	Dana Keistimewaan	

NO.	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URAIAN PROGRAM STRATEGIS BUPATI	TAHAPAN PELAKSANAAN PER TAHUN						PD PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Optimalisasi Kawasan Glagah - Congot - Mangrove**		Optimalisasi Kawasan Glagah - Congot - Mangrove	Optimalisasi Kawasan Glagah - Congot - Mangrove	Optimalisasi Kawasan Glagah - Congot - Mangrove	Optimalisasi Kawasan Glagah - Congot - Mangrove	Optimalisasi Kawasan Glagah - Congot - Mangrove	DPUPKP	Dana Keistimewaan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Mendorong Kawasan Exit Toll (Temon dan Wates)**			Mendorong pengadaan tanah lingkar barat Wates dan konstruksi jalan	Mendorong pengadaan tanah lingkar barat Wates dan konstruksi jalan	Mendorong pengadaan tanah lingkar barat Wates dan konstruksi jalan	Mendorong pengadaan tanah lingkar barat Wates dan konstruksi jalan	DPUPKP	APBD DIY	
M4.PSB-21	**Meningkatkan Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Antar Wilayah**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Peningkatan Jalan Palang KA Barat - Gemulung**		0	Peningkatan Jalan Palang KA Barat - Gemulung				DPUPKP	APBD Kabupaten	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Mendorong Pembangunan Flyover**							DPUPKP		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Mendorong pembangunan Smart Area Traffic Control System (ATCS)**		Mendorong pembangunan Smart ATCS	Mendorong pembangunan Smart ATCS	Mendorong pembangunan Smart ATCS	Mendorong pembangunan Smart ATCS	Mendorong pembangunan Smart ATCS	DISHUB	DAK/ APBN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Pembangunan PJU dan Perlengkapan Jalan**	Pembangunan PJU dan Perlengkapan Jalan	Pembangunan PJU dan Perlengkapan Jalan	Pembangunan PJU dan Perlengkapan Jalan	Pembangunan PJU dan Perlengkapan Jalan	Pembangunan PJU dan Perlengkapan Jalan	Pembangunan PJU dan Perlengkapan Jalan	DISHUB	DAK, Dana Keistimewaan, dan APBD Kabupaten	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Layanan Transportasi Inklusif (Bus Sekolah Difabel)**	Fasilitasi bus sekolah untuk difabel	Mendorong penerapan transportasi inklusif	Percepatan penerapan transportasi inklusif	Percepatan penerapan transportasi inklusif	Percepatan penerapan transportasi inklusif	Percepatan penerapan transportasi inklusif	DISHUB	APBN dan APBD Kabupaten	
M4.PSB-22	**Mengembangkan Infrastruktur Ramah Lingkungan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Perbaikan Drainase Kota Wates**		Peningkatan drainase kota Wates	Peningkatan drainase kota Wates				DPUPKP	Dana Keistimewaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Mendorong Pembangunan Embung Sriti & Ngruno**			Mendorong Pembangunan Embung Sriti & Ngruno	Mendorong Pembangunan Embung Sriti & Ngruno			DPUPKP	APBN dan Dana Keistimewaan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Lanjutan Pembangunan Trase Temon - Borobudur**	Lanjutan Pembangunan Trase Temon-Borobudur	Lanjutan Pembangunan Trase Temon - Borobudur	Lanjutan Pembangunan Trase Temon - Borobudur	Lanjutan Pembangunan Trase Temon - Borobudur	Lanjutan Pembangunan Trase Temon - Borobudur	Lanjutan Pembangunan Trase Temon - Borobudur	DPUPKP	Dana Keistimewaan dan APBD Kabupaten	
M4.PSB-23	**Menyediakan Ruang Terbuka Hijau**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Pembangunan Taman (Taman Adipura)**		Mendorong pembangunan taman adipura	Mendorong pembangunan taman adipura	Mendorong pembangunan taman adipura			DLH	APBD Kabupaten	
M4.PSB-24	**Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Pembentukan Bank Sampah / TPS3R Tiap Kalurahan dan Kelembagaan Bank Sampah**	1. Pemberdayaan kelompok pengelola sampah (yg ada saat ini).	1. Pembentukan Bank Sampah Induk di tiap kalurahan. 2. Sosialisasi pembentukan bank	1. Evaluasi kelompok pengelola sampah (KSM/TPSR dan BS).	1. Pembinaan dan evaluasi kelompok pengelola sampah.	Pembinaan dan evaluasi kelompok pengelola sampah	Pembinaan dan evaluasi kelompok pengelola sampah	DLH	Dana Keistimewaan dan APBD Kabupaten	

NO.	PROGRAM STRATEGIS BUPATI	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URAIAN PROGRAM STRATEGIS BUPATI	TAHAPAN PELAKSANAAN PER TAHUN						PD PELAKSANA	SUMBER PENDANAAN	KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				2. Sosialisasi pembentukan BS di tiap kalurahan. 3. Penilaian kriteria kelompok pengelola sampah aktif.	sampah di tiap pedukuhan.	2. Pembentukan bank sampah di tiap pedukuhan	2. Pembentukan bank sampah di tiap pedukuhan					
M4.PSB-25	**Mempersiapkan Infrastruktur Bencana dan Adaptasi Iklim**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Koordinasi Mitigasi Bencana Banjir di Kawasan Selatan**	Koordinasi Mitigasi Bencana Banjir di Kawasan Selatan	Koordinasi Mitigasi Bencana Banjir di Kawasan Selatan	Koordinasi Mitigasi Bencana Banjir di Kawasan Selatan	Koordinasi Mitigasi Bencana Banjir di Kawasan Selatan	Koordinasi Mitigasi Bencana Banjir di Kawasan Selatan	Koordinasi Mitigasi Bencana Banjir di Kawasan Selatan	BPBD	APBD Kabupaten dan APBN	

Keterangan:

- Kolom NO. = Kolom bantu kodefikasi
- Program Strategis Bupati = ditandai sebagai (PSB)
- Misi = ditandai sebagai (M)
- Kolom PD Pelaksana = Perangkat Daerah Pelaksana

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, Tahun 2025

3.3 Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025–2030

Penahapan pembangunan atau tema tahunan dalam siklus RPJMD perlu disusun secara umum dan non-sektoral. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penentuan tema pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Tema pembangunan tahunan menjadi penghubung antara arah pembangunan jangka menengah daerah dengan operasionalisasi program dan kegiatan perangkat daerah di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan penahapan pembangunan untuk periode 2025–2030 sebagai tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2045. Tahap ini disebut sebagai fase ***"Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah",*** yang menjadi dasar untuk mewujudkan visi jangka panjang: ***"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)".*** Dalam kerangka RPJMD, pembangunan periode ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, yakni ***"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan."***

Dalam menyusun fokus penahapan pembangunan tahunan 2025–2030, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan penelusuran terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan, antara lain:

1. RPJPN Tahun 2025–2045;
2. RPJMN Tahun 2025–2029;
3. RPJPD DIY Tahun 2025–2045;
4. RPJMD DIY Tahun 2022–2027;
5. RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2045;
6. KLHS RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029; dan
7. Dokumen perencanaan sektoral lainnya.

Secara nasional, arah pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025–2029 menekankan pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan sebanyak 83 Kegiatan Prioritas Nasional (KP), dimana 30 di antaranya berada dalam lingkup kewenangan kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan prioritas tersebut telah diselaraskan ke dalam kerangka program perangkat daerah dan akan diuraikan lebih lanjut pada Bab 4 dalam Tabel 4.1-1. Selain itu, amanat RPJMN 2025–2029 yang tertuang dalam Strategi Kewilayahan menegaskan bahwa setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik khusus untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dirumuskan tema pembangunan wilayah untuk setiap pulau besar di Indonesia. Untuk Pulau Jawa, tema pembangunan adalah ***"Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan."*** Strategi kewilayahan tersebut memerlukan dukungan dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Mengingat Kabupaten Kulon Progo terletak di Pulau Jawa, arah dan tema pembangunan tersebut menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penahapan Tahun 2025 yakni "Pengembangan kawasan pertumbuhan menuju akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif", dan penahapan Tahun 2026 telah diintegrasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan 2026 sehingga selaras dengan target tahunannya. Adapun fokus penahapan pembangunan

tahunan Kabupaten Kulon Progo untuk periode 2026–2030 dirangkum dalam Tabel 3.3-1 berikut:

Tabel 3.3-1 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kulon Progo

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penguatan Fondasi Pembangunan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif menuju Kulon Progo yang Makmur dan Berkelanjutan	Penguatan SDM, Inovasi Daerah, dan Ketahanan Sosial Budaya	Transformasi Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan	Pemerataan Layanan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Percepatan Pembangunan Daerah

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3-1, penahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun 2026–2030 telah dirancang secara bertahap mulai dari Tahap 1 hingga Tahap 5. Penahapan Tahap 3 hingga Tahap 5 disusun dengan memperhatikan arah Program Strategis Bupati yang telah diuraikan dalam Subbab 3.2.2 melalui Tabel 3.2.2-1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025–2030.

Khusus untuk Tahap 5 (Tahun 2030), penahapan diarahkan pada ***"Percepatan Pembangunan Daerah".*** Fokus ini sejalan dengan tema pembangunan Tahap 2 dalam RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2045, sekaligus menjadi masa transisi menuju kepemimpinan Kepala Daerah periode selanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tahun 2030 tidak hanya menjadi kelanjutan dari RPJMD Tahun 2025–2029, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan capaian pembangunan jangka menengah dengan sasaran jangka panjang daerah.

3.4 Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam periode RPJMD 2025-2029, pembangunan wilayah Kabupaten Kulon Progo diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diterapkan pendekatan klasterisasi spasial yang mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi ekonomi, dan daya dukung wilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pengembangan wilayah yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, melalui penguatan sektor jasa dan perdagangan, industrialisasi berbasis potensi lokal, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan, untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, maka Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P). Dokumen ini menjadi bagian dokumen RPJMD yang dioperasionalisasikan dalam RKPD. RP2P diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RP2P terdiri dari Rencana Sistem Pelayanan Perkotaan dan rencana pendanaan indikatif.

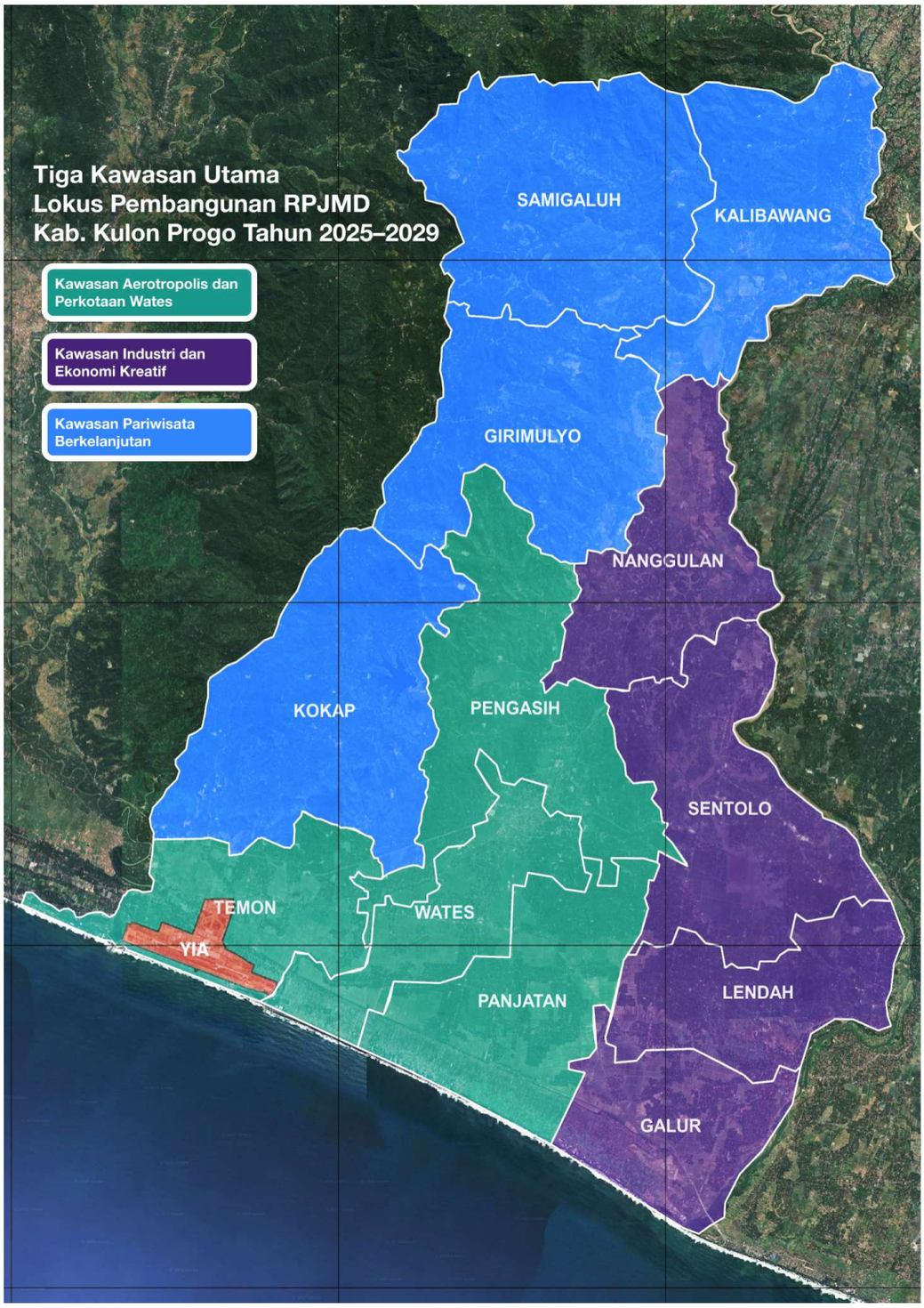
Hingga penetapan RPJMD 2025-2029 ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sedang pada tahapan persiapan Penyusunan RP2P. RP2P akan menjadi jembatan untuk

perencanaan RPJMD yang merupakan perencanaan non spasial dan RTRW yang merupakan perencanaan spasial. Selanjutnya, RP2P tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan seperti RKPD terutama perencanaan yang spesifik mengenai pengembangan wilayah perkotaan.

Berdasarkan hasil pemetaan wilayah dan analisis tematik per kapanewon, pembangunan wilayah Kabupaten Kulon Progo difokuskan pada tiga kawasan utama, yaitu:

1. **Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates**, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis konektivitas, jasa, dan perdagangan, dengan dukungan infrastruktur strategis seperti Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) dan koridor ekonomi terkait;
2. **Kawasan Peruntukan Industri dan Ekonomi Kreatif**, yang diarahkan untuk pengembangan industri berbasis inovasi, agroindustri, serta ekonomi kreatif guna meningkatkan daya saing daerah;
3. **Kawasan Pariwisata Berkelanjutan**, yang mengedepankan pemanfaatan potensi wisata alam, budaya, dan religi dengan prinsip keberlanjutan, serta peningkatan konektivitas menuju destinasi unggulan, termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Gambaran spasial ketiga kawasan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4-1 Lokus Pengambangan Kawasan Kabupaten Kulon Progo yang menunjukkan lokus pembangunan berdasarkan wilayah administrasi kapanewon di Kulon Progo.



Gambar 3.4-1 Peta Pengembangan Kawasan Utama Lokus Pembangunan Kabupaten Kulon Progo

Sumber: RPJPD Kab. Kulon Progo Tahun 2025-2045, diolah

Untuk memastikan arah pengembangan wilayah yang lebih terfokus dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah, tiga kawasan utama di Kabupaten Kulon Progo tersebut dikembangkan dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Setiap kawasan memiliki prioritas pembangunan yang didasarkan pada aspek konektivitas, daya saing ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis konektivitas dan perdagangan, didukung oleh infrastruktur strategis seperti Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA) dan pengembangan kawasan perkotaan. Sementara itu, Kawasan Peruntukan Industri dan Ekonomi Kreatif berperan dalam mendorong industrialisasi berbasis potensi lokal serta memperkuat sektor ekonomi kreatif dan agroindustri sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di sisi lain, Kawasan Pariwisata Berkelanjutan difokuskan pada pemanfaatan potensi wisata alam, budaya, dan religi dengan pendekatan yang berbasis konservasi dan pengelolaan yang inklusif.

Pengembangan kewilayahan Kabupaten Kulon Progo periode 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis potensi daerah. Melalui klasterisasi spasial ini, pembangunan diharapkan dapat lebih terarah dan mampu mewujudkan pemerataan ekonomi, peningkatan daya saing, serta kesejahteraan masyarakat.

3.4.1 Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates

Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates meliputi empat kapanewon utama, yaitu **Kapanewon Temon, Wates, Pengasih, dan Panjatan**. Kawasan ini berfokus pada pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan perkotaan dengan peran spesifik masing-masing kapanewon:

1. **Kapanewon Temon dan Wates** sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mendukung kegiatan ekonomi skala kabupaten. Temon, dengan Bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA), berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis aerotropolis, sedangkan Wates berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik.
2. **Kapanewon Pengasih** menjadi penyokong utama Wates dengan fungsi permukiman dan pelayanan lingkungan.
3. **Kapanewon Panjatan** berperan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan untuk mendukung kebutuhan wilayah sekitarnya.

Kawasan Aerotropolis di sekitar Bandara YIA diarahkan sebagai pusat perekonomian berbasis bandara dengan pengembangan kawasan komersial, permukiman pekerja, industri manufaktur, serta sistem transportasi integratif berbasis *Transit Oriented Development (TOD)*. Pengembangan ini sejalan dengan Keputusan Gubernur DIY No. 353/KEP/2021 tentang Program Prioritas Pembangunan.

Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Perkotaan Wates tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan dan permukiman, tetapi juga sebagai pusat pendidikan yang mencakup jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, pengembangan kawasan ini diarahkan pada peningkatan infrastruktur pendidikan yang memadai serta penguatan aksesibilitas transportasi guna mendukung kegiatan akademik dan mobilitas masyarakat secara optimal.

Kawasan ini akan dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi *(smart city),* yang mendukung mobilitas, efisiensi ekonomi, dan integrasi pembangunan regional. Dengan klasterisasi fungsi, Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates diharapkan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo dan sekitarnya.

Keterkaitan Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates dengan Misi RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2025–2029:

1. Mendukung **Misi 2** dengan mengembangkan pusat ekonomi berbasis jasa, perdagangan, dan industri kreatif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
2. Selaras dengan **Misi 3** melalui peningkatan pelayanan publik dan tata kelola perkotaan berbasis *smart city*.
3. Berkontribusi pada **Misi 4** dengan pembangunan infrastruktur transportasi dan konektivitas yang berkelanjutan.

Fokus Pembangunan Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates:

1. Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan kawasan *smart agriculture, smart tourism,* dan destinasi wisata bisnis *(airfront MICE)*.
2. Penerapan sistem ekonomi sirkular untuk mendukung terwujudnya kawasan *futuristic town.*
3. Pengembangan sains, teknologi, dan inovasi menuju kota cerdas *(science techno city)*.
4. Pengembangan konektivitas.
5. Pengembangan layanan kesehatan bertaraf internasional.
6. Penataan dan pengembangan kawasan pendidikan dasar, menengah, serta pendidikan tinggi.
7. Pengembangan PKL menjadi PKW.
8. Peningkatan dan pengembangan sarana, prasarana, serta utilitas perkotaan.
9. Pengembangan transportasi bersinergi melalui simpul-simpul kegiatan berbasis *Transit Oriented Development (TOD)*.
10. Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.

Fokus Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates:

Berdasarkan fokus pengembangan kawasan aerotropolis dan perkotaan Wates itu, maka arah pengembangan keterampilan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Pertanian Cerdas dan Millennial, yang meliputi keterampilan: Penggunaan Teknologi Pertanian sesuai taraf perkembangannya, Menginterpretasikan data untuk meningkatkan hasil panen dan Manajemen Sumber Daya Alam (Mengelola air dan tanah secara efisien).
2. Pariwisata Cerdas dan *MICE,* yang meliputi keterampilan: pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yaitu menggunakan aplikasi dan platform digital untuk promosi wisata, Manajemen Acara (Merencanakan dan menyelenggarakan acara berskala besar), Pelayanan Pelanggan (Memberikan layanan yang ramah dan profesional kepada wisatawan).
3. Ekonomi Sirkular dan Kota Futuristik, yang meliputi keterampilan: Desain Produk Berkelanjutan (Membuat produk yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan, Manajemen Limbah (Mengelola limbah untuk mengurangi dampak lingkungan) serta Kewirausahaan Sosial yaitu mengembangkan usaha yang berfokus pada keberlanjutan dan dampak sosial positif.
4. Kota Cerdas *(Smart City),* yang meliputi keterampilan Membuat dan mengelola aplikasi untuk layanan kota, Menggunakan data besar dan AI untuk pengambilan keputusan pengembangan usaha dan pelayanan.
5. Konektivitas dan *Transit Oriented Development (TOD),* yang meliputi keterampilan: Manajemen Infrastruktur (Mengelola dan memelihara infrastruktur transportasi), Analisis Mobilitas (Menggunakan data untuk memahami pola pergerakan masyarakat.).
6. Layanan Kesehatan Bertaraf Internasional, yang meliputi keterampilan: Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar internasional, Manajemen Rumah Sakit, dan Teknologi Kesehatan (Menggunakan sistem informasi kesehatan dan *telemedicine).*
7. Transformasi PKL, yang meliputi keterampilan: Kewirausahaan (Mengelola usaha secara mandiri dan inovatif), Manajemen Keuangan (Mengelola keuangan usaha dengan efektif), dan Pemasaran Digital (Mempromosikan produk melalui platform digital).
8. Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perkotaan, yang meliputi kemampuan: Teknik Sipil dan Arsitektur (Merancang dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan), Manajemen Proyek (Mengelola proyek pembangunan dengan efisiensi waktu dan biaya), Pengelolaan Energi dan Air (Mengelola sistem utilitas yang efisien dan ramah lingkungan).
9. Koridor Jalan sebagai Pusat Pelayanan Ekonomi dan Sosial, yang meliputi keterampilan: Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah (Mendukung pelaku usaha lokal untuk berkembang), Manajemen Lalu Lintas (Mengatur arus kendaraan dan pejalan kaki untuk kenyamanan dan keamanan).

Strategi Pengembangan Kawasan Aerotropolis Kabupaten Kulon Progo:

Sebagaimana disebutkan pada awal Subbab 3.4.1, Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan Wates mencakup empat kapanewon utama, yakni Temon, Wates, Pengasih, dan Panjatan. Namun demikian, kawasan sekitar Bandara *Yogyakarta International Airport (YIA)* juga ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten berbasis pengembangan Aerotropolis. Secara keseluruhan, terdapat delapan kapanewon yang termasuk dalam

kawasan strategis ini, yaitu Kapanewon Temon, Wates, Pengasih, Kokap, Galur, Lendah, Panjatan, dan Sentolo, dengan total luas wilayah mencapai 26.605,5 Ha.

Strategi Pengembangan Kawasan Aerotropolis Kabupaten Kulon Progo dirumuskan dalam 6 program prioritas utama meliputi:

1. Memfasilitasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi
2. Program Pengembangan *Airfront MICE;*
3. Program Pengembangan *Smart Agriculture;*
4. Program Pengembangan *Smart Tourism;*
5. Program Pengembangan *Science-Techno City;*
6. Program Pengembangan *Futuristic Town.*

Uraian lengkap terhadap 6 program prioritas utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam program Strategis Bupati terdapat prioritas untuk Memfasilitasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Prioritas ini secara spesifik menuangkan arah kebijakan pentahapan dalam menarik investasi terutama pada pengembangan kawasan Aerotropolis. Direncanakan pada tahun 2026 dilaksanakan kajian potensi investasi Aerotropolis, dilanjutkan dengan fasilitasi penawaran melalui *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* pada tahun-tahun berikutnya, seperti pada tabel 3.2.2-1, nomor M2.PPB-9.
2. Program pengembangan *Airfront MICE* dilaksanakan melalui:
    a. Penyelarasan rencana pengembangan fasilitas pada area *Airport City* yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura Indonesia yang berada dalam Zona Transportasi dengan Zona Campuran Intensitas Tinggi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar Bandar Udara Internasional Yogyakarta Tahun 2023 - 2043;
    b. Pengembangan kawasan pusat bisnis, pelayanan aktivitas transit, pelayanan aktivitas *Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition (MICE)* yang saling terintegrasi;
    c. Penciptaan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan promosi investasi guna mendorong terwujudnya pengembangan *Airfront MICE* di kawasan Aerotropolis;
    d. Pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas umum dalam mendukung terwujudnya pengembangan *Airfront MICE* di kawasan Aerotropolis;
3. Program pengembangan *Smart Agriculture* dilaksanakan melalui:
    a. Perumusan rencana bisnis;
    b. Pengoptimalan peran dan fungsi Jogja Agro Park dan *Field Research Center* Sekolah Vokasi UGM sebagai pusat inovasi, Pendidikan, diseminasi dan pelatihan usaha pertanian;
    c. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha pertanian;
    d. Penumbuhan petani milenial dan usaha rintisan *(startup)* di bidang usaha pertanian;
    e. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan pertanian;
    f. Pelestarian lahan sawah surjan sebagai ciri khas budidaya pertanian di kawasan Aerotropolis sebagai Kawasan Agroeduekowisata;
    g. Pengoptimalan kelembagaan usaha pertanian dengan melibatkan peran sektor swasta;

h. Pengembangan dan peningkatan jejaring dan kerjasama usaha pertanian di dalam dan diluar negeri;
i. Pengoptimalan sumberdaya teknologi dan informasi dalam usaha pertanian;
j. Pembangunan prasarana, sarana, utilitas umum dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung terwujudnya pengembangan *Smart Agriculture* di kawasan Aerotropolis.

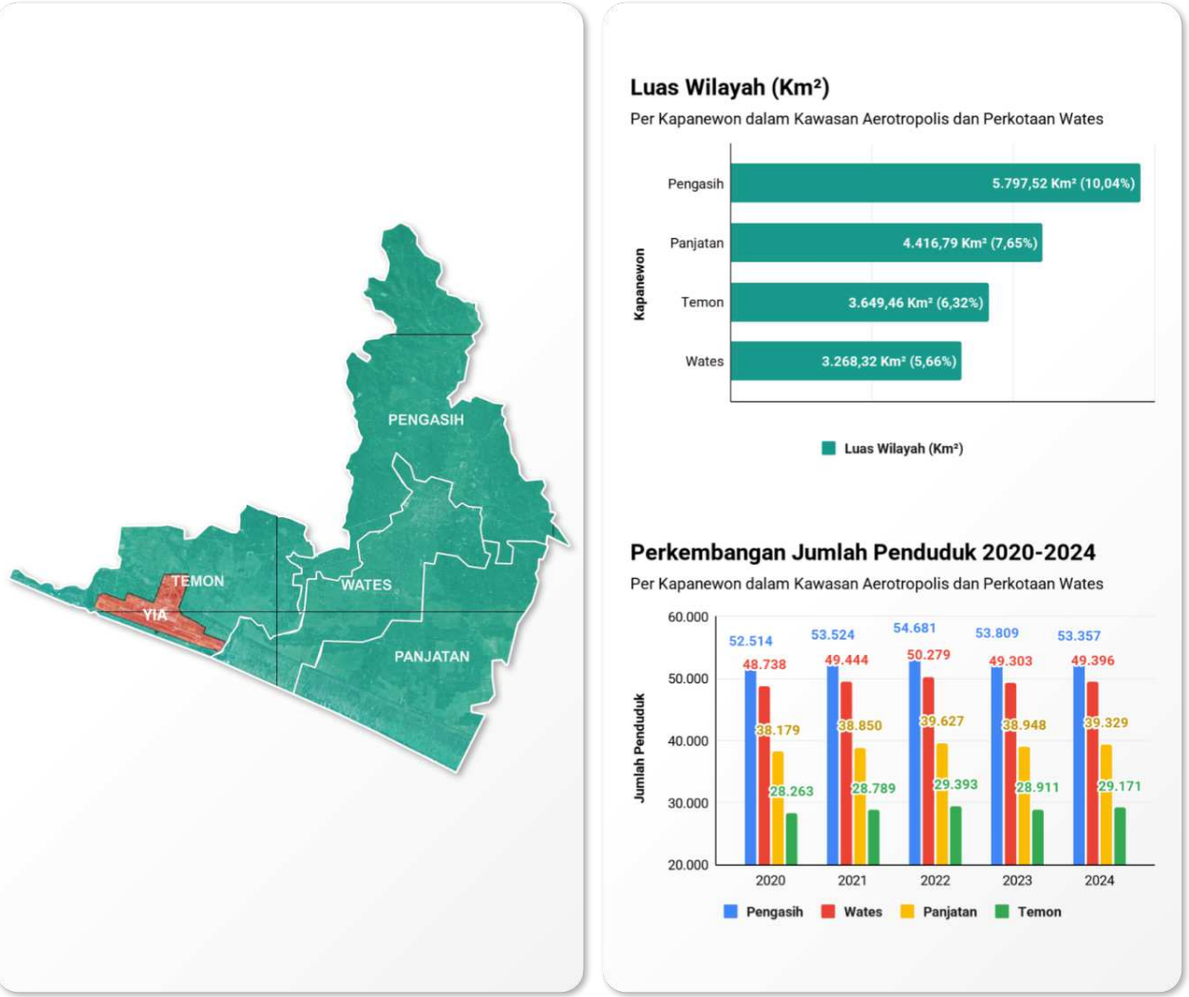
4. Program pengembangan *Smart Tourism* dilaksanakan melalui:
   a. Perumusan rencana bisnis;
   b. Pengembangan daya tarik wisata alam yang diharmonisasikan dengan daya tarik budaya lokal;
   c. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha jasa pariwisata;
   d. Pengembangan usaha jasa pariwisata berbasis komunitas;
   e. Pemanfaatan teknologi dan informasi digital untuk peningkatan promosi dan rantai bisnis usaha jasa pariwisata yang terintegrasi;
   f. Pengembangan dan peningkatan jejaring dan kerjasama usaha jasa pariwisata;
   g. Pembangunan amenitas, prasarana, sarana, utilitas umum dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung terwujudnya pengembangan *Smart Tourism* di kawasan Aerotropolis.
5. Program pengembangan *Science-Techno City* dilaksanakan melalui:
   a. Penyusunan kajian ekonomi dan rencana desain pengembangan *Science-Techno City;*
   b. Pengoptimalan peran dan fungsi *Field Research Center* Sekolah Vokasi UGM sebagai pusat inovasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
   c. Pembangunan kawasan berorientasi transit melalui integrasi konektivitas berbagai moda transportasi untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman dan nyaman di Pusat Kota Wates;
   d. Pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung terwujudnya pengembangan *Science-Techno City* di kawasan Aerotropolis.
6. Program pengembangan *Futuristic Town* dilaksanakan melalui:
   a. Penyusunan kajian ekonomi dan rencana desain pengembangan *Futuristic Town;*
   b. Penerapan sistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan serta pengoptimalan pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan masyarakat perkotaan yang modern dan inovatif;
   c. Peningkatan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat untuk mewujudkan sistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan bagi pengembangan *Futuristic Town;*
   d. Pengintegrasian program *Smart Agriculture* dalam sistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan untuk mendukung fungsi kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam pengembangan *Futuristic Town;*
   e. Penciptaan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan promosi investasi guna mendorong terwujudnya pengembangan *Futuristic Town* di kawasan Aerotropolis;

f. Pembangunan infrastruktur, prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mendukung terwujudnya pengembangan *Futuristic Town* di kawasan Aerotropolis.

Kawasan *Aerotropolis* dan Perkotaan Wates

Fokus Pengembangan Kawasan:

1. Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan kawasan *smart agriculture, smart tourism,* dan destinasi wisata bisnis *(air front MICE).*
2. Penerapan sistem ekonomi sirkular untuk mendukung terwujudnya kawasan *futuristic town.*
3. Pengembangan sains, teknologi, dan inovasi menuju kota cerdas *(science techno city)*
4. Pengembangan konektivitas.
5. Pengembangan layanan kesehatan bertaraf internasional.
6. Penataan dan pengembangan kawasan pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi.
7. Pengembangan PKL menjadi PKW.
8. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas perkotaan.
9. Pengembangan transportasi bersinergi melalui simpul-simpul kegiatan berbasis *Transit Oriented Development (TOD).*
10. Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.



Gambar 3.4.1-2 Fokus Pembangunan Kawasan Aerotropolis dan Perkotaan

Sumber: RPJPD Kab. Kulon Progo Tahun 2025-2045, diolah

3.4.2 Kawasan Industri dan Ekonomi Kreatif

Kawasan ini mencakup **Kapanewon Galur, Lendah, Sentolo, dan Nanggulan,** yang memiliki potensi pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Wilayah ini terdiri dari dataran rendah, kawasan pesisir, serta area berbukit, dengan peruntukan utama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

1. **Kapanewon Galur** menjadi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dengan sektor unggulan pertanian padi, kedelai, dan kelapa, serta perikanan tangkap yang terpusat di TPI Trisik.
2. **Kapanewon Lendah** mendukung sektor pertanian dan memiliki Bendung Sapon sebagai perlindungan terhadap kawasan hilir.
3. **Kapanewon Nanggulan** berfokus pada industri kreatif, seperti tenun, tas, dan kuliner, yang berpotensi meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah di Kulon Progo.
4. **Kapanewon Sentolo** ditetapkan sebagai pusat industri skala provinsi dengan luas lahan potensial 72-200 hektar di Desa Tuksono dan sekitarnya. Pengembangannya bertujuan untuk meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, serta mendukung sektor industri pengolahan pangan, sandang, kimia, logam, dan kerajinan. Meskipun pusat industri utama berada di Sentolo, pengembangan kawasan industri juga dapat meluas ke Kapanewon Temon dan Nanggulan guna memperkuat integrasi ekonomi wilayah.

Kawasan ini juga memiliki risiko bencana seperti banjir dan tsunami, sehingga strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan secara optimal. Dengan pengembangan industri dan ekonomi kreatif yang terencana, kawasan ini diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

Keterkaitan Kawasan Peruntukan Industri dan Ekonomi Kreatif dengan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029:

1. Mendukung **Misi 2** dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi sektor pertanian, dan pengembangan industri kreatif.
2. Berkontribusi pada **Misi 4** melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan mitigasi bencana.

Fokus Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri dan Ekonomi Kreatif:

1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sarana serta prasarana pendukung pertanian, perikanan, dan pariwisata.
2. Hilirisasi sektor pertanian dan perikanan guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan.
3. Pelestarian lingkungan dan sumber daya alam melalui konservasi kawasan pesisir.
4. Pemenuhan kebutuhan air minum.
5. Pengembangan kawasan sentra industri kreatif (batik, serat alam, kuliner).
6. Pengembangan pusat perekonomian, agropolitan, dan minapolitan.
7. Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dalam penguasaan, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian serta perikanan.
8. Pengembangan kawasan peruntukan industri.
9. Pusat penelitian, pendidikan, dan inovasi pertanian (JAP).
10. Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.

11. Pengembangan utilitas pendukung kegiatan industri.
12. Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas sentra industri batik.

Fokus Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kawasan Industri dan Ekonomi Kreatif:

Berdasarkan fokus pengembangan kawasan Industri dan Ekonomi Kreatif itu, maka arah pengembangan keterampilan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Pertanian dan Perikanan Modern, yang meliputi kemampuan: Teknologi Pertanian (Penggunaan alat dan metode pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas), Manajemen Sumber Daya (Pengelolaan air dan tanah secara efisien, Teknik Budidaya Perikanan (Pengetahuan tentang budidaya ikan dan pengelolaan tambak).
2. Industri Kreatif dan Kerajinan, yang meliputi kemampuan: Desain Produk (Kemampuan merancang produk yang menarik dan fungsional), Pemasaran Digital (Menggunakan media sosial dan platform online untuk mempromosikan produk), Manajemen Usaha Kecil (Pengelolaan keuangan dan operasional usaha kecil dan menengah).
3. Industri Pengolahan, yang meliputi kemampuan: Teknologi Pengolahan (Pengetahuan tentang proses pengolahan makanan, sandang, dan bahan lainnya), Standar Kualitas (Memastikan produk memenuhi standar kualitas dan keamanan), Logistik dan Distribusi (Mengelola rantai pasok dan distribusi produk secara efisien).
4. Kewirausahaan dan Inovasi, yang meliputi kemampuan: Perencanaan Bisnis (Menyusun rencana bisnis yang solid dan berkelanjutan),Inovasi Produk (Mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar), Jaringan dan Kemitraan (Membangun hubungan dengan mitra bisnis dan pelanggan).
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang meliputi kemampuan: Penggunaan Perangkat Lunak (Mengoperasikan perangkat lunak untuk desain, akuntansi, dan manajemen), *E-commerce* (Menjual produk melalui platform online dan memahami perilaku konsumen digital), Keamanan Data (Melindungi informasi bisnis dan pelanggan dari ancaman digital).

Kawasan Industri dan Ekonomi Kreatif

Fokus Pengembangan Kawasan:

1. Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertanian, perikanan, dan pariwisata.
2. Hilirisasi sektor pertanian dan perikanan guna memberikan nilai tambah komoditas unggulan.
3. Pelestarian lingkungan sumber daya alam melalui konservasi kawasan pesisir.
4. Pemenuhan kebutuhan air minum.
5. Kawasan sentra industri kreatif (batik, serat alam, kuliner).
6. Pengembangan pusat perekonomian, agropolitan dan minapolitan.
7. Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dalam penguasaan, pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan perikanan.
8. Pengembangan Kawasan peruntukan industri.
9. Pusat penelitian, Pendidikan, dan inovasi pertanian (JAP).
10. Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
11. Pengembangan utilitas pendukung kegiatan industri.
12. Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas sentra industri batik.





Gambar 3.4.2-1 Fokus Pembangunan Kawasan Industri dan Ekonomi Kreatif

Sumber: RPJPD Kab. Kulon Progo Tahun 2025-2045, diolah

3.4.3 Kawasan Pariwisata Berkelanjutan

Kawasan ini mencakup **Kapanewon Girimulyo, Kokap, Kalibawang, dan Samigaluh** di lereng Pegunungan Menoreh. Selain berperan sebagai kawasan resapan air dan konservasi lingkungan, wilayah ini dikembangkan sebagai destinasi pariwisata berbasis ekowisata dan agrowisata.

1. Ekowisata difokuskan pada **Kapanewon Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh,** yang masuk dalam Koridor Temon-Borobudur. Pengembangan wisata alam dan budaya di kawasan ini didukung oleh jalur Bedah Menoreh yang terhubung dengan KSPN Borobudur. Penguatan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (6A) serta penyediaan fasilitas berbasis *MICE,* seperti ekolodge dan aula serbaguna, akan meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong ekonomi lokal.
2. **Kapanewon Kalibawang** difokuskan pada agrowisata dengan konsep agropolitan. Pengembangan mencakup optimalisasi pertanian, perkebunan, dan hortikultura sebagai daya tarik wisata edukatif. Infrastruktur pendukung seperti transportasi dan teknologi pertanian juga akan diperkuat.

Selain potensi wisata, kawasan ini memiliki peran konservasi penting. Kapanewon Kokap memiliki suaka marga satwa seluas 185 hektare, sementara terdapat empat kawasan cagar alam geologi di Samigaluh, Kalibawang, dan Girimulyo. Keempat kapanewon ini juga berfungsi sebagai kawasan imbuhan air tanah, sehingga pengembangan pariwisata harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan yang berbasis ekowisata, agrowisata, dan konservasi, kawasan ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan ekologi.

Keterkaitan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan dengan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029:

1. Mendukung **Misi 1** melalui penguatan identitas budaya dan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata.
2. Berkontribusi pada **Misi 2** dengan mendorong pengembangan ekowisata dan agrowisata yang meningkatkan pendapatan daerah.
3. Selaras dengan **Misi 4** melalui konservasi lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung secara berkelanjutan.

Fokus Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan

1. Pengembangan pariwisata berkelanjutan.
2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah untuk mempertahankan warisan ekologis.
3. *Hinterland aerotropolis.*
4. Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
5. Peningkatan dan pengembangan sarana, prasarana, serta utilitas perkotaan.
6. Pengembangan dan pengaturan fasilitas pariwisata.
7. Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kegiatan agropolitan.
8. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier kewenangan kabupaten.
9. Pembangunan, peningkatan, dan pengembangan terminal tipe B dan tipe C.
10. Pengembangan industri kreatif (gula semut).
11. Penguatan konektivitas pariwisata berkelanjutan.
12. Pengendalian pemanfaatan lahan dan bangunan baru.

Fokus Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kawasan Pariwisata Berkelanjutan:

Berdasarkan fokus pengembangan kawasan Pariwisata Berkelanjutan itu, maka arah pengembangan keterampilan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Pemandu Wisata Alam dan Budaya, yang meliputi kemampuan: Pengetahuan Lokal (Memahami sejarah, budaya, dan keunikan alam setempat), Komunikasi Efektif (Mampu menyampaikan informasi dengan menarik kepada wisatawan), Bahasa Asing Dasar (Menguasai bahasa Inggris dasar untuk berinteraksi dengan wisatawan mancanegara).
2. Pengelolaan Homestay dan Ekolodge, yang meliputi kemampuan: Pelayanan Tamu (Memberikan layanan yang ramah dan profesional kepada pengunjung), Kebersihan dan Keamanan (Menjaga standar kebersihan dan keamanan akomodasi), Pemasaran Digital (Menggunakan media sosial dan platform online untuk mempromosikan homestay).
3. Pertanian dan Perkebunan Berbasis Wisata, yang meliputi kemampuan: Teknik Pertanian Berkelanjutan (Menggunakan metode pertanian yang ramah lingkungan), Agrowisata Edukatif (Menyelenggarakan kegiatan wisata edukatif di lahan pertanian), Pengolahan Produk Lokal (Mengembangkan produk olahan dari hasil pertanian untuk dijual kepada wisatawan).
4. Konservasi Lingkungan, yang meliputi kemampuan: Pelestarian Alam (Menjaga kelestarian hutan, sumber air, dan keanekaragaman hayati), Pengelolaan Sampah (Menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif di kawasan wisata), Edukasi Lingkungan (Memberikan edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya konservasi).
5. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha, yang meliputi kemampuan: Perencanaan Usaha (Menyusun rencana bisnis untuk usaha pariwisata lokal), Manajemen Keuangan (Mengelola keuangan usaha dengan baik dan transparan), Inovasi Produk dan Layanan (Mengembangkan produk dan layanan yang menarik bagi wisatawan).

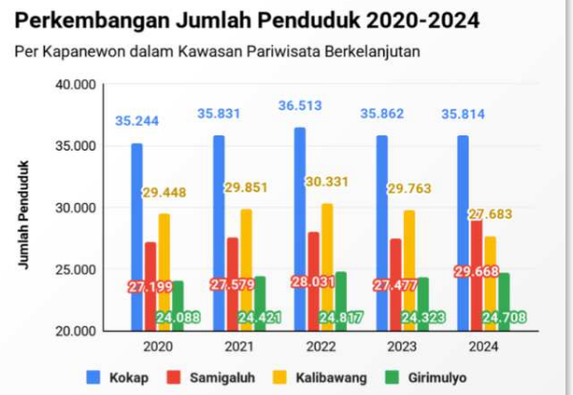
Kawasan Pariwisata Berkelanjutan

Fokus Pengembangan Kawasan:

1. Pengembangan pariwisata berkelanjutan.
2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah untk mempertahankan warisan ekologis.
3. *Hinterland aerotropolis.*
4. Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial.
5. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana serta utilitas perkotaan.
6. Pengembangan dan pengaturan fasilitas pariwisata.
7. Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kegiatan agropolitan.
8. Pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier kewenangan kabupaten.
9. Pembangunan, peningkatan, dan pengembangan terminal tipe B dan tipe C.
10. Pengembangan industri kreatif (gula semut).
11. Penguatan konektivitas pariwisata berkelanjutan.
12. Pengendalian pemanfaatan lahan dan bangunan baru.







Gambar 3.4.3-1 Fokus Pembangunan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan

Sumber: RPJPD Kab. Kulon Progo Tahun 2025-2045, diolah

3.5 Strategi Pembangunan Kewilayahan Berbasis Keistimewaan DIY

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY memiliki kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil, (2) Gubernur; (3) Kelembagaan; (4) Kebudayaan; (5) Pertanahan; (6) Tata ruang. Dalam hal kewenangan di kabupaten/kota, kabupaten/kota di DIY melaksanakan kewenangan keistimewaan dalam urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Dalam urusan kelembagaan, keistimewaan DIY yang dilimpahkan ke Kabupaten Kulon Progo diwujudkan dengan penetapan kelembagaan melalui Perda No. 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di mana terdapat perubahan nomenklatur "kecamatan" menjadi "kapanewon" dan Desa Wates menjadi Kalurahan Wates di bawah Kapanewon Wates untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Panewu, serta penetapan Perda No. 4 tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan, dimana terdapat perubahan nomenklatur "desa" menjadi "kalurahan". Selain itu, urusan kelembagaan diwujudkan untuk tata laksana kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Dana Keistimewaan DIY juga dimanfaatkan untuk mendukung terlaksananya inovasi di daerah. Di Kabupaten Kulon Progo, telah terlaksana inovasi Pelayanan Publik Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Disabilitas Sentosa. Inovasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas Sentolo I ini merupakan perluasan dari pelayanan puskesmas pada kaum difabel, tidak hanya pada layanan kesehatan namun juga pada aspek sosial dan kemandirian ekonomi. Beberapa kegiatan yang dilakukan di Pusbindu Sentosa antara lain:

1. Pemeriksaan kesehatan, pemantauan kesehatan, dan pemberian intervensi;
2. Memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal untuk pengembangan usaha ekonomi;
3. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan penyandang disabilitas melalui kegiatan di masyarakat.

Inovasi tersebut kemudian ditularkan ke puskesmas-puskesmas lainnya dengan jenis aktivitas yang berbeda sesuai dengan potensi di lingkungan masing-masing.

Di tahun 2024 dan 2025, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pendataan sosial ekonomi penduduk di 12 kapanewon dengan menggunakan aplikasi Sistem Pendataan Desa Cinta Statistik (Sipedet Cantik). Tujuan dari pendataan ini adalah untuk menyediakan informasi komprehensif tentang populasi secara menyeluruh meliputi profil data individu, aspek sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terhubung dengan data induk kependudukan yang terperinci. Harapannya, pemerintah dapat melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan, tantangan, dan kondisi masyarakat di berbagai tingkatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Yogyakarta tahun 2022-2042, dapat disimpulkan isu-isu strategis mencakup: reformasi birokrasi kelembagaan keistimewaan untuk memaksimalkan partisipasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi kreatif dan ketahanan pangan; kepastian hukum pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan kalurahan untuk mengatasi kesenjangan kemiskinan; dan penguatan filosofi keistimewaan penataan ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Isu strategis tersebut akan

ditindaklanjuti dengan misi daerah ”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis”, dan “Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi”.

Urusan kebudayaan menjadi urusan yang paling dominan dalam kewenangan keistimewaan. Di Kabupaten Kulon Progo, penggunaan dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan digunakan untuk pembinaan dan pengembangan kesejarahan, bahasa, sastra, cagar budaya, warisan budaya, desa budaya, dan kantong budaya. Selain itu, dana keistimewaan digunakan untuk pelaksanaan gelar budaya Jogja serta berbagai kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat.

Pada urusan tata ruang, anggaran dana keistimewaan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur di Kulon Progo. Pada tahun 2017, dana keistimewaan digunakan untuk membangun talud dan jalan lingkungan kawasan Agrowisata Tonogoro. Pada tahun 2018, 2020, dan 2023 dilakukan peningkatan jalan ruas Pasar Bendo-Beku. Di tahun 2019, 2021, dan 2023 dana keistimewaan digunakan untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur di Kawasan Tonogoro. Tahun 2023 - 2025 dengan menggunakan dana keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga melaksanakan peningkatan dan pengembangan layanan air bersih dengan total sebanyak 961 sambungan rumah. Pembangunan jalan di makam Girigondo juga telah dilaksanakan di tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan anggaran dana keistimewaan. Di tahun 2025 juga telah dipasang alat penerangan jalan Pintar Bernuansa Budaya serta Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari - Kebonharjo sepanjang 1,3 km. Terkait penanganan sampah, dana keistimewaan berkontribusi dalam pembuatan instalasi sampah termal pada tahun 2024.

Dalam urusan pertanahan, keistimewaan DIY di Kabupaten Kulon Progo diwujudkan pengelolaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Urusan keistimewaan pada aspek tata ruang yang dimiliki meliputi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dengan terlebih dahulu menyusun kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, sesuai dengan Keistimewaan DIY dengan tetap memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan ini, dalam Perdais No. 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dirumuskan ke dalam Satuan Ruang Strategis (SRS) kasultanan/kadipaten, yaitu satuan ruang tanah kasultanan/kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana, dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan/atau kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pula, terdapat total 18 Satuan Ruang Strategis Kasultanan/Kadipaten (14 Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan 4 Satuan Ruang Strategis Kadipaten) seperti pada tabel 3.5-1 berikut:

Tabel 3.5-1 Amanah Perdais No.2 Tahun 2017

NO.	URAIAN	NO.	URAIAN
A1.	**Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon**	**B1.**	**Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Keprabon**
1	Karaton;	1	Puro Pakualaman
2	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri;	2	Makam Girigondo

NO.	URAIAN	NO.	URAIAN
3	Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak;		
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede;		
5	Masjid Pathok Nagoro;		
6	Gunung Merapi;		
7	Pantai Samas – Parangtritis;		
A2.	**Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Bukan Keprabon**	**B2.**	**Satuan Ruang Strategis Kadipaten pada Tanah Bukan Keprabon**
1	Kerto – Pleret;	1	Pusat Kota Wates
2	Kotabaru;	2	Pantai Selatan Kulon Progo
3	Candi Prambanan - Candi Ijo;		
4	Sokoliman;		
5	Perbukitan Menoreh;		
6	Karst Gunungsewu; dan		
7	Pantai Selatan Gunungkidul.		

Sumber: PERDAIS DIY No.2 Th 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Kabupaten Kulon Progo, dalam tipologi Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan memiliki satu SRS Kesultanan yaitu Perbukitan Menoreh, dan tiga SRS Kadipaten yaitu Makam Girigondo, Pusat Kota Wates, dan Pantai Selatan Kulon Progo. Amanah bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi Kasultanan dan Kadipaten tersebut tertuang di dalam Pasal 43 ayat (1) Perdais No. 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah kepada Kasultanan dan Kadipaten tertuang di dalam Pasal 44 Perdais No. 2 tahun 2017 di mana fasilitasi Pemda dalam mewujudkan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, memberikan bantuan dalam hal sebagai berikut.

a. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
c. Penyusunan rencana induk pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
d. Pelaksanaan Penataan Ruang;
e. Penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Rencana Tata Ruang;
f. Penanganan sengketa atas pemanfaatan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten;
g. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
h. Pengendalian pemanfaatan ruang; dan
i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal tersebut mengamanatkan agar Pemda DIY memfasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan rencana induk. Mengacu pada Pergub DIY No. 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, aspek tata ruang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
b. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
c. Penyusunan rencana induk pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten yang berada dalam kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
e. Pemanfaatan ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
f. Audit tata ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten;
g. Pengenaan sanksi pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten; dan
h. Pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan satuan Ruang Strategis Kadipaten.

Secara umum, pemanfaatan tanah dan ruang merupakan isu yang sedang disoroti pemerintah provinsi agar dapat dilaksanakan sesuai peruntukan. Sesuai dengan arahan dalam Rancangan Perda RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2024-2044, arahan pemanfaatan ruang perlu memperhatikan prosedur perizinan dan pengendalian. Hal tersebut dapat didukung dengan menyusun tata ruang dengan peraturan zonasinya, mengembangkan sistem prosedur perizinan, dan melaksanakan pengawasan atas dasar peruntukan.

Selaras dengan arahan pemanfaatan ruang, efektivitas terkait perizinan dapat ditingkatkan dengan beberapa resolusi. Penegakan hukum yang diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur daerah perlu menjadi gerbang pertama dalam mengatasi permasalahan perizinan. Kesalahan terkait suatu perizinan dapat berakibat fatal bagi daya dukung dan kemampuan lahan yang berujung pada terancamnya eksistensi sumber daya lahan. Dengan demikian, perizinan yang transparan dan akuntabel perlu diperkuat sebagai pemahaman aparatur sehingga bisa diteruskan kepada masyarakat. Pada konteks ini, Danais dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyusunan regulasi daerah, peningkatan kapasitas, dan penegakan hukum.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan, Danais juga dapat direncanakan alokasinya untuk pengadaan elemen pendukung penegakan hukum pemanfaatan tanah dan tata ruang. Beberapa di antaranya meliputi infrastruktur pendukung seperti digitalisasi dan penguatan arsip untuk menghindari duplikasi serta mempermudah verifikasi. Tidak hanya itu, pengawasan dengan pemberian sanksi dapat dilakukan secara tegas dan efektif oleh jajaran terkait. Koordinasi antar lembaga dengan mengadakan forum

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang efektif.

Sebagai acuan strategis yang mengintegrasikan dimensi historis, filosofis, dan spasial dalam kerangka pembangunan keistimewaan, Lampiran 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023–2043 memuat Peta Pengembangan Wilayah Strategis Keistimewaan secara lebih terperinci. Peta ini tidak hanya mencakup delineasi kawasan dan arahan pemanfaatannya, tetapi juga menjadi dasar operasional bagi penyusunan rencana rinci tata ruang, penataan kawasan, pengendalian, serta pemantauan pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah. Dengan menjadikan dokumen tersebut sebagai rujukan utama, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat memastikan bahwa strategi pembangunan kewilayahan berjalan selaras dengan kebijakan keistimewaan, menjaga nilai-nilai budaya dan tata ruang khas DIY, sekaligus menjawab kebutuhan aktual pembangunan daerah secara terencana dan berkelanjutan.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo agar kegiatan yang dilaksanakan dengan dana keistimewaan dapat berdampak bagi masyarakat adalah:

1. Melakukan proses perencanaan usulan program kegiatan dana keistimewaan DIY melalui suatu sistem yang terintegrasi dari awal sampai akhir dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.
2. Melakukan optimalisasi pemanfaatan output kegiatan dana keistimewaan dengan kolaborasi antar program dan antar perangkat daerah.
3. Memprioritaskan program kegiatan yang diusulkan menggunakan dana keistimewaan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan.

3.6 Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD ini merujuk dan sejalan dengan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 yang disusun berdasarkan amanat Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. RPKD berperan sebagai dokumen strategis yang memetakan kondisi kemiskinan daerah, baik dari sisi konsumsi maupun non-konsumsi, serta mengidentifikasi determinan dan tantangan utama penanggulangan kemiskinan di Kulon Progo. RPKD juga menjadi pedoman multipihak dalam mewujudkan konvergensi program, anggaran, dan sasaran lintas sektor dan wilayah. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD ini telah diintegrasikan dengan arah kebijakan dan program dalam RPKD sebagai upaya memperkuat efektivitas dan efisiensi pencapaian target penurunan kemiskinan menuju 12,40–13,40% pada akhir tahun 2029.

Tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2015 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang melambat, dengan rata-rata penurunan hanya sebesar 0,57% per tahun. Pada tahun 2021 dan 2022, bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kontraksi ekonomi serta menurunkan daya tahan kelompok rentan. Percepatan penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih sistemik, kolaboratif, berbasis data, serta mempertimbangkan konteks spasial dan sektoral sebagaimana telah disusun dalam RPKD.

Program unggulan kabupaten dalam rangka penanganan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. ***Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat, melalui:***
    a. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
    b. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler.
    c. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
    d. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.
2. ***Peningkatan Pendapatan Masyarakat, melalui:***
    a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
    b. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
    c. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
    d. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.
3. ***Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan, melalui:***
    a. Pemenuhan pelayanan dasar, yaitu peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
    b. Peningkatan konektivitas antar wilayah, yaitu melalui pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Selain itu, intervensi spesifik untuk kelompok petani dilaksanakan melalui beberapa program seperti *Integrated Farming* (budidaya pisang dan ternak), Pemanfaatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tanaman, Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tanaman, serta Cetak Sawah.

Berdasarkan hasil analisis spasial RPKD, wilayah selatan Kulon Progo (Kapanewon Temon, Panjatan, dan Galur) menjadi lokasi prioritas untuk intervensi penanggulangan kemiskinan. Pembagian prioritas per bidang adalah sebagai berikut:

1. ***Bidang Kemiskinan Konsumsi:***
    - Lokasi prioritas bidang konsumsi Kapanewon Galur dan Panjatan masuk prioritas pertama yang dapat diartikan bahwa pada lokasi tersebut merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin desil 1 dan 2 yang banyak serta di bagian ini juga terdapat jumlah KK perempuan tidak bekerja yang tinggi.
2. ***Bidang Pendidikan:***
    - Analisis lokasi prioritas bidang pendidikan ditentukan berdasarkan sebaran persentase penduduk miskin pada desil 1 dan desil 2 yang tinggi dan sebaran

penduduk usia 12-17 tahun tidak sekolah yang tinggi di tiap-tiap Kapanewon. Lokasi prioritas penanganan kemiskinan bidang pendidikan, kapanewon panjatan bersama dengan kapanewon Lendah, Sentolo, Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh masuk prioritas pertama, Galur prioritas ketiga dan Temon prioritas keempat.

3. ***Bidang Kesehatan:***

   - Penentuan Lokasi prioritas program bidang kesehatan di Kulon Progo berdasarkan analisis kuadran menggunakan indikator prevalensi stunting (indikator utama) dengan indikator gizi buruk (indikator pendukung). Wilayah prioritas yang dipilih untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan urutan prevalensi stunting dan gizi buruk tertinggi per kapanewon. Untuk Kapanewon Temon masuk pada prioritas pertama penanganan kemiskinan bidang kesehatan.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kulon Progo juga dijalankan melalui konvergensi lintas sektor berdasarkan tiga pilar utama berikut:

1. ***Pilar pertama–Komitmen Pemerintah:***

   a. Program dan kegiatan dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025-2029.

   b. Penetapan regulasi dan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan.

2. ***Pilar kedua–Konvergensi Program, Anggaran, dan Sasaran:***

   a. Dukungan terhadap program nasional terkait cakupan penerima, ketercukupan manfaat, dan manajemen pelaksanaan:

      i. Inovasi program komplementer/inisiatif daerah.

      ii. Penguatan kapasitas kelembagaan koordinasi antar sektor terkait.

      iii. Penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah (NGO, Ormas, Perguruan Tinggi, Swadaya Masyarakat).

3. ***Pilar ketiga–Pemantauan dan Evaluasi:***

   a. Penetapan indikator capaian penanggulan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

   b. Penyusunan mekanisme pemantauan yang dilakukan berkala.

   c. Evaluasi berkala capaian penanggulan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem juga memperhatikan dan mempedomani 11 (sebelas) arah kebijakan penurunan kemiskinan dalam RPJPN pada periode RPJMN Tahun 2025–2029, yakni:

1. Satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi;
2. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
3. Pengembangan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim;

4. Integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap kelompok rentan;
6. Peningkatan usia pensiun bertahap dengan memastikan kesiapan sosial dan ekonomi selama pensiun;
7. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
8. Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam angkatan kerja;
9. Inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlinsos yang berkesinambungan utamanya *social impact bonds, social impact investment,* dan optimalisasi dana jamsos;
10. Penyelarasan peraturan perlindungan sosial; dan
11. Penyempurnaan metodologi penghitungan angka kemiskinan.

Di samping itu, strategi daerah juga selaras dengan arah strategis nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, yang menekankan empat pilar strategi utama penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Stabilitas ekonomi makro: pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjaga inflasi;
2. Pengurangan beban pengeluaran: bantuan sosial dan jaminan sosial;
3. Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja; dan
4. Layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah: membangun SDM dan perluasan akses ekonomi.

Keempat strategi ini telah diinternalisasi dalam kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kulon Progo. Pendekatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kesempatan kerja terakomodasi melalui pengembangan usaha ultra mikro dan mikro, pelatihan vokasi, serta intervensi sektor pertanian. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan telah dilakukan melalui berbagai skema bantuan sosial, subsidi jaminan kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Sementara itu, strategi peningkatan pendapatan masyarakat didukung oleh perluasan akses terhadap aset produktif, penguatan kewirausahaan, serta kemitraan lintas sektor. Dalam hal infrastruktur dasar, upaya percepatan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, dan konektivitas wilayah kantong kemiskinan menjadi bagian penting dari agenda penanggulangan kemiskinan daerah.

Keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, disertai penguatan konvergensi multipihak, diharapkan menjadikan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Strategi dan program yang dijabarkan dalam subbab ini secara substansial telah mengakomodasi arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), baik melalui pendekatan spasial, sektoral, maupun penguatan pilar konvergensi multipihak. Dengan adanya sinergi antara program dalam RPJMD dan RPKD yang berpedoman pada arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPN dan RPJMN, upaya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

BAB IV
Program Perangkat Daerah & Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator & Target Tujuan & Sasaran Daerah Tahun 2025 - 2029 (1)

Misi 1
Mewujudkan masyarakat Kulon Progo makmur, berbudaya dan religius

Tujuan:
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas



Indeks Pembangunan Manusia
2025: 76,00-76,23
2029: 77,60-78,09

Sasaran:
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat



Usia Harapan Hidup
2025: 75,5 th - 79,75 th
2029: 75,80 th - 80,05 th

Sasaran:
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat



Harapan Lama Sekolah
2025: 14,63 th - 15,72 th
2029: 14,93 th - 16,01 th

Tujuan:
Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo



Tingkat Kemiskinan
2025: 14,12%-15,12%
2029: 12,40%-13,40%

Sasaran:
Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat



Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan
2025: 10.732,40-11.732,40 ribu rupiah
2029: 11.753,20-12.753,20 ribu rupiah

Tujuan:
Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya & Religius

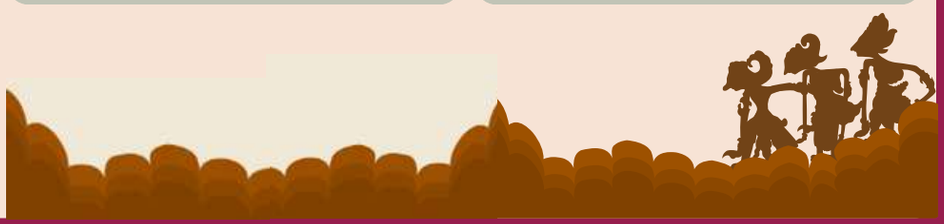


Indeks Pembangunan Kebudayaan
2025: 64,00-66,00
2029: 68,00-70,00

Sasaran:
Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat



Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, & Ekspresi Budaya IPK
2025: 60,00-61,00
2029: 62,00-63,00



Misi 2
Meningkatkan kemandirian & daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi

Tujuan:
Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah



Pertumbuhan Ekonomi
2025: 4,78%-5,38%
2029: 4,86%-5,46%

Sasaran:
Meningkatnya Kemandirian Daerah



Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
2025: 41,02-42,22 %
2029: 41,06-42,26 %



PDRB per Kapita (ADHB)
2025: 40.043-40.272 ribu rupiah
2029: 52.516-54.036 ribu rupiah



Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum
2025: 684,46-1.228,98 miliar rupiah
2029: 1.063,43-1.831,90 miliar rupiah

Tujuan:
Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah



Gini Ratio
2025: 0,372-0,402
2029: 0,368-0,398

Sasaran:
Menurunnya Pengangguran



Tingkat Pengangguran Terbuka
2025: 2,08%-2,60%
2029: 1,90%-2,35%





Indikator & Target Tujuan & Sasaran Daerah Tahun 2025 - 2029 (2)

Misi 3
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis

Tujuan:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



Indeks Reformasi Birokrasi
- 2025: 14,12%-15,12%
- 2029: 12,40%-13,40%

Sasaran:
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik yang Responsif & Akuntabel



Indeks SPBE/Pemdi
- 2025: 4,11 - 4,61
- 2029: 1,51 - 1,60



Indeks Kepuasan Masyarakat
- 2025: A (84,2)
- 2029: A (88,1)



Opini BPK
- 2025: WTP
- 2029: WTP



Nilai AKIP
- 2025: A (84,2)
- 2029: A (88,1)



Indeks Maturitas SPIP
- 2025: 3,22
- 2029: 3,26

Tujuan:
Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis



Crime Rate
- 2025: 62,00
- 2029: 58,00

Sasaran:
Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman & Ketertiban Masyarakat



Indeks Harmoni Indonesia
- 2025: 7,38
- 2029: 7,54



% Penanganan Gangguan Trantibum & Pelanggaran Perda
- 2025: 100%
- 2029: 100%

Misi 4
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana

Tujuan:
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur



% Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
- 2025: 88,70
- 2029: 88,90

Sasaran:
Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang



% Kesesuaian Pola Ruang
- 2025: 89,90
- 2029: 90,10

Sasaran:
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah



Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
- 2025: 49,28
- 2029: 52,79



Level of Service
- 2025: A / Arus Bebas
- 2029: A / Arus Bebas

Tujuan:
Meningkatnya Lingkungan yang Lestari & Tangguh Bencana



Indeks Risiko Bencana
- 2025: 136,71-141,71
- 2029: 130,17-135,17

Sasaran:
Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup

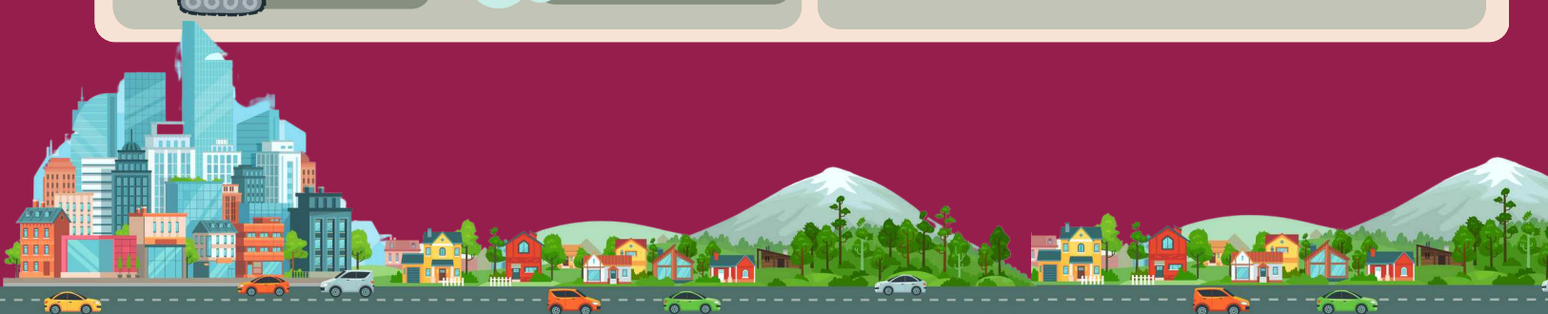


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 2025: 69,74
- 2029: 70,12

Sasaran:
Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana



Indeks Ketahanan Daerah
- 2025: 0,65
- 2029: 0,69



BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, sekaligus menjaga kesinambungan arah pembangunan menuju visi jangka panjang daerah, setiap perangkat daerah telah merumuskan program prioritas yang dilengkapi dengan target capaian *(outcome)* dan kebutuhan pendanaan indikatif (pagu indikatif) untuk periode 2025 hingga 2030. Penyusunan program ini dilakukan secara terukur dan berbasis pada capaian kinerja tahun 2024 *(baseline),* dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya, serta arah kebijakan nasional dan provinsi.

Program-program perangkat daerah yang dimuat dalam dokumen ini tidak hanya merupakan instrumen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo, melainkan juga menjadi wujud keterpaduan dan komitmen daerah dalam mendukung Visi Nasional 2025–2029. Hal ini tercermin melalui integrasi Kegiatan Prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029 yang menjadi kewenangan daerah, dan telah diselaraskan dalam struktur program perangkat daerah.

Setiap program yang dirancang oleh perangkat daerah berperan strategis dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta akselerasi pencapaian *outcome* pembangunan daerah. Selain itu, program-program tersebut juga menjadi pijakan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas dan kebutuhan pendanaannya pada masing-masing tahun anggaran.

Dengan demikian, program perangkat daerah yang telah dirumuskan berfungsi sebagai kerangka operasional pembangunan daerah yang komprehensif, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 sebagai tahap akhir RPJMD ini.

Rincian program perangkat daerah, yang mencakup kode program, bidang urusan, kegiatan prioritas, indikator *outcome,* satuan, baseline 2024, target tahunan, dan pagu indikatif tahun 2025–2030, dan perangkat daerah penanggung jawab disajikan pada Tabel 4.1-1 Program Perangkat Daerah yang Disertai Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025–2030.

Tabel 4.1-1 Program Perangkat Daerah yang disertai Target dan Pagu Indikatif Tahun 2025–2030

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga						**512.501.477.705**		**292.480.286.412**		**495.764.139.240**		**507.186.204.629**		**519.108.165.816**		**531.559.458.799**		
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																		
1	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	97,50	100,00	397.874.120.789	100,00	246.583.149.800	100,00	366.385.934.308	100,00	370.049.793.651	100,00	373.750.291.587	100,00	377.487.794.502		DISDIKPORA
1	01	02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	*Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah*	Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan Kondisi Layak	%	73,35	73,45	102.594.588.410	73,56	33.325.007.600	73,66	110.792.987.868	73,76	117.440.567.140	73,87	124.487.001.168	73,97	131.956.221.238	04.01.01 KP: Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	DISDIKPORA
																				04.01.02 KP: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang Berkualitas (PHTC)	
																				04.01.04 KP: Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	
																				04.02.07 KP: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	
					Persentase Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISDIKPORA
					Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	%	84,23	84,33		84,43		84,53		84,63		84,73		84,83			DISDIKPORA
					Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	%	56,43	56,96		57,25		57,53		57,81		58,08		58,64			DISDIKPORA
1	01	03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	*Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan*	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi dengan Satuan Pendidikan	Kurikulum			0	2,00	65.000.000	2,00	76.700.000	3,00	81.302.000	3,00	86.180.120	4,00	91.350.927		DISDIKPORA; IKP 2026–2030
1	01	04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	*Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan*	Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik	%			0	41,88	79.000.000	43,36	85.766.290	44,70	88.371.829	46,17	92.053.406	47,65	94.994.900	04.04.02 KP: Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, In- Service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	DISDIKPORA; IKP 2026–2030
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																		
2	19	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	*Meningkatnya daya saing kepemudaan*	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Wirausaha	%	35,00	35,66	919.322.100	36,33	994.435.100	37,01	1.173.433.418	37,71	1.243.839.423	38,41	1.318.469.788	39,14	1.397.577.975		DISDIKPORA

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	19	03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	*Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga*	Persentase Atlet yang Mengikuti Pembinaan Intensif.	%	55,24	55,58	11.013.446.406	55,78	11.047.074.912	56,00	17.167.282.406	56,18	18.197.319.350	56,53	19.289.158.511	56,72	20.446.508.021	04.09.03 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	DISDIKPORA
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya implementasi pendidikan berbasis budaya*	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya	%	N/A	26,87	100.000.000	32,84	386.619.000	38,81	82.034.950	44,78	85.011.236	50,75	85.011.236	56,72	85.011.236	08.02.01 KP: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	DISDIKPORA
			Dinas Kesehatan						**447.953.522.528**		**384.762.176.143**		**413.856.228.299**		**416.570.013.272**		**422.407.170.561**		**427.838.024.531**		
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																		
1	02	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	93,90	100,00	134.785.583.848	100,00	133.436.314.844	100,00	134.770.677.992	100,00	136.118.384.771	100,00	137.479.568.618	100,00	138.854.364.304		DISKES
1	02	02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	*Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat*	Persentase FASYANKES yang Memiliki Sarana Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	81,25	83,33	49.451.443.872	91,84	26.917.845.399	100,00	49.078.351.427	100,00	50.573.885.521	100,00	52.687.046.637	100,00	54.375.413.130	04.13.01 KP: Penuntasan TBC	DISKES
																				04.13.02 KP: Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	
																				04.15.02 KP: Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	
					Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan:	-														04.15.01 KP: Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	DISKES
					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	91,29	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		04.11.01 KP: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	DISKES
																				04.11.02 KP: Pencegahan dan Penurunan Stunting	
																				04.11.04 KP: Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	
					Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	99,85	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	98,71	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Pelayanan Kesehatan Balita	%	94,96	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	96,42	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	98,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	90,60	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	94,73	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
					Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	98,07	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	93,54	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	93,30	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	94,39	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	86,88	90,23		91,29		92,24		93,11		94,12		95,02			DISKES
					Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	40,62	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISKES
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,11	99,14		99,18		99,21		99,24		99,28		99,31			DISKES
1	02	03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	*Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan*	Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial	%	97,53	97,59	903.996.309	97,64	86.609.600	97,68	1.001.795.430	97,73	1.032.229.502	97,77	1.075.232.265	97,81	1.109.590.470	04.15.03 KP: Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	DISKES
1	02	04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	*Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman*	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pendampingan	%	0,00	22,22	596.993.350	25,56	25.912.800	27,78	656.935.909	30,00	676.893.312	33,33	705.092.741	36,67	727.623.427		DISKES
					Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	%	2,80	6,16		9,52		13,17		16,81		20,73		24,65			DISKES
1	02	05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	*Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan*	Persentase Kel/Kalurahan yang Menerapkan GERMAS	%	13,64	30,68	341.434.850	47,73	56.842.500	64,77	411.040.373	81,82	423.527.585	100,00	441.171.777	100,00	455.269.076		DISKES
1	02	07	**PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN**	*Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan*	Persentase FASYANKES yang Sudah Terakreditasi	%				47,83		51,09	150.000.000	54,35	150.000.000	57,61	150.000.000	59,78	150.000.000		DISKES; IKP 2026–2030
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya inovasi layanan publik*	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	4,76	23,81	1.069.951.100	28,57	1.322.668.000	33,33	191.548.796	38,10	198.498.323	42,86	198.498.323	47,62	198.498.323		DISKES
			Rumah Sakit Umum Daerah Wates																		
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																		

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	02	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD Wates*	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES	Angka			0	86,00	181.250.000.000	86,50	183.062.500.000	86,50	184.893.125.000	87,00	186.742.056.250	87,00	188.609.476.812		DISKES (RSUD WATES); IKP 2026–2030
1	02	02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	*Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD Wates*	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES	Angka	85,00	85,50	215.048.849.199												DISKES (RSUD WATES); IKP 2025
			Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang																		
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																		
1	02	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD Nyi Ageng Serang*	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS	Angka			0	85,75	41.665.983.000	86,25	42.082.642.830	86,50	42.503.469.258	86,75	42.928.503.950	86,75	43.357.788.989		DISKES (RSUD NAS); IKP 2026–2030
1	02	02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	*Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD Nyi Ageng Serang*	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS	Angka	84,75	85,25	45.755.270.000												DISKES (RSUD NAS); IKP 2025
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya pelayanan trauma centre RSUD Nyi Ageng Serang*	Persentase pemenuhan sarana prasarana trauma centre	%						25,00	2.450.735.542	50,00		75,00		100,00			DISKES (RSUD NAS); IKP 2027–2030
			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman						**87.361.205.169**		**113.086.210.463**		**112.695.298.415**		**117.555.163.792**		**122.178.030.652**		**126.699.229.715**		
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																		
1	03	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	97,50	100,00	6.698.832.945	100,00	7.235.572.393	100,00	7.284.228.466	100,00	7.357.070.750	100,00	7.430.641.457	100,00	7.504.947.871		DPUPKP
1	03	02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	*Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi*	Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	64,65	64,94	7.646.677.100	65,22	6.421.423.650	65,51	7.577.279.907	65,80	8.031.916.701	66,08	8.513.831.703	66,37	9.024.661.605	02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	DPUPKP
1	03	03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	*Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum*	Capaian Akses Air Minum Layak	%	97,75	98,12	6.924.083.670	98,46	450.000.000	98,87	488.542.158	99,25	503.383.838	99,62	524.354.848	100,00	541.110.196	02.12.05 KP: Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir	DPUPKP

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	03	05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	*Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah*	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,15	8,34	1.134.426.200	8,53	1.505.800.000	8,72	1.634.770.627	8,91	1.684.434.187	9,10	1.754.607.849	9,29	1.810.674.970	02.12.06 KP: Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	DPUPKP
1	03	08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	*Meningkatnya kualitas bangunan gedung*	Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Baik	%	58,73	58,77	1.541.095.200	58,80	4.439.252.000	58,83	10.247.716.771	58,87	10.559.037.572	58,90	10.998.927.919	58,93	11.350.390.056		DPUPKP
1	03	10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	*Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman*	Rasio Penanganan Jalan	%	7,77	7,93	31.088.782.100	8,11	43.961.836.193	8,24	41.341.882.684	8,37	43.822.395.645	8,53	46.451.739.383	8,69	49.238.843.745	03.05.01 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur - Yogyakarta - Prambanan	DPUPKP
1	03	11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	*Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi*	Capaian Layanan Jasa Konstruksi	%	100,00	100,00	523.724.654	100,00	575.986.504	100,00	625.319.311	100,00	644.316.216	100,00	671.158.480	100,00	692.604.824		DPUPKP
					Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Kompetensi Kerja SKK	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DPUPKP
1	03	13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)**	*Meningkatnya aksesibilitas kawasan SRS*	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	%	50,00	50,00	9.762.649.800	100,00	28.649.693.700	100,00	22.991.285.568	100,00	23.825.425.823	100,00	23.825.425.823	100,00	23.825.425.823		DPUPKP
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																		
1	04	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	*Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah*	Persentase Keterisian Hunian	%	45,86	46,99	1.228.865.100	47,74	1.236.999.800	47,74	1.342.947.894	47,74	1.383.746.017	48,12	1.441.392.986	48,12	1.487.451.571	06.06.01 KP: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	DPUPKP
1	04	03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	*Meningkatnya kualitas kawasan permukiman*	Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%	10,32	4,10	3.725.238.000		4.121.907.100		4.474.945.315		4.610.892.042		4.802.982.172		4.956.457.710		DPUPKP; IKP 2025
					Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%				19,76		24,89		30,40		36,68		43,59			DPUPKP; IKP 2026–2030
1	04	05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	*Meningkatnya penyediaan PSU permukiman*	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	%	54,98	2,24	17.086.830.400	5,39	14.487.739.123	8,29	14.686.379.714	10,92	15.132.545.001	13,03	15.762.968.032	15,66	16.266.661.344	06.06.01 KP: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	DPUPKP
					Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun	%	29,55	29,62		29,69		29,76		29,83		29,90		29,97			DPUPKP
			Satuan Polisi Pamong Praja						**6.114.891.222**		**7.129.408.889**		**7.191.726.150**		**7.307.812.793**		**7.449.936.241**		**7.574.217.724**		
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																		

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	05	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	3.920.364.922	100,00	4.983.702.089	100,00	5.033.539.109	100,00	5.083.874.500	100,00	5.134.713.245	100,00	5.186.060.377		SATPOL PP
1	05	02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	*Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	2.194.526.300	100,00	1.958.804.800	100,00	2.126.574.944	100,00	2.191.179.287	100,00	2.282.463.990	100,00	2.355.398.341		SATPOL PP
					Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			SATPOL PP
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya keaktifan jaga warga*	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	%				22,73	186.902.000	51,14	31.612.097	79,55	32.759.006	100,00	32.759.006	100,00	32.759.006		SATPOL PP; IKP 2026–2030
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**3.996.044.065**		**3.979.513.000**		**5.742.615.823**		**5.909.924.698**		**6.035.403.190**		**6.158.101.496**		
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																		
1	05	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	2.353.027.365	100,00	2.305.758.929	100,00	2.328.816.518	100,00	2.352.104.683	100,00	2.375.625.729	100,00	2.399.381.986		BPBD
1	05	03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	*Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	Persentase Warga yang Tersosialisasi KIE Rawan Bencana	%	100,00	100,00	871.261.800	100,00	892.346.700	100,00	1.052.969.106	100,00	1.116.147.252	100,00	1.183.116.087	100,00	1.254.103.052		BPBD
					Persentase Pelayanan terhadap Warga di Daerah Rawan Bencana	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			BPBD
1	05	04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	*Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*	Persentase Pembinaan Relawan Kebakaran	%	100,00	100,00	771.754.900	100,00	781.407.371	100,00	815.097.167	100,00	839.859.434	100,00	874.848.045	100,00	902.803.129		BPBD
					Persentase Pelayanan terhadap Warga Terdampak Kebakaran	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			BPBD
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya penanggulangan bencana dan kebakaran yang difasilitasi Dais*	Persentase Layanan Dasar Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang Terfasilitasi Dana Keistimewaan	%				33,33		50,00	1.545.733.032	66,67	1.601.813.329	100,00	1.601.813.329	100,00	1.601.813.329		BPBD; IKP 2026–2030
			Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						**19.865.716.953**		**12.619.919.953**		**14.272.990.465**		**14.635.731.409**		**15.129.940.031**		**15.533.882.376**		

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																		
1	06	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	3.855.768.303	100,00	3.696.327.953	100,00	3.610.126.378	100,00	3.646.227.641	100,00	3.682.689.917	100,00	3.719.516.816		DISSOS P3A
1	06	02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	*Meningkatnya pemberdayaan sosial*	Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	19,67	42,62	70.794.900	59,02	70.792.900	73,77	83.535.622	86,89	88.547.759	100,00	93.860.624	100,00	99.492.261		DISSOS P3A
1	06	04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	*Meningkatnya rehabilitasi sosial*	Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00	1.301.753.300	100,00	579.090.400	100,00	603.214.293	100,00	621.539.658	100,00	647.433.049	100,00	668.121.265		DISSOS P3A
					Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				DISSOS P3A
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				DISSOS P3A
					Persentase Gelandangan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				DISSOS P3A
1	06	05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	*Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial*	Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial	%	32,82	29,94	13.610.493.100	29,13	7.326.674.200	28,64	8.692.966.309	28,16	8.957.054.524	27,38	9.330.206.129	27,38	9.628.345.567		DISSOS P3A
1	06	06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	*Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana*	Persentase Penanganan Korban Bencana	%	100,00	100,00	150.848.200	100,00	210.408.600	100,00	228.429.936	100,00	235.369.529	100,00	245.175.042	100,00	253.009.418		DISSOS P3A
1	06	07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	*Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan*	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	%	100,00	100,00	42.248.000	100,00	76.164.600	100,00	82.688.040	100,00	85.200.063	100,00	88.749.504	100,00	91.585.424		DISSOS P3A
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																		
2	08	02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	*Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan*	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	70,60	71,69	98.878.500	71,70	99.921.300	71,71	108.479.483	71,72	111.775.038	71,73	116.431.594	71,74	120.152.074		DISSOS P3A
2	08	03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	*Menurunnya kekerasan terhadap perempuan*	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Per 100.000 Penduduk Perempuan	19,24	12,69	628.631.350	10,24	237.324.500	8,41	692.627.388	6,98	713.669.081	5,83	743.400.591	4,90	767.155.375		DISSOS P3A
2	08	06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	*Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif*	Persentase Kalurahan Layak Anak	%	6,90	9,20	106.301.300	11,49	106.476.300	13,79	115.595.914	16,09	119.107.663	18,39	124.069.697	20,69	128.034.247		DISSOS P3A

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	08	07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	*Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak*	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	%			0	0,02	14.665.200	0,02	15.921.263	0,01	16.404.943	0,01	17.088.374	0,01	17.634.419		DISSOS P3A; IKP 2026–2030
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan*	Cakupan Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitasi pemberdayaan	%			0	0,04	202.074.000	0,04	39.405.839	0,05	40.835.510	0,05	40.835.510	0,05	40.835.510		DISSOS P3A; IKP 2026–2030
			Dinas Tenaga Kerja						**9.227.022.615**		**13.141.363.671**		**13.460.611.353**		**14.016.317.237**		**14.621.845.391**		**15.236.897.209**		
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																		
2	07	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	4.437.118.915	100,00	3.613.607.671	100,00	3.649.743.747	100,00	3.686.241.184	100,00	3.723.103.595	100,00	3.760.334.630		DISNAKER
2	07	02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	*Terkelolanya informasi tenaga kerja*	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	%	100,00	100,00	159.625.200	100,00	116.811.500	100,00	126.816.316	100,00	130.668.935	100,00	136.112.613	100,00	140.461.985		DISNAKER
2	07	03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	*Meningkatnya produktivitas tenaga kerja*	Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Sertifikasi	%	92,86	93,75	1.068.101.000	93,75	1.238.651.600	95,83	1.330.921.289	95,83	1.371.354.049	95,83	1.428.484.768	95,83	1.474.130.881		DISNAKER
2	07	04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	*Meningkatnya penempatan tenaga kerja*	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	79,83	79,92	3.257.068.600	80,02	6.402.943.600	80,11	7.437.473.448	80,21	7.883.721.854	80,21	8.356.745.165	80,21	8.858.149.874		DISNAKER
2	07	05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	*Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi*	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak	%	35,12	38,69	93.013.000	44,12	635.672.600	52,94	690.117.475	55,88	711.082.918	58,82	740.706.689	61,76	764.375.391		DISNAKER
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*meningkatnya kompetensi angkatan kerja*	Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	%			0	93,75	1.059.769.000	93,75	145.301.240	93,75	150.572.872	93,75	150.572.872	93,75	150.572.872		DISNAKER; IKP 2026–2030
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																		
3	32	03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	*Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi*	Persentase Kerjasama antar Daerah Tujuan Transmigrasi	%	100,00	100,00	212.095.900		73.907.700		80.237.838		82.675.425		86.119.689		88.871.576		DISNAKER; IKP 2025
					Persentase Transmigran yang Bertahan Selama 5 Tahun Terakhir	%				69,23		71,43		73,33		75,00		76,47			DISNAKER; IKP 2025–2030
			Dinas Pertanian dan Pangan						**28.549.196.146**		**28.219.795.400**		**28.595.400.838**		**29.426.710.957**		**30.294.402.593**		**31.150.319.270**		

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																		
1	03	13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)**	*Meninngkatnya Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten*	Jumlah Luas Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten	Ha	80,00	80,00	1.943.704.000	85,00	2.538.815.000	90,00	696.402.497	95,00	721.668.476	100,00	721.668.476	105,00	721.668.476		DISPERTAPANG
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																		
2	09	03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	*Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat*	Tingkat Ketersediaan Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 Kkal/Kap/Hari	Kkal/Kapita /Hari	2.949,00	2.951,00	1.283.685.200	2.953,00	328.000.000	2.955,00	1.441.742.192	2.957,00	1.485.541.639	2.959,00	1.547.429.422	2.961,00	1.596.876.318	02.10.07 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	DISPERTAPANG
					Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 Kkal/Kap/Hari	Kkal/Kapita /Hari	1.831,00	1.855,50		1.879,90		1.904,40		1.928,80		1.953,30		1.977,70			DISPERTAPANG
2	09	04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	*Meningkatnya penanganan kerawanan pangan*	Persentase Desa Kategori Tahan dan Sangat Tahan Pangan	%	20,45	22,73	21.445.300	25,00	20.000.000	27,27	21.712.984	29,55	22.372.614	31,82	23.304.658	34,09	24.049.340		DISPERTAPANG
2	09	05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	*Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan*	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan	%	90,83	91,67	19.538.400	92,50	33.400.000	93,33	36.260.684	94,17	37.362.266	95,00	38.918.780	95,83	40.162.399		DISPERTAPANG
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya kapasitas kelompok tani lahan surjan dan lumbung kemataraman*	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas kelompok tani lahan surjan dan kelompok wanita tani lumbung mataraman yang terfasilitasi	%	24,66	25,68	1.823.937.495	29,11	5.832.106.000	32,53	886.911.630	35,96	919.089.417	39,38	919.089.417	42,81	919.089.417		DISPERTAPANG
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																		
3	27	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	13.372.079.171	100,00	13.765.486.719	100,00	13.934.062.736	100,00	14.073.403.363	100,00	14.214.137.396	100,00	14.356.278.769		DISPERTAPANG
3	27	02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	*Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian*	Produktivitas Padi	kuintal/ha	69,22	69,91	2.913.222.880	70,61	2.129.723.600	71,31	2.513.073.848	72,03	2.663.858.278	72,75	2.823.689.774	73,48	2.993.111.160	02.10.11 KP: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	DISPERTAPANG
					Produktivitas Jagung	kuintal/ha	67,34	68,01		68,69		69,38		70,07		70,77		71,48		02.10.10 KP: Pengembangan Pangan Hewani	DISPERTAPANG
					Produktivitas Cabai	kuintal/ha	57,70	58,30		58,80		59,40		60,00		60,60		61,20			DISPERTAPANG
					Produktivitas Bawang Merah	kuintal/ha	126,00	127,20		128,50		129,80		131,10		132,40		133,70			DISPERTAPANG
					Populasi Ternak	Animal Unit	171.171,00	172.028,00		172.888,00		173.752,00		174.620,00		175.493,00		176.374,00			DISPERTAPANG
					Persentase Sarana Pertanian yang digunakan dan Kondisinya Baik	%	74,98	75,17		75,35		75,53		75,71		75,88		76,06			DISPERTAPANG

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3	27	03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	*Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian*	Persentase Lahan yang Terfasilitasi Jalan Pertanian	%	28,02	28,09	1.301.416.500	28,16	2.022.708.800	28,23	2.386.796.384	28,30	2.530.004.167	28,37	2.681.804.417	28,44	2.842.712.682		DISPERTAPANG
					Persentase Lahan yang Terfasilitasi Irigasi	%	8,58	8,69		8,79		8,90		9,00		9,10		9,21			DISPERTAPANG
3	27	04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	*Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner*	Persentase Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan	%	90,02	90,16	3.118.877.300	90,36	855.268.281	90,55	3.461.123.910	90,73	3.566.271.221	90,91	3.714.842.364	91,08	3.833.547.245		DISPERTAPANG
					Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Hewan	%	98,57	98,61		98,65		98,69		98,73		98,77		98,80			DISPERTAPANG
3	27	05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	*Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*	Persentase Bencana Pertanian yang ditangani	%	95,32	95,46	85.919.400	95,65	99.923.800	95,85	108.482.197	96,00	111.777.834	96,14	116.434.507	96,38	120.155.080		DISPERTAPANG
3	27	07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	*Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian*	Persentase Penerapan Teknologi yang dianjurkan	%	75,59	75,68	2.665.370.500	75,77	594.363.200	75,86	3.108.831.776	75,95	3.295.361.682	76,04	3.493.083.382	76,13	3.702.668.384		DISPERTAPANG
			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)						**9.972.286.019**		**10.868.063.018**		**8.265.396.082**		**8.512.890.282**		**8.758.636.685**		**8.997.612.137**		
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																		
1	03	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	96,77	100,00	3.246.967.989	100,00	3.472.371.568	100,00	3.508.507.493	100,00	3.543.592.567	100,00	3.579.028.492	100,00	3.614.818.776		DISPERTARU
1	03	12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang*	Persentase Perencanaan Penataan Ruang	%	28,57	57,14	1.346.181.550	71,43	1.319.839.550	85,71	1.529.721.969	100,00	1.621.505.287	100,00	1.718.795.604	100,00	1.821.923.340		DISPERTARU
					Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			DISPERTARU
1	03	13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)**	*Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan kesesuaian pemanfaatan ruang*	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	8,33	12,50	300.121.000	30,00	653.602.000	53,75	126.369.684	65,00	130.954.466	88,75	130.954.466	100,00	130.954.466		DISPERTARU
					Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%						50,00		52,50		55,00		57,50			DISPERTARU; IKP 2027–2030
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																		
2	10	04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	*Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan*	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	100,00	100,00	30.068.700	100,00	30.068.700	100,00	32.644.061	100,00	33.635.772	100,00	35.037.040	100,00	36.156.621		DISPERTARU

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	10	05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	*Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan*	Persentase Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan	%	100,00	100,00	2.431.231.180	100,00	1.593.040.300	100,00	1.729.482.992	100,00	1.782.023.869	100,00	1.856.263.125	100,00	1.915.578.561		DISPERTARU
2	10	6	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	*Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)*	Persentase Ketersediaan Dokumen Inventarisasi Tanah PEMDA	%	100,00	100,00	54.118.100				0		0		0		0		DISPERTARU; IKP 2025
2	10	10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	*Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah*	Persentase Tertib Administrasi Tanah PEMDA	%	74,23	73,50	450.591.700	74,10	498.076.400	74,69	587.730.152	75,28	622.993.961	75,88	660.373.598	76,47	699.996.013		DISPERTARU
2	10	11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN *)**	*Meningkatnya kinerja pengelolaan tanah dan pemanfaatan tanah*	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	%	56,09	63,98	2.113.005.800	72,27	3.301.064.500	76,33	750.939.731	76,94	778.184.360	77,55	778.184.360	78,17	778.184.360		DISPERTARU
					Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	%	5,47	22,10		33,33		50,00		66,67		83,33		100,00			DISPERTARU
			Dinas Lingkungan Hidup						**14.019.395.911**		**13.184.469.700**		**15.460.995.149**		**16.086.574.375**		**16.688.892.903**		**17.309.847.668**		
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																		
1	03	13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)**	*Meningkatnya penanganan sampah*	Persentase Penanganan Sampah	%			0	15,12	0	15,02	1.719.391.383	14,92	1.781.772.129	14,83	1.781.772.129	14,73	1.781.772.129		DLH; IKP 2026–2030
					Persentase Lahan Terkonservasi di Wilayah Pantai Selatan	%				6,13		9,20		12,27		15,34		18,40			DLH; IKP 2026–2030
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																		
2	11	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	4.402.814.575	100,00	4.284.831.578	100,00	4.327.679.893	100,00	4.370.956.691	100,00	4.414.666.257	100,00	4.458.812.919		DLH
2	11	02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	*Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP*	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	52.845.700	100,00	48.645.700	100,00	52.812.167	100,00	54.416.575	100,00	56.683.573	100,00	58.494.852		DLH
2	11	03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	*Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*	Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan	Parameter	21,00	26,00	1.958.404.428	29,00	1.007.934.400	31,00	1.094.263.216	33,00	1.127.506.416	35,00	1.174.478.423	37,00	1.212.007.962	02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	DLH

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	11	04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	*Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati*	Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup	%	28,30	41,51	2.376.296.900	54,72	1.435.559.500	66,04	1.693.960.210	77,36	1.795.597.822	88,68	1.903.333.691	100,00	2.017.533.712	02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	DLH
					Persentase Taman Kondisi Baik	%	73,47	75,51		77,55		79,59		81,63		83,67		85,71			DLH
2	11	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	*Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan*	Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi	%	50,00	52,86	27.095.600	54,29	33.122.300	57,14	35.959.199	60,00	37.051.622	62,86	38.595.195	65,71	39.828.474		DLH
2	11	08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	*Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup*	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup	%	76,54	76,83	125.431.000	77,11	149.485.600	77,38	162.288.928	77,65	167.219.189	77,91	174.185.553	78,16	179.751.516		DLH
2	11	10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	*Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup*	Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	22.874.500	100,00	20.024.000	100,00	21.739.040	100,00	22.399.461	100,00	23.332.624	100,00	24.078.199		DLH
2	11	11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	*Meningkatnya tata kelola persampahan*	Proporsi Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	%	22,17	27,00	4.837.678.408	27,82	5.225.868.622	28,64	6.166.524.973	29,46	6.536.516.471	30,27	6.928.707.459	31,09	7.344.429.906	02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	DLH
																			02.18.02 KP: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Berkurangnya sampah*	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Persentase Pengurangan Sampah)	%	32,78	31,41	215.954.800		978.998.000		186.376.140		193.137.999		193.137.999		193.137.999		DLH; IKP 2025
					Persentase Pengurangan Sampah	%				35,01		36,97		43,59		51,01		60,05			DLH; IKP 2026–2030
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**4.656.858.450**		**4.680.836.714**		**4.729.837.052**		**4.791.639.305**		**4.862.772.340**		**4.928.169.998**		
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																		
2	12	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	3.961.836.100	100,00	3.978.364.464	100,00	4.018.148.108	100,00	4.058.329.589	100,00	4.098.912.884	100,00	4.139.902.012		DISDUKCAPIL
2	12	02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	*Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk*	Persentase Penduduk Memiliki Kartu Identitas	%	90,37	92,17	468.071.100	92,20	484.971.100	92,23	475.558.987	92,26	490.006.244	92,29	510.419.943	92,32	526.730.013		DISDUKCAPIL

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	12	03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	*Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil*	Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	%	99,48	99,50	117.790.000	99,55	109.957.500	99,60	119.375.276	99,65	123.001.840	99,70	128.126.106	99,75	132.220.275		DISDUKCAPIL
2	12	04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	*Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan*	Inovasi Pelayanan	Satuan Inovasi	2,00	2,00	86.055.400	2,00	84.437.800	2,00	91.669.833	2,00	94.454.719	2,00	98.389.710	2,00	101.533.676		DISDUKCAPIL
2	12	05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	*Meningkatnya kualitas profil kependudukan*	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100,00	100,00	23.105.850	100,00	23.105.850	100,00	25.084.848	100,00	25.846.913	100,00	26.923.697	100,00	27.784.022		DISDUKCAPIL
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**16.768.715.263**		**11.056.155.483**		**18.280.476.932**		**19.006.100.627**		**19.834.445.028**		**20.640.000.248**		
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																		
2	10	11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN *)**	*Meningkatnya garis batas desa yang tersinkronisasi*	Persentase garis batas desa yang tersinkronisasi	%		38,64	179.329.400	76,14	182.765.000	100,00	55.869.081	100,00	57.896.051	100,00	57.896.051	100,00	57.896.051		DPMKAL DALDUK KB
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																		
2	13	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	97,73	100,00	3.630.869.969	100,00	3.614.709.639	100,00	3.605.689.535	100,00	3.641.746.430	100,00	3.678.163.894	100,00	3.714.945.532		DPMKAL DALDUK KB
2	13	04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	Persentase Kalurahan Kategori TDD	%	43,68	45,98	2.029.867.894	48,28	1.993.183.344	50,57	2.163.897.985	52,87	2.229.636.185	55,17	2.322.523.006	57,47	2.396.737.411		DPMKAL DALDUK KB
					Persentase BUMDes Kategori Maju	%	16,09	18,39		20,69		22,99		25,29		27,59		29,89			DPMKAL DALDUK KB
2	13	05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	*Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan*	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program TMMD dan Karya Bakti	%	10,00	12,00	1.107.284.300	14,00	4.682.747.700	16,00	5.525.642.286	18,00	5.857.180.823	20,00	6.208.611.672	22,00	6.581.128.372	06.07.01 KP: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	DPMKAL DALDUK KB
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																		
2	14	02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	*Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk*	Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB	%	80,68	81,82	406.167.500	82,95	73.819.200	84,09	424.075.438	85,23	436.958.649	86,36	455.162.381	87,50	469.706.738		DPMKAL DALDUK KB
2	14	03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	*Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)*	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	%	68,24	59,24	6.901.887.400	60,10	155.129.300	61,37	3.719.162.128	62,24	3.832.148.519	63,06	3.991.796.131	64,09	4.119.350.853		DPMKAL DALDUK KB

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
					Persentase Unmet Need	%	8,57	15,00		14,55		14,01		13,51		13,01		12,54			DPMKAL DALDUK KB
2	14	04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	*Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)*	Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera	%	5,35	6,07	2.254.998.400	6,57	84.591.300	6,79	2.669.149.734	6,97	2.829.298.718	7,20	2.999.056.641	7,38	3.179.000.039		DPMKAL DALDUK KB
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi kalurahan*	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	%		8,05	258.310.400	11,49	269.210.000	13,79	116.990.745	17,24	121.235.252	19,54	121.235.252	19,54	121.235.252		DPMKAL DALDUK KB
			Dinas Perhubungan						**16.198.545.887**		**17.093.647.344**		**20.873.463.931**		**21.860.038.803**		**22.822.274.593**		**23.840.066.543**		
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																		
1	03	13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)**	*Meningkatnya sarana prasarana LLAJ di kawasan strategis*	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	%	16,98	16,96	618.091.721	17,01	749.487.000	17,38	2.116.024.976	17,76	2.192.795.872	18,18	2.192.795.872	18,60	2.192.795.872		DISHUB
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																		
2	15	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	95,65	100,00	4.117.085.991	100,00	4.270.130.906	100,00	4.312.847.219	100,00	4.355.975.691	100,00	4.399.535.447	100,00	4.443.530.801		DISHUB
2	15	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	*Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat*	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	56,43	56,43	11.463.368.175	57,86	12.074.029.438	59,29	14.444.591.736	60,71	15.311.267.240	62,14	16.229.943.274	63,57	17.203.739.870		DISHUB
					Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	19,24	19,69		20,08		20,47		20,86		21,26		21,65			DISHUB
			Dinas Komunikasi dan Informatika						**12.922.694.716**		**9.763.063.100**		**11.399.095.199**		**11.866.450.207**		**12.323.024.034**		**12.799.364.010**		
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																		
2	16	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	3.411.847.392	100,00	3.460.662.716	100,00	3.495.269.343	100,00	3.530.222.036	100,00	3.565.524.256	100,00	3.601.179.498		DISKOMINFO
2	16	02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	*Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah*	Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik	%	52,38	57,14	646.194.050	61,90	1.407.002.784	66,67	1.549.508.485	71,43	1.642.478.994	76,19	1.741.027.733	80,95	1.845.489.396		DISKOMINFO
2	16	03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	*Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika*	Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah	%	27,50	24,11	4.549.225.374	27,40	4.000.914.400	32,88	4.721.078.992	38,36	5.004.343.731	43,84	5.304.604.354	49,32	5.622.880.615	07.10.04 KP: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	DISKOMINFO

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
																				03.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	
																				02.14.01 KP: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	
					Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	63,93	20,45		40,91		61,36		81,82		100,00		100,00			DISKOMINFO
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																		
2	20	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	*Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)*	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dilengkapi Metadata	%	52,38	61,90	150.436.500	71,43	157.821.800	80,95	171.339.117	90,48	176.544.318	100,00	183.899.168	100,00	189.775.522		DISKOMINFO
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																		
2	21	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	*Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah*	Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	%	63,93	20,45	303.514.700	40,91	324.177.400	61,36	351.942.948	81,82	362.634.808	100,00	377.742.203	100,00	389.812.659		DISKOMINFO
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya layanan jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik*	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik	%			0	74,22	412.484.000	75,78	942.376.490	77,34	976.566.581	78,91	976.566.581	80,47	976.566.581		DISKOMINFO; IKP 2026–2030
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	3.861.476.700	100,00	0	100,00	167.579.824		173.659.739		173.659.739		173.659.739		DISKOMINFO
			Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						**8.519.334.284**		**8.534.554.542**		**5.713.347.290**		**5.894.721.757**		**6.069.741.463**		**6.253.729.869**		
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																		
2	17	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	85,71	100,00	4.963.764.283	100,00	2.973.956.637	100,00	3.034.617.353	100,00	3.064.963.526	100,00	3.095.613.161	100,00	3.126.569.292		DISPERINKOP UKM
2	17	03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	*Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi*	Persentase Koperasi Sehat	%	7,28	12,08	324.595.400	24,04	208.653.200	31,10	128.142.100	38,10	135.830.626	45,02	143.980.463	51,89	152.619.290	03.03.01 KP: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	DISPERINKOP UKM
2	17	05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	*Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian*	Persentase Peningkatan kualitas SDM Koperasi yang dilatih	%	95,54	97,31	63.278.400				0		0		0		0		DISPERINKOP UKM; IKP 2025

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	17	07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	*Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri*	Persentase Usaha Mikro yang Mempunyai Legalitas	%	36,64	42,35	1.607.021.050	47,99	909.968.809	53,79	1.073.763.194	59,73	1.138.188.985	65,80	1.206.480.324	71,99	1.278.869.143		DISPERINKOP UKM
2	17	08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	*Meningkatnya daya saing UMKM*	Omzet Usaha Mikro	Rp	117.013.000.000,00	171.600.000.000,00	456.443.751	177.600.000.000,00	527.875.596	183.600.000.000,00	568.724.635	189.600.000.000,00	602.848.113	195.600.000.000,00	639.018.999	201.600.000.000,00	677.360.138		DISPERINKOP UKM
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya pelaku usaha KUMKM binaan yang naik kelas*	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	pelaku usaha		2,00	374.524.700	5,00	3.487.931.000	10,00	408.760.234	10,00	423.590.347	10,00	423.590.347	10,00	423.590.347		DISPERINKOP UKM; IKP 2025–2030
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																		
3	31	02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	*Meningkatnya realisasi pembangunan industri*	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun ke-n	Unit	16.092,00	16.222,00	729.706.700	16.357,00	426.169.300	16.507,00	499.339.774	16.667,00	529.300.160	16.847,00	561.058.169	17.047,00	594.721.659		DISPERINKOP UKM
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**3.295.908.255**		**3.675.977.650**		**3.341.174.542**		**3.392.618.277**		**3.450.660.037**		**3.505.077.388**		
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																		
2	18	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	2.722.632.755	100,00	2.641.367.250	100,00	2.667.780.922	100,00	2.694.458.731	100,00	2.721.403.318	100,00	2.748.617.351		DPMPTSP
2	18	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	*Meningkatnya kemudahan berinvestasi*	Persentase Peta Potensi yang Tersusun	%	100,00	100,00	103.746.500	100,00	120.341.500	100,00	142.002.970	100,00	150.523.148	100,00	159.554.536		169.127.808		DPMPTSP
2	18	03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	*Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal*	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	33,33	35,00	65.377.100	35,00	161.206.400	40,00	175.013.605	40,00	180.330.435	45,00	187.843.015	50,00	193.845.391		DPMPTSP
2	18	04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	*Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko*	IKM Pelayanan dan Perizinan	Nilai	89.79	84.75-89.82	275.536.200	85-89.85	261.686.400	85.25-89.9	284.099.641	85.5-89.95	292.730.454	85.75-90	304.925.628	86-90	314.669.287		DPMPTSP
2	18	05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	*Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal*	Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi	%	85,71	85,71	13.167.500	85,71	10.517.500	88,57	11.418.315	88,57	11.765.198	91,43	12.255.337	91,43	12.646.946		DPMPTSP
2	18	06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	*Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal*	Persentase Dokumen Data Investasi yang disajikan	%	100,00	100,00	35.940.800	100,00	40.081.600	100,00	43.514.558	100,00	44.836.509	100,00	46.704.401	100,00	48.196.803		DPMPTSP
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya implementasi inovasi pelayanan publik*	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	100,00	100,00	79.507.400	100,00	440.777.000	100,00	17.344.531	100,00	17.973.802	100,00	17.973.802	100,00	17.973.802		DPMPTSP

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						**19.300.819.537**		**42.254.235.000**		**24.380.191.966**		**25.167.079.953**		**25.269.053.994**		**25.357.688.972**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	3.985.892.837	100,00	3.326.179.468	100,00	3.359.441.262	100,00	3.393.035.674	100,00	3.426.966.030	100,00	3.461.235.690		DISBUD
2	22	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	*Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan*	Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya	Orang	69.230,00	70.300,00	1.296.102.000	71.300,00	232.924.532	72.300,00	1.585.150.520	73.300,00	1.633.306.645	74.300,00	1.701.350.330	75.300,00	1.755.715.648		DISBUD
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya pelestarian sumber sejarah dan budaya*	Jumlah Aktivitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Kegiatan	7,00	7,00	14.018.824.700	8,00	38.695.131.000	8,00	19.435.600.184	9,00	20.140.737.634	9,00	20.140.737.634	10,00	20.140.737.634	08.02.03 KP: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	DISBUD
					Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan	Warisan Budaya	216,00	225,00		233,00		242,00		250,00		259,00		267,00			DISBUD
					Jumlah Kelurahan/Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan/Kalurahan Budaya Kategori Berkembang	Kelurahan / Kalurahan	57,00	62,00		64,00		66,00		68,00		70,00		72,00			DISBUD
					Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	%	79,84	81,20		82,56		83,92		85,29		86,65		88,01			DISBUD
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						**5.035.893.620**		**4.432.625.096**		**5.394.544.734**		**5.480.309.166**		**5.580.693.453**		**5.669.131.042**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya perlindungan dan konservasi asrsip dan bahan pustaka bersejarah*	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi	dokumen				200,00	139.296.000	200,00	102.078.432	200,00	105.781.910	200,00	105.781.910	200,00	105.781.910		DISPERPUSIP; IKP 2026–2030
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																		
2	23	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	3.695.589.000	100,00	3.824.536.596	100,00	3.862.781.961	100,00	3.901.409.780	100,00	3.940.423.877	100,00	3.979.828.115		DISPERPUSIP
2	23	02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	*Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan*	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	218.832,00	218.932,00	992.946.120	219.032,00	210.616.500	219.132,00	1.070.158.785	219.232,00	1.102.669.704	219.332,00	1.148.607.011	219.432,00	1.185.309.849		DISPERPUSIP
2	23	03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	*Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno*	Naskah Kuno yang Terdata	Naskah	10,00	11,00	72.985.800	12,00	2.211.400	13,00	81.637.783	14,00	84.117.900	15,00	87.622.258	16,00	90.422.158		DISPERPUSIP
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																		
2	24	02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	*Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis*	Nilai ASKI Perangkat Daerah	Nilai	86,00	86,50	274.372.700	87,00	255.964.600	87,50	277.887.773	88,00	286.329.872	88,50	298.258.397	89,00	307.789.010		DISPERPUSIP

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			Dinas Kelautan dan Perikanan						**4.905.576.873**		**6.338.114.051**		**5.148.559.854**		**5.248.210.972**		**5.308.691.286**		**5.363.763.084**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan*	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	%	68,85	67,46	876.950.000	68,66	2.591.231.000	69,78	1.317.950.540	70,82	1.365.766.726	71,78	1.365.766.726	72,69	1.365.766.726		DISLAUTKAN
					Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik	%	50,00	50,00		50,00		50,00		75,00		75,00		100,00			DISLAUTKAN
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																		
3	25	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	3.071.647.101	100,00	3.135.410.500	100,00	3.166.764.605	100,00	3.198.432.251	100,00	3.230.416.573	100,00	3.262.720.738		DISLAUTKAN
3	25	03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	*Meningkatnya produksi perikanan tangkap*	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.190,03	2.195,00	109.238.572	2.200,00	157.261.072	2.205,00	170.730.363	2.210,00	175.917.070	2.215,00	183.245.789	2.220,00	189.101.264	02.10.09 KP: Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	DISLAUTKAN
3	25	04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	*Meningkatnya produksi perikanan budidaya*	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	16.968,63	16.989,00	728.041.800	17.044,00	318.990.179	17.119,00	346.311.445	17.194,00	356.832.223	17.269,00	371.697.881	17.364,00	383.575.196		DISLAUTKAN
3	25	05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	*Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati*	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	%	N/A	67,00	39.319.300	67,00	38.339.600	70,00	41.623.357	70,00	42.887.854	73,00	44.674.565	73,00	46.102.105		DISLAUTKAN
3	25	06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	*Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat*	Produksi Pengolahan Ikan	Kg	182.570,50	183.500,00	80.380.100	184.000,00	96.881.700	184.500,00	105.179.544	185.000,00	108.374.848	185.500,00	112.889.752	186.000,00	116.497.055		DISLAUTKAN
			Dinas Pariwisata						**24.892.562.458**		**26.251.268.000**		**16.426.896.861**		**16.913.942.601**		**17.131.689.278**		**17.312.427.911**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya wisatawan budaya dan sejarah*	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah	orang	121.686,00	125.337,00	17.314.429.500	129.097,00	19.100.943.000	132.970,00	8.927.333.858	136.959,00	9.251.223.904	141.068,00	9.251.223.904	145.300,00	9.251.223.904		DISPAR
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																		
3	26	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	3.136.000.954	100,00	3.142.227.763	100,00	3.173.650.040	100,00	3.205.386.540	100,00	3.237.440.405	100,00	3.269.814.809		DISPAR
3	26	02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	*Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata*	Objek Pariwisata dalam Kondisi Baik	Lokasi	2,00	2,00	4.022.558.904	3,00	3.467.003.537	4,00	3.763.949.759	5,00	3.878.296.777	6,00	4.039.866.930	7,00	4.168.957.717		DISPAR
3	26	03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	*Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata*	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah	Orang	1.926.051,00	1.983.833,00	235.517.000	2.043.348,00	284.435.200	2.104.648,00	283.322.099	2.167.787,00	291.929.290	2.232.821,00	304.091.087	2.299.806,00	313.808.079		DISPAR

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3	26	05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	*Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif*	Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Tersertifikasi	Pelaku Usaha	166,00	176,00	184.056.100	186,00	256.658.500	196,00	278.641.105	206,00	287.106.090	216,00	299.066.952	226,00	308.623.402		DISPAR
			Dinas Perdagangan						**8.338.009.384**		**8.702.757.973**		**19.583.724.572**		**20.447.317.559**		**21.210.325.413**		**22.015.261.612**		
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																		
3	30	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	95,83	100,00	4.372.095.884	100,00	4.222.940.673	100,00	4.265.170.079	100,00	4.307.821.779	100,00	4.350.899.996	100,00	4.394.408.995		DISDAG
3	30	03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	*Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi*	Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik	%	36,00	40,00	3.049.799.700	40,00	3.885.246.500	44,00	10.680.495.445	44,00	11.321.325.171	48,00	12.000.604.681	48,00	12.720.640.961		DISDAG
3	30	04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	*Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting*	Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu	%	5,97	5,92	625.310.000	5,87	303.767.000	5,82	358.445.060	5,77	379.951.763	5,72	402.748.868	5,67	426.913.800		DISDAG
3	30	05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	*Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor*	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang	Orang	8,00	12,00	151.197.000	15,00	151.197.000	18,00	178.412.460	21,00	189.117.207	24,00	200.464.239	27,00	212.492.093		DISDAG
3	30	06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	*Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk*	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	%	78,71	90,50	139.606.800	91,74	139.606.800	92,68	151.564.016	93,74	156.168.459	94,38	162.674.449	95,88	167.872.583		DISDAG
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya sarana distribusi perdagangan*	Persentase dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan	%				100,00		100,00	3.949.637.512	100,00	4.092.933.180	100,00	4.092.933.180	100,00	4.092.933.180		DISDAG; IKP 2026–2030
			Sekretariat Daerah						**24.592.614.576**		**24.001.906.658**		**24.362.246.343**		**24.880.325.932**		**25.426.893.052**		**25.989.709.294**		
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi	%	100,00	100,00	19.619.304.961	100,00	18.887.694.731	100,00	18.488.903.178	100,00	18.673.792.209	100,00	18.860.530.131	100,00	19.049.135.432		SETDA
					Persentase Fasilitasi Layanan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Pimpinan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			SETDA
					Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00													SETDA; IKP 2025
					Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			SETDA; IKP 2026–2030

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	01	02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	*Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat*	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	100,00	100,00	4.206.695.988	100,00	4.450.162.200	100,00	5.223.502.696	100,00	5.536.912.857	100,00	5.869.127.628	100,00	6.221.275.285		SETDA
					Persentase Perumusan dan Monev kebijakan Pemerintahan, Dokumen Kerjasama dan Laporan Pemerintahan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			SETDA
					Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			SETDA
4	01	03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	*Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan*	Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	%	136,84	100,00	650.084.327	100,00	592.555.727	100,00	643.307.675	100,00	662.851.058	100,00	690.465.485	100,00	712.528.769		SETDA
					Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			SETDA
					Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	%	160,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			SETDA
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya perencanaan, evaluasi, dan pengendalian perangkat daerah urusan keistimewaan*	Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	%	100,00	100,00	116.529.300		71.494.000		6.532.794		6.769.808		6.769.808		6.769.808		SETDA; IKP 2025
					Kematangan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi				49,07		49,10		49,12		49,15		49,30			SETDA; IKP 2026–2030
					Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon	Nilai	96,00	96,10													SETDA; IKP 2025
					Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			SETDA; IKP 2026–2030
			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						**43.465.513.080**		**51.274.052.900**		**37.199.366.894**		**37.837.512.836**		**38.641.922.964**		**39.336.077.454**		
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**																		
4	02	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	26.449.518.652	100,00	25.106.659.556	100,00	24.139.581.109	100,00	24.380.976.920	100,00	24.624.786.689	100,00	24.871.034.555		SETWAN
4	02	02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	*Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD*	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA	%	100,00	100,00	17.015.994.428	100,00	26.167.393.344	100,00	13.059.785.785	100,00	13.456.535.916	100,00	14.017.136.275	100,00	14.465.042.899		SETWAN
					Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			SETWAN

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
					Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			SETWAN
			Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah						**6.752.715.680**		**6.738.374.737**		**6.738.245.453**		**6.845.214.742**		**6.972.671.560**		**7.084.779.323**		
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	247.398.500	100,00	275.841.000	100,00	83.209.221	100,00	86.228.110	100,00	86.228.110	100,00	86.228.110		BAPPERIDA
5	**01**		**PERENCANAAN**																		
5	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	4.601.384.180	100,00	4.772.137.937	100,00	4.819.859.316	100,00	4.868.057.909	100,00	4.916.738.488	100,00	4.965.905.872		BAPPERIDA
5	01	02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	810.880.300	100,00	680.694.200	100,00	738.995.141	100,00	761.445.464	100,00	793.167.342	100,00	818.512.383		BAPPERIDA
					Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan	%	99,86	99,87		99,88		99,89		99,90		99,90		99,90			BAPPERIDA
5	01	03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu	%	100,00	100,00	686.714.900	100,00	501.363.800	100,00	544.305.229	100,00	560.840.965	100,00	584.205.644	100,00	602.873.478		BAPPERIDA
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA Tepat Waktu	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			BAPPERIDA
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			BAPPERIDA
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																		
5	05	02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	*Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan*	Capaian Inovasi Daerah	Satuan Inovasi	208,00	209,00	406.337.800	210,00	140.337.800	211,00	152.357.626	212,00	156.986.178	213,00	163.526.234	214,00	168.751.586		BAPPERIDA

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5	05	03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	*Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan*	Capaian Riset Daerah	%				50,00	368.000.000	62,50	399.518.920	75,00	411.656.116	87,50	428.805.742	100,00	442.507.894	04.08.02 KP: Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	BAPPERIDA; IKP 2026–2030
			Badan Keuangan dan Aset Daerah						**225.195.479.381**		**227.728.663.845**		**243.698.247.662**		**250.535.259.149**		**260.083.821.766**		**267.772.138.900**		
5	**02**		**KEUANGAN**																		
5	02	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	97,56	100,00	27.497.894.110	100,00	27.518.700.501	100,00	27.793.887.506	100,00	28.071.826.381	100,00	28.352.544.644	100,00	28.636.070.090		BKAD
5	02	02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	*Meningkatnya tata kelola keuangan daerah*	Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	%	100,00	100,00	192.423.874.271	100,00	195.009.412.044	100,00	210.191.911.281	100,00	216.577.442.392	100,00	225.600.075.918	100,00	232.808.949.868		BKAD
					Persentase Penerbitan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				BKAD
					Persentase Penerbitan SPM yang Lengkap dan Benar	%	78,85	80,00		82,22		84,00		87,27		88,71		90,32				BKAD
5	02	03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	*Meningkatnya tata kelola aset daerah*	Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	%	100,00	100,00	258.231.700	100,00	208.230.800	100,00	226.065.610	100,00	232.933.376	100,00	242.637.399	100,00	250.390.687		BKAD
5	02	04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	*Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah*	Jumlah Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak	366.124,00	370.858,00	5.015.479.300	374.078,00	4.992.320.500	377.958,00	5.486.383.265	381.866,00	5.653.057.000	385.837,00	5.888.563.805	389.934,00	6.076.728.255		BKAD
					Jumlah Pengawasan dan Penagihan Wajib Pajak Daerah	Wajib Pajak	2.314,00	2.529,00		2.740,00		2.855,00		2.970,00		3.090,00		3.220,00				BKAD
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**142.762.456.774**		**144.959.767.352**		**146.061.174.495**		**147.600.692.498**		**149.197.535.682**		**150.776.493.725**		
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kepuasan peserta atas layanan kediklatan*	Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada Urusan Kelembagaan Berkinerja Sangat Tinggi	%	n/a	100,00	189.378.000		390.162.000		104.337.205		108.122.633		108.122.633		108.122.633		
					Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik	%				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				BKPSDM; IKP 2026–2030
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**																		
5	03	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	139.399.199.574	100,00	140.827.158.502	100,00	142.219.547.481	100,00	143.641.742.955	100,00	145.078.160.384	100,00	146.528.941.987		BKPSDM
5	03	02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	*Meningkatnya kualitas ASN*	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	%	76,39	77,35	3.173.879.200	77,69	3.008.885.350	78,44	2.940.899.324	79,13	3.030.242.458	79,63	3.156.482.600	80,37	3.257.345.532	07.07.01 KP: Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	BKPSDM

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
					Persentase Kedisiplinan ASN	%	99,79	99,80		99,82		99,83		99,85		99,86		99,88			BKPSDM
					Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan Redistribusi	Orang	232,00	242,00		247,00		252,00		257,00		262,00		267,00			BKPSDM
5	04	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	*Meningkatnya kompetensi ASN*	Persentase ASN yang Memenuhi Pengembangan Kompetensi	%				43,14	733.561.500	44,83	796.390.485	46,30	820.584.452	47,88	854.770.065	49,39	882.083.573		BKPSDM; IKP 2026–2030
			Inspektorat Daerah						**11.753.843.594**		**10.137.169.965**		**10.197.996.690**		**10.304.093.391**		**10.413.724.061**		**10.522.621.225**		
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**																		
6	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	11.538.731.494	100,00	9.951.102.965	100,00	9.995.993.194	100,00	10.095.953.125	100,00	10.196.912.656	100,00	10.298.881.782		IRDA
6	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	*Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan*	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	82,29	84,71	134.361.700	86,14	108.404.100	88,41	117.688.828	93,75	121.264.159	98,70	126.316.033	99,33	130.352.363		IRDA
6	01	03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	*Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi*	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	92,86	100,00	80.750.400	100,00	77.662.900	100,00	84.314.668	100,00	86.876.107	100,00	90.495.372	100,00	93.387.080		IRDA
			Kapanewon Temon						**1.991.179.833**		**2.068.159.969**		**2.011.441.714**		**2.036.207.634**		**2.062.033.175**		**2.086.491.105**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	26.557.174	100,00	27.520.687	100,00	27.520.687	100,00	27.520.687		KAP. TEMON
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	22.200.000	100,00	26.450.000	100,00	11.250.506	100,00	11.658.682	100,00	11.658.682	100,00	11.658.682		KAP. TEMON
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	1.827.761.033	100,00	1.776.381.569	100,00	1.794.145.384	100,00	1.812.086.837	100,00	1.830.207.705	100,00	1.848.509.782		KAP. TEMON
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	33.356.400	100,00	70.675.400	100,00	76.728.694	100,00	79.059.675	100,00	82.353.307	100,00	84.984.842		KAP. TEMON

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	15.366.300	100,00	20.691.300	100,00	22.463.494	100,00	23.145.924	100,00	24.110.185	100,00	24.880.607		KAP. TEMON
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	46.778.500	100,00	48.778.500	100,00	52.956.341	100,00	54.565.129	100,00	56.838.316	100,00	58.654.539		KAP. TEMON
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	15.717.600	100,00	25.183.200	100,00	27.340.121	100,00	28.170.700	100,00	29.344.293	100,00	30.281.966		KAP. TEMON
			Kapanewon Wates						**4.726.735.436**		**4.724.595.020**		**4.753.178.546**		**4.846.741.885**		**4.965.943.521**		**5.066.534.105**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	23.438.556	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923		KAP. WATES
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	120.165.000	100,00	125.000.000	100,00	32.813.979	100,00	34.004.493	100,00	34.004.493	100,00	34.004.493		KAP. WATES
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	2.547.274.736	100,00	2.485.892.820	100,00	2.510.751.748	100,00	2.535.859.265	100,00	2.561.217.857	100,00	2.586.830.035		KAP. WATES
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	29.566.500	100,00	57.721.600	100,00	62.665.411	100,00	64.569.156	100,00	67.259.112	100,00	69.408.324		KAP. WATES
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	1.375.125.200	100,00	1.347.565.700	100,00	1.462.983.679	100,00	1.507.428.433	100,00	1.570.228.021	100,00	1.620.403.429		KAP. WATES
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	608.761.000	100,00	593.560.900	100,00	644.398.940	100,00	663.975.475	100,00	691.636.746	100,00	713.737.457		KAP. WATES
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	15.843.000	100,00	14.854.000	100,00	16.126.233	100,00	16.616.140	100,00	17.308.369	100,00	17.861.444		KAP. WATES
			Kapanewon Panjatan						**2.105.722.600**		**2.229.664.748**		**2.149.493.718**		**2.175.466.294**		**2.202.729.380**		**2.228.644.490**		

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	23.438.556	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923		KAP. PANJATAN
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	15.660.800	100,00	21.660.000	100,00	8.203.494	100,00	8.501.122	100,00	8.501.122	100,00	8.501.122		KAP. PANJATAN
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	94,74	100,00	1.921.899.400	100,00	1.943.210.948	100,00	1.938.943.407	100,00	1.958.332.841	100,00	1.977.916.169	100,00	1.997.695.330		KAP. PANJATAN
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	33.582.500	100,00	60.214.200	100,00	65.371.500	100,00	67.357.455	100,00	70.163.571	100,00	72.405.593		KAP. PANJATAN
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	26.140.500	100,00	26.140.500	100,00	28.379.413	100,00	29.241.566	100,00	30.459.771	100,00	31.433.089		KAP. PANJATAN
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	60.032.200	100,00	60.031.900	100,00	65.173.586	100,00	67.153.528	100,00	69.951.149	100,00	72.186.383		KAP. PANJATAN
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	18.407.200	100,00	18.407.200	100,00	19.983.762	100,00	20.590.859	100,00	21.448.675	100,00	22.134.050		KAP. PANJATAN
			Kapanewon Galur						**1.839.481.231**		**1.942.325.000**		**1.850.606.600**		**1.872.904.334**		**1.896.039.442**		**1.918.091.155**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	22.818.372	100,00	23.646.238	100,00	23.646.238	100,00	23.646.238		KAP. GALUR
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	23.040.000	100,00	28.000.000	100,00	8.905.947	100,00	9.229.061	100,00	9.229.061	100,00	9.229.061		KAP. GALUR
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	1.685.633.731	100,00	1.680.633.200	100,00	1.673.739.882	100,00	1.690.477.280	100,00	1.707.382.052	100,00	1.724.455.872		KAP. GALUR
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	23.452.100	100,00	53.507.500	100,00	58.090.376	100,00	59.855.134	100,00	62.348.703	100,00	64.341.007		KAP. GALUR
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	16.030.000	100,00	16.030.000	100,00	17.402.957	100,00	17.931.650	100,00	18.678.683	100,00	19.275.545		KAP. GALUR
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	49.911.500	100,00	52.740.400	100,00	57.257.575	100,00	58.997.033	100,00	61.454.854	100,00	63.418.595		KAP. GALUR
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	11.413.900	100,00	11.413.900	100,00	12.391.491	100,00	12.767.938	100,00	13.299.851	100,00	13.724.837		KAP. GALUR
			Kapanewon Lendah						**1.969.798.384**		**2.076.411.000**		**2.013.125.427**		**2.037.487.351**		**2.062.950.436**		**2.087.162.861**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	23.438.556	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923		KAP. LENDAH
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	22.095.000	100,00	26.481.000	100,00	8.678.124	100,00	8.992.972	100,00	8.992.972	100,00	8.992.972		KAP. LENDAH
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	1.794.075.784	100,00	1.796.862.400	100,00	1.814.831.024	100,00	1.832.979.334	100,00	1.851.309.127	100,00	1.869.822.218		KAP. LENDAH

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	37.407.500	100,00	67.407.500	100,00	73.180.901	100,00	75.404.102	100,00	78.545.442	100,00	81.055.300		KAP. LENDAH
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	17.483.600	100,00	17.483.600	100,00	18.981.057	100,00	19.557.692	100,00	20.372.467	100,00	21.023.453		KAP. LENDAH
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	49.567.200	100,00	49.567.200	100,00	53.812.593	100,00	55.447.394	100,00	57.757.336	100,00	59.602.926		KAP. LENDAH
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	19.169.300	100,00	18.609.300	100,00	20.203.172	100,00	20.816.934	100,00	21.684.169	100,00	22.377.069		KAP. LENDAH
			Kapanewon Sentolo						**1.799.697.642**		**1.834.743.000**		**1.776.669.966**		**1.799.232.920**		**1.823.226.485**		**1.845.701.591**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	23.438.556	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923		KAP. SENTOLO
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	21.524.000	100,00	20.710.000	100,00	8.531.634	100,00	8.841.167	100,00	8.841.167	100,00	8.841.167		KAP. SENTOLO
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	1.606.831.842	100,00	1.535.228.200	100,00	1.550.580.482	100,00	1.566.086.286	100,00	1.581.747.148	100,00	1.597.564.619		KAP. SENTOLO
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	33.458.000	100,00	65.109.100	100,00	70.685.645	100,00	72.833.041	100,00	75.867.271	100,00	78.291.550		KAP. SENTOLO
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	16.845.400	100,00	17.687.700	100,00	19.202.638	100,00	19.786.005	100,00	20.610.291	100,00	21.268.876		KAP. SENTOLO
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	66.492.200	100,00	70.234.500	100,00	76.250.031	100,00	78.566.470	100,00	81.839.555	100,00	84.454.673		KAP. SENTOLO

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	24.546.200	100,00	25.773.500	100,00	27.980.980	100,00	28.831.028	100,00	30.032.130	100,00	30.991.783		KAP. SENTOLO
			Kapanewon Pengasih						**1.820.477.893**		**1.949.939.740**		**1.890.322.502**		**1.913.416.936**		**1.937.539.334**		**1.960.423.407**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	23.438.556	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923		KAP. PENGASIH
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	22.093.100	100,00	22.096.000	100,00	9.380.344	100,00	9.720.669	100,00	9.720.669	100,00	9.720.669		KAP. PENGASIH
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	1.649.239.193	100,00	1.677.393.740	100,00	1.694.167.677	100,00	1.711.109.353	100,00	1.728.220.446	100,00	1.745.502.650		KAP. PENGASIH
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	31.157.300	100,00	63.376.100	100,00	68.804.214	100,00	70.894.453	100,00	73.847.921	100,00	76.207.673		KAP. PENGASIH
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	15.720.500	100,00	16.956.200	100,00	18.408.485	100,00	18.967.726	100,00	19.757.922	100,00	20.389.270		KAP. PENGASIH
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	54.153.200	100,00	53.816.600	100,00	58.425.950	100,00	60.200.902	100,00	62.708.876	100,00	64.712.689		KAP. PENGASIH
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	18.114.600	100,00	16.301.100	100,00	17.697.276	100,00	18.234.910	100,00	18.994.577	100,00	19.601.533		KAP. PENGASIH
			Kapanewon Kokap						**1.889.611.982**		**1.763.299.612**		**1.698.737.649**		**1.719.237.232**		**1.740.587.425**		**1.760.916.231**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	23.438.556	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923		KAP. KOKAP
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	18.225.000	100,00	18.437.000	100,00	4.488.483	100,00	4.651.328	100,00	4.651.328	100,00	4.651.328		KAP. KOKAP
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	1.753.070.886	100,00	1.519.291.312	100,00	1.534.484.225	100,00	1.549.829.067	100,00	1.565.327.357	100,00	1.580.980.630		KAP. KOKAP
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	20.585.696	100,00	56.556.100	100,00	61.400.087	100,00	63.265.392	100,00	65.901.033	100,00	68.006.848		KAP. KOKAP
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	14.862.300	100,00	12.862.300	100,00	13.963.946	100,00	14.388.164	100,00	14.987.576	100,00	15.466.492		KAP. KOKAP
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	46.722.600	100,00	48.007.400	100,00	52.119.197	100,00	53.702.553	100,00	55.939.805	100,00	57.727.317		KAP. KOKAP
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	6.145.500	100,00	8.145.500	100,00	8.843.155	100,00	9.111.805	100,00	9.491.403	100,00	9.794.693		KAP. KOKAP
			Kapanewon Girimulyo						**1.920.399.109**		**2.114.360.937**		**2.058.305.130**		**2.084.610.512**		**2.113.123.825**		**2.139.711.352**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	23.438.556	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923		KAP. GIRIMULYO
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	22.415.000	100,00	21.461.000	100,00	5.030.148	100,00	5.212.645	100,00	5.212.645	100,00	5.212.645		KAP. GIRIMULYO
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	1.752.041.609	100,00	1.768.079.537	100,00	1.785.760.332	100,00	1.803.617.935	100,00	1.821.654.114	100,00	1.839.870.655		KAP. GIRIMULYO

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	30.353.300	100,00	77.013.500	100,00	83.609.647	100,00	86.149.668	100,00	89.738.670	100,00	92.606.199		KAP. GIRIMULYO
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	20.325.200	100,00	28.951.100	100,00	31.430.739	100,00	32.385.590	100,00	33.734.776	100,00	34.812.744		KAP. GIRIMULYO
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	53.471.500	100,00	90.905.800	100,00	98.691.812	100,00	101.690.022	100,00	105.926.436	100,00	109.311.232		KAP. GIRIMULYO
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	11.792.500	100,00	27.950.000	100,00	30.343.896	100,00	31.265.729	100,00	32.568.261	100,00	33.608.954		KAP. GIRIMULYO
			Kapanewon Nanggulan						**2.172.839.259**		**2.313.107.000**		**2.231.033.999**		**2.256.976.160**		**2.283.638.984**		**2.309.337.467**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	23.438.556	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923		KAP. NANGGULAN
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	20.184.600	100,00	22.562.000	100,00	9.375.422	100,00	9.715.569	100,00	9.715.569	100,00	9.715.569		KAP. NANGGULAN
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	2.014.196.259	100,00	2.065.372.260	100,00	2.062.326.332	100,00	2.082.949.595	100,00	2.103.779.090	100,00	2.124.816.880		KAP. NANGGULAN
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	35.243.800	100,00	59.923.840	100,00	65.056.271	100,00	67.032.649	100,00	69.825.234	100,00	72.056.444		KAP. NANGGULAN
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	17.845.000	100,00	13.353.900	100,00	14.497.651	100,00	14.938.082	100,00	15.560.403	100,00	16.057.623		KAP. NANGGULAN
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	41.329.800	100,00	41.164.500	100,00	44.690.208	100,00	46.047.875	100,00	47.966.233	100,00	49.498.956		KAP. NANGGULAN

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	14.039.800	100,00	10.730.500	100,00	11.649.559	100,00	12.003.467	100,00	12.503.532	100,00	12.903.072		KAP. NANGGULAN
			Kapanewon Samigaluh						**2.153.636.884**		**2.079.718.571**		**2.021.564.012**		**2.046.102.490**		**2.072.016.665**		**2.096.595.288**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	23.438.556	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923		KAP. SAMIGALUH
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	21.050.000	100,00	18.009.000	100,00	4.531.610	100,00	4.696.020	100,00	4.696.020	100,00	4.696.020		KAP. SAMIGALUH
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	1.969.628.184	100,00	1.799.550.871	100,00	1.817.546.379	100,00	1.835.721.842	100,00	1.854.079.060	100,00	1.872.619.850		KAP. SAMIGALUH
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	34.318.400	100,00	64.318.400	100,00	69.827.222	100,00	71.948.540	100,00	74.945.921	100,00	77.340.759		KAP. SAMIGALUH
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	22.895.000	100,00	22.095.000	100,00	23.987.419	100,00	24.716.145	100,00	25.745.821	100,00	26.568.508		KAP. SAMIGALUH
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	56.630.400	100,00	56.630.400	100,00	61.480.750	100,00	63.348.506	100,00	65.987.609	100,00	68.096.191		KAP. SAMIGALUH
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	19.114.900	100,00	19.114.900	100,00	20.752.076	100,00	21.382.514	100,00	22.273.311	100,00	22.985.037		KAP. SAMIGALUH
			Kapanewon Kalibawang						**2.037.911.498**		**2.089.738.619**		**2.037.239.687**		**2.061.983.833**		**2.087.881.106**		**2.112.477.511**		
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)**	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100,00	100,00	30.000.000	100,00	100.000.000	100,00	23.438.556	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923	100,00	24.288.923		KAP. KALIBAWANG
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4	01	04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)**	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	100,00	100,00	17.790.000	100,00	17.039.000	100,00	9.375.447	100,00	9.715.622	100,00	9.715.622	100,00	9.715.622		KAP. KALIBAWANG
7	**01**		**KECAMATAN**																		
7	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	100,00	100,00	1.864.909.698	100,00	1.814.085.069	100,00	1.832.225.919	100,00	1.850.548.178	100,00	1.869.053.659	100,00	1.887.744.195		KAP. KALIBAWANG
7	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	Persentase Pelayanan Non Perizinan	%	100,00	100,00	27.586.500	100,00	57.586.500	100,00	62.518.740	100,00	64.418.029	100,00	67.101.689	100,00	69.245.870		KAP. KALIBAWANG
7	01	03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	20.609.500	100,00	20.609.500	100,00	22.374.688	100,00	23.054.420	100,00	24.014.868	100,00	24.782.244		KAP. KALIBAWANG
7	01	05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM	%	100,00	100,00	61.250.800	100,00	64.653.550	100,00	70.191.077	100,00	72.323.448	100,00	75.336.448	100,00	77.743.765		KAP. KALIBAWANG
7	01	06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	15.765.000	100,00	15.765.000	100,00	17.115.260	100,00	17.635.213	100,00	18.369.897	100,00	18.956.892		KAP. KALIBAWANG
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**4.861.273.269**		**4.656.036.000**		**5.006.997.708**		**5.155.125.709**		**5.332.597.875**		**5.497.428.513**		
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																		
8	01	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi	%	94,12	100,00	1.822.212.737	100,00	1.845.776.304	100,00	1.864.234.067	100,00	1.882.876.407	100,00	1.901.705.171	100,00	1.920.722.222		BAKESBANGPOL
8	01	02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	*Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan*	Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	%	80,00	90,00	1.130.776.336	90,00	973.042.200	91,58	1.148.189.796	93,16	1.217.081.183	94,74	1.290.106.053	96,32	1.367.512.416		BAKESBANGPOL
8	01	03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	*Meningkatnya etika dan budaya politik*	Persentase Siswa yang Menggunakan Hak Pilih dalam PEMILOS	%	50,00	60,00	1.357.481.496	65,00	1.244.795.896	70,00	1.351.411.719	75,00	1.392.466.969	80,00	1.450.477.254	80,00	1.496.826.120		BAKESBANGPOL
8	01	04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	*Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan*	Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	75,17	79,87	119.707.200	84,56	124.991.700	89,26	135.697.144	93,96	139.819.559	97,32	145.644.452	100,00	150.298.406		BAKESBANGPOL

KODE			BIDANG URUSAN / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PD PENANGGUNG JAWAB
								2025		2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8	01	05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	*Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat*	Persentase Hasil Penetapan Kalurahan Bersinar yang ditindaklanjuti	%	0,00	17,39	86.775.600	34,78	134.101.100	56,52	145.586.757	78,26	150.009.614	86,96	156.259.026	100,00	161.252.160		BAKESBANGPOL
8	01	06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	*Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan*	Persentase Laporan Penanganan Konflik Sosial	%	16,67	100,00	344.319.900	100,00	333.328.800	100,00	361.878.225	100,00	372.871.977	100,00	388.405.919	100,00	400.817.189		BAKESBANGPOL

Keterangan:

- *) Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Negara atau Alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, Penilaian Kelayakan Usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.
- Cell warna abu-abu = sengaja n/a karena adanya transisi penggunaan indikator.
- Pagu 2026 berdasarkan angka RKPD 2026

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode perencanaan. Pencapaian indikator ini mencerminkan akumulasi hasil dari indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun maupun indikator yang bersifat mandiri. Dengan demikian, target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai secara optimal.

Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcomes)* terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja daerah. Indikator ini merupakan hasil agregasi dan akumulasi capaian indikator kinerja program yang berbasis *outcomes* dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD). Sementara itu, indikator kinerja program yang bersifat terukur merupakan hasil agregasi dari pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada keluaran *(output)* yang juga dilaksanakan oleh PD.

Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian saat ini, tetapi juga sebagai proyeksi terhadap prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Untuk menjamin akuntabilitas pencapaian kinerja, indikator dan target kinerja harus dinyatakan secara jelas sejak tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan. Oleh karena itu, target kinerja yang ditetapkan harus selaras dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah serta memenuhi prinsip *SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, and Continuously Improve)*, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian kinerja daerah bergantung pada indikator yang mampu mencerminkan kemajuan pembangunan serta menjadi acuan bagi publik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tabel 4.2-1 berikut menyajikan target indikator kinerja utama.

Tabel 4.2-1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,18	76,00–76,23	76,40–76,69	76,80–77,16	77,20–77,62	77,60–78,09	78,00–78,55	IUP
2.	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,49	75,50–79,75	75,58–79,83	75,65–79,90	75,73–79,98	75,80–80,05	75,88–80,13	IUP
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,49	14,63–15,72	14,7–15,79	14,78–15,87	14,85–15,94	14,93–16,01	15,00–16,09	IUP
4.	Tingkat Kemiskinan	%	15,62	14,12–15,12	13,69–14,69	13,26–14,26	12,83–13,83	12,40–13,40	11,90–12,97	IUP
5.	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	10.990,00	10.732,40–11.732,40	10.987,60–11.987,60	11.242,80–12.242,80	11.498,00–12.498,00	11.753,20–12.753,20	12.008,40–13.008,40	
6.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	63,31	64,00–66,00	65,00–67,00	66,00–68,00	67,00–69,00	68,00–70,00	69,00–71,00	IUP
7.	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	58,91	60,00–61,00	60,50–61,50	61,00–62,00	61,50–62,50	62,00–63,00	62,50–63,50	
8.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	4,78–5,38	4,80–5,40	4,82–5,42	4,84–5,44	4,86–5,46	4,88–5,48	
9.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,98	41,02–42,22	41,03–42,23	41,04–42,24	41,05–42,25	41,06–42,26	41,07–42,27	
10.	PDRB Per Kapita (ADHB)	Ribu Rupiah	37.976,26	40.043–40.272	42.865–43.357	45.874–46.666	49.087–50.221	52.516–54.036	56.179–58.136	
11.	Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Miliar rupiah	655,55	684,46–1.228,98	766,86–1.360,34	857,40–1.504,26	956,80–1.661,85	1.063,43–1.831,90	1.182,74–2.020,43	
12.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar rupiah	1.709,15	1.892,11–1.984,03	2.048,17–2.159,39	2.216,00–2.349,08	2.396,46–2.554,25	2.592,87–2.778,58	2.801,62–3.018,70	
13.	Rasio Gini	Nilai	0,37	0,372–0,402	0,371–0,401	0,370–0,400	0,369–0,399	0,368–0,398	0,367–0,397	IUP
14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,01	1,95–2,55	1,90–2,50	1,90–2,45	1,90–2,40	1,90–2,35	1,90–2,30	IUP
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	87,04	87,50	87,90	88,20	88,40	88,50	88,60	
16.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Nilai	3,91	4,11–4,61	1,41–1,50	1,41–1,50	1,51–1,60	1,51–1,60	1,61–1,70	IUP; Transisi Indikator Baru; Target 2025 adalah Indeks SPBE, Target 2026-2030 adalah Indeks Pemdi
17.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	A (83,75)	A (84,2)	A (85,3)	A (86,4)	A (87,5)	A (88,1)	A (88,66)	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18.	Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,80	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10	
20.	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	
21.	Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate)	kejahatan per 100.000 penduduk	62,70	62,00	61,00	60,00	59,00	58,00	57,00	IUP
22.	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Nilai	7,32	7,38	7,42	7,46	7,50	7,54	7,58	
23.	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,61	88,70	88,75	88,80	88,85	88,90	88,95	Hasil Audit Tata Ruang
25.	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,86	89,90	89,95	90,00	90,05	90,10	90,15	Hasil Audit Tata Ruang
26.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Angka	48,40	49,28	50,15	51,03	51,91	52,79	53,66	
27.	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service/LOS)	Kategori	A (0,10)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	V/C Ratio
28.	Indeks Risiko Bencana	Nilai	152,65	136,71–141,71	135,07–140,07	133,44–138,44	131,80–136,80	130,17–135,17	128,53–133,53	IUP
29.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65,46	69,75	69,84	69,93	70,03	70,12	70,22	IUP
30.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo Tahun 2025

Mengingat periode RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan RPJPN 2025-2045 menuju terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045, maka pada bagian ini disajikan arah pembangunan nasional (ditandai dengan keterangan "IE" sebagai singkatan dari Indonesia Emas) serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang menjadi kewenangan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah pembangunan dan IUP tersebut dirumuskan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD), yaitu ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Sebagai bagian integral dari penyajian IKD, turut disampaikan pula Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Arah Pembangunan Nasional (IE), Indikator Utama Pembangunan (IUP), Indikator Makro Pembangunan, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang membentuk bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD), disajikan secara sistematis dalam Tabel 4.2-2.

Tabel 4.2-2 Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**										
I.4	**Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan (IE 16)**										
I.4.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	85,73	87,65	89,14	90,63	92,12	93,62	95,11		DISPERTAPANG
I.4.2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	8,75	12,17–14,17	11,67–13,67	11,17–13,17	10,67–12,67	10,17–12,17	9,67–11,67	IUP	DISPERTAPANG
I.4.4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	28,08	32,84	36,19	39,55	42,91	46,27	49,63	IUP	DPUPKP
I.5	**Lingkungan Hidup Berkualitas (IE 15)**										
I.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65,46	69,75	69,84	69,93	70,03	70,12	70,22	IUP	DLH
I.5.2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	10,20	11,85	13,51	15,16	16,82	18,47	20,13	IUP	DPUPKP
I.5.3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14,00	15,21	15,12	15,02	14,92	14,83	14,73	Di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo	DLH
I.5.4	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	86,07	87,88	88,46	89,01	89,54	90,82	91,82	IUP (*Indikator Proksi), di Kelurahan Wates	DLH
I.6	**Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (IE 17)**										
I.6.2	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	IKU Daerah	BPBD
I.6.3	Indeks Risiko Bencana	Nilai	152,65	136,71–141,71	135,07–140,07	133,44–138,44	131,80–136,80	130,17–135,17	128,53–133,53	IUP (*Indikator Proksi) / IKU Daerah	BPBD
I.7	**Demografi**										
I.7.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,44	0,48	0,46	0,44	0,41	0,38	0,36	Sumber: BPS	DPMKAL DALDUK KB
I.7.2	Rasio Penduduk	(Laki-laki per 100 Perempuan)	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	Sumber: BPS	DPMKAL DALDUK KB
I.7.3	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	759,01	744,31	777,84	781,23	784,41	787,44	790,26	Sumber: BPS	DPMKAL DALDUK KB
I.7.4	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Nilai	7,30	6,80	6,30	5,80	5,40	5,00	4,60	GDPK	DPMKAL DALDUK KB
I.7.5	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	%	83,69	84,30	85,00	85,70	86,30	87,00	87,70	GDPK	DPMKAL DALDUK KB

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I.7.6	Rate Nett Recent Migrasi		2,09	3,41	5,55	9,04	14,72	23,97	39,05	GDPK	DPMKAL DALDUK KB
I.7.7	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	82,98	84,51	86,04	87,57	89,10	90,63	92,16	GDPK	DISDUKCAPIL
I.7.8	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	%	90.12	91,62	93,12	94,62	96,12	97,62	99,12	GDPK	DISDUKCAPIL
I.7.9	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	GDPK	DISDUKCAPIL
I.7.9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	GDPK	DISDUKCAPIL
II.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**										
II.1	**Kesejahteraan Ekonomi**										
II.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	4,78-5,38	4,80-5,40	4,82-5,42	4,84-5,44	4,86-5,46	4,88-5,48		
II.1.2	Tingkat Kemiskinan	%	15,62	14,12–15,12	13,69–14,69	13,26–14,26	12,83–13,83	12,40–13,40	11,90–12,97	IUP; IKU Daerah	
II.1.3	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp juta	37,98	40,04–40.27	42,87-43,36	45,87–46,67	49,09–50,22	52,52–54,04	56,18–58,14	IUP; IKU Daerah	
II.1.4	PDRB Per Kapita (ADHK)	Rp juta	23,41	24,41–24,55	25,47–25,76	26,58–27,04	27,76–28,40	28,99–29,83	30,30–31,35		
II.1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,01	1,95–2,55	1,90–2,50	1,90–2,45	1,90–2,40	1,90–2,35	1,90–2,30	IUP; IKU Daerah	DISNAKER
II.1.6	Rasio Gini	Nilai	0,37	0,372–0,402	0,371–0,401	0,370–0,400	0,369–0,399	0,368–0,398	0,367–0,397	IUP; IKU Daerah	
II.1.7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,18	76,00–76,23	76,40–76,69	76,80–77,16	77,20–77,62	77,60–78,09	78,00–78,55	IUP; IKU Daerah	
II.1.8	Kemiskinan Ekstrem	%	1,55	1,20	0,85	0,50	0,28	0,25	0,20		
II.2	**Kesehatan untuk Semua (IE 1)**										
II.2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,49	75,50–79,75	75,58–79,83	75,65–79,90	75,73–79,98	75,80–80,05	75,88–80,13	IUP; IKU Daerah; RIBK	
II.2.2	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45		DISKES
II.2.3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	18,00	17,10	16,20	15,40	14,60	13,80	13,10	IUP; IKU Diskes; RIBK	DISKES
II.2.4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	40,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IUP; IKP Diskes	DISKES
II.2.5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	86,88	90,23	91,29	92,24	93,11	94,12	95,02	IUP; IKP Diskes; RIBK	DISKES
II.2.7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,11	99,25–99,95	99,26–99,95	99,26–99,95	99,26–99,95	99,26–99,95	99,26-99,95	IUP; IKP Diskes; RIBK	DISKES
II.2.9	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	1,49	1,45	1,44	1,42	1,40	1,35	1,30	IKU Diskes; RIBK	DISKES

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
II.2.10	Cakupan Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	n/a	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	RIBK	DISKES
II.2.11	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	98,35	95,00	95,00	96,00	96,00	97,00	97,00	RIBK	DISKES
II.2.12	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	18,90	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	RIBK	DISKES
II.2.13	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%	n/a	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	RIBK	DISKES
II.3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata (IE 2)**										
II.3.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,20	9,36	9,46	9,55	9,65	9,74	9,84		DISDIK
II.3.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,49	14,63–15,72	14,7–15,79	14,78–15,87	14,85–15,94	14,93–16,01	15,00–16,09	IUP; IKU Daerah	DISDIK
II.3.3	Angka Literasi SD	%	69,19	71,69	74,19	76,69	79,19	81,69	84,19		DISDIK
II.3.4	Angka Numerasi SD	%	58,81	61,71	64,61	67,51	70,41	73,31	76,21		DISDIK
II.3.5	Angka Literasi SMP	%	82,91	84,01	85,11	86,21	87,31	88,41	89,51		DISDIK
II.3.6	Angka Numerasi SMP	%	70,70	72,20	73,70	75,20	76,70	78,20	79,70		DISDIK
II.3.7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	96,23	96,33	96,43	96,53	96,63	96,73	96,83		DISPERPUSIP
II.3.9	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Literasi Membaca	%	87,44	87,63	87,69	87,79	87,93	88,13	88,39		DISDIK
II.3.10	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk: Numerasi	%	82,91	83,08	83,33	83,38	83,46	83,64	83,91		DISDIK
II.4	**Perlindungan Sosial yang Adaptif (IE 3)**										
II.4.1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	%	32,31	38,46–46,21	42,83–47,83	45,12–50,12	47,42–52,42	49,72–54,72	52,02–57,02	IUP	DISNAKER
II.5	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju (IE 13)**										
II.5.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	63,31	64,00–66,00	65,00–67,00	66,00–68,00	67,00–69,00	68,00–70,00	69,00–71,00	IUP; IKU Daerah	
II.6	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif (IE 14)**										
II.6.1	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	n/a	69,30	69,30	70,00	70,00	70,00	70,00	GDPK/ PJPK	DISSOS P3A
II.6.2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	64,30	65,20	66,10	67,10	68,00	69,00	70,00		DPMKAL DALDUK KB

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
II.6.3	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,15	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12		DISSOS P3A
II.6.4	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Nilai	90,46	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	GDPK	DPMKAL DALDUK KB
II.6.5	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,86	95,87	95,88	95,89	95,91	95,92	95,93	PPPA	DISSOS P3A
II.6.6	Proporsi perempuan dalam posisi struktural pemerintahan	%	43,82	43,84	43,85	43,87	43,88	43,90	43,91	PPPA	DISSOS P3A
II.6.7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Nilai	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	GDPK	DPMKAL DALDUK KB
II.6.8	Indeks Lansia Berdaya	Nilai	55,88	56,70	57,50	58,20	59,00	59,70	60,40	GDPK	DPMKAL DALDUK KB
II.6.9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	64,77	67,75	68,70	70,70	72,80	75,00	77,20	GDPK	DPMKAL DALDUK KB
II.6.10	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	8,60	8,50	8,40	8,20	8,10	8,00	7,90	GDPK	DPMKAL DALDUK KB
III.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**										
III.1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**										
III.1.1	Angka Ketergantungan	%	49,57	49,81	50,10	50,43	50,79	51,18	51,58	BPS, Proyeksi Penduduk Kecamatan DIY 2020-2035	
III.2	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (IE 4)**										
III.2.1	Kontribusi/Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	10,11	10,56–11,01	10,63–11,08	10,70,11,15	10,77–11,22	10,85–11,30	10,92–11,37	IUP	DISPERINKOP UKM
III.2.2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	3,88	3,82–6,82	3,98–6,98	4,14–7,14	4,30–7,30	4,45–7,45	4,61–7,61	IUP	DISPAR
III.2.3	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,11	2,56–3,56	2,66–3,66	2,76–3,76	2,85–3,85	2,95–3,95	3,05–4,05	IUP	DISPERINKOP UKM
III.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	78,57	76,41–78,91	76,44–78,94	76,48–78,98	76,52–79,02	76,56–79,06	76,60–79,10		DISNAKER
III.2.6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	54,68 (inovatif)	55,40 (inovatif)	56,00 (inovatif)	57,50 (inovatif)	58,40 (inovatif)	59,00 (inovatif)	60,50 (sangat inovatif)		BAPPERIDA
III.2.7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	%	1,31	1,89–2,39	2,05–2,55	2,21–2,71	2,37–2,87	2,53–3,03	2,69-3,19	IUP	DISPERINKOP UKM
III.2.8	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,89	2,12–3,12	2,47–3,47	2,70–3,70	2,92–3,92	3,15–4,15	3,38-4,38	IUP	DISPERINKOP UKM
III.2.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	72,66	68,59-72,84	68,62-72,86	68,66-72,90	68,69-72,94	68,73-72,97	68,76-73,00	IUP, PPPA	DISSOS P3A

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
III.2.10	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	4,66	4,71	4,74	4,76	4,79	4,81	4,82		SETDA
III.2.11	Indeks Zakat Nasional	Nilai	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	Indikator Outcome untuk dimensi ekonomi syariah dalam fokus Asta Cita ke-2 (PN 2)	SETDA
III.2.12	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	92,86	93,75	93,75	95,83	95,83	95,83	95,83		DISNAKER
III.2.13	Persentase pekerja informal	%	66,82	66,21-67,99	64,53-68,47	64,80-68,98	65,12-69,40	65,40-70,25	65,40-70,25		
III.5	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (IE 7)**										
III.5.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41,98	41,02–42,22	41,03–42,23	41,04–42,24	41,05–42,25	41,06–42,26	41,07–42,27	IUP	
III.5.2	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	8,74	8,96	9,07	9,18	9,29	9,40	9,51	IUP	
III.6	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (IE 8)**										
III.6.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	45,58	50,45	52,93	55,41	57,89	60,36	62,84	IUP	DPUPKP
III.6.3	Persentase Desa (Kalurahan) Mandiri	%	82,76	87,36	89,66	91,95	95,40	100,00	100,00		DPMKAL DALDUK KB
III.7	**Stabilitas Ekonomi Makro (IE 11)**										
III.7.1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,54	0,65–0,78	0,66–0,79	0,68–0,81	0,70–0,83	0,72–0,83	0,73–0,86	IUP	BKAD
III.7.2	Total Kredit/PDRB	%	23,87	24,50–27,03	25,30–28,24	26,12–29,06	26,94–29,88	27,76–30,70	28,58–31,52	IUP	
IV.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
IV.1	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (IE 9)**										
IV.1.1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	90,10	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	Indikator Baru; Hanya menggunakan nilai awal tanpa nilai apresiasi	SETDA
IV.1.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	Nilai	3,91	4,11–4,61	1,41–1,50	1,41–1,50	1,51–1,60	1,51–1,60	1,61–1,70	IUP; Transisi Indikator Baru; Target 2025 adalah Indeks SPBE, Target 2026-2030 adalah Indeks Pemdi	DISKOMINFO

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
IV.1.3	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,55 (A/Pelayanan Prima)	4,56 (A/Pelayanan Prima)	4,57 (A/Pelayanan Prima)	4,59 (A/Pelayanan Prima)	4,61 (A/Pelayanan Prima)	4,63 (A/Pelayanan Prima)	4,65 (A/Pelayanan Prima)	IUP	SETDA
IV.2	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial (IE 10)**										
IV.2.1	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		SATPOL PP
IV.3	**Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan (IE 12)**										
IV.3.1	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,73	3,78	3,83	3,88	3,93	3,98	4,03		BAPPERIDA
IV.4	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**										
-	**Pendidikan**										
IV.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun	%	97,52	97,78	98,03	98,28	98,54	98,79	99,05		DISDIKPORA
IV.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun	%	98,61	98,72	98,82	98,92	99,03	99,13	99,24		DISDIKPORA
IV.4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun	%	14,09	14,85	15,62	16,38	17,14	17,91	18,67		DISDIKPORA
IV.4.4	Kemampuan literasi numerasi SD (skor)	Nilai	64,00	66,70	69,40	72,10	74,80	77,50	80,20		DISDIKPORA
IV.4.5	Kemampuan literasi numerasi SMP (skor)	Nilai	76,80	78,10	79,40	80,70	82,00	83,30	84,60		DISDIKPORA
IV.4.6	Persentase Penguatan Pendidikan Karakter	Nilai	57,72	58,05	59,12	59,82	60,52	61,22	61,92		DISDIKPORA
-	**Kesehatan**										
IV.4.7	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	58,53	61,12	62,56	64,14	65,66	67,14	68,87		DISKES
IV.4.8	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	10,24	10,39	10,32	10,26	10,18	10,07	9,99		DISKES
-	**Pekerjaan Umum**										
IV.4.10	Capaian Akses Air Minum Aman	%	28,08	29,68	31,28	32,88	34,48	36,08	37,68		DPUPKP
IV.4.11	Rasio Rumah Layak Berkelanjutan	%	94,55	94,56	94,58	94,58	94,59	94,61	94,62		DPUPKP

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
IV.4.12	Rasio luas layanan jaringan irigasi Kabupaten	%	64,65	64,85	65,14	65,42	65,71	66,00	66,28		DPUPKP
IV.4.13	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	68,72	68,87	69,03	69,18	69,34	69,49	69,65		DPUPKP
-	**Penataan Ruang**										
IV.4.14	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00		DISPERTARU
-	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
IV.4.15	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	10,32	4,10	19,76	24,89	30,40	36,68	43,59		DPUPKP
-	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**										
IV.4.16	Persentase Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		SATPOL PP
IV.4.17	Persentase Penanggulangan Bencana	%	92,05	93,18	94,32	95,45	97,73	100,00	100,00		BPBD
IV.4.18	Persentase Penanggulangan Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		BPBD
-	**Sosial**										
IV.4.19	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56		DISSOS P3A
IV.5	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**										
-	**Tenaga Kerja**										
-	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
-	**Pangan**										
IV.5.3	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88,00	89,10	90,20	91,30	92,40	93,50	94,60		DISPERTAPANG
-	**Pertanahan**										
IV.5.4	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	%	56,09	63,98	72,27	76,33	76,94	77,55	78,17		DISPERTARU
-	**Lingkungan Hidup**										
IV.5.5	Indeks Kualitas Air	Nilai	44,24	71,90	72,10	72,30	72,50	72,70	72,90	Lonjakan data IPA dan IPU disebabkan karena ada	DLH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
										perubahan medote perhitungan. Untuk tahun 2025 dan seterusnya menggunakan IKA-INA, sedangkan pada tahun 2024 IKA-IP.	
IV.5.6	Indeks Kualitas Udara	Nilai	91,62	75,70	75,71	75,72	75,73	75,74	75,75	Lonjakan data IPA dan IPU disebabkan karena ada perubahan medote perhitungan. Untuk tahun 2025 dan seterusnya menggunakan IKA-INA, sedangkan pada tahun 2024 IKA-IP.	DLH
IV.5.7	Persentase Pengelolaan Persampahan	%	46,78	48,70	50,13	51,99	58,52	65,84	74,78		DLH
-	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
IV.5.8	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,20		DISDUKCAPIL
-	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
-	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**										
IV.5.10	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	1,98	1,99	2,00	1,99	1,99	1,99	1,99		DPMKAL DALDUK KB
-	**Perhubungan**										
IV.5.11	Tingkat Kualitas Layanan Transportasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISHUB
-	**Komunikasi dan Informatika**										
IV.5.12	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai (Predikat)	90,00 (Informatif)	91,00 (Informatif)	91,50 (Informatif)	92,00 (Informatif)	92,50 (Informatif)	93,00 (Informatif)	93,50 (Informatif)		DISKOMINFO
-	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**										
IV.5.13	Persentase Koperasi Berkualitas	%	25,73	28,02	32,69	37,32	43,33	43,60	50,00		DISPERINKOP UKM
IV.5.14	Jumlah UMKM MIkro yang Naik Subkelas	Unit Usaha	15.631,00	18.141,00	20.653,00	23.267,00	25.983,00	28.801,00	31.721,00		DISPERINKOP UKM

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-	**Penanaman Modal**										
IV.5.15	Nilai Investasi	Rp (Juta)	354.783,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00		DPMPTSP
-	**Kepemudaan dan Olahraga**										
IV.5.16	Persentase Pemuda berprestasi	%	58,82	64,71	76,47	82,35	88,24	94,12	100,00		DISDIKPORA
IV.5.17	Persentase perolehan medali pada kejuaraan olahraga pelajar dan umum	%	50,19	50,21	50,78	51,13	51,35	51,84	52,31		DISDIKPORA
-	**Kebudayaan**										
IV.5.18	Persentase Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan	%	50,82	52,82	54,69	56,81	58,69	60,66	62,53		DISBUD
-	**Perpustakaan**										
IV.5.19	Nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM)	Nilai	74,55	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50		DISPERPUSIP
-	**Kearsipan**										
IV.5.20	Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)	Nilai	83,86	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00		DISPERPUSIP
IV.6	**Urusan Pemerintahan Pilihan**										
-	**Pariwisata**										
IV.6.1	Pendapatan Sektor Pariwisata	Rupiah	7.378.133.000,00	7.599.476.990,00	7.827.461.229,00	8.062.285.138,00	8.304.153.692,00	8.553.278.303,00	8.809.876.652,00		DISPAR
-	**Kelautan & Perikanan**										
IV.6	Nilai Produksi Perikanan	Rupiah	492.348.349.500,00	492.738.184.000,00	493.536.453.500,00	494.503.844.000,00	495.571.780.750,00	496.910.692.500,00	498.481.355.500,00		DISLAUTKAN
-	**Pertanian**										
IV.6.2	Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis - Padi	Ton	124.230,00	125.472,00	126.727,00	127.994,00	129.274,00	130.567,00	131.873,00		DISPERTAPANG
IV.6.3	Produksi Komoditas Tanaman Pangan Strategis - Jagung	Ton	23.471,00	23.706,00	23.943,00	24.182,00	24.424,00	24.668,00	24.915,00		DISPERTAPANG
IV.6.4	Produksi Komoditas Hortikultura Strategis - Cabai	Kuintal	379.192,19	382.984,00	386.814,00	390.682,00	394.589,00	398.535,00	402.520,00		DISPERTAPANG
IV.6.5	Produksi Komoditas Hortikultura Strategis - Bawang Merah	Kuintal	128.346,00	129.629,00	130.925,00	132.235,00	133.557,00	134.893,00	136.242,00		DISPERTAPANG
IV.6.6	Produksi Daging - Sapi	Ton	643,00	646,00	650,00	653,00	656,00	660,00	663,00		DISPERTAPANG
IV.6.7	Produksi Daging - Kambing	Ton	547,00	550,00	553,00	555,00	558,00	561,00	564,00		DISPERTAPANG
IV.6.8	Produksi Daging - Domba	Ton	598,00	601,00	604,00	607,00	611,00	614,00	617,00		DISPERTAPANG

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
IV.6.9	Produksi Daging - Ayam	Ton	12.887,00	12.952,00	13.017,00	13.082,00	13.147,00	13.213,00	13.279,00		DISPERTAPANG
IV.6.10	Produksi Telur - Ayam Buras	Ton	494,00	496,00	499,00	501,00	504,00	506,00	509,00		DISPERTAPANG
IV.6.11	Produksi Telur - Ayam Ras Petelur	Ton	16.156,00	16.237,00	16.318,00	16.400,00	16.482,00	16.564,00	16.647,00		DISPERTAPANG
IV.6.12	Produksi Telur - itik	Ton	627,00	630,00	633,00	636,00	639,00	642,00	646,00		DISPERTAPANG
IV.6.13	Produksi Telur - Burung Puyuh	Ton	567,00	570,00	573,00	576,00	579,00	581,00	584,00		DISPERTAPANG
-	**Perdagangan**										
IV.6.14	Nilai Usaha Perdagangan	Rupiah	2.716.540.427.770,00	2.790.643.014.858,50	2.865.527.205.476,43	2.941.228.019.000,25	3.017.782.113.075,26	3.095.227.879.979,02	3.173.605.522.852,97		DISDAG
-	**Perindustrian**										
IV.6.15	Nilai Usaha Industri	Rp	2.729.943.713.736,49	2.732.693.188.016,50	2.735.445.369.345,69	2.738.200.259.828,91	2.740.957.861.567,46	2.743.718.176.659,05	2.746.481.207.197,74		DISPERINKOP UKM
IV.7	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**										
IV.7.1	Nilai LPPD	Nilai / kategori	sedang (3,3346)	sedang (3,3246)	sedang (3,3274)	sedang (3,3376)	sedang (3,3567)	sedang (3,3807)	Tinggi (3,4097)		SETDA
IV.7.2	Nilai Kinerja TPID	Nilai	94,93	94,95	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40		SETDA
IV.7.3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja AKIP	Nilai	12,69	12,71	12,73	12,75	12,77	12,79	12,81		SETDA
IV.7.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	82,61	82,65	82,70	82,75	82,80	82,85	82,90		SETDA
IV.7.5	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Nilai	84,81	85,00	85,10	85,20	85,30	85,40	85,50	berdasarkan rakortek PUPR ditetapkan target kab/kota 75 SKK/th	SETDA
IV.7.6	Persentase Kinerja DPRD yang Terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		SETWAN
IV.8	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**										
-	**Perencanaan**										
IV.8.1	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja & Pengukuran Kinerja	Nilai	52,41	52,49	52,57	52,65	52,73	52,81	52,85		BAPPERIDA
-	**Penelitian dan Pengembangan**										
IV.8.2	Satuan Inovasi Daerah yang Matang	Inovasi	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00		BAPPERIDA
-	**Keuangan**										

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
IV.8.3	Persentase Realisasi Belanja APBD	%	95,51	95,70	95,89	96,08	96,27	96,46	96,65		BKAD
IV.8.4	Persentase Nilai Aset Tetap yang Ada, Tercatat dan Berfungsi	%	88,00	88,88	89,76	90,64	91,54	92,45	93,36		BKAD
IV.8.5	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	%	25,60	26,11	26,62	27,15	27,69	28,24	28,80		BKAD
-	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**										
IV.8.6	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	83,03	83,10	83,20	83,40	83,60	83,80	84,00		BKPSDM
IV.9	**Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan**										
IV.9.1	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3,19	3,20	3,21	3,22	3,23	3,24	3,25		IRDA
IV.9.2	Capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)	%	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00		IRDA
IV.9.3	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada LHE AKIP	Nilai	18,65	19,00	20,00	21,00	22,00	22,50	23,00		IRDA
IV.10	**Unsur Kewilayahan**										
IV.10.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	Nilai	87,21	87,24	87,29	87,34	87,39	87,44	87,49		12 KAPANEWON
IV.11	**Urusan Pemerintahan Umum**										
IV.11.1	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		BAKESBANGPOL
	INDIKATOR KINERJA KUNCI										***PERANGKAT DAERAH (SUMBER DATA)***
	PENDIDIKAN										
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	90,38	90,48	90,58	90,68	90,78	90,88	90,98		DISDIKPORA
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95,76	95,86	95,96	96,06	96,16	96,26	96,36		DISDIKPORA
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	95,80	95,90	96,00	96,10	96,20	96,30	96,40		DISDIKPORA
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	%	88,92	88,93	88,94	88,95	88,96	88,97	88,98		DISDIKPORA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan										
	KESEHATAN										
1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	per 1.000 penduduk	1,58	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16		DISKES
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	94,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	94,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	93,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	93,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	94,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKES
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DPUPKP
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	97,75	98,13	98,50	98,88	99,25	99,63	100,00		DPUPKP
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,86	99,05	99,24	99,43	99,62	99,81	100,00		DPUPKP
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DPUPKP
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	74,29	68,87	69,03	69,18	69,34	69,49	69,65		DPUPKP
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DPUPKP
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DPUPKP
	PERUMAHAN										
1.d.1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DPUPKP
1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	unit	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		DPUPKP
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100,00	2,24	3,16	2,89	2,63	2,11	2,63		DPUPKP
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	6.344,00	6.094,00	5.844,00	5.644,00	5.444,00	5.194,00	4.944,00		DPUPKP

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DPUPKP
	TRANTIBUMLINMAS										
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		SATPOL PP
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		SATPOL PP
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	87,98	88,04	88,11	88,17	88,24	88,31	88,37		BPBD
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	55,12	55,17	55,23	55,29	55,34	55,40	55,46		BPBD
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		BPBD
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		BPBD
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		11,27	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		BPBD
	SOSIAL										
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISSOS P3A
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISSOS P3A
	KETENAGAKERJAAN										
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISNAKER

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	48,23	49,57	50,23	51,57	52,23	53,57	54,23		DISNAKER
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		46.964.365,35	47.411.645,02	47.863.184,49	48.319.024,35	48.779.205,53	49.243.769,39	49.712.757,67		DISNAKER
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35,12	38,69	44,12	53,94	55,88	58,82	61,76		DISNAKER
2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	82,40	83,80	85,20	86,60	88,00	89,40	90,80		DISNAKER
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	6,00	6,10	6,20	6,30	6,35	6,39	6,40		DISSOS P3A
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISSOS P3A
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk	19,24	12,69	10,24	8,41	6,98	5,83	4,90		DISSOS P3A
	PANGAN										
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	34,78	37,72	42,72	47,72	52,72	57,72	62,72	Penambahan 5 ton per tahun. Kecuali di tahun 2025 ada penambahan 9 ton namun ada pengurangan hitungan 4,2 ton karena cadangan pangan ini berasal dari Kementerian Pertanian	DISPERTAPANG
	PERTANAHAN										
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISPERTARU

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan										
2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISPERTARU
2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISPERTARU
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DISPERTARU
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISPERTARU
2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISPERTARU
	LINGKUNGAN HIDUP										
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	65,46	69,75	69,84	69,93	70,03	70,12	70,22		DLH
2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	%	46,27	48,70	50,13	51,99	58,52	65,84	74,78		DLH
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	50,00	52,86	54,29	57,14	60,00	62,86	65,72		DLH
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,46	99,47	99,48	99,49	99,50	99,51	99,52		DISDUKCAPIL
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	81,71	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50	85,55		DISDUKCAPIL
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,48	99,50	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75		DISDUKCAPIL
2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat daerah	11,00	12,00	12,00	13,00	13,00	14,00	14,00		DISDUKCAPIL
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DPMKAL DALDUK KB

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.l.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	82,76	87,36	89,66	91,95	95,40	100,00	100,00		DPMKAL DALDUK KB
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB										
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,98	1,99	2,00	1,99	1,99	1,99	1,99		DPMKAL DALDUK KB
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	68,24	59,24	60,10	61,37	62,24	63,06	64,09		DPMKAL DALDUK KB
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,57	15,00	14,60	14,00	13,50	13,00	12,50		DPMKAL DALDUK KB
	PERHUBUNGAN										
2.n.1	Rasio konektivitas	nilai	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82		DISHUB
2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	nilai	0,10	0–0,2	0–0,2	0–0,2	0–0,2	0–0,2	0–0,2		DISHUB
	KOMINFO										
2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKOMINFO
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKOMINFO
2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKOMINFO
	KOPERASI DAN UKM										
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	76,21	79,71	83,17	87,08	90,95	94,79	99,06		DISPERINKOP UKM
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISPERINKOP UKM
	PENANAMAN MODAL										
2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	14,53	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,54	1,64	1,74	1,84	1,94	2,04	2,14		DISDIKPORA DAN DISPERINKOP UKM
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	17,59	17,69	17,79	17,89	17,99	18,09	18,19		DISDIKPORA DAN BAKESBANGPOL
2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00		DISDIKPORA
	STATISTIK										
2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKOMINFO
2.s.2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISKOMINFO
	PERSANDIAN										
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	68,06	47,05	48,05	49,05	50,05	51,05	52,05		DISKOMINFO
	BUDAYA										
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		DISBUD
	PERPUSTAKAAN										
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	74,55	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50		DISPERPUSIP
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	nilai	96,23	96,33	96,43	96,53	96,63	96,73	96,83		DISPERPUSIP
	KEARSIPAN										
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	59,48	60,50	61,50	62,50	63,50	64,50	65,50		DISPERPUSIP
2.w2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	81,49	81,79	82,09	82,39	82,69	82,99	83,33		DISPERPUSIP
	KELAUTAN DAN PERIKANAN										

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	ton	19.159,00	19.184,00	19.244,00	19.324,00	19.404,00	19.484,00	19.584,00		DISLAUTKAN
	PARIWISATA										
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-30,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		DISPAR
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	0,31	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96		DISPAR
3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	23,37	22,00	23,00	24,00	24,00	24,00	24,00		DISPAR
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,88	3,82	3,98	4,14	4,30	4,45	4,61		DISPAR
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	8,12	8,35	7,06	7,42	7,90	8,54	8,60		DISPAR
	PERTANIAN										
3.c1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	751,59	755,35	759,12	762,92	766,73	770,57	774,42	kenaikan 0,5% pertahun	DISPERTAPANG
3.c2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-13,45	-13,18	-12,91	-12,66	-12,40	-11,91	-11,67	penurunan 2% pertahun	DISPERTAPANG
	ESDM										
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DPMPTSP DAN BAG. PEM
	PERDAGANGAN										
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DISDAG
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	47,86	49,30	50,77	52,30	53,87	55,48	57,15	kenaikan 3% pertahun	DISPERTAPANG
3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	56,58	90,50	91,74	92,68	93,74	94,38	95,88		DISDAG
	PERINDUSTRIAN										
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	rasio	0,81	0,81	0,83	0,92	0,97	1,08	1,19		DISDAG

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	107,92	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00		DISDAG
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		DISDAG
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DISDAG
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		DISDAG
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Jumlah informasi	115,00	115,00	125,00	125,00	125,00	135,00	135,00		DISDAG
	PERENCANAAN DAN KEUANGAN										
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	19,27	19,30	19,46	19,66	19,85	20,05	20,25		BKAD
4.a.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	20,40	20,40	20,60	20,81	21,02	21,23	21,44		BKAD
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	nilai	3,00	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,31		IRDA
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	nilai	3,00	3,20	3,21	3,22	3,23	3,24	3,25		IRDA
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	70,88	70,90	71,59	72,30	73,03	73,76	74,50		BKAD
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	nilai	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		BKAD
	PENGADAAN										

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BAG. PBJ
4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	0,15	0,64	0,59	0,58	0,55	0,54	0,49		BAG. PBJ
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		BAG. PBJ
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	68,60	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00	71,50		BAG. PBJ
	KEPEGAWAIAN										
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	64,08	64,15	64,74	65,08	65,38	65,71	65,90	Pegawai yang dihitung adalah ASN (PNS dan PPPK)	BKPSDM / BAG. PEM
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	28,74	27,37	27,75	28,82	30,07	31,09	31,81	Pegawai Fungsional = ASN Jabatan Fungsional (PNS dan PPPK)	BKPSDM / BAG. PEM
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	46,31	46,65	47,06	47,98	48,03	48,50	48,99	bersertifikat kompetensi, diasumsikan ASN yang telah mengikuti Diklat Fungsional	BKAD
	MANAJEMEN KEUANGAN										
4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,83	0,83	0,84	0,85	0,86	0,86	0,87		BKAD
4.d.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5,50	5,50	5,56	5,61	5,67	5,72	5,78		BKAD
4.d.3	Assets Management	nilai	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		BKAD
4.d.4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	4,39	4,39	4,43	4,48	4,52	4,57	4,61		BKAD
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK										

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	95,51	95,70	95,89	96,08	96,27	96,46	96,65		BKAD DAN BAG. PEM
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		BKAD DAN BAG. PEM

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, 2025

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak dasar warga negara, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penetapan target SPM dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

SPM merupakan instrumen kebijakan minimum yang wajib dicapai oleh pemerintah daerah dalam lima urusan pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang (air minum dan sanitasi), perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Target yang ditetapkan disusun secara bertahap dan terukur selama periode perencanaan 2025–2030, serta mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan teknis sektoral dari kementerian terkait.

Penetapan target ini mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain: capaian SPM tahun sebelumnya, ketersediaan sumber daya, kapasitas fiskal daerah, serta hasil analisis kebutuhan pelayanan dasar yang diperoleh melalui proses perencanaan partisipatif dan pendekatan berbasis data. Target SPM juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Selanjutnya, rincian target SPM untuk masing-masing urusan pelayanan dasar di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2025–2030 disajikan dalam Tabel 4.2-3.

Tabel 4.2-3 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2025–2030

BIDANG URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						PD PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PENDIDIKAN											
	1	**Pendidikan Anak Usia Dini**	%	98,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIKPORA
		a.) Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Nilai		97,78	98,03	98,28	98,54	98,79	99,05	DISDIKPORA
		b.) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%		77,09	77,5	77,91	78,32	78,73	79,14	DISDIKPORA
		c.) Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%		76,83	77,58	78,33	79,08	79,83	80,58	DISDIKPORA
	2	**Pendidikan Dasar**	%	99,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIKPORA
		a.) Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	69,19	71,69	74,19	76,69	79,19	81,69	84,19	DISDIKPORA
		b.) Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	82,91	84,01	85,11	86,21	87,31	88,41	89,51	DISDIKPORA
		c.) Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	58,81	61,71	64,61	67,51	70,41	73,31	76,21	DISDIKPORA
		d.) Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	70,70	72,2	73,7	75,2	76,7	78,2	79,7	DISDIKPORA
		e.) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 SD/SMP	Nilai	98,61	98,72	98,82	98,92	99,03	99,13	99,24	DISDIKPORA
		f.) Iklim Inklusivitas SD	Nilai	60,32	62,82	65,32	67,82	70,32	72,82	75,32	DISDIKPORA
		g.) Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	60,04	62,44	64,84	67,24	69,64	72,04	74,44	DISDIKPORA
		h.) Iklim Keamanan SD	Nilai	79,33	80,23	81,13	82,03	82,93	83,83	84,73	DISDIKPORA
		i.) Iklim Keamanan SMP	Nilai	72,82	74,32	75,82	77,32	77,82	80,32	81,82	DISDIKPORA
		j.) Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	76,59	77,59	78,59	79,59	80,59	81,59	82,59	DISDIKPORA

BIDANG URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						PD PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		k.) Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	72,70	73,7	74,7	75,7	76,7	77,7	78,7	DISDIKPORA
	3	**Pendidikan Kesetaraan**	%	98,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIKPORA
		a.) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Nilai	14,09	14,85	15,62	16,38	17,14	17,91	18,67	DISDIKPORA
KESEHATAN											
	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	91,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	97,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	97,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
	4	Pelayanan Kesehatan Balita	%	95,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
	5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	95,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
	6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	97,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
	7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	90,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
	8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	93,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
	9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	95,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
	10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	94,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
	11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	92,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES

BIDANG URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						PD PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	92,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISKES
PEKERJAAN UMUM											
	1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPUPKP
	2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PERUMAHAN RAKYAT											
	1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPUPKP
	2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DPUPKP
TRANTIBUM											
	1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	SATPOL PP
KEBENCANAAN											
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD

BIDANG URUSAN	NO.	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET						PD PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
DAMKAR											
	1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
SOSIAL											
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISSOS P3A
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISSOS P3A
	3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISSOS P3A
	4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISSOS P3A
	5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISSOS P3A

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, 2025

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029, telah dirumuskan sejumlah program pembangunan daerah yang menjadi prioritas intervensi strategis lintas urusan pemerintahan. Program-program ini dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan masing-masing program dikoordinasikan oleh tiga unsur Asisten dalam struktur Sekretariat Daerah, yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membidangi pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat;
2. Asisten Pembangunan dan Sumber Daya Alam, yang mengkoordinasikan program penguatan ekonomi lokal serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan; dan
3. Asisten Administrasi Umum, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Rangkaian program prioritas tersebut menjadi dasar dalam pengukuran capaian pembangunan secara sistematis dan terarah, sekaligus memperkuat kesinambungan kebijakan lintas tahun dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Rincian Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo disajikan dalam Tabel 4.2-4.

Tabel 4.2-4 Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat	Capaian Sasaran Daerah Lingkup Pemerintahan dan Kesra	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ast. Pemerintahan dan Kesra
2	Program Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Capaian Sasaran Daerah Lingkup Perekonomian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ast. Perekonomian dan Pembangunan
3	Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Capaian Sasaran Daerah Lingkup Infrastruktur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ast. Perekonomian dan Pembangunan
4	Program Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Capaian Sasaran Daerah Lingkup Penunjang Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Ast. Adm. Umum

Sumber: Bapperida Kab. Kulon Progo, 2025

BAB 5 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang bersifat strategis, operasional, dan integratif. Dokumen ini disusun guna menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas pembangunan daerah secara terukur dan sistematis. RPJMD ini diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2045 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo.

RPJMD ini juga merupakan bagian integral dari sistem perencanaan nasional dan regional. Dalam konteks nasional, RPJMD Kulon Progo mengacu dan mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yaitu ***"Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan",*** dan Visi RPJMN 2025–2029 yakni ***"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".*** Di tingkat provinsi, RPJMD ini terintegrasi dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022–2027 yang berorientasi pada ***"Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi".***

Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025–2029 tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan isu-isu strategis jangka menengah, tetapi juga menjadi sarana pengawalan terhadap transformasi struktural lintas sektor menuju pencapaian visi jangka panjang daerah: ***"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan (SEMARAK)".***

Dokumen ini menerapkan pendekatan berbasis hasil *(outcome-based policy),* yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan. Fokus diarahkan pada penguatan faktor-faktor pengungkit pembangunan yang diyakini mampu mempercepat pencapaian visi, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dalam konteks dinamika demokrasi dan perubahan global.

Keberhasilan implementasi RPJMD sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti *(evidence-based decision making),* serta penguatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan menjadi prasyarat utama. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan, sinergi antar sektor, dan partisipasi publik perlu terus diperkuat dan diinstitusionalisasi.

Setiap Perangkat Daerah (PD) diharapkan menjadikan RPJMD ini sebagai pedoman utama dalam menyusun rencana kerja, anggaran, dan target kinerja yang selaras dengan arah pembangunan daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang secara terpadu diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan jangka menengah: ***"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya yang Berkelanjutan"*** melalui pelaksanaan empat misi pembangunan daerah yang saling menguatkan, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang makmur, berbudaya, dan religius;

2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance,* aspiratif, serta mewujudkan masyarakat yang aman dan demokratis;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang lestari serta tangguh bencana.

Sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan, RPJMD Tahun 2025–2029 juga secara eksplisit memuat rencana program dan arah pembangunan hingga tahun 2030. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah terpilih periode 2030–2034. Dengan demikian, RPJMD ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen strategis lima tahunan, tetapi juga sebagai penghubung antar siklus pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang secara konsisten dan berkelanjutan.

5.1 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini harus konfirmasi ulang pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan yang akan dilaksanakan memiliki alokasi anggaran yang memadai dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

Dalam kondisi kelangkaan pendanaan, maka tiap PD harus meningkatkan kualitas belanjanya melalui peningkatan prioritas dan inovasi serta penghematan anggaran. Hal lain yang harus diperhatikan saat penganggaran adalah ketepatan desain subkegiatan yang meliputi: ketepatan bentuk aktivitas subkegiatan (aktivitas yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target IKU dan IKD), ketepatan kelompok sasaran, ketepatan lokasi kegiatan, ketepatan waktu pelaksanaan dan ketepatan kemitraan dengan PD lainnya.

5.2 Kerangka Pengendalian

Pencapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen RPJMD ini sangat tergantung pada ketepatan pengendalian pencapaiannya. Diharapkan agar setiap PD dapat mengoptimalkan pengendalian pada tahap perencanaan tahunan dan pengendalian tahap pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, baik secara horizontal (antar PD di Kabupaten Kulon Progo) maupun secara vertikal (antar tingkatan pemerintahan). Selain itu, pengendalian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas desain subkegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo, dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dengan demikian, perencanaan yang matang dan konsisten akan menjadi fondasi yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan yang efektif.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin bahwa setiap subkegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini meliputi pemantauan pelaksanaan kegiatan prioritas, mitigasi risiko yang mungkin muncul selama pelaksanaan, serta evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, juga dilakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama dan program pembangunan daerah yang mendukung sasaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Melalui pengendalian yang ketat dan komprehensif, diharapkan dapat diidentifikasi secara dini setiap penyimpangan atau masalah yang mungkin terjadi, sehingga dapat segera diambil tindakan korektif untuk memastikan pembangunan tetap berada pada jalur yang ditargetkan.

Dengan sistem pengendalian yang efektif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yakin bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan baik, serta mampu mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Hal ini akan berkontribusi pada terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan.

5.3 Sistem Insentif

Pencapaian target RPJMD ini juga memerlukan integrasi dengan sistem insentif yang dilembagakan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja. Artinya, *cascading* kinerja diturunkan hingga ke level perjanjian kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Melalui sistem ini, insentif diberikan berdasarkan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan utama pembangunan.

Kinerja diukur dari aspek, yaitu konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta aspek pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) termasuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) tiap bidang urusan, yang berfungsi untuk melacak kemajuan dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain itu, sistem insentif juga dirancang untuk memotivasi pelaku pembangunan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Insentif untuk kelompok ini dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya yang dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan. Dengan sistem insentif yang baik, diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan semua pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif, sehingga mempercepat pencapaian tujuan utama pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

5.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif menjadi kunci untuk mitigasi risiko terhadap perubahan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Dalam situasi *force majeure* seperti perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, target RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 dapat diperbarui melalui perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo. Pembaruan target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik memegang peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan

bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik serta dapat mengundang partisipasi publik dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian kebijakan pembangunan. Komunikasi publik didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor yang obyektif, akuntabel, inovatif, dan profesional. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat diakses dengan mudah serta murah oleh berbagai pihak. Selain itu, komunikasi publik juga menjunjung tinggi keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis, berbasis data yang valid dan menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan publik yang beragam. Dalam praktiknya, komunikasi publik melibatkan dua pemangku kepentingan utama, yaitu perangkat daerah dan masyarakat luas. Komunikasi dengan perangkat daerah dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar mereka dapat memberikan masukan yang berharga terhadap prioritas pembangunan. Sementara itu, komunikasi dengan masyarakat umum, termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta lansia, dilakukan dengan berbagai metode komunikasi yang memudahkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam pembangunan. Metode ini memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, atau dukungan terhadap kebijakan dan program pemerintah. Komunikasi publik dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kapanewon, hingga kabupaten, untuk membangun pemahaman yang mendalam dan partisipasi yang luas dari masyarakat. Selain itu, komunikasi publik juga mengutamakan keterbukaan serta menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif kepada informasi. Dengan demikian, komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan, sehingga memastikan kerjasama antar pihak dalam pencapaian target-target pembangunan.

5.6 Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029, pembiayaan program pembangunan menjadi aspek yang tidak terpisahkan. Pembiayaan yang tepat dan efektif akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat.

1. **Peningkatan Kualitas Belanja di Tiap Perangkat Daerah.**

   Setiap Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Kulon Progo akan fokus pada peningkatan kualitas belanja. Hal ini mencakup peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA). Dengan pendekatan yang lebih cermat dan terperinci, PD dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan memberikan nilai tambah bagi pembangunan. Pemilihan subkegiatan yang harus menjadi prioritas dan inovatif juga akan menjadi fokus utama. Subkegiatan yang memiliki dampak strategis bagi pencapaian target pembangunan akan mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran. Selain itu, inovasi dalam pelaksanaan program akan didorong untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang lebih baik.

2. **Harmonisasi Belanja dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat.**

Koordinasi yang baik dan harmonisasi belanja antara PD di Kabupaten Kulon Progo dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta kementerian dan lembaga pemerintah pusat akan terus diperkuat. Hal ini akan memastikan bahwa pendanaan dari berbagai sumber tersebut dapat saling melengkapi dan bekerja bersama untuk mendukung program pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang terpadu dan komunikasi yang intensif, akan terhindar dari adanya tumpang tindih atau kelangkaan pendanaan pada sektor tertentu. Harmonisasi ini juga akan memungkinkan adanya sinergi program, sehingga hasil yang dicapai lebih besar dari pada jumlah individual dari setiap program.

3. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.**

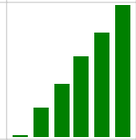
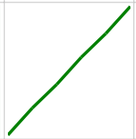
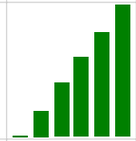
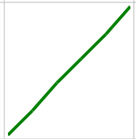
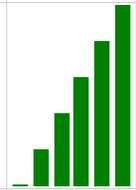
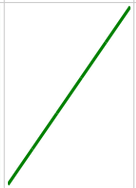
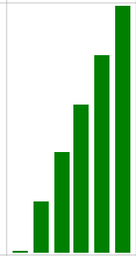
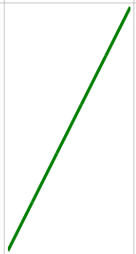
   Peningkatan kapasitas pembiayaan juga akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Intensifikasi akan difokuskan pada optimalisasi sumber-sumber PAD yang sudah ada. Hal ini termasuk peningkatan efisiensi pengumpulan pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ekstensifikasi PAD akan dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengembangkan sumber-sumber baru yang potensial. Antara lain melalui pengembangan usaha milik daerah, pemanfaatan sumber daya alam secara lestari yang dapat menghasilkan pendapatan, serta atraksi investasi yang dapat memberikan kontribusi bagi PAD.

Selain dari tiga pilar utama di atas, Pemerintah Daerah Kulon Progo juga akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kerja sama dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonbank, akan dioptimalkan untuk mengakses pembiayaan yang lebih luas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan perencanaan juga akan menjadi perhatian, agar tersedia kompetensi yang memadai untuk mengelola pembiayaan pembangunan secara profesional.

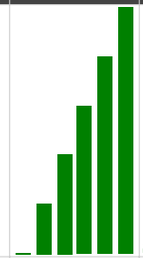
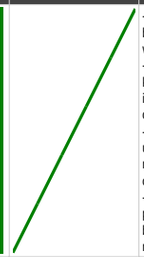
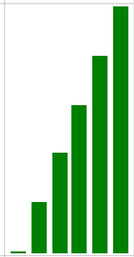
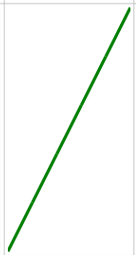
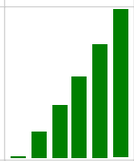
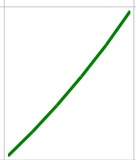
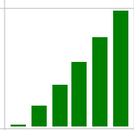
Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana akan dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi ini, Pemerintah Daerah Kulon Progo meyakini bahwa pembiayaan pembangunan yang mencukupi dan efektif akan terjamin, sehingga dapat mendorong tercapainya target-target pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dengan pengelolaan pembiayaan pembangunan yang cermat, terencana, dan terkoordinasi dengan baik, Pemerintah Daerah Kulon Progo optimistis bahwa Kabupaten Kulon Progo akan berkembang secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

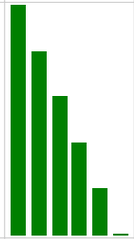
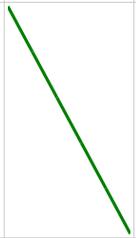
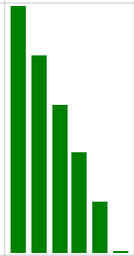
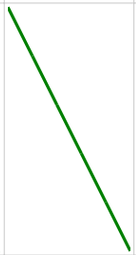
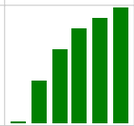
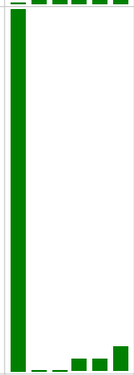
Lampiran 1: Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO. IKU DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN		DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	DASAR HUKUM / SUMBER
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*			
M1.T1.IKU01	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Nilai**	**76,18**	**76,00–76,23**	**76,40–76,69**	**76,80–77,16**	**77,20–77,62**	**77,60–78,09**	**78,00–78,55**	**IUP**			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.	IPM dihitung dengan rumus sebagai berikut:	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (03.07.011).
		MIN	*76,18*	*76,00*	*76,40*	*76,80*	*77,20*	*77,60*	*78,00*						
		MAX		*76,23*	*76,69*	*77,16*	*77,62*	*78,09*	*78,55*						
M1.T1.S1.IKU02	**Usia Harapan Hidup**	**Tahun**	**75,49**	**75,50–79,75**	**75,58–79,83**	**75,65–79,90**	**75,73–79,98**	**75,80–80,05**	**75,88–80,13**	**IUP**			Usia harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (04.01.0199).
		MIN	*75,49*	*75,50*	*75,58*	*75,65*	*75,73*	*75,80*	*75,88*						
		MAX		*79,75*	*79,83*	*79,90*	*79,98*	*80,05*	*80,13*						
M1.T1.S2.IKU03	**Harapan Lama Sekolah**	**Tahun**	**14,49**	**14,63–15,72**	**14,7–15,79**	**14,78–15,87**	**14,85–15,94**	**14,93–16,01**	**15,00–16,09**	**IUP**			Harapan lama sekolah adalah lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	Harapan Lama Sekolah =FKi=7nEitPit ***) Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren Eit = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t Pit = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (06.01.002).
		MIN	*14,49*	*14,63*	*14,70*	*14,78*	*14,85*	*14,93*	*15,00*						
		MAX		*15,72*	*15,79*	*15,87*	*15,94*	*16,01*	*16,09*						
M1.T2.IKU04	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**15,62**	**14,12–15,12**	**13,69–14,69**	**13,26–14,26**	**12,83–13,83**	**12,40–13,40**	**11,90–12,97**	**IUP**			Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis kemiskinan ini merupakan batas pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.	Tingkat Kemiskinan (%) = (Jumlah Penduduk Miskin / Jumlah Seluruh Penduduk) * 100%	BPS
		MIN	*15,62*	*14,12*	*13,69*	*13,26*	*12,83*	*12,40*	*11,90*						
		MAX		*15,12*	*14,69*	*14,26*	*13,83*	*13,40*	*12,97*						
M1.T2.S1.IKU05	**Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan**	**Ribu Rupiah**	**10.990,00**	**10.732,40–11.732,40**	**10.987,60–11.987,60**	**11.242,80–12.242,80**	**11.498,00–12.498,00**	**11.753,20–12.753,20**	**12.008,40–13.008,40**	**Hasil regresi**			Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity- PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan = (Pengeluaran per Kapita / PPP)	BPS
		MIN	*10.990,00*	*10.732,40*	*10.987,60*	*11.242,80*	*11.498,00*	*11.753,20*	*12.008,40*						
		MAX		*11.732,40*	*11.987,60*	*12.242,80*	*12.498,00*	*12.753,20*	*13.008,40*						
M1.T3.IKU06	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	**Nilai**	**63,31**	**64,00–66,00**	**65,00–67,00**	**66,00–68,00**	**67,00–69,00**	**68,00–70,00**	**69,00–71,00**	**IUP**			Indeks pembangunan kebudayaan merupakan Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.	IPK = j = 17Wj x indeks Dj ***) Keterangan: IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan Wj = Bobot dimensi ke-j Dj = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (Dj): Indeks Dj=i=1nSXjinj×100 ***) Keterangan: Dj = Dimensi ke-j SXji = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi nj = Jumlah indikator dimensi ke-j	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (08.02.002).
		MIN	*63,31*	*64,00*	*65,00*	*66,00*	*67,00*	*68,00*	*69,00*						
		MAX		*66,00*	*67,00*	*68,00*	*69,00*	*70,00*	*71,00*						

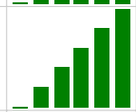
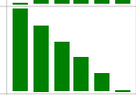
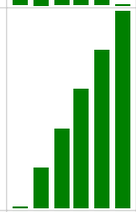
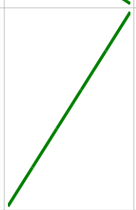
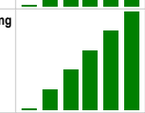
Lampiran 1: Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO. IKU DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN		DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	DASAR HUKUM / SUMBER
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*			
M1.T3.S1.IKU07	**Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Nilai**	**58,91**	**60,00–61,00**	**60,50–61,50**	**61,00–62,00**	**61,50–62,50**	**62,00–63,00**	**62,50–63,50**				- Dimensi Ekonomi Budaya menunjukkan bagaimana sektor budaya berkontribusi pada ekonomi suatu negara atau wilayah. - Dimensi Ketahanan Sosial menyoroti kemampuan suatu kebudayaan untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya yang relevan dengan dukungan kondisi sosial dalam masyarakat. - Dimensi Ekspresi budaya didefinisikan sebagai sarana untuk melestarikan keberagaman budaya global seraya mendorong kreativitas masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya mereka. - Dimensi Warisan Budaya merujuk pada upaya pelestarian, pemeliharaan, dan pengembangan benda dan praktik budaya yang menjadi bagian integral dari identitas suatu masyarakat.	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan = (Indeks Dimensi Ekonomi Budaya + Ketahanan Sosial Budaya + Warisan Budaya + Ekspresi Budaya) / 4	Bapperida Kulon Progo
		MIN	*58,91*	*60,00*	*60,50*	*61,00*	*61,50*	*62,00*	*62,50*						
		MAX		*61,00*	*61,50*	*62,00*	*62,50*	*63,00*	*63,50*						
M2.T1.IKU08	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,77**	**4,78–5,38**	**4,80–5,40**	**4,82–5,42**	**4,84–5,44**	**4,86–5,46**	**4,88–5,48**				Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan.	Pertumbuhan Ekonomi(%) = ((PDB tahun berjalan – PDB tahun sebelumnya) / PDB tahun sebelumnya) x 100%	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (09.05.011).
		MIN	*4,77*	*4,78*	*4,80*	*4,82*	*4,84*	*4,86*	*4,88*						
		MAX		*5,38*	*5,40*	*5,42*	*5,44*	*5,46*	*5,48*						
M2.T1.S1.IKU09	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**% PDRB**	**41,98**	**41,02–42,22**	**41,03–42,23**	**41,04–42,24**	**41,05–42,25**	**41,06–42,26**	**41,07–42,27**	**Menggunakan ADHK**			Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) merupakan share PMTB terhadap PDB Nasional.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) = PMTBPDB ADHK x 100% ***) Keterangan: - Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) - PDB ADHK = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (02.08.035).
		MIN	*41,98*	*41,02*	*41,03*	*41,04*	*41,05*	*41,06*	*41,07*						
		MAX		*42,22*	*42,23*	*42,24*	*42,25*	*42,26*	*42,27*						
M2.T1.S1.IKU10	**PDRB Per Kapita (ADHB)**	**Ribu Rupiah**	**37.976,26**	**40.043–40.272**	**42.865–43.357**	**45.874–46.666**	**49.087–50.221**	**52.516–54.036**	**56.179–58.136**				PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.	PDRB per Kapita = PDRB ADHB / Populasi ***) Keterangan: - PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku - Populasi = jumlah penduduk regional - t = periode	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (09.02.053).
		MIN	*37.976,26*	*40.043,00*	*42.865,00*	*45.874,00*	*49.087,00*	*52.516,00*	*56.179,00*						
		MAX		*40.272,00*	*43.357,00*	*46.666,00*	*50.221,00*	*54.036,00*	*58.136,00*						
M2.T1.S1.IKU11	**Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum**	**Miliar rupiah**	**655,55**	**684,46–1.228,98**	**766,86–1.360,34**	**857,40–1.504,26**	**956,80–1.661,85**	**1.063,43–1.831,90**	**1.182,74–2.020,43**				PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan demikian, Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah jumlah nilai tambah dari aktivitas terkait pariwisata yang meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan serta penyediaan jasa makan dan minum di Kulon Progo.	PDRB Penyediaan Akomodasi makan minum = Nilai tambah sektor penyedia akomodasi dan makan minum	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (02.11.014).
		MIN	*655,55*	*684,46*	*766,86*	*857,40*	*956,80*	*1.063,43*	*1.182,74*						
		MAX		*1.228,98*	*1.360,34*	*1.504,26*	*1.661,85*	*1.831,90*	*2.020,43*						
M2.T1.S2.IKU12	**Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan**	**Miliar rupiah**	**1.709,15**	**1.892,11–1.984,03**	**2.048,17–2.159,39**	**2.216,00–2.349,08**	**2.396,46–2.554,25**	**2.592,87–2.778,58**	**2.801,62–3.018,70**				PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dengan demikian, Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah jumlah nilai tambah dari aktivitas terkait industri pengolahan di Kulon Progo.	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan = Nilai tambah sektor Industri Pengolahan	BPS
		MIN	*1.709,15*	*1.892,11*	*2.048,17*	*2.216,00*	*2.396,46*	*2.592,87*	*2.801,62*						

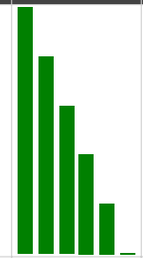
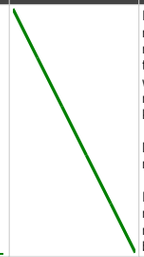
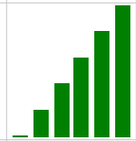
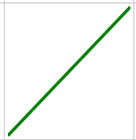
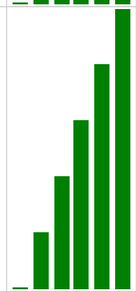
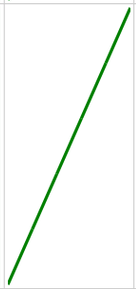
Lampiran 1: Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO. IKU DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN		DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	DASAR HUKUM / SUMBER
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*			
		MAX		*1.984,03*	*2.159,39*	*2.349,08*	*2.554,25*	*2.778,58*	*3.018,70*						
M2.T2.IKU13	**Rasio Gini**	**Nilai**	**0,37**	**0,372–0,402**	**0,371–0,401**	**0,370–0,400**	**0,369–0,399**	**0,368–0,398**	**0,367–0,397**	**IUP**			Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Rasio Gini bernilai1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.	Rasio Gini = 1-i=1n(pi-pi-1)(Yi-Yi-1) ***) Keterangan: - pi = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i; - Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i; - n = jumlah observasi	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (04.02.065).
		MIN	*0,37*	*0,37*	*0,37*	*0,37*	*0,37*	*0,37*	*0,37*						
		MAX		*0,40*	*0,40*	*0,40*	*0,40*	*0,40*	*0,40*						
M2.T2.S2.IKU14	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**%**	**2,01**	**1,95–2,55**	**1,90–2,50**	**1,90–2,45**	**1,90–2,40**	**1,90–2,35**	**1,90–2,30**	**IUP**			Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	TPT= PPPAK x 100% ***) Keterangan: - TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%); - PP = Jumlah pengangguran (orang); - PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (06.02.061).
		MIN	*2,01*	*1,95*	*1,90*	*1,90*	*1,90*	*1,90*	*1,90*						
		MAX		*2,55*	*2,50*	*2,45*	*2,40*	*2,35*	*2,30*						
M3.T1.IKU15	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**87,04**	**87,50**	**87,90**	**88,20**	**88,40**	**88,50**	**88,60**				Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran "terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif" serta "terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional".	Nilai RB General + Nilai RB Tematik	PermenPAN RB No. 9 Tahun 2023
M3.T1.S1.IKU16	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)**	**Nilai**	**3,91**	**4,11–4,61**	**1,41–1,50**	**1,41–1,50**	**1,51–1,60**	**1,51–1,60**	**1,61–1,70**	**IUP; Transisi Indikator Baru; Target 2025 adalah Indeks SPBE, Target 2026-2030 adalah Indeks Pemdi**			[01.] Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE): Indeks SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. [02.] Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi): Indeks Pemdi merupakan sasaran dalam kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 yang masuk dalam sasaran pertama yaitu Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah. Tujuan utama dari Indeks Pemdi adalah: 1. Menciptakan layanan digital yang terpadu, terpersonofikasi, dan user centric; 2. Mewujudkan birokrasi yang lincah dan adaptif; dan 3. Mewujudkan ASN bertalenta digital.	[01.] Indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut, dimana: - NDj adalah nilai indeks domain ke-j; - BDj adalah nilai bobot domain ke-j. [02.] Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) dihitung berdasarkan 35 indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek dengan bobot tiap aspek variatif. Indeks Pemdi menggunakan rentang skala 5 sebagai berikut: 1 - <1,8 : Kurang 1,8 - < 2.6 : Cukup 2,6 - <3,5 : Baik 3,5 - <4,2 : Sangat Baik 4,2 - 5 : Memuaskan	KemenPAN RB
		MIN	*3,91*	*4,11*	*1,41*	*1,41*	*1,51*	*1,51*	*1,61*						
		MAX		*4,61*	*1,50*	*1,50*	*1,60*	*1,60*	*1,70*						
M3.T1.S1.IKU17	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)**	**Nilai**	**A (83,75)**	**A (84,2)**	**A (85,3)**	**A (86,4)**	**A (87,5)**	**A (88,1)**	**A (88,66)**				Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Penjumlahan dari komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal.	PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021

Lampiran 1: Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO. IKU DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN		DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	DASAR HUKUM / SUMBER
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*			
M3.T1.S1.IKU18	Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				Opini BPK atas akuntabilitas pengelola keuangan daerah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4. Efektivitas sistem pengendalian intern	Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN
M3.T1.S1.IKU19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,80	86,85	86,90	86,95	87,00	87,05	87,10				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari survey kepuasan masyarakat tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	Nilai rata-rata dari total nilai IKM Perangkat Daerah (PD)/ Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dibagi jumlah PD/ UPT yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik	Bagian Organisasi, Setda Kulon Progo
M3.T1.S1.IKU20	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,20	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27				Indeks Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penjumlahan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1-5 yang kemudian diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Skor ini juga menunjukkan skor MRI dan IEPK.	Peraturan BPKP RI No. 5 Tahun 2021
M3.T2.IKU21	Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (Crime Rate)	kejahatan per 100.000 penduduk	62,70	62,00	61,00	60,00	59,00	58,00	57,00	IUP			Crime rate adalah ngka yang menggambarkan risiko terjadinya sejumlah tindak kejahatan pada setiap 100.000 orang penduduk.	Crime Rate = (Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun t/Jumlah Penduduk) x 100.000	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (05.02.047).
M3.T2.S1.IKU22	Indeks Harmoni Indonesia (IHal)	Nilai	7,32	7,38	7,42	7,46	7,50	7,54	7,58				Indeks Harmoni Indonesia (IHal) dikembangkan sebagai sistem pengukuran yang bertujuan untuk mengukur tingkat harmoni sosial.	Survei online yang menjangkau setidaknya 5.000 responden dari masyarakat. 1. Dimensi: IHal terdiri dari 4 dimensi utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. 2. Variabel: Setiap dimensi diuraikan menjadi 10 variabel yang lebih spesifik, yang mencerminkan faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni di masyarakat. 3. Indikator: Untuk setiap variabel, terdapat 32 indikator yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek spesifik dari variabel tersebut.	Kementerian Dalam Negeri RI
M3.T2.S1.IKU23	Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda digunakan untuk mengukur penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda.	Jumlah patroli, pengawalan dan penertiban yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah patroli, pengawalan dan penertiban yang direncanakan.	Satpol PP Kulon Progo
M4.T1.IKU24	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,61	88,70	88,75	88,80	88,85	88,90	88,95	Hasil Audit Tata Ruang			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang digunakan untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang yang berjalan terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah diperdakan.	(% Kesesuaian Struktur Ruang + % Kesesuaian Pola Ruang)/2	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kulon Progo
M4.T1.S1.IKU25	Persentase Kesesuaian Pola Ruang	%	89,86	89,90	89,95	90,00	90,05	90,10	90,15	Hasil Audit Tata Ruang			Persentase kesesuaian pola ruang adalah tingkat kesesuaian lokasi dan program perwujudan pola ruang (kawasan peruntukan/ zonasi lindung dan budi daya) dalam rencana pembangunan daerah dengan indikasi lokasi dan program perwujudan pola ruang (kawasan peruntukan/ zonasi lindung dan budi daya) dalam RTRW.	(persentase kesesuaian lokasi perwujudan pola ruang + persentase kesesuaian program perwujudan pola ruang)/ 2	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kulon Progo
M4.T1.S2.IKU26	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Angka	48,40	49,28	50,15	51,03	51,91	52,79	53,66				Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum digunakan untuk mengukur kondisi infrastruktur pekerjaan umum di suatu wilayah, mencakup berbagai aspek seperti jalan, irigasi, drainase, permukiman, dan sarana prasarana perhubungan.	((Jumlah jalan kondisi mantap/ jumlah jalan)+(jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman/ jumlah rumah tangga))/2	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo
M4.T1.S2.IKU27	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service/LOS)	Kategori	A (0,10)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	A / Arus Bebas (0–0,2)	V/C Ratio			LOS adalah ukuran kinerja ruas jalan atau simpang yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas, kecepatan, kepadatan, dan hambatan yang terjadi.	Berdasarkan PKJI, tingkatan LOS dari A hingga F, dengan LOS A menunjukkan kondisi terbaik (lalu lintas lancar) dan LOS F menunjukkan kondisi terburuk (lalu lintas sangat padat). LOS A: Kondisi arus bebas, kecepatan tinggi, dan tidak ada hambatan. LOS B: Arus stabil, kecepatan masih tinggi, namun mulai ada hambatan kecil. LOS C: Arus stabil, namun kecepatan mulai menurun dan hambatan mulai terasa. LOS D: Arus mendekati kondisi tidak stabil, kecepatan menurun, dan hambatan cukup terasa. LOS E: Arus tidak stabil, kecepatan sangat rendah, dan hambatan sangat terasa. LOS F: Arus terhenti atau macet, kecepatan sangat rendah atau nol, dan hambatan sangat parah	Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) Kementerian PUPR, 2023

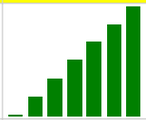
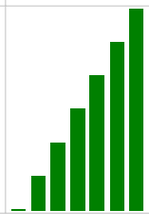
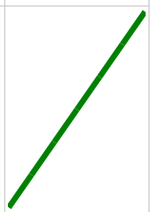
Lampiran 1: Metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO. IKU DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN		DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	DASAR HUKUM / SUMBER
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*			
M4.T1.IKU28	**Indeks Risiko Bencana**	**Nilai**	**152,65**	**136,71–141,71**	**135,07–140,07**	**133,44–138,44**	**131,80–136,80**	**130,17–135,17**	**128,53–133,53**	**IUP**			IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	Risk = (Hazard x Vulnerability) / Capacity	KEPMEN BAPPENAS/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025; Kode Indikator (05.02.2013).
		MIN	*152,65*	*136,71*	*135,07*	*133,44*	*131,80*	*130,17*	*128,53*						
		MAX		*141,71*	*140,07*	*138,44*	*136,80*	*135,17*	*133,53*						
M4.T1.S1.IKU29	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Nilai**	**65,46**	**69,75**	**69,84**	**69,93**	**70,03**	**70,12**	**70,22**	**IUP**			IKLH merupakan hasil pemantauan kualitas lingkungan terutama untuk mengendalikan dan mengurangi beban pencemaran yang dibuang ke lingkungan yang berasal dari sektor industri dan kegiatan masyarakat. Pengukuran IKLH dilakukan dengan metode dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dilakukan setiap tahun. Komponen IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).	IKLH = (37,6% x IKA) + (40,5% x IKU) + (21,9% x IKL)	Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2024
M4.T1.S2.IKU30	**Indeks Ketahanan Daerah**	**Nilai**	**0,64**	**0,65**	**0,66**	**0,67**	**0,68**	**0,69**	**0,70**				Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. BNPB melakukan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator yang terkelompokan dalam 7 program prioritas, yaitu: (1) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan; (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu; (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik; (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana; (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.	Penjumlahan skor seluruh indikator, dibagi jumlah total indikator	https://inarisk.bnpb.go.id

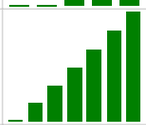
Lampiran 2: Metadata Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO.	NAMA ASISTEN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**												
		Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat	**Capaian Sasaran Daerah Lingkup Pemerintahan dan Kesra**	**%**	**Jumlah sasaran daerah pada lingkup pemerintahan dan kesra yang tercapai / Jumlah sasaran daerah lingkup pemerintahan dan kesra x 100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah sasaran daerah pada urusan pemerintahan dan kesra yang tercapai	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	
					Jumlah sasaran daerah urusan pemerintahan dan kesra Harapan Hidup; Indeks Keluarga Sehat; Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah.	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*	
2	**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**												
		Program Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	**Capaian Sasaran Daerah Lingkup Perekonomian**	**%**	**Jumlah sasaran daerah pada lingkup perekonomian yang tercapai / Jumlah sasaran daerah lingkup perekonomian x 100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah sasaran daerah pada lingkup perekonomian yg tercapai	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
					Jumlah sasaran daerah lingkup perekonomlan	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	
					Sasaran daerah lingkup perekonomian : Pendapatan perkapita penduduk (ADHB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka								
3	**ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**												
		Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	**Capaian Sasaran Daerah Lingkup Infrastruktur**	**%**	**Jumlah sasaran daerah pada lingkup infrastruktur yang tercapai / Jumlah sasaran daerah lingkup infrastruktur x 100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah sasaran daerah pada lingkup infrastruktur yg tercapai	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
					Jumlah sasaran daerah lingkup infrastruktur	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
					Sasaran daerah lingkup infrastruktur : Indeks Pembangunan Infrastruktur; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; Persentase Penanggulangan Bencana.								
4	**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**												
		Program Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	**Capaian Sasaran Daerah Lingkup Penunjang Pemerintahan dan Keamanan Ketertiban**	**%**	**Jumlah sasaran daerah pada lingkup penunjang pemerintahan yang tercapai / Jumlah sasaran daerah lingkup penuniang pemerintahan x 100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	
					Jumlah sasaran daerah pada lingkup penunjang pemerintahan yg tercapai	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
					jumlah sasaran daerah lingkup penunjang pemerintahan	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	*4*	
					Sasaran daerah lingkup penunjang pemerintahan : Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (AKIP); Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK); Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Peningkatan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial.								

Lampiran 3: Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (IKP PD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
1.	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**														
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah*	**Persentase Sarana Prasarana di Satuan Pendidikan Kondisi Layak**	**%**	**(Jumlah Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana / Jumlah Seluruh Satuan Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo (TK, SD, SMP, SKB-PKBM)) x 100%**	**73,35**	**73,45**	**73,56**	**73,66**	**73,76**	**73,87**	**73,97**			
					Jumlah sarana prasarana di satuan pendidikan kondisi layak	*18.531,00*	*18.631,00*	*18.731,00*	*18.831,00*	*18.931,00*	*19.031,00*	*19.131,00*			
					Jumlah sarana prasarana di satuan pendidikan	*25.264,00*	*25.364,00*	*25.464,00*	*25.564,00*	*25.664,00*	*25.764,00*	*25.864,00*			
			Persentase Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan	**%**	**(Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan / Jumlah Seluruh Peserta Didik) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Layanan Pendidikan	*55.230,00*	*55.060,00*	*55.335,00*	*55.889,00*	*56.448,00*	*57.012,00*	*57.582,00*			
					TK	*8.038,00*	*7.976,00*	*8.016,00*	*8.096,00*	*8.177,00*	*8.259,00*	*8.341,00*			
					SD	*31.077,00*	*30.974,00*	*31.129,00*	*31.440,00*	*31.755,00*	*32.072,00*	*32.393,00*			
					SMP	*15.413,00*	*15.313,00*	*15.390,00*	*15.543,00*	*15.699,00*	*15.856,00*	*16.014,00*			
					Kesetaraan (SKB/PKBM)	*702,00*	*797,00*	*801,00*	*809,00*	*817,00*	*825,00*	*834,00*			
					Jumlah Seluruh Peserta Didik (TK, SD, SMP, Kesetaraan)	*55.230,00*	*55.060,00*	*55.335,00*	*55.889,00*	*56.448,00*	*57.012,00*	*57.582,00*			
					TK	*8.038,00*	*7.976,00*	*8.016,00*	*8.096,00*	*8.177,00*	*8.259,00*	*8.341,00*			
					SD	*31.077,00*	*30.974,00*	*31.129,00*	*31.440,00*	*31.755,00*	*32.072,00*	*32.393,00*			
					SMP	*15.413,00*	*15.313,00*	*15.390,00*	*15.543,00*	*15.699,00*	*15.856,00*	*16.014,00*			
					Kesetaraan (SKB/PKBM)	*702,00*	*797,00*	*801,00*	*809,00*	*817,00*	*825,00*	*834,00*			
					**DO:* *Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan adalah Peserta didik yang mendapatkan: Pembiayaan, Akses media Pembelajaran, Akses bahan Pustaka, Pembimbingan dan Konseling.*										
			Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi (SD dan SMP)	**%**	**(Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi SD) + (Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi SD) + (Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Literasi SMP) + (Persentase Peserta Didik yang Telah Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi SMP) / 4**	**84,23**	**84,33**	**84,43**	**84,53**	**84,63**	**84,73**	**84,83**			
					Persentase peserta didik yang Telah mencapai kompetensi minimum Literasi SD	*88,29*	*88,39*	*88,49*	*88,59*	*88,69*	*88,79*	*88,89*			
					Persentase peserta didik yang Telah mencapai kompetensi minimum Numerasi SD	*78,71*	*78,81*	*78,91*	*79,01*	*79,11*	*79,21*	*79,31*			
					Persentase peserta didik yang Telah mencapai kompetensi minimum Literasi SMP	*86,70*	*86,80*	*86,90*	*87,00*	*87,10*	*87,20*	*87,30*			

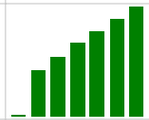
Lampiran 3: Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (IKP PD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Persentase peserta didik yang Telah mencapai kompetensi minimum Numerasi SMP	*83,20*	*83,30*	*83,40*	*83,50*	*83,60*	*83,70*	*83,80*			
			Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik	**%**	**(Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, dan SMP) + Jumlah Guru (TK, SD dan SMP)) x 100%**	**56,43**	**56,96**	**57,25**	**57,53**	**57,81**	**58,08**	**58,64**			
					Guru yang Bersertifikat Pendidik (TK, SD, dan SMP)	*2.564,00*	*2.616,00*	*2.658,00*	*2.700,00*	*2.742,00*	*2.784,00*	*2.840,00*			
					TK	*163,00*	*166,00*	*169,00*	*172,00*	*175,00*	*178,00*	*181,00*			
					SD	*1.790,00*	*1.826,00*	*1.852,00*	*1.878,00*	*1.904,00*	*1.930,00*	*1.956,00*			
					SMP	*611,00*	*623,00*	*635,00*	*647,00*	*659,00*	*671,00*	*697,00*			
					Kesetaraan (SKB/PKBM)	*0,00*	*1,00*	*2,00*	*3,00*	*4,00*	*5,00*	*6,00*			
					Jumlah Guru (TK, SD dan SMP)	*4.544,00*	*4.593,00*	*4.643,00*	*4.693,00*	*4.743,00*	*4.793,00*	*4.843,00*			
					TK	*603,00*	*615,00*	*627,00*	*639,00*	*651,00*	*663,00*	*675,00*			
					SD	*2.786,00*	*2.813,00*	*2.841,00*	*2.869,00*	*2.897,00*	*2.925,00*	*2.953,00*			
					SMP	*1.045,00*	*1.055,00*	*1.065,00*	*1.075,00*	*1.085,00*	*1.095,00*	*1.105,00*			
					Kesetaraan (SKB/PKBM)	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*			
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	*Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan*	**Persentase Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik**	**%**	**(Jumlah Satuan Pendidikan yang Memenuhi Standar Jumlah Pendidik) / (Jumlah Seluruh Satuan Pendidikan di Kulon Progo) x 100%**	***sengaja n/a**		**41,88**	**43,36**	**44,70**	**46,17**	**47,65**	**IKP 2026–2030**		
					Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik	**sengaja n/a*		*312,00*	*323,00*	*333,00*	*344,00*	*355,00*			
					TK	**sengaja n/a*		*169,00*	*174,00*	*179,00*	*184,00*	*190,00*			
					SD	**sengaja n/a*		*139,00*	*143,00*	*147,00*	*152,00*	*156,00*			
					SMP	**sengaja n/a*		*2,00*	*3,00*	*4,00*	*5,00*	*6,00*			
					Kesetaraan (SKB/PKBM)	**sengaja n/a*		*2,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*			
					Jumlah seluruh satuan pendidikan di Kulon Progo	**sengaja n/a*		*745,00*	*745,00*	*745,00*	*745,00*	*745,00*			
					TK	**sengaja n/a*		*327,00*	*327,00*	*327,00*	*327,00*	*327,00*			
					SD	**sengaja n/a*		*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*	*335,00*			
					SMP	**sengaja n/a*		*67,00*	*67,00*	*67,00*	*67,00*	*67,00*			
					kesetaraan (SKB/PKBM)	**sengaja n/a*		*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*			
					**DO:* *Jumlah Satuan Pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik adalah* *- TK (1 Guru untuk 1 Rombel + Kepala sekolah)* *- SD (1 Guru untuk 1 Rombel + Kepala sekolah + 1 guru Agama + 1 Penjas)* *- SMP (1 Guru untuk 1 Rombel + Kepala sekolah + Guru MAPEL)*										
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	*Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan*	**Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi dengan Satuan Pendidikan**	**Kurikulum**	**Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Terintegrasi**	***sengaja n/a**		**2,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**IKP 2026–2030**		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	*Meningkatnya daya saing kepemudaan*	**Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaaan, Sosial Kemasyarakatan, dan Wirausaha**	**%**	**(Jumlah Pemuda yang Ikut Organisasi Pemuda + Jumlah Pemuda yang Ikut Kegiatan Sosial Kemasyarakatan + Jumlah Pemuda Wirausaha) / (Jumlah Pemuda Keseluruhan Pemuda) x 100%**	**35,00**	**35,66**	**36,33**	**37,01**	**37,71**	**38,41**	**39,14**			
					Jumlah Pemuda yang ikut Organisasi pemuda + jumlah pemuda yang Ikut Kegiatan sosial kemasyarakatan + jumlah pemuda wirausaha	*32.800,00*	*33.456,00*	*34.125,00*	*34.808,00*	*35.504,00*	*36.214,00*	*36.938,00*			

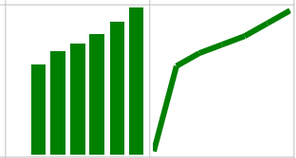
Lampiran 3: Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (IKP PD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Organisasi Pemuda	*16.482,00*	*16.812,00*	*17.148,00*	*17.491,00*	*17.841,00*	*18.197,00*	*18.561,00*			
					Kegiatan Kemasyarakatan	*14.386,00*	*14.674,00*	*14.967,00*	*15.267,00*	*15.572,00*	*15.883,00*	*16.201,00*			
					Wirausaha	*1.932,00*	*1.971,00*	*2.010,00*	*2.050,00*	*2.091,00*	*2.133,00*	*2.176,00*			
					Jumlah Keseluruhan Pemuda Usia 16-30 tahun	*93.711,00*	*93.823,00*	*93.935,00*	*94.047,00*	*94.159,00*	*94.271,00*	*94.383,00*			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	*Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga*	**Persentase Atlet yang Mengikuti Pembinaan Intensif.**	**%**	**Jumlah Atlet yang Mengikuti Pembinaan / Jumlah Atlet yang diseleksi) x 100%**	**55,24**	**55,58**	**55,78**	**56,00**	**56,18**	**56,53**	**56,72**			
					Atlet yang mengikuti pembinaan	*411,00*	*528,00*	*415,00*	*532,00*	*418,00*	*537,00*	*422,00*			
					Atlet yang diseleksi	*744,00*	*950,00*	*744,00*	*950,00*	*744,00*	*950,00*	*744,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya implementasi pendidikan berbasis budaya*	**Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya**	**%**	**Jumlah SD, SMP, SMA dan SMK yang menerapkan pendidikan berbasis budaya / jumlah SD & SMP x 100%**	**N/A**	**26,87**	**32,84**	**38,81**	**44,78**	**50,75**	**56,72**			
					Jumlah SD & SMP yang menerapkan pendidikan berbasis budaya	*N/A*	*108,00*	*132,00*	*156,00*	*180,00*	*204,00*	*228,00*			
					jumlah SD & SMP	*402,00*	*402,00*	*402,00*	*402,00*	*402,00*	*402,00*	*402,00*			
2.	**Dinas Kesehatan**														
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	*Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat*	**Persentase FASYANKES yang Memiliki Sarana Prasarana Kesehatan yang Memenuhi Standar**	**%**	**Jumlah FASYANKES yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan yang memenuhi standar / Jumlah FASYANKES yang ada x 100%**	**81,25**	**83,33**	**91,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah FASYANKES yg memiliki sarana prasarana & alkes yang memenuhi standar	*39,00*	*40,00*	*45,00*	*49,00*	*49,00*	*49,00*	*49,00*			
					Jumlah FASYANKES yg ada	*48,00*	*48,00*	*49,00*	*49,00*	*49,00*	*49,00*	*49,00*			
			Persentase Pencapaian Layanan SPM Kesehatan:	**-**											
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**%**	**Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran ibu hamil yang ada x 100%**	**91,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	*3.353,00*	*3.464,00*	*3.391,00*	*3.310,00*	*3.234,00*	*3.154,00*	*3.009,00*			
					Jumlah sasaran ibu hamil yang ada	*3.673,00*	*3.464,00*	*3.391,00*	*3.310,00*	*3.234,00*	*3.154,00*	*3.009,00*			
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	**%**	**Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada x 100%**	**99,85**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	*3.406,00*	*3.420,00*	*3.349,00*	*3.268,00*	*3.192,00*	*3.158,00*	*2.946,00*			
					Jumlah sasaran ibu bersalin yang ada	*3.411,00*	*3.420,00*	*3.349,00*	*3.268,00*	*3.192,00*	*3.158,00*	*2.946,00*			
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	**%**	**Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran bayi lahir yang ada x 100%**	**98,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah bayi lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	*3.374,00*	*3.408,00*	*3.329,00*	*3.122,00*	*3.170,00*	*3.095,00*	*2.774,00*			
					Jumlah sasaran bayi lahir yang ada	*3.418,00*	*3.408,00*	*3.329,00*	*3.122,00*	*3.170,00*	*3.095,00*	*2.774,00*			
			Pelayanan Kesehatan Balita	**%**	**Jumlah balita yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran balita yang ada x 100%**	**94,96**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah balita yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	*19.291,00*	*19.711,00*	*19.210,00*	*19.016,00*	*18.824,00*	*18.643,00*	*18.543,00*			
					Jumlah sasaran balita yang ada	*20.314,00*	*19.711,00*	*19.210,00*	*19.016,00*	*18.824,00*	*18.643,00*	*18.543,00*			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	**%**	**Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar/ Jumlah sasaran anak usia dasar yang ada x 100%**	**96,42**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah anak usia dasar yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	*51.454,00*	*53.063,00*	*53.063,00*	*56.761,00*	*57.896,00*	*59.053,00*	*60.234,00*			
					Jumlah sasaran anak usia dasar yang ada	*53.366,00*	*53.063,00*	*53.063,00*	*56.761,00*	*57.896,00*	*59.053,00*	*60.234,00*			
			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	**%**	**Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah sasaran warga negara usia produktif yang ada x 100%**	**98,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah warga negara usia produktif yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	*73.939,00*	*74.000,00*	*81.400,00*	*89.540,00*	*98.494,00*	*108.343,00*	*108.343,00*			
					Jumlah sasaran warga negara usia produktif yang ada	*75.449,00*	*74.000,00*	*81.400,00*	*89.540,00*	*98.494,00*	*108.343,00*	*108.343,00*			
			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	**%**	**Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah sasaran usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar x 100%**	**90,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah penduduk usia lanjut yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	*60.928,00*	*61.004,00*	*61.406,00*	*62.634,00*	*63.876,00*	*65.143,00*	*65.500,00*			
					Jumlah sasaran usia lanjut yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	*67.249,00*	*61.004,00*	*61.406,00*	*62.634,00*	*63.876,00*	*65.143,00*	*65.500,00*			
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	**%**	**Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang ada x 100%**	**94,73**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	*12.946,00*	*12.946,00*	*13.000,00*	*13.050,00*	*13.100,00*	*13.150,00*	*13.150,00*			
					Jumlah estimasi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang ada	*13.666,00*	*12.946,00*	*13.000,00*	*13.050,00*	*13.100,00*	*13.150,00*	*13.150,00*			
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	**%**	**Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus yang ada x 100%**	**98,07**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah penderita DM yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	*4.870,00*	*4.870,00*	*5.000,00*	*5.150,00*	*5.300,00*	*5.400,00*	*5.400,00*			
					Jumlah estimasi penderita DM yg ada	*4.966,00*	*4.870,00*	*5.000,00*	*5.150,00*	*5.300,00*	*5.400,00*	*5.400,00*			
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**%**	**Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar / Jumlah proyeksi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang ada x 100%**	**93,54**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah ODGJ berat yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	*1.418,00*	*1.430,00*	*1.450,00*	*1.435,00*	*1.421,00*	*1.407,00*	*1.393,00*			
					Jumlah proyeksi ODGJ berat yg ada	*1.516,00*	*1.430,00*	*1.450,00*	*1.435,00*	*1.421,00*	*1.407,00*	*1.393,00*			
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	**%**	**Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang ada x 100%**	**93,30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah orang terduga TB yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	*4.318,00*	*4.318,00*	*4.218,00*	*4.118,00*	*4.018,00*	*3.918,00*	*3.918,00*			
					Jumlah orang terduga TB yg ada	*4.628,00*	*4.318,00*	*4.218,00*	*4.118,00*	*4.018,00*	*3.918,00*	*3.918,00*			
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	**%**	**Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah orang terduga menderita HIV yang ada x 100%**	**94,39**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg mendapatkan pelayanan sesuai standar	*5.671,00*	*5.690,00*	*5.710,00*	*5.725,00*	*5.745,00*	*5.755,00*	*5.755,00*			
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yg ada	*6.008,00*	*5.690,00*	*5.710,00*	*5.725,00*	*5.745,00*	*5.755,00*	*5.755,00*			
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	**%**	**Jumlah penderita TB yang sensitif obat yang ditemukan satu tahun sebelumnya / Jumlah penderita TB sensitif obat yang mendapat pengobatan lengkap & sembuh x 100%**	**86,88**	**90,23**	**91,29**	**92,24**	**93,11**	**94,12**	**95,02**			
					Jumlah penderita TB sensitif obat yang mendapat pengobatan lengkap & sembuh	*245,00*	*277,00*	*304,00*	*333,00*	*365,00*	*400,00*	*439,00*			
					Jumlah penderita TB yang sensitif obat yang ditemukan satu tahun sebelumnya	*282,00*	*307,00*	*333,00*	*361,00*	*392,00*	*425,00*	*462,00*			
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	**%**	**Jumlah penderita TB yang ditemukan dan diobati/ Jumlah penderita TB yang ditemukan dan diobati x 100%**	**40,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah penderita TB yang ditemukan dan diobati	*353,00*	*867,00*	*741,00*	*635,00*	*560,00*	*503,00*	*459,00*			
					Target penderita TB yang harus ditemukan dan diobati	*869,00*	*867,00*	*741,00*	*635,00*	*560,00*	*503,00*	*459,00*			
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	**%**	**Jumlah penduduk yang menjadi anggota JKN / Jumlah total Penduduk x 100%**	**99,11**	**99,14**	**99,18**	**99,21**	**99,24**	**99,28**	**99,31**			
					Jumlah penduduk yang menjadi anggota JKN	*440.548,00*	*440.700,00*	*440.850,00*	*441.000,00*	*441.150,00*	*441.300,00*	*441.450,00*			
					Jumlah total Penduduk	*444.516,00*	*444.516,00*	*444.516,00*	*444.516,00*	*444.516,00*	*444.516,00*	*444.516,00*			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD Wates*	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD WATES**	**Angka**	**(Total dari Nilai Persepsi Per Unsur SKM x Nilai Penimbang) / Total Unsur yg terisi**	***transisi**		**86,00**	**86,50**	**86,50**	**87,00**	**87,00**	**IKP 2026–2030**		
					Persyaratan										
					Sistem, Mekanisme, dan Prosedur										
					Waktu Penyelesaian										
					Biaya/Tarif										
					Produk Spesifikasi jenis pelayanan										
					Kompetensi pelaksana										
					Perilaku pelaksana										
					Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan										
					Sarana dan Prasarana										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD Nyi Ageng Serang*	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD NAS**	**Angka**	**(Total dari Nilai Persepsi Per Unsur SKM x Nilai Penimbang) / Total Unsur yg terisi**	***transisi**		**85,75**	**86,25**	**86,50**	**86,75**	**86,75**	**IKP 2026–2030**		
					Persyaratan										
					Sistem, Mekanisme, dan Prosedur										
					Waktu Penyelesaian										

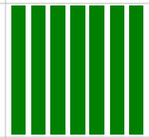
Lampiran 3: Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (IKP PD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

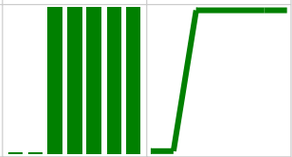
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Biaya/Tarif										
					Produk Spesifikasi jenis pelayanan										
					Kompetensi pelaksana										
					Perilaku pelaksana										
					Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan										
					Sarana dan Prasarana										
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	*Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan*	**Persentase Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dilakukan kredensial**	**%**	**Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Telah dilakukan Kredensial / Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Harus di Kredensial x 100%**	**97,53**	**97,59**	**97,64**	**97,68**	**97,73**	**97,77**	**97,81**			
				Orang	**Jumlah Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang Telah dilakukan kredensial**	**1.186,00**	**1.217,00**	**1.241,00**	**1.265,00**	**1.289,00**	**1.313,00**	**1.337,00**			
				Orang	**Jumlah Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang harus di kredensial**	**1.216,00**	**1.247,00**	**1.271,00**	**1.295,00**	**1.319,00**	**1.343,00**	**1.367,00**			
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	*Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman*	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pendampingan**	**%**	**(Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan Pendampingan) / (Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang ada (terdaftar)) x 100%**	**0,00**	**22,22**	**25,56**	**27,78**	**30,00**	**33,33**	**36,67**			
				Unit	**Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan**	**0,00**	**20,00**	**23,00**	**25,00**	**27,00**	**30,00**	**33,00**			
				Unit	**Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg ada**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**			
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	**%**	**Jumlah Kumulatif TPP yg Mendapatkan SLHS / Jumlah TPP yang Wajib SLHS x 100%**	**2,80**	**6,16**	**9,52**	**13,17**	**16,81**	**20,73**	**24,65**			
				Unit	**Jumlah kumulatif TPP yg mendapatkan SLHS**	**10,00**	**22,00**	**34,00**	**47,00**	**60,00**	**74,00**	**88,00**			
				Unit	**Jumlah TPP yang wajib SLHS**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**	**357,00**			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	*Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan*	**Persentase Kel/Kalurahan yang Menerapkan GERMAS**	**%**	**Jumlah Kel/Kalurahan yang Menerapkan GERMAS / Jumlah Kel/Kalurahan yang Ada x 100%**	**13,64**	**30,68**	**47,73**	**64,77**	**81,82**	**100,00**	**100,00**			
				Kel/Kalurahan	**Jumlah Kel/kalurahan yang menerapkan GERMAS**	**12,00**	**27,00**	**42,00**	**57,00**	**72,00**	**88,00**	**88,00**			
				Kel/Kalurahan	**Jumlah Kel/kalurahan yang ada**	**88,00**	**88,00**	**88,00**	**88,00**	**88,00**	**88,00**	**88,00**			
	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	*Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan*	**Persentase FASYANKES yang Sudah Terakreditasi**	**%**	**Jumlah FASYANKES yang Terakreditasi / Jumlah FASYANKES yang Ada x 100%**	***transisi**		**47,83**	**51,09**	**54,35**	**57,61**	**59,78**	**IKP 2026–2030**		
				Unit	**jumlah fasyankes yang sudah terakreditasi**	***transisi**		**44,00**	**47,00**	**50,00**	**53,00**	**55,00**			
				Unit	**jumlah fasyankes yang ada**	***transisi**		**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**	**92,00**			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)	*Meningkatnya inovasi layanan publik*	**Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik**	**%**	**Jumlah Iinovasi yang diimplementasikan / Jumlah Inovasi Seharusnya x 100%**	**4,76**	**23,81**	**28,57**	**33,33**	**38,10**	**42,86**	**47,62**			
					Jumlah inovasi yang diimplementasikan	*1,00*	*5,00*	*6,00*	*7,00*	*8,00*	*9,00*	*10,00*			
					Jumlah inovasi seharusnya	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*			

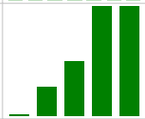
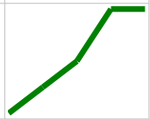
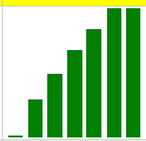
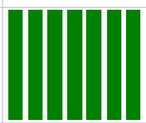
Lampiran 3: Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (IKP PD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

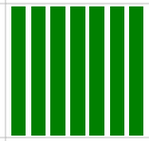
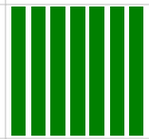
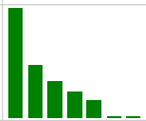
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya pelayanan trauma centre RSUD Nyi Ageng Serang*	**Persentase pemenuhan sarana prasarana trauma centre**	**%**	**Pelaksanaan pemenuhan sarpras trauma centre / kebutuhan pemenuhan sarpras trauma centre x 100%**	***transisi**			**25,00**	**50,00**	**75,00**	**100,00**	**IKP 2027–2030**		
					Pelaksanaan pemenuhan sarpras trauma centre	**transisi*			*10,00*	*20,00*	*30,00*	*40,00*			
					Kebutuhan pemenuhan sarpras trauma centre	**transisi*			*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*			
3.	**Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman**														
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	*Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi*	**Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik**	**%**	**(Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik / Panjang Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten) x 100%**	**64,65**	**64,94**	**65,22**	**65,51**	**65,80**	**66,08**	**66,37**			
					Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik (meter)	*126.352,00*	*126.912,00*	*127.472,00*	*128.032,00*	*128.592,00*	*129.152,00*	*129.712,00*			
					Panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten (meter)	*195.436,00*	*195.436,00*	*195.436,00*	*195.436,00*	*195.436,00*	*195.436,00*	*195.436,00*			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	*Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum*	**Capaian Akses Air Minum Layak**	**%**	**(Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih Akses Layak / Jumlah Rumah Tangga) x 100%**	**97,75**	**98,12**	**98,46**	**98,87**	**99,25**	**99,62**	**100,00**			
					Jumlah rumah tangga berakses air bersih akses layak	*153.302,00*	*155.063,00*	*157.340,00*	*159.768,00*	*162.171,00*	*164.606,00*	*167.076,00*			
					Jumlah rumah tangga	*156.824,00*	*158.026,00*	*159.796,00*	*161.586,00*	*163.396,00*	*165.226,00*	*167.076,00*			
					**DO:* *rumah tangga = KK* *berakses air bersih = akses air minum layak berkelanjutan baik dari sumber perpipaan maupun non perpipaan terlindungi*										
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	*Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah*	**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	**%**	**(Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah Aman / Jumlah Rumah Tangga) x 100%**	**8,15**	**8,34**	**8,53**	**8,72**	**8,91**	**9,10**	**9,29**			
					Jumlah rumah tangga berakses air limbah aman	*12.781,00*	*13.179,00*	*13.631,00*	*14.090,00*	*14.559,00*	*15.036,00*	*15.521,00*			
					Jumlah rumah tangga	*156.824,00*	*158.026,00*	*159.796,00*	*161.586,00*	*163.396,00*	*165.226,00*	*167.076,00*			
					**DO:* *akses air limbah = akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman (jamban sehat baik komunal maupun individu serta disedot secara berkala)*										
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	*Meningkatnya kualitas bangunan gedung*	**Persentase Gedung Pemerintah dan Bangunan Lainnya dalam Kondisi Baik**	**%**	**(Jumlah Gedung Pemerintah dan Bangunan Lain Dalam Kondisi Baik dan ber-PBG/ Jumlah Bangunan) x 100 %**	**58,73**	**58,77**	**58,80**	**58,83**	**58,87**	**58,90**	**58,93**			
					Jumlah Gedung Pemerintah dan Bangunan Lain Dalam Kondisi Baik dan Ber PBG	*71.670,00*	*71.852,00*	*72.034,00*	*72.216,00*	*72.398,00*	*72.580,00*	*72.762,00*			
					Jumlah Gedung Pemerintah dan Bangunan Lain	*122.025,00*	*122.265,00*	*122.505,00*	*122.745,00*	*122.985,00*	*123.225,00*	*123.465,00*			
					**DO:* *Kondisi baik dan Ber PBG*										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	*Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman*	**Rasio Penanganan Jalan**	**%**	**(Panjang Jalan Kabupaten yang ditangani (km) / Panjang Jalan Kabupaten (km)) x 100%**	**7,77**	**7,93**	**8,11**	**8,24**	**8,37**	**8,53**	**8,69**			

Lampiran 3: Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (IKP PD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Panjang jalan kabupaten yang ditangani (km)	*62,80*	*64,03*	*65,47*	*66,58*	*67,59*	*68,93*	*70,18*			
					Panjang jalan kabupaten (km).	*807,76*	*807,76*	*807,76*	*807,76*	*807,76*	*807,76*	*807,76*			
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	*Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi*	**Capaian Layanan Jasa Konstruksi**	**%**	**(Jumlah Permohonan Uji Laboratorium yang ditangani / Jumlah Permohonan Uji Lab) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah permohonan uji laboratorium yang ditangani	*541,00*	*470,00*	*490,00*	*510,00*	*530,00*	*550,00*	*570,00*			
					Jumlah permohonan uji lab	*541,00*	*470,00*	*490,00*	*510,00*	*530,00*	*550,00*	*570,00*			
			Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Kompetensi Kerja SKK	**%**	**(Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi / Jumlah Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) Konstruksi	*59,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*80,00*			
					Jumlah kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) Konstruksi	*59,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*80,00*			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	*Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah*	**Persentase Keterisian Hunian**	**%**	**(Jumlah Unit Hunian yang disediakan Pemerintah yang Terhuni / Jumlah Unit Hunian yang Disediakan Pemerintah) x 100%**	**45,86**	**46,99**	**47,74**	**47,74**	**47,74**	**48,12**	**48,12**			
					Jumlah unit hunian yang disediakan pemerintah Yang Terhuni	*122,00*	*125,00*	*127,00*	*127,00*	*127,00*	*128,00*	*128,00*			
					Jumlah Unit Hunian yang Disediakan Pemerintah	*266,00*	*266,00*	*266,00*	*266,00*	*266,00*	*266,00*	*266,00*			
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	*Meningkatnya kualitas kawasan permukiman*	**Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani**	**%**	**(Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani / Jumlah Keseluruhan Rumah Tidak Layak Huni) x 100%**	**10,32**	**4,10**						**IKP 2025**		
					Jumlah penanganan rumah tidak layak huni	*655,00*	*250,00*								
					Jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni	*6.344,00*	*6.094,00*								
					**DO:* *Jumlah RTLH yang dilaksanakan pada tahun N*										
			Persentase jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	**%**	**(Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani / Jumlah Keseluruhan Rumah Tidak Layak Huni) x 100%**	***transisi**		**19,76**	**24,89**	**30,40**	**36,68**	**43,59**	**IKP 2026–2030**		
					Jumlah penanganan rumah tidak layak huni	**transisi*		*1.155,00*	*1.405,00*	*1.655,00*	*1.905,00*	*2.155,00*			
					Jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni	**transisi*		*5.844,00*	*5.644,00*	*5.444,00*	*5.194,00*	*4.944,00*			
					**DO:* *Jumlah RTLH yang ditangani sampai dengan tahun N*										
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	*Meningkatnya penyediaan PSU permukiman*	**Persentase Penanganan Kawasan Kumuh**	**%**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani**	**54,98**	**2,24**	**5,39**	**8,29**	**10,92**	**13,03**	**15,66**			
					Luas permukiman kumuh yang ditangani (ha)	*83,45*	*1,70*	*4,10*	*6,30*	*8,30*	*9,90*	*11,90*			
					luas keseluruhan pemukiman kumuh dibawah 10 ha (ha)	*151,78*	*76,00*	*76,00*	*76,00*	*76,00*	*76,00*	*76,00*			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					**DO:* *Luas permukiman kumuh yang ditangani : kumulatif dr T-1* *DO luas keseluruhan permukiman kumuh dibawah 10 ha berdasar pada SK No 416/A/2020 ttg Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kab KP Tahun 2020-2024*										
			Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun	**%**	**(Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun / Seluruh Panjang Jalan Lingkungan) x 100%**	**29,55**	**29,62**	**29,69**	**29,76**	**29,83**	**29,90**	**29,97**			
					Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	*552,00*	*553,00*	*554,00*	*555,00*	*556,00*	*557,00*	*558,00*			
					Panjang Seluruh Jalan Lingkungan	*1.868,00*	*1.867,00*	*1.866,00*	*1.865,00*	*1.864,00*	*1.863,00*	*1.862,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)	*Meningkatnya aksesibilitas kawasan SRS*	**Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS**	**%**	**((Jumlah Panjang Peningkatan Jalan yang dilakukan di Kawasan SRS) / (Panjang Peningkatan Jalan yang direncanakan) x 0,50) + ((Jumlah Dokumen Penunjang yang Terlaksana) / (Jumlah Dokumen Penunjang yang direncanakan) x 0,50) x 100%**	**50,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Panjang Peningkatan Jalan yang dilakukan di Kawasan SRS	*700,00*	*650,00*	*3.141,00*	*3.900,00*	*4.650,00*	*5.480,00*	*5.200,00*			
					Panjang Peningkatan Jalan yang direncanakan	*1.400,00*	*1.300,00*	*3.141,00*	*3.900,00*	*4.650,00*	*5.480,00*	*5.200,00*			
					Jumlah Dokumen Penunjang yang Terlaksana	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
					Jumlah Dokumen Penunjang yang direncanakan	*4,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
4.	**Satuan Polisi Pamong Praja**														
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum*	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**(Jumlah Penanganan Gangguan TRANTIBUM yg sesuai SOP / Jumlah Penanganan Gangguan TRANTIBUM) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Penanganan Gangguan TRANTIBUM yg sesuai dengan SOP	*461,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*			
					Jumlah Penanganan Gangguan TRANTIBUM	*461,00*	*465,00*	*470,00*	*475,00*	*480,00*	*485,00*	*490,00*			
			Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA	**%**	**(Jumlah Penyelesaian Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang sesuai dengan SOP / Jumlah pelanggaran PERDA dan PERKADA) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah penyelesaian pelanggaran perda dan perkada yang sesuai dengan SOP	*347,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*	*375,00*			
					Jumlah pelanggaran perda dan perkada	*347,00*	*350,00*	*355,00*	*360,00*	*365,00*	*370,00*	*375,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya keaktifan jaga warga*	**Persentase Omah Jaga Warga yang aktif**	**%**	**Jumlah Kalurahan yang memiliki Kelompok Jaga Warga yang aktif / jumlah Kalurahan x 100%**	***transisi**		**22,73**	**51,14**	**79,55**	**100,00**	**100,00**	**IKP 2026–2030**		
					Jumlah Kalurahan yang memiliki Kelompok Jaga Warga yang aktif	**transisi*		*20,00*	*45,00*	*70,00*	*88,00*	*88,00*			
					jumlah Kalurahan	**transisi*		*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*			
5.	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**														

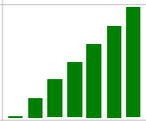
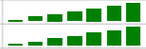
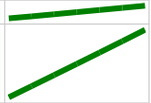
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	*Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*	**Persentase Warga yang Tersosialisasi KIE Rawan Bencana**	**%**	**((Jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana/Jumlah target warga yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana) x 100)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) rawan bencana	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*			
					Jumlah target warga yang mendapatkan sosialisasi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) rawan bencana	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*			
			Persentase Pelayanan terhadap Warga di Daerah Rawan Bencana	**%**	**Persentase Warga terdampak bencana yang terlayani**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	*Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*	**Persentase Pembinaan Relawan Kebakaran**	**%**	**((Jumlah relawan kebakaran yang mengikuti pembinaan / Jumlah target relawan kebakaran yang mengikuti pembinaan x 100)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah relawan kebakaran yang mengikuti pembinaan (orang)	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*			
					Jumlah target relawan kebakaran yang mengikuti pembinaan (orang)	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*			
			Persentase Pelayanan terhadap Warga Terdampak Kebakaran	**%**	**Persentase warga terdampak kebakaran yang terlayani**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya penanggulangan bencana dan kebakaran yang difasilitasi Dais*	**Persentase Layanan Dasar Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang Terfasilitasi Dana Keistimewaan**	**%**	**(Jumlah Layanan Dasar Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang Terfasilitasi Dana Keistimewaan / Target Layanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran pada Tahun 2029) x 100%**	***transisi**		**33,33**	**50,00**	**66,67**	**100,00**	**100,00**	**IKP 2026–2030**		
					Jumlah Layanan Dasar Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang Terfasilitasi Dana Keistimewaan	**transisi*		*2,00*	*3,00*	*4,00*	*6,00*	*6,00*			
					Target Layanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran pada tahun 2029	**transisi*		*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*			
6.	**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**														
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	*Meningkatnya pemberdayaan sosial*	**Persentase Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**	**%**	**(Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Terkoordinasi dan dilakukan Pemantauan Evaluasi / Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan) x 100**	**19,67**	**42,62**	**59,02**	**73,77**	**86,89**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang terkoordinasi dan dilakukan pemantauan evaluasi	*12,00*	*26,00*	*36,00*	*45,00*	*53,00*	*61,00*	*61,00*			
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang ada	*61,00*	*61,00*	*61,00*	*61,00*	*61,00*	*61,00*	*61,00*			
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	*Meningkatnya rehabilitasi sosial*	**Persentase Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti**	**%**	**(Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak) x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	*1.202,00*	*440,00*	*430,00*	*420,00*	*410,00*	*400,00*	*400,00*			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak	*1.202,00*	*440,00*	*430,00*	*420,00*	*410,00*	*400,00*	*400,00*			
			Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	**%**	**(Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar) x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	*5.347,00*	*467,00*	*455,00*	*443,00*	*441,00*	*429,00*	*429,00*			
					Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	*5.347,00*	*467,00*	*455,00*	*443,00*	*441,00*	*429,00*	*429,00*			
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	**%**	**(Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sosial yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sosial yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar) x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sosial yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	*1.000,00*	*1.000,00*	*952,00*	*904,00*	*856,00*	*806,00*	*806,00*			
					Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti sosial yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	*1.000,00*	*1.000,00*	*952,00*	*904,00*	*856,00*	*806,00*	*806,00*			
			Persentase Gelandangan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	**%**	**(Jumlah gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar/ Jumlah gelandangan pengemis diluar panti sosial yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar) x 100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah gelandangan pengemis diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	*44,00*	*40,00*	*36,00*	*34,00*	*32,00*	*30,00*	*30,00*			
					Jumlah gelandangan pengemis diluar panti sosial yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	*44,00*	*40,00*	*36,00*	*34,00*	*32,00*	*30,00*	*30,00*			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	*Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial*	**Persentase Perlindungan dan Jaminan sosial**	**%**	**Jumlah Kepala keluarga yang Mendapat fasilitasi Bantuan Sosial diluar APBD dan kepala keluarga yang mendapat bantuan sosial APBD / Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Kulon Progo x 100**	**32,82**	**29,94**	**29,13**	**28,64**	**28,16**	**27,38**	**27,38**			
					Jumlah Kepala keluarga yang Mendapat fasilitasi Bantuan Sosial diluar APBD dan kepala keluarga yang mendapat bantuan sosial APBD	*51.471,00*	*47.500,00*	*46.500,00*	*46.000,00*	*45.500,00*	*44.500,00*	*44.500,00*			
					Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Kulon Progo	*156.824,00*	*158.677,00*	*159.634,00*	*160.596,00*	*161.565,00*	*162.539,00*	*162.539,00*			
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	*Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana*	**Persentase Penanganan Korban Bencana**	**%**	**(korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana / Jumlah Korban Bencana) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			

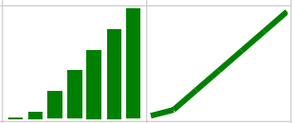
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	*397,00*	*350,00*	*340,00*	*330,00*	*320,00*	*310,00*	*310,00*			
					Jumlah korban bencana	*397,00*	*350,00*	*340,00*	*330,00*	*320,00*	*310,00*	*310,00*			
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	*Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan*	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara**	**%**	**(Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan Pemeliharaan / Jumlah Taman Makam Pahlawan) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan Pemeliharaan	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
					Jumlah Taman Makam Pahlawan	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	*Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan*	**Indeks Pemberdayaan Gender**	**Nilai**	**IDG Mengukur Ketimpangan Gender di Bidang Ekonomi, Partisipasi Politik, dan Pengambilan Keputusan (BPS)**	**70,60**	**71,69**	**71,70**	**71,71**	**71,72**	**71,73**	**71,74**			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	*Menurunnya kekerasan terhadap perempuan*	**Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 Penduduk Perempuan)**	**Per 100.000 Penduduk Perempuan**	**(Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan / Jumlah Penduduk Perempuan) x 100.000**	**19,24**	**12,69**	**10,24**	**8,41**	**6,98**	**5,83**	**4,90**			
					Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	*43,00*	*34,00*	*32,00*	*30,00*	*28,00*	*26,00*	*24,00*			
					Jumlah Penduduk Perempuan	*223.527,00*	*267.962,00*	*312.397,00*	*356.832,00*	*401.266,00*	*445.701,00*	*490.136,00*			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	*Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif*	**Persentase Kalurahan Layak Anak**	**%**	**Jumlah Kalurahan Layak Anak / Jumlah kalurahan x 100**	**6,90**	**9,20**	**11,49**	**13,79**	**16,09**	**18,39**	**20,69**			
					Jumlah Kalurahan Layak Anak	*6,00*	*8,00*	*10,00*	*12,00*	*14,00*	*16,00*	*18,00*			
					Jumlah Kalurahan	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*			
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	*Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak*	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani**	**%**	**Jumlah Anak korban kekerasan yang ditangani / Jumlah Anak x 100**	***transisi**		**0,02**	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**IKP 2026–2030**		
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang ditangani	**transisi*		*34,00*	*32,00*	*30,00*	*28,00*	*26,00*			
					Jumlah Anak	**transisi*		*161.926,00*	*185.299,00*	*208.673,00*	*232.046,00*	*255.419,00*			
					**DO:* *Anak Berusia 0-19 tahun*										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan*	**Cakupan Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Fasilitasi pemberdayaan**	**%**	**(Jumlah Penduduk Perempuan Dewasa yang Mendapat Fasilitasi / Jumlah Seluruh Penduduk Perempuan Dewasa) x 100%**	***transisi**		**0,04**	**0,04**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**IKP 2026–2030**		
					Jumlah Penduduk Perempuan Dewasa yang Mendapat Fasilitasi	**transisi*		*70,00*	*75,00*	*80,00*	*85,00*	*90,00*			
					Jumlah Seluruh Penduduk Perempuan Dewasa	**transisi*		*174.839,00*	*175.839,00*	*175.939,00*	*176.839,00*	*177.839,00*			
7.	**Dinas Tenaga Kerja**														
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	*Terkelolanya informasi tenaga kerja*	**Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun**	**%**	**Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun / Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Seharusnya disusun) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
				Dokumen	**Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun**	**1,00**	**4,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**			
					Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Seharusnya disusun	*1,00*	*4,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*2,00*			

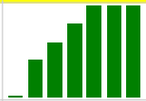
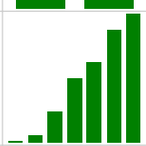
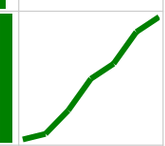
Lampiran 3: Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (IKP PD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

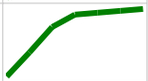
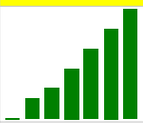
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					*Ket: Jenis dokumen rencana tenaga kerja		*1. RTK Makro 2. Data disabilitas 3. Data pilah 4. Data ketenagakerjaan*	*1. Data pilah 2. Data ketenagakerjaan*	*1. Data pilah 2. Data ketenagakerjaan*	*1. Data pilah 2. Data ketenagakerjaan*	*1. RTK Makro 2. Data pilah 3. Data ketenagakerjaan*	*1. Data pilah 2. Data ketenagakerjaan*			
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	*Meningkatnya produktivitas tenaga kerja*	**Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Sertifikasi**	**%**	**(Jumlah Peserta Pelatihan Lulus Ujian Sertifikasi / Jumlah Peserta Pelatihan yang Mengikuti Ujian Sertifikasi) x 100%**	**92,86**	**93,75**	**93,75**	**95,83**	**95,83**	**95,83**	**95,83**			
					Jumlah peserta pelatihan lulus ujian sertifikasi	*208,00*	*45,00*	*45,00*	*46,00*	*46,00*	*46,00*	*46,00*			
					jumlah peserta pelatihan yang mengikuti ujian sertifikasi	*224,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*			
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	*Meningkatnya penempatan tenaga kerja*	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**%**	**(Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap / Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Bursa Kerja) x 100%**	**79,83**	**79,92**	**80,02**	**80,11**	**80,21**	**80,21**	**80,21**			
					Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	*3.356,00*	*3.360,00*	*3.364,00*	*3.368,00*	*3.372,00*	*3.372,00*	*3.372,00*			
					Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar	*4.204,00*	*4.204,00*	*4.204,00*	*4.204,00*	*4.204,00*	*4.204,00*	*4.204,00*			
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	*Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi*	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak**	**%**	**(Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Prasyarat Hubungan Industrial Sesuai Aturan Wajib / Jumlah Perusahaan) x 100%**	**35,12**	**38,69**	**44,12**	**52,94**	**55,88**	**58,82**	**61,76**			
					Jumlah Perusahaan yang Memenuhi Prasyarat Hubungan Industrial Sesuai Aturan Wajib	*59,00*	*65,00*	*75,00*	*90,00*	*95,00*	*100,00*	*105,00*			
					Jumlah Perusahaan	*168,00*	*168,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*			
					DO: Jumlah perusahaan yang memenuhi prasyarat hubungan industrial sesuai aturan wajib Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama (PP/ PKB), Struktur Upah dan Skala Upah, Kepesertaan BPJS, LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama Bipartit). Jumlah Perusahaan = Perusahaan dalam Pembinaan Disnaker.										
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	*Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi*	**Persentase Kerjasama antar Daerah Tujuan Transmigrasi**	**%**	**(Kerjasama Antar Daerah Tujuan yang ditetapkan / Kerjasama Antar Daerah yg direncanakan) x 100%**	**100,00**	**100,00**						**IKP 2025**		
					Kerjasama Antar Daerah Tujuan yang ditetapkan	*1,00*	*1,00*								
					kerjasama Antar Daerah yg direncanakan	*1,00*	*1,00*								
			Persentase Transmigran yang Bertahan Selama 5 Tahun Terakhir	**%**	**(Jumlah Transmigran yang Bertahan Selama 5 Tahun Terakhir / Jumlah Total Transmigran yang diberangkatkan 5 Tahun Terakhir) x 100%**	***transisi**		**69,23**	**71,43**	**73,33**	**75,00**	**76,47**	**IKP 2025–2030**		
					Jumlah transmigran yang bertahan selama 5 tahun terakhir (KK)	**transisi*		*9,00*	*10,00*	*11,00*	*12,00*	*13,00*			
					Jumlah total transmigran yang diberangkatkan 5 tahun terakhir (KK)	**transisi*		*13,00*	*14,00*	*15,00*	*16,00*	*17,00*			
					DO : 5 tahun terakhir dihitung mulai n-1 ke belakang										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*meningkatnya kompetensi angkatan kerja*	**Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten**	**%**	**(Jumlah Peserta yang Mendapat Sertifikat Pelatihan / Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan) x 100%**	***transisi**		**93,75**	**93,75**	**93,75**	**93,75**	**93,75**	**IKP 2026–2030**		

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah Peserta yang Mendapat Sertifikat Pelatihan	*transisi*		*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*			
					Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	*transisi*		*112,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*			
8.	**Dinas Pertanian dan Pangan**														
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat*	**Tingkat Ketersediaan Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 Kkal/Kap/Hari**	**Kkal/Kapita/ Hari**	**Angka Ketersediaan Energi Kelompok Pangan (9 Kelompok Pangan)**	**2.949,00**	**2.951,00**	**2.953,00**	**2.955,00**	**2.957,00**	**2.959,00**	**2.961,00**			
			Tingkat Konsumsi Energi, Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 Kkal/Kap/Hari	**Kkal/Kapita/ Hari**	**Angka Konsumsi Energi Kelompok Pangan (9 Kelompok Pangan)**	**1.831,00**	**1.855,50**	**1.879,90**	**1.904,40**	**1.928,80**	**1.953,30**	**1.977,70**			
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	*Meningkatnya penanganan kerawanan pangan*	**Persentase Desa Kategori Tahan dan Sangat Tahan Pangan**	**%**	**(Jumlah Desa Tahan dan Sangat Tahan Pangan / Jumlah Desa) x 100%**	**20,45**	**22,73**	**25,00**	**27,27**	**29,55**	**31,82**	**34,09**			
					Jumlah Desa Tahan dan Sangat Tahan Pangan	*18,00*	*20,00*	*22,00*	*24,00*	*26,00*	*28,00*	*30,00*			
					Jumlah Desa	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*			
					**DO:* *(1.) Desa tahan pangan adalah desa yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri dan berkelanjutan* *(2.) Desa sangat tahan pangan adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, serta nilai gizi dari pangan yang dihasilkan*										
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	*Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan*	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan**	**%**	**(Jumlah Sampel Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Keamanan dan Mutu Pangan / Jumlah Seluruh Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan) x 100%**	**90,83**	**91,67**	**92,50**	**93,33**	**94,17**	**95,00**	**95,83**			
					Jumlah Sampel Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Keamanan dan Mutu Pangan	*109,00*	*110,00*	*111,00*	*112,00*	*113,00*	*114,00*	*115,00*			
					Jumlah Seluruh Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian*	**Produktivitas Padi**	**kuintal/ha**	**Produksi (ton) x 10 / Luas Panen (ha)**	**69,22**	**69,91**	**70,61**	**71,31**	**72,03**	**72,75**	**73,48**			
			Produktivitas Jagung	**kuintal/ha**	**Produksi (ton) x 10 / Luas Panen (ha)**	**67,34**	**68,01**	**68,69**	**69,38**	**70,07**	**70,77**	**71,48**			
			Produktivitas Cabai	**kuintal/ha**	**Produksi (ton) x 10 / Luas Panen (ha)**	**57,70**	**58,30**	**58,80**	**59,40**	**60,00**	**60,60**	**61,20**			
			Produktivitas Bawang Merah	**kuintal/ha**	**Produksi (ton) x 10 / Luas Panen (ha)**	**126,00**	**127,20**	**128,50**	**129,80**	**131,10**	**132,40**	**133,70**			
			Populasi Ternak	**Animal Unit**	**Populasi Sapi, Kambing, Kambing PE, Domba, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, Ayam Buras Tahun n (Animal Unit)**	**171.171,00**	**172.028,00**	**172.888,00**	**173.752,00**	**174.620,00**	**175.493,00**	**176.374,00**			
				Animal Unit	**Populasi sapi**	**42.578,00**	**42.791,00**	**43.005,00**	**43.220,00**	**43.436,00**	**43.653,00**	**43.872,00**			
				Animal Unit	**Populasi Kambing**	**10.381,00**	**10.433,00**	**10.485,00**	**10.537,00**	**10.590,00**	**10.643,00**	**10.696,00**			
				Animal Unit	**Populasi Kambing PE**	**5.021,00**	**5.046,00**	**5.072,00**	**5.097,00**	**5.122,00**	**5.148,00**	**5.174,00**			
				Animal Unit	**Populasi Domba**	**5.024,00**	**5.049,00**	**5.075,00**	**5.100,00**	**5.125,00**	**5.151,00**	**5.177,00**			
				Animal Unit	**Populasi Ayam Petelur**	**41.571,00**	**41.779,00**	**41.987,00**	**42.197,00**	**42.408,00**	**42.620,00**	**42.834,00**			
				Animal Unit	**Populasi Ayam Pedaging**	**46.780,00**	**47.014,00**	**47.249,00**	**47.486,00**	**47.723,00**	**47.962,00**	**48.202,00**			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
				Animal Unit	**Populasi Ayam Buras**	**16.436,00**	**16.519,00**	**16.601,00**	**16.684,00**	**16.768,00**	**16.851,00**	**16.936,00**			
				Animal Unit	**Populasi Itik**	**3.380,00**	**3.397,00**	**3.414,00**	**3.431,00**	**3.448,00**	**3.465,00**	**3.483,00**			
			Persentase Sarana Pertanian yang digunakan dan Kondisinya Baik	**%**	**(Jumlah Alsin yang dimanfaatkan / Total Jumlah Alsin Pertanian) x 100%**	**74,98**	**75,17**	**75,35**	**75,53**	**75,71**	**75,88**	**76,06**			
					Jumlah alat mesin pertanian yang dimanfaatkan tahun-n	*1.205,00*	*1.217,00*	*1.229,00*	*1.241,00*	*1.253,00*	*1.265,00*	*1.277,00*			
					Alat mesin pertanian budidaya yang dimanfaatkan tahun-n	*1.044,00*	*1.054,00*	*1.064,00*	*1.074,00*	*1.084,00*	*1.094,00*	*1.104,00*			
					Alat mesin pertanian pasca panen yang dimanfaatkan tahun-n	*161,00*	*163,00*	*165,00*	*167,00*	*169,00*	*171,00*	*173,00*			
					**DO:* *Jumlah alat mesin pertanian DO : Alat mesin pertanian budidaya : Traktor Roda 2, Pompa Air, Cultivator, Alat mesin pertanian pasca panen : Thresher*	*1.607,00*	*1.619,00*	*1.631,00*	*1.643,00*	*1.655,00*	*1.667,00*	*1.679,00*			
					Jumlah Alat Mesin Pertanian Budidaya	*1.392,00*	*1.402,00*	*1.412,00*	*1.422,00*	*1.432,00*	*1.442,00*	*1.452,00*			
					Jumlah Alat Mesin Pertanian Pasca Panen	*215,00*	*217,00*	*219,00*	*221,00*	*223,00*	*225,00*	*227,00*			
					**DO:* *Alat mesin pertanian budidaya meliputi: Traktor Roda 2, Pompa Air, Cultivator, Alat mesin pertanian pasca panen meliputi Thresher*										
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian*	**Persentase Lahan yang Terfasilitasi Jalan Pertanian**	**%**	**(Lahan yang Terfasilitasi Jalan Pertanian / Lahan yang Membutuhkan Jalan Pertanian) x 100%**	**28,02**	**28,09**	**28,16**	**28,23**	**28,30**	**28,37**	**28,44**			
				ha	**Lahan yang terfasilitasi Jalan Pertanian**	**3.213,00**	**3.221,00**	**3.229,00**	**3.237,00**	**3.245,00**	**3.253,00**	**3.261,00**			
				ha	**Lahan yang membutuhkan Jalan Pertanian**	**11.467,00**	**11.467,00**	**11.467,00**	**11.467,00**	**11.467,00**	**11.467,00**	**11.467,00**			
			Persentase Lahan yang Terfasilitasi Irigasi	**%**	**(Lahan yang terfasilitasi Irigasi / Lahan yang membutuhkan Fasilitasi Irigasi) x 100%**	**8,58**	**8,69**	**8,79**	**8,90**	**9,00**	**9,10**	**9,21**			
				ha	**Lahan yang terfasilitasi Irigasi**	**984,00**	**996,00**	**1.008,00**	**1.020,00**	**1.032,00**	**1.044,00**	**1.056,00**			
					Lahan yang membutuhkan Fasilitasi Irigasi	*11.467,00*	*11.467,00*	*11.467,00*	*11.467,00*	*11.467,00*	*11.467,00*	*11.467,00*			
					**DO:* *(1.) Fasilitasi Jalan Pertanian: setiap 100 meter jalan, memfasilitasi 2 ha lahan pertanian.* *(2.) Fasilitasi Irigasi: setiap 1 unit kegiatan (irpom, irpip dam parit) memfasilitasi 5 ha, sedangkan RJIT (Rehab Jaringan Irigasi Tersier) setiap panjang 100 meter memfasilitasi 0,5 ha*										
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian*	**Persentase Penerapan Teknologi yang dianjurkan**	**%**	**(Luas lahan Sawah yang menerapkan Teknologi Budidaya yang dianjurkan / Luas Total Lahan Sawah) x 100%**	**75,59**	**75,68**	**75,77**	**75,86**	**75,95**	**76,04**	**76,13**			
					Luas Lahan Sawah yang Menerapkan Teknologi Budidaya yang dianjurkan	*8.350,00*	*8.360,00*	*8.370,00*	*8.380,00*	*8.390,00*	*8.400,00*	*8.410,00*			
					Luas Total Lahan Sawah	*11.047,00*	*11.047,00*	*11.047,00*	*11.047,00*	*11.047,00*	*11.047,00*	*11.047,00*			

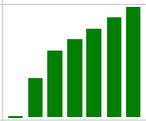
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					*DO Penerapan teknologi yaitu menerapkan teknologi budidaya, misalnya: sistem tajarwo, dll.										
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*	**Persentase Bencana Pertanian yang ditangani**	**%**	**((Luas Terkena Serangan OPT atau DPI – Luas Puso Serangan OPT atau DPI) / Luas Terkena Serangan OPT atau DPI) x 100%**	**95,32**	**95,46**	**95,65**	**95,85**	**96,00**	**96,14**	**96,38**			
					Luas Puso Serangan OPT atau DPI	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*34,00*			
					Luas Terkena Serangan OPT atau DPI	*770,00*	*793,00*	*827,00*	*844,00*	*876,00*	*906,00*	*938,00*			
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner*	**Persentase Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Persyaratan Keamanan Pangan**	**%**	**(Jumlah Sampel Produk Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan / Jumlah Seluruh Sampel Pangan Asal Hewan) x 100%**	**90,02**	**90,16**	**90,36**	**90,55**	**90,73**	**90,91**	**91,08**			
					Jumlah Sampel Produk Pangan Asal Hewan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	*415,00*	*440,00*	*450,00*	*460,00*	*470,00*	*480,00*	*490,00*			
					Jumlah Seluruh Sampel Pangan Asal Hewan	*461,00*	*488,00*	*498,00*	*508,00*	*518,00*	*528,00*	*538,00*			
					DO: Produk pangan asal hewan meliputi daging, susu, olahan pangan asal hewan										
			Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Hewan	**%**	**(((Jumlah Penanganan – (Jumlah kematian, Jumlah Prognosa Dubius, Jumlah Prognosa Infausta)) / Jumlah Penanganan)) x 100%**	**98,57**	**98,61**	**98,65**	**98,69**	**98,73**	**98,77**	**98,80**			
					Jumlah Kematian, prognosa dubius dan prognosa infausta ternak akibat Penyakit Hewan	*104,00*	*102,00*	*100,00*	*98,00*	*96,00*	*94,00*	*92,00*			
					Jumlah penanganan kasus Penyakit Hewan	*7.248,00*	*7.320,00*	*7.394,00*	*7.468,00*	*7.542,00*	*7.618,00*	*7.694,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)	*Meninngkatnya Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten*	**Jumlah Luas Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten**	**Ha**	**Jumlah pemanfaatan lahan pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten**	**80,00**	**80,00**	**85,00**	**90,00**	**95,00**	**100,00**	**105,00**			
					DO: (1.) Lahan pertanian di Kawasan Ruang SRS Kasultanan dan Kadipaten : Luas lahan pertanian di kawasan ruang SRS Perbukitan Menoreh (2.) Kawasan Ruang SRS Perbukitan Menoreh = Kawasan Tonogoro, Kleco, Canggal dan Hargowilis										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya kapasitas kelompok tani lahan surjan dan lumbung kemataraman*	**Persentase rata-rata peningkatan kapasitas kelompok tani lahan surjan dan kelompok wanita tani lumbung mataraman yang terfasilitasi**	**%**	**Jumlah kelompok tani lahan surjan dan jumlah KWT lumbung mataraman yang terfasilitasi / Jumlah kelompok tani lahan surjan dan jumlah KWT lumbung mataraman**	**24,66**	**25,68**	**29,11**	**32,53**	**35,96**	**39,38**	**42,81**			
					Jumlah kelompok tani lahan surjan dan jumlah KWT lumbung mataraman yang terfasilitasi	*72,00*	*75,00*	*85,00*	*95,00*	*105,00*	*115,00*	*125,00*			
					Jumlah seluruh kelompok tani lahan surjan (=142 KWT) dan jumlah KWT lumbung mataraman (=150 KWT)	*292,00*	*292,00*	*292,00*	*292,00*	*292,00*	*292,00*	*292,00*			

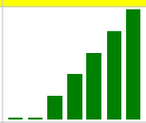
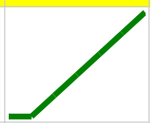
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
9.	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)**														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang*	**Persentase Perencanaan Penataan Ruang**	**%**	**((Jumlah peraturan perencanaan penataan ruang yang ditetapkan/ Jumlah peraturan perencanaan penataan ruang yang seharusnya ada)x100)**	**28,57**	**57,14**	**71,43**	**85,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah peraturan perencanaan penataan ruang yang ditetapkan (perbup)	*2,00*	*4,00*	*5,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*			
					Jumlah peraturan perencanaan penataan ruang yang seharusnya ada	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*			
			Persentase Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	**%**	**((Jumlah Penerbitan KKPR dan KRK/ Jumlah pengawasan dan pengendalian KKPR dan KRK)/ 100)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Penerbitan KKPR (dokumen)	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*			
					Jumlah Penerbitan KRK (dokumen)	*1.288,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*			
					Jumlah Pengawasan dan pengendalian KKPR dan KRK	*1.388,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*			
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	*Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan*	**Persentase Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan**	**%**	**((Jumlah masalah pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya /Jumlah masalah pertanahan) x 100)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah masalah pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya (masalah)	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*			
					Jumlah masalah pertanahan (masalah)	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*			
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	*Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan*	**Persentase Tertib Administrasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan**	**%**	**((Pembayaran sewa Tanah Kalurahan yang dilaksanakan/Jumlah obyek sewa Tanah Kalurahan yang dimanfaatkan Pemda) x 100)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Pembayaran sewa Tanah Kalurahan yang dilaksanakan (obyek sewa)	*396,00*	*391,00*	*391,00*	*391,00*	*391,00*	*391,00*	*391,00*			
					Jumlah obyek sewa Tanah Kalurahan yang dimanfaatkan Pemda (obyek sewa)	*396,00*	*391,00*	*391,00*	*391,00*	*391,00*	*391,00*	*391,00*			
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	*Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah*	**Persentase Tertib Administrasi Tanah PEMDA**	**%**	**((Luas tanah Pemda yang didaftarkan di BPN/Luas tanah Pemda)x100)**	**74,23**	**73,50**	**74,10**	**74,69**	**75,28**	**75,88**	**76,47**			
					Luas tanah Pemda yang didaftarkan di BPN (m2)	*3.645.969,00*	*3.715.969,00*	*3.745.969,00*	*3.775.969,00*	*3.805.969,00*	*3.835.969,00*	*3.865.969,00*			
					Luas tanah Pemda (m2)	*4.911.447,00*	*5.055.552,00*	*5.055.552,00*	*5.055.552,00*	*5.055.552,00*	*5.055.552,00*	*5.055.552,00*			
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	*Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)*	**Persentase Ketersediaan Dokumen Inventarisasi Tanah PEMDA**	**%**	**-**	**100,00**	**100,00**						**IKP 2025**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)	*Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan kesesuaian pemanfaatan ruang*	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**%**	**Rerata Persentase [Satuan ruang strategis yang menyusun rencana rinci (persen) + satuan ruang strategis yang menyusun Rencana Induk (persen) + satuan ruang strategis yang menyusun RTBL (persen)]/3**	**8,33**	**12,50**	**30,00**	**53,75**	**65,00**	**88,75**	**100,00**			
					Satuan ruang strategis yang menyusun rencana rinci (persen)	*33,33*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*			
					satuan ruang strategis yang menyusun Rencana Induk (persen)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*			
					satuan ruang strategis yang menyusun RTBL (persen)	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*40,00*	*60,00*	*80,00*	*100,00*			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					satuan ruang strategis yang menyusun peta dasar (%)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25,00*	*50,00*	*75,00*	*100,00*			
			Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	**%**	**Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan zonasi dalam Perdais**	***transisi**			**50,00**	**52,50**	**55,00**	**57,50**	**IKP 2027–2030**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN *)	*Meningkatnya kinerja pengelolaan tanah dan pemanfaatan tanah*	**Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa**	**%**	**(Jumlah bidang tanah SG,PAG,Pemda, Kalurahan yang telah bersertifikat /Total bidang tanah SG, PAG, Pemda,Kalurahan) x 100**	**56,09**	**63,98**	**72,27**	**76,33**	**76,94**	**77,55**	**78,17**			
					Jumlah bidang tanah SG,PAG, Pemda,Kalurahan yang telah bersertifikat	*5.478,00*	*6.248,00*	*7.058,00*	*7.454,00*	*7.514,00*	*7.574,00*	*7.634,00*			
					Total bidang tanah SG,PAG,Pemda,Kalurahan	*9.766,00*	*9.766,00*	*9.766,00*	*9.766,00*	*9.766,00*	*9.766,00*	*9.766,00*			
			Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	**%**	**Jumlah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tanah SG, PAG dan Tanah Kalurahan/ Jumlah seluruh Tanah SG, PAG dan Tanah Kalurahan yang dimanfaatkan x 100%**	**5,47**	**22,10**	**33,33**	**50,00**	**66,67**	**83,33**	**100,00**			
					Jumlah rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tanah SG, PAG dan Tanah Kalurahan/ Jumlah seluruh Tanah SG, PAG dan Tanah Kalurahan yang dimanfaatkan x 100%	*164,00*	*663,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*3.000,00*			
					Jumlah seluruh Tanah SG, PAG dan Tanah Kalurahan yang dimanfaatkan	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*			
10.	**Dinas Lingkungan Hidup**														
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	*Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan*	**Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Menindaklanjuti Hasil Pengawasan terhadap Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi**	**%**	**Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menindaklanjuti hasil pengawasan dibandingkan dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi**	**50,00**	**52,86**	**54,29**	**57,14**	**60,00**	**62,86**	**65,71**			
					Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menindaklanjuti hasil pengawasan (tahun ke n)	*35,00*	*37,00*	*38,00*	*40,00*	*42,00*	*44,00*	*46,00*			
					Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (tahun ke n)	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*			
					**DO:* *Usaha dan/atau kegiatan yang menindaklanjuti hasil pengawasan jika satu atau lebih rekomendasi dilaksanakan*										
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	*Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*	**Jumlah Parameter Uji Laboratorium Lingkungan**	**Parameter**	**Jumlah Parameter yang diuji**	**21,00**	**26,00**	**29,00**	**31,00**	**33,00**	**35,00**	**37,00**			
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	*Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP*	**Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup**	**%**	**(Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan yang disusun Tahun ke-n / Jumlah Dokumen Kajian yang Seharusnya disusun Tahun ke-n) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan yang disusun Tahun ke-n	*5,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*5,00*			
					Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan yang Seharusnya disusun Tahun ke-n	*5,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*5,00*			

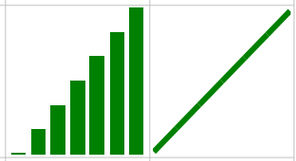
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					**Ket:* *(1.) 2025 : DIKPLHD, GRK, IKLH, RPPLH.* *(2.) 2026 : DIKPLHD, GRK, IKLH, Review D3TLH.* *(3.) 2027 : DIKPLHD, GRK, IKLH, Inventarisasi Keanekaragaman Hayati.* *(4.) 2028 : DIKPLHD, GRK, IKLH, NSDA.* *(5.) 2029 : DIKPLHD, GRK, IKLH, KLHS RPJMD.* *(6.) 2030 : DIKPLHD, GRK, IKLH, Review D3TLH, RPPLH.*									
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	*Meningkatnya tata kelola persampahan*	**Proporsi Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah**	**%**	**(Jumlah cakupan wilayah terlayani / Jumlah wilayah total Kabupaten Kulon Progo) x 100%)**	**22,17**	**27,00**	**27,82**	**28,64**	**29,46**	**30,27**	**31,09**			
					Luas wilayah terlayani tahun ke -n	*129,96*	*158,30*	*163,10*	*167,90*	*172,70*	*177,50*	*182,30*			
					Luas wilayah total Kabupaten Ke -n	*586,30*	*586,30*	*586,30*	*586,30*	*586,30*	*586,30*	*586,30*			
					**DO:* *(1.) Luas Wilayah Terlayani Tahun ke-n adalah, Wilayah tersebut sudah terlayani kelompok masyarakat pengelola sampah teregistrasi di DLH.* *(2.) Luas Wilayah Total Kabupaten adalah, Total seluruh wilayah yang masuk ke dalam administrasi Kabupaten Kulon Progo*									
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	*Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati*	**Persentase Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup**	**%**	**Jumlah Mata Air yang dikonservasi / Jumlah Mata Air) x 100%**	**28,30**	**41,51**	**54,72**	**66,04**	**77,36**	**88,68**	**100,00**			
					Jumlah Mata Air yang dikonservasi	*15,00*	*22,00*	*29,00*	*35,00*	*41,00*	*47,00*	*53,00*			
					Jumlah Mata Air	*53,00*	*53,00*	*53,00*	*53,00*	*53,00*	*53,00*	*53,00*			
			Persentase Taman Kondisi Baik	**%**	**(Jumlah taman dalam kondisi baik / Jumlah Keseluruhan Taman) x 100%**	**73,47**	**75,51**	**77,55**	**79,59**	**81,63**	**83,67**	**85,71**			
					Jumlah taman dalam kondisi baik	*36,00*	*37,00*	*38,00*	*39,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*			
					Jumlah keseluruhan Taman	*49,00*	*49,00*	*49,00*	*49,00*	*49,00*	*49,00*	*49,00*			
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	*Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup*	**Capaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**%**	**(Jumlah aduan ditindaklanjuti / jumlah aduan yang masuk)*100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	*18,00*	*21,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*			
					Jumlah aduan yang masuk	*18,00*	*21,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*			
					**DO:* *(1.) Semua aduan yang masuk ke DLH, seluruhnya ditindaklanjuti sesuai SOP penanganan aduan.* *(2.) Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti adalah, jumlah laporan aduan yang ditindaklanjuti/ditangani dengan rapat koordinasi, survey lapangan, pemberian arahan kepada pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan.* *(3.) Jumlah Aduan yang Masuk adalah, jumlah laporan aduan yang masuk ke DLH baik secara langsung datang ke DLH, melalui email, surat, media sosial.*									

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	*Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup*	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup**	**%**	**(jumlah kelompok peduli lingkungan hidup yang aktif / jumlah kelompok peduli lingkungan hidup yang sudah terbentuk) x 100%**	**76,54**	**76,83**	**77,11**	**77,38**	**77,65**	**77,91**	**78,16**			
					Jumlah kelompok peduli lingkungan hidup yang aktif	*62,00*	*63,00*	*64,00*	*65,00*	*66,00*	*67,00*	*68,00*			
					Jumlah kelompok peduli lingkungan hidup yang sudah terbentuk	*81,00*	*82,00*	*83,00*	*84,00*	*85,00*	*86,00*	*87,00*			
					**DO:* *- Kelompok peduli lingkungan yang masih melakukan aktivitas 5 aspek (pengelolaan sampah, konservasi air, konservasi energi, pengelolaan drainase, penanaman pohon)* *- Kelompok peduli lingkungan (2024) : Sekolah Adiwiyata (72), Saka Kalpataru (1), Proklim (8),*										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Berkurangnya sampah*	**Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat (Persentase Pengurangan Sampah)**	**%**	**(Jumlah pengurangan sampah / Jumlah timbulan sampah) x 100%**	**32,78**	**31,41**						**IKP 2025**		
				ton	**jumlah pengurangan sampah**	**25.957,19**	**24.873,02**								
				ton	**jumlah timbulan sampah**	**79.177,19**	**79.177,19**								
					**) DO pengurangan sampah : pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga*										
			Persentase Pengurangan Sampah	**%**	**(Jumlah pengurangan sampah / Jumlah timbulan sampah) x 100%**	***transisi**		**35,01**	**36,97**	**43,59**	**51,01**	**60,05**	**IKP 2026–2030**		
				ton	**jumlah pengurangan sampah**	***transisi**		**27.876,80**	**29.600,00**	**35.100,00**	**41.300,00**	**48.890,00**			
				ton	**jumlah timbulan sampah**	***transisi**		**79.620,58**	**80.066,46**	**80.514,83**	**80.965,71**	**81.419,12**			
					**) DO pengurangan sampah : pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga*										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)	*Meningkatnya penanganan sampah*	**Persentase Penanganan Sampah**	**%**	**(Jumlah penanganan sampah / Jumlah timbulan sampah) x 100%**	***transisi**		**15,12**	**15,02**	**14,92**	**14,83**	**14,73**	**IKP 2026–2030**		
				ton	**jumlah penanganan sampah**	***transisi**		**12.035,00**	**12.025,00**	**12.015,00**	**12.005,00**	**11.995,00**			
				ton	**jumlah timbulan sampah**	***transisi**		**79.620,58**	**80.066,46**	**80.514,83**	**80.965,71**	**81.419,12**			
					**)DO penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga*										
			Persentase Lahan Terkonservasi di Wilayah Pantai Selatan	**%**	**(Luasan lahan Sempadan Pantai yang terkonservasi / total luasan lahan Sempadan Pantai) x 100%**	***transisi**		**6,13**	**9,20**	**12,27**	**15,34**	**18,40**	**IKP 2026–2030**		
				Hektar	**Luasan lahan Sempadan Pantai yang terkonservasi**	***transisi**		**4,00**	**6,00**	**8,00**	**10,00**	**12,00**			
				Hektar	**Luasan total lahan Sempadan Pantai**	***transisi**		**65,20**	**65,20**	**65,20**	**65,20**	**65,20**			
11.	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**														
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	*Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk*	**Persentase Penduduk Memiliki Kartu Identitas**	**%**	**((Jumlah Penduduk yang memiliki KTP / Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100%)+(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x 100%))/2**	**90,37**	**92,17**	**92,20**	**92,23**	**92,26**	**92,29**	**92,32**			
					Jumlah penduduk yang memiliki KTP	*344.955,00*	*345.839,00*	*346.204,00*	*346.569,00*	*346.934,00*	*347.299,00*	*347.664,00*			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah Penduduk wajib KTP	*348.351,00*	*349.192,00*	*349.525,00*	*349.858,00*	*350.191,00*	*350.524,00*	*350.857,00*			
					Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA	*78.970,00*	*78.719,00*	*79.050,00*	*79.409,00*	*79.712,00*	*80.043,00*	*80.375,00*			
					Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari	*96.643,00*	*92.286,00*	*92.619,00*	*92.985,00*	*93.285,00*	*93.618,00*	*93.951,00*			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	*Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil*	**Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran**	**%**	**Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran / jumlah penduduk usia 0-17 tahun x 100%**	**99,48**	**99,50**	**99,55**	**99,60**	**99,65**	**99,70**	**99,75**			
					Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	*102.524,00*	*97.794,00*	*98.175,00*	*98.556,00*	*98.937,00*	*99.319,00*	*99.701,00*			
					Jumlah penduduk usia 0-17 tahun	*103.062,00*	*98.286,00*	*98.619,00*	*98.952,00*	*99.285,00*	*99.618,00*	*99.951,00*			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	*Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan*	**Inovasi Pelayanan**	**Satuan Inovasi**	**Jumlah Inovasi Pelayanan Baru tahun n**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**			
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	*Meningkatnya kualitas profil kependudukan*	**Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan**	**%**	**Jumlah Buku Profil Kependudukan yang tersusun / Jumlah Buku Profil Kependudukan yang Seharusnya disusun x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Buku Profil Kependudukan yang tersusun	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
					Jumlah Buku Profil Kependudukan yang seharusnya disusun	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
12.	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**														
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	*Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk*	**Persentase Rumah Data Kependudukan di kampung KB**	**%**	**Jumlah Rumah Data Kependudukan yang dibentuk /jumlah Kampung KB X 100**	**80,68**	**81,82**	**82,95**	**84,09**	**85,23**	**86,36**	**87,50**			
					Jumlah Rumah Data Kependudukan	*71,00*	*72,00*	*73,00*	*74,00*	*75,00*	*76,00*	*77,00*			
					Jumlah Kampung KB	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	*Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)*	**Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)**	**%**	**Jumlah Peserta KB Aktif/ Jumlah Pasangan Usia Subur x 100**	**68,24**	**59,24**	**60,10**	**61,37**	**62,24**	**63,06**	**64,09**			
					Jumlah Peserta KB Aktif (PA)	*43.399,00*	*38.554,00*	*39.176,00*	*40.253,00*	*41.442,00*	*42.225,00*	*42.949,00*			
					Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	*63.599,00*	*65.076,00*	*65.183,00*	*65.587,00*	*66.582,00*	*66.965,00*	*67.014,00*			
			Persentase Unmet Need	**%**	**Jumlah Unmet Need / Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) x 100**	**8,57**	**15,00**	**14,55**	**14,01**	**13,51**	**13,01**	**12,54**			
					Unmet Need	*5.452,00*	*9.763,00*	*9.485,00*	*9.192,00*	*8.993,00*	*8.712,00*	*8.403,00*			
					Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	*63.599,00*	*65.076,00*	*65.183,00*	*65.587,00*	*66.582,00*	*66.965,00*	*67.014,00*			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	*Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)*	**Persentase Peningkatan Keluarga yang Terlayani Konseling Keluarga Sejahtera**	**%**	**Jumlah Klien yang mendapat pelayanan konsultasi dan konseling pada PPKS/Jumlah anggota kelompok BKB, BKR, dan BKL (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) x 100**	**5,35**	**6,07**	**6,57**	**6,79**	**6,97**	**7,20**	**7,38**			
					Jumlah Klien yang Mendapat Pelayanan Konsultasi dan Konseling pada PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)	*1.222,00*	*1.385,00*	*1.502,00*	*1.557,00*	*1.602,00*	*1.657,00*	*1.703,00*			
					Jumlah anggota kelompok BKB, BKR, dan BKL	*22.829,00*	*22.830,00*	*22.870,00*	*22.923,00*	*22.974,00*	*23.024,00*	*23.075,00*			
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	*Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	**Persentase Kalurahan Kategori TDD**	**%**	**Jumlah Kalurahan kategori TDD (Tertib Dapat Dipertanggungjawabkan) / Jumlah Kalurahan x 100**	**43,68**	**45,98**	**48,28**	**50,57**	**52,87**	**55,17**	**57,47**			
					Jumlah Kalurahan kategori TDD (Tertib Dapat Dipertanggungjawabkan)	*38,00*	*40,00*	*42,00*	*44,00*	*46,00*	*48,00*	*50,00*			

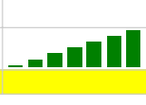
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah Kalurahan	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*			
			Persentase BUMDes Kategori Maju	**%**	**(Jumlah BUMDes Kategori Maju / Jumlah BUMDes) x 100%**	**16,09**	**18,39**	**20,69**	**22,99**	**25,29**	**27,59**	**29,89**			
					Jumlah BUMDes Kategori Maju	*14,00*	*16,00*	*18,00*	*20,00*	*22,00*	*24,00*	*26,00*			
					Jumlah BUMDes	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	*Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan*	**Persentase Swadaya Masyarakat dalam Program TMMD dan Karya Bakti**	**%**	**Jumlah Swadaya Masyarakat / Jumlah Bantuan dalam Program TMMD dan Karya Bakti x 100**	**10,00**	**12,00**	**14,00**	**16,00**	**18,00**	**20,00**	**22,00**			
					Jumlah Swadaya Masyarakat	*73.000.000,00*	*87.600.000,00*	*242.200.000,00*	*116.800.000,00*	*131.400.000,00*	*346.000.000,00*	*160.600.000,00*			
					Jumlah Bantuan dalam Program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa) dan karya bakti	*730.000.000,00*	*730.000.000,00*	*1.730.000.000,00*	*730.000.000,00*	*730.000.000,00*	*1.730.000.000,00*	*730.000.000,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN *)	*Meningkatnya garis batas desa yang tersinkronisasi*	**Persentase garis batas desa yang tersinkronisasi**	**%**	**Terlaksananya sinkronisasi garis batas desa / jumlah total sinkronisasi batas yang harus dilakukan sinkronisasi x 100**		**38,64**	**76,14**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Terlaksananya sinkronisasi garis batas desa		*34,00*	*67,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*			
					jumlah total sinkronisasi batas yang harus dilakukan sinkronisasi		*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*88,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)	*Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi kalurahan*	**Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik**	**%**	**Jumlah Kalurahan yang memiliki Reformasi Birokrasi Kalurahan berkategori Baik / jumlah kalurahan x 100**		**8,05**	**11,49**	**13,79**	**17,24**	**19,54**	**19,54**			
					Jumlah Kalurahan yang memiliki Reformasi Birokrasi Kalurahan berkategori Baik		*7,00*	*10,00*	*12,00*	*15,00*	*17,00*	*17,00*			
					jumlah kalurahan		*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*			
13.	**Dinas Perhubungan**														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	*Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat*	**Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	**%**	**Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang tersedia / Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan yang sesuai standar pelayanan x 100%**	**56,43**	**56,43**	**57,86**	**59,29**	**60,71**	**62,14**	**63,57**			
					Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang tersedia	*79,00*	*79,00*	*81,00*	*83,00*	*85,00*	*87,00*	*89,00*			
					Fasilitas Utama	*50,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*53,00*	*54,00*	*55,00*			
					Fasilitas Pendukung	*29,00*	*29,00*	*30,00*	*31,00*	*32,00*	*33,00*	*34,00*			
					Jumlah Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sesuai standar pelayanan	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*			
					Fasilitas Utama	*92,00*	*92,00*	*92,00*	*92,00*	*92,00*	*92,00*	*92,00*			
					Fasilitas Pendukung	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*48,00*			
			Ketersediaan Perlengkapan Jalan	**%**	**Jumlah perlengkapan jalan yang ada / Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada x 100%**	**19,24**	**19,69**	**20,08**	**20,47**	**20,86**	**21,26**	**21,65**			
					Jumlah perlengkapan jalan yang ada	*10.497,00*	*10.786,00*	*10.998,00*	*11.213,00*	*11.427,00*	*11.642,00*	*11.857,00*			
					LPJU	*3.997,00*	*4.149,00*	*4.249,00*	*4.349,00*	*4.449,00*	*4.549,00*	*4.649,00*			
					APILL	*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*			
					Warning Lamp	*1,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*			
					Rambu LL	*1.440,00*	*1.461,00*	*1.481,00*	*1.501,00*	*1.521,00*	*1.541,00*	*1.561,00*			
					Cermin Tikungan	*121,00*	*130,00*	*142,00*	*157,00*	*170,00*	*185,00*	*200,00*			
					Guardrail	*4.912,00*	*4.996,00*	*5.076,00*	*5.156,00*	*5.236,00*	*5.316,00*	*5.396,00*			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada	*54.555,00*	*54.772,00*	*54.772,00*	*54.772,00*	*54.772,00*	*54.772,00*	*54.772,00*			
					LPJU	*19.122,00*	*19.122,00*	*19.122,00*	*19.122,00*	*19.122,00*	*19.122,00*	*19.122,00*			
					APILL	*22,00*	*38,00*	*38,00*	*38,00*	*38,00*	*38,00*	*38,00*			
					Warning Lamp	*15,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*			
					Rambu LL	*4.298,00*	*4.352,00*	*4.352,00*	*4.352,00*	*4.352,00*	*4.352,00*	*4.352,00*			
					Cermin Tikungan	*110,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*			
					Guardrail	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG *)	*Meningkatnya sarana prasarana LLAJ di kawasan strategis*	**Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis**	**%**	**(Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten di kawasan strategis / Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten di kawasan Strategis) x 100%**	**16,98**	**16,96**	**17,01**	**17,38**	**17,76**	**18,18**	**18,60**			
					Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten di kawasan strategis	*8.228,00*	*8.253,00*	*8.278,00*	*8.457,00*	*8.642,00*	*8.847,00*	*9.052,00*			
					LPJU	*1.754,00*	*1.779,00*	*1.804,00*	*1.854,00*	*1.904,00*	*1.954,00*	*2.004,00*			
					Warning Lamp	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
					Rambu LL	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.455,00*	*1.480,00*	*1.505,00*	*1.530,00*			
					Cermin Tikungan	*121,00*	*121,00*	*121,00*	*135,00*	*145,00*	*155,00*	*165,00*			
					Guardrail	*4.912,00*	*4.912,00*	*4.912,00*	*5.012,00*	*5.112,00*	*5.232,00*	*5.352,00*			
					Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten di kawasan Strategis	*48.465,00*	*48.666,00*	*48.666,00*	*48.666,00*	*48.666,00*	*48.666,00*	*48.666,00*			
					LPJU	*13.054,00*	*13.054,00*	*13.054,00*	*13.054,00*	*13.054,00*	*13.054,00*	*13.054,00*			
					Warning Lamp	*15,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*			
					Rambu LL	*4.298,00*	*4.352,00*	*4.352,00*	*4.352,00*	*4.352,00*	*4.352,00*	*4.352,00*			
					Cermin Tikungan	*110,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*			
					Guardrail	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*	*30.988,00*			
					.....										
14.	**Dinas Komunikasi dan Informatika**														
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	*Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika*	**Persentase Layanan Koneksi Internet Pemerintah Daerah**	**%**	**((Bandwidth yang tersedia/Kebutuhan bandwidth ideal) x 100)**	**27,50**	**24,11**	**27,40**	**32,88**	**38,36**	**43,84**	**49,32**			
					Bandwidth yang tersedia (Mbps)	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.500,00*			
					Kebutuhan bandwidth ideal (Mbps)	*8.000,00*	*9.124,00*	*9.124,00*	*9.124,00*	*9.124,00*	*9.124,00*	*9.124,00*			
					**DO:* *kebutuhan bandwidth ideal (Mbps) dihitung berdasarkan data Jumlah ASN, Non ASN dan Pamong Desa per Januari 2025*										
			Persentase Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	**%**	**((Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang dikembangkan / Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah) x 100)**	**63,93**	**20,45**	**40,91**	**61,36**	**81,82**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang dikembangkan	*39,00*	*9,00*	*18,00*	*27,00*	*36,00*	*44,00*	*44,00*			
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	*61,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	*Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah*	**Persentase Pengamanan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah**	**%**	**((Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang diamankan / Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah) x 100)**	**63,93**	**20,45**	**40,91**	**61,36**	**81,82**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang diamankan	*39,00*	*9,00*	*18,00*	*27,00*	*36,00*	*44,00*	*44,00*			

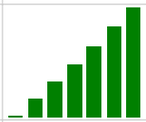
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah	*61,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	*Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah*	**Persentase Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Informasi Publik**	**%**	**(((Jumlah PPID Pelaksana yang Informatif / Jumlah PPID Pelaksana) x 100) + ((Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial / Jumlah target informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial) x 100)) / 2**	**52,38**	**57,14**	**61,90**	**66,67**	**71,43**	**76,19**	**80,95**			
					Jumlah PPID Pelaksana yang Informatif	*2,00*	*6,00*	*10,00*	*14,00*	*18,00*	*22,00*	*26,00*			
					Jumlah PPID Pelaksana	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*			
					Jumlah informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial	*1.365,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*			
					Jumlah target informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan media sosial	*1.365,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*			
					**DO:* *media elektronik dan media sosial meliputi: X, Instagram, Facebook, Youtube dan Website Pemkab*										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	*Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)*	**Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang dilengkapi Metadata**	**%**	**((Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi metadata/Jumlah Perangkat Daerah) x 100)**	**52,38**	**61,90**	**71,43**	**80,95**	**90,48**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi metadata	*22,00*	*26,00*	*30,00*	*34,00*	*38,00*	*42,00*	*42,00*			
					Jumlah Perangkat Daerah	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya layanan jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik*	**Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik**	**%**	**(Jumlah Perangkat Daerah dan Kalurahan/Kelurahan Terhubung Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik/ Jumlah Perangkat Daerah dan Kalurahan/Kelurahan)x 100%**	***transisi**		**74,22**	**75,78**	**77,34**	**78,91**	**80,47**	**IKP 2026–2030**		
					Jumlah Perangkat Daerah dan Kalurahan/Kelurahan Terhubung Jaringan Intra Pemerintah Daerah berbasis Fiber Optik	**transisi*		*95,00*	*97,00*	*99,00*	*101,00*	*103,00*			
					Jumlah Perangkat Daerah dan Kalurahan/Kelurahan	**transisi*		*128,00*	*128,00*	*128,00*	*128,00*	*128,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang disusun / jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang seharusnya disusun x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**						
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang disusun	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*						
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang seharusnya disusun	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*						
15.	**Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**														
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	*Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi*	**Persentase Koperasi Sehat**	**%**	**(Jumlah Koperasi Sehat Tahun ke-n / Jumlah Koperasi Aktif Tahun ke-n) x 100%**	**7,28**	**12,08**	**24,04**	**31,10**	**38,10**	**45,02**	**51,89**			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah Koperasi Sehat Tahun ke-n	*15,00*	*25,00*	*50,00*	*65,00*	*80,00*	*95,00*	*110,00*			
					Jumlah Koperasi Aktif Tahun ke-n	*206,00*	*207,00*	*208,00*	*209,00*	*210,00*	*211,00*	*212,00*			
					**DO:* *Koperasi sehat adalah:* *(1.) Koperasi yang mampu melayani kebutuhan anggotanya, baik pemberian pinjaman maupun pembelian barang/produk, baik bagi anggota atau masyarakat umum.* *(2.) Koperasi mampu memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan anggotanya.* *(3.) Melaksanakan RAT, 4) NPL (non performance loan) dibawah 5%.* *Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1x dalam 3 tahun terakhir.*										
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	*Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian*	**Persentase Peningkatan kualitas SDM Koperasi yang dilatih**	**%**	**(Jumlah anggota koperasi yang meningkat kapasitasnya tahun ke n / jumlah anggota koperasi yang mengikuti bimtek tahun ke-n) x 100**	**95,54**	**97,31**						**IKP 2025**		
					Jumlah anggota koperasi yang meningkat kapasitasnya tahun ke-n	*107,00*	*253,00*								
					jumlah anggota koperasi yang mengikuti bimtek tahun ke-n	*112,00*	*260,00*								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	*Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri*	**Persentase Usaha Mikro yang Mempunyai Legalitas**	**%**	**((Jumlah usaha mikro yang mempunyai legalitas/jumlah usaha mikro tahun ke-n) x 100**	**36,64**	**42,35**	**47,99**	**53,79**	**59,73**	**65,80**	**71,99**			
					Jumlah usaha mikro yang mempunyai legalitas	*15.631,00*	*18.131,00*	*20.631,00*	*23.231,00*	*25.931,00*	*28.731,00*	*31.631,00*			
					jumlah usaha mikro tahun ke-n	*42.665,00*	*42.815,00*	*42.990,00*	*43.190,00*	*43.415,00*	*43.665,00*	*43.940,00*			
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	*Meningkatnya daya saing UMKM*	**Omzet Usaha Mikro**	**Rp**	**Jumlah omzet usaha mikro tahun ke n**	**117.013.000.000,00**	**171.600.000.000,00**	**177.600.000.000,00**	**183.600.000.000,00**	**189.600.000.000,00**	**195.600.000.000,00**	**201.600.000.000,00**			
					**DO:* *omzet usaha mikro yang difasilitasi*										
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	*Meningkatnya realisasi pembangunan industri*	**Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun ke-n**	**Unit**	**Jumlah industri kecil dan menengah tahun n**	**16.092,00**	**16.222,00**	**16.357,00**	**16.507,00**	**16.667,00**	**16.847,00**	**17.047,00**			
					**DO:* *(1.) Industri kecil dan menengah adalah industri yang memenuhi kriteria memiliki nilai investasi antara Rp.0 s/d Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).* *(2.) Berdasarkan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*		*0,81*	*0,83*	*0,92*	*0,97*	*1,08*	*1,19*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya pelaku usaha KUMKM binaan yang naik kelas*	**Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas**	**pelaku usaha**	**Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas**	***sengaja n/a**	**2,00**	**5,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**IKP 2025–2030**		
16.	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**														
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal*	**Persentase Promosi Penanaman Modal**	**%**	**(Jumlah perusahaan realisasi investasi / Jumlah perusahaan target promosi) x 100**	**33,33**	**35,00**	**35,00**	**40,00**	**40,00**	**45,00**	**50,00**			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah perusahaan realisasi investasi	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*8,00*	*8,00*	*9,00*	*10,00*			
					Jumlah perusahaan target promosi	*21,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*			
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya kemudahan berinvestasi*	**Persentase Peta Potensi yang Tersusun**	**%**	**Peta Potensi Investasi yang tersusun/Peta Potensi investasi yang seharusnya disusun**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Peta Potensi Investasi yang tersusun	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
					Peta Potensi investasi yang seharusnya disusun	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
					**DO:* *Peta Potensi Investasi berupa kajian IPRO (Investment Project Ready to Offer) maupun kajian non IPRO*										
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	*Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal*	**Persentase Kegiatan Usaha Berisiko yang diawasi**	**%**	**Kegiatan Usaha berisiko yang diawasi tahun ke n/Kegiatan usaha yang berisiko yang wajib diawasi tahun ke n**	**85,71**	**85,71**	**85,71**	**88,57**	**88,57**	**91,43**	**91,43**			
					Kegiatan Usaha berisiko yang diawasi tahun ke n	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*31,00*	*31,00*	*32,00*	*32,00*			
					Kegiatan usaha yang berisiko yang wajib diawasi tahun ke n	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*			
					**DO:* *Kegiatan Usaha yang terdaftar di OSS dan memerlukan pengawasan/inspeksi berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan urgensinya*										
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal*	**Persentase Dokumen Data Investasi yang disajikan**	**%**	**Dokumen Data Investasi yang tersusun/Dokumen Data investasi yang seharusnya disusun**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Dokumen Data Investasi yang tersusun	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*			
					Dokumen Data investasi yang seharusnya disusun	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*			
					**DO:* *dokumen data berupa database pelaku usaha per triwulan*										
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko*	**IKM Pelayanan dan Perizinan**	**Nilai**	**Survei Kepuasan Masyarakat**	**89.79**	**84.75-89.82**	**85-89.85**	**85.25-89.9**	**85.5-89.95**	**85.75-90**	**86-90**			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)	*Meningkatnya implementasi inovasi pelayanan publik*	**Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik**	**%**	**jumlah inovasi yang diimplementasikan / jumlah inovasi seharusnya x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					jumlah inovasi yang diimplementasikan	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
					jumlah inovasi seharusnya	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
17.	**Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)**														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya pelestarian sumber sejarah dan budaya*	**Jumlah Aktivitas Pelestarian Sumber Sejarah, Karya Bahasa, Sastra, dan Permuseuman**	**Kegiatan**	**Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa, sastra, dan permuseuman yang dilaksanakan pada tahun n**	**7,00**	**7,00**	**8,00**	**8,00**	**9,00**	**9,00**	**10,00**			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					**DO:* *Pelestarian meliputi upaya Perlindungan, pengembangan, & pemanfaatan. Mencakup diantaranya: revitalisasi sumber sejarah seperti naskah kuno, produk buku kontemporer, foto, rekaman, peristiwa bersejarah, pelaku sejarah, monumen/ penanda sejarah, benda bersejarah, dokumenter; penulisan sejarah lokal; publikasi kesejarahan; even kesejarahan seperti peringatan hari bersejarah, lomba cerdas cermat sejarah, lawatan sejarah, testimoni perjuangan penulisan karya sastra/ensiklopedi/kamus; event kebahasaan dan sastra seperti macapatan, kompetisi bahasa dan sastra, apresiasi sastra, gelar puisi; penyiapan dan sarana prasarana museum, even permuseuman seperti Lomba Cerdas Cermat Museum, Wajib Kunjung Museum, pameran koleksi museum.*									
			Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan	**Warisan Budaya**	**(Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati) + (Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian)**	**216,00**	**225,00**	**233,00**	**242,00**	**250,00**	**259,00**	**267,00**			
					Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati (Cagar Budaya)	*191,00*	*199,00*	*207,00*	*215,00*	*223,00*	*231,00*	*239,00*			
					Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian	*25,00*	*26,00*	*26,00*	*27,00*	*27,00*	*28,00*	*28,00*			
					**DO:* *Warisan budaya yang sudah ditetapkan adalah Warisan Budaya Benda yang sudah ditetapkan oleh SK Bupati (Cagar Budaya) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah ditetapkan oleh Kementerian*										
			Jumlah Kelurahan/Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan/Kalurahan Budaya Kategori Berkembang	**Kelurahan / Kalurahan**	**(Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya) + (Rintisan Kelurahan Kalurahan Budaya kategori Berkembang)**	**57,00**	**62,00**	**64,00**	**66,00**	**68,00**	**70,00**	**72,00**			
					Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*			
					Jumlah Rintisan Kalurahan Budaya kategori Berkembang	*36,00*	*41,00*	*43,00*	*45,00*	*47,00*	*49,00*	*51,00*			
			Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	**%**	**(Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya kondisi baik) / (Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya) x 100 %**	**79,84**	**81,20**	**82,56**	**83,92**	**85,29**	**86,65**	**88,01**			
					Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya kondisi baik	*293,00*	*298,00*	*303,00*	*308,00*	*313,00*	*318,00*	*323,00*			
					Jumlah sarana dan prasarana di Taman Budaya	*367,00*	*367,00*	*367,00*	*367,00*	*367,00*	*367,00*	*367,00*			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	*Menigkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan*	**Jumlah Penonton Pertunjukan Seni di Taman Budaya**	**Orang**	**Jumlah Penonton atau Pengunjung Pertunjukan Seni di Taman Budaya**	**69.230,00**	**70.300,00**	**71.300,00**	**72.300,00**	**73.300,00**	**74.300,00**	**75.300,00**			
18.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**														

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	*Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan*	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**Orang**	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan**	**218.832,00**	**218.932,00**	**219.032,00**	**219.132,00**	**219.232,00**	**219.332,00**	**219.432,00**			
					**DO:* *Pengunjung Perpustakaan adalah pengunjung Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Keliling, Pengunjung online, Pojok Baca Digital, layanan Car Free Day*										
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	*Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno*	**Naskah Kuno yang Terdata**	**Naskah**	**Jumlah naskah kuno yang terdata**	**10,00**	**11,00**	**12,00**	**13,00**	**14,00**	**15,00**	**16,00**			
					**DO:* *Jumlah Naskah Kuno yang Terdata di Perpustakaan Nasional*										
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	*Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis*	**Nilai ASKI Perangkat Daerah**	**Nilai**	**Rata-rata Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Badan/Dinas**	**86,00**	**86,50**	**87,00**	**87,50**	**88,00**	**88,50**	**89,00**			
					**DO:* *Nilai Audit Sistem Kearsipan internal (ASKI) adalah Nilai hasil Pengawasan Kearsipan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)*										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya perlindungan dan konservasi asrsip dan bahan pustaka bersejarah*	**Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi**	**dokumen**	**Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka bersejarah yang dilindungi dan dikonservasi tahun n**	***transisi**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**IKP 2026–2030**		
19.	**Dinas Kelautan dan Perikanan**														
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	*Meningkatnya produksi perikanan tangkap*	**Produksi Perikanan Tangkap**	**Ton**	**Produksi ikan tangkap tahun ke n**	**2.190,03**	**2.195,00**	**2.200,00**	**2.205,00**	**2.210,00**	**2.215,00**	**2.220,00**			
					**DO:* *Perhitungan ikan tangkap baik penangkapan dari laut maupun perairan umum daratan (PUD)*										
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	*Meningkatnya produksi perikanan budidaya*	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**	**Produksi ikan budidaya tahun ke n**	**16.968,63**	**16.989,00**	**17.044,00**	**17.119,00**	**17.194,00**	**17.269,00**	**17.364,00**			
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	*Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati*	**Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**	**%**	**(Jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh / Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa) x 100%**	**N/A**	**67,00**	**67,00**	**70,00**	**70,00**	**73,00**	**73,00**			
					Jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh (orang)	*N/A*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*	*22,00*	*22,00*			
					Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa (orang)	*N/A*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*			
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	*Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat*	**Produksi Pengolahan Ikan**	**Kg**	**Jumlah produk pengolahan ikan tahun ke n**	**182.570,50**	**183.500,00**	**184.000,00**	**184.500,00**	**185.000,00**	**185.500,00**	**186.000,00**			
					**DO:* *Perhitungan pengolahan ikan diambil dari pelaku usaha pengolahan ikan (metode sampel terpilih)*										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan*	**Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi**	**%**	**Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi / Jumlah seluruh pelaku usaha perikanan**	**68,85**	**67,46**	**68,66**	**69,78**	**70,82**	**71,78**	**72,69**			
				kelompok	**Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi**	**126,00**	**141,00**	**149,00**	**157,00**	**165,00**	**173,00**	**181,00**			
				kelompok	**Jumlah seluruh pelaku usaha perikanan**	**183,00**	**209,00**	**217,00**	**225,00**	**233,00**	**241,00**	**249,00**			
					**DO pelaku usaha : Pokdakan, Poklahsar, KUB, Pokmaswas*										

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
			Persentase sarana prasarana TPI yang berfungsi dengan baik	**%**	**(Bangunan TPI berfungsi dengan baik / Bangunan yang ada) x 100%**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**75,00**	**75,00**	**100,00**			
				unit	**Bangunan TPI berfungsi dengan baik**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**4,00**			
				unit	**Bangunan TPI yang ada**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**			
20.	**Dinas Pariwisata**														
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	*Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata*	**Objek Pariwisata dalam Kondisi Baik**	**Lokasi**	**Jumlah Objek Wisata dalam Kondisi baik**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**4,00**	**5,00**	**6,00**	**7,00**			
					**DO:* *- objek wisata kondisi baik = tersedia sarpras dasar yang berfungsi (pos retribusi, jalan akses kawasan, parkir, toilet, tempah sholat, TIC, rumah makan)* *- objek yang dikelola pemerintah meliputi = Congot, Glagah, Trisik, Sermo, Kiskendo, Suroloyo, Nglinggo, Tritis*										
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	*Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata*	**Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah**	**Orang**	**Jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pemerintah tahun ke n + jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola masyarakat tahun ke n**	**1.926.051,00**	**1.983.833,00**	**2.043.348,00**	**2.104.648,00**	**2.167.787,00**	**2.232.821,00**	**2.299.806,00**			
					jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pemerintah tahun ke n	*733.032,00*	*755.023,00*	*777.674,00*	*801.004,00*	*825.034,00*	*849.785,00*	*875.279,00*			
					jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola masyarakat tahun ke n	*1.193.019,00*	*1.228.810,00*	*1.265.674,00*	*1.303.644,00*	*1.342.753,00*	*1.383.036,00*	*1.424.527,00*			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	*Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif*	**Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang Tersertifikasi**	**Pelaku Usaha**	**Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang tersertifikasi**	**166,00**	**176,00**	**186,00**	**196,00**	**206,00**	**216,00**	**226,00**			
					**DO:* *- Sumber Daya Pariwisata meliputi pelaku usaha (SDM Pelaku Wisata dan UJP)* *- Jumlah SDM dan UJP yang tersertifikasi didapatkan dari total pelaku wisata yang tersertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi*										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya wisatawan budaya dan sejarah*	**Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah**	**orang**	**Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah**	**121.686,00**	**125.337,00**	**129.097,00**	**132.970,00**	**136.959,00**	**141.068,00**	**145.300,00**			
					**) DO daya tarik wisata : Kunjungan di Desa WIsata yang memberikan paket wisata budaya dan sejarah*										
21.	**Dinas Perdagangan**														
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	*Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting*	**Stabilitas Harga Bahan Pokok Antar Waktu**	**%**	**Koefisien Variasi Harga Antar Waktu = Standar Deviasi Harga Tahunan/Rata-Rata Harga Tahunan**	**5,97**	**5,92**	**5,87**	**5,82**	**5,77**	**5,72**	**5,67**			

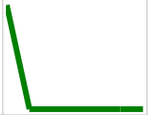
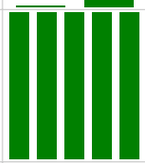
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					*DO: Koefisien Variasi Harga Antar Waktu dihitung berdasarkan data harian 55 komoditas di Pasar Wates, Pasar Bendungan, dan Pasar Galur melalui aplikasi Sikepoku										
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	*Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor*	**Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi dan Misi Dagang**	**Orang**		**8,00**	**12,00**	**15,00**	**18,00**	**21,00**	**24,00**	**27,00**			
					*DO: IKM produk ekspor yang dibina meliputi pelaku usaha yang memproduksi produk ekspor, produk potensi ekspor dan/atau pelaku usaha perdagangan yang memiliki potensi memasarkan produk ekspor/produk potensi ekspor										
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	*Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk*	**Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**%**	**(jumlah UTTP yang ditera tahun ke-n / jumlah UTTP tahun ke-n)*100**	**78,71**	**90,50**	**91,74**	**92,68**	**93,74**	**94,38**	**95,88**			
					jumlah UTTP tertib tera tahun ke-n	*6.139,00*	*7.059,00*	*7.156,00*	*7.229,00*	*7.312,00*	*7.362,00*	*7.479,00*			
					jumlah UTTP wajib tera tahun ke-n	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*			
					*DO: Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) wajib tera adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. (mengacu pada Permendag 24 Tahun 2024)										
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	*Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi*	**Persentase Pasar Rakyat Kondisi Baik**	**%**	**(Jumlah pasar rakyat dengan sarana prasarana kondisi baik tahun ke n / Jumlah pasar rakyat) x 100%)**	**36,00**	**40,00**	**40,00**	**44,00**	**44,00**	**48,00**	**48,00**			
					Jumlah pasar rakyat dengan sarana prasarana kondisi baik tahun ke n	*9,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*12,00*	*12,00*			
					Jumlah pasar rakyat dengan sarana prasarana kondisi baik tahun ke n	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*			
					DO: kondisi pasar rakyat dengan sarana prasarana baik yang dikelola OPD										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya sarana distribusi perdagangan*	**Persentase dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan**	**%**	**(jumlah dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan tahun ke n/jumlah dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan tahun ke n yang direncanakan)**	***transisi**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**IKP 2026–2030**		
					(jumlah dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan tahun ke n	**transisi*		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
					jumlah dukungan terhadap peningkatan sarana distribusi perdagangan tahun ke n yang direncanakan	**transisi*		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
22.	**Sekretariat Daerah**														

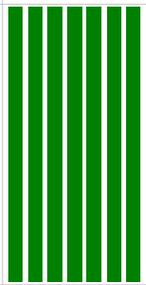
Lampiran 3: Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (IKP PD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

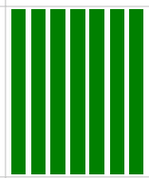
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	**Persentase Perumusan dan Monev Kebijakan Penataan Organisasi**	**%**	**(Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan penataan organisasi yang disusun/Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan penataan organisasi yang seharusnya disusun)*100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan penataan organisasi yang disusun	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*			
					Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan penataan organisasi yang seharusnya disusun	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*			
					**DO:* *Rumusan Kebijakan = Kajian, SE, Nota Dinas, Telaah Staf, Policy brief*										
			Persentase Fasilitasi Layanan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Pimpinan	**%**	**(Jumlah fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan yang dilaksanakan/Jumlah fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan yang seharusnya dilaksanakan)*100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan yang dilaksanakan	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*			
					Jumlah fasilitasi layanan keprotokolan dan kerumahtanggaan pimpinan yang seharusnya dilaksanakan	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*			
					**DO:* *MCU, kerumahtanggaan bupati, kerumahtanggaan wabup, kerumahtanggaan sekda, fasilitasi keprotokolan, pengadaan outsourcing,perjalanan dinas pimpinan, pemeliharaan sarpras, pengadaan sarpras, pakaian dinas*										
			Persentase Peningkatan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**%**	**(Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu/ Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan yang seharusnya disampaikan tepat waktu) *100%**	**100,00**	**100,00**						**IKP 2025**		
					Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	*37,00*	*38,00*								
					Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan yang seharusnya disampaikan tepat waktu	*37,00*	*38,00*								
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	*Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat*	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**%**	**(Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang ditetapkan sesuai tahapan/Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang disusun)*100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang ditetapkan sesuai tahapan	*729,00*	*503,00*	*444,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*			

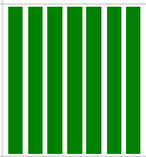
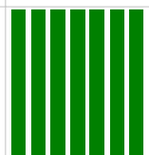
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang disusun	*729,00*	*503,00*	*444,00*	*450,00*	*455,00*	*460,00*	*465,00*			
					**DO: Produk hukum = perda,perbup,sk bupati, instruksi bupati, SK Sekda ; Perjanjian Daerah/ Mou ; dokumen evaluasi produk hukum*										
			Persentase Perumusan dan Monev kebijakan Pemerintahan, Dokumen Kerjasama dan Laporan Pemerintahan	**%**	**(Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan yang disusun/Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan yang seharusnya disusun)*100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan yang disusun	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*			
					Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pemerintahan, dokumen kerjasama dan laporan pemerintahan yang seharusnya disusun	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*			
					**DO: Rumusan Kebijakan (Kajian, SE, Nota Dinas, Telaah Staf, Policy brief, laporan)*										
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat	**%**	**(Jumlah pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan/ Jumlah pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang seharusnya dilaksanakan)*100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*20,00*			
					Jumlah pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi kesejahteraan rakyat yang seharusnya dilaksanakan	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*20,00*			
					**DO: Layanan terkait bina mental spiritual; kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan*										
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	*Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan*	**Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian**	**%**	**(Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan perekonomian yang disusun/Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan perekonomian yang seharusnya disusun)*100**	**136,84**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					(Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan perekonomian yang disusun	*26,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*			
					Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan perekonomian yang seharusnya disusun	*19,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*			
					**DO: Rumusan Kebijakan (Kajian, SE, Nota Dinas, Telaah Staf, Policy brief)*										

Lampiran 3: Metadata Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah (IKP PD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2030

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
			Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	**%**	**(Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terealisasi/jumlah seluruh paket pengadaan barang dan jasa)*100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang terealisasi	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*			
					jumlah seluruh paket pengadaan barang dan jasa	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*			
					**DO:* *yang melalui tender*										
			Persentase Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	**%**	**(Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pembangunan yang disusun/Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pembangunan yang seharusnya disusun)*100**	**160,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pembangunan yang disusun	*8,00*	*12,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*			
					Jumlah dokumen perumusan dan monev kebijakan pembangunan yang seharusnya disusun	*5,00*	*12,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*			
					**DO:* *Rumusan Kebijakan (Kajian, SE, Nota Dinas, Telaah Staf, Policy brief)*										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)	*Meningkatnya perencanaan, evaluasi, dan pengendalian perangkat daerah urusan keistimewaan*	**Persentase Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo**	**%**	**(Jumlah Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo/Jumlah Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo yang seharusnya dilaksanakan)*100**	**100,00**	**100,00**						**IKP 2025**		
					Jumlah Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo	*1,00*	*1,00*								
					Jumlah Monitoring Pelaksanaan Kelembagaan Asli di Kabupaten Kulon Progo yang seharusnya dilaksanakan	*1,00*	*1,00*								
			Kematangan Perangkat Daerah	**Nilai Kematangan Organisasi**	**nilai kematangan organisasi diukur dengan menggabungkan nilai pada seluruh perangkat daerah dibagi dengan jumlah perangkat daerah**	***transisi**		**49,07**	**49,10**	**49,12**	**49,15**	**49,30**	**IKP 2026–2030**		
			Indeks Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja 12 Kapanewon	**Nilai**	**Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Kinerja dari 12 Kapanewon**	**96,00**	**96,10**						**IKP 2025**		
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**%**	**(Jumlah kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi/Jumlah kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi yang seharusnya) x 100%**	***transisi**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**IKP 2026–2030**		
					Jumlah kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	**transisi*		*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*			
					Jumlah kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi yang seharusnya	**transisi*		*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					DO: 12 Kapanewon (Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Samigaluh, dan Kalibawang)										
23.	**Sekretariat DPRD**														
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	*Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD*	**Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pembentukan PERDA**	**%**	**(Jumlah Raperda yang Telah disetujui dengan Keputusan Bersama/Jumlah Raperda dalam Propemperda)x100 %**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Raperda yang Telah disetujui dengan Keputusan Bersama	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*			
					Jumlah Raperda dalam Propemperda	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*			
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Penganggaran dan Pengawasan	**%**	**((Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati atau disetujui tepat waktu / Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang seharusnya disepakati atau disetujui tepat waktu) + (Jumlah Rekomendasi DPRD hasil pengawasan terhadap Kebijakan dan Pembangunan Daerah yang dikirim kepada Bupati / Jumlah Rekomendasi DPRD hasil pengawasan terhadap Kebijakan dan Pembangunan Daerah yang direncanakan dikirim kepada Bupati)) x 100/2**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati atau disetujui tepat waktu	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*			
					Jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang seharusnya disepakati atau disetujui tepat waktu	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*			
					DO: Kebijakan perencanaan dan anggaran yang terdiri atas Pertanggungjawaban APBD; KUA PPAS Murni; APBD Murni; KUA PPAS Perubahan; APBD Perubahan										
					Jumlah Rekomendasi DPRD hasil pengawasan terhadap Kebijakan dan Pembangunan Daerah yang dikirim kepada Bupati	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*			
					Jumlah Rekomendasi DPRD hasil pengawasan terhadap Kebijakan dan Pembangunan Daerah yang direncanakan dikirim kepada Bupati	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*			
					DO: Rekomendasi yang disusun oleh setiap Komisi										
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	**%**	**(Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Peningkatan Kapasitas/Jumlah anggota DPRD) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah Peserta yang seharusnya mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*			
					**DO:* *Jumlah pendalaman tugas dalam 1 tahun 6 kali.*										
24.	**Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**														
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*	**Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah**	**%**	**(Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan yang Seharusnya disusun) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tepat Waktu	*5,00*	*7,00*	*5,00*	*6,00*	*5,00*	*6,00*	*6,00*			
					Jumlah Dokumen Perencanaan yang Seharusnya disusun	*5,00*	*7,00*	*5,00*	*6,00*	*5,00*	*6,00*	*6,00*			
					**DO:* *Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu adalah :* *(1.) Dokumen RKPD tahun n+1 dengan tenggat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* *(2.) Dokumen Perubahan RKPD Tahun n dengan tenggat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* *(3.) Dokumen Perencanaan lainnya yang bisa berupa RPJMD atau RKPD penyesuaian mengikuti ketentuan yang berlaku.* *(4.) Dokumen usulan Dana Alokasi Khusus tahun n+1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.* *(5.) Dokumen usulan Dana Keistimewaan tahun n+2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*										
			Persentase Capaian Fisik Pelaksanaan Pembangunan	**%**	**(Rata-rata Realisasi fisik sub kegiatan)/(Rencana operasional pelaksanaan sub kegiatan) x 100%**	**99,86**	**99,87**	**99,88**	**99,89**	**99,90**	**99,90**	**99,90**			
					Rata-rata Realisasi fisik sub kegiatan	*99,86*	*99,87*	*99,88*	*99,89*	*99,90*	*99,90*	*99,90*			
					Rencana operasional pelaksanaan sub kegiatan	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*			
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu / Jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang seharusnya disusun) * 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu	*12,00*	*24,00*	*18,00*	*21,00*	*18,00*	*18,00*	*21,00*			

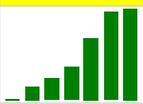
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang seharusnya disusun	*12,00*	*24,00*	*18,00*	*21,00*	*18,00*	*18,00*	*21,00*			
					**DO:* *Bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun tepat waktu adalah:* *(1.) Bahan kebijakan Perencanaan Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan (RKPD dan RPJMD).* *(2.) Bahan Pengendalian pembangunan tiap triwulan yang disusun paling lambat akhir bulan berikutnya.*									
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Bahan Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun Tepat Waktu / Jumlah Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang Seharusnya disusun) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu	*12,00*	*16,00*	*12,00*	*14,00*	*12,00*	*12,00*	*14,00*			
					jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang seharusnya disusun	*12,00*	*16,00*	*12,00*	*14,00*	*12,00*	*12,00*	*14,00*			
					**DO:* *Bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun tepat waktu adalah:* *(1.) Bahan kebijakan Perencanaan Lingkup Perekonomian dan SDA yang disusun untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan (RKPD dan RPJMD)* *(2.) Bahan Pengendalian pembangunan tiap triwulan yang disusun paling lambat akhir bulan berikutnya*									
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Bahan Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun Tepat Waktu / Jumlah Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Seharusnya disusun) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumlah bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun tepat waktu	*12,00*	*16,00*	*12,00*	*14,00*	*12,00*	*12,00*	*14,00*			
					jumlah kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang seharusnya disusun	*12,00*	*16,00*	*12,00*	*14,00*	*12,00*	*12,00*	*14,00*			
					**DO:* *Bahan kebijakan perencanaan dan pengendalian Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun tepat waktu adalah:* *(1.) Bahan kebijakan Perencanaan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan (RKPD dan RPJMD).* *(2.) Bahan Pengendalian pembangunan tiap triwulan yang disusun paling lambat akhir bulan berikutnya.*									
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	*Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan*	**Capaian Riset Daerah**	**%**	**Persentase Riset / Kajian / Penelitian yang digunakan sebagai Bahan Kebijakan**	***transisi***		**50,00**	**62,50**	**75,00**	**87,50**	**100,00**	**IKP 2026–2030**		
					Dokumen riset / kajian / penelitian yang digunakan sebagai bahan kebijakan	**transisi*		*8,00*	*10,00*	*12,00*	*14,00*	*16,00*			
					Dokumen riset / kajian / penelitian yang seharusnya dihasilkan	**transisi*		*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	*Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan*	**Capaian Inovasi Daerah**	**Satuan Inovasi**	**Inovasi Daerah yang dilaporkan Masih Eksis atau Berjalan**	**208,00**	**209,00**	**210,00**	**211,00**	**212,00**	**213,00**	**214,00**			
					**DO:* *(1.) Inovasi Daerah dapat berupa inovasi Perangkat Daerah, BUMD, Kalurahan dan masyarakat yang ditetapkan setiap tahun dengan SK Bupati.* *(2.) Dokumen Riset/Kajian/Penelitian yang dihasilkan adalah dokumen Riset/Kajian/Penelitian yang disusun di lingkup Pemda Kulon Progo.*									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang disusun / jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang seharusnya disusun x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang disusun	*1,00*	*1,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*			
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang seharusnya disusun	*1,00*	*1,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*			
25.	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**														

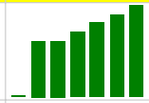
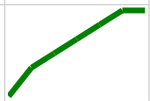
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	*Meningkatnya tata kelola keuangan daerah*	**Persentase Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu / Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah dokumen penganggaran daerah yang disusun tepat waktu	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*			
					Jumlah dokumen penganggaran daerah	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*			
					**DO:* *Penerbitan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu (mendasar PERMENDAGRI Pedoman Penyusunan APBD 2025) Berupa:* *(1.) Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBD tahun n+1 ke DPRD paling lambat Minggu II bulan September, Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA berkenaan.* *(2.) Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBDP tahun n ke DPRD paling lambat minggu II bulan September tahun n, Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 30 September.* *(3.) Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBD tahun n+1 ke Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama.* *(4.) Penyampaian Dokumen Raperda dan RaperBub APBDP tahun n ke Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama.* *(5.) Penetapan Dokumen PerDa dan perbup APBD tahun n+1 paling lambat akhir Desember (31 Desember).* *(6.) Penetapan Dokumen PerDa dan perbup Perubahan APBD tahun n pada pertengahan november tahun n.*									
			Persentase Penerbitan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	**%**	**(Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu / Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*			
					Jumlah dokumen laporan keuangan daerah	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					DO: (1.) Penerbitan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tepat waktu berupa : ... (2.) Penyampaian laporan keuangan Daerah tahun n-1 berupa: LRA, Neraca, LO, LPE, LPSAL, LAK, CaLK ke BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran n-1 berakhir. (3.) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah berupa: PERDA dan perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun n-1 paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran n-1 berakhir.										
			Persentase Penerbitan SPM yang Lengkap dan Benar	**%**	**(Jumlah SPM yang Lengkap dan Benar / Jumlah SPM yang diajukan Oleh Perangkat Daerah) x 100%**	**78,85**	**80,00**	**82,22**	**84,00**	**87,27**	**88,71**	**90,32**			
					Jumlah SPM yang lengkap dan benar	*4.854,00*	*3.200,00*	*3.700,00*	*4.200,00*	*4.800,00*	*5.500,00*	*5.600,00*			
					Jumlah SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah	*6.156,00*	*4.000,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.500,00*	*6.200,00*	*6.200,00*			
					DO: SPM yang lengkap dan benar adalah SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah, yang sudah diverifikasi menjadi lengkap dan benar sesuai ketentuan penatausahaan keuangan										
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	*Meningkatnya tata kelola aset daerah*	**Persentase Penerbitan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Barang Milik Daerah Tepat Waktu / Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Barang Milik Daerah tepat waktu	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*			
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*			
					DO: (1.) Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu berupa : ... (2.) Penyampaian laporan Barang Milik Daerah Berupa : Laporan Aset Tetap, Laporan Penyusutan, Laporan aset lain-lain, laporan aset tak berwujud dan laporan persediaan yang paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya setiap semester.										
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	*Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah*	**Jumlah Wajib Pajak Daerah**	**Wajib Pajak**	**Jumlah Wajib Pajak Daerah Tahun-n**	**366.124,00**	**370.858,00**	**374.078,00**	**377.958,00**	**381.866,00**	**385.837,00**	**389.934,00**			
					Pajak Hotel / PBJT Jasa Perhotelan	*54,00*	*54,00*	*55,00*	*56,00*	*57,00*	*58,00*	*59,00*			
					Pajak Restoran / PBJT Makanan dan/atau Minuman	*217,00*	*225,00*	*243,00*	*252,00*	*264,00*	*275,00*	*286,00*			
					Pajak Hiburan / PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	*15,00*	*15,00*	*17,00*	*18,00*	*20,00*	*20,00*	*22,00*			
					Pajak Reklame	*1.156,00*	*1.201,00*	*1.245,00*	*1.253,00*	*1.266,00*	*1.278,00*	*1.293,00*			
					PPJ / PBJT Tenaga Listrik	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
					Pajak Parkir / PBJT Jasa Parkir	*16,00*	*16,00*	*17,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*			
					PAT	*99,00*	*102,00*	*104,00*	*105,00*	*105,00*	*106,00*	*107,00*			

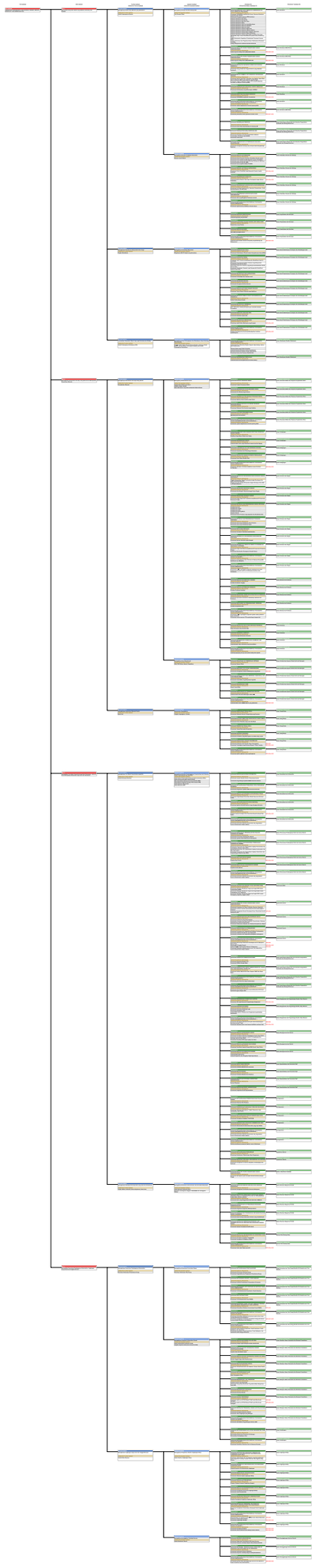
NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Pajak MBLB	*43,00*	*44,00*	*46,00*	*46,00*	*47,00*	*47,00*	*48,00*			
					PBB P2	*358.612,00*	*363.000,00*	*366.020,00*	*369.800,00*	*373.600,00*	*377.500,00*	*381.500,00*			
					BPHTB	*5.911,00*	*6.200,00*	*6.330,00*	*6.409,00*	*6.488,00*	*6.534,00*	*6.600,00*			
			Jumlah Pengawasan dan Penagihan Wajib Pajak Daerah	**Wajib Pajak**	**(Jumlah Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan Selesai) + Jumlah Wajib Pajak yang Menerima/diberikan Sanksi**	**2.314,00**	**2.529,00**	**2.740,00**	**2.855,00**	**2.970,00**	**3.090,00**	**3.220,00**			
					Jumlah Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan Selesai (SP2DK) selesai	*14,00*	*29,00*	*40,00*	*55,00*	*70,00*	*90,00*	*120,00*			
					Jumlah wajib pajak yang membayar Piutang Pajak	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.700,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*3.000,00*	*3.100,00*			
					**DO:* *Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan (SP2DK) Selesai adalah hasil dari pengujian data laporan wajib pajak dan dokumen pajak yang seharusnya dibayarkan atas Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan* *Jumlah wajib pajak yang membayar Piutang Pajak adalah wajib pajak yang mempunyai piutang dan membayar piutangnya*										
26.	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**														
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	*Meningkatnya kompetensi ASN*	**Persentase ASN yang Memenuhi Pengembangan Kompetensi**	**%**	**(Jumlah ASN yang Memenuhi Minimal 20 Jam Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Per-Tahun) / (Jumlah ASN) x 100%**	***transisi**		**43,14**	**44,83**	**46,30**	**47,88**	**49,39**	**IKP 2026–2030**		
					Jumlah ASN yang memenuhi minimal 20 Jam Pembelajaran Pengembangan Kompetensi per tahun	**transisi*		*2.594,00*	*2.669,00*	*2.744,00*	*2.819,00*	*2.894,00*			
					Jumlah ASN	**transisi*		*6.013,00*	*5.953,00*	*5.926,00*	*5.888,00*	*5.860,00*			
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	*Meningkatnya kualitas ASN*	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN**	**%**	**(Jumlah ASN yang tersedia) / (Jumlah ASN yang dibutuhkan) x 100%**	**76,39**	**77,35**	**77,69**	**78,44**	**79,13**	**79,63**	**80,37**			
					Jumlah ASN yang tersedia	*6.130,00*	*6.207,00*	*6.235,00*	*6.295,00*	*6.350,00*	*6.390,00*	*6.450,00*			
					Jumlah ASN yang dibutuhkan	*8.025,00*	*8.025,00*	*8.025,00*	*8.025,00*	*8.025,00*	*8.025,00*	*8.025,00*			
					**DO:* *Jumlah ASN yang tersedia adalah jumlah ASN pada tahun ke-N*										
					**DO:* *Jumlah ASN yang dibutuhkan adalah jumlah kebutuhan sesuai Anjab ABK*										
			Persentase Kedisiplinan ASN	**%**	**(Jumlah ASN yang Tidak dijatuhi Hukuman disiplin / Jumlah ASN) x 100%**	**99,79**	**99,80**	**99,82**	**99,83**	**99,85**	**99,86**	**99,88**			
					Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	*6.117,00*	*6.054,00*	*6.002,00*	*5.943,00*	*5.917,00*	*5.880,00*	*5.853,00*			
					Jumlah ASN	*6.130,00*	*6.066,00*	*6.013,00*	*5.953,00*	*5.926,00*	*5.888,00*	*5.860,00*			
			Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan Redistribusi	**Orang**	**Jumlah ASN (Jabatan Pelaksana dan Fungsional) yang dilakukan Redistribusi pada Tahun-n**	**232,00**	**242,00**	**247,00**	**252,00**	**257,00**	**262,00**	**267,00**			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					*DO: Redistribusi adalah penataan/pemindahan baik ASN dalam Instansi (Pemerintah Kabupaten Kulon Progo) baik dari satu jabatan ke jabatan yang lain pada unor yang sama, atau dari jabatan yang berbeda pada unor yang berbeda, baik pada kelas jabatan yang setara, lebih tinggi, maupun lebih rendah, maupun mutasi antar Instansi masuk maupun keluar Kabupaten Kulon Progo. Mutasi didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan yang ditetapkan dalam peta jabatan.										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)	*Meningkatnya kepuasan peserta atas layanan kediklatan*	**Persentase Sub Kegiatan Keistimewaan pada Urusan Kelembagaan Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**(Jumlah Sub kegiatan Keistimewaan pada Urusan Kelembagaan berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub kegiatan Keistimewaan pada Urusan Kelembagaan yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%**	**n/a**	**100,00**						**IKP 2025**		
					*DO: Sub kegiatan berkinerja sangat tinggi adalah sub kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan yang memiliki total skor kinerja sangat tinggi (91 - 100)										
			Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal baik	**%**	**Jumlah peserta diklat yang menilai kualitas layanan diklat kategori minimal baik dibagi jumlah peserta diklat X 100%**	***transisi**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**IKP 2026–2030**		
					Jumlah peserta diklat yang menilai kualitas layanan diklat kategori minimal baik	*transisi		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*			
					jumlah peserta diklat	*transisi		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*			
27.	**Inspektorat Daerah**														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	*Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan*	**Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**	**%**	**(Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai ditindaklanjuti Tahun Berjalan / Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan) x 100%**	**82,29**	**84,71**	**86,14**	**88,41**	**93,75**	**98,70**	**99,33**			
					Jumlah Rekomendasi temuan hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti tahun berjalan	*144,00*	*144,00*	*143,00*	*145,00*	*150,00*	*152,00*	*149,00*			
					Jumlah Rekomendasi Temuan hasil pengawasan	*175,00*	*170,00*	*166,00*	*164,00*	*160,00*	*154,00*	*150,00*			
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	*Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi*	**Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**%**	**(Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP Minimal A / Jumlah OPD) x 100%**	**92,86**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah OPD dengan nilai SAKIP minimal A	*39,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*			
					Jumlah OPD	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*	*42,00*			
28.	**12 Kapanewon**														
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*	**Persentase Pelayanan Non Perizinan**	**%**	**(Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan / Jumlah Realisasi Non Perizinan yang Sesuai Kewenangan) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah realisasi non perizinan	*1.354,00*	*954,00*	*974,00*	*1.087,00*	*1.099,00*	*1.112,00*	*1.129,00*			
					Jumlah target non perizinan yang sesuai Kewenangan	*1.354,00*	*954,00*	*974,00*	*1.087,00*	*1.099,00*	*1.112,00*	*1.129,00*			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					*DO: Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Panewu melalui Keputusan Bupati										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Meningkatnya peran serta masyarakat Kalurahan dan Kelurahan dalam pembangunan*	**Persentase Dokumen Pembangunan Tingkat Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan Profil Kapanewon) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon yang disampaikan tepat waktu	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*			
					jumlah dokumen RPTK dan Profil Kapanewon	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*			
					DO: RPTK Kapanewon disampaikan ke Bapperida Bulan Februari, Profil Kapanewon disampaikan ke Bapperida Desember										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	**Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM**	**%**	**(Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani / Jumlah Gangguan TRANTIBUM) x 100 %**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM yang ditangani	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*			
					Jumlah Gangguan TRANTIBUM	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Meningkatnya ketaatan hukum pemerintahan kalurahan*	**Persentase Rekomendasi Produk Hukum Desa yang Tepat Waktu**	**%**	**(Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Tepat Waktu / Jumlah Rekomendasi Produk Hukum Desa Wajib yang Seharusnya tepat Waktu) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang tepat Waktu	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*			
					Jumlah Rekomendasi Produk Hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktu	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*			
					DO: Produk Hukum tentang Peraturan Kalurahan (Perkal) ttg APBKal, Perubahan APBKal, RKPKal, Pertanggungjawaban APBKal, Kekayaan dan aset Kalurahan yang disampaikan ke Dinas PMKaldalduk KB tepat waktu										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN *)	*Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi*	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi**	**%**	**(Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi/Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*			
					Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN *)	*Meningkatnya realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan*	**Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan**	**%**	**(Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan/Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya) x 100%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
					Jumah program kegiatan urusan kebudayaan yang dilaksanakan	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
					Jumlah program kegiatan urusan kebudayaan yang seharusnya	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*			
29.	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**														
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	*Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan*	**Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan**	**%**	**(Jumlah Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan / Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan) x 100%**	**80,00**	**90,00**	**90,00**	**91,58**	**93,16**	**94,74**	**96,32**			
					Jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	*72,00*	*171,00*	*171,00*	*174,00*	*177,00*	*180,00*	*183,00*			
					Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	*90,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*			
					**DO:* *Tingkat Pemahaman dinilai dari hasil Pretest dan Post test*										
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	*Meningkatnya etika dan budaya politik*	**Persentase Siswa yang Menggunakan Hak Pilih dalam PEMILOS**	**%**	**(Jumlah Siswa yang Menggunakan Hak Pilih dalam PEMILOS / Jumlah Siswa yang Ada) x 100**	**50,00**	**60,00**	**65,00**	**70,00**	**75,00**	**80,00**	**80,00**			
					Jumlah siswa yang menggunakan hak pilih dalam pemilos	*17.550,00*	*21.060,00*	*22.815,00*	*24.570,00*	*26.325,00*	*28.080,00*	*28.080,00*			
					Jumlah siswa yang ada	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*			
					**DO:* *data berasal dari laporan pelaksanaan Pemilos di masing masing sekolah*										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	*Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan*	**Persentase Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**%**	**(Jumlah Ormas yang dilakukan pengawasan / Jumlah Ormas yang ada) x 100**	**75,17**	**79,87**	**84,56**	**89,26**	**93,96**	**97,32**	**100,00**			
					Jumlah Ormas yang dilakukan pengawasan	*112,00*	*119,00*	*126,00*	*133,00*	*140,00*	*145,00*	*149,00*			
					Jumlah ormas yang ada	*149,00*	*149,00*	*149,00*	*149,00*	*149,00*	*149,00*	*149,00*			
					**DO:* *pengawasan Ormas berupa pemantauan secara langsung dan/atau koordinasi melalui rapat/ pertemuan*										
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	*Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat*	**Persentase Hasil Penetapan Kalurahan Bersinar yang ditindaklanjuti**	**%**	**(Jumlah Kalurahan Bersinar dalam Pemantauan / Jumlah Kalurahan Bersinar) x 100**	**0,00**	**17,39**	**34,78**	**56,52**	**78,26**	**86,96**	**100,00**			
					Jumlah kalurahan Bersinar Dalam Pemantauan	*0,00*	*4,00*	*8,00*	*13,00*	*18,00*	*20,00*	*23,00*			
					Jumlah kalurahan Bersinar	*23,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*			
					**DO:* *Pemantauan meliputi Pembentukan Peraturan Kalurahan ttg Kalurahan Bersinar, alokasi anggaran dan kegiatan P4GN, Pembentukan Pokja dan Penyusunan RAD serta Posko Satgas P4GN, Keterlibatan elemen masyarakat (Karang Taruna, PKK, Tokoh agama & tokoh masyarakat)*										

NO.	PD / PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.	TREN TARGET KINERJA TAHUNAN	
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		*COLUMN CHART*	*LINE CHART*
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	*Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan*	**Persentase Laporan Penanganan Konflik Sosial**	**%**	**(Jumlah Bidang Konflik Sosial Terlapor / Jumlah Bidang Konflik Sosial) x 100**	**16,67**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			
					Jumlah bidang konflik sosial terlapor	*1,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*			
					Jumlah bidang konflik sosial	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*			
					**DO:* *Bidang konflik sosial terlapor (ideologi, politik, ekonomi, sosial , budaya, pertahanan keamanan)*										
					**Ket:* *5 peta potensi konflik jalan tol, tambang pasir sepanjang sungai progo, bandara, JJLS.*										
30.	**SEMUA PERANGKAT DAERAH**														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Meningkatnya kinerja sub kegiatan pada perangkat daerah*	**Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi**	**%**	**(Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Berkinerja Sangat Tinggi / Jumlah Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Tahun-n) x 100%**	**98,83**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**			





RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2025-2029

“TERWUJUDNYA KULON PROGO YANG MAKMUR, MANDIRI, RELIGIUS, BERBUDAYA YANG BERKELANJUTAN”

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Bapperida Kulonprogo

Selain dari tiga pilar utama di atas, Pemerintah Daerah Kulon Progo juga akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kerja sama dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonbank, akan dioptimalkan untuk mengakses pembiayaan yang lebih luas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan perencanaan juga akan menjadi perhatian, agar tersedia kompetensi yang memadai untuk mengelola pembiayaan pembangunan secara profesional.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana akan dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi ini, Pemerintah Daerah Kulon Progo meyakini bahwa pembiayaan pembangunan yang mencukupi dan efektif akan terjamin, sehingga dapat mendorong tercapainya target-target pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dengan pengelolaan pembiayaan pembangunan yang cermat, terencana, dan terkoordinasi dengan baik, Pemerintah Daerah Kulon Progo optimistis bahwa Kabupaten Kulon Progo akan berkembang secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Wates, 19 Agustus 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN